



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

AUDITED

**PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA
2025**



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

AUDITED



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 277/UD.08.00
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Representasi Manajemen

23 Mei 2025

Kepada

Yth. Kepala Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI
Jakarta

di

Jakarta

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024, Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat representasi ini disampaikan terbatas pada hal-hal yang bersifat material, tanpa melihat besarnya nilai atau volume, namun juga menyangkut kekeliruan dan kesalahan penyajian informasi akuntansi yang memengaruhi pertimbangan wajar pengguna Laporan Keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi Laporan Keuangan dimaksud.
2. Berdasarkan keyakinan dan pengetahuan, representasi berikut ini telah disampaikan kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan, yaitu
 - a. Laporan Keuangan telah kami sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - b. telah disampaikan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI;
 - c. seluruh transaksi yang bersifat material sudah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan;

- d. seluruh rekening yang dimiliki Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah dicatat dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan;
 - e. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
 - f. adanya tindakan pelanggaran hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan, sedang diteliti;
 - g. pada dasarnya semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam Laporan Keuangan;
 - h. tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan, tetapi belum diungkapkan;
 - i. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah memenuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap Laporan Keuangan jika terjadi pelanggaran;
 - j. tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2024 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan;
 - k. tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern; dan
 - l. kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
3. Efektivitas sistem pengendalian intern telah dilakukan dalam hal penilaian:
- a. keandalan Laporan Keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan
 - b. ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap Laporan Keuangan.
4. Kelemahan-kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan material, kiranya telah disampaikan secara menyeluruh.

5. Identifikasi dan pengungkapan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam Laporan Keuangan, termasuk kejadian ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surat representasi ini kami sampaikan sebagai penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pranono Anung

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR TABEL	vi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN	xii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xiii
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	xv
NERACA	xvi
LAPORAN OPERASIONAL	xxv
LAPORAN ARUS KAS.....	xxvii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xxix
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II - EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	
APBD	6
2.1 Ekonomi Makro	6
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	16
2.3 Kebijakan Keuangan	18
2.4 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2024.....	22
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	24
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	24
3.1.1 Pendapatan Daerah	25
3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer	26
3.1.3 Surplus	28
3.1.4 Pembiayaan Daerah	28
3.1.5 SiLPA	29
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI	30
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	30
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	32
4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan ..	32
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	68
BAB V - PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	69
5.1 Laporan Realisasi Anggaran.....	69
5.1.1 Pendapatan Daerah	69
5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer	131



5.1.3	Surplus/Defisit	168
5.1.4	Pembiayaan	168
5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	171
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	171
5.3	Neraca.....	173
5.3.1	Aset	173
5.3.1.1	Aset Lancar	173
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	241
5.3.1.3	Properti Investasi.....	263
5.3.1.4	Aset Tetap	266
5.3.1.4.1	Tanah	267
5.3.1.4.2	Peralatan dan Mesin	274
5.3.1.4.3	Gedung dan Bangunan	283
5.3.1.4.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	293
5.3.1.4.5	Aset Tetap Lainnya	300
5.3.1.4.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	304
5.3.1.4.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	307
5.3.1.4.8	Catatan Penting atas Aset Tetap	308
5.3.1.5	Aset Lainnya.....	320
5.3.2	Kewajiban.....	371
5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek.....	372
5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang.....	395
5.3.3	Ekuitas.....	401
5.4	Laporan Operasional.....	401
5.4.1	Kegiatan Operasional.....	402
5.4.2	Kegiatan Non Operasional	438
5.5	Laporan Arus Kas	439
5.6	Laporan Perubahan Ekuitas.....	453
BAB VI – CATATAN PENTING LAINNYA		461
6.1	Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi	461
6.2	Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional	462
6.3	Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	466
6.4	Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).....	467
6.5	Potensi Piutang	470
6.6	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi	477
6.7	Penugasan kepada BUMD.....	479
6.8	Penjabat Gubernur DKI Jakarta	487
BAB VII - PENUTUP.....		488



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 - Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Periode 2020-2024	7
Grafik 2. 2 - Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2020-2024	8
Grafik 2. 3 - Perkembangan Garis Kemiskinan di DKI Jakarta Periode 2020-2024	8
Grafik 2. 4 - Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2024	9
Grafik 2. 5 - Perkembangan Pekerja Sektor Formal dan Informal di Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2024	10
Grafik 2. 6 - Perkembangan PDRB DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2024	11
Grafik 2. 7 - Perkembangan PDRB Lapangan Usaha DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2024	11
Grafik 2. 8 - Perkembangan PDRB Pengeluaran DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2022- 2024	12
Grafik 2. 9 - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita atas Dasar Harga Berlaku Periode 2020-2024	13
Grafik 2. 10 - Perkembangan Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020-2024	14
Grafik 2. 11 - Realisasi Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	14



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 - Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	6
Tabel 2. 2 - Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2024.....	16
Tabel 2. 3 - Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
Tabel 2. 4 - Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024	23
Tabel 3. 1 - Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024	24
Tabel 5. 1 - Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023	69
Tabel 5. 2 - Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023.....	70
Tabel 5. 3 - Rincian Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2024	72
Tabel 5. 4 - Rincian BBNKB Tahun Anggaran 2024.....	74
Tabel 5. 5 - Rincian PBBKB Tahun Anggaran 2024	76
Tabel 5. 6 - Rincian Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024.....	79
Tabel 5. 7 - Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2024	84
Tabel 5. 8 - Rincian penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun Anggaran 2024.....	89
Tabel 5. 9 - Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023	92
Tabel 5. 10 - Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 dan 2023	92
Tabel 5. 11 – Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 dan 2023	98
Tabel 5. 12 - Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 dan 2023.....	109
Tabel 5. 13 - Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2023.....	112
Tabel 5. 14 - Realisasi Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2024 dan 2023	113
Tabel 5. 15 - Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2024 dan 2023	113
Tabel 5. 16 - Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023	114
Tabel 5. 17 - Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024	116
Tabel 5. 18 - Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2024 dan 2023.....	120
Tabel 5. 19 - Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023	125
Tabel 5. 20 - Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023.....	133
Tabel 5. 21 - Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024	134
Tabel 5. 22 - Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024.....	139
Tabel 5. 23 - Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2024	140
Tabel 5. 24 - Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024	141
Tabel 5. 25 - Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu Tahun Anggaran 2024	141



Tabel 5. 26 - Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024	150
Tabel 5. 27 - Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024 dan 2023	153
Tabel 5. 28 - Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023	168
Tabel 5. 29 - Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023	170
Tabel 5. 30 - Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023	174
Tabel 5. 31 - Kas di Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2024 dan 2023	180
Tabel 5. 32 - Kas di Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2024 dan 2023	182
Tabel 5. 33 - Jenis Kendaraan dan Perhitungan Perkiraan Penerimaan PKB Periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.....	185
Tabel 5. 34 - Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih Per 31 Desember 2024 dan 2023	196
Tabel 5. 35 - Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2024	199
Tabel 5. 36 - Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2023 dan 2024	200
Tabel 5. 37 – Jenis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2024	202
Tabel 5. 38 –Rincian Piutang Denda Pajak Daerah Per 31 Desember 2024.....	204
Tabel 5. 39 - Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih Per 31 Desember 2024 dan 2023	204
Tabel 5. 40 – Piutang Pendapatan Denda Retribusi Per 31 Desember 2024 dan 2023	205
Tabel 5. 41 – Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Per 31 Desember 2024 dan 2023	206
Tabel 5. 42 - Piutang BLUD Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	208
Tabel 5. 43 – Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD	210
Tabel 5. 44 - Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung Per 31 Desember 2024 dan 2023	213
Tabel 5. 45 - Rincian Piutang Hasil Kerjasama BLUD Per 31 Desember 2024 dan 2023	214
Tabel 5. 47 - Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Per 31 Desember 2024	216
Tabel 5. 48 - Penyisihan Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah Tak Tertagih Per 31 Desember 2024	222
Tabel 5. 49 - Penyisihan Piutang Hasil Tagih Tak Tertagih Per 31 Desember 2024	223
Tabel 5. 50 - Penyisihan Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa Per 31 Desember 2024	224
Tabel 5. 51 - Penyisihan Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa Per 31 Desember 2024	224
Tabel 5. 52 - Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) Per 31 Desember 2024 dan 2023	226
Tabel 5. 53 - Rincian Piutang Lainnya Tahun 31 Desember 2023 dan 2024.....	227
Tabel 5. 54 – UMK Paket Kegiatan Pengadaan BUS Transjakarta	231
Tabel 5. 55 – Penyisihan UMK Paket Kegiatan Pengadaan BUS Transjakarta per 31 Desember 2024	232
Tabel 5. 56 – UMK pada Kegiatan Pengadaan BUS Single Transjakarta Tahun 2013	233
Tabel 5. 57 – UMK Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta Tahun 2024.....	234



Tabel 5. 58 – Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Tak Tertagih Tahun 2024	234
Tabel 5. 59 – Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023	239
Tabel 5. 60 - Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2024.....	243
Tabel 5. 61 - Rekapitulasi Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK Per 31 Desember 2024...	244
Tabel 5. 62 - Rekapitulasi Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir Per 31 Desember 2024	246
Tabel 5. 63 - Rekapitulasi Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan Per 31 Desember 2024	247
Tabel 5. 64 - Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Per 31 Desember 2024.....	247
Tabel 5. 65 – Investasi Permanen Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	248
Tabel 5. 66 - Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023	249
Tabel 5. 67 - Investasi Permanen dengan Metode Biaya Per 31 Desember 2024 dan 2023	263
Tabel 5. 70 - Kas Dikonsinyasikan Per 31 Desember 2024 dan 2023	273
Tabel 5. 71 – Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023	308
Tabel 5. 72 - Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	321
Tabel 5. 73 - Rincian Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	322
Tabel 5. 74 - Rincian Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2024 dan 2023	322
Tabel 5. 75 - Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2024 dan 2023.....	326
Tabel 5. 76 - Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa Tahun 2024 dan 2023.....	327
Tabel 5. 77 - Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kerjasama Pemanfaatan Tahun 2024 dan 2023	328
Tabel 5. 79 - Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kerjasama Bangun Serah Guna Tahun 2024 dan 2023.....	329
Tabel 5. 80 - Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan Tahun 2024 dan 2023	329
Tabel 5. 81 - Aset Lain-lain Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	332
Tabel 5. 82 - Aset Fasos Fasum Per 31 Desember 2024 dan 2023	343
Tabel 5. 83 – Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	358
Tabel 5. 84 – Nilai Buku Aset Fasos Fasum Per 31 Desember 2024 dan 2023	359
Tabel 5. 85 – Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023	359
Tabel 5. 86 – Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 2023	372
Tabel 5. 87 - Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	372
Tabel 5. 88 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	372
Tabel 5. 89 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	374
Tabel 5. 90 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD Per 31 Desember 2024 dan 2023	374
Tabel 5. 91 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar Per 31 Desember 2024 dan 2023	375
Tabel 5. 92 - Perhitungan Utang Bunga (Akrual) JEDI Per 31 Desember 2024	376



Tabel 5. 93 – Perhitungan Utang Bunga (Akrual) MRT Per 31 Desember 2024.....	376
Tabel 5. 94 - Perhitungan Utang Bunga Per 31 Desember 2024	377
Tabel 5. 95 - Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	378
Tabel 5. 96 - Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	379
Tabel 5. 97 - Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD Per 31 Desember 2024 dan 2023	381
Tabel 5. 98 - Rincian Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023	382
Tabel 5. 99 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	388
Tabel 5. 100 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD Per 31 Desember 2024 dan 2023	388
Tabel 5. 101 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	389
Tabel 5. 102 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan Per 31 Desember 2024 dan 2023...	390
Tabel 5. 103 – Perhitungan Utang Kompensasi Pajak	392
Tabel 5. 104 – Rincian atas Utang Dalam Negeri – JICA (Proyek MRT)	396
Tabel 5. 105 – Rincian atas Utang Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 31 Desember 2024 dan 2023	396
Tabel 5. 106 – Rincian Realisasi Per Kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah	397
Tabel 5. 107 – Rincian Realisasi Per Kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah s.d 31 Desember 2022....	399
Tabel 5. 108 – Rincian Realisasi Per Kegiatan atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 s.d 31 Desember 2022.....	401
Tabel 5. 109 - Rekapitulasi Pendapatan-LO.....	402
Tabel 5. 110 - Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023	403
Tabel 5. 111 - Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah -LO Tahun 2023 dan 2022	403
Tabel 5. 112 – Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Daerah Yang Berasal Dari BDU di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2024	405
Tabel 5. 113 - Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023	410
Tabel 5. 114 - Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024.....	410
Tabel 5. 115 - Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2024	411
Tabel 5. 116 - Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2024.....	412
Tabel 5. 117 - Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2024	413
Tabel 5. 118 - Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan 2023	414
Tabel 5. 119 – Pendapatan Atas Laba dan Komponen Ekuitas Lainnya BUMD dan PT Patungan yang Menggunakan Metode Ekuitas	415
Tabel 5. 120 - Rekapitulasi Lain-lain Asli Daerah (PAD) – LO Tahun 2024 dan 2023.....	416
Tabel 5. 121 - Rekapitulasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023.....	425
Tabel 5. 122 - Rekapitulasi Beban Daerah Tahun 2024 dan 2023	428
Tabel 5. 123 - Beban Penurunan Nilai Investasi BUMD dan PT Patungan Tahun 2024 dengan Metode Pencatatan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023.....	436



Tabel 5. 124 - Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2024 dan 2023	440
Tabel 5. 125 - Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2024 dan 2023	444
Tabel 5. 126 - Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2024 dan 2023	446
Tabel 5. 127 - Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	448
Tabel 5. 128 - Penerimaan Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2024	450
Tabel 5. 129 - Pengeluaran Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2024	452
Tabel 5. 130 – Rincian Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2024	453
Tabel 6. 1 - Realisasi Pinjaman PEN Tahun 2020-2022	466
Tabel 6. 2 - Daftar Badan Layanan Umum Daerah dan SKPD Penggabungannya Tahun 2024.....	467
Tabel 6. 3 - Daftar Tugas Pembantuan Tahun 2024	478
Tabel 6. 4 - Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta Per 31 Desember 2024	479
Tabel 6. 5 - Penugasan kepada BUMD yang Masih Berlangsung Sampai Dengan Tahun 2024	480



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Daftar Rincian Realisasi Belanja Operasi Per 31 Desember 2024
Lampiran	2	Daftar Saldo Kas dan Setara Kas BLUD Per 31 Desember 2024
Lampiran	3	Daftar Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2024
Lampiran	4	Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran	5	Rekapitulasi Persediaan Usang/Rusak Per 31 Desember 2024
Lampiran	6	Ikhtisar Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2024
Lampiran	7	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2024
Lampiran	8	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
Lampiran	9	Daftar Aset Properti Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2024
Lampiran	10	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran	11	Daftar Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Atas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2024
Lampiran	12.1	Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BOT, BTO, dan KSP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2024
Lampiran	12.2	Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan dan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan Per 31 Desember 2024
Lampiran	13.1	Daftar Utang Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2024
Lampiran	13.2	Daftar Utang Belanja Barang, Belanja Jasa, dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2024
Lampiran	13.3	Daftar Utang Belanja BLUD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2024
Lampiran	14	Monitoring Atas Penyelesaian Pekerjaan Yang Melewati Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2024
Lampiran	15	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit) Per 31 Desember 2024
Lampiran	16	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Per 31 Desember 2024



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 23 Mei 2025

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Riamono Anung



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI APBD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2024	Realisasi 31 Desember 2024 (Audited)	(%)	Realisasi 31 Desember 2023 (Audited)
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	44.980.000.000.000	44.448.074.892.860	98,82	43.516.481.672.833
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	647.749.998.376	713.719.914.820	110,18	454.697.560.911
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	634.395.407.063	653.700.898.761	103,04	545.869.249.987
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	4.204.598.994.964	4.926.523.566.307	117,17	4.622.697.231.503
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		50.466.744.400.403	50.742.019.272.748	100,55	49.139.745.715.234
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT					
10	Dana Perimbangan		23.732.336.589.863	21.576.815.024.381	90,92	20.124.459.645.034
11	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	20.089.713.629.863	18.032.588.917.639	89,76	17.049.968.580.672
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	368.377.412.000	368.173.270.201	99,94	22.179.718.000
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.3	-	-	-	3.076.020.400
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.4	3.274.245.548.000	3.176.052.836.541	97,00	3.049.235.325.962
15	Dana Insentif Fiskal		44.090.217.000	44.090.217.000	100,00	35.175.027.000
16	Insentif Fiskal	5.1.1.2.2	44.090.217.000	44.090.217.000	100,00	35.175.027.000
17	Total Pendapatan Transfer (9 + 14 + 16)		23.776.426.806.863	21.620.905.241.381	90,93	20.159.634.672.034
18	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
19	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	703.654.652.623	589.167.782.024	83,73	1.766.153.820.454
20	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (20)		703.654.652.623	589.167.782.024	83,73	1.766.153.820.454
21	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 18 + 21)		74.946.825.859.889	72.952.092.296.153	97,34	71.065.534.207.722
22	BELANJA					
23	BELANJA OPERASI					
24	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.1.a	20.031.780.182.216	19.190.554.701.043	95,80	17.977.776.327.870
25	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.1.1.b	27.835.321.117.883	26.572.367.215.305	95,46	25.824.444.605.296
26	Belanja Bunga	5.1.2.1.1.1.c	186.000.000.000	180.738.864.995	97,17	229.704.491.741
27	Belanja Subsidi	5.1.2.1.1.1.d	6.320.798.085.601	5.875.837.590.937	92,96	5.539.653.281.534
28	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.1.e	3.358.144.887.494	3.307.808.095.906	98,50	3.621.682.896.507
29	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.1.f	3.551.461.654.483	3.496.629.048.637	98,46	4.363.641.476.668
30	Jumlah Belanja Operasi (25 s/d 30)		61.283.505.927.677	58.623.935.516.823	95,66	57.556.903.079.616
31	BELANJA MODAL					
32	Belanja Tanah	5.1.2.1.1.2.a	763.402.783.015	433.525.287.650	56,79	442.600.308.470
33	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.1.1.2.b	3.169.221.270.721	2.961.717.289.383	93,45	2.822.976.130.249
34	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.1.2.c	3.441.760.532.962	2.385.010.773.455	69,30	1.653.055.663.410
35	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.1.1.2.d	5.352.974.561.800	4.975.949.887.118	92,96	3.799.027.573.476
36	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.1.1.2.e	128.157.171.217	119.496.671.697	93,24	139.600.392.693
37	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.1.1.2.f	133.539.507.754	129.085.346.240	96,66	-
38	Jumlah Belanja Modal (33 s/d 37)		12.989.055.827.469	11.004.785.255.543	84,72	8.857.260.068.298
39	BELANJA TAK TERDUGA					
40	Belanja Tak Terduga	5.1.2.1.1.3	1.365.518.170.267	-	-	-
41	Jumlah Belanja Tak Terduga (40)		1.365.518.170.267	-	-	-
42	Jumlah Belanja (31 + 38 + 41)		75.638.079.925.413	69.628.720.772.366	92,06	66.414.163.147.914
43	TRANSFER					
44	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN					
45	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.1.1.4	385.033.285.520	383.997.067.520	99,73	356.446.480.500
46	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (45)		385.033.285.520	383.997.067.520	99,73	356.446.480.500
47	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (42 + 47)		76.023.113.210.933	70.012.717.839.886	92,09	66.770.609.628.414
48	SURPLUS/DEFISIT (22 - 47)	5.1.3	(1.076.287.351.044)	2.939.374.456.267		4.294.924.579.308
49	PEMBIAYAAN					
50	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
51	Penggunaan SilPA	5.1.4.1.1	6.542.421.120.069	6.542.421.120.069	100,00	8.600.096.664.254
52	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.4.1.2	3.713.081.611.718	2.801.304.537.758	75,44	286.277.630.136
53	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.1.4.1.3	-	71.846.300	-	190.589.666
54	Jumlah Penerimaan (51 s/d 53)		10.255.502.731.787	9.343.797.504.127	91,11	8.886.564.884.056

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2024	Realisasi 31 Desember 2024 (Audited)	(%)	Realisasi 31 Desember 2023 (Audited)
55	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	7.317.545.546.679	5.988.136.019.949	81,83	4.836.397.306.901
57	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.4.2.2	1.861.669.834.064	1.861.185.106.399	99,97	1.802.671.036.394
59	Jumlah Pengeluaran (56 s/d 58)		9.179.215.380.743	7.849.321.126.348	85,51	6.639.068.343.295
60	PEMBIAYAAN NETO (54 - 59)		1.076.287.351.044	1.494.476.377.779	138,85	2.247.496.540.761
61	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (48 + 60)	5.1.5	-	4.433.850.834.046		6.542.421.120.069

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 23 Mei 2025

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung



**LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2024**

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Saldo Anggaran Lebih Awal		6.542.421.120.069	8.600.096.664.254
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		(6.542.421.120.069)	(8.600.096.664.254)
Subtotal	5.2	-	-
Pendapatan		72.952.092.296.153	71.065.534.207.722
Belanja		(70.012.717.839.886)	(66.770.609.628.414)
Surplus (Defisit)	5.2	2.939.374.456.267	4.294.924.579.308
Penerimaan Pembiayaan		9.343.797.504.127	8.886.564.884.056
Pengeluaran Pembiayaan		(7.849.321.126.348)	(6.639.068.343.295)
Pembiayaan - Neto	5.2	1.494.476.377.779	2.247.496.540.761
Saldo Anggaran Lebih Akhir		4.433.850.834.046	6.542.421.120.069

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 23 Mei 2025

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung



NERACA
TAHUN ANGGARAN 2024
AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2024 (Audited)	31 DESEMBER 2023 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	3.416.945.253.102	5.454.632.626.327
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	346.000	109.645.250
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	3.181.233.945	329.382.648
Kas dan Setara Kas BLUD	5.3.1.1.1.4	942.341.899.395	1.008.514.643.569
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	5.3.1.1.1.5	76.180.041.065	85.056.746.795
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	130.020.000	13.543.921.396
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	13.241.938.790.492	11.679.786.241.137
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(7.584.681.386.531)	(6.386.116.946.848)
Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	287.659.874.500	68.096.444.794
Penyisihan Piutang Retribusi		(206.905.230.397)	(51.563.663.295)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.3	3.416.172.018.863	3.030.838.594.857
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(1.722.362.611.297)	(1.696.690.000.868)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.4	2.370.741.523.000	8.295
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.5	383.637.070.506	374.339.155.304
Penyisihan Piutang Lainnya		(140.150.375.904)	(139.785.192.718)
Beban Dibayar di Muka	5.3.1.1.3	655.570.616.904	501.750.677.798
Persediaan	5.3.1.1.4	1.347.138.009.623	1.263.775.601.406
Jumlah Aset Lancar		16.487.537.093.266	15.206.617.885.847
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Nonpermanen	5.3.1.2.1	550.000.000.000	550.000.000.000
Investasi Dalam Dana Bergulir		1.099.708.355.664	1.099.780.201.964
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		(549.708.355.664)	(549.780.201.964)
Investasi Permanen	5.3.1.2.2	92.626.692.451.917	84.009.599.245.749
Jumlah Investasi Jangka Panjang		93.176.692.451.917	84.559.599.245.749
Properti Investasi			
Properti Investasi - Tanah	5.3.1.3	4.178.110.485.462	3.367.064.778.502
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	5.3.1.3	1.553.795.480.328	1.542.937.242.079
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3	14.163.299.823	14.163.299.823
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(456.072.090.311)	(448.002.283.626)
Jumlah Properti Investasi		5.289.997.175.302	4.476.163.036.778
Aset Tetap			
Tanah	5.3.1.4.1	527.255.442.881.924	515.882.640.362.479
Peralatan dan Mesin	5.3.1.4.2	30.462.326.362.242	32.771.280.763.093
Gedung dan Bangunan	5.3.1.4.3	48.454.852.796.405	47.160.243.335.958
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.4.4	65.909.190.073.931	61.937.757.653.148
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.4.5	1.114.104.352.668	1.388.435.196.833
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.4.6	4.463.525.049.578	2.516.920.525.377
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.4.7	(83.920.518.130.702)	(82.370.545.608.448)
Jumlah Aset Tetap		593.738.923.386.046	579.286.732.228.440
Aset Lainnya			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.5.1	35.662.823.855	36.651.951.367
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	6.524.180.701.395	6.524.489.356.721
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(394.218.153.955)	(393.892.000.498)
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	715.084.977.785	634.599.864.666
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(551.873.044.557)	(537.631.910.464)
Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	43.707.111.197.345	33.076.672.679.419
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(12.772.762.604.350)	(7.371.702.525.617)
Jumlah Aset Lainnya		37.263.185.897.518	31.969.187.415.594
JUMLAH ASET		745.956.336.004.049	715.498.299.812.408

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2024 (Audited)	31 DESEMBER 2023 (Audited)
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang PFK	5.3.2.1.1	1.615.238.139	652.047.503
Utang Bunga Pinjaman	5.3.2.1.2	15.646.130.966	14.739.619.252
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	1.981.669.834.064	1.861.669.834.064
Pendapatan Diterima di Muka	5.3.2.1.4	221.835.170.345	216.488.454.965
Utang Belanja	5.3.2.1.5	1.780.943.311.694	2.147.127.573.272
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	15.141.616.464	16.377.359.980
Utang Jaminan	5.3.2.1.7	6.373.805.574	6.188.082.151
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.023.225.107.246	4.263.242.971.187
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.3.2.2	13.982.891.651.205	13.162.772.219.846
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		13.982.891.651.205	13.162.772.219.846
JUMLAH KEWAJIBAN		18.006.116.758.451	17.426.015.191.033
EKUITAS	5.3.3	727.950.219.245.598	698.072.284.621.375
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		745.956.336.004.049	715.498.299.812.408

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 23 Mei 2025

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2024 (Audited)	31 DESEMBER 2023 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	4.438.778.793.507	6.562.186.965.985
Kas di Kas Daerah	3.416.945.253.102	5.454.632.626.327
Kas Daerah	3.416.945.253.102	5.454.632.626.327
Kas di Bendahara Penerimaan	346.000	109.645.250
Pendapatan yang Belum Disetor	346.000	108.493.750
Asuransi yang Belum Disetor	-	1.151.500
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.181.233.945	329.382.648
Sisa Belanja UP/GU	2.527.302	329.382.648
Sisa Belanja TU	3.058.350.579	-
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	120.356.064	-
Kas dan Setara Kas BLUD	942.341.899.395	1.008.514.643.569
Kas Tunai	700.266.859	1.197.791.647
Kas di Bank	937.293.659.466	1.000.840.280.678
Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	941.418.323	123.669.297
Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	237.927.548	134.902.031
Uang Muka Pasien RSUD/K	565.419.352	375.151.361
Uang Jaminan Kerjasama	60.000.000	3.289.499.147
Uang Titipan	2.400.510.747	2.474.424.408
Uang Muka Jasa BLUD	142.697.100	78.925.000
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	76.180.041.065	85.056.746.795
Kas Bank BOS	74.981.577.371	84.768.659.304
Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor	72.926.444	150.075.275
Kas Bank BOP Kesetaraan	166.000.907	137.834.016
Potongan PFK Dana BOP Kesetaraan yang Belum Disetor	538.560	178.200
Kas di Bendahara Sekolah Lainnya	958.997.783	-
Kas Lainnya	130.020.000	13.543.921.396
Kas Lainnya	130.020.000	13.543.921.396
Piutang Pajak Daerah	13.241.938.790.492	11.679.786.241.137
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	131.848.667.679	127.437.900.750
Piutang Pajak Hotel	-	31.223.713.068
Piutang Pajak Restoran	-	141.327.184.933
Piutang Pajak Hiburan	-	77.344.622.956
Piutang Pajak Reklame	616.967.500.306	555.601.209.780
Piutang Pajak Parkir	-	12.081.179.716
Piutang Pajak Air Tanah	591.869.625.756	591.166.273.424
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	11.395.000.473.511	9.926.116.872.186
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	230.805.014.096	217.487.284.324
Piutang Pajak Alat Berat	710.000	-
Pajak Barang dan Jasa Tertentu	275.446.799.144	-
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(7.584.681.386.531)	(6.386.116.946.848)
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	(105.262.186.377)	(96.636.018.561)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	-	(24.914.164.674)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	-	(111.902.947.023)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	-	(62.686.463.649)
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(446.861.921.967)	(425.829.255.268)
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	-	(10.703.994.829)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(563.387.434.806)	(556.743.033.749)
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	(6.114.557.196.711)	(4.972.172.331.387)
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	(131.427.564.480)	(124.528.737.708)
Penyisihan Piutang Pajak Alat Berat	(3.550)	-
Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu	(223.185.078.640)	-
Piutang Pajak Daerah - Neto	5.657.257.403.961	5.293.669.294.289

Uraian	31 DESEMBER 2024 (Audited)	31 DESEMBER 2023 (Audited)
Piutang Retribusi	287.659.874.500	68.096.444.794
Piutang Retribusi Jasa Umum	163.484.366.548	7.795.430.587
Piutang Retribusi Jasa Usaha	115.392.799.146	51.635.978.940
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	8.782.708.806	8.665.035.267
Penyisihan Piutang Retribusi	(206.905.230.397)	(51.563.663.295)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(112.620.146.600)	(4.309.044.201)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(88.940.063.443)	(42.283.623.220)
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(5.345.020.354)	(4.970.995.874)
Piutang Retribusi - Neto	80.754.644.103	16.532.781.499
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	540.968.971	540.968.971
Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	540.968.971	540.968.971
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	(540.968.971)	(540.968.971)
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	(540.968.971)	(540.968.971)
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - Neto	-	-
Piutang Jasa Giro	-	1.775.710.904
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	-	1.775.342.466
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	368.438
Piutang Pendapatan Bunga	-	4.787
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	4.787
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	17.088.993.346	17.053.387.096
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(17.005.565.127)	(15.681.385.349)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Neto	83.428.219	1.372.001.747
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.330.103.591	1.130.615.950
Penyisihan Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	(6.650.518)	(5.653.080)
Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - Neto	1.323.453.073	1.124.962.870
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.266.505.150	-
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	905.539.466.873	865.718.779.090
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Daerah Tak Tertagih	(589.754.317.602)	(509.610.862.514)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Neto	315.785.149.271	356.107.916.576
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	20.236.913.612	17.821.739.466
Penyisihan Piutang Denda Retribusi	(18.844.356.862)	(17.624.758.053)
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah - Neto	1.392.556.750	196.981.413
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	525.889.003.130	16.431.747.538
Piutang BLUD	449.977.840.530	414.630.180.236
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	405.487.457.213	381.034.672.279
Piutang Hasil Kerjasama BLUD	39.836.942.886	31.553.049.422
Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	4.653.440.431	2.042.458.535
Penyisihan Piutang BLUD	(50.405.476.008)	(93.592.778.733)
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	(11.633.486.192)	(65.500.600.696)
Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD	(34.312.818.518)	(26.286.983.260)
Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	(4.459.171.298)	(1.805.194.777)
Piutang BLUD - Neto	399.572.364.522	321.037.401.503
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	26.335.832.350	26.743.584.888
Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah	(25.886.097.013)	(25.991.600.505)
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Neto	449.735.337	751.984.383
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.894.389.875	6.390.310.880
Penyisihan Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda	(1.364.848.908)	(1.387.787.838)
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - Neto	529.540.967	5.002.523.042

Uraian	31 DESEMBER 2024 (Audited)	31 DESEMBER 2023 (Audited)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	44.146.360.933
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	(24.506.039.621)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Neto	-	19.640.321.312
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.466.072.001.435	1.618.455.204.118
Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah	709.188.171.009	842.311.305.796
Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN	41.880.534.592	41.923.253.432
Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	28.893.574.595	26.444.238.419
Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	17.988.000	121.230.000
Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	686.091.733.239	707.655.176.471
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	(1.018.554.330.288)	(1.007.748.166.204)
Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah	(355.329.750.914)	(324.828.688.287)
Penyisihan Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN	(41.880.534.592)	(41.923.253.432)
Penyisihan Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	(24.637.004.643)	(22.665.126.114)
Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	(8.994.000)	(69.609.000)
Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(596.698.046.139)	(618.261.489.371)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - Neto	447.517.671.147	610.707.037.914
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.370.741.523.000	8.295
Piutang Dana Transfer Umum-DBH	2.370.741.523.000	8.295
Piutang Lainnya	383.637.070.506	374.339.155.304
Uang Muka	200.957.354.942	229.757.096.738
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	200.957.354.942	229.757.096.738
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	506.527.225	406.051.698
Piutang Tunjangan DPRD	4.255.540.000	4.419.140.000
Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD	(4.255.540.000)	(4.419.140.000)
Piutang Tunjangan DPRD - Neto	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	130.085.082.350	130.297.979.742
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan pengembalian UMK pengadaan Trans Jakarta	(130.085.082.350)	(130.297.979.742)
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta - Neto	-	-
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	9.292.376.530	9.458.887.126
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(5.809.753.554)	(5.068.072.976)
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah - Neto	3.482.622.976	4.390.814.150
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi	38.540.189.459	-
Beban Dibayar di Muka	655.570.616.904	501.750.677.798
Beban Barang Dibayar Dimuka	314.989.120.601	198.718.344.133
Beban Jasa Dibayar Dimuka	286.739.131.617	290.653.783.872
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	53.842.364.686	12.378.549.793
Persediaan	1.347.138.009.623	1.263.775.601.406
Barang Pakai Habis	1.339.998.488.548	1.256.899.948.763
Barang Tak Habis Pakai	7.139.175.643	6.875.652.643
Barang Bekas Dipakai	345.432	-
JUMLAH ASET LANCAR	16.487.537.093.266	15.206.617.885.847
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	550.000.000.000	550.000.000.000
Dana Bergulir	1.099.708.355.664	1.099.780.201.964
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(549.708.355.664)	(549.780.201.964)
Investasi Permanen	92.626.692.451.917	84.009.599.245.749
Penyertaan Modal kepada PD Air Minum Jaya	4.067.208.731.415	3.449.544.925.780
Penyertaan Modal kepada PD Dharma Jaya	439.088.897.611	466.125.029.737
Penyertaan Modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya	5.572.106.346.809	5.554.928.504.064

Uraian	31 DESEMBER 2024 (Audited)	31 DESEMBER 2023 (Audited)
Penyertaan Modal kepada PD Pasar Jaya	1.532.218.565.464	1.530.748.892.361
Penyertaan Modal kepada PD PAL Jaya	1.262.788.357.311	1.246.431.260.941
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Propertindo	24.868.736.897.996	23.991.197.246.177
Penyertaan Modal kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta	27.282.827.509.869	23.887.901.546.678
Penyertaan Modal kepada PT Bank DKI Jakarta	11.350.312.689.538	10.982.535.682.062
Penyertaan Modal kepada PT Food Station Tjipinang	627.365.823.104	617.635.223.340
Penyertaan Modal kepada PT Transportasi Jakarta	4.842.878.703.074	4.701.221.698.896
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Tourisindo	658.158.455.150	567.235.405.681
Penyertaan Modal kepada PT Penjamin Kredit Daerah	632.776.241.327	413.139.843.427
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya Ancol	1.234.296.000.471	1.185.955.200.453
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya	4.659.453.593.788	4.688.253.593.788
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	3.079.860.074.757	187.918.474.113
Penyertaan Modal kepada PT Delta Djakarta Tbk	222.111.609.233	244.322.763.251
Penyertaan Modal kepada PT Cemani Toka	27.059.360.000	27.059.360.000
Penyertaan Modal kepada PT Kawasan Berikat Nusantara	209.692.695.000	209.692.695.000
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta International Expo	39.375.000.000	39.375.000.000
Penyertaan Modal kepada PT Grahasahari Suryajaya	3.951.000.000	3.951.000.000
Penyertaan Modal kepada PT Asuransi Bangun Askrida	13.080.000.000	13.080.000.000
Penyertaan Modal kepada PT Pakuan International	1.345.900.000	1.345.900.000
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	93.176.692.451.917	84.559.599.245.749
PROPERTI INVESTASI	5.746.069.265.613	4.924.165.320.404
Properti Investasi - Tanah	4.178.110.485.462	3.367.064.778.502
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	1.553.795.480.328	1.542.937.242.079
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.163.299.823	14.163.299.823
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(456.072.090.311)	(448.002.283.626)
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	(453.947.595.338)	(447.294.118.634)
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.124.494.973)	(708.164.992)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	5.289.997.175.302	4.476.163.036.778
ASET TETAP	677.659.441.516.748	661.657.277.836.888
Tanah	527.255.442.881.924	515.882.640.362.479
Peralatan dan Mesin	30.462.326.362.242	32.771.280.763.093
Gedung dan Bangunan	48.454.852.796.405	47.160.243.335.958
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	65.909.190.073.931	61.937.757.653.148
Aset Tetap Lainnya	1.114.104.352.668	1.388.435.196.833
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.463.525.049.578	2.516.920.525.377
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(83.920.518.130.702)	(82.370.545.608.448)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(23.958.429.154.024)	(26.998.498.994.240)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(25.980.192.256.199)	(24.426.328.768.702)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(33.882.901.558.383)	(30.843.293.737.787)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(98.995.162.096)	(102.424.107.719)
JUMLAH ASET TETAP	593.738.923.386.046	579.286.732.228.440
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	35.662.823.855	36.651.951.367
Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	35.662.823.855	36.651.951.367
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.524.180.701.395	6.524.489.356.721
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	1.052.854.485.000	1.029.914.960.000
Kerja Sama Pemanfaatan	1.901.175.286.258	1.901.175.286.258
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	1.209.114.512.500	1.209.123.512.500
Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1.015.013.208.858	1.045.325.528.858
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	1.346.023.208.779	1.338.950.069.105
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(394.218.153.955)	(393.892.000.498)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	(6.653.291.800)	(11.053.796.400)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	(46.926.468.758)	(46.926.468.758)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	-	(2.700.000)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	(288.857.340.929)	(285.579.528.800)
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	(51.781.052.468)	(50.329.506.540)
Jumlah Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.129.962.547.440	6.130.597.356.223

Uraian	31 DESEMBER 2024 (Audited)	31 DESEMBER 2023 (Audited)
Aset Tidak Berwujud	715.084.977.785	634.599.864.666
Lisensi dan franchise	8.390.903.300	-
Software	390.582.775.038	269.888.332.098
Aset Tidak Berwujud Lainnya	316.111.299.447	364.711.532.568
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(551.873.044.557)	(537.631.910.464)
Jumlah Aset Tidak Berwujud	163.211.933.228	96.967.954.202
Aset Lain-Lain	43.707.111.197.345	33.076.672.679.419
Aset Rusak Berat/Usang	8.224.981.762.728	4.382.335.026.906
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	926.659.033.718	489.746.555.352
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	1.075.481.299.172	973.782.683.243
Aset Tetap - Fasos Fasum	22.380.891.194.269	16.290.870.877.648
Kas Dikonsinyasikan	2.168.628.752	27.413.446.297
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	548.652.428.827	573.280.906.692
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	6.055.700.858.515	4.475.775.978.273
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya	10.697.454.729	10.697.454.729
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	4.481.878.536.635	5.852.769.750.279
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(12.772.762.604.350)	(7.371.702.525.617)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(7.065.393.887.354)	(3.487.075.355.149)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	(2.051.770.742.962)	(2.193.154.079.554)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	(90.786.883.873)	(7.402.394.895)
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(112.078.627.721)	(84.618.783.387)
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(3.031.268.442.557)	(1.547.280.825.586)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(421.464.019.883)	(52.171.087.046)
Jumlah Aset Lain-Lain	30.934.348.592.995	25.704.970.153.802
JUMLAH ASET LAINNYA	37.263.185.897.518	31.969.187.415.594
JUMLAH ASET	745.956.336.004.049	715.498.299.812.408
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.615.238.139	652.047.503
Utang Bunga Pinjaman	15.646.130.966	14.739.619.252
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	15.646.130.966	14.739.619.252
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.981.669.834.064	1.861.669.834.064
Bagian Lancar Utang - IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)	33.629.623.430	33.629.623.430
Bagian Lancar Utang - JICA SLA.... (Proyek MRT)	120.000.000.000	-
Bagian Lancar Utang - PEN	1.828.040.210.634	1.828.040.210.634
Pendapatan Diterima di Muka	221.835.170.345	216.488.454.965
Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah	2.511.423.274	3.506.186.150
Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah	198.463.584.362	24.944.175.550
Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	-	112.033.643.034
Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	-	39.266.042.398
Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	-	910.687.396
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	3.175.331.199	2.988.648.669
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD	17.684.831.510	19.909.645.124
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah	-	12.929.419.406
Pendapatan Diterima di Muka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	7.238

Uraian	31 DESEMBER 2024 (Audited)	31 DESEMBER 2023 (Audited)
Utang Belanja	1.780.943.311.694	2.147.127.573.272
Utang Belanja SKPD	1.458.899.490.074	1.264.677.003.896
Utang Belanja Pegawai	773.782.580.212	897.763.135.326
Utang Belanja Barang dan Jasa	410.726.963.508	216.423.240.256
Utang Belanja Barang	19.922.520.581	12.002.332.272
Utang Belanja Jasa Non TALI	257.558.168.325	119.392.881.363
Utang Belanja TALI	57.070.645.240	56.801.584.954
Utang Belanja Pemeliharaan	30.746.012.909	27.093.304.167
Utang Belanja Perjalanan Dinas	5.807.866.453	-
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	39.621.750.000	1.133.137.500
Utang Belanja Modal	274.389.946.354	150.490.628.314
Utang Belanja Modal Tanah	159.840.000	-
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.630.836.424	234.425.902
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.290.717.717	77.447.682.079
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.308.552.213	72.808.520.333
Utang Belanja BLUD	249.204.411.128	193.623.555.598
Utang Belanja Pegawai BLUD	13.507.051.040	14.696.755.850
Utang Belanja Barang Jasa BLUD	230.510.277.449	176.808.371.586
Utang Belanja Modal BLUD	5.187.082.639	2.118.428.162
Utang Belanja Subsidi	72.839.410.492	688.827.013.778
Utang Jangka Pendek Lainnya	15.141.616.464	16.377.359.980
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	60.301.439	60.600.192
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	-	169.040.000
Utang Kompensasi Pajak	4.341.069.296	4.247.474.531
Utang Restitusi Pajak	2.011.990.094	1.178.722.745
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.710.322.955	10.628.454.363
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	17.932.680	93.068.149
Utang Jaminan	6.373.805.574	6.188.082.151
Utang Jaminan Pajak Daerah	2.504.261.554	2.958.583.004
Utang Jaminan BLUD	3.869.544.020	3.229.499.147
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.023.225.107.246	4.263.242.971.187
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	13.982.891.651.205	13.162.772.219.846
Utang Dalam Negeri - IBRD (Proyek JUFMP/JEDI)	219.097.501.569	252.727.124.999
Utang Dalam Negeri - JICA (Proyek MRT)	10.257.674.464.002	7.576.369.926.244
Utang PEN	3.506.119.685.634	5.333.675.168.603
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	13.982.891.651.205	13.162.772.219.846
JUMLAH KEWAJIBAN	18.006.116.758.451	17.426.015.191.033
JUMLAH EKUITAS	727.950.219.245.598	698.072.284.621.375
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	745.956.336.004.049	715.498.299.812.408

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 23 Mei 2025

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pranono Anung



LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2024 (Audited)	31 DESEMBER 2023 (Audited)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
<u>PENDAPATAN</u>					
Pendapatan Asli Daerah					
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1.1	46.010.295.342.977	44.365.069.145.521	1.645.226.197.456	3,71
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.1.2	1.401.893.769.313	461.646.047.887	940.247.721.426	203,67
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.1.3	5.005.268.401.929	3.393.855.897.994	1.611.412.503.935	47,48
Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.1.1.4	24.145.049.224.753	28.284.884.221.263	(4.139.834.996.510)	(14,64)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		76.562.506.738.972	76.505.455.312.665	57.051.426.307	0,07
Pendapatan Transfer					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	5.4.1.1.2.1	18.746.603.810.943	20.669.456.449.952	(1.922.852.639.009)	(9,30)
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.4.1.1.2.2	368.173.270.201	22.179.718.000	345.993.552.201	1.559,95
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	5.4.1.1.2.3	-	3.076.020.400	(3.076.020.400)	(100,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	5.4.1.1.2.4	3.176.221.876.541	3.049.066.285.962	127.155.590.579	4,17
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Insentif Fiskal - LO					
Insentif Fiskal - LO	5.4.1.1.2.5	44.090.217.000	35.175.027.000	8.915.190.000	25,35
Jumlah Pendapatan Transfer		22.335.089.174.685	23.778.953.501.314	(1.443.864.326.629)	(6,07)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah					
Pendapatan Hibah	5.4.1.1.3	1.223.761.457.172	3.584.721.532.629	(2.360.960.075.457)	(65,86)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1.223.761.457.172	3.584.721.532.629	(2.360.960.075.457)	(65,86)
JUMLAH PENDAPATAN		100.121.357.370.829	103.869.130.346.608	(3.747.772.975.779)	(3,61)
<u>BEBAN</u>					
Beban Operasi					
Beban Pegawai	5.4.1.2.1.a	19.064.896.423.259	17.978.251.780.755	1.086.644.642.504	6,04
Beban Barang	5.4.1.2.1.b	8.210.467.578.487	8.368.039.918.686	(157.572.340.199)	(1,88)
Beban Jasa	5.4.1.2.1.c	15.899.306.134.614	15.897.400.048.649	1.906.085.965	0,01
Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.1.d	2.374.946.418.584	2.347.768.127.910	27.178.290.674	1,16
Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.1.e	214.123.989.688	144.239.199.856	69.884.789.832	48,45
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.1.2.1.f	632.244.815.800	179.286.179.744	452.958.636.056	252,65
Beban Bunga	5.4.1.2.1.g	181.645.376.709	229.413.542.369	(47.768.165.660)	(20,82)
Beban Subsidi	5.4.1.2.1.h	5.637.232.604.654	5.482.558.366.839	154.674.237.815	2,82
Beban Hibah	5.4.1.2.1.i	2.791.383.055.853	3.623.927.568.369	(832.544.512.516)	(22,97)
Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.1.j	3.478.730.711.035	4.300.981.697.194	(822.250.986.159)	(19,12)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.1.k	1.394.832.288.718	1.018.310.129.789	376.522.158.929	36,98
Beban Lain-lain	5.4.1.2.1.l	1.837.595.845.916	1.470.465.936.556	367.129.909.360	24,97
Jumlah Beban Operasi		61.717.405.243.317	61.040.642.496.716	676.762.746.601	1,11
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.1.2.2	7.390.364.255.277	7.207.960.765.111	182.403.490.166	2,53
Beban Transfer					
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.1.2.3	383.715.114.400	356.446.480.500	27.268.633.900	7,65
Jumlah Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		383.715.114.400	356.446.480.500	27.268.633.900	7,65
JUMLAH BEBAN		69.491.484.612.994	68.605.049.742.327	886.434.870.667	1,29
JUMLAH SURPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL		30.629.872.757.835	35.264.080.604.281	(4.634.207.846.446)	(13,14)
<u>SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>					
Surplus Non Operasional	5.4.2.1				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		27.717.897.192	3.722.940.118	23.994.957.074	644,52
Jumlah Surplus Non Operasional		27.717.897.192	3.722.940.118	23.994.957.074	644,52
Defisit Non Operasional	5.4.2.2				
Defisit Penghentian Aset Non Lancar		3.958.243.918	-	3.958.243.918	-
Jumlah Defisit Non Operasional		3.958.243.918	-	3.958.243.918	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		23.759.653.274	3.722.940.118	20.036.713.156	538,20
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		30.653.632.411.109	35.267.803.544.399	(4.614.171.133.290)	(13,08)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2024 (Audited)	31 DESEMBER 2023 (Audited)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
POS LUAR BIASA	5.4.3				
Beban Luar Biasa		-	3.025.742.350	(3.025.742.350)	(100,00)
Beban Luar Biasa		-	3.025.742.350	(3.025.742.350)	(100,00)
Jumlah Beban Luar Biasa		-	(3.025.742.350)	3.025.742.350	(100,00)
POS LUAR BIASA		-	(3.025.742.350)	3.025.742.350	(100,00)
SURPLUS	5.4.4	30.653.632.411.109	35.264.777.802.049	(4.611.145.390.940)	(13,08)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 23 Mei 2025

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Ramono Anung



LAPORAN ARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2024

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk:			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.a	44.448.074.892.860	43.516.481.672.833
Penerimaan Retribusi daerah	5.5.1.1.b	713.719.914.819	454.697.560.911
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.c	653.700.898.761	545.869.249.987
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.5.1.1.d	4.895.435.469.115	4.583.119.605.650
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.e	17.110.097.019.361	16.304.845.339.366
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.5.1.1.f	-	3.076.020.400
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.5.1.1.g	2.352.167.225.584	2.263.034.544.382
Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	5.5.1.1.h	368.173.270.201	22.179.718.000
Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.1.i	44.090.217.000	35.175.027.000
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.j	12.927.060.000	30.905.119.064
Jumlah Arus Kas Masuk		70.598.385.967.701	67.759.383.857.593
Arus Kas Keluar:			
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.a	19.190.554.701.043	17.977.776.327.870
Pembayaran Barang	5.5.1.2.b	26.572.367.215.305	25.824.444.605.296
Pembayaran Bunga	5.5.1.2.c	180.738.864.995	229.704.491.741
Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.d	5.875.837.590.937	5.539.653.281.534
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.e	2.472.491.761.571	2.835.482.114.927
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.f	3.496.629.048.637	4.363.641.476.668
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.g	383.997.067.520	356.446.480.500
Jumlah Arus Kas Keluar		58.172.616.250.008	57.127.148.778.536
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		12.425.769.717.693	10.632.235.079.057
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk:			
Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang	5.5.2.1.a	3.370.200.000	3.145.400.000
Penjualan Aset Tetap	5.5.2.1.b	27.717.897.192	3.722.940.118
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.2.1.c	71.846.300	190.589.666
Jumlah Arus Kas Masuk		31.159.943.492	7.058.929.784
Arus Kas Keluar:			
Perolehan Aset Tetap	5.5.2.2.a	11.004.785.255.543	8.857.260.068.298
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.2.2.b	2.610.590.760.167	2.814.870.975.375
Jumlah Arus Kas Keluar		13.615.376.015.710	11.672.131.043.673
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(13.584.216.072.218)	(11.665.072.113.889)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk:	5.5.3.1		
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
Arus Kas Keluar:	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		938.693.208.121	1.057.547.795.088
Jumlah Arus Kas Keluar		938.693.208.121	1.057.547.795.088
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(938.693.208.121)	(1.057.547.795.088)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk:			
Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya (Bansos)	5.5.4.1.a	20.617.619.270	-
Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	5.5.4.1.b	21.512.667	1
Reklasifikasi Kas dibatasi penggunaannya ke Kas di Bendahara Sekolah Lainnya	5.5.4.1.c	958.997.783	-
Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama	5.5.4.1.d	961.411.902	1.684.920.147
Penerimaan Deposit Pasien - BLUD	5.5.4.1.e	5.246.548.583	6.759.297.420
Penerimaan Deposit Jasa BLUD	5.5.4.1.f	1.723.693.572	1.487.097.500
Penerimaan Uang Titipan	5.5.4.1.g	67.290.000	1.701.917.859
Penerimaan Kas Lainnya	5.5.4.1.h	235.238.706	13.543.921.396
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.i	4.384.292.716.228	3.778.990.123.701
Jumlah Arus Kas Masuk		4.414.125.028.711	3.804.167.278.024
Arus Kas Keluar:			
Penyetoran Kas BOSP ke RKUN	5.5.4.2.a	11.430.723.378	-
Reklasifikasi Kas Lainnya ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.5.4.2.b	34.266.759.372	-
Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama	5.5.4.2.c	321.367.029	448.402.500
Penyetoran Asuransi pada Kas Bendahara Penerimaan	5.5.4.2.d	1.151.500	-
Pengembalian Uang Titipan BLUD	5.5.4.2.e	141.203.661	1.743.395.823
Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	5.5.4.2.f	318.313.427	22.001.380
Reklasifikasi ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.5.4.2.g	3.869.544.020	-
Pengeluaran Deposit Pasien - BLUD	5.5.4.2.h	5.056.280.592	6.978.631.689
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD	5.5.4.2.i	1.659.921.472	1.412.672.500
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.j	4.383.328.374.092	3.779.641.645.864
Jumlah Arus Kas Keluar		4.440.393.638.543	3.790.246.749.756
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(26.268.609.832)	13.920.528.268
Kenaikan (Penurunan) Kas			
Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD	5.5.5	(2.123.408.172.478)	(2.076.464.301.652)
Saldo Akhir Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD		6.562.186.965.985	8.638.651.267.637
Saldo Akhir Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD		4.438.778.793.507	6.562.186.965.985

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 23 Mei 2025

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung



**LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
EKUITAS AWAL	5.6.1	698.072.284.621.375	665.549.886.851.294
SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL	5.6.2	30.653.632.411.109	35.264.777.802.049
KOREKSI EKUITAS	5.6.3		
Koreksi Penyajian Piutang	5.6.3.a	100.775.674.212	78.718.584.165
Koreksi Penyajian Penyisihan Piutang	5.6.3.b	14.868.906.540	94.027.206.176
Koreksi Penyajian Persediaan	5.6.3.c	749.286.737	104.112.303.551
Koreksi Penyajian Investasi:	5.6.3.d		
Koreksi Penyajian Nilai Investasi Non Permanen		71.846.300	190.589.666
Koreksi Penyajian Saldo Awal Aset Tetap dan Aset Lainnya	5.6.3.e	(1.257.534.477.431)	(2.960.315.473.964)
Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya	5.6.3.f	(50.102.248.068)	(311.042.566.786)
Koreksi Penyajian Kewajiban	5.6.3.g	406.979.281.332	251.929.325.224
Penyesuaian Lainnya:	5.6.3.h		
Hasil Perkembangbiakan Hewan/Tanaman		8.375.908.492	-
Koreksi Ekuitas BLUD		(405.000)	-
Penerimaan Pengembalian Bansos sebelum Tahun 2024		118.440.000	-
Jumlah Koreksi Ekuitas		(775.697.786.886)	(2.742.380.031.968)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	727.950.219.245.598	698.072.284.621.375

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 23 Mei 2025

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung



**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

AUDITED



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, maka kepala daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

- a. **Laporan Realisasi Anggaran**
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
- b. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. **Neraca**
Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- d. **Laporan Operasional**
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. **Laporan Arus Kas**
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- f. **Laporan Perubahan Ekuitas**
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan Peraturan Perundang-undangan;
- c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
- m. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- n. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- p. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;
- q. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;



- r. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- s. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
- t. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- u. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- v. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2024;
- w. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, indikator kinerja utama, kebijakan keuangan, perubahan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun 2024.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Dan Laporan Perubahan Ekuitas.



BAB VI : Berisi penjelasan atas catatan penting lainnya.

BAB VII : Berisi penutup yang memuat kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.



BAB II

**EKONOMI MAKRO,
KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro digambarkan dalam bentuk capaian kinerja makro yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Selisih
1.	Indeks Pembangunan Manusia	83,55	84,15	0,60%
2.	Angka Kemiskinan	4,44%	4,14%	(0,30%)
3.	Angka Pengangguran	6,53%	6,21%	(0,32%)
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,96%	4,90%	(0,06%)
5.	Pendapatan Per Kapita	Rp322,62 Juta	Rp344,35 Juta	Rp21,73 Juta
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,43	0,43	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

Penjelasan atas capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yakni dengan menjelaskan bagaimana penduduk mencapai umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu:

- 1) umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yakni rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi sesuai kondisinya pada saat lahir;
- 2) pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas rata-rata lamanya pendidikan formal yang dapat dikenyam oleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke atas; dan
- 3) standar hidup layak yang diperoleh dari besar pengeluaran per kapita yang disesuaikan - *Purchasing Power Parity* (PPP).

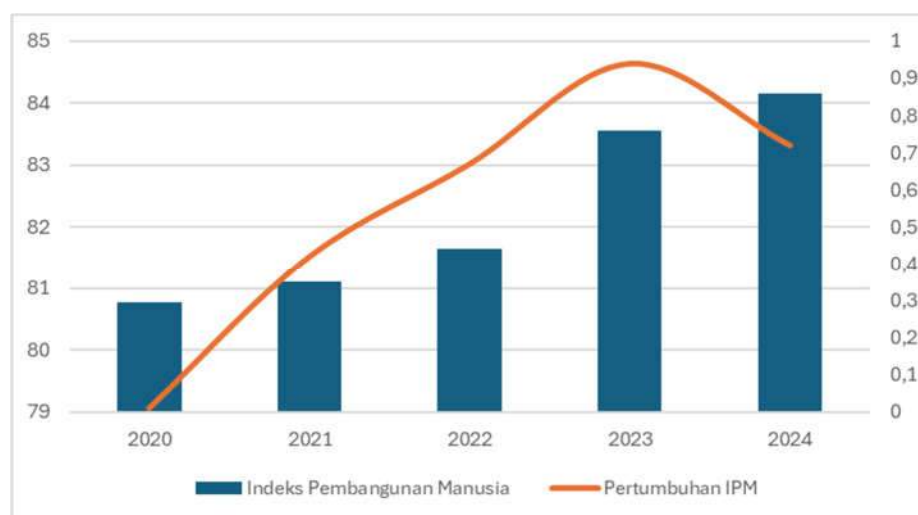
Data IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta berjudul Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta 2024 yang dirilis pada 2 Desember 2024. IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 tercatat sebesar 84,15



atau meningkat 0,20% dibandingkan Tahun 2023 dengan status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM ≥ 80) dan menjadi Provinsi dengan kualitas hidup penduduk tertinggi di Indonesia. Capaian pertumbuhan IPM Provinsi DKI Jakarta di tahun ini juga menjadi yang tertinggi sepanjang periode 2020-2024.

Grafik 2.1

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Periode 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

Selama kurun waktu 2020-2024, IPM Provinsi DKI Jakarta tumbuh sebesar 3,38%, dari sebesar 80,77 pada 2020 kemudian meningkat 3,38 poin menjadi 84,15 pada 2024.

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 digambarkan menggunakan indikator persentase penduduk miskin dan bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret dan September. BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Indikator persentase penduduk miskin dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah total penduduk.

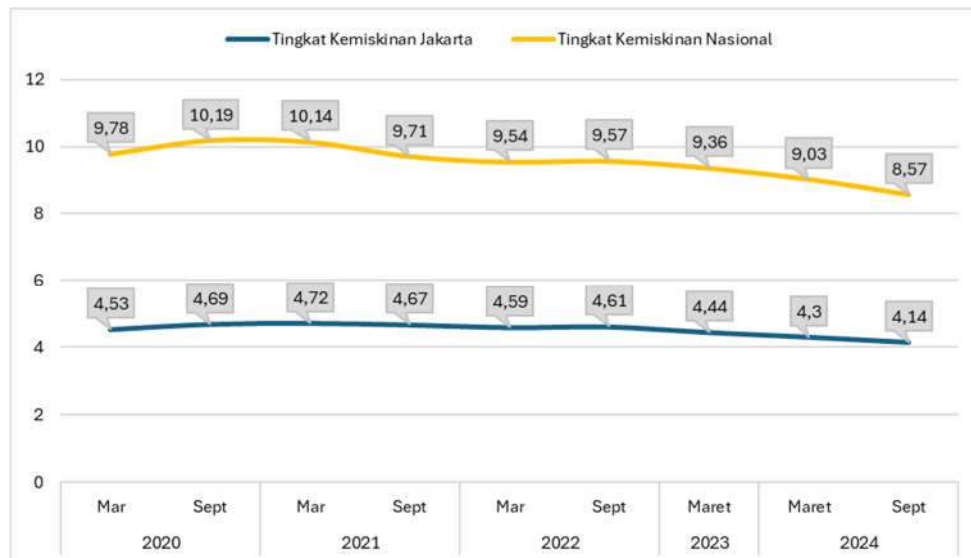
Persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta per September 2024 sebesar 4,14 persen, atau turun 0,30 persen poin dibandingkan dengan angka Maret 2023 sebesar 4,44 persen. Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada September 2024 berada pada level 9,03 persen. Secara gradual tingkat kemiskinan mulai turun dari puncaknya pada Maret 2021 sebesar 4,72 persen. Tren penurunan angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir menjadi momentum keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan. Namun demikian ke depannya masih terdapat tantangan mengingat angka kemiskinan Maret 2024



masih lebih tinggi bila dibandingkan angka kemiskinan sebelum Covid-19 yaitu Maret 2019 yang sebesar 3,47 persen. Perkembangan angka kemiskinan selama periode 2020-2024 secara lengkap disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2.2

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

Sementara itu Badan Pusat Statistik mencatat garis kemiskinan di DKI Jakarta pada September 2024 sebesar Rp 846.085/Kapita/Bulan, naik sebesar 24,35 persen dibandingkan dengan Maret 2020 yang sebesar Rp 680.401/Kapita/Bulan. Secara umum kondisi ini menunjukkan meningkatnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan agar tidak dikategorikan sebagai penduduk kategori miskin.

Grafik 2.3

Perkembangan Garis Kemiskinan di DKI Jakarta Periode 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, diolah 2025

Kenaikan Garis Kemiskinan pada periode 2020-2024 didorong oleh kenaikan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) (26,72 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) (19,20 persen).



Dari sisi komoditas, Garis Kemiskinan pada September 2024 masih didominasi oleh pengeluaran dasar untuk makanan (69,82 persen). Secara lebih lengkap perkembangan Garis Kemiskinan dan komponen pembentuknya pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik 2.3.

c. Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan laman resmi BPS Provinsi DKI Jakarta, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut:

- 1) angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran;
- 2) pengangguran adalah:
 - a) penduduk yang aktif mencari pekerjaan;
 - b) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;
 - c) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan
 - d) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Grafik 2.4

Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2024



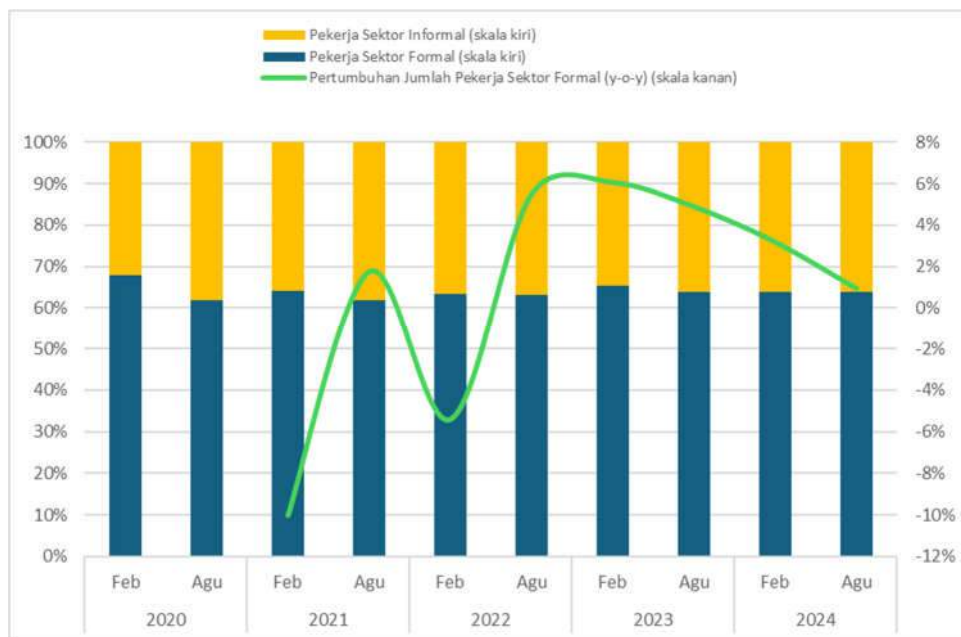
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

Selama kurun waktu 2020-2024 jumlah penduduk bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang berfluktuasi. Jumlah penduduk bekerja mulai mengalami peningkatan pada Agustus 2022 (4,88 juta orang), meningkat sebesar 3,17 persen



dibandingkan dengan Agustus 2021. Tren peningkatan jumlah penduduk bekerja terus berlanjut hingga pada Agustus 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,15 persen (yoy) menjadi 5,1 juta orang. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka juga berangsur turun dari puncaknya sebesar 10,95 persen pada Agustus 2020 menjadi sebesar 6,21 persen (yoy) pada Agustus 2024.

Grafik 2.5
Perkembangan Pekerja Sektor Formal dan Informal
di Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

Sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta pada Agustus 2024, yakni sebanyak 63,69 persen dari total pekerja dan sisanya sebanyak 36,31 persen bekerja pada sektor informal. Jumlah pekerja sektor formal pada Agustus 2024 tumbuh sebesar 3,26 persen (yoy), melambat dibandingkan periode Agustus 2023 sebesar 3,23 persen (yoy). Sementara itu, jumlah pekerja sektor informal tumbuh sebesar 1,84 persen (yoy), meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi 1,83 persen (yoy).

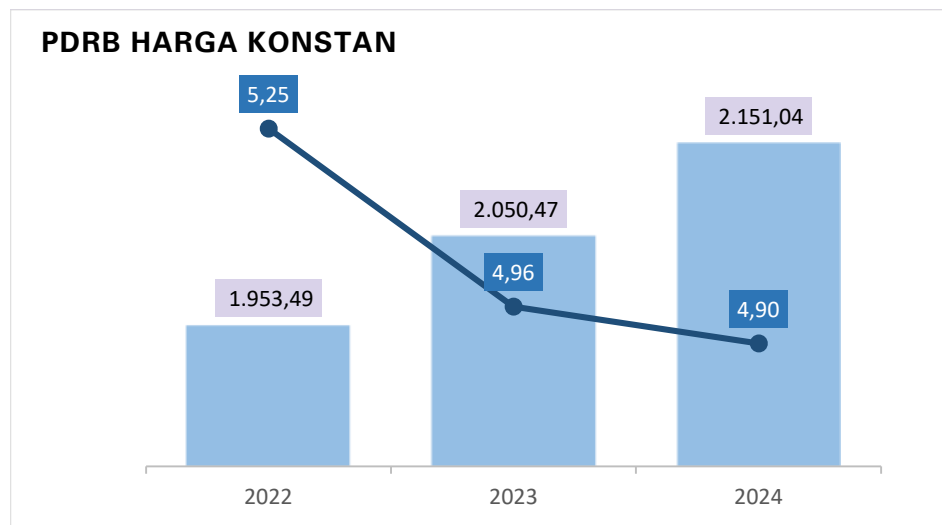
d. Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Jakarta masih tumbuh positif. Ekonomi Jakarta Tahun 2024 tumbuh sebesar 4,90 persen, lebih lambat dibandingkan pertumbuhan Tahun 2023 yang mencapai 4,96 persen. Pada Tahun 2024 PDRB DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencapai 3.679,36 triliun rupiah dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 2.151,04 triliun rupiah, meningkat dari Tahun 2023 yang tercatat sebesar 3.443,03 triliun rupiah Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan 2.050,47 triliun rupiah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).



Grafik 2.6

Perkembangan PDRB DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2024

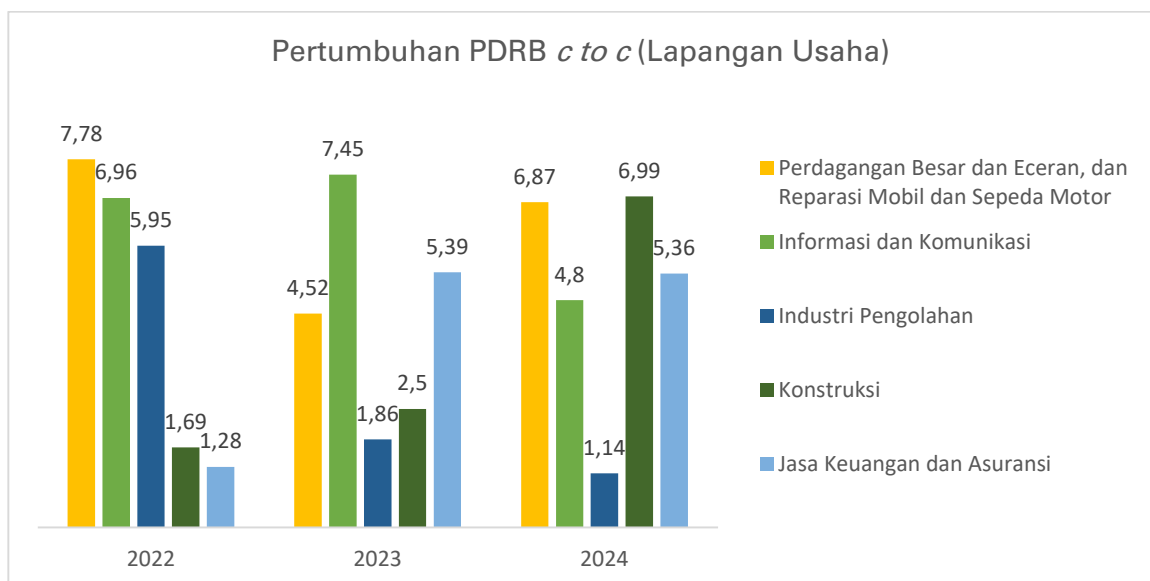


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,31 persen. Tingginya kinerja Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Jakarta terutama disebabkan peningkatan Jumlah Wisatawan Nusantara menuju Jakarta sehingga penerimaan pajak hotel dan restoran tumbuh. Pertumbuhan tertinggi berikutnya dicapai oleh Konstruksi yang tumbuh sebesar 6,99 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,96 persen. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mendominasi struktur perekonomian Jakarta sebesar 18,01 persen. Adapun perkembangan PDRB Jakarta berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 2.7

Perkembangan PDRB Lapangan Usaha DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2024



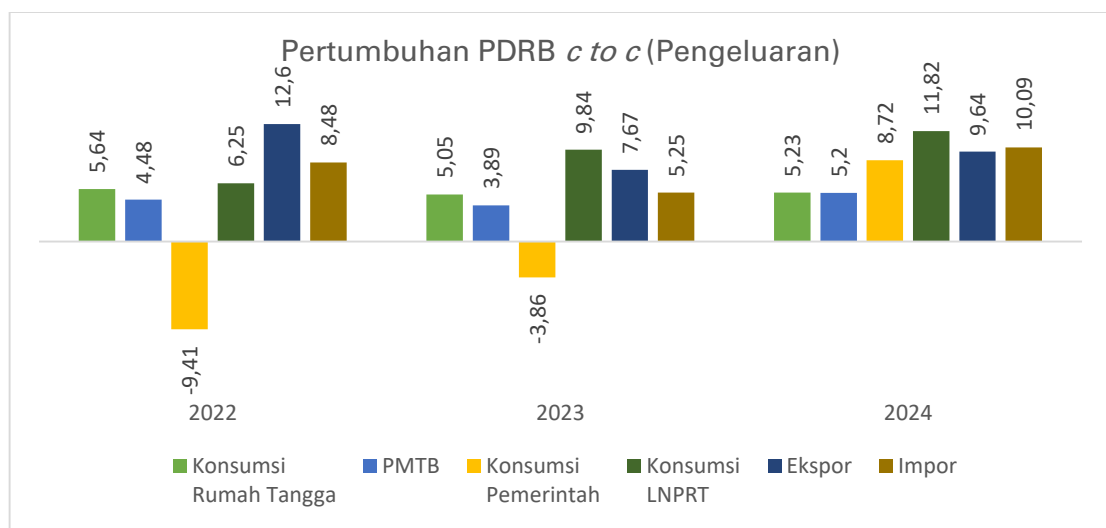
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025



Lebih lanjut berdasarkan Pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 11,82 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa sebesar 9,64 persen; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 8,72 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB mengalami pertumbuhan sebesar 10,09 persen. Pertumbuhan PKLNPRT didorong oleh Peningkatan aktivitas partai politik pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dan Pertumbuhan konsumsi listrik kategori sosial.

Grafik 2.8

Perkembangan PDRB Pengeluaran DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

Adapun struktur ekonomi Jakarta menurut pengeluaran Tahun 2024 didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 70,37 persen; diikuti oleh Komponen PKRT sebesar 62,48 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 34,11 persen; Komponen PK-P sebesar 12,53 persen; dan Komponen PKLNPRT sebesar 2,32 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 81,98 persen.

e. Pendapatan Per Kapita

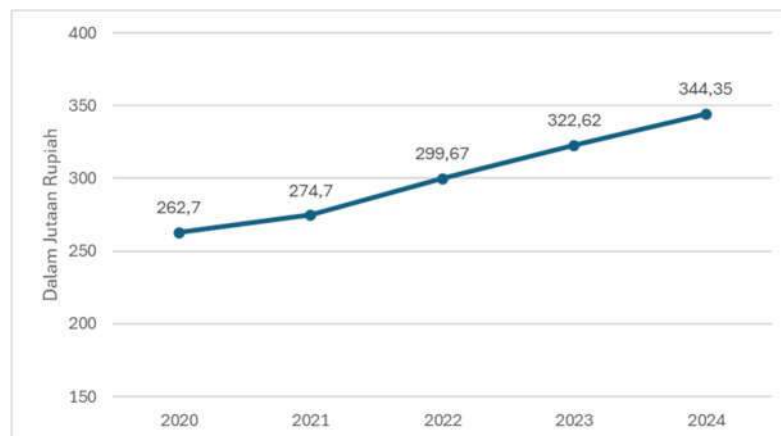
Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa pendekatan (*proxy*) yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu daerah di mana pendekatan yang paling sering digunakan adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah. Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dan 2024 pada dokumen ini merupakan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Januari 2025.



Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Pada 2024, PDRB per kapita tercatat sebesar 344,35 juta rupiah atau meningkat 6,74% dibandingkan Tahun 2023. Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta terus meningkat sejak tahun 2020, meskipun sempat mengalami penurunan karena pandemi Covid-19. PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2020-2024 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2.9

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita atas Dasar Harga Berlaku
Periode 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2020-2024 menunjukkan tren meningkat meskipun sempat turun pada 2020 dikarenakan pandemi Covid-19.

f. Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DKI Jakarta menggunakan Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret dan September. Data terakhir yang dipublikasi oleh BPS adalah data periode sampai dengan September 2024 yang dipublikasi pada tanggal 15 Januari 2025. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 di mana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna di mana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki. Perkembangan Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 2.10

Perkembangan Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

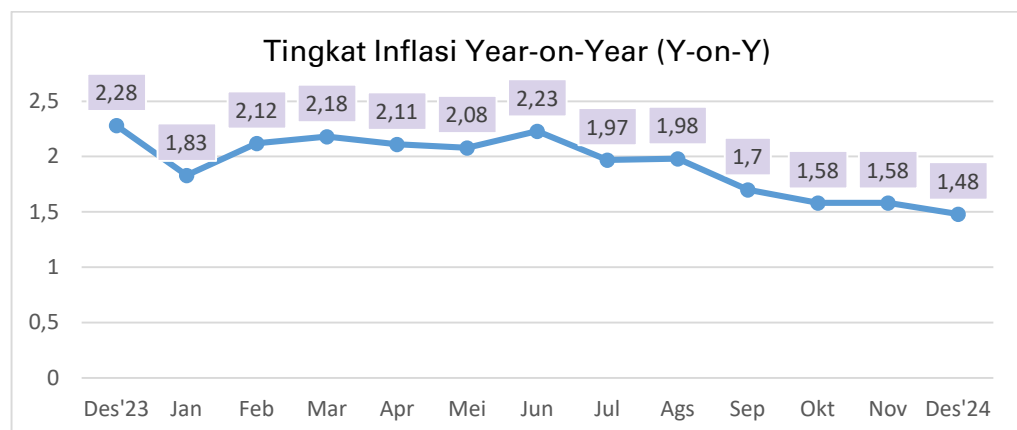
Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta secara umum berada di atas Rasio Gini Nasional selama periode 2020-2024. Artinya, ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta umumnya lebih tinggi dibandingkan kondisi nasional. Selain itu apabila dilihat dari perkembangannya selama 2020-2024, ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami kenaikan hingga September 2024 mencapai tingkat tertinggi sebesar 0,431 dan kemudian sedikit turun pada Maret 2024 menjadi sebesar 0,423.

g. Inflasi

Pergerakan inflasi (y-on-y) sepanjang Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan inflasi pada Tahun 2024 terjadi empat kali yaitu pada bulan Februari, Maret, Juni dan Agustus dengan puncak inflasi sebesar 2,23 persen pada bulan Juni 2024. Pada Desember 2024, tingkat inflasi y-on-y Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,48 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,48 persen. Sementara itu, pada Desember 2023, tingkat inflasi y-on-y tercatat sebesar 2,28 persen. Hal ini menunjukkan inflasi di Jakarta dalam keadaan terkendali.

Grafik 2.11

Realisasi Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2025



Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Dari sebelas kelompok pengeluaran, sepuluh di antaranya mengalami peningkatan indeks harga atau inflasi dan hanya satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga atau deflasi. Sepuluh kelompok tersebut yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (8,10 persen), perlengkapan, penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,80 persen), pendidikan (2,39 persen), peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (2,14 persen), makanan minuman dan tembakau (1,67 persen), kesehatan (1,63 persen), pakaian dan alas kaki (0,93 persen), perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,64 persen), dan rekreasi, olahraga dan budaya (0,38 persen). Sementara kelompok yang mengalami deflasi yaitu transportasi (1,15 persen) dan informasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,04 persen).

Dibandingkan provinsi lain di Indonesia, inflasi Jakarta pada Desember 2024 (y-on-y) menunjukkan tren yang relatif terkendali dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Inflasi DKI Jakarta paling rendah bila dibandingkan dengan seluruh provinsi di Pulau Jawa. Sementara itu, di antara kota-kota satelit, inflasi Jakarta merupakan yang terendah secara y-on-y namun berada di posisi tengah secara m-to-m. Inflasi Jakarta (y-to-y sebesar 1,48 persen paling rendah dibandingkan Bogor (1,75 persen), Depok (1,95 persen), Tangerang (1,86 persen), dan Bekasi (1,60 persen).

Realisasi inflasi di DKI Jakarta yang relatif masih terkendali tidak terlepas dari dukungan berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta. TPID Provinsi DKI Jakarta melakukan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) untuk pengendalian inflasi. Upaya tersebut di antaranya melaksanakan program pangan murah bersubsidi bagi kelompok masyarakat tertentu, kegiatan pasar murah, panen raya bersama, kerja sama antardaerah, monitoring harga dan pasokan di pasar induk dan gudang beras, peluncuran produk beras resik, serta High Level Meeting (HLM) TPID. Sinergi dan kerja sama juga senantiasa dilakukan dengan Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, Bulog, BUMD Pangan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengendalikan inflasi di Jakarta.

h. Kinerja Belanja Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Kinerja belanja urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebesar 56,33% dari total belanja keseluruhan sebesar Rp70.012.728.586.086,00 yang terdiri atas urusan Pendidikan sebesar 23,98%, urusan Kesehatan sebesar 14,86%, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 9,94%, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 1,92%, urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar 3,63%, dan urusan Sosial sebesar 2,00%. Kinerja belanja urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dijelaskan pada tabel berikut.



Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2024		%	% Terhadap Total Belanja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	42.247.891.005.900	39.437.201.404.246	93,35	56,33
1	Pendidikan	17.780.831.753.367	16.786.112.162.883	94,41	23,98
2	Kesehatan	10.845.875.887.486	10.401.287.867.957	95,90	14,86
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.060.621.581.050	6.961.529.482.334	86,36	9,94
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.433.518.119.145	1.345.992.644.823	93,89	1,92
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.666.125.746.128	2.543.497.357.142	95,40	3,63
6	Sosial	1.460.917.918.724	1.398.781.889.107	95,75	2,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran dan realisasi belanja urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dijelaskan pada CaLK 5.1.2.2 Klasifikasi Urusan.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu capaian kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan akuntabilitas kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis.

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa satu periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 4 Tujuan dengan 4 Indikator Kinerja Tujuan dan 22 Sasaran dan 26 Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dari 26 indikator kinerja yang dijanjikan pada Tahun 2024 secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut.



Tabel 2.3
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja
Tahun 2024

NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni	Indeks	71	N/A (belum rilis)	-
	1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas		Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	77.24	77,66	100.54%
	2	Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit		Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Persen	20.97	22.19	105.82%
	3	Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	55.43	56.39	101.73%
			2	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	25.4	25,9	101.97%
	4	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota		Indeks Risiko Bencana	Indeks	59.66	N/A (belum rilis)	-
2		Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7,81	N/A (belum rilis)	-
	5	Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah		Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	4.8 – 5.6	4.90	100%
	6	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja		Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)	Persen	6.53	6.21	105.15% *)
	7	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	1	Tingkat Kemiskinan	Persen	3.79	4.14	91.55% *)
			2	Rasio Gini	Koefisien	0.410	0,431	95,13% *)
			3	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	0.5	0,35	142.86% *)
	8	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4.01	N/A (belum rilis)	-
3		Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83.55	84.15	100.72%
	9	Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat		Indeks dimensi pendidikan	Tahun	12,16	12,5	102.80%
	10	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	75.81	75,99	100.24%
			2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Persen	13.2	N/A (belum rilis)	-
	11	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95.14	N/A (belum rilis)	-
	12	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebinekaan masyarakat		Indeks Demokrasi	Indeks	82.13	84.57	102.97%
4		Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83	N/A (belum rilis)	-



NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	13	Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91.08	93.36	102.50%
	14	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4.21	4,46	105.94%
	15	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	84 (A)	81,66	97.21%
			2	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	75	72,34	96.45%
	16	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100%
	17	Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur		Indeks Sistem Merit	Indeks	350.5	350.5	100%

*)Semakin rendah capaian semakin baik indikator kinerja

2.3 Kebijakan Keuangan

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dana Perimbangan.

Beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.3.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah:

- a. Strategi Pajak Daerah: Intensifikasi
 - 1) Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
 - 2) Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah;
 - 3) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment*;
 - 4) *Law enforcement* penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah;
 - 5) Pemberdayaan Juru Sita, PPNS, Intel Pajak Daerah dalam upaya penegakan hukum;
 - 6) Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mendekati harga pasar wajar;
 - 7) Meningkatkan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital; dan
 - 8) Peningkatan koordinasi kelembagaan (pertukaran data informasi, tax clearance, law enforcement, sosialisasi, dan pendataan).
- b. Strategi Pajak Daerah: Ekstensifikasi

Penguatan Wajib Pajak baru berdasarkan pendataan, terutama objek pajak baru sebagai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



2.3.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- a. Kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, antara lain:
 - 1) Pengembangan retribusi daerah pada Retribusi Online Sistem (R.O.S) sebagai sarana pemungutan retribusi;
 - 2) Digitalisasi pemungutan retribusi berbasis tiket atau dokumen yang dipersamakan;
 - 3) Melakukan integrasi aplikasi yang dimiliki oleh SKPD pemungut retribusi ke dalam R.O.S;
 - 4) Mendorong SKPD yang memiliki Laboratorium agar mempunyai akreditasi dari KAN;
 - 5) Monitoring langsung ke SKPD pemungut retribusi untuk mendapatkan objek retribusi yang kemungkinan belum dijadikan objek retribusi;
 - 6) Pencairan piutang dan mendorong SKPD pemungut retribusi untuk memastikan piutang semakin mengecil;
 - 7) Penyusunan Draf Rapergub Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 8) Sosialisasi terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - 9) Monitoring dan Evaluasi secara periodik/bulanan objek retribusi.

2.3.1.3 Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini antara lain berasal dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Mempertahankan dan meningkatkan status rasio kesehatan serta tata kelola BUMD;
- b. Menghadirkan kepengurusan yang unggul dan profesional dalam pengelolaan bisnis BUMD;



- c. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergi antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- d. Optimalisasi produktivitas aset BUMD melalui kerja sama dengan BUMD, BUMN dan pihak swasta;
- e. Meningkatkan inovasi dan diferensiasi bisnis agar mampu bersaing secara unggul;
- f. Alokasi PMD diutamakan untuk program yang mendukung prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- g. Mendorong skema alternatif pembiayaan lainnya dalam pembiayaan korporasi.

Sedangkan, lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Dalam hal meningkatkan kinerja lain-lain pendapatan daerah yang sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan dan monitoring kepada SKPD Pengampu Penerimaan LLPAD;
- b. Pengembangan serta integrasi sistem terkait monitoring dan evaluasi laporan bulanan dan rekonsiliasi; dan
- c. Melakukan pendataan potensi kepada SKPD Pengampu Penerimaan LLPAD:

Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, diperlukan strategi dalam hal optimalisasi pemanfaatan aset, pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan di atas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi, serta pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame, yang dilakukan melalui langkah-langkah berikut;

- a. Optimalisasi pemanfaatan aset;
- b. Optimalisasi pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan di atas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tanah Kota Praja dan Eks Desa;
- c. Optimalisasi pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi;
- d. Optimalisasi pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame.

2.3.1.4 Kebijakan Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK)



Non Fisik, peningkatan kerja sama intensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi, serta penjangkauan WP baru di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, kebijakan belanja daerah Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- a. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah;
- b. Menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial;
- c. Penyelesaian prioritas Pembangunan daerah Tahun Anggaran 2024, antara lain Penanggulangan Banjir, Penanganan Kemacetan, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Pencegahan Stunting, Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Nilai Demokrasi;
- d. Kegiatan tahun jamak yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada Tahun Anggaran 2024; dan
- e. Kegiatan yang mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan kegiatan lainnya yang merupakan ear marking dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, antara lain Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Wajib yang didanai oleh dana bagi hasil.

2.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan untuk pengalokasian SILPA dan Rencana Penerimaan Pinjaman Daerah yang



bersumber dari penerusan pinjaman dari pemerintah pusat untuk pembangunan proyek MRT Jakarta. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; dan Pembayaran Pokok Utang.

Dalam penyertaan penganggaran Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada Kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terdiri atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya; Penerimaan dari Obligasi Daerah; Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Pengembalian Investasi Dana Bergulir.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas. Perluasan tersebut dapat dilakukan melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pinjaman dan hibah luar negeri, penerbitan Obligasi Daerah, pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong kerja sama secara *business to business* (B to B) serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela dalam kerangka skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

2.4 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2024

Seiring perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional ketika konflik Rusia-Ukraina berdampak pada kenaikan harga pangan dan energi di berbagai negara yang berakibat pada terganggunya rantai pasok dunia maka inflasi global tidak dapat dihindari. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II juga memperkuat bahwa Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 harus dilakukan penyesuaian.



APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan sebesar Rp81.716.573.026.059,00. Namun pada APBD Perubahan 2024 mengalami kenaikan 4,27% menjadi Rp85.202.328.591.676,00.

Tabel 2.4
Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

APBD	Perda No. 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Perda No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)
1	2	3
PENDAPATAN DAERAH	72.446.382.571.261	74.946.825.859.889
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.398.081.040.625	50.466.744.400.403
Pajak Daerah	46.240.000.000.000	44.980.000.000.000
Retribusi Daerah	483.034.270.805	647.749.998.376
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	823.000.000.000	634.395.407.063
Lain-lain PAD yang Sah	4.852.046.769.820	4.204.598.994.964
PENDAPATAN TRANSFER	19.326.007.889.000	23.776.426.806.863
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	722.293.641.636	703.654.652.623
BELANJA DAERAH	72.600.997.362.528	76.023.113.210.933
Belanja Pegawai	20.065.594.901.085	20.031.780.182.216
Belanja Barang dan Jasa	27.309.645.709.375	27.835.321.117.883
Belanja Bunga	256.000.000.000	186.000.000.000
Belanja Subsidi	5.603.712.087.924	6.320.798.085.601
Belanja Hibah	3.306.327.319.994,	3.358.144.887.494
Belanja Bantuan Sosial	3.114.488.637.394	3.551.461.654.483
Belanja Modal	11.554.909.926.952	12.989.055.827.469
Belanja Tidak Terduga	1.072.006.625.640	1.365.518.170.267
Belanja Bantuan Keuangan	318.312.154.164	385.033.285.520
PEMBIAYAAN DAERAH	154.614.791.267	1.076.287.351.044
Penerimaan Pembiayaan	9.270.190.454.798	10.255.502.731.787
Pengeluaran Pembiayaan	9.115.575.663.531	9.179.215.380.743
Total APBD	81.716.573.026.059	85.202.328.591.676



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pada Tahun 2024 terdapat Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam ringkasan Realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PENDAPATAN	74.946.825.859.889	72.952.092.296.153	97,34	71.065.534.207.722
1.1	Pendapatan Asli Daerah	50.466.744.400.403	50.742.019.272.748	100,55	49.139.745.715.234
1.2	Pendapatan Transfer	23.776.426.806.863	21.620.905.241.381	90,93	20.159.634.672.034
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	703.654.652.623	589.167.782.024	83,73	1.766.153.820.454
2	BELANJA dan TRANSFER	76.023.113.210.933	70.012.717.839.886	92,09	66.770.609.628.414
2.1	Belanja Operasi	61.283.505.927.677	58.623.935.516.823	95,66	57.556.903.079.616
2.2	Belanja Modal	12.989.055.827.469	11.004.785.255.543	84,72	8.857.260.068.298
2.3	Belanja Tak Terduga	1.365.518.170.267	0	0,00	0
2.4	Transfer - Bantuan Keuangan	385.033.285.520	383.997.067.520	99,73	356.446.480.500
Surplus/Defisit		(1.076.287.351.044)	2.939.374.456.267		4.294.924.579.308
3	PEMBIAYAAN	1.076.287.351.044	1.494.476.377.779	138,85	2.247.496.540.761
3.1	Penerimaan Pembiayaan	10.255.502.731.787	9.343.797.504.127	91,11	8.886.564.884.056
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	9.179.215.380.743	7.849.321.126.348	85,51	6.639.068.343.295
4	SiLPA		4.433.850.834.046		6.542.421.120.069

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut.



3.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.952.092.296.153,00 atau 97,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp74.946.825.859.889,00. Realisasi Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp50.742.019.272.748,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp21.620.905.241.381,00, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp589.167.782.024,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.742.019.272.748,00 atau 100,55% dari target sebesar Rp50.466.744.400.403,00. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp49.139.745.715.234,00, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.602.273.557.514,00 atau 3,26%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp931.593.220.027,00 atau 2,14%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp44.448.074.892.860,00 atau 98,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp44.980.000.000.000,00. Tidak tercapainya target dikarenakan kurang optimalnya realisasi Pendapatan Pajak di antaranya disebabkan oleh menurunnya transaksi pengalihan hak yang berdampak pada penurunan pendapatan BPHTB;
- b. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp713.719.914.820,00 atau 110,18% dari target yang ditetapkan sebesar Rp647.749.998.376,00. Capaian pendapatan Retribusi yang melebihi target di antaranya disebabkan oleh peningkatan layanan kemudahan pembayaran retribusi dan peningkatan retribusi pada layanan MOD di BLUD bidang kesehatan;
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp653.700.898.761,00 atau 103,04% dari target yang ditetapkan sebesar Rp634.395.407.063,00. Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp107.831.648.774,00 dibandingkan tahun lalu; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp4.926.523.566.307,00 atau 117,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.204.598.994.964,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp303.826.334.804,00 dibandingkan dengan tahun lalu. Pendapatan lain-lain PAD yang sah melebihi target yang disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Bunga karena optimalisasi penempatan dalam investasi jangka pendek (deposito) dan kenaikan Pendapatan Bunga karena remunerasi atas Dana TDF.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.620.905.241.381,00 atau 90,93% dari target sebesar Rp23.776.426.806.863,00. Sisa yang tidak terealisasi dikarenakan faktor kebijakan pemerintah di mana penyaluran DAK Non Fisik



memperhitungkan sisa dana tahun yang lalu yang ada di Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp18.032.588.917.639,00 atau 89,76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp20.089.713.629.863,00;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp368.173.270.201,00 atau 99,94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp368.377.412.000,00;
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp3.176.052.836.541,00 atau 97,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.274.245.548.000,00; dan
- d. Insentif Fiskal Daerah sebesar Rp44.090.217.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp44.090.217.000,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.461.270.569.347,00 atau 7,25% dibandingkan Tahun 2023. Kenaikan ini disebabkan karena terdapat penyaluran *Treasury Deposit Facility* (TDF) ke Rekening Kas Umum Daerah di Tahun 2023.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 merupakan Pendapatan Hibah yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp589.167.782.024,00 atau 83,73% dari target sebesar Rp703.654.652.623,00. Pendapatan Hibah tidak mencapai target anggaran disebabkan adanya pergeseran pekerjaan proyek MRT Jakarta dan adanya selisih kurs pada saat perencanaan dengan realisasi. Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.176.986.038.430,00 atau 66,64% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp1.766.153.820.454,00.

3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.012.717.839.886,00 atau 92,09% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp76.023.113.210.933,00. Apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya tercatat Rp66.770.609.628.414,00, maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.242.108.211.472,00 atau 4,85%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa jenis belanja mengalami kenaikan di Tahun 2024 yaitu Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1.212.778.373.173,00 atau 6,75% dibanding Tahun Anggaran 2023, selain itu Belanja Gedung dan Bangunan yang mengalami kenaikan sebesar Rp731.955.110.045,00 atau 44,28% dibanding Tahun Anggaran 2023, dan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan juga



mengalami kenaikan sebesar Rp1.176.922.313.642,00 atau 30,98% dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer terdiri dari:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp58.623.935.516.823,00 atau 95,66% dari anggaran sebesar Rp61.283.505.927.677,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp19.190.554.701.043,00 atau 95,80% dari anggaran sebesar Rp20.031.780.182.216,00. Belanja Pegawai tidak tercapai secara optimal dikarenakan adanya perhitungan accres anggaran Belanja Pegawai, kekosongan jabatan struktural, dan CPNS yang belum aktif bekerja;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp26.572.367.215.305,00 atau 95,46% dari anggaran sebesar Rp27.835.321.117.883,00. Tidak optimalnya realisasi dikarenakan tidak terserapnya Belanja Jasa KKI dan PJLP, efisiensi Belanja TALL, dan Belanja Barang/Jasa di BLUD;
 - 3) Belanja Bunga sebesar Rp180.738.864.995,00 atau 97,17% dari anggaran sebesar Rp186.000.000.000,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Bunga disebabkan penyesuaian kurs pada saat pelaksanaan pembayaran bunga pinjaman MRT;
 - 4) Belanja Subsidi sebesar Rp5.875.837.590.937,00 atau 92,96% dari anggaran sebesar Rp6.320.798.085.601,00. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Subsidi terkait dengan Pemberian Subsidi untuk Pelayanan Transjakarta melalui PT. Transportasi Jakarta yang disesuaikan dengan hasil verifikasi;
 - 5) Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.307.808.095.906,00 atau 98,50% dari anggaran sebesar Rp3.358.144.887.494,00. Realisasi Belanja Hibah tidak mencapai 100% di antaranya disebabkan oleh sisa hibah kepada Penerima Hibah; dan
 - 6) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.496.629.048.637,00 atau 98,46% dari anggaran sebesar Rp3.551.461.654.483,00. Belanja Bantuan Sosial tidak terserap 100% di antaranya disebabkan oleh sisa anggaran Belanja Bantuan Sosial merupakan adanya mekanisme verifikasi yang lebih selektif dalam pencairan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
- b. Belanja Modal sebesar Rp11.004.785.255.543,00 atau 84,72% dari anggaran sebesar Rp12.989.055.827.469,00, terdiri dari:
 - 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp433.525.287.650,00 atau 56,79% dari anggaran sebesar Rp763.402.783.015,00;
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.961.717.289.383,00 atau 93,45% dari anggaran sebesar Rp3.169.221.270.721,00;
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.385.010.773.455,00 atau 69,30% dari anggaran sebesar Rp3.441.760.532.962,00;
 - 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp4.975.949.887.118,00 atau 92,96% dari anggaran sebesar Rp5.352.974.561.800,00



- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp119.496.671.697,00 atau 93,24% dari anggaran sebesar Rp128.157.171.217,00; dan
- 6) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp129.085.346.240,00 atau 96,66% dari anggaran sebesar Rp133.539.507.754,00.

Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal antara lain disebabkan oleh:

- 1) Adanya sisa anggaran atas pembayaran pengadaan tanah pada Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Perhubungan yang pembayarannya belum terlaksana karena terdapat tahapan untuk memenuhi persyaratan pengadaan yang masih dalam proses di BPN;
 - 2) Kurang optimalnya realisasi Belanja Peralatan dan Mesin disebabkan oleh adanya efisiensi pengadaan;
 - 3) Terdapat kegiatan yang belum terselesaikan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya pada Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan;
 - 4) Adanya efisiensi pada pembangunan waduk di Dinas Sumber Daya Air;
 - 5) Efisiensi hasil negosiasi harga dan penyesuaian kebutuhan satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan; dan
 - 6) Efisiensi pengadaan lisensi dan *franchise* pada UP Jakarta Smart City.
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp1.365.518.170.267,00. Tidak terserapnya Belanja Tidak Terduga disebabkan karena tidak ada kebutuhan yang bersifat darurat atau mendesak yang mengharuskan penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- d. Transfer atau Bantuan Keuangan sebesar Rp383.997.067.520,00 atau 99,73% dari anggaran sebesar Rp385.033.285.520,00.

3.1.3 Surplus

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.952.092.296.153,00 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.012.717.839.886,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami surplus sebesar Rp2.939.374.456.267,00 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

3.1.4 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.494.476.377.779,00. Rincian realisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.343.797.504.127,00 atau 91,11% dari anggaran sebesar Rp10.255.502.731.787,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:



- 1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 yang tercatat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.542.421.120.069,00 atau 100,00%;
 - 2) Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp2.801.304.537.758,00 atau 75,44%; dan
 - 3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp71.846.300,00.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.849.321.126.348,00 atau 85,51% dari anggaran sebesar Rp9.179.215.380.743,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp5.988.136.019.949,00 atau 81,83% dari anggaran sebesar Rp7.317.545.546.679,00; dan
 - 2) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp1.861.185.106.399,00 atau 99,97% dari target sebesar Rp1.861.669.834.064,00.

Tidak tercapainya pengeluaran pembiayaan daerah terdapat pada realisasi Penyertaan Modal Daerah (PMD), disebabkan oleh:

- 1) pergeseran pekerjaan proyek MRT Jakarta dan terdapat selisih kurs pada saat perencanaan dengan realisasi;
- 2) belum ditetapkannya Perda pembentukan BUMD PT JIEP sehingga PMD atas PT JIEP tidak terealisasi; dan
- 3) adanya kegiatan yang diusulkan akan didanai dari sumber pembiayaan lain pada Perumda Air Minum Jaya sehingga tidak terealisasi.

3.1.5 SiLPA

Berdasarkan data realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp4.433.850.834.046,00. Penjelasan lebih rinci atas komponen LRA disajikan dalam CaLK Bab 5.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Laporan keuangan yang disusun terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan



akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara *intern* dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan konsolidasi dari 753 Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku entitas akuntansi. Pada proses konsolidasi, dilakukan penggabungan 753 Laporan Keuangan entitas akuntansi menjadi 42 laporan keuangan entitas akuntansi penggabung sebagai berikut.

No.	Entitas Penggabung	Jumlah Entitas Akuntansi
1	Dinas Pendidikan	33
2	Dinas Kesehatan	88
3	Dinas Bina Marga	6
4	Dinas Sumber Daya Air	7
5	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	9
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	18
7	Satuan Polisi Pamong Praja	7
8	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	8
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
10	Dinas Sosial	30
11	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	16
12	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	10
13	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	13
14	Dinas Lingkungan Hidup	10
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9
16	Dinas Perhubungan	21
17	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	8
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	13
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7
20	Dinas Pemuda Dan Olahraga	12
21	Dinas Kebudayaan	14
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	7
23	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	11
24	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	8
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9
26	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	8
27	Badan Pengelolaan Aset Daerah	10
28	Badan Pendapatan Daerah	6
29	Badan Kepegawaian Daerah	7
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7
32	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah	10
33	Sekretariat DPRD	1
34	Inspektorat	7
35	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1
36	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	1
37	Kota Administrasi Jakarta Pusat	53
38	Kota Administrasi Jakarta Utara	38
39	Kota Administrasi Jakarta Barat	65
40	Kota Administrasi Jakarta Selatan	76



No.	Entitas Penggabung	Jumlah Entitas Akuntansi
41	Kota Administrasi Jakarta Timur	76
42	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	9
Jumlah		753

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi, walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian, atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
- Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
- Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas, penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan



- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Kelompok Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

- a. Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening operasional (d.h rekening penampungan);
- d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA; dan
- e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat:

- Terjadi pengeluaran dari RKUD;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA;
- Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada Peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- Dalam hal Belanja Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Pemerintah Pusat, belanja diakui dengan mengacu pada Peraturan perundangan yang mengatur mengenai penggunaan dan penatausahaan Dana BOS.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)	
1	Tanah		1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:		
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000	
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000	
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000	
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000	
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Alat-alat Kantor	750.000	
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000	



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
a.	Hewan	300.000
b.	Ternak	300.000
c.	Tumbuhan Pohon	300.000
d.	Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja non modal.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika pemeliharaan tersebut memenuhi seluruh kriteria huruf a dan b sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/Aset Tetap yang dipelihara:
 - 1) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) Bertambah volume, dan/atau
 - 4) Bertambah kapasitas produktivitas; dan
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/Aset Tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
-	Alat-alat Kantor	750.000
-	Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
a.	Hewan	300.000
b.	Ternak	300.000
c.	Tumbuhan Pohon	300.000
d.	Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pembayaran Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2025 adalah dalam hal pelaksanaan pekerjaan kontraktual tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan akan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengajuan wajib menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPKD, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan dilampiri:
 - 1) Fotokopi surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa yang telah dilegalisasi oleh PA/KPA;
 - 2) BAPP sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
 - 3) Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Daerah sesuai dengan Format 10 Lampiran II; dan
 - 4) Surat permintaan pencairan/Klaim Jaminan Pembayaran kepada Kepala SBPKD yang dibuat sesuai dengan Format 12 Lampiran II.
- b. Berdasarkan surat pemberitahuan, SBPKD melakukan klaim jaminan sesuai surat kuasa klaim pencairan jaminan dari PA/KPA sebesar prestasi pekerjaan yang belum terselesaikan atau sebesar termin pekerjaan yang belum terselesaikan;
- c. Dilakukan penyelesaian dengan mengacu ketentuan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.



- d. Dalam hal SKPD/Unit SKPD tidak menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPKD, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tahun anggaran berkenaan atau paling lambat tanggal 15 Januari 2025, maka dilakukan klaim jaminan oleh SBPKD berdasarkan surat kuasa klaim pencairan jaminan dari PA/KPA sebesar nilai jaminan.

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.4 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait; dan
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

- a. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan; dan
- b. Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk Pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.



Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima Pemerintah Daerah. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.5 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan Aset Tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu:
 - 1) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau



- 2) Konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
- c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban dalam BAS sebagai berikut:

- a. Beban operasi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain;
- b. Beban penyusutan dan amortisasi;
- c. Beban transfer;
- d. Beban tak terduga; dan
- e. Defisit non operasional.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin, dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam defisit non operasional, antara lain defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar dan defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang. Sedangkan, pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai Aset Tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.6 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum



dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalan mineral, minyak, dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal; dan
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non lancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.6.1 Aset Lancar

- a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - 1) Diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
 - 2) Berupa kas dan setara kas; dan
 - 3) Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.
- d. Penerimaan kas dibendahara penerimaan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam



bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Saldo kas di bendahara penerimaan harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

- e. Pengeluaran kas dibendahara pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Saldo kas di bendahara pengeluaran harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- f. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang Pemerintah Daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih Pemerintah Daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
 - 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 - a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
 - b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih; Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca;
 - c) Penyisihan Piutang Tak Tertagih bukan merupakan penghapusan piutang; Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan Peraturan yang berlaku; dan
 - d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
 - 2) Kualitas Piutang
 - a) Kualitas Piutang adalah perkiraan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.



- b) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.
- c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
 - 1. Menilai dan menentukan kualitas piutang; dan
 - 2. Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- d) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan;
- e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - 1. Kualitas lancar;
 - 2. Kualitas kurang lancar;
 - 3. Kualitas diragukan; dan
 - 4. Kualitas macet.
- f) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
 - 2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - 3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun; dan
 - 4. Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
- g) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - 1. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
 - 2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
 - 3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
 - 4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- h) Khusus untuk piutang transfer Pemerintah Pusat tidak dilakukan penggolongan kualitas piutang,
- i) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer antar daerah, dilakukan dengan ketentuan:



1. Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
 2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
 4. Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
- j) persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebagai berikut.

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)
1.	Lancar	0,5
2.	Kurang Lancar	10
3.	Diragukan	50
4.	Macet	100

- k) setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 2. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
 3. Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang tuntutan ganti kerugian daerah yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan;
 4. Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
 5. Informasi lainnya yang dianggap penting.
- g. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:
- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.



Persediaan dapat terdiri dari:

- 1) Barang konsumsi;
- 2) Amunisi;
- 3) Bahan untuk pemeliharaan;
- 4) Suku cadang;
- 5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- 6) Pita cukai;
- 7) Bahan baku;
- 8) Barang dalam proses/setengah jadi;
- 9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 10) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/ sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaan berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada di gudang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan jika potongan tersebut tercantum dalam bukti pembelian, jika tidak tercantum diakui sebagai pendapatan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual dan dinilai dengan menggunakan metode sistematis *FIFO*.

Persediaan juga mencakup Barang atau perlengkapan yang diperoleh selain dari Belanja persediaan, misalnya yang bersumber dari hibah dan reklasifikasi aset yang diperoleh dari Belanja modal yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai aset tetap.

Dalam hal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

- h. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemerintah Daerah



diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 (tiga) – 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergilir. Penilaian kualitas Investasi Non Permanen dana bergilir dilakukan berdasarkan umur Investasi Non Permanen dana bergilir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergilir ditetapkan sebesar:

- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergilir dengan kualitas lancar;
- b) 10% (sepuluh perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergilir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) 50% (lima puluh perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergilir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) 100% (seratus perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergilir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Metode penilaian Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya



perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Metode biaya diterapkan untuk:

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk saham, deposito, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), SPN, dan investasi jangka pendek lainnya; dan
2. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk obligasi, proyek pembangunan, surat utang jangka panjang, deposito jangka panjang, maupun investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.

b) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*); Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk Investasi Non Permanen berupa dana bergulir. Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap Investasi Non Permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terrealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi.

Pengukuran Investasi Non Permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai Investasi Non Permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai Investasi Non Permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi Non Permanen dapat dihapuskan jika Investasi Non Permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI



Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

- b) Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

- a) Metode Biaya (*cost method*)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.

- b) Metode Ekuitas (*equity method*)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laba/rugi Perusahaan

Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.



2. Penerimaan Dividen

Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham.

Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi Pemerintah Daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

4.3.6.2 Properti Investasi

- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
- c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh akan diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- f. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas



properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

- g. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
- h. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian.

4.3.6.3 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi Aset Tetap yang digunakan meliputi:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - a) Alat - alat berat;
 - b) Alat - alat angkutan;
 - c) Alat - alat bengkel dan alat ukur;
 - d) Alat - alat pertanian/peternakan;
 - e) Alat - alat kantor dan rumah tangga;
 - f) Alat - alat studio dan alat komunikasi;
 - g) Alat - alat kedokteran;
 - h) Alat - alat laboratorium;
 - i) Alat - alat keamanan; dan
 - j) Alat – alat olahraga.
 - 3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - a) Bangunan gedung; dan
 - b) Bangunan monumen.
 - 4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - a) Jalan dan jembatan;
 - b) Bangunan air/irigasi;
 - c) Instalasi; dan
 - d) Jaringan.
 - 5) Aset Tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - a) Buku dan perpustakaan;
 - b) Alat peraga pendidikan;



- c) Barang bercorak kesenian/kebudayaan;
- d) Hewan/ternak dan tumbuhan; dan
- e) Aset Tetap-renovasi.

6) Konstruksi dalam pengerjaan

c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- 2) Biaya perolehan Aset Tetap selain harga beli atau konstruksinya yang dapat diatribusikan langsung seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit Aset Tetap induk, maka di kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional ke masing-masing Aset Tetap induk;
- 3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
- 4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
- 5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;



- 6) Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
 - 7) Biaya perolehan Aset Tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
 - 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
 - 9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
 - 10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian; dan
 - 11) Biaya appraisal untuk pengadaan Aset Tetap tanah secara gabungan, namun tidak seluruh pengadaan tersebut terealisasi maka atas biaya appraisal tersebut dikapitalisasi ke aset yang pengadaannya terealisasi dan dialokasikan secara proporsional berdasarkan luasan aset tetap tanah tersebut.
- d. Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomtabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai Aset Tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).
- e. Jika suatu belanja modal/Aset Tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam CaLK.



4.3.6.4 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta Aset Tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - 1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - 2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - 3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
 - 4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.
- d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:



- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan;
- 5) Uang Jaminan/Retensi; dan
- 6) KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

4.3.6.5 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
- b. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- c. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap.

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
2.10	Alat Olahraga	5
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20



No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	Tidak Disusutkan
	b. Ternak	Tidak Disusutkan
	c. Tumbuhan Pohon	Tidak Disusutkan
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan
5.5	Aset Tetap - renovasi	Masa kerja sama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

- d. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomi mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- e. Penyusutan atas Aset Tetap mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.
- f. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- g. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (*Aset Idle*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- h. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset Tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut.

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ <i>Overhaul</i> dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Olahraga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

4.3.6.6 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- Aset Tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;



- b. Apabila Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi Aset Tetap, maka harus dipindahkan ke pos Aset Lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat;
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh;
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan;
- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara; dan
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluwarsa dihapus.

4.3.6.7 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
 - 1) Tagihan Jangka Panjang;
 - 2) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - 3) Aset tidak berwujud; dan
 - 4) Aset Lain-lain.
- b. Tagihan Jangka Panjang merupakan jumlah tagihan yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima/dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran. Antara lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- d. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

TP merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum



yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Atas TGR yang belum diterbitkan SKP2K dapat diakui sepanjang sudah terdapat kata sepakat antara pemeriksa auditor internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK) dengan pihak terperiksa dan hasil temuan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sudah teregister, TGR tersebut dicatat pada kelompok aset lainnya.

- e. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerja sama pemanfaatan (KSP).
- f. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- g. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- h. Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerja sama.
- i. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.



- j. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.
- k. Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.
- l. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Tidak Berwujud. Termasuk di dalam Aset Lain-lain di antaranya Aset Rusak Berat/Usang, Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah, Aset Tetap - Fasos Fasum, Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB), Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya, dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
- m. Kewajiban Penyerahan Fasos Fasum.
Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos-Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos-Fasum merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan. Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan PPK-Fasos-Fasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang menyerahkan fasos-fasum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.
Piutang Fasos-Fasum dan Pendapatan Fasos Fasum - LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.



Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau nilai Fasos-Fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan PPK-Fasos-Fasum dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat disajikan informasi antara lain:

- 1) Jumlah keseluruhan Izin yang diterbitkan (jumlah Izin Pemanfaatan Ruang keseluruhan);
- 2) Jumlah lokasi wilayah dan luas lahan kewajiban;
- 3) Jumlah izin yang telah dilakukan BAST;
- 4) Jumlah sisa kewajiban yang belum dilakukan BAST; dan
- 5) Informasi pendukung lainnya.

Fasos-fasum yang telah diterima dari kewajiban pengembang dicatat sebagai aset fasos fasum dan sekaligus diakui sebagai pendapatan LO berkenaan pada saat berita acara serah terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah serta diungkapkan secara memadai. Aset Fasos Fasum dicatat sebagai Aset Tetap/aset berkenaan pada saat BAST/SK Gubernur kepada SKPD Pengguna telah diterbitkan.

Aset Tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, fasom fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum. Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban fasos fasum serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai. Aset Fasos Fasum selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Dalam rangka pencatatan secara ekstrakomptabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang yang belum diserahkan.

Perolehan Aset Tetap sebagai pemenuhan kewajiban fasos fasum diperlakukan sebagai pendapatan operasional dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.



n. Konversi Kewajiban SP3L dalam Bentuk Penyetoran Dana.

Dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS) dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas konversi kewajiban SP3L dalam bentuk penyetoran dana.

Sanksi SP3L untuk membangun/menyediakan Rumah Susun Murah (RSM) yang dikonversi dalam bentuk penyetoran dana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai Pendapatan Sanksi SP3L – LO dan Piutang Sanksi SP3L sebesar jumlah yang tercantum dalam dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS).

Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang menjadi bagian dari Lain-lain PAD yang sah dan diakui saat Sanksi tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Piutang atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang berkurang saat diterimanya pembayaran. Pendapatan Sanksi SP3L – LO, Piutang Sanksi SP3L, dan Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

o. Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (PPK-KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK-KLB dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan KLB.

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK- KLB merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan KLB yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kompensasi KLB diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang sah – LO dan Piutang KLB sebesar jumlah yang tercantum dalam PPK- KLB.

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan KLB disajikan dalam neraca untuk dapat mengetahui nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan KLB dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan KLB dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam BAST.

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLB serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai.

Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.



Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO, Piutang Kompensasi KLB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KLB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

p. Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Surat ketetapan pengenaan denda atas pelampauan KDB/dokumen lainnya yang sah yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan lahan pengganti dan/aset lainnya dapat dijadikan sebagai sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan KDB.

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang kompensasi pelampauan KDB dan Pendapatan kompensasi pelampauan KDB - LO diakui dan dicatat dalam Neraca saat nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah.

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan KDB dalam bentuk aset lahan tanah dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan KDB dan menambah aset lahan tanah sebesar jumlah yang tercantum dalam BAST, Jika terdapat beda nilai antara pengakuan piutang awal dengan nilai saat serah terima maka diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang Sah – LO.

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KDB serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KDB – LO, Piutang Kompensasi KDB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KDB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

q. Pemenuhan Kewajiban Lainnya oleh Pihak Ketiga

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Lainnya, selanjutnya disebut PPK-Lainnya merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan uang dan/atau aset kepada Pemerintah Provinsi DKI



Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemenuhan kewajiban lainnya (PPK-Lainnya), seperti kewajiban kontribusi reklamasi dan tambahan kewajiban kontribusi reklamasi dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang atas pemenuhan kewajiban lainnya dan pendapatan lainnya LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam PPK-Lainnya dan/atau dokumen lainnya yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. dokumen PPK-Lainnya atau dokumen lainnya yang sah dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstra komtabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- r. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam BAST. Pengakuan Aset Tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang dan Pendapatan Lain-lain yang sah-LO. Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

4.3.6.8 Amortisasi Aset

- a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
- b. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai Tabel Amortisasi Aset Tak Berwujud berikut ini.

Uraian	Masa Manfaat
Software Komputer	5
Lisensi	10
Franchise	5
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
Hak Paten Sederhana	10
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan	50
Hak Ekonomi Prosedur Fonogram	50
Hak ekonomi Lembaga Penyiaran	20
Paten Biasa	20



Uraian	Masa Manfaat
Merek	10
Desain Industri	10
Rahasia Dagang	10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Peta RBI Skala Kecil (1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000)	20
Peta BRI Skala Menengah (1:100.000, 1:50.000, 1:25.000)	10
Peta RBI Skala Besar (1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, 1:1.000)	5
Peta LLN Skala Kecil (1:500.000, 1:250.000)	20
Peta LLN Skala Menengah (1:50.000)	12
Peta LPI Skala Kecil (1:250.000)	20
Peta LPI Skala Menengah (1:50.000, 1:25.000)	12
Peta LPI Skala Besar (1:10.000)	5
Peta Batas Wilayah Administrasi	10
Peta Delineasi Batas Wilayah Administrasi	5
Peta Batas Negara	10
Data Pasang Surut	20
Data GNSS	20
Data Gaya berat	20
Data Pengukuran Sifat Datar Teliti	10
Citra Satelit Resolusi Tinggi (4 meter atau lebih halus)	5
Citra Satelit Resolusi Sedang (lebih kasar dari 4 meter)	10
Foto Udara	5
Peta Tematik Morfometri	5
Peta Tematik Penutup Lahan	5
Peta Tematik Sistem Lahan	5
Peta Tematik Lainnya	5
Atlas	10

- c. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat Aset Tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- d. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.



4.3.6.9 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau Peraturan Perundang-undangan.
- d. Kewajiban Pemerintah Daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
 - a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan
 - b) Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima di muka, utang kepada pegawai, dan Kewajiban jangka pendek lainnya. Misalnya, Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi; Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang
 - a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
 - b) Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya;



- c) Utang Luar Negeri Pemerintah Daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan.
- e. Pengukuran Kewajiban
 - 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pertama kali transaksi berlangsung; Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut;
 - 2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong, tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan; Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong; Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain; Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
 - 3) Utang Bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi, tetapi belum dibayar oleh pemerintah; Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak;
 - 4) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
 - 5) Pendapatan Diterima di Muka dicatat sebesar kas yang telah diterima, tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang / jasa belum diserahkan oleh pemerintah;
 - 6) Utang Belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca; Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan, 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon, tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan;



- 7) Utang Jangka Pendek Lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun; Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya, utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer;
 - 8) Utang Jaminan dicatat sebesar kas yang disepakati oleh Pihak Ketiga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 9) Utang Dalam Negeri (utang yang diperoleh dari dalam negeri) merupakan komitmen maksimum atas jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- f. Kewajiban kontingensi merupakan:
- 1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti, dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa mendatang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
 - 2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) bahwa Pemerintah Daerah akan mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

4.3.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas dalam Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2) Perubahan nilai Aset Tetap akibat revaluasi Aset Tetap.
- c. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
- d. Ekuitas Akhir.



4.3.8 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dan dijabarkan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 menggunakan basis akrual yang mengacu pada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, tetapi telah diupayakan untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan Peraturan Perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya, semua pencatatan "*auditable*", sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp74.946.825.859.889,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp72.952.092.296.153,00 atau 97,34%.

Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.886.558.088.431,00 atau 2,65% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp71.065.534.207.722,00.

Realisasi Pendapatan Daerah (PD) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp50.742.019.272.748,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp21.620.905.241.381,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp589.167.782.024,00. Rincian realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=(4:3)	6
1	Pendapatan Asli Daerah	50.466.744.400.403	50.742.019.272.748	100,55	49.139.745.715.234
2	Pendapatan Transfer	23.776.426.806.863	21.620.905.241.381	90,93	20.159.634.672.034
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	703.654.652.623	589.167.782.024	83,73	1.766.153.820.454
Jumlah		74.946.825.859.889	72.952.092.296.153	97,34	71.065.534.207.722

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta



Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp50.466.744.400.403,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2024 sebesar Rp50.742.019.272.748,00 atau 100,55%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun 2024 terdiri atas realisasi Pajak Daerah sebesar Rp44.448.074.892.860,00 atau 98,82%, realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp713.719.914.820,00 atau 110,18%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp653.700.898.761,00 atau 103,04%, dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp4.926.523.566.307,00 atau 117,17%. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

5.1.1.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diturunkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp44.448.074.892.860,00 atau 98,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp44.980.000.000.000,00. Rincian realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.409.750.000.000	9.650.927.358.671	102,56	9.416.563.568.950
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.250.000.000.000	6.644.445.800.800	106,31	6.643.605.545.100
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.700.000.000.000	1.795.757.431.976	105,63	1.680.813.642.600
4	Pajak Rokok	900.000.000.000	883.986.065.225	98,22	855.303.949.037
5	Pajak Reklame	700.000.000.000	961.372.732.703	137,34	975.808.842.214
6	Pajak Air Tanah	90.000.000.000	87.684.846.585	97,43	83.718.755.701
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000.000.000	9.954.931.380.113	99,55	9.048.682.494.705
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.000.000.000.000	6.159.796.789.591	77,00	6.910.215.589.931
9	Pajak Alat Berat	250.000.000	5.978.000	2,39	0
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	7.930.000.000.000	8.309.166.509.196	104,78	7.901.769.284.595
10.1	Pajak Hotel (1 – 4 Jan 2024)	29.875.332.000	372.067.855	1,25	1.898.844.468.744



No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6
10.2	Pajak Restoran (1 – 4 Jan 2024)	66.389.332.000	2.227.532.305	3,36	3.949.482.690.461
10.3	Pajak Hiburan (1 – 4 Jan 2024)	10.695.498.000	308.732.635	2,89	686.623.192.014
10.4	Pajak Penerangan Jalan (1 – 4 Jan 2024)	14.938.000.000	0	0	889.487.806.146
10.5	Pajak Parkir (1 – 4 Jan 2024)	8.714.000.000	65.531.100	0,75	477.331.127.230
10.6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) (5 Jan - 31 Desember 2024)	7.799.387.838.000	8.306.192.645.301	106,50	0
	JUMLAH (1 s.d 10)	44.980.000.000.000	44.448.074.892.860	98.82	43.516.481.672.833

Penjelasan mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor, Subjek PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor sedangkan Wajib PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan secara progresif sebesar: 2% (dua persen) untuk kendaraan bermotor pertama, 2,5% (dua koma lima persen) untuk kendaraan bermotor kedua, 3% (tiga persen) untuk kendaraan bermotor ketiga dan seterusnya meningkat sebesar 0,5% sampai dengan kendaraan ke tujuh belas dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen). Untuk kendaraan ke delapan belas dan selanjutnya menggunakan tarif 10%. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dan tidak dikenakan pajak progresif.



Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp9.650.927.358.671,00 atau 102,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.409.750.000.000,00. Dengan demikian realisasi PKB Tahun Anggaran 2024 telah melampaui target sebesar Rp241.177.358.671,00 atau 2,56%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp234.363.789.721,00 atau 2,49% jika dibandingkan dengan realisasi PKB Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.416.563.568.950,00. Rincian Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.3
Rincian Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun Anggaran 2024

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	816.007.000.000	854.613.915.200	104,73
2	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	1.579.841.000.000	1.606.987.139.700	101,72
3	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	5.060.722.000.000	5.190.269.253.336	102,56
4	PKB-Mobil Bus-Microbus	61.608.000.000	70.242.352.150	114,01
5	PKB-Mobil Bus-Bus	7.626.000.000	7.266.646.100	95,29
6	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	215.465.000.000	227.580.424.300	105,62
7	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truk	73.467.000.000	72.912.772.400	99,25
8	PKB-Mobil Barang/Beban-Truk	34.109.000.000	39.312.507.600	115,26
9	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	283.585.000.000	276.915.072.425	97,65
10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	985.346.000.000	1.004.515.751.260	101,95
11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1.605.000.000	1.520.748.000	94,75
12	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	40.000.000	0	0
13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	290.129.000.000	298.790.776.200	102,99
14	PKB-Mobil Roda Tiga	40.000.000	0	0
15	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga	40.000.000	0	0
16	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga	40.000.000	0	0
17	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box	40.000.000	0	0
18	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang	40.000.000	0	0
	JUMLAH	9.409.750.000.000	9.650.927.358.671	102,56

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Tahun Anggaran 2024, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024:

- 1) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 426 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- 2) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0098 Tahun 2024 tentang penghapusan sanksi



administrasi secara jabatan untuk jenis PKB dan BBNKB penyerahan pertama sebagai salah satu upaya optimalisasi penerimaan PKB di penghujung Tahun 2024;

- 3) *Monitoring* dan evaluasi secara berkala atas capaian penerimaan PKB pada seluruh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPPPKB);
- 4) Pelaksanaan kegiatan Razia Gabungan dengan mengikutsertakan peran serta Media Massa/Media Sosial secara masif;
- 5) Sosialisasi secara masif terkait penggunaan aplikasi SIGNAL dan pembayaran pajak menggunakan teknologi QRIS bagi seluruh Wajib Pajak;
- 6) Mengusulkan inovasi pelayanan pembayaran SKP secara *online* sebagai salah satu pengembangan sistem PKB dan BBNKB DKI Jakarta; dan
- 7) Penambahan sarana pembayaran PKB dan BBNKB, melalui pembukaan gerai samsat baru pada beberapa tempat di Jakarta.

Walaupun realisasi PKB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, bahwa Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB, selanjutnya bersamaan dengan pertumbuhan penjualan dan kepemilikan kendaraan Listrik yang mendapatkan serangkaian insentif fiskal dari Pemerintah Pusat dan Daerah, turut mempengaruhi laju realisasi penerimaan PKB secara agregat dan jangka panjang; dan
- b. Mengacu pada data Gabungan Industri kendaraan bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan *wholesales* (pabrik ke dealer) kendaraan bermotor secara nasional mengalami penurunan hingga 13,9% secara *year on year* (YoY) sepanjang Tahun 2024 kemudian pada periode yang sama, penjualan retail (dealer ke konsumen) kendaraan bermotor nasional juga menyusut 8,4% secara *year on year* (YoY).

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan bermotor adalah semua



kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor sedangkan Wajib BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen). Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.

Realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.644.445.800.800,00 atau 106,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.250.000.000.000,00, dengan demikian realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2024 telah melampaui target sebesar Rp394.445.800.800,00 atau 5,94%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp840.255.700,00 atau 0,01% jika dibandingkan dengan realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.643.605.545.100,00. Rincian BBNKB Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.4
Rincian BBNKB Tahun Anggaran 2024

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	320.973.000.000	356.853.073.800	111.18
2	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	1.032.265.000.000	1.030.476.624.200	99.83
3	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	3.522.116.000.000	3.771.599.264.800	107.08
4	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	57.430.000.000	78.982.254.500	137.53
5	BBNKB-Mobil Bus-Bus	6.104.000.000	7.093.414.000	116.21
6	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	223.979.000.000	254.618.152.000	113.68
7	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truk	17.025.000.000	18.764.822.500	110.22
8	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truk	15.169.000.000	19.726.036.800	130.04
9	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	97.246.000.000	103.841.900.500	106.78
10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	641.951.000.000	658.585.493.600	102.59
11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	2.128.000.000	1.562.077.100	73.41
12	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	10.000.000	0	0



No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
13	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	313.554.000.000	342.342.687.000	109.18
14	BBNKB-Mobil Roda Tiga	10.000.000	0	0
15	BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga	10.000.000	0	0
16	BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga	10.000.000	0	0
17	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box	10.000.000	0	0
18	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang	10.000.000	0	0
JUMLAH		6.250.000.000.000	6.644.445.800.800	106,31

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Tahun Anggaran 2024, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024 antara lain:

- 1) Proses percepatan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai dasar *APM, Dealer, Leasing* untuk menerbitkan faktur pajak, menjadi hal yang patut untuk tetap dipertahankan;
- 2) Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024 tentang Insentif Pajak Daerah berupa Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebagai upaya tertib administrasi identitas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor;
- 3) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 426 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 4) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0098 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama; dan
- 5) Mensosialisasikan secara masif penggunaan aplikasi SIGNAL dan pembayaran pajak menggunakan teknologi QRIS bagi seluruh Wajib Pajak.

Walaupun realisasi Pajak BBNKB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) belum pulihnya daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor baru yang disebabkan oleh kecenderungan masyarakat masih



memprioritaskan pada kebutuhan dasar, perlambatan ekonomi nasional dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada akhir 2023; dan

- 2) asumsi *Loss Potency* penerimaan BBNKB yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan kendaraan Listrik yang mendapatkan insentif fiskal mengacu pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 mengamanatkan Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai ditetapkan 0% dari DPP PKB dan DPP BBNKB.

c. **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

Objek PBBKB merupakan penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor, Subjek PBBKB merupakan konsumen BBKB sedangkan Wajib PBBKB merupakan orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.

Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Dasar Pengenaan PBBKB merupakan nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Realisasi PBBKB Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.795.757.431.976,00 atau 105,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.700.000.000.000,00, dengan demikian realisasi PBBKB melampaui target sebesar Rp95.757.431.976,00 atau 5,63%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp114.943.789.376,00 atau 6,84% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.680.813.642.600,00. Rincian PBBKB Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.5

Rincian PBBKB Tahun Anggaran 2024

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PBBKB Bahan Bakar Bensin	1.699.970.000.000	1.795.757.431.976	105,63
2	PBBKB Bahan Bakar Solar	10.000.000	0	0
3	PBBKB Bahan Bakar Gas	10.000.000	0	0
4	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	10.000.000	0	0
JUMLAH		1.700.000.000.000	1.795.757.431.976	105,63



Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Tahun Anggaran 2024, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai salah satu optimalisasi Penerimaan PBBKB di Tahun 2024;
- 2) Ekstensifikasi melalui pendataan Perusahaan Niaga Bahan Bakar Minyak/BBM/Hasil Olahan, khususnya terhadap perusahaan yang telah memiliki IUNU;
- 3) Memaksimalkan pelaporan wajib pajak secara *online* (pajak *online*), khususnya terhadap badan usaha dengan kontribusi penerimaan PBBKB terbesar;
- 4) Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan BPH Migas Kementerian ESDM dalam rangka penelusuran data pembanding terkait dengan jumlah volume pendistribusian BBM di DKI Jakarta; dan
- 5) Penyampaian himbauan kepada para WP PBBKB untuk menyampaikan laporan secara baik dan benar.

Walaupun realisasi PBBKB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Peralihan penggunaan bahan bakar minyak ke penggunaan tenaga listrik sebagai penggerak kendaraan bermotor menjadi tantangan dalam pemungutan PBBKB; dan
- 2) Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bahan Bakar Minyak untuk keperluan industri merupakan salah satu objek pengecualian pemungutan PBBKB sehingga hal tersebut menjadi *loss potency* terhadap penerimaan PBBKB.

d. **Pajak Rokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak



Rokok merupakan jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia.

Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan disetorkan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Kas Negara serta dilakukan pengelolaan penyetoran ke RKUD Provinsi oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI. Pembayaran Pajak Rokok ditetapkan Melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, setiap tahun ditetapkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi/Daerah berdasarkan proporsi jumlah penduduk per Provinsi/Daerah.

Realisasi Pajak Rokok Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp883.986.065.225,00 atau 98,22% dari target yang ditetapkan sebesar Rp900.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Rokok tidak mencapai target sebesar Rp16.013.934.775,00 atau 1,87%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.682.116.188,00 atau 3,35% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp855.303.949.037,00.

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Rokok di Tahun Anggaran 2024, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan pembuatan Surat Kuasa Gubernur dan berkas penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi, Kesepakatan dan Kompilasi Kesepakatan Kontribusi daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2023; dan
- 2) Koordinasi intensif sehingga transfer pajak rokok dan validasi penerimaan pajak rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap triwulan dapat direalisasikan tepat waktu.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pajak rokok Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- 1) Sulitnya mendapatkan data riil pemungutan pajak rokok yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
- 2) Turunnya daya beli dan keinginan masyarakat terhadap rokok, sebagai dampak dari pola hidup masyarakat untuk hidup sehat dan harga rokok yang secara perlahan mulai naik.



e. **Pajak Reklame**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Objek Pajak Reklame meliputi: reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/*slide*; dan reklame peragaan.

Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Sedangkan Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp961.372.732.703,00 atau 137,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp700.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Reklame melebihi target sebesar Rp261.372.732.703,00 atau 37,34%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.436.109.511,00 atau 1,48% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp975.808.842.214,00.

Rincian Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.6

Rincian Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	635.506.000.000	879.783.519.210	138,44
2	Pajak Reklame Kain	30.222.000.000	42.247.958.840	139,79
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	258.000.000	283.660.000	109,95
4	Pajak Reklame Selebaran	98.000.000	67.109.375	68,48
5	Pajak Reklame Berjalan	31.765.000.000	36.199.448.028	113,96
6	Pajak Reklame Udara	104.000.000	130.825.000	125,79
7	Pajak Reklame Apung	10.000.000	0	0,00
8	Pajak Reklame Suara	10.000.000	0	0,00
9	Pajak Reklame Film/Slide	1.770.000.000	2.237.319.500	126,40
10	Pajak Reklame Peragaan	257.000.000	422.892.750	164,55
JUMLAH		700.000.000.000	961.372.732.703	137,34



Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Reklame di Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Penerbitan aturan turunan sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024;
- 2) Penagihan untuk piutang SKPD pajak reklame yang terbit sejak 01 Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- 3) Ekstensifikasi melalui pendataan reklame perkantoran, insidental dan reklame berjalan pada kendaraan;
- 4) Penyampaian himbauan reklame yang belum daftar ulang (BDU) kelompok tertentu;
- 5) Simplifikasi persyaratan pendaftaran/perpanjangan reklame guna mendorong Wajib Pajak melakukan pendaftaran dan perpanjangan secara daring melalui pajakonline.jakarta.go.id;
- 6) Simplifikasi persyaratan, prosedur penetapan dan pembatalan Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame guna mendorong pertumbuhan Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Bapenda Nomor 1588 Tahun 2023;
- 7) Pengimplementasian sistem e-Reklame pada tanggal 01 Mei 2024 guna mendorong digitalisasi pelayanan pemungutan pajak reklame;
- 8) Sosialisasi dan penyamaan persepsi tentang pengenaan pajak reklame kepada *stakeholders* atas reklame pengenalan usaha; reklame dalam ruang; hingga dan penyelenggaraan reklame kegiatan politik; dan
- 9) Melakukan penambahan dan/atau perubahan nama jalan reklame yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2020.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pajak reklame Tahun Anggaran 2024 antara lain kecenderungan penyelenggara reklame memilih media sosial sebagai sarana penyelenggaraan/penayangan reklame/iklan, dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

f. **Pajak Air Tanah (PAT)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan



pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sedangkan Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah sedangkan Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp87.684.846.585,00 atau 97,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp90.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Air Tanah tidak mencapai target sebesar Rp2.315.153.415,00 atau 2,57%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.966.090.884,00 atau 4,74% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pemanfaatan Air Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp83.718.755.701,00.

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Tahun Anggaran 2024, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) ekstensifikasi melalui pendataan dan pengukuhan wajib pajak yang bergerak di sektor bisnis dan komersial seperti hotel, restoran besar, dan perkantoran;
- 2) koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk percepatan pengklasifikasian (*mapping*) objek maupun penyesuaian ulang data/klasifikasi ulang objek pajak berdasarkan Pergub No. 94 Tahun 2021;
- 3) penagihan atas piutang SKPD Pajak Air Tanah khususnya SKPD yang terbit sejak 01 Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- 4) verifikasi objek yang telah dilakukan pengklasifikasian objek atas jenis perusahaan dan kualitas air oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta guna mengidentifikasi objek aktif, tidak aktif, tutup, tidak ditemukan dan keadaan objek lainnya; dan
- 5) pemutakhiran data wajib pajak dengan memasukkan *email* wajib pajak untuk percepatan penyampaian SKPD secara elektronik.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2024, antara lain:

- 1) adanya Wajib Pajak yang hanya menggunakan air tanah sebagai cadangan, apabila air perpipaan mati/tidak stabil, sehingga penggunaan/pemanfaatan atas air tanah seminimal mungkin yang mempengaruhi nilai ketetapan pajaknya; dan



- 2) adanya pembatasan penggunaan/pemanfaatan air tanah oleh Wajib Pajak, karena buruknya kualitas air tanah, terutama terhadap objek air tanah yang berada di lokasi dekat dengan daerah pesisir pantai/laut.

g. **Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBBP2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Objek PBBP2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Objek PBBP2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, Subjek PBBP2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan sedangkan Wajib PBBP2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBBP2 dan ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tarif PBBP2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Sementara untuk tarif PBBP2 lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).

Realisasi PBBP2 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.954.931.380.113,00 atau 99,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp906.248.885.408,00 atau 10,02% jika dibandingkan dengan realisasi PBBP2 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.048.682.494.705,00.

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan PBBP2 di Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah



melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Penerbitan aturan turunan sebagai amanat dari Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 yang di dalamnya memuat kebijakan penetapan, pembayaran, dan juga memuat insentif fiskal berupa keringanan, pengurangan, pembebasan untuk PBBP2 Tahun 2024 dan tahun-tahun pajak sebelumnya.
- 2) Penagihan pasif dan penagihan aktif PBBP2 yang terdiri dari upaya penagihan sebagai berikut:
 - a) himbauan terhadap Wajib Pajak dengan ketetapan pajak per tahun sebesar 100 juta ke atas untuk melakukan permohonan PBBP2 secara angsuran berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023;
 - b) pemberian teguran terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran s.d 31 Desember 2024 dengan pelibatan Lurah, Camat, Walikota/Bupati di kota administrasi; dan
 - c) penagihan aktif dengan surat paksa dan penagihan melibatkan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- 3) Penambahan kanal dan metode pembayaran PBBP2 untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran secara digital seperti melalui QRIS.
- 4) Pemutakhiran data PBBP2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah melalui Sistem Informasi Geospasial.
- 5) Simplifikasi dan digitalisasi pelayanan pengurangan dan pembebasan PBBP2 yang diajukan secara daring melalui kanal pajakonline.jakarta.go.id.
- 6) Pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pendataan NIK dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek PBBP2 oleh petugas Kelurahan guna mendapatkan data narahubung Wajib PBBP2.

Dalam pelaksanaan pemungutan PBBP2 di Tahun 2024, terdapat kendala yang menghambat pencapaian. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan PBBP2 disebabkan adanya penurunan kemampuan ekonomi untuk Badan dan Orang Pribadi yang mengalami kesulitan melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran PBBP2.



h. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang meliputi: a. pemindahan hak karena: jual beli; tukar-menukar; hibah; hibah wasiat; waris; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; penggabungan usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; atau hadiah. b. pemberian hak baru karena: kelanjutan pelepasan hak; atau di luar pelepasan hak.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB (setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak) dengan tarif BPHTB.

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.159.796.786.591,00 atau 77,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp750.418.800.340,00 atau 10,86% jika dibandingkan dengan realisasi PBBP2 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.910.215.589.931,00.

Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.7

Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2024

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BPHTB-Pemindahan Hak	7.999.990.000.000	6.159.796.789.591	77,00
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru	10.000.000	0	0,00
JUMLAH		8.000.000.000.000	6.159.796.789.591	77,00



Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan BPHTB di Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024 antara lain sebagai berikut, antara lain:

- 1) penerbitan aturan turunan sebagai amanat dari Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 terkait implementasi perubahan NPOPTKP dan pengecualian BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- 2) pengembangan sistem BPHTB secara elektronik (e-BPHTB) sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelaporan, Pelayanan, dan Pengawasan BPHTB secara Elektronik untuk efisiensi dan efektivitas pemungutan BPHTB;
- 3) penetapan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembebasan BPHTB terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai Perolehan Objek Pajak sampai dengan Nilai Tertentu yang berkontribusi atas penerimaan BPHTB dari objek non-tapak;
- 4) penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemecahan SPPT PBBP2 atas Satuan Rumah Susun untuk mendorong percepatan penerimaan BPHTB sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh hak-hak pertanahannya; dan
- 5) kemudahan pelaporan BPHTB yang dilakukan oleh WNA berdasarkan dokumen keimigrasian berupa KITAP atau paspor.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target BPHTB Tahun Anggaran 2024, antara lain:

- 1) Adanya penurunan penjualan properti di wilayah DKI Jakarta Tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya;
- 2) Adanya kenaikan pemberian insentif pembebasan BPHTB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023, Pembebasan BPHTB berlaku untuk objek Perolehan Hak Pertama Kali berupa Rumah Tapak dengan NPOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang tidak mensyaratkan Wajib Pajak harus berdomisili di DKI Jakarta paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Daerah atau Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang (berbeda dengan Peraturan Gubernur Sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2017); dan
- 3) Adanya perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 sebagai



amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang sebelumnya sebesar Rp80.000.000 untuk transaksi jual beli dan Rp350.000.000 untuk transaksi waris dan hibah wasiat menjadi Rp250.000.000,00 untuk transaksi jual beli dan Rp1.000.000.000 untuk transaksi waris dan hibah wasiat.

i. **Pajak Alat Berat**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Alat Berat (PAB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan kehutanan, dan pertambangan.

Dasar pengenaan Pajak Alat Berat merupakan nilai jual alat berat yang ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum alat berat yang bersangkutan. Tarif Pajak Alat Berat yang ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Realisasi Pajak Alat Berat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.978.000,00 atau 2,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00, dengan demikian realisasi PAB tidak mencapai target sebesar Rp244.022.000,00 atau 97,61%. Realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, karena PAB baru di berlakukan pada Tahun 2024.

j. **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan dalam nomenklatur nama untuk beberapa jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir menjadi pajak atas barang dan jasa tertentu. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) **Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur nama jenis pajak dari Pajak Hotel menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan. Perubahan ini berlaku sejak 5 Januari 2024. Untuk periode 1 hingga 4 Januari 2024, nomenklatur nama yang digunakan masih Pajak Hotel dengan realisasi penerimaan sebesar Rp372.067.855,00, atau 1,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp29.875.332.000,00



2) Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur nama jenis pajak dari Pajak Restoran menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Makan dan/atau Minuman. Perubahan ini berlaku sejak 5 Januari 2024. Untuk periode 1 hingga 4 Januari 2024, nomenklatur nama yang digunakan masih Pajak Restoran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp2.227.532.305,00 atau 3,36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp66.389.332.000,00.

3) Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, Pajak Hiburan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang berlaku sejak 5 Januari 2024. Selain perubahan nomenklatur, tarif pajak juga mengalami penyesuaian dari 25% menjadi paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa. Untuk periode 1 hingga 4 Januari 2024, nomenklatur yang digunakan masih Pajak Hiburan dengan realisasi sebesar Rp308.732.635,00 atau 2,89% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.695.498.000,00.

4) Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur nama jenis pajak dari Pajak Penerangan Jalan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Tenaga Listrik. Perubahan ini berlaku sejak 5 Januari 2024. Untuk periode 1 hingga 4 Januari 2024, nomenklatur nama yang digunakan masih Pajak Penerangan Jalan dan tidak terdapat realisasi penerimaan dari target sebesar Rp14.938.000.000,00 dikarenakan jatuh tempo pembayaran terjadi pada tanggal 15 bulan berikutnya. Pajak Penerangan Jalan hanya memiliki satu Wajib Pajak, yaitu PT PLN.

5) Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur nama jenis pajak dari Pajak Parkir menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perparkiran. Perubahan ini berlaku sejak 5 Januari 2024. Selain perubahan nomenklatur, tarif pajak juga mengalami penyesuaian dari 20% menjadi 10%. Untuk periode 1 hingga 4 Januari 2024, nomenklatur nama yang digunakan masih Pajak Parkir dengan realisasi penerimaan sebesar Rp65.531.100,00, atau 0,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.714.000.000,00.



6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Periode 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disebut PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu dikenakan atas penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a) Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran; Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran;
- b) Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik;
- c) Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya;
- d) Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor; dan
- e) Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Sementara untuk Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu sedangkan Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar,



dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen), konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.306.192.645.301,00 atau 106,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.799.387.838.000,00.

Rincian penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.8

Rincian penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Tahun Anggaran 2024

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PBJT-Makanan dan Minuman	4.133.610.668.000	4.277.305.948.355	103,48
2	PBJT-Tenaga Listrik	885.062.000.000	950.005.521.197	107,34
3	PBJT-Jasa Perhotelan	1.870.124.668.000	2.123.857.788.041	113,57
4	PBJT-Jasa Parkir	321.286.000.000	330.258.787.242	102,79
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	589.304.502.000	624.764.600.466	106,02
JUMLAH		7.799.387.838.000	8.306.192.645.301	106,50

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) *Monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap Wajib yang Pajak tidak melakukan setoran masa dan tidak melakukan pelaporan SPTPD;
- 2) Kegiatan *monitoring* dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- 3) Implementasi Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Analisa Setoran Masa Pajak;
- 4) Pengimplementasian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hotel yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT), termasuk pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi secara pemeriksaan secara berkala untuk memastikan proses pemeriksaan



sesuai ketentuan dan target pemeriksaan pajak daerah Tahun 2024 tercapai;

- 5) Penagihan atas tunggakan SKPDKB objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu sekaligus upaya pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan daerah;
- 6) Penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- 7) Penggiatan kembali upaya *tax clearance* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020; dan
- 8) Optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak *online* sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib pajak hotel berdasarkan Pergub No. 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 2 Tahun 2022.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target PBJT Tahun Anggaran 2024, antara lain:

- 1) Pada bulan Desember 2023, aktivitas perhotelan dan tingkat hunian hotel di Jakarta cenderung mengalami perlambatan karena libur akhir tahun bisnis, dan pelaku bisnis cenderung menunggu dan melihat situasi secara nasional, terutama dengan persiapan pemilihan presiden yang sedang berlangsung;
- 2) Adanya kecenderungan masyarakat untuk memilih sewa apartemen dibandingkan memanfaatkan hotel sebagai sarana menginap;
- 3) Terdapat beberapa objek pajak yang tahun sebelumnya masih dipungut pajak restoran, namun saat ini dipungut PPN karena amanat UU HKPD;
- 4) Makin berkembangnya usaha restoran dan kuliner di daerah penyangga DKI Jakarta;
- 5) Stagnasi pada pertumbuhan objek pajak hiburan baru karena kemampuan daya beli masyarakat dan dunia bisnis khususnya sektor pariwisata yang masih belum sepenuhnya pulih karena pandemi;
- 6) Perkembangan yang semakin dinamis pada industri hiburan malam salah satunya bentuk transformasi dan pergeseran dari diskotek, klub dan bar konvensional menjadi restoran formal yang menyediakan hiburan malam berupa pentas musik hidup/DJ, konser band;
- 7) Belum tertibnya administrasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan PT. PLN (Persero) Distribusi Banten terkait data pendukung pelaporan SPTPD; dan



- 8) Pelaksanaan penggalian potensi objek PPJ baru di antaranya objek tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri belum optimal hal ini disebabkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pemungutan PPJ atas objek dimaksud.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 Rp713.719.914.820,00 atau 110,18% dari anggaran sebesar Rp647.749.998.376,00. Dengan demikian realisasi melampaui target sebesar Rp65.969.916.444,00 atau 10,18%. Apabila realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp454.697.560.911,00, maka pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp259.022.353.909,00 atau 56,97%. Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 termasuk realisasi Retribusi Daerah pada BLUD sebesar Rp605.179.943.597,00.

Unit pemungut retribusi melakukan berbagai upaya intensif yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan seperti:

- a. Melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024;
- b. Menaikkan tarif retribusi untuk beberapa objek retribusi sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024;
- c. Menambah objek retribusi baru sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024;
- d. Melakukan penagihan – penagihan secara aktif terhadap piutang tahun – tahun sebelumnya;
- e. Menerapkan *Banking System* dan transaksi non tunai dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah; dan
- f. Menjalin hubungan baik dengan pengguna jasa, kolaborasi dan promosi dengan *travel agent* serta *tenant* (Wajib Retribusi).

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.9
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Jasa Umum	212.194.331.357	242.006.204.556	114,05	130.712.761.587
2	Retribusi Jasa Usaha	160.541.330.737	200.120.308.890	124,65	87.591.704.800
3	Retribusi Perizinan Tertentu	275.014.336.282	271.593.401.374	98,76	236.393.094.524
Jumlah		647.749.998.376	713.719.914.820	110,18	454.697.560.911

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp242.006.204.556,00 atau 114,05% dari anggaran sebesar Rp212.194.331.357,00. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum melampaui target sebesar Rp29.811.873.199,00 atau 14,05%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 Rp130.712.761.587,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp111.293.442.969,00 atau 85,14%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.10
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	115.189.739.636	156.319.434.913	135,71	0
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	73.142.719.200	71.179.826.562	97,32	56.637.395.482
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	301.320.000	296.055.000	98,25	13.709.730.000
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.442.882.458	13.149.732.518	85,15	0
5	Retribusi Pelayanan Pasar	7.645.500.000	589.085.500	7,70	1.091.168.400
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	373.366.000	373.366.000	100,00	49.360.885.500
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	98.704.063	98.704.063	100,00	1.669.692.705



No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0	0	0	228.000
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000	0	0	8.243.661.500
Jumlah		212.194.331.357	242.006.204.556	114,05	130.712.761.587

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp115.189.739.636,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp156.319.434.913,00 atau 135,71%. Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp41.129.695.277,00 atau 35,71%. Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD untuk bulan Januari sampai dengan Mei 2024 sebesar Rp128.225.692.751,00, masih disajikan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan retribusi pada awal tahun telah disahkan dengan diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD. Meskipun demikian, seluruh Retribusi Pelayanan Kesehatan telah disajikan sebagai Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp73.142.719.200,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp71.179.826.562,00 atau 97,32%. Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp1.962.892.638,00 atau 2,68%. Penurunan realisasi ini karena adanya permohonan keringanan pembayaran retribusi atas pengangkutan sampah pasar dari Perumda Pasar Jaya sehingga belum terealisasinya pembayaran yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2023 sebesar



Rp56.637.395.482,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.542.431.080,00 atau 25,68%.

Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan antara lain:

- a) Pendataan Wajib Retribusi yang dilakukan secara intensif;
- b) Penggunaan aplikasi *e-retribusi* dalam pendataan, penetapan, penyetoran dan pelaporan retribusi; dan
- c) Adanya standarisasi pemungutan retribusi dengan mengacu kepada metode hitung yang terukur.

3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp301.320.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp296.055.000,00 atau 98,25%. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tidak mencapai target sebesar Rp5.265.000,00 atau 1,75%. Hal tersebut disebabkan antara lain transisi peralihan peraturan pada Tahun Anggaran 2024 yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tidak terdapat jenis Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dianggarkan untuk mengakomodasi realisasi pada masa transisi dan target pembayaran atas piutang retribusi makam pada tahun sebelumnya.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan perpanjangan sewa tanah makam. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.709.730.000,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp13.413.675.000,00 atau 97,84 %.

4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp15.442.882.458,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp13.149.732.518,00 atau 85,15%. Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak



mencapai target sebesar Rp2.293.149.940,00 atau 14,85 %. Hal tersebut disebabkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Revitalisasi trotoar/penataan trotoar melalui kegiatan *complete street* yang menyebabkan pengurangan Satuan Ruang Parkir (SRP) pada lokasi parkir di ruang milik jalan (*onstreet*);
- b) Perkembangan lalu lintas jalan dengan rambu larangan parkir;
- c) Banyaknya mesin Terminal Elektronik (TPE) yang rusak dan tidak dapat diperbaiki karena tidak adanya purna jual untuk *sparepart* mesin TPE; dan
- d) Pengembangan jalur sepeda.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya yang dilakukan Unit Pengelola Perparkiran Provinsi DKI Jakarta untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum antara lain:

- a) Pengembangan lokasi layanan parkir;
- b) Kerja sama penyelenggaraan perparkiran di lokasi penitipan atau simpul angkutan umum serta mendorong adanya digitalisasi dengan aplikasi parkir;
- c) Layanan parkir kegiatan *insidentil* dan *event*; dan
- d) Pengembangan jasa layanan, contoh iklan reklame mesin TPE, sewa SRP untuk layanan uji emisi dan SPKLU.

5) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.645.500.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp589.085.500,00 atau 7,70%. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target sebesar Rp7.056.414.500,00 atau 92,30%.

Hal tersebut disebabkan di antaranya dasar penerbitan SKRD untuk retribusi Lokasi Sementara menunggu Kepgub Nomor 835 Tahun 2024 yang rilis pada tanggal 13 Desember 2024. SKRD baru dapat diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2024 menunggu kesiapan sistem ROS dalam mengakomodasi pengurangan tarif dimaksud.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.091.168.400,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp502.082.900,00 atau 46,01%. Dalam rangka optimalisasi penerimaan dari pembayaran Retribusi Pelayanan



Pasar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melakukan upaya penagihan tunggakan retribusi kepada pedagang di enam wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi sesuai Surat Tugas Kepala Dinas PPKUKM Nomor e-0145/UD.02.01 tanggal 29 Mei 2024 tentang Kegiatan Peninjauan Lapangan dan Upaya Penagihan Piutang Retribusi di Lokasi Sementara (Loksem) dan Lokasi Binaan (Lokbin).

6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp373.366.000,00. Realisasinya mencapai Rp373.366.000,00 atau 100,00%. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mencapai target sebesar Rp373.366.000,00 atau 100,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp49.360.885.500, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp48.987.519.500,00 atau 99,24%.

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

- a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan kemudahan, dan cepat dalam proses Pengujian KIR sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku;
- b) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- c) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum;
- d) Melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah dengan sistem *Drive Thru*; dan
- e) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp98.704.063,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp98.704.063,00 atau 100,00%. Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini mencapai target sebesar Rp98.704.063,00 atau 100,00%.

Realisasi retribusi pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mencapai target sebesar



Rp2.550.000,00 atau 100,00% dan realisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta mencapai target sebesar Rp96.154.063,00 atau 100,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.669.692.705,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.570.988.642,00 atau 94,09%.

8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ini tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2024 karena berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak terdapat jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena adanya pencetakan peta diganti dengan peta digital. Realisasi retribusi ini sudah beralih menjadi peta digital sehingga tidak dipungut retribusi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp228.000,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp228.000,00 atau 100,00%.

9) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp100.000,00. Tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 atau 0,00%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak mencapai target sebesar Rp100.000,00 atau 0,00%. Hal tersebut disebabkan pungutan atas retribusi pelayanan tera/tera ulang sudah dihapus berdasarkan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda No. 1 Tahun 2024 sehingga penerimaan yang diperoleh di atas tanggal 4 Januari 2025 (setelah Perda No. 1 Tahun 2024 ditetapkan) menjadi penerimaan kode rekening baru (Retribusi Pemakaian Alat).

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.243.661.500,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.243.661.500,00 atau 100,00%.



b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp160.541.330.737,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp200.120.308.890,00 atau 124,65%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp39.578.978.154,00 atau 24,65%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp87.591.704.800,00, maka terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp112.528.604.091,00 atau 128,47%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.11
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	29.634.486.473	50.908.747.221	171,79	54.905.199.122
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	5.656.635.800	2.125.684.216	37,58	595.668.080
3	Retribusi Tempat Pelelangan	7.030.122.688	6.242.085.800	88,79	0
4	Retribusi Terminal	1.554.855.319	1.945.853.583	125,15	2.430.250.462
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	6.264.746.400	3.940.580.018	62,90	0
6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	4.332.594.000	5.299.535.000	122,32	196.700.000
7	Retribusi Rumah Potong Hewan	2.977.448.008	3.724.349.859	125,09	0
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	7.224.141.612	8.397.499.250	116,24	967.896.250
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	28.416.502.107	35.925.726.191	126,43	25.845.219.800
10	Retribusi Penyeberangan di Air	3.400.000.000	4.051.300.000	119,16	1.630.105.000
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	10.674.731.784	17.448.767.848	163,46	1.020.666.086
12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.555.124.762	2.712.742.452	174,44	0
13	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di luar Badan Jalan	3.541.305.500	4.168.353.927	117,71	0
14	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	6.956.103.142	6.333.889.750	91,06	0



No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
15	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	13.149.073.546	10.228.366.482	77,79	0
16	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	28.173.459.596	36.666.827.293	130,15	0
Jumlah		160.541.330.737	200.120.308.890	124,65	87.591.704.800

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp29.634.486.473,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp50.908.747.221,00 atau 171,79%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp21.274.260.748,00 atau 71,79%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.905.199.122,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.996.451.901,00 atau 7,28%.

Kenaikan realisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Adanya peningkatan permohonan sewa lahan dan bangunan dari pihak swasta dan instansi di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Adanya *event-event* di berbagai bidang sudah mulai diadakan dengan dicabutnya status PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) selama pandemi COVID-19;
- Adanya peningkatan permohonan uji laboratorium untuk mutu hasil perikanan seiring peningkatan ekspor hasil perikanan;
- Adanya pembayaran piutang dari tahun-tahun sebelumnya;
- Dicabutnya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 per 22 November 2023; dan
- Perubahan klasifikasi retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian laboratorium, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.



Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- a) Optimalisasi pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pelayanan;
- b) Optimalisasi jasa layanan yang disediakan;
- c) Optimalisasi koordinasi antar unit terkait layanan kepada wajib retribusi;
- d) Membangun relasi dengan laboratorium LsPro dan laboratorium swasta;
- e) Mendaftarkan/ mengajukan diri menjadi unit LsPro di bawah Kementerian Perindustrian melalui sistem SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional). Harapannya, apabila terdapat perusahaan/ masyarakat yang akan melakukan pengujian maka UPT akan ditunjuk sebagai mitra yang tersertifikasi oleh Kementerian Perindustrian; dan
- f) Kolaborasi dan promosi kawasan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh SKPD terkait sebagai destinasi wisata, lokasi *shooting*, pertunjukkan seni budaya, pertandingan olahraga, seminar dan berbagai kegiatan lainnya kepada seluruh masyarakat.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh SKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain: Badan Pengelolaan Aset Daerah; Dinas Bina Marga; Dinas Sumber Daya Air; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Pertamanan dan Hutan Kota; dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp5.656.635.800,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp2.125.684.216,00 atau 37,58%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp3.530.951.584,00 atau 62,42%.

Penurunan ini di antaranya disebabkan oleh dasar penerbitan SKRD untuk retribusi Lokasi Sementara menunggu Kepgub Nomor 835 Tahun 2024 yang rilis di tanggal 13 Desember 2024. SKRD baru dapat



diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2024 menunggu kesiapan sistem ROS dalam mengakomodasi pengurangan tarif dimaksud.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp595.668.080,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.530.016.136,00 atau 256,86%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain melakukan upaya penagihan tunggakan retribusi kepada pedagang di enam wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi sesuai Surat Tugas Kepala Dinas PPKUKM Nomor e-0145/UD.02.01 tanggal 29 Mei 2024 tentang Kegiatan Peninjauan Lapangan dan Upaya Penagihan Piutang Retribusi di Lokasi Sementara (Loksem) dan Lokasi Binaan (Lokbin).

3) Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Tempat Pelelangan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.030.122.688,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp6.242.085.800,00 atau 88,79%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp788.036.888,00 atau 11,21%.

Penurunan ini disebabkan oleh beberapa kendala berikut:

- a) Terbitnya Surat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nomor: B.781/DJPT/PI.330/VII/2024, perihal pelaksanaan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan penarikan pungutan hasil perikanan pasca produksi menyebabkan terjadinya penolakan dari nelayan melalui Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DKI JAKARTA untuk melakukan pembayaran pungutan fasilitas pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan, karena pungutan tersebut dianggap serupa dengan yang dipungut KKP; dan
- b) Berkurangnya bahan baku untuk olahan ikan asin, sehingga pendapatan menurun dan berakibat pada kemampuan membayar retribusi.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- a) Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- b) Memberikan surat teguran kepada para Wajib Retribusi yang menunggak.

4) Retribusi Terminal

Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.554.855.319,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp1.945.853.583,00 atau 125,15%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp390.998.264,00 atau 25,15%.

Kendala yang dihadapi unit pemungut Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan dalam mencapai target adalah masih adanya pendapatan dalam bentuk manual/cash (belum cash/less) pada lokasi Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, Terminal Tanjung Priok, Terminal Tanah Merdeka, Terminal Pulo Gebang, dan Terminal Pulo Gadung.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.430.250.462,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp484.396.879,00 atau 19,93%.

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.264.746.400,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp3.940.580.018,00 atau 62,90%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp2.324.166.382,00 atau 37,10%. Penurunan ini dikarenakan sarana pendukung perparkiran pada lokasi parkir *off street* dan parkir *on street* belum terlaksana secara optimal, di mana pengelolaan parkir dilakukan secara konvensional (manual).

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:



- a) Penerapan kenaikan tarif parkir mengacu kenaikan tarif retribusi sesuai Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Mendorong kajian sistem bagi hasil yang memberikan dampak pendapatan yang maksimal; dan
- c) Mendorong pengelolaan semua fasos/fasum Pemerintah Daerah dengan metode swakelola sehingga pendapatan optimal tanpa bagi hasil ataupun pajak parkir.

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp4.332.594.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp5.299.535.000,00 atau 122,32%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp966.941.000,00 atau 22,32%. Pencapaian target ini disebabkan antara lain sudah tidak adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada masa Pandemi COVID-19 dan dicabutnya Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2021 efektif per 22 November 2023.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp196.700.000,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.102.835.000,00 atau 2.594,22%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

7) Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.977.448.008,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp3.724.349.859,00 atau 125,09%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp746.901.851,00 atau 25,09%.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.224.141.612,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp8.397.499.250,00 atau 116,24%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp1.173.357.638,00 atau 16,24%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp967.896.250,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.429.603.000,00 atau 767,60%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Dinas Kebudayaan.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp28.416.502.107,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp35.925.726.191,00 atau 126,43%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp7.509.224.084,00 atau 26,43%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari pemakaian tempat untuk rekreasi kebudayaan dan permuseuman, gedung olahraga, kolam renang, pertunjukan planetarium dan observatorium serta pemakaian stadion olahraga. Semua unit pemungut dapat merealisasikan dengan melebihi target yang telah ditetapkan, terutama Dinas Pemuda dan Olahraga karena tingginya animo masyarakat untuk berolahraga pasca pandemi COVID-19.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.845.219.800,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.080.506.391,00 atau 39,00%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

- a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pemeliharaan fasilitas terkait;



- b) Melakukan promosi melalui media sosial maupun kolaborasi dengan instansi terkait;
- c) Menginformasikan pembukaan kembali Fasilitas Penginapan dan Ruang Pertemuan di UP Anjungan dan Graha Wisata melalui website dan media sosial;
- d) Menambahkan Monumen Nasional (Monas) sebagai salah satu tujuan destinasi pada kegiatan *Familiarization Trip*;
- e) Mengadakan kegiatan Monas Week dan Pertunjukan – pertunjukan *video mapping*, konser musik dan hiburan lainnya pada saat peringatan hari – hari besar nasional;
- f) Melakukan kerja sama dengan Bank DKI dalam mempromosikan dan memberikan layanan pembayaran melalui kartu elektronik dan uang elektronik QRIS; dan
- g) Menganggarkan kegiatan wajib kunjung museum bagi kalangan pelajar dalam APBD Dinas Kebudayaan sebagai salah satu upaya pengenalan museum ke masyarakat.

10) Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.400.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp4.051.300.000,00 atau 119,16%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp651.300.000,00 atau sebesar 19,16%. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.630.105.000,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.421.195.000,00 atau 148,53%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Penyeberangan di Air antara lain:

- a) Menerapkan tarif baru sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- b) Mendorong UKPD Pemungut Retribusi agar terus berkoordinasi dengan Bank DKI dalam rangka percepatan proses pelimpahan dana dari bank DKI ke rekening serta penyempurnaan sistem *Jaket Boat*.



11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp10.674.731.784,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp17.448.767.848,00 atau 163,46%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp6.774.036.064,00 atau 63,46 %.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.020.666.086,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp16.428.101.762,00 atau 1.609,55%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; Dinas Sumber Daya Air; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; Dinas Bina Marga; Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. Kenaikan signifikan realisasi dipengaruhi adanya perubahan klasifikasi dan unit pemungut retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

12) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.555.124.762,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp2.712.742.452,00 atau 174,44%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp1.157.617.690,00 atau 74,44%.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

13) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di luar Badan Jalan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.541.305.500,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp4.168.353.927,00 atau 117,71%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp627.048.427,00 atau 17,71%.



Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

14) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.956.103.142,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp6.333.889.750,00 atau 91,06%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp622.213.392,00 atau 8,94%.

Penurunan ini disebabkan oleh beberapa kendala berikut:

- a) belum dianggarkannya biaya cetak karcis;
- b) kurangnya SDM di lapangan, karena banyak yang pensiun dan belum mendapat pengganti;
- c) adanya perubahan kode rekening retribusi pada pertengahan Tahun 2024.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- a) menganggarkan cetak karcis masuk kebun bibit untuk Tahun 2025;
- b) sosialisasi ke sekolah dan masyarakat terkait diberlakukannya Perda No. 1 Tahun 2024 tiket masuk kebun;
- c) sosialisasi kepada masyarakat retribusi tiket hutan kota;
- d) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- e) meningkatkan pengawasan dari pimpinan terhadap pelayanan.

15) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp13.149.073.546,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp10.228.366.482,00 atau 77,79%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp2.920.707.063,00 atau 22,21%. Hal ini disebabkan diantaranya karena masih dalam transisi atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berdampak pada penyesuaian kode rekening pemungutan Retribusi Daerah. Penetapan target APBD-P Tahun Anggaran 2024 yang semula ditargetkan di bulan Agustus, baru disahkan di bulan Oktober sehingga seluruh realisasi



penerimaan pada bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 diakui sebagai realisasi di kode rekening transisi (Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan). Atas hal tersebut, alokasi pagu menjadi berlebih sehingga menyebabkan *gap* antara target dan realisasi.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- a) telah mengajukan permohonan ke Kementerian agar menjadi laboratorium yang ditunjuk LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) melalui sistem SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional);
- b) telah menawarkan kerja sama dengan 12 (dua belas) LSPro swasta dalam pengujian pakaian bayi, handuk dan mainan anak; serta dalam proses kerja sama antara LSPro UPPISP dan Laboratorium uji PT. Anindya Certification Testing, PT. SGS Indonesia dan PT. Rajawali Baskara Perkasa terkait pengujian dalam rangka sertifikasi produk mainan anak;
- c) akan mendirikan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk tekstil dan kerajinan di Tahun 2025;
- d) melakukan upaya-upaya penagihan kepada WR kios dan los yang mempunyai tunggakan antara lain membuat STRD melalui sistem e-ROS, menghubungi melalui media elektronik telepon/*chatting*, menerbitkan surat pemberitahuan/ tagihan/teguran, menandatangani secara langsung ke lapangan, memasang/menempelkan *stiker/banner* sebagai sanksi sosial;
- e) meningkatkan jumlah produksi benih ikan sehingga selain dibagikan ke masyarakat, masih ada benih ikan yang dapat dijual ke masyarakat;
- f) melakukan komunikasi dengan WR yang pernah melakukan pengujian sebelumnya;
- g) melakukan koordinasi ke bidang pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kota Administrasi lima wilayah agar melakukan tes pengujian, penyelidikan dan pengukuran ke UPPPP Bina Marga Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
- h) memperbanyak ruang lingkup pengujian, penyelidikan dan pengukuran dan memperkenalkan pengujian, penyelidikan dan pengukuran UPPPP Bina Marga Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melalui media sosial.



16) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp28.173.459.596,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp36.666.827.293,00 atau 130,15%. Dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp8.493.367.697,00 atau 30,15%.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp275.014.336.282,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp271.593.401.374,00 atau 98,76%. Dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp3.420.934.908,00 atau 1,24%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp236.393.094.524,00, maka realisasi retribusi di Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp35.200.306.850,00 atau 14,89%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan secara terpusat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.12

Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	75.000.000	75.000.000	100,00	1.672.500.000
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	6.450.000	6.450.000	100,00	384.925.000
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	174.932.886.282	162.037.302.574	92,63	234.335.669.524
4	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	100.000.000.000	109.474.648.800	109,47	0
	Jumlah	275.014.336.282	271.593.401.374	98,76	236.393.094.524



Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp75.000.000,00 atau 100,00%. Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi mencapai target sebesar Rp75.000.000,00 atau 100,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.672.500.000,00, maka realisasi retribusi ini di Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.597.500.000,00 atau 95,52%.

2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu.

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.450.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.450.000,00 atau Rp100,00%. Dengan demikian realisasi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum mencapai target sebesar Rp6.450.000,00 atau Rp100,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp384.925.000,00, maka realisasi mengalami penurunan di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp378.475.000,00 atau 98,32%.

3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah retribusi atas perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun anggaran sebelumnya menggunakan nomenklatur Retribusi Izin Mendirikan



Bangunan (IMB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp174.932.886.282,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp162.037.302.574,00 atau 92,63%. Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp12.895.583.708,00 atau 7,37%. Hal ini disebabkan di antaranya karena masih dalam transisi atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan masih belum pulihnya sektor infrastruktur.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp234.335.669.524,00, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp72.298.366.950,00 atau 30,85%.

4) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp100.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp109.474.648.800,00 atau 109,47%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp9.474.648.800,00 atau 9,47%.

Retribusi ini mulai diterapkan di Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024, ditetapkan sebesar Rp634.395.407.063,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp653.700.898.761,00 atau 103,04%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan akhir 31 Desember 2024 melampaui target sebesar Rp19.305.491.698,00 atau 3,04%.

Apabila realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp545.869.249.987,00, terjadi kenaikan sebesar Rp107.831.648.774,00 atau 19,75%.

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.13
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	31.436.669.637	31.436.669.637	100,00	14.833.909.895
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	602.958.737.426	622.264.229.124	103,20	531.035.340.092
Jumlah		634.395.407.063	653.700.898.761	103,04	545.869.249.987

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2024, ditargetkan sebesar Rp31.436.669.637,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31.436.669.637,00 atau 100,00%. Dengan demikian realisasi Penerimaan bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sampai dengan akhir 31 Desember 2024 mencapai target.

Apabila Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya sebesar Rp14.833.909.895,00 maka di Tahun Anggaran 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp16.602.759.742,00 atau 111,92%.

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.14

Realisasi Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	9.127.128.545	9.127.128.545	100,00	4.783.042.097
2	PT Kawasan Berikat Nusantara	22.309.541.092	22.309.541.092	100,00	10.050.867.798
Jumlah		31.436.669.637	31.436.669.637	100,00	14.833.909.895

b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp602.958.737.426,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 Rp622.264.229.124,00 atau 103,20%. Dengan demikian pendapatan dari penyertaan modal melampaui target sebesar Rp19.305.491.698,00 atau 3,20%.

Apabila Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp531.035.340.092,00, maka di Tahun Anggaran 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp91.228.889.032,00 atau 17,18%.

Rincian lebih lanjut realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.15

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Asuransi Bangun Askrida	0	0	0	2.302.711.241
2	PT Bank DKI Jakarta	326.362.883.842	326.362.883.842	100,00	281.670.562.798
3	Perumda Pasar Jaya	19.218.954.000	21.964.518.857	114,29	5.897.211.097
4	PT Cemani Toka	3.157.998.480	3.361.871.240	106,46	1.758.443.960
5	PT Food Station Tjipinang	1.856.956.748	1.856.956.748	100,00	14.426.245.892
6	PT Pembangunan Jaya	17.500.000.000	28.800.000.000	164,57	20.320.000.000



No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
7	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	36.863.999.968	36.863.999.968	100,00	33.407.999.971
8	PT Transportasi Jakarta	55.399.293.005	55.452.326.932	100,10	88.529.116.811
9	PT Delta Jakarta, Tbk	59.066.396.700	59.066.396.700	100,00	68.315.227.500
10	PT. Pakuan International	0	111.171.340	~	0
11	Perumda Air Minum Jaya	61.150.000.000	62.367.973.726	101,99	0
12	Perumda PAL Jaya	14.695.500.353	18.369.375.441	125,00	14.407.820.822
13	PT. Penjamin Kredit Daerah	7.686.754.330	7.686.754.330	100,00	0
Jumlah		602.958.737.426	622.264.229.124	103,20	531.035.340.092

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp4.204.598.994.964,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp4.926.523.566.307,00 atau 117,17%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp4.622.697.231.503,00, maka di Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp303.826.334.804,00 atau 6,57%. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 termasuk realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD sebesar Rp1.780.935.782,00.

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16

Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	22.000.000.000	31.088.097.192	141,31	6.868.340.118
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	205.643.594.333	51.404.601.274	25,00	94.789.704.974
3	Hasil Kerja Sama Daerah	9.082.478.091	0	0,00	7.933.605.456
4	Jasa Giro	150.364.216.661	138.977.554.226	92,43	163.754.037.012
5	Pendapatan Bunga	134.442.082.231	488.490.087.480	363,35	350.699.189.334
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	41.897.641.265	24.662.147.115	58,86	15.412.050.340
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	15.540.000.000	16.273.021.852	104,72	15.509.900.579
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.205.883.824	72.571.509.022	421,78	43.692.667.644
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	280.000.000.000	304.385.210.814	108,71	288.999.391.997
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	765.777.296	2.831.448.222	369,75	314.556.868



No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
11	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.108.272.500	71.391.895	6,44	204.862.000
12	Pendapatan dari Pengembalian	0	95.507.744.792	0,00	102.706.935.656
13	Pendapatan BLUD	3.321.349.048.763	3.692.384.367.607	111,17	3.469.930.800.522
14	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000	0	0,00	416.272.363
15	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.150.000.000	7.876.384.816	152,94	61.464.916.640
Jumlah		4.204.598.994.964	4.926.523.566.307	117,17	4.622.697.231.503

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2024 di antaranya diperoleh dari:

- 1) penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan; dan
- 2) penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah, seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta inventaris kantor yang tidak terpakai.

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp22.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp31.088.097.192,00 atau 141,31%. Dengan demikian realisasi penerimaan ini melampaui target sebesar Rp9.088.097.192,00 atau 41,31%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp6.868.340.118,00, maka realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp24.219.757.074,00 atau 352,63%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.17
Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		%
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5 (4:3)
1	Hasil Penjualan Tanah	3.370.200.000	3.370.200.000	100,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	9.288.700.485	13.952.606.328	150,21
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	9.341.099.515	13.765.290.864	147,36
Jumlah		22.000.000.000	31.088.097.192	141,31

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp205.643.594.333,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp51.404.601.274,00 atau 25,00%. Dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp154.238.993.059,00 atau 75,00 %.

Realisasi penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp51.404.601.274,00 merupakan penerimaan atas Hasil Sewa BMD.

Realisasi penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp51.404.601.274,00 berasal dari:

- 1) Pendapatan Sewa Listrik dan Air Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Sederhana dan sewa pemakaian lantai dasar rumah susun sewa beli sebesar Rp51.179.980.774,00;
- 2) Pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame sebesar Rp103.242.000,00;
- 3) Pendapatan cicilan atas sewa beli rumah bermis yang berlokasi di Muara Angke sebesar Rp62.928.500,00;
- 4) Pendapatan Sewa Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp53.450.000,00; dan
- 5) Pendapatan Sewa Pemakaian Ruang Serba Guna PKK Melati Jaya sebesar Rp5.000.000,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp94.789.704.974,00, maka realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp43.385.103.700,00 atau 45,77%.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan mengalami penurunan akibat masih banyaknya pemanfaatan yang berada dalam proses



persetujuan dan perjanjian kerja sama. Selain itu, pemanfaatan titik reklame masih dalam tahap sidang proposal sebelum dapat diproses lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan.

c. Hasil Kerja Sama Daerah

Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp9.082.478.091,00. Tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 atau 0,00%. Dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp9.082.478.091,00 atau 0,00%. Hasil Kerja Sama Daerah mengalami perubahan kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 yang sebelumnya tercatat sebagai Hasil Penerimaan Pihak Ketiga dan Hasil Kerja Sama Aset Daerah. Realisasi di Tahun 2024 mengalami penurunan dikarenakan penganggaran Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah pada Badan Pengelolaan Aset Daerah telah dikelola oleh BLUD Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center, sehingga Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah menjadi bagian dari Pendapatan BLUD pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.933.605.456,00, maka realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.933.605.456,00 atau 100,00%.

d. Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp150.364.216.661,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai sebesar Rp138.977.554.226,00 atau 92,43%. Dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar Rp11.386.662.435,00 atau 7,57%. Hal ini disebabkan di antaranya adanya optimalisasi penempatan dana pada Investasi Jangka Pendek yaitu Deposito pada Kas Daerah.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp138.977.554.226,00 terdiri dari:

- 1) Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp132.890.819.625,00;
- 2) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp3.920.651.990,00; dan
- 3) Jasa Giro pada Rekening Dana BOS sebesar Rp2.166.082.611,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp163.754.037.012,00 maka realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp24.776.482.786,00 atau 15,13%.



e. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp134.442.082.231,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp488.490.087.480,00 atau 363,35%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga tercapai melebihi target. Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp350.699.189.334,00, maka realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp137.790.898.146,00 atau 39,29%.

f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan Rp41.897.641.265,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.662.147.115,00 atau 58,86%, realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tidak mencapai target sebesar Rp17.235.494.150,00 atau 41,14%. Hal ini dikarenakan dilakukannya pemindahan kode rekening Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ke kode rekening Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp28.323.306.516,00.

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tersebut diperoleh dari:

- 1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp20.665.481.476,00; dan
- 2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp3.996.665.639,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp15.412.050.340,00, maka realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.250.096.775,00 atau 60,02%.

g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp15.540.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.273.021.852,00 atau 104,72%, realisasi



Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain melebihi target sebesar Rp733.021.852,00 atau 4,72%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp15.509.900.579,00, maka realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp763.121.273,00 atau 4,92%.

Penerimaan komisi di antaranya merupakan pendapatan atas piutang hasil tagih atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebesar Rp42.718.840,00, komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) atas bulan Desember 2024 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi yaitu sebesar Rp14.607.594.619,00 dan pendapatan sewa Rusunami pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.622.708.393,00.

h. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp17.205.883.824,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.571.509.022,00 atau 421,78%. Dengan demikian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi melebihi target sebesar Rp55.365.625.198 atau 321,78%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp43.692.667.644,00, maka realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp28.878.841.378,00 atau 66,10%.

i. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp280.000.000.000,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp304.385.210.814,00 atau 108,71%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah melampaui target sebesar Rp24.385.210.814,00 atau 8,71%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp288.999.391.997,00, maka realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp15.385.818.817,00 atau 5,32%.



Lebih rinci mengenai realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut.

Tabel 5.18
Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	190.194.138.711	210.767.387.519	110,82	163.536.491.522
2	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.405.043.192	1.485.372.690	105,72	1.411.779.560
3	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	59.769.139	80.413.442	134,54	43.658.362
4	Pendapatan Denda Pajak Hotel	3.722.893.576	6.508.551.813	174,83	4.412.662.709
5	Pendapatan Denda Pajak Restoran	14.146.598.557	20.289.171.545	143,42	23.936.140.368
6	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	2.878.001.180	6.187.429.059	214,99	5.591.896.141
7	Pendapatan Denda Pajak Reklame	3.731.629.187	4.613.222.041	123,62	16.126.764.812
8	Pendapatan Denda Pajak Parkir	983.918.400	1.917.322.528	194,87	3.079.614.787
9	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	323.965.694	436.950.076	134,88	818.631.512
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	60.975.431.522	50.028.126.146	82,05	64.250.642.083
11	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.578.610.842	2.071.263.955	131,21	5.791.110.141
	Jumlah	280.000.000.000	304.385.210.814	108,71	288.999.391.997

j. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp765.777.296,00. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.831.448.222,00 atau 369,75%. Dengan demikian Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi melebihi target sebesar Rp2.065.670.926,00 atau 269,75%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 tersebut terdiri atas perolehan:

- 1) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.061.402.033,00;
- 2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.616.929.674,00; dan
- 3) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp153.116.515,00.



Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp314.556.868,00, maka realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.516.891.354,00 atau 800,14%.

k. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.108.272.500,00. Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp71.391.895,00 atau Rp6,44%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan belum mencapai target sebesar Rp1.036.880.605,00 atau 93,56%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp204.862.000,00 maka realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp133.470.105,00 atau 65,15%.

l. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 tidak ditargetkan, namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp95.507.744.792,00.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 tersebut terdiri atas perolehan:

- 1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp138.530.153,00;
- 2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp3.295.998.904,00;
- 3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp645.209,00;
- 4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp49.283.291,00;
- 5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebesar Rp165.110.626,00;
- 6) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp356.268.961,00;
- 7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp19.170.055.904,00;



- 8) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba sebesar Rp320.053.861,00;
- 9) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp44.258.253.262,00;
- 10) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp20.924.081.689,00;
- 11) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp27.873.000,00;
- 12) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.301.337.601,00;
- 13) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebesar Rp715.103.994;
- 14) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air sebesar Rp645.069.258,00;
- 15) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi sebesar Rp11.407.968;
- 16) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.649.975.960,00; dan
- 17) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp478.695.151,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp102.706.935.656,00, maka realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.199.190.864,00 atau 7,01%.

m. Pendapatan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan



keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerja sama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.

Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3BP kepada BUD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima BLUD.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp3.321.349.048.763,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.692.384.367.607,00 atau 111,17%. Dengan demikian realisasi Pendapatan BLUD telah melebihi target sebesar Rp371.035.318.844,00 atau 10,05%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp3.469.930.800.521,00, maka realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp222.453.567.085,00 atau 6,37%.

Selain pengesahan pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.692.384.367.607,00, terdapat Pendapatan Operasional BLUD yang belum disahkan pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp16.881.743.513,00. Nilai tersebut merupakan pendapatan yang diterima dan telah dibelanjakan oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Permukiman Pulogadung pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

n. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00. Tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 atau 0,00%. Dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp50.000.000,00 atau 0,00%. Hal ini dikarenakan dilakukannya pemindahan penerimaan atas Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Badan Pengelolaan Aset Daerah ke kode rekening



Pendapatan BLUD pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center sebesar Rp1.050.684.978,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp416.272.363,00, maka realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp416.272.363,00 atau 100,00%.

o. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp5.150.000.000,00. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.876.384.816,00 atau 152,94%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah di Tahun Anggaran 2024 melebihi target sebesar Rp2.726.384.816,00 atau 52,94%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp61.464.916.640,00, maka realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp53.588.531.824,00 atau 87,19%.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2024 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran dari rekening *Treasury Deposit Facility* atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya, yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2024 Tanggal 22 Maret 2024 Tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267 Tahun 2024 Tanggal 6 Juni 2024



Tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Gaji Ketiga Belas Di Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp23.776.426.806.863,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp21.620.905.241.381,00 atau 90,93%. Apabila realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp20.159.634.672.034,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.461.270.569.347,00 atau 7,25%.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.19
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
A	Dana Perimbangan	23.732.336.589.863	21.576.815.024.381	90,92	20.124.459.645.034
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	20.089.713.629.863	18.032.588.917.639	89,76	17.049.968.580.672
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	49.522.948.000	31.130.727.000	62,86	31.525.639.306
b	DBH PPh Pasal 21	18.686.943.626.863	17.151.231.818.639	91,78	15.790.018.049.333
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	1.264.838.746.000	828.793.211.000	65,53	1.187.186.308.155
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.302.705.000	1.332.416.000	102,28	1.137.786.459
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	81.969.240.000	14.964.381.000	18,26	33.972.535.563
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	5.136.364.000	5.136.364.000	100,00	6.128.261.856
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	368.377.412.000	368.173.270.201	99,94	22.179.718.000
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0	0	100,00	3.076.020.400
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.274.245.548.000	3.176.052.836.541	97,00	3.049.235.325.962
B	Insentif Fiskal	44.090.217.000	44.090.217.000	100,00	35.175.027.000
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	23.776.426.806.863	21.620.905.241.381	90,93	20.159.634.672.034

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan daerah dari Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

5.1.1.2.1 Dana Perimbangan

5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.



Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp20.089.713.629.863,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp18.032.588.917.639,00 atau 89,76%. Dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 tidak mencapai target sebesar Rp2.057.124.712.224,00 atau 10,24%. Tidak tercapainya target tersebut karena tidak tersalurkannya penarikan atas dana *Treasury Deposit Facility*. Berdasarkan surat Nomor e-0003/UD.08.01 Tanggal 6 Desember 2024 Hal Permohonan Penarikan *Dana Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam rangka mendanai kebutuhan yang diarahkan penggunaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan permohonan penarikan dana TDF sebesar Rp1.710.273.544.341,00 dan telah mendapat tanggapan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI melalui surat Nomor S-165/PK/PK.2/2024 Tanggal 11 Desember 2024 Hal Tanggapan atas Permohonan Penarikan Dana Treasury Deposit Facility (TDF) dalam rangka mendanai kebutuhan yang diarahkan penggunaannya, bahwa nilai penarikan dana TDF adalah sebesar sisa dana TDF pada saat pengajuan, yaitu sebesar Rp3.253.939.379.361,00. Sehingga pengajuan penarikan dana TDF dilakukan kembali di Tahun 2025.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp982.620.336.967,00 atau 5,76% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp17.049.968.580.672,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

- a. realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp31.130.727.000,00 atau 62,86%;
- b. realisasi DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp17.151.231.818.639,00 atau 91,78%;
- c. realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sebesar Rp828.793.211.000,00 atau 65,53%;
- d. realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp1.332.416.000,00 atau 102,28%;
- e. realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp14.964.381.000,00 atau 18,26%; dan
- f. realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp5.136.364.000,00 atau 100,00%.



Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 termasuk di dalamnya realisasi melalui mekanisme Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.7/2023 sebesar Rp922.491.898.278,00 yang terdiri dari:

- a. pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Fasilitas I sebesar Rp390.385.927.362,00 sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 yang jatuh tempo untuk periode bulan Maret, Juni, dan September Tahun 2024.
- b. pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Fasilitas II sebesar Rp532.105.970.916,00 sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020 yang jatuh tempo untuk periode bulan Maret, Juni dan September 2024.

5.1.1.2.1.2 Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07.2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Dana Alokasi Umum yang didapat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (DAU *Block Grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU *Spesific Grant*) yaitu untuk pendanaan kelurahan.

Pendanaan kelurahan Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan sebanyak 267 kelurahan sebesar Rp53.400.000.000,00. Pendanaan Kelurahan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Transfer Umum-DAU Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan sebesar Rp368.377.412.000,00 yang terdiri dari DAU tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp314.977.412.000 dan DAU pendanaan kelurahan sebesar Rp53.400.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp368.173.270.201,00 atau 99,94% terdiri dari realisasi DAU tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp314.977.412.000 atau 100,00% dan DAU pendanaan kelurahan sebesar Rp53.195.858.201,00 atau 99,62% tidak tercapainya target tersebut karena penyaluran DAU pendanaan kelurahan sesuai dengan rencana penggunaan belanja pada APBD sebesar Rp53.195.858.201,00.



Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp345.993.552.201,00 atau 1559,95% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp22.179.718.000,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp0,00 atau 0,00%. Tidak adanya target dan realisasi DAK Fisik, disebabkan karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 DKI Jakarta tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik pada Tahun Anggaran 2024, sehingga realisasi penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.076.020.400,00 atau 100% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp3.076.020.400,00.

5.1.1.2.1.4 Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non fisik. Penyaluran DAK Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan Laporan secara lengkap dan benar.

Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp3.274.245.548.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp3.176.052.836.541,00 atau 97,00%. Dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 tidak mencapai target sebesar Rp98.192.711.459,00 atau 3,00%.

DAK Non Fisik TPG PNSD dan Tamsil Guru PNSD realisasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024. Untuk jenis DAK Non Fisik BOS Reguler, BOS Kinerja, PAUD Reguler, PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Reguler dan BOP Kesetaraan Kinerja realisasi berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan yang telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Untuk jenis DAK Non Fisik BOP Museum dan Taman Budaya-Museum, BOKKB-BOKB, Fasilitas Penanaman Modal, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan PK2UMK realisasi tidak mencapai 100%



karena masih terdapat sisa saldo di RKUD atas penggunaan tahun sebelumnya, sehingga mengurangi nilai penyaluran DAK Non Fisik Tahun berjalan.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 juga mengalami kenaikan sebesar Rp126.817.510.579,00 atau 4,16% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp3.049.235.325.962,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

- a. Realisasi DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOS Reguler sebesar Rp1.732.660.661.755,00 atau 95,11%;
- b. Realisasi DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp35.268.750.000,00 atau 98,67%;
- c. Realisasi DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar Rp1.248.388.041.000,00 atau 99,98%;
- d. Realisasi DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp23.510.885.000,00 atau 84,15%;
- e. Realisasi DAK Non Fisik-BOP PAUD Reguler sebesar Rp79.487.124.858,00 atau 98,82%;
- f. Realisasi DAK Non Fisik-BOP PAUD Kinerja sebesar Rp1.620.000.000,00 atau 95,58%;
- g. Realisasi DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler sebesar Rp39.023.171.234,00 atau 97,49%;
- h. Realisasi DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja sebesar Rp855.000.000,00 atau 95,00%;
- i. Realisasi DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum sebesar Rp5.886.922.625,00 atau 98,12%;
- j. Realisasi DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp5.666.398.867,00 atau 78,77%;
- k. Realisasi DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal sebesar Rp605.673.050,00 atau 80,13%;
- l. Realisasi DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp474.911.300,00 atau 91,33%; dan
- m. Realisasi DAK Non Fisik-PK2UMK sebesar Rp2.605.296.852,00 atau 97,82%.

5.1.1.2.2 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan sebesar Rp44.090.217.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp44.090.217.000,00 atau 100%.



Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Pengelolaan Insentif Fiskal diatur dalam ketentuan berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 Tanggal 24 November 2023 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal TA 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal TA 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi insentif fiskal (IF) pada Tahun Anggaran 2024 sebesar total Rp44.090.217.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. IF atas penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp32.358.203.000,00 berdasarkan alokasi yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tanggal 28 November 2023 tentang Rincian APBN TA 2024.
- b. IF atas penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar Rp11.732.014.000,00 berdasarkan alokasi yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 Tanggal 1 September 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal TA 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi kelompok kategori kesejahteraan masyarakat pada:
 - Kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, sebesar Rp5.778.438.000,00.
 - Kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, sebesar Rp5.953.576.000,00.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp703.654.652.623,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp589.167.782.024,00 atau 83,73% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:



- a. Pendapatan Hibah merupakan Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Pembangunan Proyek MRT Jakarta sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-001/MK.7/2019 Tanggal 13 Februari 2019 (IP-578) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-1/MK.7/DTK.03/MRT/2023 Tanggal 13 November 2023 (IP-585). Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Hibah IP-578 dan IP-585 dengan jumlah sebesar Rp576.240.722.024,00 atau sebesar 83,52% dari anggaran sebesar Rp690.727.592.623,00 sesuai dengan salinan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Adapun penyebab tidak tercapainya pendapatan hibah dimaksud dikarenakan penggunaan kurs aktual yang cenderung di bawah asumsi kurs yang digunakan saat perencanaan, terjadi kegagalan tender paket pekerjaan CP206 dalam rangka pengadaan *rolling stock*, penyesuaian nilai kontrak dan pergeseran jadwal pekerjaan pada paket pekerjaan, dan;
 - b. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp12.927.060.000,00, merupakan pendapatan hibah dari PT Jasa Raharja berupa kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode bulan Januari sampai dengan Desember 2024 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor P/44/SP/2024 Nomor E-0001/UD.02.01 Tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Pemberian Dana Hibah Daerah Tahun 2024 Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Untuk Mendukung Operasional Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.
- Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.176.986.038.430,00 atau 66,64% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp1.766.153.820.454,00.

5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.

Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam



pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Belanja Daerah dan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penyajian Belanja Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang dijabarkan menurut klasifikasi kelompok dan urusan.

5.1.2.1 Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan Belanja dan Transfer yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi Ekonomi berdasarkan jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Transfer.

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp76.023.113.210.933,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.012.717.839.886,00 atau 92,09%. Adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp6.010.395.371.047,00 atau 7,91% di antaranya :

1. Belanja Barang dan Jasa, tidak terealisasi sebesar Rp1.262.953.902.578,00 dikarenakan tidak terserapnya belanja jasa KKI dan PJLP, efisiensi Belanja TALI dan Belanja Barang/Jasa di BLUD;
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak terealisasi sebesar Rp1.056.749.759.507,00 dikarenakan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan yang disebabkan oleh kegiatan yang belum selesai dan dilanjutkan pada tahun berikutnya; dan
3. Belanja Pegawai, tidak terealisasi sebesar Rp841.225.481.173,00 dikarenakan adanya perhitungan accres anggaran belanja pegawai, kekosongan jabatan struktural, dan CPNS yang belum masuk.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.242.108.211.472,00 atau 4,63% dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp66.770.609.628.414,00.

Rincian realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.20
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	Belanja Operasi	61.283.505.927.677	58.623.935.516.823	95,66	57.556.903.079.616
1	Belanja Pegawai	20.031.780.182.216	19.190.554.701.043	95,80	17.977.776.327.870
2	Belanja Barang dan Jasa	27.835.321.117.883	26.572.367.215.305	95,46	25.824.444.605.296
3	Belanja Bunga	186.000.000.000	180.738.864.995	97,17	229.704.491.741
4	Belanja Subsidi	6.320.798.085.601	5.875.837.590.937	92,96	5.539.653.281.534
5	Belanja Hibah	3.358.144.887.494	3.307.808.095.906	98,50	3.621.682.896.507
6	Belanja Bantuan Sosial	3.551.461.654.483	3.496.629.048.637	98,46	4.363.641.476.668
II	Belanja Modal	12.989.055.827.469	11.004.785.255.543	84,72	8.857.260.068.298
1	Belanja Tanah	763.402.783.015	433.525.287.650	56,79	442.600.308.470
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.169.221.270.721	2.961.717.289.383	93,45	2.822.976.130.249
3	Belanja Gedung dan Bangunan	3.441.760.532.962	2.385.010.773.455	69,30	1.653.055.663.410
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.352.974.561.800	4.975.949.887.118	92,96	3.799.027.573.476
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	128.157.171.217	119.496.671.697	93,24	139.600.392.693
6	Belanja Aset Lainnya	133.539.507.754	129.085.346.240	96,66	0
III	Belanja Tak Terduga	1.365.518.170.267	0	0	0
1	Belanja Tak Terduga	1.365.518.170.267	0	0	0
IV	Transfer	385.033.285.520	383.997.067.520	99,73	356.446.480.500
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	385.033.285.520	383.997.067.520	99,73	356.446.480.500
Jumlah (I,II, III, dan IV)		76.023.113.210.933	70.012.717.839.886	92,09	66.770.609.628.414

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi Tahun Anggaran 2024, dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja

5.1.2.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp61.283.505.927.677,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp58.623.935.516.823,00 atau 95,66%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp57.556.903.079.616,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.067.032.437.207,00 atau 1,85%. Rincian realisasi belanja operasi terdapat pada lampiran 1.



Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1.1.a Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp20.031.780.182.216,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.190.554.701.043,00 atau 95,80%.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 tidak terserap sebesar Rp841.225.481.173,00 atau 4,2% disebabkan adanya perhitungan accres anggaran Belanja Pegawai, kekosongan jabatan struktural, dan CPNS yang belum masuk.

Apabila realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.977.776.327.870,00 terdapat kenaikan realisasi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.212.778.373.173,00 atau 6,75%.

Berikut rincian realisasi belanja pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.21

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024

Jenis Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.343.275.787.515	6.017.571.319.444	94,87
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.293.176.410.908	10.903.991.920.983	96,55
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.934.559.231.000	1.833.820.051.913	94,79
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	165.126.384.200	160.409.799.009	97,14
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.854.935.720	1.492.957.760	52,29
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	69.795.586.773	66.071.053.327	94,66
Belanja Pegawai BLUD	222.991.846.100	207.197.598.607	92,92
Total Belanja Pegawai	20.031.780.182.216	19.190.554.701.043	95,80

5.1.2.1.1.1.b Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.



Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp27.835.321.117.883,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.572.367.215.305,00 atau 95,46%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 tidak terserap sebesar Rp1.262.953.902.578,00 atau 4,54% disebabkan adanya tidak terserapnya Belanja Jasa KKI dan PJLP, efisiensi Belanja TALI dan Belanja Barang/Jasa di BLUD.

Apabila realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.824.444.605.296,00 terdapat kenaikan realisasi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp747.922.610.009,00 atau 2,90%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.572.367.215.305,00 di antaranya merupakan:

- a. Realisasi belanja jasa sebesar Rp15.761.798.306.361,00;
- b. Realisasi belanja barang jasa BLUD sebesar Rp3.493.660.758.447,00;
- c. Realisasi belanja barang sebesar Rp3.211.762.716.717,00; dan
- d. Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp2.634.070.516.032,00.

Dari jumlah belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 tersebut, di antaranya terdapat belanja yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp198.675.562.663,00 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (sebagaimana dijelaskan dalam CaLK 4.3.6.3 tentang Aset Tetap). Rincian kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap adalah sebagai berikut

1. Kapitalisasi dari Belanja Barang-APBD	
Peralatan dan Mesin	62.168.931.190,00
Gedung dan Bangunan	658.610.160,00
Aset Tetap Lainnya	22.497.660,00
Jumlah	62.850.039.010,00
2. Kapitalisasi dari Belanja Jasa	
Peralatan dan Mesin	244.826.000,00
Gedung dan Bangunan	8.212.909.480,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.934.778.649,00
Jumlah	15.392.514.129,00
3. Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	
Peralatan dan Mesin	11.667.144.274,00
Gedung dan Bangunan	67.794.158.745,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	25.900.891.129,00
Aset Tetap Lainnya	2.977.227.752,00
Jumlah	108.339.421.900,00



4. Kapitalisasi dari Belanja Persediaan

Peralatan dan Mesin	148.775.000,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.944.812.624,00
Jumlah	12.093.587.624,00
Jumlah Aset Tetap	198.675.562.663,00

Rincian Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap terdapat pada Lampiran 10 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah.

Selain itu, terdapat Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 yang diakui sebagai Beban Barang dan Jasa Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp646.744.771.399,00, di antaranya merupakan jumlah nilai BBM yang belum digunakan berdasarkan saldo yang ada pada *Radio Frequency Identification (RFID)* BBM. Rincian Beban Barang dan Jasa Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Beban Dibayar di Muka

Beban Barang Dibayar di Muka	306.163.275.096
Beban Jasa Dibayar di Muka	286.739.131.617
Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka	53.842.364.686
Jumlah Beban Dibayar Di Muka	646.744.771.399,00

5.1.2.1.1.c Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp186.000.000.000,00. Realisasi Belanja Bunga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp180.738.864.995,00 atau 97,17%.

Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 tidak terserap sebesar Rp5.261.135.005,00 atau 2,83% disebabkan adanya oleh penyesuaian kurs pada saat pelaksanaan pembayaran bunga pinjaman MRT.

Apabila realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp229.704.491.741,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp48.965.626.746,00 atau 21,32%.

Realisasi belanja bunga Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

- Pembayaran bunga pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Proyek JEDI) sebesar Rp32.415.973.802,00;



- b. Pembayaran bunga pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA 1263/DSMI/2016 dan SLA-1295/DSMI/2023 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Jakarta Kota – Bundaran HI) sebesar JPY271.509.860,27 yang dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tanggal pembayaran sebesar Rp28.905.561.486,00; dan
- c. Pembayaran bunga pinjaman Sumber Lainnya dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp119.417.329.707,00.

5.1.2.1.1.d Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.320.798.085.601,00. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.875.837.590.937,00 atau 92,96%.

Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 tidak terserap sebesar Rp444.960.494.664,00 atau 7,04% disebabkan adanya efisiensi pada PSO PT TransJakarta yang disesuaikan dengan hasil verifikasi.

Apabila realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.539.653.281.534,00 terdapat kenaikan realisasi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp336.184.309.403,00 atau 6,07%.

Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.875.837.590.937,00 dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Transportasi

Belanja Subsidi dalam bidang transportasi dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.524.905.503.122,00 dan terealisasi sebesar Rp5.084.658.442.903,00 atau 92,03%, dengan rincian sebagai berikut:

1) PT. Trans Jakarta

Belanja Subsidi kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) merupakan belanja untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum guna menyelenggarakan transportasi publik di DKI Jakarta. Belanja Subsidi kepada PT Trans Jakarta Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.909.930.081.062,00 dan terealisasi sebesar Rp3.628.665.936.744,00 atau 92,81%.

2) PT. MRT Jakarta

Belanja Subsidi kepada PT MRT Jakarta merupakan belanja untuk memberikan dukungan pembiayaan menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik berupa layanan angkutan dengan Moda Raya Terpadu



(MRT) di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Belanja subsidi kepada PT MRT Jakarta Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.004.054.784.399,00 dan terealisasi sebesar Rp910.956.014.876,00 atau 90,73%.

3) PT. Jakarta Propertindo

Belanja Subsidi kepada PT Jakarta Propertindo (LRT) merupakan belanja untuk memberikan dukungan pembiayaan menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik berupa layanan angkutan dengan Lintas Raya Terpadu (LRT) di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Belanja Subsidi kepada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp610.920.637.661,00 dan terealisasi sebesar Rp545.036.491.283,00 atau 89,22%.

b. Bidang Penyediaan Pangan

Belanja Subsidi dalam bidang penyediaan pangan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp793.392.582.479,00 dan terealisasi sebesar Rp791.179.148.034,00 atau 99,72%. Belanja Subsidi dalam bidang pangan Tahun Anggaran 2024 seluruhnya merupakan belanja subsidi kepada Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

c. Bidang Pengelolaan Air Limbah

Belanja Subsidi dalam bidang pengelolaan air limbah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan tidak terealisasi seluruhnya yang disebabkan oleh proses administrasi Peraturan Gubernur penugasan Perumda PAL Jaya yang belum selesai.

5.1.2.1.1.1.e Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.358.144.887.494,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.307.808.095.906,00 atau 98,50%.



Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 tidak terserap sebesar Rp50.336.791.588,00 atau 1,50% disebabkan oleh adanya tidak terealisasi sisa hibah kepada KONI.

Apabila realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.621.682.896.507,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp313.874.800.601,00 atau 8,67%.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.307.808.095.906,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.22
Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	543.961.406.000	525.194.266.097	96,55
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	2.037.905.046.494	2.011.406.600.656	98,70
3	Belanja Hibah Dana BOS	734.519.050.000	729.447.844.153	99,31
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	41.759.385.000	41.759.385.000	100,00
	Jumlah	3.358.144.887.494	3.307.808.095.906	98,50

a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat adalah hibah yang diberikan kepada instansi Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional instansi Pemerintah Pusat yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp543.961.406.000,00 terealisasi sebesar Rp525.194.266.097,00 atau 96,55%.

b. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia adalah hibah yang diberikan kepada Badan/Lembaga kemasyarakatan bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah berbadan hukum, memiliki surat keterangan terdaftar dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur atau pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan



nilai manfaat serta mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.037.905.046.494,00 dan terealisasi sebesar Rp2.011.406.600.656,00 atau 98,70%.

c. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja Hibah Dana BOS adalah hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer secara langsung ke rekening sekolah swasta. Nilai Belanja Hibah BOS adalah sebesar nilai transfer dana BOS ke rekening sekolah swasta.

Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp734.519.050.000,00 terealisasi sebesar Rp729.447.844.153,00 atau 99,31% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.23

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Dana BOS ke SLB Swasta	19.603.020.000	19.546.159.794	99,71
2	Belanja Hibah Dana BOS ke SD/MI Swasta	171.690.230.000	170.152.197.837	99,10
3	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	145.586.860.000	144.355.620.038	99,15
4	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	142.690.200.000	141.364.108.550	99,07
5	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	254.948.740.000	254.029.757.934	99,64
	Jumlah	734.519.050.000	729.447.844.153	99,31

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah Bantuan keuangan dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp41.759.385.000,00 dan terealisasi sebesar Rp41.759.385.000,00 atau 100,00%.

5.1.2.1.1.f Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah



dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.551.461.654.483,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.496.629.048.637,00 atau 98,46%.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 tidak terserap sebesar Rp54.832.605.846,00 atau 1,54% disebabkan oleh adanya mekanisme verifikasi yang lebih selektif dalam pencairan bantuan sosial agar tepat sasaran.

Apabila realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp4.363.641.476.668,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun 2024 sebesar Rp867.012.428.031,00,00 atau 19,87%.

Realisasi Belanja Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.496.629.048.637,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.24

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.542.472.981.186	3.487.787.138.637	98,46
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.988.673.297	8.841.910.000	98,37
	Jumlah	3.551.461.654.483	3.496.629.048.637	98,46

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu

Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu merupakan bantuan sosial berupa biaya personil peserta didik dan kesejahteraan keluarga.

Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.542.472.981.186,00 terealisasi sebesar Rp3.487.787.138.637,00 atau 98,46%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bantuan Biaya Personal Pendidikan KJP Plus	2.461.029.973.093	2.454.165.542.631	99,72



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Bantuan Biaya Personal Pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)	281.682.000.000	278.811.000.000	98,98
3	Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah	108.296.648.093	92.226.036.006	85,16
4	Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Dalam Penanganan COVID 19	654.000.000	654.000.000	100,00
5	Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ)	530.363.280.000	516.060.930.000	97,30
6	Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui Kartu Anak Jakarta (KAJ)	95.910.300.000	82.682.935.000	86,21
7	Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)	64.536.780.000	63.186.695.000	97,91
	Jumlah	3.542.472.981.186	3.487.787.138.637	98,46

b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat merupakan bantuan sosial penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas berupa kursi roda, alat bantu dengar, kaki palsu, tongkat kaki, dan sebagainya.

Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp8.988.673.297,00 terealisasi sebesar Rp8.841.910.000,00 atau 98,37%.

5.1.2.1.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp12.989.055.827.469,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.004.785.255.543,00 atau 84,72% mengalami kenaikan sebesar Rp2.147.525.187.245,00 atau 24,25% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.857.260.068.298,00.

Terdapat realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dengan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun (RPBATA) sebesar Rp235.107.098.320, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah sebesar Rp159.840.000,00 terdapat pada Dinas Perhubungan merupakan pengadaan lahan untuk pembangunan MRT fase 2.



2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp129.255.396.706,00 di antaranya terdapat pada:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp89.208.466.150,00 merupakan pengadaan prasarana sarana pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan dan pengadaan Kendaraan Operasional Dinas (KDO);
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp6.955.938.180,00 merupakan pengadaan alat kesehatan; dan
 - c. Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp13.040.461.637,00 merupakan pengadaan mebel.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp85.698.306.650,00 di antaranya terdapat pada:
 - a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp39.005.328.999,00 merupakan pembangunan rumah susun Jagakarsa Jakarta Selatan;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp8.231.679.460,00 merupakan rehabilitasi gedung dinas; dan
 - c. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp7.341.618.040,00 merupakan restorasi rumah dinas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, perencanaan pembangunan markas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, pembangunan gedung parkir Jatibaru dan perawatan bangunan gedung dinas teknis Jatibaru.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp19.993.554.964,00 di antaranya terdapat pada:
 - a. Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp12.432.186.006,00 merupakan pembangunan waduk Marunda dan bangunan kelengkapannya di pesisir Jakarta;
 - b. Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp3.653.843.520,00 merupakan pembangunan fasilitas pendukung saringan sampah TB. Simatupang; dan
 - c. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp1.230.697.712,00 merupakan pembangunan Saluran Penghubung (PHB) dan kelengkapannya.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1.1.2.a Belanja Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp763.402.783.015,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp433.525.287.650,00 atau 56,79% dan mengalami penurunan sebesar Rp9.075.020.820,00 atau 2,05% bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp442.600.308.470,00. Tidak optimalnya realisasi



Belanja Modal Tanah di antaranya disebabkan oleh belum terlaksananya pembayaran pengadaan tanah pada Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Perhubungan karena terdapat tahapan yang masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal Tanah untuk bangunan air pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp476.315.215.500,00 terealisasi sebesar Rp371.698.983.538,00 atau 78,04%;
- b. Belanja Modal Tanah untuk jalan pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp249.870.465.000,00 terealisasi sebesar Rp58.190.549.010,00 atau 23,29%; dan
- c. Belanja Modal Tanah untuk jaringan pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp37.217.102.515,00 terealisasi sebesar Rp3.635.755.102,00 atau 9,77%.

Dari realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp433.525.287.650,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Tanah sebesar Rp424.288.474.547,00 dan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Tanah sebesar Rp9.236.813.103,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun 2024 yang menjadi Beban sebesar Rp6.715.345.213,00; dan
2. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp2.521.467.890,00.

5.1.2.1.1.2.b Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.169.221.270.721,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.961.717.289.383,00 atau 93,45% mengalami kenaikan sebesar Rp138.741.159.134,00 atau 4,91% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.822.976.130.249,00. Kurang optimalnya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan oleh adanya efisiensi pengadaan. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp345.568.547.692,00 terealisasi sebesar Rp336.748.313.836,00 atau 97,45%;



- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BOS serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp297.953.822.400,00 terealisasi sebesar Rp291.830.156.838,00 atau 97,94%;
- c. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp144.750.037.912,00 terealisasi sebesar Rp141.206.350.508,00 atau 97,55%;
- d. Belanja Modal komputer, alat studio serta peralatan dan mesin lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp154.149.003.986,00 terealisasi sebesar Rp135.572.652.528,00 atau 87,95%; dan
- e. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp119.814.882.952,00,00 terealisasi sebesar Rp109.916.089.069,00 atau 91,74%.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.961.717.289.383,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.748.602.591.480,00 dan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp213.114.697.903,00 yang terdiri dari:

- 1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang masih Dalam Proses Pengerjaan sebesar Rp149.801.506.774,00;
- 2. Belanja Modal atas pekerjaan kontraktual belum selesai yang menggunakan mekanisme RPBATA sebesar Rp48.702.830.358,00;
- 3. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang menjadi Beban Operasional sebesar Rp12.887.497.756,00;
- 4. Pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp1.234.347.102,00; dan
- 5. Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 atas Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya sebesar Rp488.515.913,00.

5.1.2.1.1.2.c Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.441.760.532.962,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.385.010.773.455,00 atau 69,30% mengalami kenaikan sebesar Rp731.955.110.045,00 atau 44,28% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.653.055.663.410,00. Anggaran Belanja



Modal Gedung dan Bangunan belum terealisasi dengan optimal di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan karena adanya pemberian kesempatan 50 hari penyelesaian pekerjaan yang berlanjut ke tahun berikutnya.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal bangunan gedung tempat pendidikan dan gedung kantor pada Unit Pengelola Prasarana dan Saran Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp1.327.479.231.571,00 terealisasi sebesar Rp772.759.252.727,00 atau 58,21%;
- b. Belanja Modal bangunan rumah dinas dan gedung kantor pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp737.214.884.638,00 terealisasi sebesar Rp416.674.516.794,00 atau 56,52%;
- c. Belanja Modal flat/rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp356.632.866.409,00 terealisasi sebesar Rp330.158.887.007,00 atau 92,58%;
- d. Belanja Modal bangunan gedung tempat olahraga, gedung kantor dan pagar pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp195.158.756.463,00 terealisasi sebesar Rp177.655.238.862,00 atau 91,03%; dan
- e. Belanja Modal untuk bangunan gedung kantor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp135.331.366.692,00 terealisasi sebesar Rp90.936.919.787,00 atau 67,20%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.385.010.773.455,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.606.666.459.534,00 dan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp778.344.313.921,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang masih Dalam Proses Pengerjaan sebesar Rp673.903.210.435,00;
2. Pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp75.771.592.587,00;
3. Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka sebesar Rp13.978.875.153,00;
4. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang menjadi beban sebesar Rp11.172.050.076,00;



5. Belanja Modal atas pekerjaan kontraktual belum selesai yang menggunakan mekanisme RPBATA sebesar Rp2.398.606.038,00; dan
6. Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 atas temuan, klaim bank garansi, dan koreksi lainnya sebesar Rp1.119.979.632,00.

5.1.2.1.1.2.d Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp5.352.974.561.800,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.975.949.887.118,00 atau 92,96% mengalami kenaikan sebesar Rp1.176.922.313.642,00 atau 30,98% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.799.027.573.476,00. Kurang optimalnya Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi di antaranya disebabkan oleh adanya efisiensi pembangunan waduk di Dinas Sumber Daya Air.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal jaringan listrik, jalan, instalasi air kotor, air irigasi dan pengolahan sampah pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp1.393.444.620.779,00 terealisasi sebesar Rp1.371.937.840.088,00 atau 98,46%;
- b. Belanja Modal bangunan waduk irigasi, air irigasi, bangunan pengamanan sungai dan instalasi air kotor pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp1.453.939.470.013,00 terealisasi sebesar Rp1.209.088.314.201,00 atau 83,16%;
- c. Belanja Modal untuk jalan provinsi, jembatan penyeberangan dan instalasi air kotor pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp974.014.646.339,00 terealisasi sebesar Rp937.068.920.322,00 atau 96,21%;
- d. Belanja Modal bangunan air irigasi, bangunan pengamanan sungai dan instalasi air pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp131.719.781.242,00 terealisasi sebesar Rp129.774.028.421,00 atau 98,52%; dan
- e. Belanja Modal bangunan air irigasi dan instalasi air pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp123.442.172.307,00 terealisasi sebesar Rp118.986.622.115,00 atau 98,52%.

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.975.949.887.118,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.350.424.851.647,00 dan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Jalan,



Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.625.525.035.471,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp77.926.504.446;
2. Belanja Modal yang di akui sebagai Uang Muka sebesar Rp57.150.309.759,00;
3. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang menjadi beban sebesar Rp25.881.455.082,00;
4. Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 atas temuan, klaim bank garansi, dan koreksi lainnya sebesar Rp1.893.720.921,00;
5. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang masih dalam proses pengerjaan Rp1.462.143.558.321; dan
6. Belanja Modal atas pekerjaan kontraktual belum selesai yang menggunakan mekanisme RPBATA sebesar Rp529.486.942,00.

5.1.2.1.1.2.e Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp128.157.171.217,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp119.496.671.697,00 atau 93,24% mengalami penurunan sebesar Rp20.103.720.996,00 atau 14,40% bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp139.600.392.693,00. Kurang optimalnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di antaranya disebabkan oleh adanya efisiensi hasil negosiasi harga dan penyesuaian kebutuhan satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan.

Realisasi belanja Aset Tetap lainnya tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BOS dan buku pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp115.328.309.627,00 terealisasi sebesar Rp107.889.492.352,00 atau 93,55%;
- b. Belanja Modal buku pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp2.788.700.464,00 terealisasi sebesar Rp2.779.829.994,00 atau 99,68%;
- c. Belanja Modal alat musik dan alat peraga kesenian pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp1.759.966.434,00 terealisasi sebesar Rp1.647.783.000,00 atau 93,63%;
- d. Belanja Modal buku pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp1.210.110.320,00 terealisasi sebesar Rp1.194.102.500,00 atau 98,68%; dan



- e. Belanja Modal buku pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp1.050.264.420,00 terealisasi sebesar Rp975.914.081,00 atau 92,92%.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp119.496.671.697,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp85.633.503.655,00 dan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp33.863.168.042,00 yang disajikan sebagai Beban.

5.1.2.1.1.2.f Belanja Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp133.539.507.754,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp129.085.346.240,00 atau 96,66% mengalami kenaikan sebesar Rp129.085.346.240,00 atau 100,00% karena tidak ada realisasi di Tahun Anggaran 2023. Kurang optimalnya Belanja Modal Aset Lainnya di antaranya disebabkan oleh adanya efisiensi pengadaan Lisensi pada Unit Pengelola Jakarta Smart City.

Realisasi belanja Aset lainnya tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal *Software* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp115.456.062.981,00 terealisasi sebesar Rp113.463.364.940,00 atau 98,27%;
- b. Belanja Modal *Lisensi* dan *Franchise* pada Pusat Data dan Informasi Keuangan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp3.069.663.375,00 terealisasi sebesar Rp2.999.897.500,00 atau 97,73%;
- c. Belanja Modal *Lisensi* dan *Franchise dan Software* pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp2.958.375.000,00 terealisasi sebesar Rp2.826.615.000,00 atau 95,55%;
- d. Belanja Modal *Lisensi* dan *Franchise dan Software* pada Unit Pengelola Jakarta Smart City Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp4.535.641.899,00 terealisasi sebesar Rp2.433.720.000,00 atau 53,66%; dan
- e. Belanja Modal *Software* pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp2.368.652.041,00 terealisasi sebesar Rp2.367.700.000,00 atau 99,96%.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp129.085.346.240,00, seluruhnya disajikan sebagai Aset Lainnya.



5.1.2.1.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan belanja yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya atau keadaan darurat mendesak.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.365.518.170.267,00. Tidak ada realisasi BTT Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dikarenakan tidak adanya kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak. Tidak ada realisasi BTT Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dikarenakan tidak adanya kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak.

5.1.2.1.1.4 Belanja Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Transfer/Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Belanja Transfer/Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp385.033.285.520,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp383.997.067.520,00 atau 99,73%. Anggaran realisasi Belanja Bantuan Keuangan tidak terealisasi sepenuhnya disebabkan oleh tidak terserapnya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota Tangerang. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp383.997.067.520,00 berasal dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2024

26

No	Nama Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota			
1	Pemerintah Kota Bekasi	1.000.000.000	994.826.000	99,48
2	Pemerintah Kabupaten Bekasi	1.000.000.000	994.826.000	99,48
3	Pemerintah Kota Bogor	1.000.000.000	994.826.000	99,48
4	Pemerintah Kabupaten Bogor	1.000.000.000	994.826.000	99,48
5	Pemerintah Kota Tangerang	1.000.000.000	0	0,00



No	Nama Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Pemerintah Kabupaten Tangerang	1.000.000.000	994.826.000	99,48
7	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	1.000.000.000	994.826.000	99,48
8	Pemerintah Kota Depok	1.000.000.000	994.826.000	99,48
	Sub Jumlah	8.000.000.000	6.963.782.000	87,05
B	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pemerintah Kota Bekasi	371.773.962.000	371.773.962.000	100,00
2	Pemerintah Kabupaten Bekasi	5.259.323.520	5.259.323.520	100,00
	Sub Jumlah	377.033.285.520	377.033.285.520	100,00
	Jumlah	385.033.285.520	383.997.067.520	99,73

Apabila realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp356.446.480.500,00 terdapat kenaikan realisasi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp27.550.587.020,00 atau 7,73%.

Belanja BLUD

Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 termasuk Belanja yang didanai dari Pendapatan BLUD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 55 Belanja BLUD terdiri dari Belanja Operasi BLUD dan Belanja Modal BLUD. Total anggaran Belanja BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.171.928.289.070,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.980.905.126.090,00 atau 95,42%. Belanja BLUD, terdiri dari:

- a. Belanja Operasi BLUD mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi BLUD. Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Operasi BLUD dianggarkan sebesar Rp3.840.400.573.896,00 dan terealisasi sebesar Rp3.700.858.357.054,00 atau 96,37% dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Belanja Pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp222.991.846.100,00 dan terealisasi sebesar Rp207.197.598.607,00 atau 92,92%.
 - 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp3.617.408.727.796,00 dan terealisasi sebesar Rp3.493.660.758.447,00 atau 96,58%.
- b. Belanja Modal BLUD mencakup seluruh Belanja BLUD untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan,



Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya.

Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal BLUD dianggarkan sebesar Rp331.527.715.174,00 dan terealisasi sebesar Rp280.046.769.036,00 atau 84,47% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp199.710.384.600,00 dan terealisasi sebesar Rp175.011.343.994,00 atau 87,63%;
- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp124.435.312.867,00 dan terealisasi sebesar Rp98.718.271.842,00 atau 79,33%;
- 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp5.782.600.107,00 dan terealisasi sebesar Rp5.432.395.700,00 atau 93,94%;
- 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp1.203.567.600,00 dan terealisasi sebesar Rp491.757.500,00 atau 40,86%; dan
- 5) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp395.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp393.000.000,00 atau 99,28%.

Selain realisasi belanja tersebut di atas, terdapat belanja BLUD yang belum disahkan sebesar Rp196.325.233,00 pada UP Terminal Terpadu Pulo Gebang dan SMK Negeri 57 Jakarta karena melebihi ambang batas pengesahan belanja BLUD. Belanja yang belum disahkan pada UP Terminal Terpadu Pulo Gebang sebesar Rp196.123.720,00 merupakan belanja barang dan jasa pada kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD guna pelaksanaan kegiatan operasional Terminal Pulo Gebang khususnya pada masa Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Belanja yang belum disahkan pada SMK Negeri 57 Jakarta sebesar Rp201.513,00 merupakan belanja barang dan jasa pada kegiatan operasional untuk belanja bahan produksi karena ada peningkatan pesanan makanan dan ruangan pada pertengahan hingga akhir tahun.

5.1.2.2 Klasifikasi Urusan

Belanja Daerah menurut Klasifikasi Urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Klasifikasi Urusan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan, dan Kewilayahan yang penanganannya



dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.27

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	42.247.891.005.900	39.437.190.658.046	93,35	38.580.032.579.763
1	Pendidikan	17.780.831.753.367	16.786.112.162.883	94,41	16.201.439.626.040
2	Kesehatan	10.845.875.887.486	10.401.277.121.757	95,90	10.724.304.443.276
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.060.621.581.050	6.961.529.482.334	86,36	6.203.038.764.647
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.433.518.119.145	1.345.992.644.823	93,89	1.457.866.291.925
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.666.125.746.128	2.543.497.357.142	95,40	2.428.980.997.223
6	Sosial	1.460.917.918.724	1.398.781.889.107	95,75	1.564.402.456.652
II	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	19.176.799.072.502	18.018.597.448.948	93,96	15.795.000.407.689
1	Tenaga Kerja	463.747.326.534	440.346.581.650	94,95	465.648.252.934
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.035.007.234	23.616.938.450	98,26	21.282.381.599
3	Pangan	1.023.075.218.120	1.007.437.399.142	98,47	1.263.489.279.283
4	Pertanahan	2.563.377.046	2.527.787.500	98,61	2.544.200.000
5	Lingkungan Hidup	5.335.230.559.859	5.119.308.421.518	95,95	3.564.073.321.008
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	392.999.963.442	372.495.915.202	94,78	307.347.244.494
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	467.033.126.924	465.756.946.911	99,73	465.818.037.592



No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	197.246.556.406	186.661.536.649	94,63	200.427.200.629
9	Perhubungan	7.170.007.662.820	6.557.630.799.290	91,46	6.250.475.611.783
10	Komunikasi dan Informatika	773.763.124.353	665.027.904.567	85,95	592.057.315.269
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	247.620.698.178	235.420.385.134	95,07	218.412.113.931
12	Penanaman Modal	781.931.306.010	752.603.485.273	96,25	715.395.751.782
13	Kepemudaan dan Olahraga	1.547.180.901.366	1.486.821.274.565	96,10	1.018.397.155.065
14	Statistik	7.883.316.582	6.448.874.000	81,80	5.879.373.700
15	Persandian	8.041.176.320	7.205.840.040	89,61	14.710.520.000
16	Kebudayaan	465.545.189.929	429.725.960.725	92,31	469.070.578.956
17	Perpustakaan	104.352.157.725	101.664.392.075	97,42	77.232.292.878
18	Kearsipan	164.542.403.654	157.897.006.257	95,96	142.739.776.786
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	1.051.777.854.394	972.704.988.086	92,48	1.052.586.716.964
1	Kelautan dan Perikanan	33.079.378.022	31.402.045.098	94,93	49.913.442.011
2	Pariwisata	412.251.605.638	383.444.641.730	93,01	375.055.403.592
3	Pertanian	44.647.639.023	43.249.011.440	96,87	42.956.177.389
4	Kehutanan	407.002.952.115	373.400.187.134	91,74	403.539.403.791
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	32.812.025.764	27.616.762.570	84,17	32.132.609.833
6	Perdagangan	55.276.957.615	50.805.535.433	91,91	46.263.829.324
7	Perindustrian	66.707.296.217	62.786.804.681	94,12	102.725.851.024
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2.361.003.417.864	2.266.547.374.141	96,00	2.182.729.677.500
1	Sekretariat Daerah	1.504.619.343.744	1.450.604.453.707	96,41	1.412.902.105.296
2	Sekretariat DPRD	856.384.074.120	815.942.920.434	95,28	769.827.572.204
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	4.659.753.798.707	2.991.577.985.109	64,20	2.809.707.455.104
1	Perencanaan	176.787.234.044	165.767.555.504	93,77	120.142.823.053
2	Keuangan	4.141.144.313.424	2.519.599.086.837	60,84	2.432.059.695.795
3	Kepegawaian	234.078.887.664	205.774.319.289	87,91	157.542.734.250
4	Pendidikan dan Pelatihan	100.126.413.121	93.152.101.379	93,03	98.415.261.406
5	Penelitian dan Pengembangan	7.616.950.454	7.284.922.100	95,64	1.546.940.600
VI	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	241.644.019.498	198.488.489.660	82,14	164.905.452.694
1	Inspektorat Daerah	241.644.019.498	198.488.489.660	82,14	164.905.452.694
VII	Unsur Kewilayahan	5.294.789.160.355	5.145.549.347.575	97,18	4.941.531.029.169
1	Kecamatan Administrasi	3.074.338.659.192	3.024.135.809.634	98,37	2.979.376.794.645
2	Kota Administrasi	2.092.061.112.523	2.000.052.042.439	95,60	1.841.857.205.696
3	Kabupaten Administrasi	128.389.388.640	121.361.495.502	94,53	120.297.028.828
VII I	Kesatuan Bangsa dan Politik	989.454.881.713	982.061.548.321	99,25	1.244.116.309.531
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	989.454.881.713	982.061.548.321	99,25	1.244.116.309.531
	Jumlah (I. II. III. IV. V. VI. VII. dan VIII)	76.023.113.210.933	70.012.717.839.886	92,09	66.770.609.628.414

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	9.679.779.777.502	8.904.201.517.745	91,99
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.101.051.975.865	7.881.910.645.138	97,29
Jumlah		17.780.831.753.367	16.786.112.162.883	94,41

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.422.070.204.223	6.120.607.249.260	95,31
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.848.735.747.202	2.752.804.914.427	96,63
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.574.265.029.299	1.527.091.732.070	97,00
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	528.938.455	514.743.000	97,32
5.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	275.968.307	258.483.000	93,66
Jumlah		10.845.875.887.486	10.401.277.121.757	95,90

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.050.685.548.907	1.829.815.735.712	89,23
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	1.908.700.900.429	1.652.290.016.276	86,57
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.602.730.295.241	1.514.049.592.684	94,47
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	916.029.345.920	888.464.544.709	96,99
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	659.333.715.040	483.737.685.134	73,37
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	766.373.472.109	445.286.233.429	58,10
7.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	134.019.098.206	127.049.949.841	94,80
8.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	22.266.374.312	20.404.747.385	91,64
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	482.830.886	430.977.164	89,26
Jumlah		8.060.621.581.050	6.961.529.482.334	86,36



4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	565.861.327.964	537.372.766.140	94,97
2.	Program Pengembangan Perumahan	452.524.707.988	437.392.871.999	96,66
3.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	415.132.083.193	371.227.006.684	89,42
Jumlah		1.433.518.119.145	1.345.992.644.823	93,89

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.925.648.123.912	1.831.168.954.633	95,09
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	357.464.445.377	340.537.097.491	95,26
3.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	280.006.679.170	274.753.990.681	98,12
4.	Program Penanggulangan Bencana	103.006.497.669	97.037.314.337	94,21
Jumlah		2.666.125.746.128	2.543.497.357.142	95,40

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	749.140.348.344	719.136.164.823	95,99
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	359.560.543.933	341.267.689.771	94,91
3.	Program Rehabilitasi Sosial	293.805.295.886	284.563.992.435	96,85
4.	Program Penanganan Bencana	38.250.636.529	35.257.044.218	92,17
5.	Program Pemberdayaan Sosial	20.161.094.032	18.556.997.860	92,04
Jumlah		1.460.917.918.724	1.398.781.889.107	95,75



b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Realisasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	321.788.886.222	301.552.954.940	93,71
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	105.760.383.117	103.442.917.581	97,81
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	30.225.467.429	29.471.129.199	97,50
4.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	3.677.518.676	3.604.240.890	98,01
5.	Program Hubungan Industrial	2.089.165.000	2.087.310.000	99,91
6.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	205.906.090	188.029.040	91,32
Jumlah		463.747.326.534	440.346.581.650	94,95

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Perlindungan Perempuan	16.617.221.664	16.324.776.976	98,24
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.459.563.794	2.402.082.153	97,66
3.	Program Perlindungan Khusus Anak	2.198.817.547	2.166.301.465	98,52
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.753.470.000	1.749.075.796	99,75
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA),	908.299.229	878.267.060	96,69
6.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	97.635.000	96.435.000	98,77
Jumlah		24.035.007.234	23.616.938.450	98,26

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	795.373.542.140	793.000.639.099	99,70
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	224.919.432.287	211.739.320.753	94,14
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	2.782.243.693	2.697.439.290	96,95
Jumlah		1.023.075.218.120	1.007.437.399.142	98,47



4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penatagunaan Tanah	2.563.377.046	2.527.787.500	98,61
Jumlah		2.563.377.046	2.527.787.500	98,61

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Persampahan	3.279.261.371.029	3.194.798.389.841	97,42
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.037.407.741.690	938.320.359.506	90,45
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	899.052.739.577	869.487.843.215	96,71
4.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	106.726.954.624	104.951.201.514	98,34
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	5.167.302.333	5.093.933.708	98,58
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.700.833.332	2.484.211.966	91,98
7.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	2.849.767.004	2.267.096.738	79,55
8.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.434.537.918	1.360.730.750	94,85
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	629.312.352	544.654.280	86,55
Jumlah		5.335.230.559.859	5.119.308.421.518	95,95

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	320.592.224.819	302.233.765.954	94,27
2.	Program Pendaftaran Penduduk	63.678.272.500	62.790.059.654	98,61
3.	Program Pencatatan Sipil	6.297.553.416	5.046.248.558	80,13
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.103.756.201	2.101.297.691	99,88
5.	Program Pengelolaan	328.156.506	324.543.345	98,90



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Profil Kependudukan			
Jumlah		392.999.963.442	372.495.915.202	94,78

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	467.033.126.924	465.756.946.911	99,73
Jumlah		467.033.126.924	465.756.946.911	99,73

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	177.786.738.263	168.216.091.215	94,62
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	9.060.007.967	8.610.047.494	95,03
3.	Program Pengendalian Penduduk	8.558.052.429	8.011.297.090	93,61
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.841.757.747	1.824.100.850	99,04
Jumlah		197.246.556.406	186.661.536.649	94,63

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.269.558.691.719	5.705.198.220.669	91,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	856.741.629.586	812.987.434.642	94,89
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	39.767.739.396	35.829.816.457	90,10
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	3.939.602.119	3.615.327.522	91,77
Jumlah		7.170.007.662.820	6.557.630.799.290	91,46

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	591.983.240.816	502.571.846.010	84,90
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	116.930.860.996	105.973.192.772	90,63



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Daerah Provinsi			
3.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	64.849.022.541	56.482.865.785	87,10
Jumlah		773.763.124.353	665.027.904.567	85,95

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	181.050.903.519	171.861.892.367	94,92
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	65.338.433.349	62.395.498.177	95,50
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	748.445.752	735.079.390	98,21
4.	Program Pengembangan UMKM	233.596.279	226.627.800	97,02
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	241.519.279	193.487.400	80,11
6.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	7.800.000	7.800.000	100,00
Jumlah		247.620.698.178	235.420.385.134	95,07

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	608.224.623.701	582.286.415.513	95,74
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	143.024.571.319	141.118.649.082	98,67
3.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	16.773.782.238	16.350.316.335	97,48
4.	Program Promosi Penanaman Modal	8.723.336.557	7.995.671.845	91,66
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.794.386.163	2.575.682.398	92,17
6.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.390.606.032	2.276.750.100	95,24
Jumlah		781.931.306.010	752.603.485.273	96,25

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengembangan daya saing keolahragaan	1.147.748.617.563	1.109.734.386.483	96,69
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	372.338.257.800	351.197.598.199	94,32



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Daerah Provinsi			
3.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	22.530.330.842	21.461.383.041	95,26
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	4.563.695.161	4.427.906.842	97,02
Jumlah		1.547.180.901.366	1.486.821.274.565	96,10

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	7.883.316.582	6.448.874.000	81,80
Jumlah		7.883.316.582	6.448.874.000	81,80

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	8.041.176.320	7.205.840.040	89,61
Jumlah		8.041.176.320	7.205.840.040	89,61

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	273.266.570.748	254.596.289.649	93,17
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	117.715.007.792	104.004.096.092	88,35
3.	Program Pengelolaan Permuseuman	61.189.878.800	58.459.851.019	95,54
4.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	13.373.732.589	12.665.723.965	94,71
Jumlah		465.545.189.929	429.725.960.725	92,31

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	103.462.049.943	100.778.710.156	97,41
2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	890.107.782	885.681.919	99,50
Jumlah		104.352.157.725	101.664.392.075	97,42

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	142.539.525.367	137.102.328.200	96,19
2.	Program Pengelolaan Arsip	22.002.878.287	20.794.678.057	94,51
Jumlah		164.542.403.654	157.897.006.257	95,96

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	10.012.467.092	9.629.135.799	96,17
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8.738.560.772	8.316.359.268	95,17
3.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	8.325.911.790	7.967.455.970	95,69
4.	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.731.890.068	4.353.582.813	92,01
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.270.548.300	1.135.511.248	89,37
Jumlah		33.079.378.022	31.402.045.098	94,93

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	191.724.404.662	177.052.671.706	92,35
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	98.191.726.392	91.696.962.544	93,39
3.	Program Pemasaran Pariwisata	73.322.121.902	68.672.225.255	93,66
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	42.991.437.317	40.323.799.266	93,79
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.021.915.365	5.698.982.959	94,64
Jumlah		412.251.605.638	383.444.641.730	93,01

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.136.988.238	13.293.258.118	94,03



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.	Program Penyuluhan Pertanian	11.322.309.939	11.121.749.904	98,23
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.477.251.030	9.381.938.906	98,99
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	8.731.656.096	8.479.902.617	97,12
5.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	979.433.720	972.161.895	99,26
Jumlah		44.647.639.023	43.249.011.440	96,87

4) Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	375.842.554.668	343.451.258.950	91,38
2.	Program Pengelolaan Hutan	30.081.330.204	28.941.441.513	96,21
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	588.914.786	542.307.876	92,09
4.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	348.131.101	331.172.625	95,13
5.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	142.021.356	134.006.170	94,36
Jumlah		407.002.952.115	373.400.187.134	91,74

5) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	17.699.999.922	15.589.187.922	88,07
2.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	7.675.850.009	6.854.780.000	89,30
3.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	7.436.175.833	5.172.794.648	69,56
Jumlah		32.812.025.764	27.616.762.570	84,17

6) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	40.775.161.309	37.101.178.822	90,99
2.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	7.762.410.578	7.357.891.202	94,79



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	Program Pengembangan Ekspor	6.485.224.350	6.125.311.109	94,45
4.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	254.161.378	221.154.300	87,01
Jumlah		55.276.957.615	50.805.535.433	91,91

7) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	66.697.488.468	62.777.054.681	94,12
2.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	9.807.749	9.750.000	99,41
Jumlah		66.707.296.217	62.786.804.681	94,12

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Realisasi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Sekretariat Daerah

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.027.895.989.377	985.367.307.163	95,86
2.	Program Kesejahteraan Rakyat	350.505.480.298	344.753.042.345	98,36
3.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	81.752.409.742	81.680.048.868	99,91
4.	Program Penataan Organisasi	34.174.191.573	29.544.323.372	86,45
5.	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.145.662.900	3.586.419.900	86,51
6.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3.571.874.195	3.208.705.840	89,83
7.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.361.091.463	2.264.376.219	95,90
8.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	212.644.196	200.230.000	94,16
Jumlah		1.504.619.343.744	1.450.604.453.707	96,41

2) Sekretariat DPRD

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	478.928.429.390	454.299.800.902	94,86



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	377.455.644.730	361.643.119.532	95,81
Jumlah		856.384.074.120	815.942.920.434	95,28

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Belanja Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan sampai dengan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Perencanaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	148.030.755.501	139.769.124.308	94,42
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	25.219.405.981	22.545.839.696	89,40
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.537.072.562	3.452.591.500	97,61
Jumlah		176.787.234.044	165.767.555.504	93,77

2) Urusan Keuangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.686.956.858.271	1.474.537.709.995	87,41
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.983.849.937.666	610.896.313.360	30,79
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	367.732.343.565	339.366.640.267	92,29
4.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	102.605.173.922	94.798.423.215	92,39
Jumlah		4.141.144.313.424	2.519.599.086.837	60,84

3) Urusan Kepegawaian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	168.049.661.234	162.029.915.257	96,42
2.	Program Kepegawaian Daerah	66.029.226.430	43.744.404.032	66,25
Jumlah		234.078.887.664	205.774.319.289	87,91



4) Pendidikan dan Pelatihan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	66.702.582.370	62.844.589.349	94,22
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.423.830.751	30.307.512.030	90,68
Jumlah		100.126.413.121	93.152.101.379	93,03

5) Penelitian dan Pengembangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	7.616.950.454	7.284.922.100	95,64
Jumlah		7.616.950.454	7.284.922.100	95,64

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Realisasi Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Inspektorat

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pembangunan Daerah Provinsi	181.300.048.882	163.159.047.955	89,99
2.	Program Penyelenggara Pengawasan	40.297.704.820	21.660.021.280	53,75
3.	Program Perumusan kebijakan Pendampingan dan Asistensi	20.046.265.796	13.669.420.425	68,19
Jumlah		241.644.019.498	198.488.489.660	82,14

g. Unsur Kewilayahan

Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Kewilayahan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Kecamatan Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pembangunan Daerah Provinsi	2.520.657.356.719	2.488.535.350.251	98,73
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	535.976.188.413	518.517.832.333	96,74
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.705.114.060	17.082.627.050	96,48
Jumlah		3.074.338.659.192	3.024.135.809.634	98,37



2) Kota Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.077.004.371.457	1.985.920.792.906	95,61
2.	Program Pengelolaan Kota Administrasi	15.056.741.066	14.131.249.533	93,85
Jumlah		2.092.061.112.523	2.000.052.042.439	95,60

3) Kabupaten Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	127.851.130.670	120.951.622.302	94,60
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan	538.257.970	409.873.200	76,15
Jumlah		128.389.388.640	121.361.495.502	94,53

h. Unsur Pemerintahan Umum

Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	747.592.996.551	745.922.814.003	99,78
2.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	154.338.566.086	153.635.139.766	99,54
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	58.166.791.596	54.813.475.054	94,23
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	17.174.288.192	16.584.414.681	96,57
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	10.099.039.624	9.029.807.493	89,41
6.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2.083.199.664	2.075.897.324	99,65
Jumlah		989.454.881.713	982.061.548.321	99,25



5.1.3 Surplus/Defisit

Surplus/Defisit pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar (Rp1.076.287.351.044,00). Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.939.376.306.649,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	74.946.825.859.889	72.952.104.892.735
Belanja Daerah	76.023.113.210.933	70.012.728.586.086
Belanja Operasi	61.283.505.927.677	58.623.946.263.023
Belanja Modal	12.989.055.827.469	11.004.785.255.543
Belanja Tidak Terduga	1.365.518.170.267	-
Belanja Transfer	385.033.285.520	383.997.067.520
Surplus/Defisit	(1.076.287.351.044)	2.939.376.306.649

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan anggaran masing-masing Rp10.255.502.731.787,00 dan Rp9.179.215.380.743,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 pada Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan masing-masing Rp9.343.797.504.127,00 dan Rp7.849.321.126.348,00. Berdasarkan nilai realisasi tersebut maka nilai Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp1.494.476.377.779,00. Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut:

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp10.255.502.731.787,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.343.797.504.127,00 atau 91,11%. Tidak optimalnya realisasi tersebut disebabkan oleh realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah yang hanya mencapai Rp2.801.304.537.758,00 atau 75,44% dari anggaran sebesar Rp3.713.081.611.718,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.886.564.884.056,00, maka terdapat peningkatan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp457.232.620.071,00 atau 5,15%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.28

Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	6	6
1	Penggunaan SiLPA	6.542.421.120.069	6.542.421.120.069	100,00	8.600.096.664.254
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.713.081.611.718	2.801.304.537.758	75,44	286.277.630.136



No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	6	6
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	71.846.300	~	190.589.666
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.255.502.731.787	9.343.797.504.127	91,11	8.886.564.884.056

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

5.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA

Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.542.421.120.069,00 dan Rp8.600.096.664.254,00. Nilai anggaran dan realisasi SiLPA Tahun 2024 merupakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diaudit oleh BPK-RI.

5.1.4.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.713.081.611.718,00. Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.801.304.537.758,00 atau 75,44%, mengalami kenaikan sebesar Rp2.515.026.907.622,00 atau 878,53% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp286.277.630.136,00. Penerimaan Pinjaman Daerah tersebut merupakan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat untuk Proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta berdasarkan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1295/DSMI/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang kemudian dijadikan penyertaan modal kepada PT *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta. Kurang optimalnya Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024 disebabkan adanya pergeseran jadwal pekerjaan, penurunan nilai kontrak, dan penyesuaian kurs aktual atas penerimaan pinjaman proyek MRT Jakarta.

5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman tersebut merupakan Penyetoran Pokok Dana Bergulir Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ke Kas Daerah. Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.846.300,00 atau 100%, mengalami penurunan sebesar Rp118.743.366,00 atau 62,30% bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp190.589.666,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp9.179.215.380.743,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp7.849.321.126.348,00 atau 85,51%. Tidak optimalnya realisasi



disebabkan oleh realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang hanya mencapai Rp5.988.136.019.949 atau 81,83% dari anggaran sebesar Rp7.317.545.546.679. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada berikut.

Tabel 5.29
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.317.545.546.679	5.988.136.019.949	81,83	4.836.397.306.901
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.861.669.834.064	1.861.185.106.399	99,97	1.802.671.036.394
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.179.215.380.743	7.849.321.126.348	85,51	6.639.068.343.295

Penjelasan lebih lanjut realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.849.321.126.348,00 adalah sebagai berikut:

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.317.545.546.679,00. Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.988.136.019.949,00 atau 81,83%, mengalami kenaikan sebesar Rp1.151.738.713.048,00 atau 23,81% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.836.397.306.901,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

- Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung sebesar Rp225.000.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun Anggaran 2024 Nomor 700/HK.01.11 tanggal 23 Desember 2024;
- Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Propertindo sebesar Rp2.183.400.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Tambahan (adendum) II atas Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2023 Nomor 606/HK.01.11 tanggal 11 November 2024;
- Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank DKI Jakarta sebesar Rp2.190.760.167,00 Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI



Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Bank DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor 646/HK.01.11 tanggal 4 Desember 2024;

- d. Penyertaan Modal Daerah pada PT *Mass Rapid Transit* Jakarta sebesar Rp3.377.545.259.782,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 330 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas *Mass Rapid Transit* Jakarta (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan *Phase II* (Bundaran HI – Kota); dan
- e. Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah sebesar Rp200.000.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Penjamin Kredit Daerah Tahun Anggaran 2024 nomor 50/HK.01.11 tanggal 19 Januari 2024.

5.1.4.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran pembayaran atas utang kepada Pemerintah Pusat atas proyek JEDI dan pendanaan PEN. Pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.861.669.834.064,00 dengan realisasi sebesar Rp1.861.185.106.399,00 atau 99,97%. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp58.514.070.005,00 atau 3,25% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.802.671.036.394,00. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo terdiri dari pembayaran cicilan melalui mekanisme pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp922.491.898.278,00 dan melalui mekanisme pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp938.693.208.121,00.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.433.850.834.046,00 yang merupakan perhitungan dari realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp72.952.092.296.153,00, realisasi Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp70.012.717.839.886,00 dan Pembiayaan Neto sebesar Rp1.494.476.377.779,00.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan. Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.



Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.433.850.834.046,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

<u>Tahun 2023</u>		
SAL per 31 Desember 2023		6.542.421.120.069,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan		<u>(6.542.421.120.069,00)</u>
Subtotal		0,00
<u>Tahun 2024</u>		
Pendapatan	72.952.092.296.153,00	
Belanja dan Transfer	<u>(70.012.717.839.886,00)</u>	
Surplus		2.939.374.456.267,00
Penerimaan Pembiayaan	9.343.797.504.127,00	
Pengeluaran Pembiayaan	<u>(7.849.321.126.348,00)</u>	
Pembiayaan Neto		<u>1.494.476.377.779,00</u>
SAL 31 Desember 2024		4.433.850.834.046,00

Rincian SAL/SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.433.850.834.046,00 adalah sebagai berikut:

1	Kas Daerah	3.416.945.253.102,00
2	Pendapatan yang Belum Disetor	346.000,00
3	Sisa Belanja UP/GU/TU	3.060.877.881,00
4	Kas BLUD - Kas Tunai	700.266.859,00
5	Kas BLUD - Kas di Bank	937.293.659.466,00
6	Kas Bank BOS	74.981.577.371,00
7	Kas Bank BOP Kesetaraan	166.000.907,00
8	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	506.527.225,00
9	Uang Muka Belanja BLUD	196.325.233,00
10	Pembulatan	2,00
	Jumlah	4.433.850.834.046,00

SAL/SiLPA sebesar Rp4.433.850.834.046,00 tersebut berbeda dengan saldo kas di Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.438.778.793.507,00. Saldo Kas merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selisih antara SiLPA Tahun Anggaran 2024 dengan Kas di Neraca sebesar Rp4.927.959.461,00 dirinci sebagai berikut.

Rincian Selisih Saldo Kas dengan SiLPA:	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.373.166.939,00
Uang Muka Pasien RSUD/K	565.419.352,00



Uang Jaminan Kerja Sama	60.000.000,00
Uang Titipan	2.400.510.747,00
Uang Muka Jasa BLUD	142.697.100,00
Kas di Bendahara Sekolah Lainnya	958.997.783,00
Kas Lainnya	130.020.000,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(506.527.225,00)
Uang Muka Belanja BLUD	(196.325.233,00)
Pembulatan	(2,00)
Total	4.927.959.461,00

5.3 Neraca

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun.

5.3.1.1.1 Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh *item*. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.416.945.253.102,00 dan Rp5.454.632.626.327,00. Dalam rangka



pengelolaan kas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyimpan dana dalam bentuk giro. Rincian dari saldo Kas di Kas Daerah tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.30

Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Bank	Nomor rekening	Peruntukan Rekening	Dasar Penetapan Rekening	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bank DKI Cab. Utama Balaikota	108-02-01575-9	Rekening Penampungan Penerimaan dan Pengeluaran	Kepgub No. 529 Tahun 2023	3.333.798.389.403	5.436.711.258.110
2	Bank DKI Cab. Utama Juanda	101.02.06015-3	Rekening Penampungan Jasa Giro dan Penerimaan Lainnya	Kepgub No. 529 Tahun 2023	76.019	56.981
3	Bank Mandiri Cab. Wisma Alia	1.230.098.157.979	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	Kepgub No. 529 Tahun 2023	34.903	1.957.641
4	Bank BTN Cab. Harmoni	00014.01.30.0017 56.6	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	Kepgub No. 529 Tahun 2023	2.452.473	2.233.584
5	B S I	7268763869	Rekening Khusus Penerimaan Bunga Deposito	Keputusan Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta No. 18 Tahun 2024	4.697	0
6	BRI Cabang Jakarta Tanah Abang	0018-01-004391-30-7	Rekening Khusus Penerimaan Pajak	Keputusan Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta No. 18 Tahun 2024	147.662.309	0
7	Bank DKI	108.16.17010.7	Rekening Khusus SIMPAD	Kepgub No. 529 Tahun 2023	0	1.600.000
8	Bank DKI	108.16.17009.3	Rekening Khusus SIMPAD	Kepgub No. 529 Tahun 2023	22.588.820.233	1.016.683.842
9	Bank DKI	108.16.17095.6	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	16.614.596	320.115.900
10	Bank DKI	108.16.17094.8	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	54.373.349.975	12.973.650.209
11	Bank Mandiri	104-00-22062017	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	1.651.119.829	2.982.912.557
12	Bank BNI	6000686867	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	47.348.173	359.596.408
13	Bank CIMB Niaga	800034210900	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	4.262.532.696	95.507.807
14	BJB (PBB)	0067263332400	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	15.042.300	0
15	Bank Danamon	3600807519	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	0	1.600.473



No	Nama Bank	Nomor rekening	Peruntukan Rekening	Dasar Penetapan Rekening	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
16	Bank OCBC NISP	545800052213	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	18.043.083	78.188.543
17	BANK MEGA	107-4001100-1860	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	1.764.023	0
18	PT POS Indonesia		Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)		21.998.390	87.264.272
		Jumlah			3.416.945.253.102	5.454.632.626.327

Kas di Kas Daerah pada Bank BJB nomor rekening 0067263332400 per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.042.300,00 termasuk setoran dalam perjalanan (*Deposit in Transit*) sebesar Rp5.000,00 yang merupakan kekurangan pelimpahan oleh Bank atas Pendapatan Pajak Daerah, dan telah diterima di Kas Umum Daerah pada tanggal 3 Januari 2025.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp346.000,00 dan Rp109.645.250,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan berupa kas tunai yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan akhir periode 31 Desember 2024 atas Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, dikarenakan adanya penerimaan Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah (UPPD) pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang telah melewati batas waktu operasional Bank DKI.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.181.233.945,00 dan Rp329.382.648,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Sisa Belanja UP/GU	2.527.302	329.382.648
2	Sisa Belanja TU	3.058.350.579	0
3	Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	120.356.064	0
	Jumlah	3.181.233.945	329.382.648

Rincian dan penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sisa Belanja UP/GU

Sisa Belanja UP/GU merupakan sisa kas dari pencairan SP2D UP/GU yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember



2024. Sisa Belanja UP/GU per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.527.302,00 dan Rp329.382.648,00.

Sisa Belanja UP/GU per 31 Desember 2024 terdapat di Dinas Perhubungan sebesar Rp1.624.991,00, Suku Dinas Pendidikan I Jakarta Selatan sebesar Rp871.750,00, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Jakarta Selatan sebesar Rp30.461,00, dan Suku Badan Kepegawaian Jakarta Barat sebesar Rp100,00.

b. Sisa Belanja TU

Sisa Belanja TU merupakan sisa kas dari pencairan SP2D TU yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Sisa Belanja TU per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.058.350.579,00 dan Rp0,00.

Sisa Belanja TU per 31 Desember 2024 terdapat di Sudin Pendidikan I Jakarta Selatan sebesar Rp3.049.936.472,00 dan Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Jakarta Selatan sebesar Rp8.414.107,00.

c. Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor

Saldo Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp120.356.064,00 dan Rp0,00. Saldo Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2024 terdapat di Sekretariat DPRD sebesar Rp120.000,00 dan Sudin Pendidikan II Jakarta Pusat sebesar Rp120.236.064,00.

5.3.1.1.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Potongan PFK di BLUD, Uang Muka Pelayanan dan lainnya.

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp942.341.899.395,00 dan Rp1.008.514.643.569,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas Tunai	700.266.859	1.197.791.647
2	Kas di Bank	937.293.659.466	1.000.840.280.678
3	Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	941.418.323	123.669.297
4	Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	237.927.548	134.902.031
5	Uang Muka Pasien RSUD/K	565.419.352	375.151.361
6	Uang Jaminan Kerja sama	60.000.000	3.289.499.147
7	Uang Titipan	2.400.510.747	2.474.424.408
8	Uang Muka Jasa BLUD	142.697.100	78.925.000
	Jumlah	942.341.899.395	1.008.514.643.569

Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 terdapat pada unit sebagai berikut.



No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Unit Pengelola Dana Perumahan	25.870.662.517	17.448.397.226
2	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	3.815.320.349	7.104.503.363
3	Unit Pengelola Perparkiran	1.929.781.332	11.665.718.611
4	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	101.241.330	681.842.881
5	BLUD di bawah koordinasi Dinas Kesehatan	308.521.628.310	812.428.462.579
6	BLUD di bawah koordinasi Dinas Pendidikan	1.352.360.577	1.181.862.044
7	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	1.939.035.838	1.029.808.571
8	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung	2.813.716.865	8.396.044.390
9	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	4.324.765.344	4.281.907.067
10	Unit Pengelola Jakarta <i>Asset Management Center</i>	580.141.667.456	143.278.215.776
11	Unit Pengelola Sampah Terpadu	8.998.688.528	420.513.813
12	Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	1.281.696.901	-
13	Unit Pengelola Jakarta <i>Smart City</i>	1.251.334.048	597.367.248
	Jumlah	942.341.899.395	1.008.514.643.569

Rincian dan Penjelasan Kas dan Setara Kas BLUD tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kas Tunai dan Kas di Bank

Saldo Kas Tunai per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp700.266.859,00 dan Rp1.197.791.647,00, sedangkan saldo Kas di Bank per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp937.293.659.466,00 dan Rp1.000.840.280.678,00.

b. Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp941.418.323,00 dan Rp123.669.297,00 merupakan potongan pajak yang berasal dari dana operasional BLUD yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2024.

Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor tersebut telah dilakukan penyetoran pada Tahun 2025.

c. Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp237.927.548 dan Rp134.902.031,00. Nilai tersebut merupakan potongan iuran BPJS Kesehatan dan Pajak Perhotelan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. BLUD RSUD Cipayung sebesar Rp32.255.472,00 untuk iuran BPJS Kesehatan;



2. BLUD RSUD Koja sebesar Rp78.817.337,00 untuk luran BPJS Kesehatan;
3. BLUD RSUD Budhi Asih sebesar Rp3.749.876,00 untuk luran BPJS Kesehatan; dan
4. BLUD SMK Negeri 57 Jakarta sebesar Rp123.104.863,00 untuk pajak perhotelan atas pelayanan yang diberikan.

Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor tersebut telah dilakukan penyetoran pada awal Tahun 2025 kecuali pada BLUD SMK Negeri 57 Jakarta sebesar Rp68.922.951,00.

d. Uang Muka Pasien RSUD/K

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD sebagai uang muka di awal sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp565.419.352,00 dan Rp375.151.361,00. Rincian saldo tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	RSUD Pasar Minggu	19.932.284	10.625.000
2	RSUD Koja	10.571.257	17.226.433
3	RSUD Tarakan	60.968.800	259.097.149
4	RSUD Cengkareng	459.647.011	79.002.779
5	RSUD Pasar Rebo	8.800.000	9.200.000
6	RSUD Duren Sawit	5.500.000	
	Jumlah	565.419.352	375.151.361

e. Uang Jaminan Kerja Sama

Uang Jaminan Kerja Sama merupakan uang jaminan yang diserahkan oleh pihak yang melakukan kerja sama pengelolaan kawasan parkir dengan BLUD RSUD Koja. Uang Jaminan kerja sama akan dikembalikan saat perjanjian kerja sama tersebut berakhir. Uang Jaminan Kerja Sama per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp3.289.499.147,00. Uang Jaminan Kerja Sama per 31 Desember 2024 terdapat pada RSUD Koja atas penyewaan lahan parkir dengan PT Stellar sebesar Rp60.000.000,00 dalam bentuk Kas di Bank.

f. Uang Titipan

Uang Titipan adalah uang pihak ketiga yang terdapat di Rekening Bank BLUD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.400.510.747,00 dan sebesar Rp2.474.424.408,00 dengan rincian sebagai berikut.



No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	BLUD RSUD Matraman	2.398.597.850	2.398.597.850
2	BLUD Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	0	41.156.603
3	BLUD RSUD Koja	0	29.854.958
4	BLUD Unit Pengelola Perparkiran	0	2.497.100
5	BLUD RSUD Pasar Minggu	1.912.897	1.912.897
6	BLUD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta	0	405.000
Jumlah		2.400.510.747	2.474.424.408

1. Saldo uang titipan pada RSUD Matraman sebesar Rp2.398.597.850,00 merupakan sisa saldo Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim Covid-19 Kemenkes RI yang diterima pada Tahun 2021. Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim Covid-19 Kemenkes RI merupakan Pendapatan Diterima di Muka yang akan diperhitungkan dengan pengajuan klaim pada tahun berikutnya; dan
2. Saldo uang titipan yang terdapat di RSUD Pasar Minggu sebesar Rp1.912.897,00 terdiri dari uang titipan atas kelebihan penerimaan transaksi non tunai melalui mesin *EDC* sebesar Rp866.460,00 dan kelebihan penerimaan atas transfer dari Bank DKI sebesar Rp1.046.437,00.

g. Uang Muka Jasa BLUD

Uang Muka Jasa BLUD adalah dana yang dibayarkan oleh pengguna Jasa BLUD kepada BLUD sebagai uang muka sebelum jasa diberikan selain Uang Muka Pasien RSUD/K. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan BLUD.

Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp142.697.100,00 dan Rp78.925.000,00. Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2024 terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta sebesar Rp8.500.000,00 merupakan uang muka sewa gedung dan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta sebesar Rp134.197.100,00 merupakan uang muka jasa layanan hotel sebesar Rp7.250.000,00 dan uang muka pemesanan makanan sebesar Rp126.947.100,00.

Rincian saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tersaji pada lampiran 2.

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp76.180.041.065,00 dan Rp85.056.746.795,00. Saldo ini berada di 2.008 sekolah pada rekening BOS, rekening BOP Kesetaraan,



rekening penerimaan hibah, rekening kegiatan *Teaching Factory* (TeFa) dan kas tunai dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Saldo Kas	Saldo per 31 Desember 2024	
1	Kas Dana BOS	Rp	75.054.503.815,00
2	Kas Dana BOP Kesetaraan	Rp	166.539.467,00
3	Kas di Bendahara Sekolah Lainnya	Rp	958.997.783,00
	a. Kas Kegiatan TeFa	Rp	839.742.481,00
	Kas Tunai (Kegiatan TeFa)	Rp	480.023.644,00
	Rekening Kegiatan TeFa	Rp	359.718.837,00
	b. Hak Pihak Lain di Rekening BOS	Rp	118.944.852,00
	c. Sisa Dana Hibah	Rp	310.450,00
	Rekening Hibah	Rp	310.250,00
	Kas Tunai (sisa dana hibah)	Rp	200,00
	Jumlah	Rp	76.180.041.065,00

Pencatatan saldo Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Pasal 36 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa Sisa Dana BOSP pada akhir tahun anggaran dilaporkan ke PPKD selaku BUD dan tetap di rekening bank satuan pendidikan serta diakui sebagai SiLPA. Pasal 36 ayat 6 menyatakan bahwa SiLPA Dana BOSP diperhitungkan pada penyaluran anggaran tahun berikutnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Non Fisik.

Penjelasan Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan secara rinci sebagai berikut.

Tabel 5.31
Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan
Per 31 Desember 2024

No.	Jenjang		Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Saldo Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan Per 31 Desember 2024 (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SiLPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SiLPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SiLPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2		3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 5 - 6	8	9 = 7 + 8
Kas Dana BOS									
1	Sekolah Dasar	SD	21.430.900.045	35.543.711	21.395.356.334	61.430.209	21.333.926.125	72.435.028	21.406.361.153
2	Sekolah Menengah Pertama	SMP	17.555.538.982	3.923.927	17.551.615.055	4.276.642	17.547.338.413	478.940	17.547.817.353
3	Sekolah Menengah Atas	SMA	21.500.604.152	30.739.732	21.469.864.420	3.185.500	21.466.678.920	14.304.900	21.480.983.820
4	Sekolah Menengah Kejuruan	SMK	14.118.904.096	48.737.482	14.070.166.614	4.034.093	14.066.132.521	34.769.315	14.100.901.836
5	Sekolah Luar Biasa	SLB	567.501.392	0	567.501.392	0	567.501.392	0	567.501.392
Jumlah Dana BOS			75.173.448.667	118.944.852	75.054.503.815	72.926.444	74.981.577.371	121.988.183	75.103.565.554
Kas Dana BOP Kesetaraan									



No.	Jenjang		Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Saldo Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan Per 31 Desember 2024 (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SiLPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SiLPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SiLPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2		3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 5 - 6	8	9 = 7 + 8
6	Sanggar Kegiatan Belajar	SKB	125.894.127	0	125.894.127	538.560	125.355.567	0	125.355.567
7	Kelompok Belajar	KB	5.152.340	0	5.152.340	0	5.152.340	0	5.152.340
8	Satuan PAUD Sejenis	SPS	4.886.187	0	4.886.187	0	4.886.187	0	4.886.187
9	Taman Kanak-Kanak	TK	27.500.756	0	27.500.756	0	27.500.756	0	27.500.756
10	Taman Penitipan Anak	TPA	3.106.057	0	3.106.057	0	3.106.057	0	3.106.057
Jumlah Dana BOP Kesetaraan			166.539.467	0	166.539.467	538.560	166.000.907	0	166.000.907
Jumlah Dana BOS dan BOP Kesetaraan			75.339.988.134	118.944.852	75.221.043.282	73.465.004	75.147.578.278	121.988.183	75.269.566.461

a. Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp75.054.503.815,00 dan Rp84.918.734.579,00. Kas Dana BOS terdiri dari:

1) Kas Bank BOS

Saldo Kas Bank BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp74.981.577.371,00 tersebar di 1.802 sekolah. Rincian per jenjang sesuai dengan kolom 7 pada Tabel Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan Per 31 Desember 2024.

2) Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor

Saldo potongan PFK Dana BOS yang belum disetor atau utang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.926.444,00 tersebar di 88 sekolah sebagai berikut:

68 SD Negeri	Rp	61.430.209,00
9 SMP Negeri	Rp	4.276.642,00
6 SMA Negeri	Rp	3.185.500,00
5 SMK Negeri	Rp	4.034.093,00
Jumlah	Rp	72.926.444,00

b. Kas Dana BOP Kesetaraan

Saldo Kas Dana BOP Kesetaraan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp166.539.467,00 dan Rp138.012.216,00. Kas Dana BOP Kesetaraan terdiri dari:

1) Kas Bank BOP Kesetaraan

Saldo Kas Bank BOP Kesetaraan per 31 Desember 2024 sebesar Rp166.000.907,00 tersebar di 206 sekolah. Rincian per jenjang sesuai



dengan kolom 7 pada Tabel Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan Per 31 Desember 2024.

2) Potongan PFK Dana BOP Kesetaraan yang Belum Disetor

Saldo potongan PFK Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor atau utang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp538.560,00 pada SKB Negeri 36.

c. Kas di Bendahara Sekolah Lainnya

Saldo Kas di Bendahara Sekolah Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp958.997.783,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Saldo Kas SMK Non BLUD dari Kegiatan *Teaching Factory* (TeFa) sebesar Rp839.742.481,00 berupa kas tunai sebesar Rp480.023.644,00 dan rekening TeFa sebesar Rp359.718.837,00.

Terdapat 21 SMK Non BLUD yang melakukan kegiatan *Teaching Factory* (TeFa). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2015 menyebutkan pabrik dalam sekolah (*teaching factory*) adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata Industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Penjelasan rinci sebagai berikut.

Tabel 5.32

Saldo Kas SMK Non BLUD dari Kegiatan *Teaching Factory* (TeFa)
Per 31 Desember 2024

No	Nama Sekolah	Saldo awal (Per 31 Desember 2023) (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo akhir (Per 31 Desember 2024) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 - 5)
1	SMK Negeri 1	25.611.000,00	29.712.500,00	17.708.000,00	37.615.500,00
2	SMK Negeri 2	8.230.000,00	210.561.750,00	191.885.800,00	26.905.950,00
3	SMK Negeri 3	28.206.380,00	212.270.019,00	225.568.358,00	14.908.041,00
4	SMK Negeri 6	5.073.788,00	307.529.895,00	295.318.015,00	17.285.668,00
5	SMK Negeri 7	15.543.200,00	190.359.100,00	174.076.025,00	31.826.275,00
6	SMK Negeri 11	19.595.000,00	250.786.650,00	207.914.186,00	62.467.464,00
7	SMK Negeri 12	4.323.901,00	95.690.189,00	80.428.515,00	19.585.575,00
8	SMK Negeri 16	126.421.307,00	242.947.613,00	211.649.568,00	157.719.352,00
9	SMK Negeri 18	0	126.299.956,00	105.586.019,00	20.713.937,00
10	SMK Negeri 22	55.923.150,00	198.803.000,00	214.047.126,00	40.679.024,00
11	SMK Negeri 23	11.402.939,00	183.187.000,00	157.876.700,00	36.713.239,00
12	SMK Negeri 25	40.273.327,00	54.743.451,00	61.566.006,00	33.450.772,00
13	SMK Negeri 31	52.789.500,00	248.662.500,00	229.624.000,00	71.828.000,00
14	SMK Negeri 42	12.000.000,00	234.699.300,00	216.050.400,00	30.648.900,00
15	SMK Negeri 45	50.844.387,00	286.588.053,00	282.749.608,00	54.682.832,00
16	SMK Negeri 46	11.252.800,00	204.848.000,00	195.380.793,00	20.720.007,00
17	SMK Negeri 47	43.865.000,00	436.818.180,00	435.089.735,00	45.593.445,00



No	Nama Sekolah	Saldo awal (Per 31 Desember 2023) (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo akhir (Per 31 Desember 2024) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 - 5)
18	SMK Negeri 50	52.235.000,00	216.754.000,00	213.823.000,00	55.166.000,00
19	SMK Negeri 52	15.163.000,00	50.480.000,00	39.023.000,00	26.620.000,00
20	SMK Negeri 55	6.582.000,00	41.646.000,00	26.895.500,00	21.332.500,00
21	SMK Negeri 58	8.800.000,00	4.480.000,00	0	13.280.000,00
Jumlah		594.135.679,00	3.827.867.156,00	3.582.260.354,00	839.742.481,00

- 2) Saldo Rekening yang masih harus dikembalikan ke pihak ketiga atas retur pembayaran dan kelebihan pengembalian belanja sebesar Rp118.944.852,00 dengan rincian sebagai berikut:

22 SD Negeri	Rp	35.543.711,00
7 SMP Negeri	Rp	3.923.927,00
13 SMA Negeri	Rp	30.739.732,00
3 SMK Negeri	Rp	48.737.482,00
Jumlah	Rp	118.944.852,00

- 3) Saldo Dana Hibah dari Bank Indonesia sebesar Rp310.450,00 berada di rekening hibah sebesar Rp310.250,00 dan kas tunai sebesar Rp200,00.

Sisa dana hibah pengembangan perpustakaan dari Bank Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

- Suku Dinas Pendidikan 2 – Jakpus sebesar Rp274.450,00 pada SMA Negeri 5 di rekening BNI 0297291975 a.n. SMAN 5 Jakarta.
- Suku Dinas Pendidikan 1 – Jakpus sebesar Rp200.000 pada SMK Negeri 19 berupa kas tunai dan sebesar Rp35.800,00 pada SMA Negeri 1 di rekening BRI 035601002082560 a.n. Perpustakaan Bung Hatta

Saldo Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan per 31 Desember 2024 secara rinci disajikan pada lampiran 3.

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp130.020.000,00 dan Rp13.543.921.396,00. Saldo tersebut merupakan bagian dari dana bantuan sosial di Dinas Pendidikan sebesar Rp114.300.000,00 dan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan sebesar Rp15.720.000,00 yang tidak berhasil disalurkan di antaranya karena rekening tujuan tutup dan pindah domisili. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.800.000,00 pada bulan Januari 2025 dan sisanya akan disetorkan kembali ke Kas Daerah pada bulan Mei 2025.



5.3.1.1.2 Piutang

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah terjadi pada saat hak daerah untuk menagih timbul yaitu pada saat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan. Piutang pajak daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp13.241.938.790.492,00 dan Rp11.679.786.241.137,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	131.848.667.679	127.437.900.750	3,46
2	Piutang Pajak Hotel	-	31.223.713.068	(100,00)
3	Piutang Pajak Restoran	-	141.327.184.933	(100,00)
4	Piutang Pajak Hiburan	-	77.344.622.956	(100,00)
5	Piutang Pajak Reklame	616.967.500.306	555.601.209.780	11,05
6	Piutang Pajak Parkir	-	12.081.179.716	(100,00)
7	Piutang Pajak Air Tanah	591.869.625.756	591.166.273.424	0,12
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	11.395.000.473.511	9.926.116.872.186	14,80
9	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	230.805.014.096	217.487.284.324	6,12
10	Piutang Pajak Alat Berat	710.000	-	-
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	275.446.799.144	-	-
Jumlah		13.241.938.790.492	11.679.786.241.137	13,37

Pada Tahun 2024, terjadi kenaikan nilai piutang pajak daerah sebesar 13,37% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan nilai piutang pajak daerah tersebut berasal dari 6 (enam) jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3,46%, Pajak Reklame sebesar Rp11,05%, Pajak Air Tanah (PAT) sebesar 0,12%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 6,12%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar 14,80% dan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 5,14% secara rinci disajikan pada Lampiran 4.

a. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp131.848.667.679,00 dan Rp127.437.900.750,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang PKB			
a. Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024			
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	127.437.900.750	
Pembetulan	Rp.	(7.793.863.871)	
Saldo atas Piutang yang Diperoleh sebelum Tahun 2024	Rp.	119.644.036.879	
b. Mutasi Piutang Tahun 2024			
Ketetapan Piutang	Rp.	927.565.937.935	
Penerimaan Pembayaran	Rp.	(915.361.307.135)	
Saldo atas Piutang yang Diperoleh pada Tahun 2024	Rp.	12.204.630.800	
c. Saldo Piutang Per 31 Desember 2024 (a+b)	Rp.	131.848.667.679	



Piutang PKB dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan dan belum terbayar sampai dengan akhir tahun. Hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengenai Piutang Pajak yang menjelaskan bahwa piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Pada Tahun 2024, terdapat pembetulan SKP atas Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp7.793.863.871,00 karena telah terbit ketetapan baru pada Tahun 2024.

Mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, menjelaskan bahwa Surat Ketetapan Pajak PKB diterbitkan setelah dilakukan tahapan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) kendaraan bermotor. Hal tersebut sejalan dengan Surat Jawaban Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atas pertanyaan Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Se-Indonesia (APPDI) Nomor: S-12.2/K.1/ KSAP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 terkait dengan Pengakuan Piutang PKB dan BBNKB.

Sedangkan untuk kendaraan Bermotor (KBm) yang telah jatuh tempo pembayaran dan belum melakukan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang belum daftar ulang atau yang lebih dikenal dengan KBm BDU. Terhadap KBm BDU tersebut tidak terbit surat ketetapan pajak sehingga KBm BDU tidak dicatat sebagai piutang PKB, melainkan merupakan perkiraan penerimaan PKB.

Terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat 3.056.134 KBm yang belum melakukan daftar ulang dengan perkiraan penerimaan PKB sebesar Rp2.525.319.141.800,00. Perkiraan penerimaan PKB tersebut dihitung dengan menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun terutang.

Berikut disajikan tabel Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Perhitungan Perkiraan Penerimaan PKB Periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel 5.33

Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Perhitungan Perkiraan Penerimaan PKB Periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024

No	Jenis	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Jumlah	
		KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)
1	Sedan dan Sejenisnya	8.073	19.598.121.025	6.620	15.939.186.601	8.665	26.297.636.855	13.405	50.527.383.600	24.234	119.024.040.950	60.997	231.386.369.031
2	Jeep Segala Merk	2.951	14.065.743.325	2.544	12.735.201.400	4.357	23.991.927.826	9.710	63.629.844.050	23.256	171.600.188.200	42.818	286.022.904.801
3	Mini Bus, Micro Bus	25.289	64.758.766.890	20.846	54.384.796.300	36.769	102.225.105.349	79.011	242.518.498.250	178.650	599.204.774.225	340.565	1.063.091.941.014



No	Jenis	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Jumlah	
		KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)
4	Pick Up, Light Truck, Truck dan Sejenisnya	4.808	7.068.594.845	4.115	6.426.965.255	5.355	8.794.364.812	7.893	13.969.364.200	13.233	24.718.622.375	35.404	60.977.911.487
5	Bus Tingkat, Wagon, Box, Delivery Van	2.853	7.418.371.555	2.700	7.007.537.450	3.612	10.354.039.028	5.599	17.327.280.850	12.574	40.429.210.425	27.338	82.536.439.308
6	Dum Truck, Truck Tangki dan Sejenisnya	1.717	6.315.607.750	1.442	5.640.765.340	1.441	4.115.446.100	2.166	5.642.041.100	3.976	11.524.013.700	10.742	33.237.873.990
7	Otolet/Opelet, Microlet	589	71.418.200	421	53.169.365	320	41.372.800	384	53.855.500	850	121.056.400	2.564	340.872.265
8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.292	347.085.800	2.841	193.497.705	2.431	170.736.761	2.841	252.670.600	3.977	377.552.000	17.382	1.341.542.866
9	Sepeda Motor	433.803	109.477.388.125	338.584	85.161.613.011	386.695	107.703.173.542	530.257	160.394.739.020	811.061	256.136.558.800	2.500.400	718.873.472.498
10	Alat-Alat Berat	2.168	5.413.682.855	1.882	4.606.778.435	2.068	5.062.270.400	3.634	10.918.205.800	8.172	21.508.877.050	17.924	47.509.814.540
Total		487.543	234.534.780.370	381.995	192.149.510.862	451.713	288.756.073.473	654.900	565.233.882.970	1.079.983	1.244.644.894.125	3.056.134	2.525.319.141.800

Terhadap kendaraan bermotor yang belum daftar ulang tersebut di atas, telah dilakukan upaya optimalisasi agar wajib pajak segera melakukan daftar ulang (registrasi dan identifikasi) dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun upaya yang dilakukan meliputi:

- 1) Penyampaian surat himbauan kendaraan bermotor yang belum daftar ulang kepada wajib pajak perorangan dan badan secara mandiri, maupun dengan menggunakan pihak ketiga seperti PT. Pos Indonesia. Selain itu penyampaian surat himbauan juga dilakukan dengan melibatkan Walikota, Camat dan Lurah.
- 2) Melakukan pemanggilan dan konfirmasi kepada Wajib Pajak Badan (Perusahaan) terkait dengan Kendaraan Bermotor yang belum daftar ulang;
- 3) Razia gabungan kendaraan bermotor secara *door to door* dengan Kepolisian Republik Indonesia, Jasa Raharja dan Bank DKI;
- 4) Pemberian sosialisasi dan pelayanan pembayaran pajak pada setiap Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi wajib pajak untuk melakukan daftar ulang di antaranya:

- 1) Masih adanya wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya namun tidak melaporkan ke samsat dan tidak melakukan blokir atas kendaraan yang telah dijual serta pembeli belum melakukan balik nama kendaraan bermotor.
- 2) Adanya kendaraan yang hilang, rusak, dicuri yang tidak dilaporkan ke Kepolisian.
- 3) Adanya kendaraan bekas kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang tidak dilakukan pemutakhiran data.
- 4) Adanya wajib pajak yang telah berpindah alamat dan tidak melakukan pemutakhiran data.
- 5) Adanya alamat wajib pajak yang tidak ditemukan, tidak jelas di lapangan, Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya dan tidak dikenal.



b. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp31.223.713.068,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan. Lebih lanjut penjelasan terkait Piutang Pajak Hotel dijelaskan pada Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

c. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp141.327.184.933,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Makan dan/atau Minuman. Lebih lanjut penjelasan terkait Piutang Pajak Restoran dijelaskan pada Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

d. Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp77.344.622.956,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan. Lebih lanjut penjelasan terkait Piutang Pajak Hiburan dijelaskan pada Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

e. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Rp616.967.500.306,00 dan Rp555.601.209.780,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang Pajak Reklame			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	555.601.209.780
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(74.180.416.776)
	Pembetulan SKP	Rp.	603.381.225
	PDM atas ketetapan sebelum Tahun 2024	Rp.	1
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024	Rp.	482.024.174.230
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024		
	Ketetapan Piutang	Rp.	1.021.861.559.348
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(887.192.315.927)
	PDM atas ketetapan Tahun 2024	Rp.	274.082.655
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024	Rp.	134.943.326.076
c.	Piutang Per 31 Desember 2024 (a+b)	Rp.	616.967.500.306



Pembetulan atas SKPD pajak reklame tahun lalu di Tahun 2024 sebesar Rp603.381.225,00 dilakukan karena kurang catat atas ketetapan reklame. Pembetulan SKPD Reklame dilaksanakan berdasarkan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Pada Tahun 2024, terdapat PDM atas ketetapan sebelum Tahun 2024 sebesar Rp1,00 dan tahun berjalan sebesar Rp274.082.655,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum Tahun 2024 dan tahun berjalan.

Optimalisasi penagihan piutang Pajak Reklame dilakukan melalui :

1. Penyampaian surat himbauan kepada 3.837 Objek Pajak atas piutang 3.672 SKPD Pajak Air Tanah khususnya SKPD yang belum kadaluwarsa penagihan.
2. Penagihan dengan melakukan kegiatan penempelan *sticker* penunggak pajak kepada 201 Objek Pajak atas 662 SKPD yang belum melakukan pembayaran setelah dilakukan penyampaian surat himbauan pembayaran.
3. Melakukan upaya penagihan aktif dalam bentuk pemberian 328 surat teguran atas 541 SKPD Pajak Reklame yang belum dibayar, kemudian menindaklanjutinya dengan membacakan surat paksa atas 23 Objek Pajak dari 42 SKPD Pajak Reklame.

f. Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.081.179.716,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir. Lebih lanjut penjelasan terkait Piutang Pajak Parkir dijelaskan pada Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

g. Piutang Pajak Air Tanah (PAT)

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp591.869.625.756,00 dan Rp591.166.273.424,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang PAT		
a. Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024		
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	591.166.273.424
Penerimaan Pembayaran	Rp.	(13.993.125.544)



Piutang PAT		
Pembetulan Piutang	Rp.	1.066.565.225
PDM atas ketetapan sebelum Tahun 2024	Rp.	27.293.735
Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024	Rp.	578.267.006.840
b. Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024		
Ketetapan Piutang	Rp.	87.291.778.840
Penerimaan Pembayaran	Rp.	(73.691.721.041)
PDM atas ketetapan Tahun 2024	Rp.	2.561.117
Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024	Rp.	13.602.618.916
c. Piutang Per 31 Desember 2024 (a+b)	Rp.	591.869.625.756

Pada Tahun 2024, terdapat PDM tahun lalu sebesar Rp27.293.735,00 dan PDM tahun berjalan sebesar Rp2.561.117,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum Tahun 2024 dan tahun berjalan.

Optimalisasi penagihan piutang Pajak Air Tanah (PAT) dilakukan melalui :

1. Penyampaian surat himbauan kepada 471 Objek Pajak atas piutang 3.836 SKPD Pajak Air Tanah khususnya SKPD yang belum kadaluwarsa penagihan.
2. Penagihan dengan melakukan kegiatan penempelan *sticker* penunggak pajak kepada 17 Objek Pajak atas 68 SKPD yang belum melakukan pembayaran setelah dilakukan penyampaian surat himbauan pembayaran.
3. Melakukan upaya penagihan aktif dalam bentuk pemberian 18 surat teguran atas 38 SKPD yang belum dibayar.

h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp11.395.000.473.511,00 dan Rp9.926.116.872.186,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang PBBP2		
a. Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024		
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	9.926.116.872.186
Penerimaan Pembayaran	Rp.	(843.045.135.009)
Kompensasi	Rp.	(37.691.298)
Pemindahbukuan	Rp.	(1.976.120.939)
Pembebasan	Rp.	(17.388.532.739)
Pengenaan	Rp.	(1.887.134.877)
Pengurangan	Rp.	(32.872.126.560)
Keringanan	Rp.	(69.714.246.554)
Pembetulan	Rp.	(12.454.891.772)
PDM atas ketetapan sebelum Tahun 2024	Rp.	281.534.544
Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024	Rp.	8.947.022.526.982
b. Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024		
Ketetapan Piutang	Rp.	14.945.548.391.332
Penerimaan Pembayaran	Rp.	(9.113.833.148.336)
Kompensasi	Rp.	(210.000.039)
Pemindahbukuan	Rp.	(2.935.291.718)
Pembebasan	Rp.	(2.180.522.465.151)
Pengenaan	Rp.	(147.118.065.306)



Piutang PBBP2			
Pengurangan	Rp.	(120.561.751.738)	
Keringanan	Rp.	(940.996.721.710)	
Pembetulan	Rp.	6.811.705.565	
PDM atas ketetapan Tahun 2024	Rp.	1.795.293.630	
Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024	Rp.	2.447.977.946.529	
c. Piutang Per 31 Desember 2024 (a+b)	Rp.	11.395.000.473.511	

Pada Tahun 2024, terdapat mutasi kurang piutang tahun lalu sebesar Rp37.691.298,00 dan tahun berjalan sebesar Rp210.000.039,00 karena adanya kompensasi pembayaran PBBP2. Kompensasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah. Kompensasi pembayaran pajak adalah pembayaran pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas daerah.

Selain itu, terdapat mutasi kurang piutang tahun lalu sebesar Rp1.976.120.939,00 dan tahun berjalan sebesar Rp2.935.291.718,00 karena adanya pemindahbukuan pembayaran pajak reklame. Pemindahbukuan pajak reklame adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak reklame untuk dibukukan pada penerimaan pajak reklame yang sesuai. Pemindahbukuan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017.

Pada Tahun 2024, terdapat PDM atas ketetapan sebelum Tahun 2024 sebesar Rp281,534,544,00 dan tahun berjalan sebesar Rp1.795.293.630,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum Tahun 2024 dan tahun berjalan.

Pembebasan dan Keringanan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur 5 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan ekonomi Tahun 2023 memberikan pembebasan sebesar 100% (seratus persen) kepada Objek PBBP2 Tahun Pajak 2023 atas Rumah Tapak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan Wajib Pajak orang pribadi dengan NJOP PBBP2 s.d kurang dari Rp2.000.000.000,00.

Peraturan Gubernur tersebut juga memberikan pembebasan sebagian ketetapan PBB tahun pajak 2024 terhadap Objek PBBP2 dengan NJOP PBBP2 Rp2.000.000.000,00 atau lebih berupa:

- pembebasan sebagian untuk bumi seluas 60m² dan bangunan seluas 36 m² dari PBB terutang; dan
- tambahan pembebasan sebagian sebesar 5% dari sisa PBBP2 yang terutang setelah diberikan pembebasan pada poin a.



Selain itu, Gubernur juga memberikan pembebasan sebagian terhadap objek PBBP2 di luar rumah tapak berupa pembebasan sebagian sebesar 10% dari PBBP2 yang terutang.

Kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran ketetapan PBBP2 Tahun Pajak 2024 pada periode tertentu diberikan keringanan sebesar 5%-10% dan untuk ketetapan sebelum Tahun 2024 diberikan keringanan sebesar 10%-20%. Adapun besaran keringanan PBBP2 yang diberikan selama Tahun 2024 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp69.714.246.554,00 dan sebesar Rp940.996.721.710,00 atas ketetapan tahun berjalan.

Sedangkan besaran pembebasan atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp17.388.532.739,00 dan ketetapan tahun berjalan sebesar Rp2.180.522.465.151,00. Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Kebijakan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk rumah sakit swasta, telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta. Bersamaan dengan hal tersebut, Gubernur juga membuat kebijakan di bidang pendidikan yang dituangkan pada Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta.

Adapun besaran pengenaan PBBP2 yang diberikan selama Tahun 2024 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp1.887.134.877,00 dan sebesar Rp147.118.065.306,00 atas ketetapan tahun berjalan.

Kebijakan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun besaran pengurangan PBBP2 yang diberikan selama Tahun 2024 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp32.872.126.560,00 dan sebesar Rp120.561.751.738,00 atas ketetapan tahun berjalan.



Pembetulan SPPT PBBP2 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Adapun besaran pembetulan PBBP2 selama Tahun 2024 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp12.454.891.772,00 dan sebesar Rp6.811.705.565,00 atas ketetapan tahun berjalan.

Dalam rangka validasi dan pemutakhiran piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), telah dilakukan langkah pembatalan ketetapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pembatalan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan data piutang pajak yang akurat dan mutakhir, sehingga laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Adapun besaran pembatalan atas ketetapan PBBP2 sebesar Rp68.953.874.825,00 dengan salah satu kriteria diantaranya: 1). Objek PBBP2 yang telah terdaftar secara sistem namun tidak ditemukan lokasinya di lapangan, 2). Objek PBBP2 yang terdaftar atas 2 (dua) atau lebih Nomor Objek Pajak sehingga diterbitkan SPPT PBBP2 lebih dari 1 (satu) pada tahun pajak yang sama, 3). Objek PBBP2 telah menjadi sarana, prasarana utilitas yang telah dibebaskan dan diserahkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Namun demikian terhadap pembatalan ketetapan tersebut belum ditindaklanjuti dengan pemutakhiran pada data piutang PBBP2.

Optimalisasi penagihan piutang PBBP2 dilakukan melalui :

1. Penyampaian surat himbauan kepada 2.916 Objek Pajak atas piutang 20.226 SPPT PBBP2 khususnya SKPD yang belum kadaluarsa penagihan.
2. Penagihan dengan melakukan kegiatan penempelan *sticker* penunggak pajak kepada 234 Objek Pajak atas 1.861 SPPT PBBP2 yang belum melakukan pembayaran setelah dilakukan penyampaian surat himbauan pembayaran.
3. Melakukan upaya penagihan aktif dalam bentuk pemberian 237 surat teguran atas 1.096 SPPT PBBP2 yang belum dibayar, kemudian menindaklanjutinya dengan membacakan surat paksa atas 65 Objek Pajak dari 35 SPPT PBB dan melakukan penyitaan terhadap 8 objek pajak dari 71 SPPT PBB.



i. Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp230.805.014.096,00 dan Rp217.487.284.324,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang BPHTB			
a. Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024			
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	217.487.284.324
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(1.746.586.048)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024	Rp.	215.740.698.276
b. Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024			
	Ketetapan Piutang	Rp.	24.747.593.353
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(9.683.277.533)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024	Rp.	15.064.315.820
c.	Piutang Per 31 Desember 2024 (a+b)	Rp.	230.805.014.096

Optimalisasi penagihan BPHTB dilakukan melalui :

- Penyampaian surat himbauan pembayaran BPHTB kepada 4.790 wajib pajak yang memiliki status kurang bayar BPHTB
- Menggiatkan kembali upaya *tax clearance* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 pada saat wajib pajak mengajukan pelayanan pelaporan BPHTB;
- Pemberitahuan (notifikasi) atas kurang bayar wajib pajak melalui aplikasi/akun pajak *online* wajib pajak/*email* wajib pajak.

j. Piutang Pajak Alat Berat

Piutang Pajak Alat Berat per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp710.000,00 dan Rp0,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Piutang Pajak Alat Berat			
A	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	0
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	0
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024	Rp.	0
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	0
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024		
	Ketetapan Piutang	Rp.	6.688.000
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(5.978.000)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024	Rp.	710.000
c.	Piutang Per 31 Desember 2024 (a+b)	Rp.	710.000



Optimalisasi penagihan piutang PAB dilakukan melalui Penyampaian surat himbauan kepada Objek PAB yang belum membayar untuk segera melaksanakan kewajiban pajaknya.

a. Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa jenis pajak berbasis konsumsi mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PBJT didefinisikan sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, meliputi: 1) Jasa Perhotelan; 2) Makanan dan/atau Minuman; 3) Jasa Kesenian dan Hiburan; 4) Tenaga Listrik; dan 5) Jasa Parkir. Perubahan nomenklatur nama jenis pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Jenis Pajak sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 dan Perda No. 1 Tahun 2024	Nama Jenis Pajak sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 dan Perda No. 1 Tahun 2024	Nilai Saldo Piutang Pajak Per 31 Desember 2023
1	Pajak Hotel	PBJT Jasa Perhotelan	31.223.713.068
2	Pajak Restoran	PBJT Jasa Makan dan/atau Minuman	141.327.184.933
3	Pajak Hiburan	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	77.344.622.956
4	Pajak Penerangan Jalan	PBJT Tenaga Listrik	-
5	Pajak Parkir	PBJT Jasa Parkir	12.081.179.716
Total			261.976.700.673

Konsekuensi dari perubahan nomenklatur jenis pajak tersebut adalah penyesuaian pada pencatatan piutang pajak. Saldo awal piutang PBJT untuk Tahun 2024, yang mencapai Rp261.976.700.673,00, merupakan agregasi dari saldo piutang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir per tanggal 31 Desember 2023. Sedangkan untuk saldo Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp275.446.799.144,00 dengan detail mutasi piutang sebagai berikut

Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)			
a. Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024			
Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	261.976.700.673	
Penerimaan Pembayaran	Rp.	(27.163.235.342)	
PDM atas ketetapan sebelum Tahun 2024	Rp.	1.318.862.423	
Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2024	Rp.	236.132.327.754	
b. Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024			
Ketetapan Piutang	Rp.	108.409.854.287	
Penerimaan Pembayaran	Rp.	(69.118.565.905)	
PDM atas ketetapan tahun berjalan	Rp.	23.183.008	



Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)		
Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2024	Rp.	39.314.471.390
c. Piutang Per 31 Desember 2024 (a+b)	Rp.	275.446.799.144

Optimalisasi penagihan piutang PBJT dilakukan melalui :

1. Penyampaian surat himbauan kepada Objek PBJT yang menunggak pajak.
2. Penagihan dengan melakukan kegiatan penempelan *sticker* penunggak pajak kepada Objek Pajak yang belum melakukan pembayaran setelah dilakukan penyampaian surat himbauan pembayaran.
3. Melakukan upaya penagihan aktif dalam bentuk pemberian 130 surat teguran atas 135 SKPDKB yang belum dibayar, kemudian menindaklanjutinya dengan membacakan surat paksa atas 54 Objek Pajak dari 107 SKPDKB dan melakukan penyitaan terhadap 7 objek pajak dari 18 SKPDKB.
4. Melaksanakan penagihan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta..
5. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi penagihan pajak daerah secara serentak untuk Wajib Pajak Group yang memiliki tunggakan pajak untuk objek pajak yang berada di seluruh wilayah DKI Jakarta.
6. Peningkatan kapabilitas pegawai melalui optimalisasi teknologi dan komunikasi dalam upaya penagihan pajak dan *in house training*.

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Pajak Daerah adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Persentase penyisihan piutang pajak tak tertagih tergantung pada kualitas piutang yang penggolongannya didasarkan pada jatuh tempo dan upaya penagihan piutang. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp5.657.257.403.961,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp13.241.938.790.492,00 dikurangi dengan penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp7.584.681.386.531,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2024 tersebut adalah sebagai berikut.



Tabel 5.34
Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih
Per 31 Desember 2024

No	Jenis Pajak	Kriteria Piutang				Jumlah Piutang Per Jenis Pajak (Rp)	NRV (Rp)
		Piutang Pokok Lancar (X < 1 Tahun)	Piutang Pokok Kurang Lancar (1 < X < 3 Tahun)	Piutang Pokok Diragukan (3 < X < 5 Tahun)	Piutang Pokok Macet (X > 5 Tahun)		
		Penyisihan Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)		
		0,50%	10%	50%	100%		
1	PKB	12.204.630.800	7.227.279.400	15.876.644.393	96.540.113.086	131,848,667,679	26.586.481.303
		61.023.154	722.727.940	7.938.322.197	96.540.113.086	105,262,186,377	
2	PAT	13.602.618.916	10.689.030.269	10.654.915.774	556.923.060.797	591,869,625,756	28.482.190.951
		68.013.095	1.068.903.027	5.327.457.887	556.923.060.797	563,387,434,805	
3	PBJT	39.314.471.390	3.038.107.477	20.819.049.483	212.275.170.794	275,446,799,144	52.261.720.504
		196.572.357	303.810.748	10.409.524.742	212.275.170.794	223,185,078,640	
4	REKLAME	134.943.326.076	14.788.155.666	45.055.257.588	422.180.760.976	616,967,500,306	170.105.578.339
		674.716.630	1.478.815.567	22.527.628.794	422.180.760.976	446,861,921,967	
5	BPHTB	15.064.315.820	11.815.960.699	147.508.181.492	56.416.556.085	230,805,014,096	99.377.449.616
		75.321.579	1.181.596.070	73.754.090.746	56.416.556.085	131,427,564,480	
6	PBBP2	2.447.977.946.529	1.443.182.562.347	3.091.681.827.780	4.412.158.136.855	11,395,000,473,511	5.280.443.276.799
		12.239.889.733	144.318.256.235	1.545.840.913.890	4.412.158.136.855	6,114,557,196,712	
7	PAB	710.000	-	-	-	710,000	706.450
		3.550	-	-	-	3,550	
TOTAL		2,663,108,019,531	1,490,741,095,858	3,331,595,876,510	5,756,493,798,593	13,241,938,790,492	5.657.257.403.961
		13,315,540,098	149,074,109,586	1,665,797,938,255	5,756,493,798,593	7,584,681,386,531	

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis Retribusi Daerah berdasarkan objeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp287.659.874.500,00 dan Rp68.096.444.794,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	163.484.366.548	7.795.430.587
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	115.392.799.146	51.635.978.940
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	8.782.708.806	8.665.035.267
	Jumlah	287.659.874.500	68.096.444.794

a. Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp163.484.366.548,00 merupakan nilai piutang yang telah dikurangi eliminasi piutang internal SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp332.965.955,00. Piutang Retribusi Jasa Umum tersebut di antaranya terdapat pada:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp44.905.895.810,00 di antaranya merupakan Piutang Retribusi Pengangkutan Sampah dari Lokasi Industri dan sejenisnya dan Piutang Retribusi Pengangkutan Sampah dari Lokasi Pedagang Kaki Lima/Usaha Mikro. Atas Piutang Retribusi tersebut terdapat eliminasi



antar SKPD sebesar Rp2.831.550,00 yang merupakan piutang kepada Puskesmas Kemayoran dan Puskesmas Kecamatan Senen Jakarta Pusat;

- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Koja Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp42.786.120.067,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa dan Piutang Hasil Kerja Sama BLUD sewa lahan. Atas Piutang Retribusi tersebut terdapat eliminasi antar SKPD sebesar Rp120.041.814,00 yang merupakan piutang kepada beberapa Rumah Sakit Umum Daerah;
- 3) Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp23.217.059.638,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa. Atas Piutang Retribusi tersebut terdapat eliminasi antar SKPD sebesar Rp43.998.091,00 yang merupakan piutang kepada beberapa Rumah Sakit Umum Daerah;
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.877.084.063,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa berupa pelayanan BPJS dan Klaim Covid Kemenkes dan Piutang Hasil Kerja Sama BLUD berupa sewa lahan;
- 5) Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.374.247.154,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis, Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa berupa pelayanan BPJS, Piutang Hasil Kerja Sama BLUD berupa sewa lahan dan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah;
- 6) Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.946.275.647,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa berupa pelayanan BPJS dan Klaim Covid Kemenkes dan Piutang Hasil Kerja sama BLUD. Atas Piutang Retribusi tersebut terdapat eliminasi antar SKPD sebesar Rp38.475.000,00 yang merupakan piutang kepada beberapa Rumah Sakit Umum Daerah;
- 7) Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.638.852.285,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Piutang Penjualan RDF; dan
- 8) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.949.718.350,00



merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Perlengkapannya dan Piutang Retribusi Kios;

b. Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp115.392.799.146,00 di antaranya terdapat pada:

- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp58.784.604.386,00 merupakan Piutang Pemakaian Unit Hunian dan Unit Usaha;
- 2) Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center sebesar Rp42.961.990.899 merupakan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang bersumber dari Hasil Sewa Barang Milik Daerah, Hasil Kerja Sama Daerah dalam bentuk BOT, BTO dan KSP, serta Hasil Pemilihan Mitra Sewa Titik Reklame;
- 3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.476.867.440,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian tempat usaha di lokasi binaan usaha kecil dan Piutang Retribusi Pemakaian tempat usaha di lokasi promosi dan pusat perdagangan UKM;
- 4) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.666.294.091,00 merupakan Retribusi Pemakaian Penginapan Graha Wisata Ragunan dan retribusi Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan;
- 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.863.585.500,00 merupakan Piutang Retribusi Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap dan Piutang Retribusi Pemakaian Alat;
- 6) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp879.183.281,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian mobil derek dan Pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus; dan
- 7) Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Rp643.331.540,00 merupakan Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan dan Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan.

c. Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp8.782.708.806,00 terdapat pada:

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.729.647.206,00 dengan bagian terbesar



berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Piutang Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing; dan

- 2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp53.061.600,00 merupakan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung periode 2008 sampai dengan 2014.

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sebesar Rp80.754.644.103,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp287.659.874.500,00 dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp206.905.230.397,00.

Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) retribusi berdasarkan jenis retribusi per 31 Desember 2024 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.35

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2024

No	Jenis Retribusi	Kriteria Piutang				Jumlah Piutang Per Jenis Retribusi (Rp)	NRV (Rp)
		Piutang Pokok Lancar (0 s.d 1 Bulan)	Piutang Pokok Kurang Lancar (1 s.d 3 Bulan)	Piutang Pokok Diragukan (3 s.d 12 bulan)	Piutang Pokok Macet lebih dari 12 bulan		
		Penyisihan Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)		
		0,50%	10%	50%	100%		
1	Retribusi Jasa Umum	18.749.808.901	14.202.053.866	38.852.623.222	91.679.880.559	163.484.366.548	50.864.219.948
		93.749.042	1.420.205.387	19.426.311.612	91.679.880.559	112.620.146.600	
2	Retribusi Jasa Usaha	12.126.999.733	9.422.977.202	11.811.382.974	82.031.439.237	115.392.799.146	26.452.735.703
		60.634.998	942.297.720	5.905.691.488	82.031.439.237	88.940.063.443	
3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.807.493.500	160.278.200	999.964.080	4.814.973.026	8.782.708.806	3.437.688.452
		14.037.468	16.027.820	499.982.040	4.814.973.026	5.345.020.354	
Total		33.684.302.134	23.785.309.268	51.663.970.276	178.526.292.822	287.659.874.500	80.754.644.103
		168.421.508	2.378.530.927	25.831.985.140	178.526.292.822	206.905.230.397	

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah piutang selain Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah di antaranya piutang hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, denda pajak, denda retribusi, BLUD, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun.



Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.416.172.018.863,00 dan Rp3.030.838.594.857,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.36
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1.	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	540.968.971	540.968.971
2.	Piutang Jasa Giro	0	1.775.710.904
3.	Piutang Pendapatan Bunga	0	4.787
4.	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	17.088.993.346	17.053.387.096
5.	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.330.103.591	1.130.615.950
6.	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.266.505.150	0
7.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	905.539.466.873	865.718.779.090
8.	Piutang Pendapatan Denda Retribusi	20.236.913.612	17.821.739.466
9.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	525.889.003.130	16.431.747.538
10.	Piutang BLUD	449.977.840.530	414.630.180.236
11.	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	26.335.832.350	26.743.584.888
12.	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.894.389.875	6.390.310.880
13.	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0	44.146.360.933
14.	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya		
1)	Piutang Kompensasi Rumah Susun Murah/ Sederhana	709.188.171.009	842.311.305.796
2)	Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit eks BPPN	41.880.534.592	41.923.253.432
3)	Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	28.893.574.595	26.444.238.419
4)	Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	17.988.000	121.230.000
5)	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	686.091.733.239	707.655.176.471
Jumlah		3.416.172.018.863	3.030.838.594.857

5.3.1.1.2.3.1 Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penerimaan atas hasil penjualan barang milik daerah. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan masing-masing per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp540.968.971,00 dan Rp540.968.971,00. Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan tersebut merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa kendaraan dinas.



Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Nilai Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp540.968.971,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp540.968.971,00. Nilai penyisihan piutang sama dengan nilai piutang karena piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang macet.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dikategorikan macet karena klasifikasi umur piutang sudah melebihi 5 tahun, dan upaya yang sedang dilakukan adalah tetap memberikan surat penagihan dan melakukan peninjauan untuk diusulkan penghapusan.

5.3.1.1.2.3.2 Piutang Jasa Giro

Piutang Jasa Giro adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan jasa giro yang berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk giro. Piutang Jasa Giro dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Piutang jasa giro per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.775.710.904,00.

5.3.1.1.2.3.3 Piutang Pendapatan Bunga

Piutang Pendapatan Bunga adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan bunga yang berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito. Piutang Pendapatan Bunga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.787,00.

5.3.1.1.2.3.4 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penyetoran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Institusi Pengawas baik internal maupun eksternal. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 berupa Piutang Kerugian Uang Daerah. Saldo Piutang Kerugian Uang Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp17.088.993.346,00 dan Rp17.053.387.096,00.

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis Pertimbangan TP/TGR. Jumlah tersebut tidak termasuk tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses penghapusan dan informasi kerugian daerah,



yang belum diakui sebagai piutang. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp83.428.219,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp17.088.993.346,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp17.005.565.127,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) berdasarkan jenis tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.37

Jenis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Badan Peradilan	0	0	0	900.648.727	900.648.727
2	Kasus Kehilangan Mobil	0	0	0	676.219.939	676.219.939
3	Kasus Kehilangan Motor	0	0	0	22.305.625	22.305.625
4	Kasus Ketekoran Kas	35.606.250	0	96.000.000	13.647.035.942	13.778.642.192
5	Kasus Lain-Lain	0	0	0	9.200.000	9.200.000
6	Kasus Biro Perlengkapan (P3D)	0	0	0	88.695.279	88.695.279
7	Kasus Walikotamadya Jakarta Selatan	0	0	0	393.181.816	393.181.816
8	Wisma Jaya raya	0	0	0	1.220.099.767	1.220.099.767
	Jumlah Piutang TGR (I)	35.606.250	0	96.000.000	16.957.387.096	17.088.993.346
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang TGR Tak Tertagih (I x II) 2024	178.031	0	48.000.000	16.957.387.096	17.005.565.127
	Nilai Piutang Neto 2024	35.428.219	0	48.000.000	0	83.428.219

5.3.1.1.2.3.5 Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa dan kerja sama oleh Pemerintah Daerah.

Saldo Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.330.103.591,00 dan Rp1.130.615.950,00, merupakan Piutang Penerimaan komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi.



Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya

Nilai Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp1.323.453.073,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.330.103.591,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya sebesar Rp6.650.518,00. Seluruh nilai Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya termasuk dalam kategori lancar.

5.3.1.1.2.3.6 Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya denda sebagai akibat dari keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja.

Saldo Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.266.505.150,00 dan Rp0,00 di antaranya terdapat pada:

- a. Pembangunan Waduk Marunda dan Bangunan Penunjang pada wilayah pesisir Jakarta sebesar Rp657.564.554,00 pada Dinas Sumber Daya Air;
- b. Pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp217.991.137,00 pada Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah; dan
- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja sebesar Rp115.303.048,00 pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Nilai Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp1.266.505.150,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.266.505.150,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.2.3.7 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp905.539.466.873,00 dan Rp865.718.779.090,00 sedangkan untuk Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp589.754.317.602,00.

Rincian Piutang Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.



Tabel 5.38
Rincian Piutang Denda Pajak Daerah
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Piutang Denda Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	31,709,101,519	30,721,221,254
2	Piutang Pendapatan Denda PBBKB	4,369,445,675	4,122,218,865
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	76,134,271,042	68,298,990,900
4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	225,386,001,889	204,724,555,666
5	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	108,096,798,872	105,535,767,767
6	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	115,072,345,442	114,364,258,147
7	Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	1,643,376,150	0
8	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	29,533,792,455	28,822,994,356
9	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	32,155,093,677	31,368,589,198
10	Piutang Pendapatan Denda PBBP2	82,983,459,180	80,620,906,199
11	Piutang Pendapatan Denda BPHTB	198,455,780,972	197,139,276,738
	Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	905,539,466,873	865,718,779,090

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Nilai Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp315.785.149.270,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp905.539.466.873,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tak Tertagih sebesar Rp589.754.317.603,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) berdasarkan jenis denda pajak per 31 Desember 2024 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.39
Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah Tak Tertagih
Per 31 Desember 2024

No	Jenis Pajak	Kriteria Piutang (Rp)				Jumlah Piutang Per Jenis Pajak (Rp)	NRV (Rp)
		Piutang Pokok Lancar (X < 1 Tahun)	Piutang Pokok Kurang Lancar (1 s.d 2 Tahun)	Piutang Pokok Diragukan (2 s.d 5 Tahun)	Piutang Pokok Macet (X > 5 Tahun)		
		Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang		
		0.50%	10%	50%	100%		
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	2.119.794.850	1.275.024.650	4.277.304.525	24.036.977.494	31.709.101.519	5.395.370.323
		10.598.974	127.502.465	2.138.652.263	24.036.977.494	26.313.731.196	
2	Piutang Pendapatan Denda PBBKB	242.788.816	432.195.484	982.848.194	2.711.613.181	4.369.445.675	1.121.974.905
		1.213.944	43.219.548	491.424.097	2.711.613.181	3.247.470.770	
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.670.951.923	3.605.806.615	10.864.443.752	50.993.068.752	76.134.271.042	19.295.044.993
		53.354.760	360.580.662	5.432.221.876	50.993.068.752	56.839.226.049	
4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	25.697.439.090	13.930.685.620	37.838.229.738	147.919.647.440	225.386.001.888	57.025.683.822
		128.487.195	1.393.068.562	18.919.114.869	147.919.647.440	168.360.318.066	
5	Piutang Pendapatan Denda	3.983.689.172	2.038.784.191	8.703.245.785	93.371.079.725	108.096.798.873	10.150.299.391



No	Jenis Pajak	Kriteria Piutang (Rp)				Jumlah Piutang Per Jenis Pajak (Rp)	NRV (Rp)
		Piutang Pokok Lancar (X < 1 Tahun)	Piutang Pokok Kurang Lancar (1 s.d 2 Tahun)	Piutang Pokok Diragukan (2 s.d 5 Tahun)	Piutang Pokok Macet (X > 5 Tahun)		
		Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang		
		0.50%	10%	50%	100%		
	Pajak Hiburan	19.918.446	203.878.419	4.351.622.893	93.371.079.725	97.946.499.482	
6	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	805.928.700	8.471.528.733	45.349.899.335	60.444.988.674	115.072.345.442	31.101.224.584
		4.029.644	847.152.873	22.674.949.668	60.444.988.674	83.971.120.858	
7	Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	1.643.376.150	0	0	0	1.643.376.150	1.635.159.269
		8.216.881	0	0	0	8.216.881	
8	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.153.020.423	823.226.178	2.646.919.388	24.910.626.466	29.533.792.455	3.211.618.575
		5.765.102	82.322.618	1.323.459.694	24.910.626.466	26.322.173.880	
9	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	794.334.074	1.159.009.322	1.357.152.828	28.844.597.453	32.155.093.677	2.512.047.207
		3.971.670	115.900.932	678.576.414	28.844.597.453	29.643.046.470	
10	Piutang Pendapatan Denda PBBP2	2.809.383.390	5.442.973.079	44.510.693.238	30.220.409.473	82.983.459.180	29.949.358.863
		14.046.917	544.297.308	22.255.346.619	30.220.409.473	53.034.100.317	
11	Piutang Pendapatan Denda BPHTB	1.707.957.403	143.020.503.501	47.938.993.143	5.788.326.926	198.455.780.973	154.387.367.338
		8.539.787	14.302.050.350	23.969.496.572	5.788.326.926	44.068.413.635	
TOTAL		51,628,663,991	180.199.737.373	204.469.729.926	469.241.335.584	905.539.466.873	315,785,149,270
		258,143,320	18.019.973.737	102.234.864.963	469.241.335.584	589.754.317.603	

5.3.1.1.2.3.8 Piutang Pendapatan Denda Retribusi

Piutang Pendapatan Denda Retribusi adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah jatuh tempo yang bersumber dari pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu. Piutang Pendapatan Denda Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.236.913.612,00 dan Rp17.821.739.466,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.40

Piutang Pendapatan Denda Retribusi
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	2.927.910.707	1.049.823.841
2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	16.907.879.739	16.129.398.947
3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	401.123.166	642.516.678
	Jumlah	20.236.913.612	17.821.739.466

Penjelasan secara lebih rinci atas piutang pendapatan denda retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.927.910.707,00 terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,



Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp1.169.213.736,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.758.696.971,00.

b) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp16.907.879.739,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp15.799.293.873,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp14.094.553,00, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp1.067.829.312,00, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp1.606.747,00 dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian sebesar Rp25.055.254,00.

c) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp401.123.166,00 terdapat pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp401.123.166,00.

Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Pendapatan Denda Retribusi per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp1.392.556.750,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp20.236.913.612,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih sebesar Rp18.844.356.862,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) berdasarkan denda retribusi per 31 Desember 2024 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.41

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi

Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Denda Retribusi	Kriteria Piutang				Jumlah Piutang Per Jenis Denda Retribusi (Rp)	NRV (Rp)
		Piutang Pokok Lancar (X < 1 Tahun)	Piutang Pokok Kurang Lancar (1< X< 3 Tahun)	Piutang Pokok Diragukan (3 < X < 5 Tahun)	Piutang Pokok Macet (X > 5 Tahun)		
		Penyisihan Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)		
		0,50%	10%	50%	100%		
1	Denda Retribusi	6.864.522	332.441.214	2.173.058.953	17.724.548.923	20.236.913.612	1.392.556.750
		34.322	33.244.136	1.086.529.481	17.724.548.923	18.844.356.862	
Total		6.864.522	332.441.214	2.173.058.953	17.724.548.923	20.236.913.612	1.392.556.750
		34.322	33.244.136	1.086.529.481	17.724.548.923	18.844.356.862	

5.3.1.1.2.3.9 Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang Pendapatan dari Pengembalian merupakan piutang yang timbul karena belum diterimanya nilai pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja tahun berjalan dan telah disetorkan pada tahun berikutnya. Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp525.889.003.130,00,00 dan Rp16.431.747.538,00.



Nilai Piutang Pendapatan dari Pengembalian yang berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja yang telah disetorkan di tahun berikutnya di antaranya terdapat pada:

1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebesar Rp516.156.429.677 merupakan pengembalian hibah uang untuk KPU dan Bawaslu;
2. Biro Kerja Sama Daerah sebesar Rp1.798.965.064,00 terdiri dari pengembalian biaya tiket pesawat selama Tahun 2024 sebesar Rp1.155.990.442,00 dan pengembalian belanja hibah MPU sebesar Rp642.974.622,00;
3. Dinas Bina Marga sebesar Rp1.303.188.774,00,00 merupakan kekurangan volume atas pekerjaan pemeliharaan berkala jalan, pekerjaan pembangunan JPO, dan pekerjaan pembangunan trotoar serta pengembalian atas pengadaan aspal instan, cat, tiner, dan besi untuk kegiatan pemeliharaan jalan;
4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp1.290.564.389,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran atas beberapa kegiatan, antara lain kegiatan festival malam tahun baru 2025, kegiatan pemilihan Abang dan Nene Jakarta 2024, kegiatan pemasangan iklan media cetak di luar negeri, dan acara kegiatan Jakarta International Coffee Conference;
5. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Selatan sebesar Rp442.205.706,00 merupakan kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan sistem saluran penghubung Dharmawangsa.
6. Sekretariat DPRD sebesar Rp418.972.052,00 terdiri dari kekurangan volume atas pekerjaan sipil gedung rehab dan perpindahan ruang dewan sebesar Rp417.575.492,00 dan pengembalian belanja pegawai sebesar Rp1.396.560,00; dan
7. Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp383.487.758,00 merupakan kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan Waduk Pondok Ronggon dan Waduk Marunda
8. Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp249.924.202,00 merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran Individu.

5.3.1.1.2.3.10 Piutang BLUD

Piutang BLUD adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD, Pendapatan Hibah BLUD, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD, dan Pendapatan Lain-Lain BLUD yang sah.

Piutang BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp449.977.840.530,00 dan Rp414.630.180.236,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023, pada Tahun 2024 terjadi kenaikan saldo Piutang BLUD yang antara lain disebabkan peningkatan pelayanan BLUD.



Rincian saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.42
Piutang BLUD

Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Jasa Layanan Umum BLUD, terdiri dari:	405.487.457.213	381.034.672.279
a.	Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa	405.487.457.213	381.034.672.279
	Pusat Kesehatan Masyarakat	9.075.046.123	5.075.943.970
	RSUD/RSKD	392.639.475.638	370.652.952.005
	Laboratorium Kesehatan Daerah	0	282.621.000
	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	0	12.650.000
	Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
	Unit Pengelola Perparkiran	0	721.254.452
	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	3.678.949.940	4.195.265.340
b.	Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (neto)	0	0
	Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	0	271.278.000
	Eliminasi Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	0	(271.278.000)
2	Piutang Hasil Kerja sama BLUD, terdiri dari:	39.836.942.886	31.553.049.422
a.	RSUD Tanjung Priok	0	800.000
b.	RSU Adhyaksa	0	250.000
c.	RSUD Koja	793.150.080	550.263.352
d.	RSUD Tarakan	2.483.942.846	2.219.962.242
e.	RSUD Cengkareng	758.385.825	728.658.325
f.	RSUD Budhi Asih	843.674.000	22.400.000
g.	RSUD Pasar Minggu	0	225.532.000
i.	RSUD Pasar Rebo	114.340.500	0
h.	Puskesmas Pasar Minggu	0	680.000
i.	Puskesmas Pasar Rebo	0	2.700.000
j.	Unit Pengelola Perparkiran	2.512.373.522	1.570.103.645
k.	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	30.726.018.000	24.341.578.000
l.	Unit Pengelola Sampah Terpadu	1.605.058.113	1.890.121.858
3	Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari:	4.653.440.431	2.042.458.535
	RSUD/RSKD	201.770.333	317.641.168
	Puskesmas	11.669.923	41.152.910
	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	4.440.000.175	1.683.664.457



No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	Jumlah	449.977.840.530	414.630.180.236

a) **Piutang Jasa Layanan Umum BLUD**

1. **Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa**

i. **Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Kesehatan Masyarakat**

Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.075.046.123,00 dan Rp5.075.943.970,00.

Saldo Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.075.046.009,00 terdiri dari:

- i) Piutang Klaim Pelayanan BPJS sebesar Rp8.250.245.114,00;
- ii) Piutang Klaim Global Fund sebesar Rp791.884.000,00; dan
- iii) Piutang KB sebesar Rp32.917.009,00.

Piutang Klaim Pelayanan BPJS

Saldo Piutang BPJS Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.250.245.114,00 dicatat berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) yang terbit atas pelayanan Tahun 2024 namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayar, dengan penjelasan mutasi sebagai berikut.

	Uraian	Jumlah (Rp)
(a)	Saldo awal piutang Tahun 2023 <i>audited</i>	5.009.942.961
	Mutasi kurang:	
(b)	- Pengurangan piutang atas koreksi Tahun 2023	197.220.000
(c)	- Penerimaan Pembayaran atas piutang pelayanan Tahun 2023 dan tahun sebelumnya yang telah diterima selama Tahun 2024	4.812.722.961
(d)	Saldo Piutang Tahun 2023 setelah koreksi dan pembayaran (d= a-b-c)	0
	Mutasi tambah tahun berjalan:	
(e)	- Jumlah klaim layanan kesehatan periode 2024 hasil verifikasi BPJS atas klaim yang diajukan	41.081.330.497
	Mutasi kurang tahun berjalan:	
(f)	- Pembayaran klaim dari BPJS per 31 Desember 2024	32.831.085.383
(g)	Saldo Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2024 (g=d+e-f)	8.250.245.114

Piutang BPJS per 31 Desember 2024 tersebut di atas tidak termasuk piutang layanan kesehatan periode 2024 yang belum diajukan klaim ke BPJS dan klaim yang masih dalam proses verifikasi BPJS.



Piutang Klaim Global Fund

Saldo Piutang Global Fund Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp791.884.000,00 merupakan klaim kepada Global Fund atas jasa pemeriksaan Tuberkulosis (TB), Tuberkulosis Resisten Obat (TB-RO), Diabetes Melitus (DM), dan Tes Cepat Molekuler (TCM) *Xpert*.

Piutang KB

Saldo Piutang KB Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.917.009,00 merupakan piutang atas pelayanan KB pada Puskesmas Kebon Jeruk dan Puskesmas Taman Sari.

ii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD

Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp392.639.475.638,00 dan Rp370.652.952.005,00.

Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp392.639.475.638,00 terdiri dari:

- i) Piutang Klaim Pelayanan BPJS sebesar Rp369.560.731.310,00;
- ii) Piutang Klaim Covid terhadap Kementerian Kesehatan sebesar Rp15.126.736.613,00;
- iii) Piutang Klaim Global Fund sebesar Rp715.275.459,00;
- iv) Piutang KB sebesar Rp1.775.000,00; dan
- v) Piutang Lainnya sebesar Rp7.234.957.256,00.

Rincian saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.43

Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	77.681.300.061	77.922.180.036
2	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	47.006.698.006	81.147.611.547
3	Rumah Sakit Umum Cengkareng	42.664.216.203	22.879.548.294
4	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	41.999.529.620	11.736.984.868
5	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	28.989.487.005	33.560.210.385
6	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	28.210.690.945	36.042.255.464
7	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	27.783.692.817	29.349.543.998
8	Rumah Sakit Umum Adhyaksa	0	3.107.896.280
9	RSUD 5 wilayah kota administrasi	98.303.860.981	74.906.721.133
	Jumlah	392.639.475.638	370.652.952.005



Piutang Klaim Pelayanan BPJS RSUD

Saldo Piutang BPJS RSUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp369.560.731.310,00 dicatat berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) yang terbit atas pelayanan Tahun 2024 namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayar, dengan penjelasan mutasi sebagai berikut.

	Uraian	Jumlah (Rp)
(a)	Saldo awal piutang Tahun 2023 <i>audited</i>	255.131.747.665
	Mutasi tambah:	
(b)	- Penambahan piutang atas koreksi Tahun 2023	130.100.820.772
	Mutasi kurang:	
(c)	- Pengurangan piutang atas koreksi Tahun 2023	70.224.285
(d)	- Penerimaan Pembayaran atas piutang pelayanan Tahun 2023 dan tahun sebelumnya yang telah diterima selama Tahun 2024	381.049.639.264
(e)	Saldo Piutang Tahun 2023 setelah koreksi dan pembayaran (e= a+b-c-d)	4.112.704.888
	Mutasi tambah tahun berjalan:	
(f)	- Jumlah klaim layanan kesehatan periode 2024 hasil verifikasi BPJS atas klaim yang diajukan	2.318.831.124.246
	Mutasi kurang tahun berjalan:	
(g)	- Pembayaran klaim dari BPJS per 31 Desember 2024	1.950.838.228.909
(h)	- Hibah Piutang Klaim Covid RSU Adhyaksa ke Kejaksaan Agung RI Tahun 2024	2.544.868.915
(i)	Saldo Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2024 (i=e+f-g-h)	369.560.731.310

Piutang BPJS per 31 Desember 2024 tersebut di atas tidak termasuk piutang layanan kesehatan periode 2024 yang belum diajukan klaim ke BPJS dan klaim yang masih dalam proses verifikasi BPJS.

Piutang Klaim Covid RSUD

Saldo Piutang Klaim Covid RSUD kepada Kemenkes sebesar Rp15.126.736.613,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

	Uraian	Jumlah (Rp)
(a)	Saldo awal piutang Tahun 2023 <i>audited</i>	12.559.125.710
(b)	Mutasi tambah:	
-	Penambahan piutang atas koreksi Tahun 2023	4.078.320.580
(c)	Mutasi kurang:	
-	Pengurangan piutang atas koreksi Tahun 2023	1.378.562.277
(d)	Nilai Piutang Tahun 2023 setelah koreksi dan pembayaran (d= a+b-c)	15.258.884.013
	Mutasi kurang tahun berjalan:	



	Uraian	Jumlah (Rp)
(e)	Hibah Piutang Klaim Covid RSU - Adhyaksa ke Kejaksaan Agung RI Tahun 2024	132.147.400
(f)	Saldo Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2024 (f= d-e)	15.126.736.613

Piutang Klaim Global Fund

Piutang Klaim Global Fund RSUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp715.275.459,00 merupakan klaim kepada Global Fund atas jasa pemeriksaan Tuberkulosis (TB), Tuberkulosis Resisten Obat (TB-RO), Diabetes Melitus (DM), dan Tes Cepat Molekuler (TCM) *Xpert*.

Piutang KB

Piutang KB RSUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.775.000,00 terdapat pada RSUD Tanah Abang.

Piutang Lainnya

Piutang Lainnya RSUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.234.957.256,00 merupakan Piutang Jampersal, Jamkesmas dan Jamkesda pada RSUD Koja dan RSKD Duren Sawit.

iii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Laboratorium Kesehatan Daerah

Saldo Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp282.621.000,00 merupakan piutang pelayanan laboratorium kepada pihak di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saldo Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2024 menjadi nihil disebabkan adanya reklasifikasi akun Piutang Pendapatan BLUD menjadi akun Piutang Retribusi sebagai dampak implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

iv. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan

Saldo Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.650.000,00, merupakan piutang atas jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi.



v. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda

Saldo Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama yaitu sebesar Rp93.985.512,00. Saldo tersebut merupakan saldo piutang sewa *tenant* di BLUD UPT Stadion Lebak Bulus. Pada tahun 2015 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus dilikuidasi, selama proses pemeriksaan oleh Inspektorat pencatatan piutang disajikan sebagai piutang di Dinas Pemuda dan Olah Raga.

vi. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Perparkiran

Saldo Piutang BLUD Unit Pengelola Perparkiran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp721.254.452,00 di antaranya adalah piutang pada operator penyedia jasa parkir.

vii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung

Saldo Piutang BLUD Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.678.949.940,00 dan Rp4.195.265.340,00. Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.44

Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Sewa SKH	3.648.913.400	4.182.228.800
2	Piutang Tanah Kavling Siap Bangun	11.596.540	11.596.540
3	Piutang Tanah Sarana Kerja dan Hunian	1.440.000	1.440.000
4	Piutang Administrasi Jasa Layanan Kontrak	17.000.000	0
	Jumlah	3.678.949.940	4.195.265.340

2. Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah piutang antar BLUD di bawah Dinas Kesehatan. Saldo piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp271.278.000,00. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi sehingga tidak disajikan dalam Neraca Provinsi DKI Jakarta.



b) Piutang Hasil Kerja Sama BLUD

Saldo Piutang Hasil Kerja sama BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp39.836.942.886,00 dan Rp31.553.049.422,00. Rincian Piutang Hasil Kerja sama BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.45
Rincian Piutang Hasil Kerjasama BLUD
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Puskesmas Pasar Minggu	0	680.000
2	Puskesmas Pasar Rebo	0	2.700.000
3	RSUD Pasar Rebo	114.340.500	0
4	RSUD Pasar Minggu	0	225.532.000
5	RSUD Tanjung Priok	0	800.000
6	RSU Adhyaksa	0	250.000
7	RSUD Koja	793.150.080	550.263.352
8	RSUD Tarakan	2.483.942.846	2.219.962.242
9	RSUD Cengkareng	758.385.825	728.658.325
10	RSUD Budhi Asih	843.674.000	22.400.000
11	Unit Pengelola Perpustakaan	2.512.373.522	1.570.103.645
12	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	30.726.018.000	24.341.578.000
13	Unit Pengelola Sampah Terpadu	1.605.058.113	1.890.121.858
	Jumlah	39.836.942.886	31.553.049.422

c) Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.653.440.431,00 dan Rp2.042.458.535,00. Saldo piutang tersebut di antaranya merupakan Piutang denda keterlambatan pelaksanaan pembangunan Bisnis Center PT Albasas Sinar Purnama atas PKS Bangun Serah Guna Gedung Pusat Grosir PIK (PGP) sebesar Rp1.782.868.770,00 dan Piutang Biaya Pra Operasional Bisnis Center sebesar Rp1.274.052.348,00 pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dan saldo piutang denda sebesar Rp191.711.234,00 pada RSUD Cengkareng.

Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih

Nilai Piutang BLUD per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sebesar Rp399.572.364.522,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp449.977.840.530,00 dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp50.405.476.008,00.



Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) BLUD berdasarkan jenis pendapatan BLUD per 31 Desember 2024 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.46

Klasifikasi umur piutang (*aging*) BLUD berdasarkan jenis pendapatan BLUD
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah Piutang per Jenis Pendapatan BLUD (Rp)	Jumlah Penyisihan Piutang per Jenis Pendapatan BLUD (Rp)
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
		0 s.d 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	2 s.d 5 Tahun	lebih dari 5 Tahun		
1	Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	387.505.822.596	8.881.406.800	571.850.000	8.528.377.817	405.487.457.213	11.633.486.192
2	Piutang Hasil Kerjasama BLUD	4.236.571.418	273.455.185	2.125.252.282	33.201.664.001	39.836.942.886	34.312.818.518
3	Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	21.729.022	191.711.234	0	4.440.000.175	4.653.440.431	4.459.171.298
Jumlah Piutang BLUD		391.764.123.036	9.346.573.219	2.697.102.282	46.170.041.993	449.977.840.530	50.405.476.008
Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih		1.958.665.972	928.216.902	1.348.551.141	46.170.041.993	50.405.476.008	
NRV Piutang BLUD		389.805.457.064	8.418.356.317	1.348.551.141	0	399.572.364.522	

5.3.1.1.2.3.11 Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyetorkan pokok sewa atau kontribusi Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) ke Kas Daerah sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dikelola oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp26.335.832.350,00 dan Rp26.743.584.888,00.

Rincian saldo Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	19.263.176.632	19.788.879.170



No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	7.072.655.718	6.954.705.718
	Jumlah	26.335.832.350	26.743.584.888

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Nilai Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp449.735.337,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp26.335.832.350,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tak Tertagih sebesar Rp25.886.097.013,00.

Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.47

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	55.197.600	106.557.301	124.390.957	18.977.030.774	19.263.176.632
2	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	117.950.000	132.618.252	0	6.822.087.466	7.072.655.718
	Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan (I)	173.147.600	239.175.553	124.390.957	25.799.118.240	26.335.832.350
	Persentase Penyisihan (II)	0.50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tak Tertagih (I x II)	865.738	23.917.555	62.195.479	25.799.118.240	25.886.097.013
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	172.281.862	215.257.998	62.195.478	0	449.735.337

5.3.1.1.2.3.12 Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan yang berasal dari denda atas pelanggaran Peraturan Daerah. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.894.389.875,00 dan Rp6.390.310.880,00. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2023 merupakan Piutang Pendapatan Denda Kelebihan Debit Air Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup



sebesar Rp1.336.257.738,00 dan Piutang Pelanggaran atas Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp558.132.137,00 yang mengalami perubahan kode rekening berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019.

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Nilai Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp529.540.967,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.894.389.875,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp1.364.848.908,00.

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Piutang Pelanggaran atas Mendirikan Bangunan	0	0	0	1.336.257.738	1.336.257.738
2	Dinas Lingkungan Hidup Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	286.547.825	271.584.312	0	0	558.132.137
-	Jumlah Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah (I)	286.547.825	271.584.312	0	1.336.257.738	1.894.389.875
-	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
-	Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah (I x II)	1.432.739	27.158.431	0	1.336.257.738	1.364.848.908
-	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	285.115.086	244.425.881	0	0	529.540.967

5.3.1.1.2.3.13 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah merupakan piutang yang berasal dari:

- Piutang hasil sewa barang milik daerah atas hak tagih pemerintah atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa.
- Piutang hasil lelang titik reklame atas hak tagih pemerintah atas pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset milik Pemerintah Daerah.
- Piutang hasil kerja sama daerah atas hak tagih pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian kerja sama pemanfaatan aset dalam bentuk Bangun Guna Serah (*Build, Operate, Transfer/BOT*) atau Bangun Serah Guna (*Build, Transfer, Operate/BTO*).



Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp44.146.360.933,00 dirinci sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
I	Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah	0	37.301.370.242
II	Piutang Hasil Lelang Titik Reklame	0	2.871.178.295
III	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	0	3.973.812.396
Total Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		0	44.146.360.933

Pada Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan reklasifikasi Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp42.961.990.890,00 yang semula pada akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah menjadi Piutang Retribusi Jasa Usaha pada akun Pendapatan Retribusi Daerah.

Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Nilai Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp19.640.321.312,00.

5.3.1.1.2.3.14 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya

1) Piutang Kompensasi Rumah Susun Murah/Sederhana

Piutang Kompensasi Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S) adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya kompensasi kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk dana/konstruksi/barang. Piutang Kompensasi RSM/S per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp709.188.171.009,00 dan Rp842.311.305.796,00.

Piutang Kompensasi RSM/S adalah kewajiban para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) untuk membiayai dan membangun rumah susun sederhana yang dapat dikonversi dalam bentuk:

- Pembangunan rumah susun;
- Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan/atau
- Pengadaan barang.

Pencatatan Piutang Kompensasi RSM/S diukur berdasarkan nilai yang termuat dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Ketentuan Pengenaan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana sebagai berikut:

Ketentuan pemberian SP3L sebagai berikut:

- Sesuai Keputusan Gubernur No. 540 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan



Lokasi/Lahan Atas Bidang Tanah Untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyatakan bahwa pembebasan terhadap lahan dengan luas 5.000m² atau lebih terhadap lahan yang peruntukannya sebagai hunian dan/atau terdapat hunian di lahan tersebut, maka pemohon SIPPT diwajibkan membiayai dan membangun RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersial. Ketentuan lokasi dan persyaratan penjualan RSM tersebut ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di lahan milik pemegang SIPPT maka bangunan RSM menjadi milik pemegang SIPPT.

- b) Keputusan Gubernur No. 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyatakan bahwa pemegang SIPPT yang membebaskan lahan seluas 5.000m² atau lebih tanpa Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dikenakan sanksi berupa:
1. Membiayai dan membangun sampai siap huni RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersial dengan ketentuan bahwa lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di atas lahan milik pemegang SIPPT, maka lahan dan bangunan RSM adalah milik pemegang SIPPT.
 2. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
 3. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Ketentuan penyelesaian konversi kewajiban RSM/S mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan RSM/S Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang. Sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang pasal 9 ayat (9) maka pencatatan saldo Piutang Kompensasi Rumah



Susun, Susun Sederhana/Murah dialihkan secara bertahap ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Saldo Piutang Kompensasi RSM/S per 31 Desember 2024 sebesar Rp709.188.171.009,00 terdapat pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp76.801.418.133,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp632.386.752.876,00.

Tahun 2024 terdapat mutasi pengurangan Piutang Kompensasi RSM/S sebesar Rp133.123.134.787,00 dengan rincian pengurangan piutang pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp2.937.992.400,00 dikarenakan adanya pengalihan piutang pendapatan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas PT Lintas Cipta Development sesuai Izin Prinsip Konversi Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana No.4/C.46/31.74.04.1007.29.K-1.b/1/TM.12/2024 tanggal 13 September 2024 dan pengurangan piutang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp130.185.142.387,00.

Rincian Piutang Kompensasi RSM/S per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pengembang	Tanggal	Persetujuan Prinsip Nomor	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
Tercatat di Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup:				
1	PT Pardhika Wisti Sarana	06-Apr-16	2149/-1.711.534	9.652.950.000
2	PT Aryakencana Semesta	13-Jan-17	32/-1.711.534	36.106.425.000
3	PT Sedayu Sejahtera Abadi	27-Jan-17	27/-1.711.534	24.059.448.933
4	PT Kode Sukses Sejahtera	21-Jul-17	1717/-1.711.534	6.982.594.200
Jumlah				76.801.418.133
Tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:				
1	PT Almaron Perkasa	30-Jan-20	42/-1.796.3	4.326.363.603
2	PT Adhi Karya (Persero) TBK	01-Sep-20	3/C.46/31.75.09.1001.02.022.R.9/1/-1.711.32/2020	4.611.946.133
3	PT Karyagraha Nusantara	02-Sep-20	4/C.46/31.74.03.1005.04.015.K.1.a.b/1/-1.711.32/2020	461.701.844
4	PT Prakarsa Semesta Alam	04-Sep-20	7/C.46/31.74.07.1010.01.015.R.7/1/-1.711.32/2020	35.875.133.400
5	PT Mandiri Eka Abadi	05-Apr-21	5/C.46/31.74.07.100.01.009.R.10/-1.711.32/2021	29.145.253.038
6	PT Mitra Sindo Makmur	05-Apr-21	6/C.46/31.75.06.100.09.001.R.7.b/1/-1.711.32/2021	117.210.107.685
7	PT Global Budi Perkasa	03-Mei-21	9/C.46/31.73.01.100.01.008.R.10/1/-1.711.32/2021	22.491.838.178
8	PT Karyabangun Greenwood	28-Mei-21	11/C.46/31.74.02.108.03.049.K.1.a.b/1/-1.711.32/2021	3.700.559.263
9	PT Sejahtera, PT Pondok Indah Land, PT	21-Okt-21	15/C.46/31.71.07.1003.04.005.K.1.a.b/1/-1.711.32/2021	42.260.447.250
10	PT Sdr/i Rahmad Abadi dan Melania Maria	21-Okt-21	14/C.46/31.73.08.1006.02.004.K.1.a.b/1/-1.711.32/2021	14.533.533.600
11		31-Dec-21	18/C.46/31.71.07.1003.04.005.K.1.a.b/1/-1.711.32/2021	4.383.946.263



No.	Nama Pengembang	Tanggal	Persetujuan Prinsip Nomor	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
12	Theresia Merlina PT Trimitra Multi Sukses Selaras PT Astra	01-Des-22	1/C.46/31.71.05.1001.12.003.K.1.a.b/1/- 1.711.32/2022	45.600.926.760
13	Modern Land (PT. Asya Mandira Land) PT Perkasa	28-Jun-22	2/C.46/31.75.06.1004.06.001.R.4.b/ 1/-1.711.32/2022	140.432.025.200
14	Internusa Mandiri	13-Sep-22	4/C.46/31.72.05.1003.04.001.K.1.a.b/1/- 1.711.32/2022	10.040.274.886
15	PT Menara Sinar Terang	13-Okt-22	5/C.46/31.73.06.1001.05.019.C.1/1/- 1.711.32/2022	7.010.250.000
16	PT Citra Mas Pentama	13-Okt-22	6/C.46/31.73.06.1005.03.007.K.1/- 1.711.32/2022	32.777.831.064
17	PT Citra Adyapataka	13-Okt-22	7/C.46/31.73.06.1002.09.012.R.4/1/- 1.711.32/2022	15.157.754.880
18	PT Teras Laras	13-Okt-22	8/C.46/31.74.06.1001.04.009.R.4/1/- 1.711.32/2022	3.204.182.610
19	PT Aplikanusa Lintasarta	13-Okt-22	9/C.46/31.74.06.1001.01.001.K.1.b/1/- 1.711.32/2022	4.849.564.590
20	PT Metropolitan Kentjana	13-Okt-22	10/C.46/31.74.10.1002.01.010.R.6.b/1/- 1.711.32/2022	2.213.527.500
21	PT Metropolitan Kentjana	13-Okt-22	11/C.46/31.74.05.1002.01.017.R.4/1/- 1.711.32/2022	1.676.307.984
22	PT. Kencana Indah Sejahtera	13-Okt-22	12/C.46/31.72.06.1002.02.017.R.6/1/- 1.711.32/2022	7.742.493.000
23	PT Astra Internasional	13-Okt-22	13/C.46/31.75.04.1007.02.021.R.6/1/- 1.711.32/2022	4.407.518.700
24	PT Samadista Karya	27-Des-23	4/C.46/31.74.06.1002.K-1.b/1/TM.12/2023	9.277.048.980
25	PT Ramayana Lestari Sentosa	21-Nov-23	2/C.46/31.75.09.1002.35.K-3/1/TM.12/2023	1.298.780.280
26	PT Lintas Cipta Development	21-Nov-23	3/C.46/31.74.10.1002.30.R-1/1/TM.12/2023	794.936.405
27	PT. Jantra Swarna Dipta Qq Pt. Jan Darmadi Investindo	22-Mei-24	1/C.46/31.74.07.1007.25.R-2/1/TM.12/2024	39.901.495.200
28	PT Kuningan Graha Samatas	13-Sep-24	3/C.46/31.74.02.1003.31.K- 1.B/1/PM.12/2024	19.879.089.660
29	PT Lestari Kirana Persada	13-Sep-24	4/C.46/31.74.04.1007.29.K- 1.B/1/PM.12/2024	2.937.992.400
30	PT. Nuansa Ayu Karamba	13-Sep-24	5/C.46/31.01.01.1001.44.W/1/PM.12/2024 TGL 13 SEPT 2024	466.233.300
31	PT. So Good Food	13-Sep-24	6/C.46/31.75.06.1007.33.KPI/1/PM.12/2024 TGL 13 SEPT 2024	3.717.689.220
Jumlah				632.386.752.876
Jumlah Piutang				709.188.171.009

Penyisihan Piutang Kompensasi Rumah Susun Murah/Sederhana Tak Tertagih

Nilai Piutang Kompensasi RSM/S per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp353.858.420.095,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp709.188.171.009,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp355.329.750.914,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.48
Penyisihan Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah Tak
Tertagih Per 31 Desember 2024

No	Nama SKPD Pengampu	Nilai Piutang per 31 Desember 2024 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)	Piutang Neto (NRV) (Rp)
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	76.801.418.133	0	0	0	76.801.418.133	76.801.418.133	0
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	632.386.752.876	334.512.499	1.137.076.566	277.056.743.716	0	278.528.332.781	353.858.420.095
	Jumlah	709.188.171.009	334.512.499	1.137.076.566	277.056.743.716	76.801.418.133	355.329.750.914	353.858.420.095

2) Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN merupakan hibah aset kredit Eks BPPN pada tahun 2003 dengan nilai Rp205.509.066.573,00 sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Saldo Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 atas pokok piutang adalah sebesar Rp41.880.534.592,00 dan Rp41.923.253.432,00.

Total hasil tagihan eks BPPN yang diterima dari tahun 2005 sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp165.418.776.708,00 yang telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah. Sampai dengan Tahun 2024 Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN yang telah digunakan sebagai menambah modal PT Bank DKI Jakarta adalah sebesar Rp163.185.297.701,00 dan sisanya sebesar Rp2.233.479.007,00 masih terdapat pada Kas Daerah (belum digunakan sebagai penambah modal PT Bank DKI Jakarta).

Penyisihan Piutang Hasil Tagih Tak Tertagih

Nilai Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp41.880.534.592,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp41.880.534.592,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.49
Penyisihan Piutang Hasil Tagih Tak Tertagih
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN	0	0	0	41.880.534.592	41.880.534.592
	Jumlah Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN (I)	0	0	0	41.880.534.592	41.880.534.592
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN Tak Tertagih (I x II) 2024	0	0	0	41.880.534.592	41.880.534.592
	Nilai Piutang Neto 2024	0	0	0	0	0

3) Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun

Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pembayaran sarana dan prasarana fasilitas rumah susun berupa penyediaan air dan listrik bagi para penghuni. Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp28.893.574.595,00 dan Rp26.444.238.419,00. Piutang ini terdiri dari:

a) Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa

Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa adalah Piutang atas penggunaan air para penghuni rumah susun sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Rumah Susun.

Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp28.073.794.506,00 dan Rp25.517.673.358,00.

Penyisihan Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa

Nilai Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp4.254.566.710,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp28.073.794.506,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp23.819.227.796,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.50

Penyisihan Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa	882.330.060	1.363.346.250	4.299.273.350	21.528.844.846	28.073.794.506
	Persentase Penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah penyisihan pembayaran air rusun sewa tak tertagih	4.411.650	136.334.625	2.149.636.675	21.528.844.846	23.819.227.796
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	877.918.410	1.227.011.625	2.149.636.675	0	4.254.566.710

b) Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa

Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa adalah Piutang atas penggunaan listrik para penghuni rumah susun sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Rumah Susun.

Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp819.780.089,00 dan Rp926.565.061,00.

Penyisihan Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa

Nilai Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp2.003.242,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp819.780.089,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp817.776.847,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51

Penyisihan Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa	0	402.896	3.281.271	816.095.922	819.780.089
	Persentase Penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah penyisihan pembayaran listrik rusun sewa tak tertagih	0	40.290	1.640.636	816.095.922	817.776.847
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	0	362.606	1.640.636	0	2.003.242

4) Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) merupakan piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame Non Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan penyelenggara reklame. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.



Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp17.988.000,00 dan Rp121.230.000,00.

Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Nilai Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp8.994.000,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp17.988.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp8.994.000,00.

5) Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bentuk disinsentif yang dikenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan yang ingin meningkatkan KLB pada daerah yang mendapat Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus (kode a) sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Dokumen sumber yang menjadi dasar pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan adalah Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai KLB selanjutnya disebut PPK-KLB.

PPK-KLB merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga untuk menyerahkan bentuk kompensasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan nilai KLB yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.

Kompensasi Pelampauan KLB diakui sebagai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB sebesar jumlah yang tercantum dalam PPK-KLB.

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB dinilai berdasarkan nilai yang tercantum dalam PPK-KLB dikurangi dengan nilai pemenuhan kewajiban kompensasi KLB yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp686.091.733.239,00 dan Rp707.655.176.471,00. Saldo Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2024 sebesar Rp686.091.733.239,00 merupakan saldo piutang per 31 Desember



2023 sebesar Rp707.655.176.471,00 dikurangi pemenuhan kewajiban Tahun 2024 sebesar Rp21.563.443.232,00.

Rincian Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.52
Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan
Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tanggal Perjanjian	Bentuk Kompensasi	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
					Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
1	Sampoerna Land, PT	7 Juni 2016	Rumah susun 3 Tower di Daan Mogot	488.385.180.216	0	0	488.385.180.216
2	Singa Propertindo Haryono, PT	12 Oktober 2016 adendum 12 Juli 2018, 5 Agustus 2020	Pekerjaan tata pamer dan pembangunan pintu masuk baru disisi jl pintu besar utara	744.211.924	0	744.211.924	0
3	Putragaya Wahana, PT	16 November 2016 adendum 1 Juli 2019	Rumah Susun 3 Tower di Pulo Gebang	5.287.537.440	0	0	5.287.537.440
4	Kepland Investama, PT	7 Desember 2016 adendum 20 Maret 2019 dan 28 Oktober 2022	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot	30.443.684.415	0	20.819.231.308	9.624.453.108
5	PT Ambal Aqar	25 September 2020	a. Revitalisasi Waduk Setiabudi Barat dengan ruang lingkup Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi (Landscape, Pengerukan Waduk, Perkuat Tebing, Pembangunan Instalasi Pengolahan IPALD Kapasitas 30 lps, Revitalisasi Pompa Setiabudi Barat, Evaluasi Sistem Kali Cideng dan Pompa Mobile) dan Pengawasan b. Revitalisasi Kanal Banjir Barat (Segmen Stasiun Karet s.d Shangrila dan Segmen Landmark s.d Jembatan Jl HOS Cokroaminoto sepanjang 500 m d dengan ruang lingkup Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi (Landscape, Jembatan Penghubung ke Waduk Setiabudi Barat) dan Pengawasan	178.787.374.200	0	0	178.787.374.200
7	PT Cempaka Wenang Jaya	6 Oktober 2017	a. Lahan Masjid Habib Cikini beserta bangunan penduduknya b. Renovasi Bangunan Masjid, Gereja dan Gedung Kesenian Masjid Luar Batang	4.007.188.276	0	0	4.007.188.275
Jumlah				707.655.176.471	0	21.563.443.232	686.091.733.239



Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) Tak Tertagih

Nilai Piutang Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp89.393.687.100,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp686.091.733.239,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp596.698.046.139,00.

5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.370.741.523.000,00 dan Rp8.295,00. Piutang tersebut dicatat sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024. Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan Piutang Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	23.574.776.000	3.052
2	Penerimaan PPh Pasal 21	2.275.715.565.000	961
3	Penerimaan PPh PODN (Pasal 25 dan Pasal 29)	27.279.767.000	1.659
4	Bagi hasil dari Cukai Hasil Tembakau	96.772.000	504
5	Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	44.074.643.000	2.119
	Jumlah	2.370.741.523.000	8.295

5.3.1.1.2.5 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp383.637.070.506,00 dan Rp374.339.155.304,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.53

Rincian Piutang Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Jenis Piutang Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Uang Muka	200.957.354.942	229.757.096.738
2	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	506.527.225	406.051.698
3	Piutang Tunjangan DPRD	4.255.540.000	4.419.140.000
4	Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	130.085.082.350	130.297.979.742
5	Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	9.292.376.530	9.458.887.126
6	Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi	38.540.189.459	0
	Jumlah	383.637.070.506	374.339.155.304



Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Uang Muka

Uang Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp200.957.354.942,00 dan Rp229.757.096.738,00. Uang Muka sebesar Rp200.957.354.942,00 merupakan Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

a) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp186.978.479.789,00 merupakan uang muka kerja pada 2 Paket kegiatan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Jakarta *Sewerage Development Project* (JSDP) Zona 1 Pekerjaan Konstruksi Jaringan Pipa Air Limbah Jakarta *Sewerage System* Zona 1 Paket 5 (Area 2-1), SPK No. 3550/Kr.01.00 Tgl. 12-04-2023 (Nindya Modern, KSO) sebesar Rp76.821.608.160,00;
2. Pekerjaan Jakarta *Sewerage Development Project* (JSDP) Zona 1 Pekerjaan Konstruksi Jaringan Pipa Alim JSDP Zone 1 Paket 6 (Area 2-2), SPK No. 3551/Kr.01.00 Tgl. 12-04-2023 (Adhi-Hutama KSO) sebesar Rp53.006.561.870,00;
3. Pekerjaan Tanggul Pengaman Pantai dan Infrastruktur Pengendali Banjir Pesisir Pantai Tahap I Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1, SPK No. 5956/Kr.01.02 Tgl. 12.01.2024 (Abipraya - Guntur, KSO) sebesar Rp19.246.713.277,00; dan
4. Pekerjaan Tanggul Pengaman Pantai dan Infrastruktur Pengendali Banjir Pesisir Pantai Tahap I Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 2, SPK No. 40911/Kr.01.02 Tgl. 06-08-2024 (PT. Nindya Karya) sebesar Rp37.903.596.482,00.

b) Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp13.978.875.153,00 merupakan uang muka kerja pada 3 Paket kegiatan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Rehab Total Gedung PKBM N 39 (PT. Citra Prasasti - Cakra Wibowo, KSO) sebesar Rp2.660.912.668,00;
2. Pekerjaan Rehab Total Gedung SDN Cipayung 05 (PT. Citra Prasasti - Cakra Wibowo, KSO) sebesar Rp6.223.476.871,00; dan
3. Rehab Total Gedung SDN Rambutan 05 (PT. Citra Prasasti - Cakra Wibowo, KSO) sebesar Rp5.094.485.614,00.

2) Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga

Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp506.527.225,00 dan



Rp406.051.698,00. Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 terdiri dari:

- a) kelebihan pembayaran pajak atas rehabilitasi gedung SMKN 64 Jakarta oleh Dinas Pendidikan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp373.147.291,00. Saldo kelebihan pembayaran pajak Per 31 Desember 2020 sebesar Rp485.091.478,00 yang merupakan kelebihan pembayaran pajak uang muka kerja atas kontrak yang dibatalkan. Pada tahun 2021 terdapat kompensasi PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp111.944.187,00 maka tersisa sebesar Rp373.147.291,00 atas penyetoran PPN PT Bangun Abipraya Bennatin KSO Masa Pajak Juli 2019 yang belum dapat di kompensasi;
- b) kelebihan pembayaran pajak, biaya admin bank maupun pembayaran pihak ketiga atas transaksi BOS pada 30 Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan sebesar Rp121.988.183,00 yang telah diterima kembali di rekening BOS di Tahun 2025;
- c) kelebihan pembayaran pajak di RSUD Koja sebesar Rp10.903.037,00 yang terdiri atas kelebihan pembayaran PPh 21 atas nama RSUD Koja Rp5.686.537,00, kelebihan pembayaran PPN dan PPh 22 atas nama CV Chandra Karya sebesar Rp3.333.666,00, kelebihan pembayaran PPN dan PPh atas nama PT Trasti Global Konverta sebesar Rp1.882.823,00, dan kelebihan pembayaran kepada PT. Anara Trisakti Medika sebesar Rp11,00; dan
- d) saldo rekening penerimaan BLUD di RSUD Sawah Besar yang didebit oleh PT Bank DKI tanpa pemberitahuan dan penjelasan sebesar Rp488.714,00. RSUD Sawah Besar telah bersurat ke PT Bank DKI, tetapi belum mendapatkan surat balasan ataupun tindak lanjut.

3) Piutang Tunjangan DPRD

Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.255.540.000,00 dan Rp4.419.140.000,00. Piutang Tunjangan DPRD berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut, jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00, tahun 2011 sampai dengan Tahun 2023 tidak ada penyetoran atas piutang tersebut, dan pada Tahun 2024 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp163.600.000,00 sehingga saldo Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp4.255.540.000,00.

Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD Tak Tertagih

Nilai Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp4.255.540.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang DPRD Tak Tertagih sebesar Rp4.255.540.000,00.

4) Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta adalah piutang atas uang muka kerja (UMK) yang telah dibayarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta atas pengadaan bus pada tahun anggaran 2013 namun belum dilakukan penyelesaian pekerjaan sampai dengan saat ini. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp130.085.082.350,00 dan Rp130.297.979.742,00. Rincian saldo Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta per 31 Desember 2024 dijelaskan sebagai berikut:

- a) UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta tahun 2013.

Pada tahun 2013 Dinas Perhubungan melaksanakan 8 (delapan) paket kegiatan pengadaan bus Transjakarta dengan melakukan pembayaran UMK namun belum dilakukan penyelesaian pekerjaan akibat proses hukum terkait tindak pidana korupsi. Para penyedia belum melakukan pembatalan kontrak atas 8 (delapan) paket pengadaan dan hingga kini masih terdapat sengketa hukum antara instansi dan penyedia. Sebagian penyedia tersebut sudah dinyatakan pailit sehingga potensi UMK untuk tidak dikembalikan menjadi sangat tinggi.

Adapun rincian dari UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta sebagai berikut.



Tabel 5.54
UMK Paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta

No	Uraian Paket	Penyedia	Uang Muka (Rp)	Penerimaan Tahun 2021 (Rp)	Penerimaan Tahun 2024 (Rp)	Sisa (Rp)
1	Articulated Bus	PT Saptaguna Dayaprima	32.160.895.800	411.154.418	0	31.749.741.382
2	Bus Sedang					
3	Single Bus	PT Ifani Dewi	30.743.900.000	0	212.897.392	30.531.002.608
4	Bus Sedang					
5	Single Bus	PT Industri Kereta Api	13.752.000.000	0	0	13.752.000.000
6	Bus Sedang	PT Putera Adi Karyajaya	11.251.710.360	0	0	11.251.710.360
7	Bus Sedang	PT Adi Teknik Equipindo	11.242.968.000	0	0	11.242.968.000
8	Articulated Bus	PT Putriasi Utama Sari	7.735.200.000	0	0	7.735.200.000
			106.886.674.160	411.154.418	212.897.392	106.262.622.350

Dari 6 (enam) penyedia sebagaimana disebutkan di atas, terdapat 4 (empat) penyedia yang dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri, yaitu:

1. PT Saptaguna Dayaprima telah dinyatakan pailit pada tahun 2017 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan hak pembagian harta pailit sebesar Rp411.154.418,00 pada 22 April 2021 atau hanya menerima pengembalian sebesar 1,28% dari total ter piutang melalui rekening 108-02615756 atas nama BPKD Provinsi DKI Jakarta dan diakui sebagai pengurang Uang Muka pada tahun berjalan;
2. PT Putera Adi Karyajaya telah dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tahun 2018. Berdasarkan Surat Permohonan No 3795/-193 tanggal 12 Agustus 2021, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa atas Temuan Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan DKI Jakarta No. 16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti;
3. PT Adi Teknik Equipindo juga telah dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tahun 2017; dan
4. PT Ifani Dewi telah dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 329/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Tahun 2024, dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan hak pembagian



harta pailit sebesar Rp212.897.392,00 pada 22 November 2024 atau hanya menerima pengembalian sebesar 0,69% dari total ter piutang melalui rekening 108-02615756 atas nama BPKD Provinsi DKI Jakarta dan diakui sebagai pengurang Uang Muka pada tahun berjalan.

Terhadap 2 (dua) penyedia lainnya, yaitu PT Industri Kereta Api dan PT Putriasi Utama Sari, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah berupaya menagih pengembalian Uang Muka sebagai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK kepada bersangkutan.

Penyisihan UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta

Penyisihan atas UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta per 31 Desember 2024 sebesar Rp106.262.622.350,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.55

Penyisihan UMK paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta

Per 31 Desember 2024

No	Nama Perusahaan	Lancar (<1 tahun/5%) (Rp)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%) (Rp)	Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%) (Rp)	Macet (di atas 5 tahun/100%) (Rp)	Jumlah (Rp)
1	PT Saptaguna Dayaprima	0	0	0	31.749.741.382	31.749.741.382
2	PT Ifani Dewi	0	0	0	30.531.002.608	30.531.002.608
3	PT Industri Kereta Api	0	0	0	13.752.000.000	13.752.000.000
4	PT Putera Adi Karyajaya	0	0	0	11.251.710.360	11.251.710.360
5	PT Adi Tehnik Equipindo	0	0	0	11.242.968.000	11.242.968.000
6	PT Putriasi Utama Sari	0	0	0	7.735.200.000	7.735.200.000
	Jumlah	0	0	0	106.262.622.350	106.262.622.350

b) UMK pada kegiatan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta Tahun 2013.

Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK pengadaan Transjakarta atas kegiatan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama sebesar Rp23.822.460.000,00.

Pada tahun 2013 Dinas Perhubungan melakukan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta dengan melakukan pembayaran UMK kepada PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Tehnik Equipindo sebesar Rp12.188.880.000,00 dan Rp12.763.580.000,00. Atas pengadaan bus tersebut dilakukan pembatalan kontrak, yang mengakibatkan kewajiban pengembalian pembayaran UMK oleh kedua perusahaan tersebut yang pembayarannya secara angsuran selama lebih dari 3 tahun. Bagian lancar tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta merupakan piutang atas



pembatalan kontrak Pengadaan Bus *Single* Transjakarta Paket III dan Paket V.

Pada Tahun 2024 belum terdapat pembayaran angsuran atas pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta, hal tersebut disebabkan PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Teknik Equipindo selaku pihak penyedia bus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. PT Adi Teknik Equipindo dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 Februari 2018, saat ini PT Adi Teknik Equipindo sudah menjalani proses lelang harta pailit yang kedua, namun mendapat gugatan dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga proses lelang masih menunggu hasil gugatan tersebut. Sedangkan PT Putera Adi Karyajaya dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 September 2018. Rincian dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.56

UMK pada kegiatan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta Tahun 2013

No.	Uraian	Angsuran Pokok (Rp)	Jadwal Pembayaran	Pembayaran Angsuran (Rp)	Sisa Pokok Angsuran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7)
Pembatalan PT Adi Teknik Equipindo						
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000	0	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000	4.845.000.000	
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	0	6.600.000.000	
4	Angsuran 41 s.d. 42	753.580.000,00	28 Jan - 28 Maret 2019	0	753.580.000	
	Jumlah	12.763.580.000,00		565.000.000	12.198.580.000	
Pembatalan PT Putera Adi Karyajaya						
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000	0	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000	4.845.000.000	
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	0	6.600.000.000	
4	Angsuran 41	178.880.000,00	28 Jan - 28 Mar 2019	0	178.880.000	
	Jumlah	12.188.880.000,00		565.000.000	11.623.880.000	

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Penyisihan atas Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta sebesar Rp23.822.460.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.



Tabel 5.57

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK
Pengadaan Transjakarta Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	Lancar (<1 tahun/5%) (Rp)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%) (Rp)	Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%) (Rp)	Macet (diatas 5 tahun/100%) (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PT Adi Teknik Equipindo	0	0	0	12.198.580.000	12.198.580.000
2.	PT Putera Adi Karyajaya	0	0	0	11.623.880.000	11.623.880.000
	Jumlah	0	0	0	23.822.460.000	23.822.460.000

5) Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah

Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah merupakan jumlah yang sudah jatuh tempo pembayaran atas nilai Tagihan Penjualan Angsuran dengan nilai per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.292.376.530,00 dan Rp9.458.887.126,00. Selama Tahun 2024 nilai Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah berkurang sebesar Rp166.510.596,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah sebesar Rp3.027.193.978,00 yang merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran sebesar Rp642.770.638,00, kolektabilitas piutang sebesar Rp2.159.821.535,00, dan mutasi penambahan lainnya sebesar Rp224.601.805,00; dan
- b) mutasi kurang sebesar Rp3.193.704.574,00 yang merupakan pembayaran sebesar Rp481.567.370,00, reklasifikasi ke tagihan penjualan angsuran sebesar Rp493.649.821,00, kolektabilitas piutang sebesar Rp2.159.821.535,00 dan mutasi pengurangan lainnya sebesar Rp58.665.848,00.

Pencatatan pada laporan keuangan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan secara wajar dengan membentuk penyisihan.

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Tak Tertagih

Penyisihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp5.809.753.554,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.58

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/
Cicilan Penjualan Rumah Tak Tertagih Tahun 2024

No	Nama Rusun	Jumlah Unit	Lancar (Rp) (1 tahun/0,5%)	Kurang Lancar (Rp) (1 s.d 2 tahun/10%)	Diragukan (Rp) (2 s.d 5 tahun/50%)	Macet (Rp) (> 5 tahun/100%)	Jumlah (Rp)
1	Tambora III	98	3.894.216	25.735.978	0	1.041.851.223	1.071.481.417
2	Bendungan Hilir II	614	0	0	39.368.098	713.163.819	752.531.917
3	Jatibunder	40	0	0	0	69.660.003	69.660.003
4	Tanah Tinggi	428	0	0	7.883.604	18.670.470	26.554.074
5	Petamburan	600	11.411.893	424.151.938	855.818.936	741.759.940	2.033.142.707
6	Karet Tengsin II	308	345.572.988	845.215.261	3.012.840.192	589.488.650	4.793.117.091



No	Nama Rusun	Jumlah Unit	Lancar (Rp) (1 tahun/0,5%)	Kurang Lancar (Rp) (1 s.d 2 tahun/10%)	Diragukan (Rp) (2 s.d 5 tahun/50%)	Macet (Rp) (> 5 tahun/100%)	Jumlah (Rp)
7	Tebet Barat I	320	0	0	0	431.783.256	431.783.256
8	Tebet Barat II	120	0	0	0	114.106.065	114.106.065
Total		2.528	360.879.097	1.295.103.177	3.915.910.830	3.720.483.426	9.292.376.530
Penyisihan			1.804.395	129.510.318	1.957.955.415	3.720.483.426	5.809.753.554

6) Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi

Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi merupakan piutang atas kelebihan pencairan tagihan subsidi prasarana dan sarana pada PT MRT dan PT Transjakarta di Tahun Anggaran 2024. Saldo Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp38.540.189.459,00 dan Rp0,00. Kelebihan pencairan tagihan subsidi prasarana dan sarana Tahun 2024 pada PT MRT sebesar Rp36.893.350.383,00 dan pada PT Transjakarta sebesar Rp1.646.839.076,00. Hal tersebut dikarenakan pembayaran atas bulan Desember 2024 masih menggunakan nilai proforma.

5.3.1.1.3 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp655.570.616.904,00 dan Rp501.750.677.798,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Barang Dibayar di Muka	314.989.120.601	198.718.344.133
2	Beban Jasa Dibayar di Muka	286.739.131.617	290.653.783.872
3	Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka	53.842.364.686	12.378.549.793
Jumlah		655.570.616.904	501.750.677.798

a. Beban Barang Dibayar di Muka

Beban Barang Dibayar di Muka sebesar Rp314.989.120.601,00 terdiri dari pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Sekda Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pembayaran Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2025 dan pembayaran deposit BBM.

Pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai Surat Edaran Sekda Nomor 33 Tahun 2024 sebesar Rp224.474.608.004,00 terdapat pada:

- 1) Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp73.865.551.506,00;
- 2) Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp62.407.506.456,00;



- 3) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp53.343.840.778,00;
- 4) Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp15.265.994.388,00;
- 5) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.761.198.990,00;
- 6) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp3.999.201.699,00;
- 7) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.980.953.392,00;
- 8) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.361.584.046,00; dan
- 9) Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah sebesar Rp1.488.776.749,00.

Beban dibayar di muka atas deposit BBM sebesar Rp90.514.512.597,00 di antaranya terdapat pada:

- 1) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat sebesar Rp9.070.581.432,00;
- 2) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.931.257.760,00; dan
- 3) Unit Pengelola Angkutan Sekolah sebesar Rp4.203.139.395,00.

b. Beban Jasa Dibayar di Muka

Beban Jasa Dibayar di Muka sebesar Rp286.739.131.617,00 terdiri dari pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Sekda Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pembayaran Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2025 dan pembayaran jasa lainnya.

Pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai Surat Edaran Sekda Nomor 33 Tahun 2024 sebesar Rp36.287.420,00 terdapat pada:

- 1) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp30.939.273,00; dan
- 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.348.147,00.

Beban Jasa Dibayar di Muka lainnya sebesar Rp286.702.844.197,00 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:



- 1) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp197.602.450.000,00. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku tuan rumah pelaksanaan Kegiatan Balap Mobil Formula E musim ke enam tahun 2020 kepada *Formula E Operation* (FEO) telah dibayarkan *commitment fee* dengan total sebesar £31.000.000,00 yang terdiri atas kewajiban untuk tahap 1 dan tahap 2 Tahun 2019 sebesar £20.000.000,00 serta kewajiban tahap 1 Tahun 2020 sebesar £11.000.000,00 sesuai kontrak jangka panjang dalam *City Host Agreement*.

Namun karena adanya pandemi Covid-19 dan penundaan pelaksanaan Formula E, PT Jakpro melakukan negosiasi dengan pihak FEO yang menghasilkan kesepakatan Penyelenggaraan Formula E yang sebelumnya direncanakan diadakan selama 5 tahun pada tahun 2020-2024, menjadi dilaksanakan selama 3 tahun mulai 2022-2024 dengan total *commitment fee* sebesar £36.000.000,00 dan telah dibayarkan sebesar £31.000.000,00 sehingga sisa kewajiban *commitment fee* adalah sebesar £5.000.000,00 dan akan dilakukan pembayaran oleh PT Jakpro tanpa menggunakan dana APBD Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2023.

Rincian ketentuan *commitment fee* Formula E adalah sebagai berikut:

Season 2021/2022 = £7.000.000,00

Season 2022/2023 = £14.000.000,00

Season 2023/2024 = £15.000.000,00

Atas terlaksananya kegiatan Formula E pada bulan Juni 2022 dan Juni 2023 maka dilakukan amortisasi terhadap Beban Jasa Dibayar di Muka sesuai dengan ketentuan biaya yang sudah ditetapkan. Total *commitment fee* yang telah dibayarkan adalah sebesar £31.000.000,00, dan pelaksanaan telah direalisasikan sebanyak dua kali pada bulan Juni 2022 dan Juni 2023 dengan jumlah £21.000.000,00 sehingga Beban Jasa Dibayar di Muka Dinas Pemuda dan Olahraga atas penyelenggaraan kegiatan Formula E per 31 Desember 2023 adalah sebesar £10.000.000,00 atau setara Rp197.602.450.000,00. Pada Tahun 2024 tidak dilakukan kegiatan Formula E sehingga nilai Beban Jasa Dibayar di Muka Per 31 Desember 2024 sama dengan 31 Desember 2023.

Penjelasan lebih lanjut atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E terdapat pada Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan;



- 2) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp61.034.497.702,00 merupakan *lisensi software*; dan
- 3) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.248.093.682,00 merupakan asuransi alat berat dan KDO, layanan server dan *software*.

b. Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka

Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka sebesar Rp53.842.364.686,00 terdiri dari pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Sekda Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pembayaran Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2025 dan pembayaran pemeliharaan lainnya.

Pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai Surat Edaran Sekda Nomor 33 Tahun 2024 sebesar Rp67.537.321,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka lainnya sebesar Rp53.774.827.365,00 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp16.392.187.404,00 merupakan pemeliharaan *software*;
- 2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp15.561.729.655,00 merupakan perpanjangan lisensi dan *software*; dan
- 3) Unit Pengelola *Jakarta Smart City* sebesar Rp15.466.925.000,00 merupakan perpanjangan lisensi.

5.3.1.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.347.138.009.623,00 dan Rp1.263.775.601.406,00. Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan di gudang untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat/kepada pihak di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan pada SKPD/UKPD berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2024 dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO). Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.



Tabel 5.59

Persediaan

Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Barang Pakai Habis	1.339.998.488.548	1.256.899.948.763
2	Barang Tak Habis Pakai	7.139.175.643	6.875.652.643
3	Barang Bekas Dipakai	345.432	0
Jumlah		1.347.138.009.623	1.263.775.601.406

Penjelasan lebih lanjut nilai Persediaan Per 31 Desember 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Barang Pakai Habis

Barang Pakai Habis sebesar Rp1.339.998.488.548,00 terdiri dari barang yang akan diserahkan ke luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang yang digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat pada:

- 1) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp65.888.068.147,00, di antaranya merupakan persediaan perbekalan farmasi berupa vaksin dan obat-obatan dan persediaan untuk penanganan Covid-19;
- 2) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp51.777.521.914,00 merupakan peralatan (armatur) penerangan jalan umum dan pekerjaan pemeliharaan jalan yang akan diserahkan kepada instansi vertikal;
- 3) Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp46.519.530.687,00 di antaranya cairan *reagen* (bahan kimia);
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp46.328.121.497,00 berupa blangko KTP elektronik;
- 5) RSUD Pasar Minggu sebesar Rp29.459.046.448,00 berupa obat-obatan dan alat kesehatan; dan
- 6) Barang yang digunakan untuk operasional di 745 PD/UPD sebesar Rp1.100.026.199.855,00.

b. Barang Tak Habis Pakai

Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp7.139.175.643,00, terdapat pada:

- 1) Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp2.701.890.196,00, berupa Pipa *PVC*;
- 2) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan sebesar Rp758.404.694,00, berupa Pipa *PVC*;
- 3) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat sebesar Rp626.820.470,00, berupa Pipa *PVC*; dan
- 4) Barang Tak Habis Pakai lainnya di 44 PD/UPD sebesar Rp3.052.060.283,00.



c. Barang Bekas Dipakai

Barang Bekas Dipakai sebesar Rp345.432,00 terdapat pada PSBI Bangun Daya 2 berupa kran air.

Pada Periode Januari s.d Desember 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima hibah barang-barang Persediaan sebesar Rp403.481.210.367,00, di antaranya terdapat pada:

- 1) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp288.906.548.512,00 yang di antaranya merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa vaksin dan obat-obatan;
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp53.348.536.262,00 berupa blangko KTP elektronik.
- 3) Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp36.892.643.437,00 yang di antaranya merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa *reagen viral load HIV*; dan
- 4) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp11.711.518.092,00 yang di antaranya berupa alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi.

Dari Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.363.090.847.492,00 termasuk persediaan berupa barang-barang *slow moving* sebesar Rp20.051.217.595,00, yang terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.255.606.629,00, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.795.610.966,00.

Nilai Persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 tidak termasuk persediaan yang sudah usang atau rusak sebesar Rp27.934.503.396,00 sebagaimana dirinci pada Lampiran 5, di antaranya berupa bukti lulus uji kendaraan bermotor, obat-obatan kadaluwarsa, alat kontrasepsi dan cetakan yang informasinya sudah tidak relevan. Persediaan yang telah usang tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD sebagai berikut:

- 1) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng sebesar Rp6.614.190.385,00;
- 2) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke sebesar Rp4.999.805.656,00;
- 3) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp3.180.950.367,00;
- 4) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing sebesar Rp2.916.926.889,00; dan



- 5) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp2.337.934.095,25.

Dari jumlah persediaan yang usang atau rusak tersebut telah diusulkan pemusnahannya sebesar Rp24.085.489.089,00.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp93.176.692.451.917,00 dan Rp84.559.599.245.749,00.

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang bersumber dari APBD kelompok pembiayaan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana bergulir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari waktu ke waktu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) sejak tahun 2001 sampai dengan 2007, dan dialihkan ke UPT Dana Bergulir di bawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Dana Bina Ekonomi PPMK bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat. Namun, dalam pengelolaannya terdapat permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana dari masyarakat penerima manfaat (menunggak), penyalahgunaan dana, dan dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengelola.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPPAPP dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terus berupaya melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir pada Dewan Kelurahan, Koperasi Jasa Keuangan PEMK, dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir; dan

- b) Program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dikelola oleh Unit Pengelola Dana Perumahan di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Adapun program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sesuai dengan



ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dana bergulir tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui Bank pelaksana.

Bentuk kerja sama dengan Bank Pelaksana adalah *Executing Agency* berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Perumahan dan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Unit Pengelola Dana Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Bank DKI Nomor 761/-072 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Oleh PT Bank DKI, di mana tanggung jawab untuk menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir ada pada Bank Pelaksana. Atas hal tersebut maka Bank Pelaksana akan memperoleh bagian dari bagi hasil atas penyaluran Dana Bergulir sebesar 3,1% dari nilai total persentase bunga sebesar 5%.

Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing tercatat sebesar Rp550.000.000.000,00. Adapun nilai pokok Dana Bergulir dan akumulasi penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dana Bergulir	1.099.708.355.664	1.099.780.201.964
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(549.708.355.664)	(549.780.201.964)
Nilai Investasi Non Permanen	550.000.000.000	550.000.000.000

Nilai Pokok Dana Bergulir dan Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp71.846.300,00,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya penyetoran pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah.

Rincian pokok Dana Bergulir sebesar Rp1.099.708.355.664,00, disajikan pada tabel sebagai berikut.



Tabel 5.60
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2024

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007) (Rp)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2016) (Rp)	Unit Pengelola Dana Perumahan (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	550.000.000.000	1.435.873.068.615
II	Dana yang dialihkan dari PPMK ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537	0	0
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	0	11.314.522.622	0	11.314.522.622
IV	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah s.d Tahun 2023	(7.014.892.937)	(340.392.496.336)	0	(347.407.389.273)
V	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah Tahun 2023	(16.846.300)	(55.000.000)		(71.846.300)
VI	Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV)	429.319.843.841	120.388.511.823	550.000.000.000	1.099.708.355.664
	Posisi				
VII	Saldo Kas dan Bank	0	0	295.450.001.937	295.450.001.937
VIII	Dana di Pemanfaat	421.662.006.310	120.388.511.823	254.549.998.063	796.600.516.196
IX	Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VI+VII)	421.662.006.310	120.388.511.823	550.000.000.000	1.092.050.518.133
X	Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (V-VIII)	7.657.837.531	0	0	7.657.837.531

a. Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh DPPAPP secara keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Selain itu, terdapat dana pengalihan kepada UPT Dana Bergulir sebesar Rp124.544.360.537,00 dan Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp7.031.739.237,00 sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp429.319.843.841,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.60.

Mutasi Tahun 2024

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK (DPPAPP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp429.319.843.841,00. Dari nilai investasi tersebut, sebesar Rp421.662.006.310,00 berada di pemanfaat, dan sisanya sebesar Rp7.657.837.531,00 merupakan selisih dana belum terjelaskan karena kelemahan pengadministrasian dana PPMK.

Mutasi Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK selama Tahun 2024 berkurang sebesar Rp16.846.300,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman masyarakat dari rekening Dekel/ Satgas PPMK yang dipindahbukukan ke Kas Daerah, sehingga nilai Investasi Non Permanen



pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp429.319.843.841,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.61

Rekapitulasi Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK

Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir 31 Desember 2024 (Rp)
			Pengembalian dari Rek Dekel/ Satgas PPMK	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	
1.	Saldo Kas dan Bank	0	16.846.300	(16.846.300)	0
2.	Dana di Pemanfaat	421.678.852.610	(16.846.300)	0	421.662.006.310
3.	Selisih Dana belum terjelaskan	7.657.837.531	0	0	7.657.837.531
	Jumlah	429.336.690.141	0	(16.846.300)	429.319.843.841

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Keuangan Dana Bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007 maka Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk sampai dengan Tahun 2024 telah berupaya melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 sebesar Rp429.319.843.841,00 yang terdapat di 295.400 pemanfaat/peminjam dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 berdasarkan data laporan hasil audit KAP Tahun 2009 di seluruh kelurahan di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Satgas Kelurahan.

Dalam proses pelaksanaan identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan tersebut, para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi terus melakukan koordinasi dan memfasilitasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk terkait sosialisasi kebijakan, dan tata cara penagihan dan pengembalian serta penyelesaian secara administrasi permasalahan yang ada di pemanfaat. Hasil identifikasi dan verifikasi data faktual terhadap 295.400 pemanfaat/peminjam dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 adalah sebagai berikut.

No	Wilayah	Jumlah Pemanfaat	Mampu Mengembalikan	Tidak Mampu Mengembalikan	Tidak Diketahui	Telah Melunasi	Tidak Meminjam	Jumlah Teridentifikasi dan Verifikasi	Jumlah Tidak Teridentifikasi dan Verifikasi
1	Jakarta Pusat	56.463	476	22.959	22.926	5.911	4.073	56.345	118
2	Jakarta Utara	40.590	1.065	6.340	24.079	5.879	3.227	40.590	0
3	Jakarta Barat	60.474	550	17.338	30.983	6.798	3.864	59.533	941
4	Jakarta Selatan	62.113	2.275	18.867	25.933	9.934	5.104	62.113	0
5	Jakarta Timur	69.666	2.191	15.582	31.843	13.935	6.115	69.666	0
6	Kepulauan Seribu	6.094	0	5.337	615	142	0	6.094	0



No	Wilayah	Jumlah Pemanfaat	Mampu Mengembalikan	Tidak Mampu Mengembalikan	Tidak Diketahui	Telah Melunasi	Tidak Meminjam	Jumlah Teridentifikasi dan Verifikasi	Jumlah Tidak Teridentifikasi dan Verifikasi
	Jumlah	295.400	6.557	86.423	136.379	42.599	22.383	294.341	1.059

Atas hasil identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan terhadap 0295.400 pemanfaat/peminjam dengan jumlah dana sebesar Rp429.319.843.841,00 tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun proses identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan hingga saat ini masih terus dilakukan untuk percepatan penyelesaian permasalahan dana Bina Ekonomi PPMK.

b. Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh ex UPT Dana Bergulir secara keseluruhan sejak tahun 2008 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp460.836.008.159,00, terdiri dari dana awal sebesar Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00, dan 30% alokasi dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digunakan untuk pengguliran kembali sebesar Rp11.314.522.622,00. Selain itu, terdapat Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp340.447.496.336,00 yang mengurangi pencatatan nilai investasi, sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp120.388.511.823,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.60.

Mutasi Tahun 2024

Nilai investasi yang tercatat pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp120.388.511.823,00. Dari nilai investasi tersebut tercatat sebesar Rp120.388.511.823,00 berada di pemanfaat.

Mutasi Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir selama Tahun 2024 berkurang sebesar Rp55.000.000,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman dari Koperasi Jasa Keuangan (KJK) ke Kas Daerah, sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp120.388.511.823,00 dengan penjelasan sebagai berikut.



Tabel 5.62
Rekapitulasi Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2024 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
		31 Des 2023 (Audited)	Pengembalian dari KJK	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	31 Des 2024
1.	Saldo Kas dan Bank	0	55.000.000	(55.000.000)	0
2.	Dana di Pemanfaat (a+b):	120.443.511.823	(55.000.000)	0	120.388.511.823
	a. teridentifikasi	121.193.494.258	(53.000.000)	0	121.140.494.258
	b. tidak teridentifikasi	(749.982.435)	(2.000.000)	0	(751.982.435)
	JUMLAH (1+2)	120.443.511.823	0	(55.000.000)	120.388.511.823

c. Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan

Nilai investasi yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp550.000.000.000,00.

UDP merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pengelolaan dana menggunakan dua rekening yang ditempatkan di Bank DKI, yaitu nomor rekening 110-02-00000-1 untuk transaksi dana investasi dan 110-02-11111-3 untuk transaksi dana operasional.

Mutasi Tahun 2024

Nilai investasi yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp550.000.000.000,00. Dari nilai investasi tersebut sebesar Rp295.450.001.937,00 berada pada rekening dana bergulir, dan sebesar Rp254.549.998.063,00 berada di pemanfaat. Atas saldo awal investasi tersebut terdapat koreksi sebesar Rp1,00 yang disebabkan oleh pembulatan sehingga saldo awal investasi dana bergulir pada UPDP menjadi sebesar Rp295.450.001.936,00 berada pada rekening dana bergulir, dan sebesar Rp254.549.998.064,00 berada di pemanfaat.

Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat penyaluran ke masyarakat sebesar Rp19.272.088.450,00 dan pengembalian dari masyarakat sebesar Rp15.422.976.651,00, sehingga nilai investasi dana bergulir pada UPDP per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp291.600.890.137,00 yang berada pada rekening dana bergulir dan sebesar Rp258.399.109.863,00 berada di pemanfaat.

Mutasi Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.



Tabel 5.63
Rekapitulasi Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2023 (Rp)	Koreksi	Saldo Awal 1 Januari 2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2024 (Rp)		Saldo Akhir 31 Desember 2024 (Rp)
					Penyaluran ke Masyarakat	Pengembalian dari Masyarakat	
1	Saldo Kas dan Bank	295.450.001.937	(1)	295.450.001.936	(19.272.088.450)	15.422.976.651	291.600.890.137
2	Dana di Pemanfaat	254.549.998.063	1	254.549.998.064	19.272.088.450	(15.422.976.651)	258.399.109.863
	Jumlah	550.000.000.000	0	550.000.000.000	0	0	550.000.000.000

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Sejak tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan kriteria kualitas piutang dana bergulir dengan menggunakan metode *executing agency* di mana kualitas piutang ditetapkan berdasarkan kualitas lancar dan kualitas macet. Nilai Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp550.000.000.000,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.099.708.355.664,00 dikurangi dengan penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih sebesar Rp549.708.355.664,00.

Tabel 5.64
Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Macet (Rp)	Akumulasi Penyisihan per 31 Des 2024 (Rp)
		100%	
I	Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir	120.388.511.823	120.388.511.823
II	Penyisihan	120.388.511.823	120.388.511.823
III	Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK	429.319.843.841	429.319.843.841
IV	Penyisihan	429.319.843.841	429.319.843.841

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Pemerintah Daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika Pemerintah Daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari peraturan daerah, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.



Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp92.626.692.451.917,00 dan Rp84.009.599.245.749,00, dengan rincian dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.65
Investasi Permanen
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas	92.332.188.496.917	83.715.095.290.749
2	Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Biaya	294.503.955.000	294.503.955.000
	Jumlah Investasi Permanen	92.626.692.451.917	84.009.599.245.749

Rincian perhitungan Investasi Permanen disajikan pada lampiran 6 Ikhtisar Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah.

a. Investasi dengan Metode Ekuitas

Penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas, didasarkan pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah yang lebih dari 51%, misalnya pada Perumda Air Minum Jaya (100%), PT Food Station Tjipinang (99,98%), dan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (72%). Penilaian penyertaan modal menggunakan metode ekuitas juga dilakukan pada kepemilikan 20% sampai 50% jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pengaruh/pengendalian yang signifikan pada perusahaan tersebut dengan variabel sebagai berikut:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Penilaian investasi dengan metode ekuitas pada perusahaan daerah dengan kepemilikan 20% sampai 50% adalah sebagai berikut:

- 1) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50,00%)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Direktur Keuangan;
- 2) PT Pembangunan Jaya (38,80%)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 1 (satu) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris Utama;
- 3) PT Delta Jakarta Tbk (26,25%)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris Independen (Komisaris Utama) dan 1 (satu) Komisaris; dan



4) PT Ratax Armada (28,00%)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris dan 1 (satu) Direktur, yang saat ini telah mengundurkan diri dan perusahaan tidak beroperasi.

Pada penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham, yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp92.332.188.496.917,00 dan Rp83.715.095.290.749,00. Dengan rincian dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.66
Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama	% Kepemilikan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Perumda Air Minum Jaya	100,00%	4.067.208.731.415	3.449.544.925.780
2	Perumda Dharma Jaya	100,00%	439.088.897.611	466.125.029.737
3	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	100,00%	5.572.106.346.809	5.554.928.504.064
4	Perumda Pasar Jaya	100,00%	1.532.218.565.464	1.530.748.892.361
5	Perumda PAL Jaya	100,00%	1.262.788.357.311	1.246.431.260.941
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah		12.873.410.898.610	12.247.778.612.883
6	PT Jakarta Propertindo	99,998%	24.868.736.897.996	23.991.197.246.177
7	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,998%	27.282.827.509.869	23.887.901.546.678
8	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	11.350.312.689.538	10.982.535.682.062
9	PT Food Station Tjipinang	99,98%	627.365.823.104	617.635.223.340
10	PT Transportasi Jakarta	99,70%	4.842.878.703.074	4.701.221.698.896
11	PT Jakarta Tourisindo	99,58%	658.158.455.150	567.235.405.681
12	PT Penjamin Kredit Daerah	99,17%	632.776.241.327	413.139.843.427
13	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	72,00%	1.234.296.000.471	1.185.955.200.453
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Perseroan Daerah		71.497.352.320.529	66.346.821.846.714
14	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	53,05%	3.079.860.074.757	187.918.474.113
15	PT Pembangunan Jaya	38,80%	4.659.453.593.788	4.688.253.593.788
16	PT Ratax Armada	28,00%	0	0
17	PT Delta Djakarta, Tbk	26,25%	222.111.609.233	244.322.763.251
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan		7.961.425.277.778	5.120.494.831.152
	Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas		92.332.188.496.917	83.715.095.290.749



Mutasi pencatatan Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

1) Perumda Air Minum Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023 disajikan sebesar Rp3.449.544.925.780,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp617.663.805.635,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp735.414.791.576,00 yang merupakan pengumuman laba Perumda Air Minum Jaya Tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024, dikalikan dengan 100% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp62.367.973.726,00 yang merupakan setoran dividen Perumda Air Minum Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 20 Tahun 2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perumda Air Minum Jaya Tahun Buku 2023 dan telah diterima Kas Daerah; dan
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp55.383.012.215,00 yang merupakan keuntungan aktuarial atas pengukuran kembali program imbalan kerja pada Laporan Keuangan Perumda Air Minum Jaya *Audited* 2024.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Jaya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp4.067.208.731.415,00.

2) Perumda Dharma Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Dharma Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp466.125.029.737,00. Nilai investasi Tahun 2024 berkurang sebesar Rp27.036.132.126,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional



berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp13.725.800.439,00 terdiri dari:

1. pengumuman laba Perumda Dharma Jaya Tahun 2024 dikalikan dengan 100% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.612.943.003,00; dan
 2. penambah ekuitas Perumda Dharma Jaya berupa cadangan umum dan pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain sebesar Rp6.112.857.436,00.
- b) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp40.761.932.565,00 terdiri dari:
1. penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.683.051.248,00; dan
 2. pengurang ekuitas Perumda Dharma Jaya berupa pengukuran kembali atas liabilitas program imbalan pasti sebesar Rp1.078.881.317,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Dharma Jaya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp439.088.897.611,00.

3) Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp5.554.928.504.064,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp17.177.842.745,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp29.019.129.297,00 terdiri dari:
 1. pengumuman laba Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2024, dikalikan dengan 100% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp27.679.181.674,00; dan
 2. penambah ekuitas Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2024 berupa penghasilan komprehensif lain sebesar Rp1.339.947.623,00.
- b) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp11.841.286.552,00 berupa penyesuaian saldo laba.



Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp5.572.106.346.809,00.

4) Perumda Pasar Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp1.530.748.892.361,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp1.469.673.103,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp23.434.191.960,00 terdiri dari:
 - 1. pengumuman laba Perumda Pasar Jaya Tahun 2024, dikalikan dengan 100% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp19.445.669.969,00; dan
 - 2. penambah ekuitas Perumda Pasar Jaya Tahun 2024 berupa penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3.988.521.991,00.
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp21.964.518.857,00 yang merupakan setoran dividen Perumda Pasar Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 18 Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perumda Pasar Jaya Tahun Buku 2023 dan telah diterima Kas Daerah.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Jaya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp1.532.218.565.464,00.

5) Perumda PAL Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda PAL Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp1.246.431.260.941,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp16.357.096.370,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional



berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp34.726.471.812,00 yang merupakan pengumuman laba komprehensif Perumda PAL Jaya Tahun 2024, dikalikan dengan 100% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp18.369.375.441,00 yang merupakan penyetoran dividen Perumda PAL Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 16 Tahun 2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perumda PAL Jaya Tahun Buku 2023, dan telah diterima Kas Daerah; dan
- c) pembulatan sebesar Rp1,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda PAL Jaya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp1.262.788.357.311,00.

6) PT Jakarta Propertindo

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp23.991.197.246.177,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp877.539.651.819,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp2.183.400.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo, sesuai dengan Perjanjian Tambahan (adendum) II atas Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2023 Nomor 606/HK.01.11 tanggal 11 November 2024;
- b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp18.737.400.022,00 terdiri dari:
 - 1. penambah ekuitas PT Jakarta Propertindo Tahun 2024 berupa penghasilan komprehensif lain sebesar Rp18.674.657.941,00; dan



2. penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan PT Jakarta Propertindo Tahun 2024 sebesar Rp62.742.081,00
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp1.324.597.748.203,00 terdiri dari:
 1. penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp804.792.901.781,00;
 2. pengumuman rugi PT Jakarta Propertindo Tahun 2024, dikalikan dengan 99,998% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp517.180.237.172,00; dan
 3. pengurang ekuitas PT Jakarta Propertindo berupa penghasilan komprehensif lain sebesar Rp2.624.609.250,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp24.868.736.897.996,00.

7) PT Mass Rapid Transit Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp23.887.901.546.678,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp3.394.925.963.191,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD Rp3.377.545.259.782,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta, yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta *Phase II* (Bundaran HI – Kota);
- b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp17.451.091.779,00 terdiri dari:
 1. pengumuman laba PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun 2024, dikalikan dengan 99,997% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rp8.895.815.291,00;



2. penambah ekuitas PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun 2024 berupa penghasilan komprehensif lain sebesar Rp8.509.823.305,00; dan
 3. penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun 2024 sebesar Rp45.453.183,00.
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp70.388.370,00 berupa penyesuaian pengurang ekuitas PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun 2024.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp27.282.827.509.869,00.

8) PT Bank DKI Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp10.982.535.682.062,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp367.777.007.476,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp2.190.760.167,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Bank DKI Jakarta, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Bank DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor 646/HK.01.11 tanggal 4 Desember 2024;
- b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp791.458.399.575,00 terdiri dari:
 1. pengumuman laba PT Bank DKI Jakarta Tahun 2024, dikalikan dengan 99,98% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp778.920.228.937,00; dan
 2. penambah ekuitas PT Bank DKI Jakarta berupa pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti setelah pajak tangguhan sebesar Rp12.538.170.638,00.
- c) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD



sebesar Rp326.362.883.842,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Bank DKI Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 11 tanggal 22 Maret 2024 dan telah diterima Kas Daerah; dan

d) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp99.509.268.424,00 terdiri dari:

1. pengurang ekuitas PT Bank DKI berupa penghasilan komprehensif lainnya dan dana kesejahteraan sebesar Rp99.508.544.911,00; dan
2. penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan sebesar Rp723.513,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp11.350.312.689.538,00.

9) PT Food Station Tjipinang

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp617.635.223.340,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp9.730.599.764,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp11.587.556.512,00 terdiri dari:
 1. pengumuman laba PT Food Station Tjipinang Tahun 2024, dikalikan dengan 99,98% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp11.587.276.026,00; dan
 2. penambah ekuitas PT Food Station Tjipinang sebesar Rp280.486,00.
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp1.856.956.748,00, yang merupakan penyetoran dividen PT Food Station Tjipinang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 3 tanggal 30 April 2024 dan telah diterima Kas Daerah.



Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp627.365.823.104,00.

10) PT Transportasi Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp4.701.221.698.896,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp141.657.004.178,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp199.965.480.155,00 berupa pengumuman laba PT Transportasi Jakarta Tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024, dikalikan dengan 99,70% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp55.452.326.932,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Transportasi Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 9 tanggal 21 Juni 2024 dan telah diterima Kas Daerah; dan
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp2.856.149.045,00 terdiri dari:
 1. pengurang ekuitas PT Transportasi Jakarta berupa penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp2.855.453.298,00; dan
 2. pengurang ekuitas PT Transportasi Jakarta sebesar Rp695.747,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp4.842.878.703.074,00.

11) PT Jakarta Tourisindo

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023 yaitu sebesar Rp567.235.405.681,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp90.923.049.469,00 dengan penjelasan sebagai berikut:



- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp140.074.752.369,00 terdiri dari:
 - 1. penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.861.920.574,00;
 - 2. penambah ekuitas PT Jakarta Tourisindo berupa selisih penilaian kembali properti investasi dan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp123.163.936.926,00; dan
 - 3. penambah ekuitas PT Jakarta Tourisindo berupa penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan sebesar Rp48.894.869,00.
- b) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp49.151.702.900,00 berupa pengumuman rugi PT Jakarta Tourisindo Tahun 2024, dikalikan dengan 99,58% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp658.158.455.150,00.

12) PT Penjamin Kredit Daerah

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp413.139.843.427,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp219.636.397.900,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp200.000.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Penjamin Kredit Daerah, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Penjamin Kredit Daerah Tahun Anggaran 2024 nomor 50/HK.01.11 tanggal 19 Januari 2024;
- b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp27.694.623.285,00, yang terdiri dari:



1. pengumuman laba PT Penjamin Kredit Daerah Tahun 2024, dikalikan dengan 99,17% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp27.174.234.990,00;
 2. penghasilan komprehensif sebagai penambah ekuitas PT Penjamin Kredit Daerah sebesar Rp476.282.432,00; dan
 3. penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan sebesar Rp44.105.863,00.
- c) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp7.686.754.330,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Penjamin Kredit Daerah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 59 tanggal 22 Maret 2024 dan telah diterima Kas Daerah; dan
- d) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp371.471.055,00 yang merupakan penghasilan komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp632.776.241.327,00.

13) PT Pembangunan Jaya Ancol

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp1.185.955.200.453,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp48.340.800.018,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp128.009.520.049,00 yang merupakan pengumuman laba PT Pembangunan Jaya Ancol Tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024, dikalikan dengan 72,00% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp128.009.520.049,00;
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD Rp36.863.999.968,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya Ancol kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum



Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 23 tanggal 23 Februari 2024 dan telah diterima Kas Daerah; dan

c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp42.804.720.063,00 yang merupakan kerugian komprehensif lain. Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp1.234.296.000.471,00.

14) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp187.918.474.113,00. Nilai investasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp2.891.941.600.644,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp225.000.000.000,00 tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun Anggaran 2024 Nomor 700/HK.01.11 tanggal 23 Desember 2024;
- b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp2.770.834.560.453,00, yang terdiri dari:
 1. pengumuman laba PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun 2024, dikalikan dengan 53,06% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.769.277.455.230,00; dan
 2. penghasilan komprehensif lainnya sebagai penambah ekuitas PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun 2024 sebesar Rp1.557.105.223,00.
- c) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp9.127.128.545,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam



akta notaris nomor 53 tanggal 28 Juni 2024 dan telah diterima Kas Daerah.

d) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp94.765.831.264,00 terdiri dari:

1. pengurang ekuitas PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) berupa penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp82.693.832,00; dan
2. pengurang ekuitas PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) berupa penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan berdasarkan laporan final penilaian 100% ekuitas milik PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) oleh KJPP sebesar Rp94.683.137.432,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp3.079.860.074.757,00

15) PT Pembangunan Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp4.688.253.593.788,00. Nilai investasi Tahun 2024 berkurang sebesar Rp28.800.000.000,00 yang merupakan mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD berupa penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tidak terdapat mutasi lain karena sampai dengan disusunnya laporan keuangan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan Laporan keuangan *Audited* PT Pembangunan Jaya Tahun 2024. Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp4.659.453.593.788,00.

16) PT Ratax Armada

Investasi pada PT Ratax Armada disajikan sebesar nol rupiah karena PT Ratax Armada memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PT Ratax Armada *Unaudited* tahun 2014 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp2.054.694.000. Pada saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian rencana divestasi PT Ratax Armada hal ini dilakukan



untuk mengantisipasi kerugian yang semakin besar akibat penurunan nilai saham PT Ratax Armada.

17) PT Delta Djakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp244.322.763.251,00. Nilai investasi Tahun 2024 berkurang sebesar Rp22.211.154.018,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp37.352.048.974,00, yang terdiri dari:
 1. pengumuman laba PT Delta Djakarta Tahun 2024, dikalikan dengan 26,26% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp37.352.048.960,00; dan
 2. pembulatan sebesar Rp14,00.
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp59.066.396.700,00 berupa penyetoran dividen PT Delta Djakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 7 tanggal 16 Mei 2024 dan telah diterima Kas Daerah; dan
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2024 sebesar Rp496.806.292,00 berupa rugi komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp222.111.609.233,00.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang dalam pengajuan perwakilan direksi kepada pemilik saham mayoritas PT Delta Djakarta. Hasil konfirmasi atas pengajuan tersebut memungkinkan terjadi perubahan penilaian investasi menjadi metode biaya pada penyusunan Laporan Keuangan tahun berikutnya.

b. Investasi dengan Metode Biaya

Penilaian investasi dengan menggunakan metode biaya, didasarkan pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah yang kurang dari 51%. Pada penilaian investasi dengan



menggunakan metode biaya investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut, berupa dividen, diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai investasi permanen dengan metode biaya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama, yaitu sebesar Rp294.503.955.000,00, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.67

Investasi Permanen dengan Metode Biaya
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Nama	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	PT Cemani Toka	27,42%	27.059.360.000	27.059.360.000
2.	PT Kawasan Berikat Nusantara	26,85%	209.692.695.000	209.692.695.000
3.	PT Jakarta International Expo	13,125%	39.375.000.000	39.375.000.000
4.	PT Grahasahari Suryajaya	8,08%	3.951.000.000	3.951.000.000
5.	PT Asuransi Bangun Askrida	4,10%	13.080.000.000	13.080.000.000
6.	PT Pakuan International	1,11%	1.345.900.000	1.345.900.000
Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Biaya			294.503.955.000	294.503.955.000

Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah disajikan pada Lampiran 7 dan 8.

5.3.1.3 Properti Investasi

Sebagai bentuk penerapan PSAP 17 tentang Properti Investasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021, pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pencatatan atas aset Properti Investasi. Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, meningkatkan nilai aset, atau keduanya. Aset Properti Investasi tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang/jasa, tidak untuk tujuan administratif, dan tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada PSAP 17, Properti Investasi diukur sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp5.746.069.265.613,00. Selama Tahun 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima realisasi pendapatan yang dihasilkan dari Properti Investasi tersebut sebesar Rp60.510.115.279,00. Rincian saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.



No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	4.178.110.485.462	3.367.064.778.502
2	Gedung dan Bangunan	1.553.795.480.328	1.542.937.242.079
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.163.299.823	14.163.299.823
	Jumlah	5.746.069.265.613	4.924.165.320.404

Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp832.206.035.209,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp10.302.090.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

<u>a. Mutasi Penambahan</u>			
1)	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	497.059.353.000
2)	Reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	Rp	163.800.000
3)	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Fasos Fasum	Rp	312.482.122.529
4)	Reklasifikasi dari Aset Idle	Rp	22.500.759.680
	Jumlah Penambahan	Rp	832.206.035.209
<u>b. Mutasi Pengurangan</u>			
1)	Reklasifikasi menjadi Aset Tetap	Rp	10.302.090.000
	Jumlah Pengurangan	Rp	10.302.090.000

Rincian penambahan dan pengurangan Properti Investasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

1) Reklasifikasi dari Aset Tetap

Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp497.059.353.000,00 berupa Tanah dan Gedung dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah yang berlokasi di Jalan Harhono RM nomor 10 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebesar Rp51.767.856.000,00;
- Tanah yang terletak di Jalan Genteng Ijo, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sebesar Rp31.668.459.000,00;
- Tanah yang terletak di Jl. RS. Fatmawati No. 20 Jakarta Selatan sebesar Rp3.648.000.000,00;
- Tanah yang terletak di Bedugul sebesar Rp52.372.300.000,00;
- Tanah yang terletak di Jalan TB. Simatupang / Lebak Bulus Raya, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sebesar Rp88.568.724.000,00;
- Tanah yang terletak di Jalan Raya Bogor KM. 28 Pekayon Pasar Rebo, Jakarta Timur sebesar Rp11.350.220.000,00;
- Tanah yang terletak di Green Bay Pluit, Jalan Pluit Karang Ayu, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara sebesar Rp236.948.796.000,00;
- Lahan di Jalan Peta Selatan Kalideres, Kalideres, Jakarta Barat sebesar Rp13.957.713.000,00; dan



- Lahan di Jalan Pejaten Barat Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebesar Rp6.777.285.000,00.

2) Reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

Reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan sebesar Rp163.800.000,00 berupa Tanah yang terletak di Jalan Belimbing Raya Blok B.5 Komplek Perumahan Bojong Indah, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

3) Reklasifikasi dari Aset Tetap - Fasos Fasum

Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum sebesar Rp312.482.122.529,00 berupa Tanah dan Gedung dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah yang terletak di Perumahan Menteng Metropolitan sebesar Rp5.167.371.000,00;
- Tanah yang terletak di Jalan Kedoya Pesing Komplek Perumahan Sunrise Garden, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat sebesar Rp10.382.344.000,00;
- Tanah yang terletak di Kelapa Gading sebesar Rp3.025.750.000,00;
- Tanah yang terletak di Perumahan Citra 3 Ext sebesar Rp60.800.000,00;
- Tanah yang terletak di Perumahan Taman Permata Buana sebesar Rp273.436.000,00;
- Tanah yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua RT 001 / RW 003, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara sebesar Rp18.299.250.000,00;
- Tanah yang terletak di Perumahan Taman Surya 5 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat sebesar Rp12.730.500.000,00;
- Tanah yang terletak di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara sebesar Rp89.064.885.000,00;
- Tanah yang terletak di Pulau Tengah, Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp154.739.548.280,00;
- Gedung yang terletak di Perumahan Citra Garden City Blok Bl.12 Citra 2 ext Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat sebesar Rp5.502.538.249,00;
- Gedung yang terletak di Perumahan Taman Meruya Ilir Blok F-1, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat sebesar Rp5.355.700.000,00; dan
- Tanah yang terletak di Jalan Manggarai Utara 7, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan sebesar Rp7.880.000.000.



4) Reklasifikasi dari Aset Idle

Reklasifikasi dari Aset Idle sebesar Rp22.500.759.680,00 berupa Tanah normalisasi kali Pesanggrahan di Jalan Meruya Ilir, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

b. Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan Properti Investasi merupakan Reklasifikasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp10.302.090.000,00 merupakan Tanah yang terletak di Komplek ITC Fatmawati/Duta Mas. JL RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

Daftar mutasi Aset Properti Investasi per 31 Desember 2024 tersaji di Lampiran 9.

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp456.072.090.311,00 dan Rp448.002.283.626,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Properti Investasi	31 Desember 2023	31 Desember 2024		
	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan	447.294.118.634	2.563.282.580	4.090.194.124	453.947.595.338
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	708.164.992	708.164.991	708.164.990	2.124.494.973
Jumlah	448.002.283.626	3.271.447.571	4.798.359.114	456.072.090.311

Nilai Buku Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.289.997.175.302,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Jenis Properti Investasi	Harga Perolehan (Rp)	31 Desember 2024	Nilai Buku (Rp)
		Akumulasi Penyusutan (Rp)	
Tanah	4.178.110.485.462	0	4.178.110.485.462
Gedung dan Bangunan	1.553.795.480.328	(453.947.595.338)	1.099.847.884.990
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.163.299.823	(2.124.494.973)	12.038.804.850
Jumlah	5.746.069.265.613	(456.072.090.311)	5.289.997.175.302

5.3.1.4 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan



Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp677.659.441.516.748 dan Rp661.657.277.836.888,00. Selama Tahun 2024 mutasi penambahan sebesar Rp26.858.952.295.809,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp10.856.788.615.949,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.69

Mutasi Aset Tetap

Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	515.882.640.362.479	13.343.534.099.240	1.970.731.579.795	527.255.442.881.924
2	Peralatan dan Mesin	32.771.280.763.093	3.174.099.475.763	5.483.053.876.614	30.462.326.362.242
3	Gedung dan Bangunan	47.160.243.335.958	2.959.684.971.375	1.665.075.510.928	48.454.852.796.405
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	61.937.757.653.148	4.520.226.464.364	548.794.043.581	65.909.190.073.931
5	Aset Tetap Lainnya	1.388.435.196.833	99.331.273.130	373.662.117.295	1.114.104.352.668
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.516.920.525.377	2.762.076.011.937	815.471.487.736	4.463.525.049.578
	Total	661.657.277.836.888	26.858.952.295.809	10.856.788.615.949	677.659.441.516.748

Daftar mutasi aset tetap per 31 Desember 2024 tersaji pada Lampiran 10.

5.3.1.4.1 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp527.255.442.881.924,00 dan Rp515.882.640.362.479,00 Selama Tahun 2024 mutasi penambahan sebesar Rp13.343.534.099.240,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.970.731.579.795,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal Tanah TA 2024 yang Menjadi Aset Tetap	Rp	424.288.474.547
a)	Belanja Modal Tanah TA 2024	Rp	433.525.287.650
b)	Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap perolehan 2024	Rp	(9.236.813.103)
1.	Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(6.715.345.213)
2.	Belanja Modal Tahun 2024 yang masih dalam proses pengadaan	Rp	(2.521.467.890)
2)	Reklasifikasi antar Aset Tetap selain Tanah	Rp	109.459.885.610
a)	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	109.124.912.000
b)	Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	334.973.610
3)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	12.097.342.802.083
a)	Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	15.887.256.000,00



b) Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	Rp	12.081.455.546.083
4) Reklasifikasi dari Properti Investasi	Rp	10.302.090.000
5) Kurang Catat	Rp	702.140.847.000
Jumlah Penambahan	Rp	13.343.534.099.240
<u>b. Mutasi Pengurangan</u>		
1) Penghapusan	Rp	90.630.000.000
2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah	Rp	13.962.083.754
3) Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	39.862.885.352
a) Reklasifikasi ke Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	37.140.411.000
b) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	Rp	553.845.600
c) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	Rp	2.168.628.752
4) Reklasifikasi ke Properti Investasi	Rp	497.059.353.000
5) Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria	Rp	1.789.567.000
6) Lebih Catat	Rp	1.327.427.690.689
Jumlah Pengurangan	Rp	1.970.731.579.795

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp424.288.474.547,00 terdiri dari:
 - tanah untuk aliran sungai dalam rangka normalisasi sungai Ciliwung, tanah untuk waduk Jagakarsa, waduk Cilincing, waduk Pondok Ranggon, waduk Rawa Lindung, Waduk Dukuh, tanah untuk Situ Srengseng dan Situ Belibis, pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp364.488.398.425,00;
 - tanah untuk jalan provinsi pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp57.631.447.370,00; dan
 - tanah untuk pembangunan MRT Fase 2 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.168.628.752,00.
- 2) Penambahan Aset Tetap Tanah karena Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Tanah sebesar Rp109.459.885.610,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang sebelumnya tercatat sebagai bangunan kantor, berupa Tanah untuk Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang berlokasi di Jalan Rawa Bebek Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, sebesar Rp109.124.912.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b) Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang telah selesai sebelum Tahun 2024, berupa Tanah untuk Jalan Provinsi sebesar Rp334.973.610,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Lainnya sebesar Rp12.097.342.802.083,00 terdiri dari:



- a) Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp15.887.256.000,00 terdiri dari :
- Reklasifikasi dari Aset Kerjasama Bangun Serah Guna berupa tanah untuk bangunan masjid sebesar Rp13.326.720.000,00 pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre; dan
 - Reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan berupa tanah hutan taman nasional sebesar Rp2.560.536.000,00 yang telah dilakukan mutasi transfer ke Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre dengan BAST nomor 1752/PU.04.00 pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre
- b) Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain sebesar Rp12.081.455.546.083,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi dari Aset Fasos-Fasum sebesar Rp12.050.278.563.786,00 berupa tanah untuk jalan provinsi sebanyak 72 unit, tanah hutan taman nasional sebanyak 96 unit, tanah untuk bangunan air kotor dan tanah dengan peruntukkan lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Reklasifikasi dari Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle) berupa tanah bangunan kantor pemerintah sebesar Rp3.763.536.000,00 pada Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - Reklasifikasi dari Kas Konsinyasi berupa tanah untuk pembangunan MRT Fase 2 sebesar Rp27.413.446.297,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi dari Aset Properti Investasi berupa tanah untuk taman sebesar Rp10.302.090.000,00 pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre.
- 5) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Kurang Catat karena koreksi kurang catat barang sebesar Rp702.140.847.000,00, terdiri dari:
- tanah untuk taman hutan kota yang berlokasi di Jalan Bukit Gading Raya 1, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara sebesar Rp289.054.885.000,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - tanah untuk jalan provinsi yang berlokasi di Jalan Karet Pasar Baru Timur I, II dan III sebesar Rp117.321.165.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat;



- tanah lapangan tempat penimbunan sampah yang berlokasi di Jalan Bukit Gading Raya 1, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara sebesar Rp79.180.325.000,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara;
- tanah untuk bangunan sarana pendidikan yang berlokasi di TK Negeri Bintaro, TK Negeri Cipete, SDN Bintaro 09, SDN Jagakarsa 03, SMA Negeri 66 dan SLB Negeri 12 dengan total sebesar Rp30.199.882.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- Selain pada empat PD/UPD tersebut di atas, penambahan Aset Tetap Tanah dari kurang catat barang juga terdapat pada 14 PD/UPD dengan total sebesar Rp186.384.590.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Penghapusan Aset Tetap Tanah berupa tanah bangunan rumah negara yang terletak di Graha Pejaten, Jl. Pejaten Raya, Pasar Minggu berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 6.000 m² (Lebih Kurang Enam Ribu Meter Persegi) sebesar Rp90.630.000.000,00 pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah berupa pemasangan pagar panel beton untuk pengamanan aset tanah, pembangunan menara tower air dan perbaikan gedung ruangan, penyediaan air bersih dan perbaikan fasilitas toilet dan ibadah, pemasangan kabel instalasi listrik, *smart TV, PC Unit, tablet, handy talkie, keyboard, laser pointer, laptop, server, scanner, hard disk*, monitor, papan nama pemasangan aset, pengadaan plang tanda bahaya, tiang pipa, kursi kerja kantor sebesar Rp13.962.083.754,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Pengurangan Aset Tetap Tanah ke Reklasifikasi Aset Lainnya sebesar Rp39.862.885.352,00 di antaranya:
 - a) Reklasifikasi ke Aset Kemitraan Pihak Ketiga yang merupakan Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan berupa tanah untuk bangunan gedung tempat ibadah permanen, tanah kosong yang sudah diperuntukkan dan tanah untuk bangunan masjid sebesar Rp37.140.411.000,00 pada Jakarta Aset Management Centre;
 - b) Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Tetap Berwujud sebesar Rp553.845.600,00 atas *software* komputer pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan



- c) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain yang merupakan Reklasifikasi Aset Tetap ke Kas Konsinyasi sebesar Rp2.168.628.752,00 atas penitipan ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Fase 2 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah menjadi Properti Investasi berupa tanah untuk jalan provinsi, tanah yang sudah diperuntukkan, tanah bangunan kantor pemerintah dan tanah lainnya sebesar Rp497.059.353.000,00 pada *Jakarta Asset Management Centre*;
- 5) Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria atas Belanja Modal sebelum Tahun 2024 dan direklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp1.789.567.000,00. pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
- 6) Pengurangan Aset Tetap Tanah karena Lebih Catat sebesar Rp1.327.427.690.689,00 terdiri dari:
 - a) Tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga tertutup seluas 3.543 m² sebesar Rp95.372.400.000,00 yang tercatat ganda pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat yang terletak di Jalan Tanah Abang I No. 2 RT 011/RW 008 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selanjutnya, Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat melakukan koreksi pencatatan ganda atas salah satu bidang tanah tersebut;
 - b) Pencatatan ganda atas register tanah sebesar Rp11.622.584.000,00 pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung terdiri dari 8 register Tanah kampung yang terletak di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Tanah HPL 00001/Penggilingan.yang tercatat pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung. Selanjutnya Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung melakukan koreksi pencatatan ganda atas salah satu bidang tanah tersebut;
 - c) Koreksi Lebih Catat Barang atas Aset Tetap Tanah sebesar Rp10.665.760.000,00 berupa tanah untuk bangunan kantor pemerintah yang terletak di Jl. Gading Elok Barat III Blok DF No.1 Jakarta Utara untuk kantor lurah seluas 2.848 m² pada Kelurahan Kelapa Gading Timur Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - d) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 7.000 m² sebesar Rp 8.750.000.000,00 pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Utara dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta -



Pejabat Pengelola Aset Daerah (PPAD) Fasos Fasum yang terletak di Kelapa Puan Raya Blok EF1 Kota Administrasi Jakarta Utara Kecamatan Kelapa Gading Kelurahan Kelapa Gading Timur Kota Administrasi Jakarta Utara. Selanjutnya Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Utara melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI - Pejabat Pengelola Aset Daerah (PPAD) Fasos Fasum;

- e) Tanah hutan taman nasional seluas 836 m² sebesar 8.740.380.000,00 yang tercatat ganda pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Kelurahan Guntur yang terletak di Jl. Salak 17 Rt.8/Rw.2 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Kelurahan Guntur Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- f) Pencatatan ganda atas register tanah seluas 3.450 m² sebesar Rp7.500.000.000,00 pada Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terletak di Jl. Komplek PIK Blok D Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur yang tercatat ganda pada Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
- g) Tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga seluas 6.307 m² sebesar Rp4.402.950.000,00 pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat yang tercatat ganda dengan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat yang terletak di Jalan Mutiara No. 4 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selanjutnya Unit Pengelola



Gelanggang Jakarta Pusat melakukan koreksi pencatatan ganda atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah tetap dicatat dan disajikan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- Pengurangan aset tetap Tanah dari Koreksi Pencatatan Ganda lainnya pada 36 PD/UPD dengan total sebesar Rp1.180.373.616.689,00.

Nilai Aset Tetap Tanah tersebut di atas sudah termasuk Kas Dikonsinyasikan dengan saldo per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp223.719.524.696,00 dan Rp209.482.676.696,00 yang terdapat pada OPD berikut ini.

Tabel 5.70

Kas Dikonsinyasikan

Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Dinas Bina Marga	107.214.674.212	15.861.614.000	1.624.766.000	121.451.522.212
2	Dinas Sumber Daya Air	102.268.002.484	0	0	102.268.002.484
	Jumlah	209.482.676.696	15.861.614.000	1.624.766.000	223.719.524.696

Selama Tahun 2024 Saldo Kas Konsinyasi terdapat mutasi penambahan sebesar Rp15.861.614.000,00 dan mutasi pengurangan Rp1.624.766.000,00 pada Dinas Bina Marga, sebagai berikut:

Mutasi Penambahan berasal dari dua kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 yang merupakan penitipan saldo kas konsinyasi baru di antaranya sebagai berikut:

- 1) Penitipan Kas Konsinyasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Konsinyasi Peta Bidang atas nama Poenjoto Thijono berlokasi di Jalan Pegangsaan Dua Kel Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp835.234.000,00); dan
- 2) Penitipan Kas Konsinyasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Konsinyasi Peta Bidang atas nama David Ridwan Sukotjo yang berlokasi di Jalan Arjuna Selatan Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp15.026.380.000,00)

Mutasi Pengurangan berasal dari Kas Konsinyasi yang sudah diserahkan dari Pengadilan ke pihak terkait, yang merupakan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Pegangsaan Dua Kel. Pegangsaan Dua Kec.



Kelapa Gading peta bidang 39 atas nama Poenjoto Thijono sebesar Rp1.624.766.000,00.

Selain Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanah hasil pembebasan lahan dan tanah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Tanah hasil pembebasan merupakan tanah Eks BPPT seluas 76.928 m² di Kelurahan Meruya Selatan yang belum tercatat. Walikota Administrasi Jakarta Barat masih dalam proses inventarisasi, legalisasi dan penyelesaian permasalahan tanah Eks BPPT. Adapun tanah berstatus HPL terdiri 45 sertifikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 13.035.227 m² dengan rincian sebagaimana disajikan dalam lampiran 11.

Selama Tahun 2024 telah dilakukan rekonsiliasi data Hak Pengelolaan antara Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan Kantor Pertanahan Wilayah. Dari rekonsiliasi tersebut diketahui bahwa HPL No. 2/Pulo Gebang dengan luas 575.155 meter persegi yang semula tercatat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkonfirmasi merupakan HPL atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan pencatatannya menjadi 45 HPL

HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang yang mewakili negara. Pemegang hak pengelolaan adalah instansi pemerintah, jawatan, atau badan milik Negara.

Lahan dengan sertifikat HPL tersebut di antaranya digunakan sebagai aset fasilitas umum, untuk pembangunan gedung pemerintah, dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset, dan dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah.

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam proses identifikasi dan inventarisasi bentuk pemanfaatan tanah HPL pada beberapa lokasi sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta hak yang terbit di atasnya.

5.3.1.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp30.462.326.362.242,00 dan Rp32.771.280.763.093,00. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp3.174.099.475.763,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp5.483.053.876.614,00 dengan rincian sebagai berikut.



a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 yang menjadi Aset Tetap terdiri dari:	Rp	2.747.113.814.731
a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024	Rp	2.961.717.289.383
b)	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 yang tidak menghasilkan Aset Tetap	Rp	(214.603.474.652)
1.	Pembayaran Utang atas Aset Peralatan dan Mesin yang telah Diakui Tahun Sebelumnya	Rp	(1.234.347.102)
2.	Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(12.887.497.756)
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 yang masih Dalam Proses Pengerjaan	Rp	(149.801.506.774)
4.	Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka	Rp	(1.488.776.749)
5.	Belanja Modal atas pekerjaan kontraktual belum selesai dengan mekanisme RPBATA	Rp	(48.702.830.358)
6.	Pengembalian Belanja Modal atas Temuan, Klaim, Bank Garansi dan Koreksi Lainnya	Rp	(488.515.913)
2)	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	Rp	74.331.542.666
a)	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	62.419.572.392
b)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa		244.826.000
c)	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	11.667.144.274
3)	Beban Dibayar Di Muka tahun sebelumnya	Rp	442.800.000
4)	Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	70.643.667.583
5)	Pengadaan yang belum dibayarkan	Rp	3.871.507.873
6)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin	Rp	233.704.983.955
a)	Reklasifikasi dari Aset Tetap dari Gedung dan Bangunan / JIJ	Rp	184.855.896.377
b)	Reklasifikasi dari KDP yang Sudah Selesai Dikerjakan		48.849.087.578
7)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap	Rp	43.880.007.841
8)	Kurang Catat	Rp	111.151.114
Jumlah Penambahan		Rp	3.174.099.475.763
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Penghapusan	Rp	19.462.275.885
2)	Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		145.771.000
3)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin	Rp	44.721.685.220
4)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	5.417.926.918.982
a)	Reklasifikasi ke Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	1.093.780.000
b)	Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	Rp	6.397.795.130
c)	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Lain-Lain	Rp	5.410.435.343.852
5)	Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria	Rp	700.114.637
6)	Pengembalian atas temuan pemeriksaan	Rp	2.483.600
7)	Lebih Catat	Rp	94.627.290
Jumlah Pengurangan		Rp	5.483.053.876.614

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp2.747.113.814.731,00 di antaranya:



- peralatan penunjang sekolah berupa komputer, laptop, *A.C. split*, dan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp294.086.721.560,00;
 - peralatan angkutan berupa truk sampah, kendaraan *sweeper*, peralatan laboratorium berupa *air quality monitoring system* dan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp 242.991.344.948,00;
 - peralatan angkutan berupa mobil pemadam kebakaran, sepeda motor, peralatan besar berupa perlengkapan *rescue*, dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp141.089.408.382,00; dan
 - peralatan komputer berupa *storage modul disk* (peralatan *mainframe*), *switch*, peralatan studio berupa *interactive display*, dan peralatan mesin lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp135.532.254.028,00.
- 2) Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp74.331.542.666,00 terdiri dari:
- a) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp62.419.572.392,00 di antaranya:
- alat khusus keamanan, mesin pengering, dan meja lipat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp18.325.238.000;
 - *distress signal unit* dan kandang logam pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp15.883.230.000,00; dan
 - kipas angin, *white board*, dan *loudspeaker* pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp10.717.799.808,00.
- b) Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp244.826.000,00 terdiri dari:
- ayunan, jungkat jungkit dan perosotan pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp146.076.000,00; dan
 - sepeda motor, *rescue truck*, dan *rescue car* pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp98.750.000,00.
- c) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp11.667.144.274,00 di antaranya:



- *P.C Unit*, meja sekolah, lemari kaca dan peralatan dan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp2.414.533.287,00;
 - *charge over switch*, A.C sentral, dan Jaringan listrik penerangan jalan umum pada Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp2.013.699.285,00; dan
 - *A.C floor standing* pada Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp1.713.230.000,00.
- 3) Beban Dibayar di Muka Tahun 2023 berdasarkan SE Sekda No.46/SE/2023 dan penyelesaian pekerjaannya dilakukan di Tahun 2024. Berupa penyelesaian pengadaan mesin gergaji (*power hacksaw machine*) pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp442.800.000,00.
- 4) Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp70.643.667.583,00 merupakan perolehan Aset Tetap dari instansi di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di antaranya:
- *ultra sono graphy (USG) internal medicine, antropometri kit*, laptop dan peralatan mesin lainnya dari Kementerian Kesehatan RI pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp55.365.867.800,00;
 - alat simulator pendidikan, *electronic robot*, mesin frais dan peralatan mesin lainnya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp2.844.163.190,00; dan
 - *welding machine*, P.C unit, mesin CNC dan peralatan mesin lainnya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp2.356.386.798,00.
- 5) Pengadaan yang Belum Dibayarkan merupakan perolehan Aset Tetap yang diterima lebih dulu tanpa disertai pengeluaran kas dari APBD maupun BLUD sebesar Rp3.871.507.873,00 di antaranya:
- peralatan ukur berupa *GPS geodetic* pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.981.819.439,00;
 - peralatan komputer berupa *NComputing* pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dengan total sebesar Rp468.729.485,00; dan



- peralatan kedokteran berupa *cold plate*, *dressing forceps*, *heacting set* dan alat partus *set* pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan total sebesar Rp176.563.373,00.
- 6) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp233.704.983.955,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal TA 2024 dari sebesar Rp184.855.896.377,00 di antaranya:
- Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa *submersible pump*, *genset*, *rail lifter* dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp55.482.683.945,00;
 - Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa *stationary water pump* dan *genset* pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp23.634.359.532,00; dan
 - reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa *elevator/lift*, *floating fire pump* (pompa punggung kecil), *elektrik panel cintrol*, dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp23.103.845.561,00.
- b) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan berupa pekerjaan pengembangan *ITS Traffic Light (Intelligent Traffic Control System)* berupa *NComputing* dengan total sebesar Rp48.849.087.578,00 pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.
- 7) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp43.880.007.841,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan Reklasifikasi yang diperoleh dari Aset Pinjam Pakai berupa mini bus dan sedan pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.921.586.129,00; dan
- b) Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain sebesar Rp41.958.421.712,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat dilakukan berdasarkan pendalaman PD/UPD bahwa Aset Rusak Berat tersebut masih dapat digunakan kembali sebesar Rp10.278.101.723,00 di antaranya:
 - 1) Alat angkutan berupa *tug boat + attachment* pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan



- Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp8.448.037.580,00;
- 2) alat angkutan berupa *truck + attachment* dan sepeda motor patroli pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp426.209.343,00; dan
 - 3) alat angkutan berupa *speed boat* / motor tempel Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp297.000.000,00.
- Reklasifikasi yang diperoleh dari Aset Lain-lain - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle) berupa televisi pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp364.333.728,00.
 - Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum berupa kapal motor, penangkal petir, pompa hidrolis, dan peralatan mesin lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp31.256.735.937,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset berupa sepeda motor pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp59.250.324,00;
- 8) Kurang Catat sebesar Rp111.151.114,00 terdiri dari:
- a) Kurang Catat Nilai sebesar Rp1.722.359 terdiri dari :
 - *Digital video recording (DVR)* pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.292.479,00; dan
 - peralatan personal komputer (*CPU*) pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp429.880,00.
 - b) Kurang Catat Barang sebesar Rp 109.428.755,00 di antaranya:
 - *patient monitor, suction pump, emergency trolley* dan lap top pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing dengan total sebesar Rp79.041.617,00
 - dispenser, *kitchen set*, tangga aluminium dan peralatan dan mesin lainnya pada Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp15.169.260,00;
 - tenis meja, *camera control television system (CCTV)* pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp4.107.000,00.



b. Mutasi Pengurangan

- 1) Penghapusan sebesar Rp19.462.275.885,00 di antaranya:
 - penghapusan berupa *ct-scan*, *x-ray unit*, *laboratory sieve set*, dan peralatan dan mesin lainnya pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit dengan total sebesar Rp16.208.286.498,00;
 - penghapusan berupa *ventilator internal medicine*, mesin diesel, mesin *fotocopy* folio, dan peralatan dan mesin lainnya pada Pusat Krisis Kesehatan dan Kegawatdaruratan Daerah dengan total sebesar Rp2.026.260.893,00; dan
 - penghapusan berupa *p.c unit*, mesin absensi, papan visual / papan nama, dan peralatan dan mesin lainnya pada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp256,235,525,00.
- 2) Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa rak kayu sebesar Rp145.771.000,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 3) Reklasifikasi ke Aset Tetap Selain Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp44.721.685.220,00 di antaranya:
 - reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa pemasangan panel dinding sebesar Rp8.968.985.800,00 pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa jaringan *warning system* sebesar Rp8.640.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa instalasi pengolahan sampah organik sistem pembakaran sebesar Rp7.364.211.968,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- 4) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp5.417.926.918.982,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan Reklasifikasi menjadi Aset Pinjam Pakai berupa sedan, *mini bus*, mobil *pick up* sebesar Rp1.093.780.000,00 pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 - b) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp6.397.795.130,00 di antaranya:



- *software* komputer sistem informasi mitigasi bencana ROB sebesar Rp3.382.384.600,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - *software veeam (software back up data)* sebesar Rp2.035.000.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - lisensi *software radiologi information system* sebesar Rp427.350.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu.
- c) Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Lain-Lain sebesar Rp5.410.435.343.852,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp3.758.339.073.619,00 di antaranya:
 - 1) alat angkutan berupa mobil pemadam kebakaran, *rapid invention vehicle*, mobil *ambulance*, dan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp431.171.274.078,00;
 - 2) *tool kit set, netware interface external, out side broad cast van radio*, dan peralatan dan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp218.775.910.468,00; dan
 - 3) *unit tape recorder*, mesin absensi, alat simulator pendidikan, dan peralatan dan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp194.359.655.423,00.
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya berupa *gene amp pcr system, ecg recorder single channel, pneumatic transfer system*, dan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp95.389.999.667,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
 - Reklasifikasi ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp1.556.706.270.566,00 di antaranya:
 - 1) *stationary water pump, sumersible pump, concrete vibrator*, dan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp395.184.091.884,00;



- 2) *tool kit set, audio video selector* (peralatan *studio audio*), *kit* analisa kimia, dan peralatan dan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp153.688.731.436,00; dan
 - 3) *unit tranceiver uhf stationary, mainframe* (komputer jaringan), *server*, dan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp99.993.089.836,00.
- 5) Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria atas Belanja Modal sebelum Tahun 2024 dan direklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp700.114.637,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi ke Beban Barang sebesar Rp458.355.527,00 di antaranya:
 - tenda yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp89.400.000,00 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
 - kursi rapat sebesar Rp79.201.700,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
 - *flash disk/memory card, cable, camera adaptor* dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp66.861.210,00;
 - kasur pasien (*hospital bed*), *wheel chair* (alat kesehatan rehabilitasi medis), kipas angin, dan peralatan mesin lainnya Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih dengan total sebesar Rp63.943.890,00;
 - buku kurikulum sebesar Rp36.300.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Barat; dan
 - *cable* sebesar Rp28.728.000,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
 - b) Reklasifikasi ke Beban Jasa berupa *software conf off-line computer* dan *software/aplikasi* lainnya sebesar Rp140.610.000,00 pada Pusat Data dan Informasi Perhubungan;
 - c) Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp101.149.110,00 terdiri dari:
 - *full body harness, ascender*, tali kamantel statis dan peralatan mesin lainnya pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan total sebesar Rp69.901.584,00;
 - timbangan Bbi kapasitas 100 Kg sebesar Rp27.000.000,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat; dan



- *microphone cable* dan *TV connector* pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dengan total sebesar Rp4.247.526,00.
- 6) Pengembalian atas temuan pemeriksaan berupa *microphone/wireless MIC* sebesar Rp2.483.600,00 pada Kelurahan Pulau Harapan.
- 7) Lebih Catat sebesar Rp94.627.290,00 terdiri dari:
 - a) Lebih Catat Nilai berupa *vertical blind* sebesar Rp2.269.740,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b) Lebih Catat Barang berupa *power amplifier, loudspeaker, microphone* pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional dengan total sebesar Rp92.357.550,00.

5.3.1.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp48.454.852.796.405,00 dan Rp47.160.243.335.958,00. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp2.959.684.971.375,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.665.075.510.928,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 yang menjadi Aset Tetap terdiri dari:	Rp	1.582.058.726.009
a)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024	Rp	2.385.010.773.455
b)	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi kriteria/tidak menghasilkan Aset Tetap	Rp	(802.952.047.446)
1.	Pembayaran Utang atas Aset Gedung dan Bangunan yang telah Diakui Tahun Sebelumnya	Rp	(75.771.592.587)
2.	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(11.172.050.076)
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang masih dalam proses pengerjaan	Rp	(673.903.210.435)
4.	Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka	Rp	(13.978.875.153)
5.	Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka	Rp	(24.607.733.525)
6.	Belanja Modal atas pekerjaan kontraktual belum selesai dengan mekanisme RPBATA	Rp	(2.398.606.038)
7.	Pengembalian Belanja Modal atas Temuan, Klaim, Bank Garansi dan Koreksi Lainnya	Rp	(1.119.979.632)
2)	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	Rp	76.970.647.140
a)	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	963.578.915
b)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	8.212.909.480
c)	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	67.794.158.745
3)	Pengadaan tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Uang Muka	Rp	35.337.761.418
4)	Pengadaan tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Beban Dibayar di Muka	Rp	42.793.221.592



5)	Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	8.961.568.871
6)	Pengadaan yang belum dibayarkan	Rp	83.674.239.214
7)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan	Rp	645.357.493.851
a)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan – APBD	Rp	101.144.777.503
b)	Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan	Rp	544.212.716.348
8)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	385.649.452.936
a)	Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	16.760.750.000
b)	Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	Rp	368.888.702.936
9)	Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel	Rp	56.566.321
10)	Koreksi Kurang Catat	Rp	98.825.294.023
Jumlah Penambahan		Rp	2.959.684.971.375
<u>b. Mutasi Pengurangan</u>			
1)	Penghapusan	Rp	28.495.579.432
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan	Rp	949.570.449.253
3)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	283.862.128.696
4)	Reklasifikasi ke Beban	Rp	54.446.523.347
5)	Koreksi Lebih Catat	Rp	348.700.830.200
Jumlah Pengurangan		Rp	1.665.075.510.928

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp1.582.058.726.009,00 di antaranya:
 - bangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 74 Jakarta, bangunan gedung sekolah SDN Pondok Pinang 05 Jakarta, bangunan gedung sekolah SDN Pasar Baru 01/03/05 dan TK Negeri Sawah Besar 01 Jakarta, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp695.334.266.403,00;
 - bangunan rumah susun Jagakarsa Jakarta Selatan, rumah susun Daan Mogot Jakarta Barat, rumah susun Marunda Jakarta Utara, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp297.164.206.486,00; dan
 - bangunan gedung Palang Merah Indonesia DKI Jakarta, bangunan tempat parkir umum Jatibaru Jakarta Pusat, rumah negara golongan I tipe A permanen, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp86.734.524.199,00.



2) Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp76.970.647.140,00 terdiri dari:

a) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp963.578.915,00 di antaranya:

- bangunan gedung pos satpam, panggung literasi dan kreasi, gapura, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp221.456.481,00;
- bangunan gedung kantor sebesar Rp218.528.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu; dan
- bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp193.845.960,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres.

b) Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp8.212.909.480,00 di antaranya:

- biaya konsultan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan rehabilitasi gedung kantor A dan gedung kantor B Dinas Sosial, biaya konsultan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan rehabilitasi gedung Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1 Cengkareng, biaya konsultan untuk kegiatan pengawasan rehabilitasi gedung Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Cengkareng, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.976.806.414,00;
- biaya konsultan untuk kegiatan pengawasan perbaikan gedung SAMSAT, biaya konsultan untuk pengawasan kegiatan perbaikan gedung kantor Abdul Muis Jakarta, biaya konsultan untuk kegiatan pengawasan perbaikan gedung kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.003.650.867,00; dan
- biaya konsultan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan rehabilitasi gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) sebesar Rp952.000.000,00 pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat.

c) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp67.794.158.745,00 di antaranya:

- pemeliharaan bangunan gedung kantor ruang Fraksi DPRD sebesar Rp28.597.896.020,00 pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta;



- pemeliharaan bangunan gedung kantor Blok G, Blok A, Blok B, dan Blok H Balaikota Jakarta sebesar Rp13.761.186.449,00 pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - pemeliharaan turap dan pagar pengaman di Rumah Susun Rawa Bebek, pemeliharaan turap dan pagar pengaman di Rumah Susun Marunda, pemeliharaan gapura di Rumah Susun BLK Pasar Rebo, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp10.004.992.475,00.
- 3) Pengadaan tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Uang Muka berupa pembangunan rumah susun Jagakarsa di Jalan Margasatwa, Jakarta Selatan sebesar Rp35.337.761.418,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Pengadaan Tahun 2023 yang tercatat sebagai Beban Dibayar di Muka berdasarkan SE Sekda No.46/SE/2023 dan penyelesaian pekerjaannya dilakukan di Tahun 2024, sebesar Rp42.793.221.592,00 di antaranya:
- pembangunan gelanggang remaja Kecamatan Pasar Rebo, pembangunan gelanggang remaja Kecamatan Kramat Jati, pembangunan gelanggang remaja Kecamatan Cakung, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp35.788.771.444,00;
 - revitalisasi pelabuhan Pulau Sabira sebesar Rp6.223.983.621,00 pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah; dan
 - rehab total bangunan gedung pendidikan permanen TKN Kalideres 01, rehab total bangunan gedung pendidikan permanen SMA N 31, pemagaran SDN Kalideres 09 Pagi Jakarta, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp409.376.079,00.
- 5) Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.961.568.871,00 merupakan perolehan Aset Tetap dari instansi di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang di antaranya:
- bangunan Masjid At-Tarbiyah yang terletak di jalan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara sebesar Rp1.400.000.000,00 yang berasal dari Ketua komite Alumni SMPN 122, bangunan Musholla AL-IQRA kompleks SDN Penjaringan 06,07,08 dan 09 Pagi yang terletak di Penjaringan, Jakarta Utara sebesar Rp228.505.000,00 yang berasal dari Ketua Pelaksana Pembangunan Musholla, bangunan



- Musholla SDN Pejagalan 09 yang terletak di Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara sebesar Rp176.851.420,00 yang berasal dari Swadaya Masyarakat, bangunan Musholla Nurul Ilmi SDN Pademangan Timur 01 yang terletak di Pademangan Timur, Jakarta Utara sebesar Rp176.472.200,00 yang berasal dari Ketua Pelaksana Pembangunan Musholla, bangunan Musholla Darul Ilmi SMPN 112 yang terletak di Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara sebesar Rp163.765.500,00 yang berasal dari Ketua Pelaksana Pembangunan Musholla, dan bangunan gudang yang terletak di Pademangan Timur, Jakarta Utara sebesar Rp15.000.000,00 yang berasal dari Ketua Komite SMPN 23 yang diterima oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara;
- bangunan pertokoan/koperasi SMKN 43 yang terletak di Jalan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebesar Rp898.383.000,00 yang berasal dari Kementerian Pendidikan, bangunan Musholla SDN Bintaro 05 Pagi yang terletak di Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebesar Rp300.000.000,00 yang berasal dari Ketua Pelaksana Pembangunan Musholla, dan bangunan gedung praktik siswa SMKN 41 yang terletak di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Jakarta Selatan sebesar Rp286.951.000,00 yang berasal dari Kementerian Pendidikan yang diterima oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - bangunan ruang praktik siswa SMKN 50 yang terletak di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur sebesar Rp553.394.000,00 yang berasal dari Kementerian Pendidikan, bangunan ruang praktik siswa teknik mekatronika SMKN 69 yang terletak di Jalan Rawa Badung, Cakung, Jakarta Timur sebesar Rp484.300.000,00 yang berasal dari Kementerian Pendidikan, bangunan Musholla Daarul Ulum yang terletak di jalan Galur Sari, Matraman, Jakarta Timur sebesar Rp244.504.000,00 yang berasal dari Ketua komite SDN Utan Kayu Selatan 20, dan gedung pertemuan permanen yang terletak di Jalan Lingkar Duren Sawit, Duren Sawit, Jakarta Timur sebesar Rp80.000.000,00 berasal dari Ketua komite Alumni SMPN 167 dan telah diterima oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur.
- 6) Pengadaan yang belum dibayarkan di Tahun 2024 sebesar Rp83.674.239.214,00 terdiri dari:
- a) Penambahan aset dari pengadaan yang belum dibayarkan dari dana APBD sebesar Rp79.082.792.589,00 di antaranya:



- rehabilitasi total bangunan gedung pendidikan permanen SDN Pasar Baru 01/03/05 dan TK Negeri Sawah Besar 01 Jakarta, rehabilitasi total bangunan gedung pendidikan permanen SDN Utan Kayu Utara 01, rehabilitasi total bangunan gedung pendidikan permanen SDN Kebon Bawang 01/03/07 Jakarta, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp66.353.648.116,00;
 - pembangunan gedung Sekretariat Resimen Mahasiswa Jayakarta, pembangunan gedung Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, pembangunan gedung parkir umum di Dinas Teknis Jatibaru, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp6.366.865.883,00; dan
 - pembangunan rumah susun 3 Marunda Jakarta Utara, rumah susun Yos Sudarso Jakarta Utara, rumah susun permanen Komarudin Jakarta Timur, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.665.702.649,00.
- b) Penambahan aset dari pengadaan yang belum dibayarkan dari dana BLUD sebesar Rp4.591.446.625,00 terdiri dari:
- Pembangunan gedung rumah sakit sebesar Rp4.307.591.030,00 pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit; dan
 - pembangunan ruang *Central Sterile Supply Department* (CSSD), dan pemasangan *vinyl* di ruang ICU pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung dengan total sebesar Rp283.855.595,00.
- 7) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp645.357.493.851,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan dari belanja modal APBD sebesar Rp101.144.777.503,00 di antaranya:
- reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar Rp14.417.799.017,00 berupa bangunan gedung dan pendidikan permanen, dan pagar pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan;
 - reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp13.420.535.816,00 berupa



- bangunan halte/shelter dan pagar pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
- reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.968.985.800,00 berupa bangunan gedung kantor pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- b) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai sebesar Rp544.212.716.348,00 di antaranya:
- bangunan gelanggang remaja Kecamatan Kemayoran, bangunan gelanggang remaja Kecamatan Johar Baru, bangunan gelanggang remaja Kecamatan Pasar Rebo, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp224.645.013.331,00;
 - bangunan gedung sekolah SDN Kembangan Utara 04 Pagi dan USB SMP, bangunan gedung sekolah SDN Grogol 05 Pagi dan USB SMP, bangunan gedung sekolah SDN Utan Kayu Utara 01, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp126.947.803.846,00; dan
 - bangunan rumah susun Jagakarsa di jalan Raya Margasatwa Jakarta Selatan sebesar Rp64.816.219.031,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
- 8) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp385.649.452.936,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp16.760.750.000,00 yang terdiri dari:
- reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan sebesar Rp11.476.550.000,00 berupa bangunan gedung tempat ibadah permanen pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - reklasifikasi dari Aset Bangun Serah Guna sebesar Rp5.284.200.000,00 di antaranya berupa bangunan gedung tempat ibadah permanen, bangunan gedung pendidikan permanen dan gedung bangunan lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- b) Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain sebesar Rp368.888.702.936,00 terdiri dari:



- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat sebesar Rp19.775.317.854,00 di antaranya:
 - bangunan gedung kantor dan bangunan gudang terbuka sebesar Rp14.547.520.000,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - bangunan gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) sebesar Rp1.763.098.644,00 pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - bangunan gedung pendidikan SKB Negeri 03 dan bangunan gedung pendidikan SDN Rawa Badak Selatan II sebesar Rp1.337.512.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - Reklasifikasi dari Aset Lain – Lain – Aset Tetap yang tidak Digunakan Operasional Pemerintah sebesar Rp71.995.900.136,00 berupa bangunan tempat bermain anak pada Badan Pengelolaan Aset daerah Provinsi DKI Jakarta.
 - Reklasifikasi dari Fasos Fasum sebesar Rp277.117.484.946,00 di antaranya berupa flat/rumah susun permanen, bangunan gedung kantor permanen, bangunan gedung pertemuan permanen, dan gedung bangunan lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 9) Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel sebesar Rp56.566.321,00 berupa penambahan ruangan bangunan gedung kantor pada Kecamatan Kemayoran.
- 10) Kurang Catat sebesar Rp98.825.294.023,00 terdiri dari:
- a) Kurang Catat Nilai sebesar Rp4.111.010,00 berupa bangunan gedung kantor Kelurahan Palmeriam Matraman pada Kota Administrasi Jakarta Timur.
 - b) Kurang Catat Barang sebesar Rp98.821.183.013,00 di antaranya:
 - kurang catat bangunan gedung olah raga, bangunan gedung pendidikan, bangunan gedung tempat ibadah, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp33.421.202.698,00;
 - kurang catat asrama putra SMKN 1, asrama putra SMA N 69 Jakarta, ruang praktik laboratorium tata boga, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp10.280.212.000,00; dan



- kurang catat bangunan gedung tata hidang, gedung pertemuan Graha 57, bangunan Masjid As Salam, dan gedung bangunan lainnya pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta dengan total sebesar Rp9.396.735.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Penghapusan sebesar Rp28.495.579.432,00 terdiri dari:
 - Bangunan Graha Pejabat Sesuai SK Penghapusan No.73 Tahun 2024 sebesar Rp15.453.687.732,00 pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Jakarta Selatan; dan
 - Bangunan Pendidikan SDN Karet Kuningan 01, Bangunan Pendidikan SDN Pejabat Timur 11, Bangunan Tempat Ibadah SDN Pejabat Timur 07, dan Bangunan Gedung Lainnya sesuai SK Penghapusan No.75 Tahun 2024 dan SK Penghapusan No.143 Tahun 2024 dengan total sebesar Rp13.041.891.700,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Selatan.
- 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp949.570.449.253,00 di antaranya:
 - Uang Muka Rehabilitasi Total SDN Kebon Bawang, Uang Muka Rehabilitasi Total SMKN 74 Jakarta, Uang Muka Rehabilitasi Total SDN Pondok Pinang 05 yang direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp493.772.067.162,00;
 - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah di Jalan Rawa Bebek yang direklasifikasi ke Tanah, dan *GPS Receiver* yang direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp112.903.352.000,00; dan
 - Dermaga Jetski Ancol, *Septic tank*, Saluran Drainase yang direklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp101.776.963.407,00.
- 3) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp283.862.128.696,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai sebesar Rp7.900.945.803,00 berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen dan Bangunan Gedung Rumah Tahanan Kelas II pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b) Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp275.961.182.893,00 di antaranya:



- Gedung dan Bangunan SDN Jati Pulo 08, Gedung dan Bangunan SDN Grogol 05, Gedung dan Bangunan SDN Kembangan Utara 04, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Barat dengan total sebesar Rp27.211.754.091,00;
 - Gedung dan Bangunan SMKN 55 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Utara dengan total sebesar Rp20.674.000.000,00; dan
 - Bangunan Gudang, Gedung Kantor, Rumah Dinas, dan Gedung bangunan lainnya pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp19.675.385.529,00.
- 4) Reklasifikasi ke Beban sebesar Rp54.446.523.347,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi ke Beban Barang sebesar Rp11.495.909.301,00 di antaranya:
 - Batu Nisan sebesar Rp5.921.810.918,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara;
 - *Vertikal Garden* sebesar Rp5.538.599.683,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Utara; dan
 - Lampu Tiang Antik sebesar Rp26.640.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
 - b) Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp407.407.611,00 di antaranya:
 - Biaya Jasa Konsultan Pembangunan Taman sebesar Rp179.366.761,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur;
 - Biaya Jasa Konsultan Renovasi Gedung Kantor, Gedung Pertemuan, dan Gedung Asrama dengan total sebesar Rp122.063.600,00 pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2; dan
 - Biaya Jasa Penataan dan Pemasangan Peralatan Pelatihan sebesar Rp64.102.500,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur.
 - c) Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp42.543.206.435,00 di antaranya:
 - Rehabilitasi Kantor Hidroponik Cilangkap, Rehabilitasi Rumah Hijau di Kebun Bibit Cilangkap dan Sukapura, Rehabilitasi Bangunan Laboratorium Anggrek dan gedung bangunan lainnya



- pada Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman dengan total sebesar Rp7.905.996.055,00;
- Renovasi Gedung Museum sebesar Rp6.677.014.487,00 pada Unit Pengelola Museum Seni; dan
 - Pemeliharaan Gedung Serbaguna, Gedung Pengelola, dan Gedung Asrama dengan total sebesar Rp5.363.469.208,00 pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.
- 5) Koreksi Lebih Catat sebesar Rp348.700.830.200,00 terdiri dari:
- a) Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp418.070.510,00 berupa:
- Koreksi Lebih Catat Hutang Rehabilitasi Berat SDN Rawa Badak Selatan 11, Koreksi Lebih Catat Hutang Rehabilitasi Berat SDN Tengah 01, Koreksi Lebih Catat Hutang Rehabilitasi Berat SDN Cipete Utara dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp413.959.500,00; dan
 - Koreksi Nilai Gedung Kantor sebesar Rp4.111.010,00 pada Kota Administrasi Jakarta Timur.
- b) Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp348.282.759.690,00 di antaranya:
- Gedung Unit Pengelola Pendapatan Daerah Mampang Prapatan yang tercatat ganda dengan Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan sebesar Rp7.781.469.283,00 dan koreksi Lebih Catat Barang berupa Gedung Blok H Balaikota sebesar Rp314.197.570.481,00 dan gedung dan bangunan lainnya dengan total Rp345.178.249.612,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 - Balai Warga Pulau Panggang yang tercatat ganda dengan Kelurahan Pulau Panggang, dan SWRO Pulau Karya yang tercatat ganda dengan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp1.126.739.375,00 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 - Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat yang tercatat ganda dengan Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.052.324.033,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Barat.

5.3.1.4.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing - masing sebesar Rp65.909.190.073.931,00 dan



Rp61.937.757.653.148,00. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp4.520.226.464.364,00 dan mutasi pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp548.794.043.581,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 yang menjadi Aset Tetap	Rp	3.223.138.724.365
a)	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024	Rp	4.975.949.887.118
b)	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak menghasilkan Aset Tetap	Rp	(1.752.811.162.753)
1.	Pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya	Rp	(77.926.504.446)
2.	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(25.881.455.082)
3.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang masih dalam proses pengerjaan	Rp	(1.462.143.558.321)
4.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang diakui Sebagai Uang Muka	Rp	(57.150.309.759)
5.	Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka	Rp	(127.286.127.282)
6.	Belanja Modal atas pekerjaan kontraktual belum selesai dengan mekanisme RPBATA	Rp	(529.486.942)
7.	Pengembalian Belanja Modal atas Temuan, Klaim, Bank Garansi dan Koreksi Lainnya	Rp	(1.893.720.921)
2)	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	Rp	44.780.482.402
3)	Pengadaan tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Uang Muka	Rp	64.591.165.290
4)	Pengadaan tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Beban Dibayar Di Muka	Rp	104.760.307.176
5)	Pengadaan yang belum dibayarkan	Rp	21.538.828.641
6)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	453.885.533.488
a)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	275.148.675.230
b)	Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan	Rp	178.736.858.258
7)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	598.029.442.568
8)	Kurang catat	Rp	9.501.980.434
Jumlah Penambahan		Rp	4.520.226.464.364
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Penghapusan	Rp	1.051.485.490
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	163.917.603.057
3)	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya	Rp	41.093.513.250
4)	Aset Tetap tidak memenuhi kriteria	Rp	310.179.967.724
5)	Koreksi Lebih Catat	Rp	32.551.474.060
Jumlah Pengurangan		Rp	548.794.043.581

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp3.223.138.724.365,00 di antaranya:



- pembangunan jembatan penyebrangan orang di jalan Dukuh - Dewi Sartika, pembangunan jembatan penyebrangan orang jalan K.H Mas Mansyur, dan *manhole* pembangunan prasarana jaringan utilitas pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp935.791.326.502,00;
 - pembangunan tanggul pengaman banjir, pembangunan pekerjaan jaringan pipa air limbah, dan pembangunan polder pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp809.975.738.993,00; dan
 - saluran drainage, bangunan pelimpah sampah, dan embung/waduk lapangan pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp129.774.028.421,00.
- 2) Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp44.780.482.402,00 terdiri dari:
- a) Kapitalisasi dari Beban Jasa sebesar Rp6.934.778.649,00 di antaranya berupa:
- biaya perencanaan pembangunan tempat pengolahan sampah (TPS3R) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.618.145.900,00;
 - belanja jasa saringan sampah di wilayah TB Simatupang pada Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp1.610.653.300,00; dan
 - biaya perolehan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (*RDF Plan*) pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp1.338.594.090,00.
- b) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp25.900.891.129,00 di antaranya:
- jembatan antar kampung dan jalan lingkungan sebesar Rp18.307.550.984,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - biaya pemeliharaan pekerjaan saluran di wilayah Jakarta Timur pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp5.728.062.200,00;
 - biaya pemeliharaan pekerjaan revitalisasi panel utama tegangan rendah sebesar Rp1.162.228.830,00 pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah; dan
 - biaya pemeliharaan sumur resapan reservoir (RO) sebesar Rp643.412.145,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.



- c) Kapitalisasi dari Belanja Persediaan berupa saringan sampah di wilayah TB Simatupang sebesar Rp11.944.812.624,00 pada Unit Penanganan Sampah Badan Air.
- 3) Pengadaan tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Uang Muka berupa pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat (JSDP) sebesar Rp64.591.165.290,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Pengadaan Tahun 2023 yang tercatat sebagai Beban Dibayar di Muka berdasarkan SE Sekda No.46/SE/2023 dan penyelesaian pekerjaannya dilakukan di Tahun 2024, sebesar Rp104.760.307.176,00 terdiri dari:
- jaminan pembayaran Bank DKI untuk pekerjaan pembangunan polder, jaminan pembayaran PT Basuki R.P untuk pembangunan *breakwater*, dan jaminan pembayaran PT Nindya Beton untuk pembangunan cagar budaya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp102.706.862.403,00;
 - pekerjaan pembangunan rumah pompa pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp1.254.668.173,00; dan
 - pekerjaan pembangunan tempat pengolahan sampah (TPS3R) pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp798.776.600,00.
- 5) Pengadaan yang belum dibayarkan sebesar Rp21.538.828.641,00 di antaranya berupa:
- pembangunan rumah pompa pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp11.713.768.380,00;
 - jalan provinsi dan biaya pengawasan jalan provinsi di wilayah Jakarta Selatan pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp7.115.548.934,00; dan
 - pembangunan pintu air kali Blencong & pembangunan pintu air pantai utara Marunda pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.709.511.327,00.
- 6) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp453.885.533.488,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp275.148.675.230,00 di antaranya berupa:
- Reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan berupa dermaga, jalan khusus lainnya, dan bak penampung kolam pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp96.098.301.071,00;



- Reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan berupa jalan khusus kompleks, sumur dengan pompa (bangunan pengambilan pengembangan sumber air), instalasi air buangan domestik kapasitas sedang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp66.010.600.663,00; dan
 - Instalasi pengolahan sampah organik sistem pembakaran yang sebelumnya tercatat sebagai Peralatan dan Mesin sebesar Rp 7.364.211.968,00 dan instalasi pengolahan sampah organik sistem pembakaran yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.105.402.441,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- b) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan sebesar Rp178.736.858.258,00 di antaranya:
- reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa pekerjaan pembangunan polder, pembangunan infrastruktur Pulau Cagar Budaya, dan pembangunan *breakwater* pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp143.824.675.175,00;
 - reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa pembangunan dermaga pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebesar Rp 22.104.952.070,00; dan
 - reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa pembangunan tempat pengelolaan sampah (TPS 3R) pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp12.661.976.013,00.
- 7) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp598.029.442.568,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi dari Rusak Berat berupa bangunan penampung air baku sebesar Rp46.259.550,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah; dan
 - b) Reklasifikasi dari Aset Fesos Fasum berupa jalan provinsi arteri, jalan provinsi lokal, instalasi pengolahan sampah non organik daur ulang non logam dan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan lainnya sebesar Rp597.983.183.018,00 pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 8) Koreksi kurang catat sebesar Rp9.501.980.434,00 terdiri dari:
- a) Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp23.093.293,00 terdiri dari kurang catat nilai berupa pemeliharaan dermaga Pulau Untung Jawa



pada Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan kurang catat nilai berupa instalasi pengolahan sampah non organik daur ulang non logam pada Unit Pengelola Sampah Terpadu; dan

- b) Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp9.478.887.141,00 di antaranya berupa:
- Koreksi kurang catat barang berupa tempat pengolahan sampah (*RDF Plan*) Rorotan pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp4.372.585.260,00;
 - Koreksi kurang catat barang berupa bangunan hydrant umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.019.366.600,00; dan
 - Koreksi kurang catat barang berupa jalan untuk pejalan kaki atau motor yang berlokasi di samping Gedung PPOP pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar sebesar Rp884.926.491,00.

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Penghapusan sebesar Rp1.051.485.490,00 terdiri dari:
 - instalasi pengolahan sampah organik Dipo Tebet dan instalasi pengolahan sampah organik Dipo Cilincing sesuai SK Penghapusan No. 5 Tahun 2024 sebesar Rp603.710.680,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; dan
 - bangunan penampung air baku sesuai dengan SK Penghapusan No. 142 Tahun 2024 sebesar Rp447.774.810,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp163.917.603.057,00 di antaranya:
 - *submersible pump*, *genset*, dan *rail lifter* ke peralatan dan mesin dengan total sebesar Rp49.974.334.995,00 dan tanaman keras pohon tabebuya ke aset tetap lainnya sebesar Rp316.899.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - *stationary water pump* dan *genset* ke peralatan dan mesin dengan total sebesar Rp23.634.359.532,00, rumah panel ke Gedung dan bangunan sebesar Rp4.613.656.761,00, dan tanaman keras ke aset tetap lainnya sebesar Rp2.624.182.500,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - rumah pompa ke konstruksi dalam pengerjaan dengan total sebesar Rp29.211.077.355,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur.



- 3) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp41.093.513.250,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp16.115.243.250,00 di antaranya:
 - bangunan hydrant umum, sumur resapan, instalasi buangan besar air domestik, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp15.437.447.546,00;
 - instalasi air buangan kapasitas sedang pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp251.500.000,00; dan
 - bangunan pengambilan dari sumber air dan bangunan penampung air baku dengan total sebesar Rp190.161.550,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah.
 - b) Reklasifikasi Ke Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya berupa jaringan rumah tangga sebesar Rp1.752.000.000,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - c) Reklasifikasi Ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset berupa jaringan listrik tegangan 300KVA sebesar Rp23.226.270.000,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria atas Belanja Modal sebelum Tahun 2024 dan direklasifikasi ke Beban sebesar Rp310.179.967.724,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Beban Barang sebesar Rp310.087.153.724,00 yang terdiri dari:
 - sumur resapan sebesar Rp307.638.733.444,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - bangunan tempat menampung sampah lingkungan pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp2.301.863.100,00; dan
 - jaringan distribusi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp146.557.180,00.
 - b) Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp92.814.000,00 terdiri dari :
 - biaya pemeliharaan jalan Karet Pasar Baru Timur I, jalan Karet Pasar Baru Timur II, dan jalan Karet Pasar Baru Timur III dengan total sebesar Rp89.817.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan



- biaya pemeliharaan mesin RO (Reverse Osmosis) di Pulau Onrust dan Pulau Cipir sebesar Rp2.997.000,00 pada Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta.
- 5) Koreksi lebih catat karena pencatatan ganda sebesar Rp32.551.474.060,00 terdiri dari :
 - instalasi pusat pengatur listrik kapasitas besar sebesar Rp29.163.695.000,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - saluran sekunder (bangunan pembawa irigasi sebesar Rp3.019.779.060,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - bangunan pengambilan dari air laut sebesar Rp368.000.000,00 pada Kelurahan Pulau Kelapa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

5.3.1.4.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.114.104.352.668,00 dan Rp1.388.435.196.833,00. Selama Tahun 2024 mutasi penambahan sebesar Rp99.331.273.130,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp373.662.117.295,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan		
1)	Belanja Modal TA 2024 yang menjadi Aset Tetap terdiri dari:	Rp 85.633.503.655
a)	Belanja Modal TA 2024	Rp 119.496.671.697
b)	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp (33.863.168.042)
2)	Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp 179.367.606
3)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya	Rp 9.223.614.254
4)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp 1.295.062.203
5)	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp 22.497.660
6)	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp 2.977.227.752
Jumlah Penambahan		Rp 99.331.273.130
b. Mutasi Pengurangan		
1)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya	Rp 14.867.755.351
2)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp 263.673.955.661
3)	Aset Tetap tidak memenuhi kriteria	Rp 95.070.537.658
4)	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp 49.868.625
Jumlah Pengurangan		Rp 373.662.117.295

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp85.633.503.655,00 di antaranya:
 - bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan umum, buku referensi, buku monograf dan Aset Tetap Lainnya pada Dinas



- Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp75.576.846.895,00;
- bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan umum, buku monograf, dan audio visual berupa pasangan suara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.461.630.569,00; dan
 - barang bercorak kesenian berupa alat musik modern/band dan alat musik tradisional/daerah pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp1.647.783.000,00.
- 2) Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp179.367.606,00 merupakan perolehan Aset Tetap dari instansi di luar Pemprov DKI Jakarta di antaranya:
- bahan perpustakaan berupa buku *Encyclopedia*, Kamus, Buku Referensi, buku ilmu pengetahuan umum, buku umum dan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Yayasan Bank Indonesia dan telah diserahkan kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp81.666.200,00;
 - bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan, buku *Encyclopedia*, Kamus, Buku Referensi, dan buku fiksi yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan telah diserahkan kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp31.206.400,00; dan
 - bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan umum, buku *Encyclopedia*, Kamus, Buku Referensi dan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Yayasan Bank Indonesia dan telah diserahkan kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp26.813.675,00.
- 3) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.223.614.254,00 dari Belanja Modal APBD di antaranya:
- tanaman keras berupa pohon tabebuaya kuning sebesar Rp2.624.182.500,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - tanaman keras berupa pohon tabebuaya kuning dan tanaman hias *bougenville* pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp1.933.140.000,00; dan
 - tanaman keras berupa pohon tabebuaya kuning dan pohon kayu putih sebesar Rp1.352.241.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara.



- 4) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp1.295.062.203,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat dilakukan berdasarkan pendalaman PD/UPD bahwa Aset Rusak Berat tersebut masih dapat digunakan kembali berupa aset tetap lainnya dalam renovasi sebesar Rp593.883.364,00 pada Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - b) Reklasifikasi dari Aset Fesos Fasum berupa permainan dan alat olahraga sebesar Rp701.178.839,00 pada Badan Pengelolaan Aset Daerah.
- 5) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp22.497.660,00 terdiri dari:
 - bahan perpustakaan buku kimia sebesar Rp21.800.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu; dan
 - peta benua sebesar Rp697.660,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- 6) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan berupa Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi sebesar Rp2.977.227.752,00 pada Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin.

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp14.867.755.351,00 di antaranya:
 - reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa biaya renovasi ruang data center atas gedung Blok G dan Blok B dan ruang kerja UP JSC pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp8.014.957.446,00;
 - reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa taman semi permanen sebesar Rp1.652.736.833,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa alat musik tradisional/daerah dan alat musik modern/band pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp1.647.783.000,00.
- 2) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp263.673.955.661,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp259.117.339.399,00 di antaranya:
 - bahan perpustakaan berupa buku etnografi, cerita rakyat, buku fisika dan mekanika, buku kimia, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp58.382.164.098,00;



- bahan perpustakaan berupa buku pengetahuan bahasa inggris, buku matematika, buku ilmu pengetahuan umum, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp45.771.757.248,00; dan
 - reklasifikasi ke Aset Rusak Berat bahan perpustakaan berupa buku laporan penelitian, buku ekonomi, buku pendidikan, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp41.227.996.557,00.
- b) Reklasifikasi Ke Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya berupa Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp4.556.616.262,00.
- 3) Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria atas Belanja Modal sebelum Tahun 2024 dan direklasifikasi ke Beban sebesar Rp95.070.537.658,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Beban Barang sebesar Rp94.754.888.384,00 di antaranya:
- bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan umum, buku agama Islam, buku pengetahuan bahasa Indonesia, dan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp23.878.551.570,00;
 - bahan perpustakaan berupa buku pengetahuan bahasa inggris, buku ilmu pengetahuan umum, ensyclopedia, kamus, buku referensi, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp14.595.552.238,00; dan
 - bahan perpustakaan berupa *encyclopedia*, kamus, buku referensi, buku ilmu pengetahuan umum, buku bitani, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp10.129.521.939,00.
- b) Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp315.649.274,00 di antaranya:
- tanaman hias pewarna alami sebesar Rp96.836.805,00 pada Unit Museum Seni;
 - tanaman hias rumput gajah sebesar Rp95.356.256,00 pada Kelurahan Semper Barat; dan
 - tanaman hias pucuk dan tanaman rumput gajah pada Kelurahan Marunda dengan total sebesar Rp32.469.250,00.



- 4) Koreksi Lebih Catat Nilai berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi sebesar Rp49.868.625,00 pada Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara.

5.3.1.4.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.463.525.049.578,00 dan Rp2.516.920.525.377,00. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp2.762.076.011.937,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp815.471.487.736,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal Tahun 2024 yang menjadi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan, terdiri dari:	Rp	2.215.625.202.382
a)	Belanja Modal Tahun 2024 yang masih dalam proses pengerjaan	Rp	2.288.369.743.420
b)	Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka	Rp	(71.168.705.446)
c)	Belanja Modal atas pekerjaan kontraktual belum selesai dengan mekanisme RPBATA	Rp	(1.242.459.446)
d)	Pengembalian Belanja Modal atas Temuan, Klaim, Bank Garansi dan Koreksi Lainnya	Rp	(333.376.146)
2)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain KDP	Rp	546.450.809.555
Jumlah Penambahan		Rp	2.762.076.011.937
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah/ Peralatan dan Mesin/ Gedung dan Bangunan/ Jalan Irigasi dan Jaringan/ Aset Tetap Lainnya	Rp	811.042.744.078
a)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP atas penyelesaian pekerjaan pada Tahun 2024	Rp	771.798.662.184
b)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP atas penyelesaian pekerjaan sebelum Tahun 2024	Rp	39.244.081.894
2)	Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan - LO	Rp	3.958.243.918
3)	Reklasifikasi Ke Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Rp	470.499.740
Jumlah Pengurangan		Rp	815.471.487.736

Adapun rincian penambahan dan pengurangan KDP dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Tahun 2024 yang menjadi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.215.625.202.382,00 di antaranya:
- perencanaan pembangunan *sitpile* dan pembangunan RDF di Provinsi DKI Jakarta, pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp1.172.239.418.835,00;
 - pembangunan sistem hidran Balaikota, pekerjaan penggantian dan pemasangan mesin pendingin AHU Blok G Balaikota, pembangunan gedung PMI DKI Jakarta, Perencanaan anjungan



Taman Mini dan perencanaan pembangunan rumah negara golongan I Tipe A pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp324.062.784.393,00; dan

- pekerjaan konstruksi pembuatan polder Sunter Greenville, pekerjaan pompa vertikal kapasitas 2000, pembangunan tanggul pengaman pantai, dan pembangunan lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp281.524.498.644,00.

2) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain KDP sebesar Rp546.450.809.555,00 di antaranya:

- reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan berupa uang muka rehab total, jasa konsultan dan pengawasan pembangunan sekolah sebelum Tahun 2024 dengan total sebesar Rp493.772.067.162,00 pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa pembangunan rumah pompa stasioner untuk saluran penghubung (PHb) Cipa (Cililitan Kebon Pala) sebesar Rp29.211.077.355,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan x-1 Rehab Total Pembangunan Puskesmas Penggilingan, Jasa Konsultansi Perencanaan x-1 Rehab Total Pembangunan Puskesmas Kelurahan Gedong, Jasa Konsultansi Perencanaan x-1 Rehab Total Pembangunan Puskesmas Kecamatan Matraman, Jasa Konsultansi Perencanaan x-1 Pembangunan PKM Kelurahan Kayu Putih, dan Jasa Konsultansi Perencanaan x-1 Rehab Berat Gedung Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp10.536.782.650,00 pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur.

b. Mutasi Pengurangan

1) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP sebesar Rp811.042.744.078,00 terdiri dari:

- a) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP atas penyelesaian pekerjaan pada Tahun 2024 sebesar Rp771.798.662.184,00 di antaranya:
 - bangunan Gelanggang Remaja Wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan GOR Cakung Barat sebesar Rp224.645.013.331,00



- pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
- bangunan polder kolam retensi, bangunan pengaman pulau cagar budaya I, bangunan *breakwater* Jakarta Utara, dan pengawasan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan total sebesar Rp143.824.675.175,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
 - biaya perencanaan, pengawasan, pemagaran dan konstruksi rehab berat bangunan sekolah di Provinsi DKI Jakarta total sebesar Rp126.947.803.846,00 pada Unit Pengelola Prasarana Dan Sarana Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- b) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP atas penyelesaian pekerjaan sebelum Tahun 2024 sebesar Rp39.244.081.894,00 di antaranya:
- biaya perencanaan, pengawasan, pemagaran dan konstruksi rehab berat bangunan sekolah di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp14.417.799.017,00 pada Unit Pengelola Prasarana Dan Sarana Pendidikan Provinsi DKI;
 - pekerjaan trotoar jalan tembus Lebak Bulus I-III Tahun 2022, pekerjaan saluran drainase jalan tembus Lebak Bulus I-III Tahun 2022, biaya pelayanan pendaftaran pelepasan Hak Sebagian dan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang, biaya konsultasi dan appraisal pembebasan tanah, biaya pembuatan akta pelepasan hak PPAT/Notaris, inventarisasi dan pembebasan tanah jalan akses menuju Rusun Pulo Gebang dengan total nilai sebesar Rp11.743.397.483,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
 - jasa konsultan perencanaan pembangunan Kelurahan Kamal Muara, jasa konsultan perencanaan pembangunan Kelurahan Kelapa Gading, jasa konsultan perencanaan pembangunan Kelurahan Pademangan Barat, jasa konsultan perencanaan pembangunan Kelurahan Tugu Selatan, jasa konsultan perencanaan pembangunan Kelurahan Tanjung Priok, jasa konsultan perencanaan pembangunan Kelurahan Cilincing dan jasa konsultan perencanaan pembangunan Kelurahan Rawa Badak Selatan dengan total sebesar Rp7.213.721.460,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara.
- 2) Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.958.243.918,00 di antaranya:



- a) jasa konsultan perencanaan gedung parkir Dinas Teknis Abdul Muis, perancangan dasar Rusun Terminal Pulo Gadung, perancangan dasar Rusun Rawa Kerbau, perancangan dasar Rusun BLK Pasar Rebo dengan total sebesar Rp2.214.898.707,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 - b) perencanaan gedung Jakarta Islamic Center dan perencanaan Masjid Raya Jakarta Timur dengan total sebesar Rp634.172.000,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c) biaya perencanaan peningkatan Taman Teluk Ratai Kelurahan Kelapa Gading Barat, biaya perencanaan peningkatan Raman Lontar Kelurahan Tugu Utara, Biaya Perencanaan RTH Makam TPU Jembatan Sampi, biaya perencanaan peningkatan RTH Taman Rorotan dengan total sebesar Rp324.632.441,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- 3) Reklasifikasi Ke Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp470.499.740,00 di antaranya:
- a) Jasa perencanaan rehab Kantor Camat Tambora dan jasa perencanaan rehab Kantor Camat Cengkareng dengan total sebesar Rp392.122.640,00 pada Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - b) Jasa perencanaan Masjid dan Rusun Pegadungan dengan total sebesar Rp78.377.100,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

Dari nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.463.525.049.578,00 termasuk progres fisik per 31 Desember 2024 atas pekerjaan dengan mekanisme RPBATA sebanyak 35 paket pekerjaan sebesar Rp110.330.249.046,00 yang telah diselesaikan pada Tahun 2025.

5.3.1.4.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015 dengan mekanisme perhitungan penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyusutan Aset Tetap Pertama Kali. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan masa manfaat Aset Tetap yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022.



Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp83.920.518.130.702,00 dan Rp82.370.545.608.448,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.71

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2024		
	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Koreksi Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Tanah	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin	26.998.498.994.240	2.184.267.229.896	5.224.337.070.112	23.958.429.154.024
Gedung dan Bangunan	24.426.328.768.702	1.897.876.424.755	344.012.937.258	25.980.192.256.199
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	30.843.293.737.787	3.094.384.341.814	54.776.521.218	33.882.901.558.383
Aset Tetap Lainnya	102.424.107.719	3.182.155.730	6.611.101.353	98.995.162.096
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
Jumlah	82.370.545.608.448	7.179.710.152.195	5.629.737.629.941	83.920.518.130.702

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp593.738.923.386.046,00 dengan rincian sebagai berikut.

Aset Tetap	31 Desember 2024		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	527.255.442.881.924	0	527.255.442.881.924
Peralatan dan Mesin	30.462.326.362.242	23.958.429.154.024	6.503.897.208.218
Gedung dan Bangunan	48.454.852.796.405	25.980.192.256.199	22.474.660.540.206
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	65.909.190.073.931	33.882.901.558.383	32.026.288.515.548
Aset Tetap Lainnya	1.114.104.352.668	98.995.162.096	1.015.109.190.572
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.463.525.049.578	0	4.463.525.049.578
Jumlah	677.659.441.516.748	83.920.518.130.702	593.738.923.386.046

5.3.1.4.8 Catatan Penting atas Aset Tetap

a. Tindak Lanjut Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Inventarisasi merupakan aktivitas utama di antara aktivitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 telah menetapkan hasil inventarisasi Aset Tetap.



Atas barang hasil inventarisasi yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan dapat disajikan dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Aset	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Tanah (KIB A)	1.579	5.615.338.906.505
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	82.808	851.562.576.411
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	1.379	448.767.327.264
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	1.749	3.566.831.360.592
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	65.204	82.836.736.335
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	39	2.041.504.137
Jumlah		152.758	10.567.378.411.244

Menindaklanjuti hasil inventarisasi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pendalaman dan penyelesaian yang menghasilkan dua tindak lanjut, yaitu dilakukan koreksi atau dicatat sebagai Aset Lain-lain Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA).

Sampai dengan Tahun 2024 telah dilakukan penyelesaian atas hasil inventarisasi 2018 melalui pelaksanaan sidang Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) sebesar Rp2.638.160.906.804,00 diantaranya sebagaimana tercantum dalam peraturan berikut ini:

- SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1666 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tanah Yang Tidak di Temukan Fisiknya;
- SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor;
- SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan;
- SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor;
- SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor; dan
- SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2022 Perubahan dari SK Sekda Nomor 32 Tahun 2021 tentang penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor.

Selain itu, dari hasil pendalaman dan penelusuran kembali, terdapat barang yang ditemukan sehingga dilakukan reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp4.891.030.047.462,00.

Selama kurun waktu 2019 s.d 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan inventarisasi sehingga terdapat penambahan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) sebesar Rp3.017.513.401.537,00, sehingga saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian



Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp6.055.700.858.515,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Jumlah	Nilai
			(Rp)
1	Tanah (KIB A)	734	2.253.216.195.700
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	148.981	2.101.022.521.216
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	791	547.656.940.860
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	3.253	1.128.652.852.566
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	30.665	23.377.560.089
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	30	1.774.788.084
Jumlah		184.454	6.055.700.858.515

b. Pengungkapan Pelaksanaan Inventarisasi atas Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 – 2027, dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2024.

Sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah tersebut yang merupakan objek inventarisasi adalah Peralatan dan Mesin yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2024, serta melakukan 4 tahapan dalam pelaksanaan inventarisasi yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap tindak lanjut.

Sampai Tahun 2024 kegiatan inventarisasi barang milik daerah telah selesai dilaksanakan dan diteruskan dengan pendataan dan pendalaman hasil inventarisasi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

c. Pelaksanaan Penanganan Aset Tanah dan/atau Bangunan Bermasalah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan atensi khusus berkaitan dengan penanganan tanah dan/atau bangunan bermasalah milik Provinsi DKI Jakarta yang berada dalam penguasaan SKPD/UKPD (tercatat dalam KIB A SKPD/UKPD) atau berada dalam pengelolaan Pengelola Barang (tercatat atau belum tercatat dalam KIB A Pengelola Barang) yang dikuasai/diklaim/disomasi/diadukan pihak lain/sedang berproses/telah berproses di pengadilan, termasuk tanah fasos fasum yang bermasalah.

Penanganan tanah dan/atau bangunan bermasalah bertujuan untuk:



- 1) Membangun *database* tanah dan/atau bangunan bermasalah;
- 2) Mengetahui perkembangan tanah dan/atau bangunan bermasalah; dan
- 3) Melaksanakan tindak lanjut tanah dan/atau bangunan bermasalah.

Tanah Bermasalah yang sedang berproses di Pengadilan di antaranya sebagai berikut:

No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Upaya/Progres	Keterangan
1	Taman Asuhan Anak Pertiwi Jl. A.M. Sangaji No.21. Petojo Utara	Jakarta Pusat	Dinas Sosial	1. Sertifikat No.92/Desa Petojo Utara a.n. Pemda DKI Jakarta 2. digugat oleh Ny. Aminah binti Mochammad Thalib	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
2	Lapangan Bola Tondano Jl. Danau Tondano. Bendungan Hilir. Tanah Abang	Jakarta Pusat	Dinas Olahraga dan Pemuda	1. SHP No.389 a.n Pemda DKI Jakarta 2. digugat oleh ahli waris Pangean Aria Jipang dengan dasar Verponding No.6651	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
3	Aset Taman Kota Rawasari Jl. Jenderal Ahmad Yani. Kelurahan Rawasari. Kecamatan Cempaka Putih	Jakarta Pusat	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. Diadukan oleh Djuremi ke PN 2. Fisik telah dikuasai; 3. Telah dipasangkan papan nama tanah; 4. Belum bersertifikat.	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
4	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 38 Jakarta Jl. Karet Pasar Baru Timur. Kelurahan Karet Tengsin. Kecamatan Tanah Abang	Jakarta Pusat	Sudin Pendidikan 2	1. Diadukan oleh ahli waris Alm Moch Muktar ke PN 2. Fisik telah dikuasai; 3. Telah dipasangkan papan nama tanah; 4. Keputusan PN Pemerintah Provinsi menang 5. Belum bersertifikat.	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
5	Tanah Kosong Jl.Yos Sudarso No.19. Sungai Bambu. Tanjung Priok. Jakarta Utara.	Jakarta Utara		1. Diadukan oleh Darianus Lungguk Sitorus ke PN 2. Belum dipasangi papan nama tanah; 3. Telah bersertifikat. SHP no.538/Sungai Bambu an. Pemda DKI Jakarta	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
6	Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok (Samping Kodim 0502/JU)	Jakarta Utara	PPAD	Hasil koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan upaya banding kembali. Dalam amar putusan tidak menyebutkan siapa pemilik tanah tersebut dan hanya membatalkan sertifikatnya saja. untuk selanjutnya dari Biro Hukum akan mengajukan upaya hukum lainnya	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
7	Jl. Assakinah Raya RT. 03 RW. 02 Kel. Kebagusan. Kec. Pasar Minggu	Jakarta Selatan	Sudin Pendidikan 2	Dikuasai IR. Agus Bakri Bin H. Bakri	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
8	Taman Marga Satwa Ragunan. Jalan Harsono No. 1 Ragunan. Pasar Minggu. Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	UPT TMR Ragunan	Digugat Ir. Alimin Abdullah	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
9	Kav. Cernai RT. 004 RW.03 Ke. Petukangan Utara. Kec. Pesanggrahan. Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	PPAD	1. PN Jaksel Menolak kasasi dari Panggabean-menang NO (Niet Ontvankelijke atau merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dari cacat Formal 2. Digugat oleh Wayan Denada dan masih berlangsung di PN Jaksel	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara



No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Upaya/Progres	Keterangan
				3. Saat ini plang aset diduga dirusak oleh Ali Said Bin Tinggal 4. Kepala BPAD agar bersurat ke Biro Hukum untuk melaporkan ke Polisi atas dugaan pengrusakan Plang Aset. 5. lokasi tersebut agar segera dibuatkan SK Penggunaan untuk SKPD	
10	Jl. Delman Elok VI. Kp. Peninggaran RT. 007 RW.011 Kel. Kebayoran Lama Utara. Kec. Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	Dinas Kehutanan	Digugat Niharoh dkk	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
11	eks. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jl. Rambutan RT. 02 RW. 04 Kel. Pejaten Barat. Kec. Pasar Minggu. Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	BPAD/PPAD	Digugat oleh M. Yazid	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
12	Jl. Lenteng Agung Raya. Kel. Lenteng Agung. Kec. Jagakarsa. Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	Dinas Kehutanan	digugat oleh R. Ivone Felicia	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
13	Jl. Cikoko Barat I RT. 001 RW.05. Kel.Cikoko. Kec. Pancoran	Jakarta Selatan	-	Digugat oleh Masyarakat. Dikuasai Fauzi untuk kandang sapi	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
14	Jl. Cipinang Muara III Rt. 09/015	Jakarta Timur	-	Digugat Hj. Eliya Kurniawati	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
15	Kel. Bidara Cina (Sodetan Kali Ciliwung)	Jakarta Timur	-	Proses PTUN dan Dikuasai masyarakat	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
16	Jl. Bambu Kuning Rt. 012/002 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung	Jakarta Timur	Dinas KPKP	-	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara

d. Aset Konsesi Jasa

Berdasarkan PSAP 16 Konsesi Jasa adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penugasan pembangunan aset kepada beberapa BUMD dalam rangka penyediaan layanan kepada publik, sebagaimana daftar berikut.

No	Aset Penugasan	BUMD
1	<i>Light Rapid Transit</i> (LRT)	PT Jakarta Propertindo
2	Jakarta International Velodrome	PT Jakarta Propertindo
3	Jakarta International Equestrian Park (JIEP)	PT Jakarta Propertindo
4	Jakarta International Stadium (JIS)	PT Jakarta Propertindo
5	Taman Ismail Marzuki	PT Jakarta Propertindo
6	MRT	PT MRT Jakarta



Berdasarkan PSAP 16, maka terdapat 2 (dua) penugasan yang berpotensi memenuhi kriteria Aset Perjanjian Konsesi Jasa, yaitu LRT pada PT Jakarta Propertindo dan MRT pada PT MRT Jakarta. Menindaklanjuti hal tersebut saat ini masih dilakukan kajian atas penugasan LRT pada PT Jakpro. Atas penugasan pada PT MRT Jakarta telah dilakukan penelitian dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil audit KAP atas Laporan Keuangan PT MRT, aset penugasan tersebut tidak disajikan sebagai Aset Perjanjian Konsesi Jasa sesuai dengan ISAK 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa, melainkan disajikan sebagai Aset Tetap BUMD.
- 2) Tidak ada intensi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi PT MRT untuk menyerahkan Aset Penugasan.
- 3) Perlu ada penyelarasan berdasarkan ketentuan di antaranya Perda No. 9 Tahun 2019, Perjanjian Penyelenggaraan tahun 2017 dan Pergub No. 29 tahun 2020.

e. Pengungkapan Lainnya

- 1) Aset ex. UP Transjakarta Busway

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 tersebut termasuk aset ex. UP Transjakarta Busway yang saat ini masih dicatat sebagai aset Dinas Perhubungan dari masih menunggu Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan Aset Tetap. Proses penilaian atas aset inbreng kepada BUMD PT Transjakarta telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 797 Tahun 2019 tentang Rincian Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Aset Tetap Pada PT Transportasi Jakarta.

Untuk masa transisi telah diterbitkan Pergub No. 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta dengan ketentuan Menetapkan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh PT Transjakarta, berupa lahan depo, halte dan sarana pendukung, bangunan gedung kantor, sarana penunjang dan inventaris kantor, kendaraan dinas operasional dan bus. Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan penyerahan Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal (inbreng). PT Transjakarta dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau



mengubah peruntukannya tanpa seizin tertulis Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2) Aset dalam Permasalahan Hukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menyelesaikan perkara hukum terkait aset tanah, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

Monitoring atas klaim/gugatan atas tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Perkara Pada Tingkat	Menang	Kalah	Proses	Total
1	Pengadilan Negeri	18	6	10	34
2	Pengadilan Tinggi	14	5	6	25
3	Mahkamah Agung (Kasasi)	6	3	8	17
4	Mahkamah Agung (PK)	5	4	7	16
JUMLAH		43	18	31	92

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengamanan atas tanah dalam sengketa tersebut, antara lain melalui pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah.

Permasalahan atas sengketa tanah lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Permasalahan Tanah Aset di Kelurahan Meruya Selatan

Bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Kelurahan Meruya Selatan yang diklaim oleh PT Portanigra telah diterbitkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 132/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2009/PTDKI tanggal 10 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 585 PK/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya antara lain menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp291.422.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi imateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada PT Portanigra.



Atas Putusan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan *Aanmaning* (teguran) Nomor 21/2012 Eks. jo. Nomor 132/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 untuk diberikan *Aanmaning* (teguran) melaksanakan 132/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Br tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2009/PTDKI tanggal 10 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 585 PK/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014.

Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta telah menghadiri *Aanmaning* (teguran) dimaksud, yang pada intinya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menegur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada PT Portanigra sebesar Rp391.442.000.000,00.

Terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak dengan alasan di dalam Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan No. 10/2007 Eks. Jo. No. 161/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 10 Maret 2016 dan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan No. 11/2007 Eks. Jo. No. 364/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 10 Maret 2016, pada intinya menyebutkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melaksanakan eksekusi pada tanggal 10 Maret 2016 dan ditetapkan bahwa atas tanah yang di atasnya terdapat objek-objek yang dipergunakan sebagai fasos dan fasum milik Pemerintah serta fasos dan fasum lainnya yang dipergunakan sebagai tempat ibadah, tidak dilaksanakan eksekusi dan/atau dikeluarkan dari objek eksekusi. Selain itu, terkait ganti rugi materiil dan imateriil kepada PT Portanigra sebesar Rp391.442.000.000,00 tidak dapat dilakukan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap sebagai pemilik tanah aset berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 500/PDT/2009/PT.DKI tanggal 16 Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 168/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar



tanggal 11 Oktober 2007, di mana putusan ini tidak pernah dibatalkan sehingga masih berlaku.

b) Permasalahan Tanah Pengadaan Lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Terhadap permasalahan pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) telah memberikan jawaban melalui surat Nomor 07/YKSW/IX/2017 tanggal 14 September 2017 perihal Jawaban Atas Permintaan Pemulihan Indikasi Kerugian Daerah yang menyatakan bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras menolak untuk membayar kerugian daerah tersebut.

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas pada lahan yang dibeli tersebut, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengupayakan untuk berkoordinasi dan membuat kesepakatan untuk merealisasikan akses jalan bersama dari Jalan Kyai Tapa menuju lokasi tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

c) Tanah Aset Gedung dan Bangunan hasil penyerahan dari Pengembang Reklamasi Pada Tahun 2015, penerimaan aset gedung dan bangunan sebagai tambahan kontribusi reklamasi dari pengembang reklamasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berasal dari:

1. PT Muara Wisesa Samudera selaku Pengembang Pulau G, berupa bangunan Rusunawa Daan Mogot sebesar Rp89.655.700.000,00; dan
2. PT Jaladri Kartika Pakci selaku Pengembang Pulau I, berupa bangunan Rusunawa Muara Baru sebesar Rp90.539.800.000,00.

Terkait Reklamasi Pulau G, terdapat gugatan yang diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup diwakili oleh Gobang, Dkk sebagai Penggugat terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat dan PT Muara Wisesa Samudera sebagai Tergugat II Intervensi dengan objek sengketa Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah terbit Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tanggal 31 Mei 2016 jo. Putusan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/B/2016/PTTUN.JKT tanggal 17 Oktober 2016 yang amar putusannya menyatakan gugatan tidak



diterima, di mana selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan upaya hukum, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada dipihak yang menang dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tetap sah dan berlaku.

Sedangkan terkait dengan Reklamasi Pulau I, PT Jaladri Kartika Pakci telah mengajukan gugatan terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nomor 1049 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi, khususnya sepanjang menyangkut pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I atas nama PT Jaladri Kartika Pakci, dan telah diputus dengan register Putusan 32 PK/TUN/2021 tanggal 4 Maret 2021 jo Nomor 98/B/2020/PTUN-JKT tanggal 28 April 2019 jo Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2019, yang amar putusannya pada pokoknya menolak gugatan seluruhnya, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada dipihak yang menang dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1049 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tetap sah dan berlaku.

- d) Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian menerima hibah tanah dari Kodam Jaya berdasarkan Berita Acara Serah Terima BAST Nomor B.A./005-Zi/II/1989 tanggal 15 Desember 1985. Tanah tersebut tercatat pada Kartu Inventaris Barang Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian seluas 60.000 m² sebesar Rp76.440.000.000,00, berlokasi di Jalan Bambu Apus Raya (sekarang Jl. Mpok Nori) yang saat ini dimanfaatkan oleh BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dan telah terbangun kantor usaha dan promosi peternakan, kantor laboratorium kesehatan masyarakat dan veteriner, bangunan mes dan gerai, gudang, kandang ternak dan Masjid Al Falah.

Pada tanah tersebut terdapat gugatan pengadilan dari R.E. Baringbing, S.H. & Ny. Sondang Siagian Baringbing. Yang bersangkutan mengklaim tanah yang merupakan Aset Tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 2.430 m² yang terletak di Jalan Bambu Kuning RT. 012 RW. 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung (dahulu Kecamatan Pasar Rebo), Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 370 tertanggal



30 April 1990 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta dengan bukti hak Girik C Nomor 573 Persil 44 Blok D-II atas nama Gendul bin Miri.

Gugatan pengadilan tersebut terdiri dari dua register, yaitu:

- 1) Perkara Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim.
 - a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Januari 2012, Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
 - b) Putusan Tingkat Banding Nomor 598/PDT/2012/PT. DKI. Biro Hukum selaku kuasa Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (DKPKP) memohon upaya hukum banding yang telah diputus Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 598/PDT/2012/PT.DKI tanggal 6 Maret 2013 dengan putusan menguatkan putusan nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. Tingkat Kasasi Nomor 1934 K/Pdt/2014Perkara Nomor 217/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. Atas putusan tersebut, Biro Hukum selaku kuasa Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (DKPKP) memohon upaya hukum banding yang telah diputus Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 598/PDT/2012/PT.DKI tanggal 6 Maret 2013 dengan putusan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
 - c) Putusan PK Nomor 319 PK/Pdt/2021 Atas putusan kasasi tersebut, Biro Hukum selaku kuasa DKPKP mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang telah diputus Mahkamah Agung RI Nomor 319 PK/Pdt/2021 tanggal 5 Mei 2021, yang amarnya Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali. Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada dalam posisi kalah.
- 2) Perkara Nomor 217/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim
 - a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 217/PDT.G/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 1 November 2016 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;



- b) Putusan Tingkat Banding Nomor 267/PDT/2017/PT. DKI
Atas putusan tersebut, Biro Hukum selaku kuasa Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (DKPKP) memohon upaya hukum banding yang telah diputus Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor Nomor 267/PDT/2017/PT.DKI tanggal 10 Juli 2017, yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 217/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 1 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- c) Putusan Tingkat Kasasi 971 K/PDT/2018
Atas putusan banding tersebut, Biro Hukum selaku kuasa Kepala DKPKP memohon upaya hukum kasasi yang telah diputus Mahkamah Agung RI Nomor 971 K/PDT/2018 tanggal 25 Juni 2018 dengan putusan ditolak;
- d) Putusan PK Nomor 525 PK/Pdt/2023
Atas putusan kasasi tersebut, Biro Hukum selaku kuasa hukum DKPKP mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang telah diputus Mahkamah Agung RI Nomor 525 PK/Pdt/2023, yang amarnya Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali.
Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan Perkara Nomor 217/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim merupakan Putusan Kondemnator (*dapat dieksekusi*) yang memerintahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembalikan/menyerahkan penguasaan atas tanah objek perkara, yang adalah kelanjutan dari Perkara Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang sebelumnya bersifat Deklarator (*tidak dapat dieksekusi*).

f. Aset Bersejarah

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sudah termasuk nilai bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan di DKI Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, di antaranya adalah; Gedung Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Taman Prasasti, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Djoeang 45, Museum Taman Arkeologi, Gedung Eks KODIM 0505, Gedung Eks Imigrasi, Gedung Balai Konservasi, Gedung Kesenian,



Monumen Nasional, Jembatan Kota Intan, dan Museum M.H. Thamrin. Pencatatan Aset Bersejarah berupa gedung sebagai Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa untuk bangunan bersejarah yang digunakan dalam kegiatan operasional dan memberikan potensi manfaat, diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap.

Selain aset bersejarah yang sudah diputuskan dalam Surat Keputusan Gubernur di atas terdapat juga aset yang terindikasi bersejarah pada museum-museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- 1) Unit Pengelola Museum Seni mempunyai 3 Museum bersejarah yaitu:
 - a) Museum Wayang memiliki 4.893 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya seperti wayang, pahatan kayu, barang kerajinan, lukisan, dan alat kesenian lain-lain;
 - b) Museum Tekstil memiliki 1.075 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya seperti koleksi busana nusantara dan barang kerajinan seni;
 - c) Museum Seni Rupa dan Keramik 1.860 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya berupa lukisan, keramik (guci), pahatan kayu, dan pahatan lain-lain.
- 2) Pusat Konservasi Cagar Budaya memiliki 1 unit aset berupa jangkar besi.
- 3) Unit Pengelola Taman Ismail Marzuki memiliki 6 unit aset berupa alat kesenian, dan karya seni (album foto dan partitur lagu).
- 4) Unit Pengelola Museum Kebaharian memiliki 155 unit aset berupa lukisan, benda-benda purbakala, dan benda-benda bersejarah lain-lain.
- 5) Unit Pengelola Museum Kesejarahan memiliki 256 unit aset berupa buku.
- 6) Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya memiliki 5 unit aset berupa bangunan bersejarah.
- 7) Unit Pengelola Monas memiliki 52 unit aset berupa Monumen Proklamator, Patung Diponegoro, dan karya seni (patung dan miniatur).

5.3.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp37.263.185.897.518,00,00 dan Rp31.969.187.415.594,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 5.72
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	35.662.823.855	36.651.951.367
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga (neto)	6.129.962.547.440	6.130.597.356.223
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.524.180.701.395	6.524.489.356.721
	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(394.218.153.955)	(393.892.000.498)
3.	Aset Tidak Berwujud (neto)	163.211.933.228	96.967.954.202
	Aset Tidak Berwujud	715.084.977.785	634.599.864.666
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(551.873.044.557)	(537.631.910.464)
4.	Aset Lain-lain (neto)	30.934.348.592.995	25.704.970.153.802
	Aset Lain-lain	43.707.111.197.345	33.076.672.679.419
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(12.772.762.604.350)	(7.371.702.525.617)
	Jumlah (1+2+3+4)	37.263.185.897.518	31.969.187.415.594

5.3.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI kepada penghuni rusun yang melakukan pembelian unit rusun secara angsuran.

Pembelian unit rusun di bagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- Pembelian unit rusun untuk warga terprogram diperuntukkan bagi warga yang terkena pembebasan lahan atau korban kebakaran yang mendapat ganti rugi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk pembelian terprogram apabila dilakukan secara angsuran maka akan dikenakan *rate* sebesar 5%.
- Pembelian unit rusun tambahan untuk warga terprogram diperuntukkan bagi warga yang tanahnya terkena pembangunan unit rumah susun tersebut dengan luas tanah 50m² s.d 100m² yang akan mendapatkan hak pembelian 2 unit rusun dengan harga jual dikalikan 2 dari pembelian warga terprogram
- Pembelian unit rusun untuk warga tidak terprogram merupakan warga yang tidak terekomendasi untuk mendapatkan unit rumah susun namun karena tidak memiliki tanah di lokasi tersebut sehingga membeli unit rusun dari orang yang melakukan pembelian terprogram. Harga jual untuk warga tidak terprogram dikalikan 3 dari pembelian warga terprogram karena sudah tidak disubsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang pada 31 Desember 2024 belum jatuh tempo. Untuk Tagihan Penjualan Angsuran yang sudah jatuh tempo akan disajikan di Neraca pada



Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah dan dibentuk penyisihan atas kualitas tagihan.

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp35.662.823.855,00 dan Rp36.651.951.367,00. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan yang berasal dari reklasifikasi dari bagian lancar ke tagihan penjualan angsuran sebesar Rp493.649.821,00 dan koreksi penambahan lainnya sebesar Rp313.788.471,00 serta mutasi pengurangan yang berasal dari pembayaran unit sebesar Rp1.115.326.810,00, pengurangan ke bagian lancar sebesar Rp642.770.638,00 dan koreksi pengurangan lainnya sebesar Rp38.468.356,00.

Tabel 5.73
Rincian Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Rusun	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan dari Bagian Lancar (+) (Rp)	Koreksi Penambahan (+) (Rp)	Pembayaran (-) (Rp)	Pengurangan ke Bagian Lancar (-) (Rp)	Koreksi Pengurangan Lainnya (-) (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Tambora III	684.683.957	-	-	29.364.630	3.894.216	-	651.425.111
2	Bendungan Hilir II	2.966.389.918	-	38.432.166	51.325.588	-	552.231	2.952.944.265
3	Jatibunder	147.715.812	-	-	-	-	-	147.715.812
4	Tanah Tinggi	2.417.186.724	-	163.044.400	169.222.345	-	37.916.115	2.373.092.664
5	Karet Tengsin I	438.486.632	-	6.118.966	13.650.137	-	-	430.955.461
6	Petamburan	15.674.900.844	-	-	90.973.380	11.411.893	10	15.572.515.561
7	Karet Tengsin II	5.923.687.563	493.649.821	96.759.518	725.714.590	627.464.529	-	5.160.917.783
8	Tebet Barat I	1.914.281.323	-	-	-	-	-	1.914.281.323
9	Tebet Barat II	786.404.560	-	-	-	-	-	786.404.560
10	Bidara Cina	5.698.214.034	-	9.433.421	35.076.140	-	-	5.672.571.315
	Jumlah	36.651.951.367	493.649.821	313.788.471	1.115.326.810	642.770.638	38.468.356	35.662.823.855

5.3.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari Aset kekayaan daerah yang disewakan, Aset kerja sama pemanfaatan, Aset bangun guna serah, Aset bangun serah guna dan Aset kekayaan daerah yang dipinjamkaikan.

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.524.180.701.395,00 dan Rp6.524.489.356.721,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74
Rincian Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan	1.052.854.485.000	1.029.914.960.000
2	Aset Kerjasama Pemanfaatan	1.901.175.286.258	1.901.175.286.258
3	Aset Bangun Guna Serah (Build. Operate and Transfer/BOT)	1.209.114.512.500	1.209.123.512.500



No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4	Aset Bangun Serah Guna (Build. Transfer and Operate/BTO)	1.015.013.208.858	1.045.325.528.858
5	Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	1.346.023.208.779	1.338.950.069.105
	Jumlah	6.524.180.701.395	6.524.489.356.721

Daftar rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 tersaji di Lampiran 12.1 dan 12.2. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dijelaskan sesuai dengan klasifikasi aset berikut.

5.3.1.5.2.1 Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan merupakan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai dengan menggunakan tarif layanan sosial. Saldo Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.052.854.485.000,00 dan Rp1.029.914.960.000,00. Selama Tahun 2024, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp37.140.411.000,00 dan terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp14.200.886.000,00. Mutasi pengurangan Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan adalah sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

Penambahan selama Tahun 2024 berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp37.140.411.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah yang dikerjasamakan dengan Yayasan Madha Tantri sebesar Rp2.631.216.000,00; dan
- 2) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah yang dikerjasamakan dengan Gereja Tiberias Indonesia sebesar Rp34.509.195.000,00;

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan selama Tahun 2024 sebesar Rp14.200.886.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi aset berupa tanah menjadi Properti Investasi yang dikerjasamakan dengan Yayasan Muslim Bojong Indah sebesar Rp163.800.000,00;
- 2) Reklasifikasi aset berupa bangunan yang sebelumnya dikerjasamakan dengan Yayasan Al Hikmah Taman Aries menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp627.000.000,00;
- 3) Reklasifikasi aset bangunan yang dikerjasamakan dengan Yayasan Muslim Bojong Indah menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.471.250.000;



- 4) Reklasifikasi aset yang dikerjasamakan dengan Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru menjadi Aset Tetap Tanah sebesar Rp2.560.536.000,00 dan bangunan sebesar Rp9.378.300.000,00.

5.3.1.5.2.2 Aset Kerja Sama Pemanfaatan

Aset Kerja Sama Pemanfaatan adalah aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Saldo Aset Kerja Sama Pemanfaatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama yaitu sebesar Rp1.901.175.286.258,00 dan yang berasal dari:

- a. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dengan PT. Bakrie Swasakti Utama sebesar Rp1.782.128.066.258,00; dan
- b. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dengan PT. Cakra Sarana Persada sebesar Rp119.047.220.000,00.

Selama Tahun 2024 tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan pada Aset Kerja Sama Pemanfaatan.

5.3.1.5.2.3 Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate, and Transfer/BOT*)

Aset Kerjasama Bangun Guna Serah adalah aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan / atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati.

Saldo Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer / BOT*) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.209.114.512.500,00 dan Rp1.209.123.512.500,00. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp9.000.000,00 berupa bangunan halte yang direklasifikasi menjadi Aset yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (*Aset Idle*).

5.3.1.5.2.4 Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer, and Operate/BTO*)

Aset Kerjasama Bangun Serah Guna adalah aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga / investor mendirikan bangunan dan / atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Saldo Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate / BTO*) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.015.013.208.858,00 dan Rp1.045.325.528.858,00. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp5.284.200.000,00 dan mutasi



pengurangan sebesar Rp35.596.520.000,00. Penjelasan atas mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*) sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

Penambahan selama Tahun 2024 berasal dari koreksi kurang catat barang atas perjanjian pemanfaatan dengan Yayasan Al Muhajirin berdasarkan BAST Nomor 1412/PU.04.00 tanggal 28 Mei 2024 berupa Gedung Bangunan sebesar Rp5.284.200.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan selama Tahun 2024 sebesar Rp35.596.520.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi aset yang dikerjasamakan dengan Yayasan Al Muhajirin yang menjadi Aset Tetap Tanah sebesar Rp13.326.720.000,00 dan Gedung Bangunan sebesar Rp5.284.200.000,00; dan
- 2) Koreksi lebih catat barang berupa Gedung Bangunan masjid Yayasan Al Muhajirin sebesar Rp11.105.605.000,00 dan berupa tanah bangunan pendidikan dan Latihan yang terletak di taman Meruya Ilir Blok E7 Kembangan Jakarta Barat sebesar Rp5.880.000.000,00.

Selain itu, pada kerjasama Bangun, Serah, Guna (BSG) atau *Build, Transfer, Operate* (BTO) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Albamas Sinar Purnama (PT ASP), terdapat pengembalian dana talangan, pendapatan *goodwill* dan kontribusi, pendapatan denda keterlambatan, serta Gedung Pusat Grosir PIK yang belum diterima oleh UPK PPKUKMP Pulo Gadung. Pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap PT ASP. Gugatan ini didasarkan pada dugaan tindakan wanprestasi oleh PT ASP atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) tanggal 1 Desember 2004. Meskipun gugatan telah didaftarkan, jumlah ganti rugi yang akan diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum dapat dipastikan karena proses hukum masih berjalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memantau perkembangan kasus ini dan mengungkapkan informasi lebih lanjut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku setelah ada keputusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

5.3.1.5.2.5 Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan

Aset Kekayaan Daerah Yang Dipinjampakaikan adalah aset yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.



Saldo Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.346.023.208.779,00 dan Rp1.338.950.069.105,00. Selama Tahun 2024, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp8.994.725.803,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.921.586.129,00. Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan adalah sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

Penambahan selama Tahun 2024 berasal dari reklasifikasi dari aset tetap sebesar Rp8.994.725.803,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dipinjam-pakaikan kepada Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebesar Rp6.782.025.803,00;
- 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dipinjam-pakaikan kepada Rumah Tahanan Pondok Bambu sebesar Rp1.118.920.000,00; dan
- 3) Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan yang dipinjam-pakaikan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebesar Rp1.093.780.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan selama Tahun 2024 sebesar Rp1.921.586.129,00 berupa kendaraan penumpang 14 orang ke bawah yang telah berakhir masa Perjanjian Pinjam Pakai sehingga di reklasifikasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp394.218.153.955,00 dan Rp393.892.000.498,00 dengan rincian yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.75

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2024			
	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Koreksi Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
	2023	2024	2024	2024
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	11.053.796.400	685.900.400	(5.086.405.000)	6.653.291.800
Aset Kerjasama Pemanfaatan	46.926.468.758	0	0	46.926.468.758
Aset Bangun Guna Serah (BOT)	2.700.000	0	(2.700.000)	0



Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2024			
	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Koreksi Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
	2023	2024	2024	2024
Aset Bangun Serah Guna (BTO)	285.579.528.800	12.162.292.129	(8.884.480.000)	288.857.340.929
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampaikan	50.329.506.540	4.568.944.172	(3.117.398.244)	51.781.052.468
Jumlah	393.892.000.498	17.417.136.701	(17.090.983.244)	394.218.153.955

Nilai buku Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.129.962.547.440,00 dengan rincian yang dapat dijelaskan sebagai berikut

Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2024		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	1.052.854.485.000	(6.653.291.800)	1.046.201.193.200
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	1.901.175.286.258	(46.926.468.758)	1.854.248.817.500
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer / BOT)	1.209.114.512.500	(0)	1.209.114.512.500
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Transfer and Operate / BTO)	1.015.013.208.858	(288.857.340.929)	726.155.867.929
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampaikan	1.346.023.208.779	(51.781.052.468)	1.294.242.156.311
Jumlah	6.524.180.701.395	(394.218.153.955)	6.129.962.547.440

a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa

Saldo Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.653.291.800,00 dan Rp11.053.796.400,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.76

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	31 Desember 2024		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.039.060.203.000	0	1.039.060.203.000
Peralatan dan Mesin	264.985.000	(264.985.000)	0
Gedung dan Bangunan	2.961.387.000	(2.856.607.200)	104.779.800
Jalan Irigasi Jaringan	10.544.000.000	(3.531.699.600)	7.012.300.400
Aset Lainnya	23.910.000	0	23.910.000
Jumlah	1.052.854.485.000	(6.653.291.800)	1.046.201.193.200



b. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Pemanfaatan

Saldo Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Pemanfaatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama yaitu sebesar Rp46.926.468.758,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Pemanfaatan per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.77

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Pemanfaatan Per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	31 Desember 2024		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.735.201.597.500	0	1.735.201.597.500
Gedung dan Bangunan	46.926.468.758	(46.926.468.758)	0
Jumlah	1.782.128.066.258	(46.926.468.758)	1.735.201.597.500

c. Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.700.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*) per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.78

Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah Per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Aset BOT	31 Desember 2024		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.209.114.512.500	0	1.209.114.512.500
Jumlah	1.209.114.512.500	0	1.209.114.512.500

d. Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp288.857.340.929,00 dan Rp285.579.528.800,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*) per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.79



Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-
Kerjasama Bangun Serah Guna
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Aset BTO	31 Desember 2024		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	717.033.729.050	0	717.033.729.050
Peralatan dan Mesin	1.919.950.000	(1.919.950.000)	0
Gedung dan Bangunan	296.059.529.808	(286.937.390.929)	9.122.138.879
Jumlah	1.015.013.208.858	(288.857.340.929)	726.155.867.929

e. Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yang Dipinjampakaikan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp51.781.052.468,00 dan Rp50.329.506.540,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yang Dipinjampakaikan per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.80

Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Aset Kekayaan Daerah yang dipinjampakai	31 Desember 2024		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.261.269.811.000	0	1.261.269.811.000
Peralatan dan Mesin	22.871.292.996	(22.323.735.378)	547.557.618
Gedung dan Bangunan	61.882.104.783	(29.457.317.090)	32.424.787.693
Jumlah	1.346.023.208.779	(51.781.052.468)	1.294.242.156.311

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp715.084.977.785,00,00 dan Rp634.599.864.666,00. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 terdiri atas lisensi, *software*, dan aset tidak berwujud lainnya. Selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp143.773.131.390,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp63.288.018.271,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 yang menjadi Aset Tidak Berwujud	Rp	126.163.939.740
a)	Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024	Rp	129.085.346.240



b)	Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 yang tidak menghasilkan Aset Tidak Berwujud perolehan Tahun 2024Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 yang tidak menghasilkan Aset Tidak Berwujud perolehan Tahun 2024	Rp	(2.921.406.500)
2)	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	Rp	6.951.640.730
3)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa		9.696.330.000
4)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	961.220.920
Jumlah Penambahan		Rp	143.773.131.390
<u>b. Mutasi Pengurangan</u>			
1)	Reklasifikasi ke Beban Jasa	Rp	63.236.428.271
2)	Reklasifikasi ke Aset dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	Rp	51.590.000
Jumlah Pengurangan		Rp	63.288.018.271

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp143.773.131.390,00 terdiri dari:

1. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 yang menjadi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp126.163.939.740,00 di antaranya berupa:
 - *Software sinkronasi & collecting data transaksi ATS, Software SAS Viya Enterprise, dan Software SAS Government Operation Monitoring Premier* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp113.463.364.940,00;
 - *Synxchro Standard Document Management Platform dan Synxchro Standard Data Synchronization Platform* pada Pusat Data dan Informasi Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.999.897.500,00; dan
 - *Software 3D Building Permit Assessment dan Lisensi Software PTV VISSIM Advance* pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.826.615.000,00.
2. Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp6.951.640.730,00 di antaranya berupa:
 - Sistem pemutakhiran data dan penguatan *capacity building* dalam rangka pengembangan sistem informasi mitigasi bencana dan Sistem pengelolaan data dan pengamanan aset yang perolehannya berasal dari belanja tanah dan belanja peralatan mesin pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp3.936.230.200,00;
 - *Software Sinkronasi & Collecting data transaksi ATS, Software SAS VIYA Enterprise dan Software SAS Government Operation Monitoring Premier* yang perolehannya berasal dari belanja peralatan mesin pada



Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp 2.035.000.000,00; dan

- *Software Radiologi Information System* yang perolehannya berasal dari belanja peralatan mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp427.350.000,00.
- 3. Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp9.696.330.000,00 berupa Konten Imersif Museum Joang 45, Konten Maket *Projection Mapping*, Konten Peta Digitalisasi Museum, dan Konten Museum lainnya pada Unit Pengelola Museum Kesenjangan.
- 4. Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp961.220.920,00 berupa Lisensi *Oracle Database Enterprise Edition* pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp63.288.018.271,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi ke Beban Jasa (Selain Belanja Modal 2024) sebesar Rp63.236.428.271,00 yang terdiri dari:
 - *Software Redhat OpenShift Container Platform* dan *Redhat Openshift Cointainer Platform with Integration, Premium* (64 core or 128 VCPUS) - 1 year pada Unit Pengelola Jakarta Smart City dengan total sebesar Rp63.190.372.271,00; dan
 - Lisensi *software Redhat* (pengolah data SQL) sebesar Rp46.056.000,00 pada Pusat Data Dan Informasi Keluarga.
2. Reklasifikasi ke Aset dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset karena belum diketahui keberadaannya sebesar Rp51.590.000,00 berupa *website* informasi jalan pada Sudin Bina Marga Jakarta Selatan.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan amortisasi dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi yang dilakukan pada Aset Tidak Berwujud untuk aset yang memiliki masa manfaat terbatas berupa *software*, sistem/aplikasi, dan jenis aset tidak berwujud lainnya. Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan Keuangan per 31



Desember 2024. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Saldo akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp551.873.044.557,00 dan Rp537.631.910.464,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

Akumulasi Amortisasi 2023	: Rp 537.631.910.464,00
Beban Amortisasi 2024	: Rp 66.105.306.292,00
Koreksi Amortisasi 2024	: Rp (51.864.172.199,00)
Akumulasi Amortisasi 2024	: Rp 551.873.044.557,00

Nilai Buku untuk Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp163.211.933.228,00,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

Harga Perolehan	: Rp 715.084.977.785,00
Akumulasi Amortisasi	: Rp (551.873.044.557,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2024	: Rp 163.211.933.228,00

5.3.1.5.4 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp43.707.111.197.345,00 dan Rp33.076.672.679.419,00. Rincian Aset Lain-lain disajikan tabel berikut.

Tabel 5.81

Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2024 dan 2023

Aset Lain-lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1. Aset Rusak Berat/Usang	8.224.981.762.728	4.382.335.026.906
2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	926.659.033.718	489.746.555.352
3. Aset Tetap - Belum ditetapkan statusnya	1.075.481.299.172	973.782.683.243
4. Aset Tetap - Fasos Fasum	22.380.891.194.269	16.290.870.877.648
5. Kas dikonsinyasikan	2.168.628.752	27.413.446.297
6. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	548.652.428.827	573.280.906.692
7. Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	6.055.700.858.515	4.475.775.978.273
8. Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya	10.697.454.729	10.697.454.729
9. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	4.481.878.536.635	5.852.769.750.279
Jumlah	43.707.111.197.345	33.076.672.679.419

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:



5.3.1.5.4.1 Aset Rusak Berat/Usang

Saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.224.981.762.728,00 dan Rp4.382.335.026.906,00. Selama Tahun 2024, terdapat mutasi penambahan Rp4.309.954.870.382,00 dan mutasi pengurangan Rp467.308.134.560,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	4.309.532.839.161
2)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	422.031.221
	Jumlah Penambahan	Rp	4.309.954.870.382
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Penghapusan	Rp	436.614.572.069
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	30.693.562.491
	Jumlah Pengurangan	Rp	467.308.134.560

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Rusak Berat selama Tahun 2024 sebesar Rp4.309.954.870.382,00 terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp4.309.532.839.161,00 di antaranya terdiri dari:
 - Mobil pemadam kebakaran, Trailer kuda, alat pembantu kebakaran dan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp431.171.274.078,00;
 - Podium, *Uninterruptible Power Supply* (UPS), *Unit Power Supply* dan peralatan dan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp256.419.611.186,00; dan
 - *Unit Tape Recorder*, Alat Simulator Pendidikan, Bangunan Gedung Pendidikan dan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp227.965.593.181,00.
- 2) Kurang Catat Barang sebesar Rp422.031.221,00 terdiri dari:
 - *Dental Panoramic*, *Ginekologi Tabel*, Televisi, dan peralatan dan mesin lainnya pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora dengan total sebesar Rp222.265.828,00;
 - *Auto panel call control*, *Amplifier unit*, *Drum band* dan peralatan dan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp193.707.060,00; dan
 - *Laboratory Refrigerators*, *Filling Cabinet* Besi, Lemari besi, dan peralatan dan mesin lainnya pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah dengan total sebesar Rp6.058.333,00.



b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Rusak Berat selama Tahun 2024 sebesar Rp467.308.134.560,00 terdiri dari:

- 1) Penghapusan sebesar Rp436.614.572.069,00 di antaranya terdiri dari:
 - Mainframe IBM z series, Alat Komunikasi UHF *Tetra*, Telepon PABX, dan aset rusak berat lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp45.442.520.106,00;
 - *Pressure switch*, saluran telepon lokal (STLO), AC *ducting* dan aset rusak berat lainnya pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dengan total sebesar Rp42.831.386.321,00; dan
 - *CT Scanner*, Alat kimia klinik, Alat USG, dan aset rusak berat lainnya pada Rumah Sakit umum Daerah Cengkareng Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp34.865.197.097,00.
- 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp30.693.562.491,00 di antaranya terdiri dari:
 - Bangunan gudang terbuka, Bangunan gedung kantor dan Bangunan penampung air baku pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah dengan total sebesar Rp14.593.779.550,00;
 - Mobil pemadam kebakaran, *Thermal Imaging Camera*, Gerobak air dan aset rusak berat lainnya pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp8.448.037.580,00; dan
 - 7 Bangunan gedung SKKT (Sasana Krida Karang Taruna) pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp1.763.098.644,00.

Dari nilai Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.194.769.394.157,00, terdapat Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp24.134.152.173,00 yang telah diambil oleh pemenang lelang pada Tahun 2024, namun tidak dapat dihapuskan dari daftar Barang Milik Daerah dikarenakan penetapan keputusan penghapusan atas Aset Rusak Berat/Usang tersebut dikeluarkan di Tahun 2025. SK Penghapusan sebagian aset tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 17 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 atas nilai aset sebesar Rp5.774.917.347,00;
- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 14 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 atas nilai aset sebesar Rp15.221.080.500,00; dan



- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 atas nilai aset sebesar Rp1.611.425.000,00.

Untuk satu register aset lainnya sebesar Rp1.226.729.326,00 belum diterbitkan SK Penghapusan.

Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/ Usang

Saldo akumulasi penyusutan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.065.393.887.354,00. Nilai Buku untuk Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.159.587.875.374,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

Harga Perolehan	Rp 8.224.981.762.728,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (7.065.393.887.354,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2024	Rp 1.159.587.875.374,00

5.3.1.5.4.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan aset KDP yang Dihentikan Permanen.

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing - masing sebesar Rp926.659.033.718,00 dan Rp489.746.555.352,00. Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2024 terdiri dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp811.099.070.415,00 dan KDP yang dihentikan Permanen yang berasal dari 8 OPD sebesar Rp115.559.963.303,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Klasifikasi	Nilai (Rp)
1.	Tanah	544.515.648.000
2.	Peralatan dan Mesin	5.182.894.769
3.	Gedung dan Bangunan	252.866.162.769
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.534.364.877
	Jumlah	811.099.070.415
5	KDP yang dihentikan permanen	115.559.963.303
	Jumlah	926.659.033.718

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp811.099.070.415,00 selama Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan Rp535.066.508.170,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp98.624.529.544,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	5.891.811.500
2)	Reklasifikasi dari Aset Tetap Fasos Fasum	Rp	529.165.696.670
3)	Reklasifikasi dari Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (BTO)	Rp	9.000.000



Jumlah		Rp	535.066.508.170
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	76.123.769.864
2)	Reklasifikasi ke Properti Investasi	Rp	22.500.759.680
Jumlah		Rp	98.624.529.544

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp535.066.508.170,00 terdiri dari:

1) Koreksi Kurang Catat Barang berdasarkan hasil inventarisasi sebesar Rp5.891.811.500,00 yang terdiri dari:

- Tanah Kantor Pemerintahan seluas 6.528 m² sebesar Rp3.505.536.000,00 yang berada di Jalan Rusun Flamboyan RT 12 RW 10 - Eks Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
- Bangunan Kantor Pemerintahan seluas 1.970 m² sebesar Rp2.386.275.500,00 yang berada di Jalan Rusun Flamboyan RT 12 RW 10 - Eks Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

2) Reklasifikasi Aset Fesos Fasum ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp529.165.696.670,00 di antaranya terdiri dari :

- Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan sebesar Rp198.670.000.000,00 yang berada di Jalan Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat sebesar Rp.66.211.000.000,00 yang berada di Jalan Muara Baru Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- PT. Nusantara Pasifik Investama sebesar Rp50.073.500.000,00 berupa Tanah Kosong yang sudah diperuntukkan yang berada di Jalan Rawa Kuning RT 01 RW 07 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.

3) Reklasifikasi Aset BOT ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp9.000.000,00 terdiri dari PT. Duta Pertiwi, Tbk. berupa dua Bangunan Stasiun Bus Permanen yang berada di Jalan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.



b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp98.624.529.544,00 merupakan Reklasifikasi ke Aset Tetap yang di antaranya terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp76.123.769.864,00 yang di antaranya terdiri dari:
 - Bangunan Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 8.820 m² sebesar Rp61.305.822.746,00 yang berada di Jalan Ahmad Yani / Jalan Pemuda RT 001 / RW 002 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - Eks Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat sebesar Rp5.891.811.500,00 berupa Tanah Kantor Pemerintahan - Eks Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Bangunan Kantor Pemerintah - Eks Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat yang berada di Jalan Rusun Flamboyan RT 12 RW 10 - Eks Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - Bangunan Tempat Bermain Anak RPTRA Edelweiss PQT seluas 1.088 m² sebesar Rp1.510.013.730,00 yang berada di Jalan Komplek Perumahan Qaryah Thoyyibah Blok C RT 05 RW 01 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 2) Reklasifikasi ke Properti Investasi sebesar Rp22.500.759.680 berupa Tanah Aliran Sungai (Normalisasi Kali Pesanggrahan) seluas 1.476 m² yang berada di Jalan Meruya Ilir RT 012 RW 07 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2024 atas KDP yang dihentikan Permanen sebesar Rp115.559.963.303,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah yang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Aset Fisik dan Biaya Non Fisik dengan rincian konstruksi fisik sebagai berikut:
 - Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 register sebesar Rp6.118.241.600,00;



- Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota – Jakut sebanyak 1 register sebesar Rp224.639.615,00;
 - Dinas Pemuda dan Olah Raga sebanyak 1 register sebesar Rp945.289.000,00;
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 1 register sebesar Rp16.030.275.500,00; dan
 - Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 1 register sebesar Rp84.535.189.400,00.
- b. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah yang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian konstruksi fisik sebagai berikut:
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 1 register sebesar Rp3.215.932.000,00; dan
 - Dinas Pendidikan sebanyak 1 register sebesar Rp2.905.376.448,00.
- c. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah berupa DED atas konstruksi fisik yang statusnya dihentikan sementara pada Unit Pengelola Angkutan Jalan sebanyak 1 register sebesar Rp1.114.520.000,00;
- d. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah berupa biaya perencanaan atas rehab total gedung kantor Kecamatan Cengkareng yang statusnya dihentikan karena lokasi lahan terdampak proyek nasional jalan tol dan Kecamatan Tambora yang statusnya dihentikan karena perubahan kondisi gedung yang memerlukan perencanaan ulang, pada Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 2 register sebesar Rp392.122.640,00; dan
- e. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah berupa biaya perencanaan atas konstruksi fisik masjid yang statusnya dihentikan karena terdampak efisiensi dan asrama yang statusnya dihentikan karena kenaikan harga material yang tidak sesuai dengan rencana awal, pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 register sebesar Rp78.377.100,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2024 sebesar



Rp421.464.019.883,00. Nilai Buku untuk Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp505.195.013.835,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

Harga Perolehan	:	Rp	926.659.033.718,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp	(421.464.019.883,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2024	:	Rp	505.195.013.835,00

5.3.1.5.4.3 Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.075.481.299.172,00 dan Rp973.782.683.243,00. Selama Tahun 2024, terdapat mutasi penambahan Rp101.698.615.929,00 dan mutasi pengurangan Rp0,00.

Penambahan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp101.698.615.929,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap pada Dinas Kesehatan atas peralatan dan mesin, jaringan rumah tangga, dan aset tetap lainnya.

Saldo Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Perangkat Daerah	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1	Dinas Sumber Daya Air	1	5.194.315.000
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)	6	706.476.085.211
3	Dinas Perhubungan	1	261.256.190.002
4	Sudin Perhubungan Jakarta Timur	131	508.596.000
5	Dinas Bina Marga	1	15.025.750
6	Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap	4	332.471.280
7	Dinas Kesehatan	3.326	101.698.615.929
	Total	3.470	1.075.481.299.172

Rincian atas aset tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dinas Sumber Daya Air atas Tanah Kali Pesanggrahan yang terindikasi *double* catat dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp5.194.315.000,00;
- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp706.476.085.211,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Aset Tanah Cengkareng Barat aset yang dibeli pada tahun 2015 sebesar Rp668.557.654.500,00. Atas aset ini, terdapat gugatan tuntutan perdata dari Pihak Ketiga.
 - Aset Tetap Rusunami sebesar Rp29.474.929.576,00 yang masih dalam penelusuran dan pemutakhiran data.



- Aset Tetap Rusunami Benhil I, Rusunami Karet Tengsin, dan Rusunami Kebon Kacang sebesar Rp8.443.501.135,00 yang masih dilakukan penelusuran lebih lanjut atas status kepemilikannya.

Tuntutan Perdata atas Aset Tanah Cengkareng Barat tersebut berasal dari Toeti NZ Soekarno, dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2016 dengan Nomor Gugatan 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.

Materi gugatan penggugat yaitu atas indikasi perbuatan melawan hukum oleh DKPKP yang mencatat Aset Tanah Penggugat seluas 46.913 m² dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) DKPKP, dengan tuntutan antara lain;

- pencatatan Tanah dalam KIB A DKPKP melanggar hukum;
- kerugian material karena adanya penahanan penundaan pembayaran sebesar Rp200.000.000.000,00;
- *lost opportunity* sebesar Rp500.000.000,00; dan
- kerugian imateriil Rp800.000.000,00.

Dalam Laporan Keuangan DKPKP per 31 Desember 2015 tercatat Aset Tanah sebesar Rp2.955.165.380.885,00 yang terdiri dari 142 bidang tanah seluas 2.742.827,31 m², di antaranya seluas 101.395 m² digunakan sebagai kebun pembibitan di Kecamatan Cengkareng Barat, termasuk di dalamnya lahan seluas 46.913 m² yang digugat.

Adapun tuntutan kuperdatakan tersebut di atas, tidak terlepas dari adanya mutasi penambahan Aset Tetap Tanah yang bersumber dari pembelian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) seluas 46.913 m² yang terdiri dari 3 Sertifikat yaitu SHM Nomor 13069/Cengkareng Barat seluas 34.503 m², SHM Nomor 13293/Cengkareng Barat seluas 9.359 m² dan SHM Nomor 13430/Cengkareng Barat seluas 3.061 m².

Atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2017 dengan Amar Putusan:

a. Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

b. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; dan
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Perkara ini telah diputus pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2017 dengan amar putusan:



- menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2017, Nomor: 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding.
- menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018, Para Penggugat tidak mengajukan kasasi sehingga perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas permasalahan pembelian lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, Cs: Laporan di Bareskrim Mabes POLRI.

- Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta melaporkan Toeti NZ Soekarno, dkk dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/673/VI/2016/Bareskrim tanggal 29 Juni 2016.
- Toeti NZ Soekarno, dkk. Melaporkan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/670/VI/2016/Bareskrim tanggal 28 Juni 2016.
- Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes POLRI melalui Laporan Polisi No. LP/656/VI/2016/Bareskrim telah melakukan penyidikan ada dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, dkk.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor 67/-076.2 tanggal 19 Januari 2018 Hal Permohonan Informasi Terkait Perkembangan Pemeriksaan Laporan Polisi Atas Tanah Aset Kebon Bibit Cengkareng Barat, yang pada intinya meminta informasi perkembangan pemeriksaan laporan dimaksud sebagaimana huruf a dan angka 2 di atas.
- Dinas Perumahan telah beberapa kali mengundang Toeti NZ Soekarno Cs dan kuasanya dalam rangka musyawarah pembatalan Akta Jual Beli



(AJB), namun musyawarah tidak berhasil karena pihak Toeti NZ Soekarno Cs tidak hadir sampai dengan rapat terakhir tanggal 27 Februari 2018.

Pada 06 Maret 2024 telah terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor 591 K/Pdt/2023 jo No.244/PDT/2022/PT.DKI jo No.1120/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br t dengan amar putusan:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta C.q.. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, dan 2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta C.q.. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Dinas Perhubungan sebesar Rp261.256.190.002,00 sudah dilakukan sidang penetapan Status Barang Milik Daerah dan menunggu hasil keputusan sidang tersebut;
- d. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 131 register berupa peralatan dan mesin sebesar Rp508.596.000,00 yang sudah dilakukan usul ke Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah;
- e. Dinas Bina Marga sebanyak 1 register berupa sepeda motor yang hilang sebesar Rp15.025.750,00 dan masih dalam proses kajian TIM TP TGR; dan
- f. Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Tetap sebanyak 4 register barang berupa gedung pos jaga permanen sebesar Rp332.471.280,00 yang merupakan tindak lanjut dari hasil inventarisasi aset pengelola yang sudah diusulkan Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.
- g. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3.326 register barang yang terdiri dari :
- Peralatan dan mesin sebanyak 3.275 register barang sebesar Rp95.389.999.667,00;
 - Jaringan rumah tangga (jarut) sebesar Rp1.752.000.000,00; dan
 - Aset tetap lainnya sebanyak 50 register barang sebesar Rp4.556.616.262,00.

Aset tetap tersebut direklasifikasi ke Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 dikarenakan menunggu berita acara/naskah hibah Provinsi DKI Jakarta kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 2344/ TG.02 (No : B-0359.I/ C.3.4/Cum.4/ 02/2025) tanggal 17 Februari 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyerahkan aset dan kewajiban pada neraca Rumah Sakit Adhyaksa kepada Kejaksaan Republik Indonesia. DPRD Provinsi DKI Jakarta juga telah memberikan persetujuan hibah berdasarkan surat dengan No. 391/BP.06.00 tanggal 7 Mei 2025 perihal Persetujuan DPRD Provinsi DKI



Jakarta terhadap Hibah Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin, Jaringan dan Aset Tetap Lainnya kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Terhadap proses hibah Provinsi DKI Jakarta kepada Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, saat ini sedang dalam proses penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp90.786.883.873,00 yang merupakan akumulasi penyusutan saat dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap. Nilai Buku untuk Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp984.694.415.299,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

Harga Perolehan	: Rp 1.075.481.299.172,00
Akumulasi Penyusutan	: Rp 90.786.883.873,00
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2024	: Rp 984.694.415.299,00

5.3.1.5.4.4 Aset Tetap – Fasos Fasum

Aset Tetap Fasos Fasum merupakan aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pemegang Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (IPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Prinsip Kewajiban Lainnya (Sanksi). Saldo Aset Tetap – Fasos Fasum per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp22.380.891.194.269,00 dan Rp16.290.870.877.648,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.82

Aset Tetap Fasos Fasum
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Tanah	13.341.948.097.518	19.431.927.716.615	13.028.398.499.066	19.745.477.315.067
2.	Peralatan dan Mesin	24.262.249.894	48.161.226.164	31.256.735.937	41.166.740.121
3.	Gedung dan Bangunan	1.179.931.055.828	119.578.144.303	438.015.737.865	861.493.462.266
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.727.587.288.654	586.655.544.264	597.983.183.018	1.716.259.649.900
5.	Aset Tetap Lainnya	17.142.185.754	53.020.000	701.178.839	16.494.026.915
	Total	16.290.870.877.648	20.186.375.651.346	14.096.355.334.725	22.380.891.194.269

Rincian mutasi Aset Tetap – Fasos Fasum adalah sebagai berikut:

5.3.1.5.4.4.1 Fasos Fasum – Tanah

Saldo Aset Fasos Fasum Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp19.745.477.315.067,00 dan Rp13.341.948.097.518,00. Pada Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan



sebesar Rp19.431.927.716.615,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp13.028.398.499.066,00 sebagai berikut.

<u>a. Mutasi Penambahan</u>		
1) Donasi/Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI	Rp	60.564.345.000
2) Penerimaan atas Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga	Rp	17.946.618.397.730
3) Koreksi Kurang Catat	Rp	1.424.744.973.885
Jumlah Penambahan	Rp	19.431.927.716.615
<u>b. Mutasi Pengurangan</u>		
1) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle)	Rp	379.125.682.000
2) Reklasifikasi Menjadi Aset Tetap	Rp	12.050.278.563.786
3) Reklasifikasi Menjadi PI	Rp	301.623.884.280
4) Koreksi Pencatatan Ganda	Rp	297.370.369.000
Jumlah Pengurangan	Rp	13.028.398.499.066

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Fasos Fasum Tanah selama Tahun 2024 sebesar Rp19.431.927.716.615,00 sebagai berikut:

- 1) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp60.564.345.000,00 yang di antaranya terdiri dari :
 - PT Propertis Investindo Bhaktitama sebesar Rp31.561.280.000,00 berupa Tanah Taman yang berada di Perumahan Bukit Gading Mediterania Jalan Casablanca IX Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - Ahli Waris Alm. H. Muhamadong SH (Daeng Sidjaja) sebesar Rp402.675.000,00 berupa Tanah Peruntukan Jalan yang berada di Jalan Akses Penghubung Ke Jalan Sahid RT 002 RW 01 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Angkasa Pancabersaudara sebesar Rp28.600.390.000,00 berupa Tanah Untuk Jalan yang berada di Perumahan Gading Kirana (-6.143557 106.896300) Jalan Gading Kirana Barat 1 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.



- 2) Penerimaan atas Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga sebesar Rp17.946.618.397.730,00 yang di antaranya terdiri dari:
- PT. Taman Kedoya Barat Indah sebesar Rp4.045.531.875.000,00 berupa 28 bidang tanah dengan peruntukkan Lahan Marga Jalan dan Lahan Penyempurna Hijau Taman yang berada di Komplek Perumahan Green Garden Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp2.554.070.400.000,00 berupa 3 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Jalan, Tanah Saluran, dan Tanah Jalur Hijau yang berada di Perumahan Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Citra Abadi Mandiri sebesar Rp2.011.915.500.000,00 berupa 4 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Taman Kota / Lingkungan, Tanah Jalur Hijau, Tanah Terbuka Biru, dan Tanah Prasarana Jalan yang berada di Jalan Raya Pegangsaan Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - PT. Indo Sandang City qq PT. Sinjaya sebesar Rp1.412.253.750.000,00 berupa 3 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Marga Jalan, Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht), dan Tanah Suka Sarana Ibadah (Ssi) yang berada di Jalan Patal Senayan 1 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Graha Rekayasa Abadi sebesar Rp839.822.385.000,00 berupa 29 bidang tanah peruntukkan Tanah Sekolah, Tanah Saluran, Tanah PHU / Taman, Tanah Rencana Rel KA, Tanah Rencana Jalan yang berada di Jalan Pegangsaan Dua (Perumahan Gading Arcadia RW 022) (-6.164658 106.917717) Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.
- 3) Koreksi kurang catat atas penerimaan aset sebelum Tahun 2024 sebesar Rp1.424.744.973.885,00 yang di antaranya terdiri dari :
- PT. Copylas Indonesia sebesar Rp1.398.341.605.000,00 berupa 11 bidang tanah dengan peruntukkan Lahan Taman Kota / Lingkungan, Lahan Hijau Tegangan Tinggi, Lahan Jalur Hijau, Lahan Prasarana Pelayanan Umum, Lahan Prasarana Jalan, Lahan Prasarana Olahraga dan Rekreasi, Lahan Prasarana Pendidikan, Lahan Prasarana Ibadah, dan Lahan Jalur Hijau yang berada di



- Perumahan Puri Botanical Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- PT. Town City Properties sebesar Rp9.919.140.000,00 berupa Tanah Taman yang berada di Jalan Patra Raya Blok M – 13 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp3.570.455.885,00 berupa 1 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan yang berada di Jalan Lebak Bulus III Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - Pencatatan atas bidang tanah yang sudah bersertifikat SHP 264 /Meruya Selatan sebesar Rp3.241.512.000,00 yang berada di Jalan Putri Bungsu RT 05 RW 06 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - Pencatatan Aset tanah yang sudah bersertifikat SHP 265/Meruya Selatan sebesar Rp3.065.040.000,00 yang berada di Jalan Cemara RT 004 RW 006 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Fasos Fasum Tanah sebesar Rp13.028.398.499.066,00 sebagai berikut :

- 1) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset *Idle*) sebesar Rp379.125.682.000,00 diantaranya berasal dari :
 - Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan sebesar Rp198.670.000.000,00 yang berada di Jalan Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat sebesar Rp66.211.000.000,00 yang berada di Jalan Muara Baru Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - PT. Nusantara Pasifik Investama sebesar Rp50.073.500.000,00 berupa Tanah Kosong yang sudah diperuntukkan yang berada di Jalan Rawa Kuning RT 01 RW 07 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur;



- Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan sebesar Rp24.435.000.000,00 yang berada di Jalan Taman Sunda Kelapa No.16A RT 06 RW 04 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - Tanah Bangunan Gudang sebesar Rp12.605.625.000,00 yang berada di Jalan Kerapu Nomor 5 (Tongkol) Pasar Ikan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 2) Reklasifikasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp12.050.278.563.786,00 yang diantaranya berasal dari :
- PT. Taman Kedoya Barat Indah sebesar Rp4.045.531.875.000,00 sebanyak 28 bidang tanah berupa lahan marga jalan dan lahan penyempurna hijau taman yang berada di Komplek Perumahan Green Garden Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Citra Abadi Mandiri sebesar Rp2.011.915.500.000,00 berupa Tanah Taman Kota / Lingkungan, Tanah Jalur Hijau, Tanah Terbuka Biru, dan Tanah Prasarana Jalan yang berada di Jalan Raya Pegangsaan Kelurahan rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - PT. Indo Sandang City qq PT. Sinjaya sebesar Rp1.272.003.750.000,00 berupa 2 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Marga Jalan dan Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht) yang berada di Jalan Patal Senayan 1 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Pangestu Luhur sebesar Rp617.615.658.000,00 berupa 12 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Marga Jalan dan Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht) yang berada di Perumahan Mitra Gading Villa -6.143696 106.904243 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Agung Sedayu Propertindo sebesar Rp546.352.695.000,00 berupa Tanah Yang Terkena Rencana Jalan yang berada di Jalan Mangga Dua Raya / Jalan Mangga Dua Abdad Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 3) Reklasifikasi Menjadi PI sebesar Rp301.623.884.280,00 yang diantaranya berasal dari:



- PT. Setia Utama Island sebesar Rp154.739.548.280,00 berupa Tanah Kosong Yang Sudah diperuntukkan yang berada di Pulau Tengah (-5.858778 106.604762) Kelurahan Pulau Pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - Penyerahan aset fasos fasum dari BPAD ke JAMC sebesar Rp89.064.885.000,00 berupa Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan yang berada di Jalan Pantai Mutiara (Mulai Dari Café Jetski, Polairud, Basarnas) Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Astra Honda Motor sebesar Rp18.299.250.000,00 berupa 4 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Prasarana Jalan dan Tanah Penyempurna Hijau Umum (PHU) / Jalur Hijau yang berada di Jalan Pegangsaan Dua RT 001 / RW 003 (-6.158471 106.920735) Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Satwika Permai Indah sebesar Rp12.730.500.000,00 berupa Lahan Suka Pendidikan yang berada di Perumahan Taman Surya 5 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Sunrise Garden sebesar Rp10.382.344.000,00 berupa Tanah Bangunan Tempat Ibadah - Permohonan Pemanfaatan Yayasan Islam Taman Cahaya yang berada di Jalan Kedoya Pesing Komplek Perumahan Sunrise Garden Kelurahan Kedoya Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 4) Koreksi Pencatatan Ganda sebesar Rp297.370.369.000,00 yang terdiri dari :
- Tanah Kampung sebesar Rp166.149.585.000,00 yang berada di Jalan Kartini dan Jalan TB. Simatupang RT 0016 RW 006 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - Tanah sebesar Rp82.410.000.000,00 berupa 2 bidang Tanah Kosong yang Sudah diperuntukkan yang berada di Jalan Rawa Kepiting Nomor 5 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdapat pencatatan ganda dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;



- Tanah sebesar Rp17.444.700.000,00 yang berada di Jalan Bangka II Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terdapat pencatatan ganda dengan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Tanah sebesar Rp11.796.696.000,00 yang berada di Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi. Aset ini dicatat dua kali pada KIB PPAD.
- Tanah sebesar Rp9.740.500.000,00 yang berada di Jalan Kebon Sirih Nomor 79 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

5.3.1.5.4.4.2 Fasos Fasum – Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Fasos Fasum Peralatan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp41.166.740.121,00 dan Rp24.262.249.894,00. Pada Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp48.161.226.164,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp31.256.735.937,00 sebagai berikut.

<u>a. Mutasi Penambahan</u>		
1) Donasi/Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI	Rp	28.402.749.584
2) Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	2.019.222.650
3) Penerimaan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga	Rp	17.739.253.930
Jumlah Penambahan	Rp	48.161.226.164
<u>b. Mutasi Pengurangan</u>		
1) Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	31.256.735.937
Jumlah Pengurangan	Rp	31.256.735.937

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Fasos Fasum Peralatan dan Mesin sebesar Rp48.161.226.164,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp28.402.749.584,00 yang di antaranya berasal dari :
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp11.734.261.074,00 Jetter Combi Besar - Mobil Tangki Air Merk Isuzu tahun pembuatan 2015.
 - Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp10.722.455.202,00 berupa Kapal Motor dengan spesifikasi Main Unit and Front EndInterceptor 001 dan Equipment Interceptor 001;



- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.702.371.323,00 berupa Jetter Combi Besar - Mobil Tangki Air (2015) Merk Isuzu tahun perolehan 2015;
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp545.372.000,00 berupa 85 unit AC Split dengan merk Panasonic type CS-YN7WKJ dan type Wall Mounted Split Standard 3/4 PK -;
 - PT Paiton Energy sebesar Rp481.740.000,00 berupa 2 unit Mobil Golf Listrik dengan spesifikasi Baterai Lithium Garansi 5 Tahun dan Smart Charging 5-6 Jam yang saat ini digunakan di Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan.
- 2) Koreksi kurang catat atas penerimaan aset sebelum Tahun 2024 sebesar Rp2.019.222.650,00 yang di antaranya berasal dari :
- PT. Bangun Mustika Inti Persada sebesar Rp1.875.500.000,00 berupa 4 buah escalator yang berada di Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan'
 - Yayasan Wahana Visi Indonesia sebesar Rp143.722.650,00 berupa peralatan mesin yang berada di RPTRA Vlaboean di Jalan Dermaga Raya Nomor 27 A Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 3) Penerimaan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga sebesar Rp17.739.253.930,00 yang di antaranya berasal dari:
- PT. Asya Mandira Land (Dahulu PT. Astra Modern Land) sebesar Rp12.530.040.685,00 berupa peralatan dan mesin di Revitalisasi Stadion Tugu Tahap Pendahuluan dan Tahap 1 (Pertama) yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Nomor 9 RT 009 RW 004 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. TCP Internusa sebesar Rp5.157.803.245,00 berupa peralatan mesin perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung Gedung PKK Melati Jaya dengan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi (Fisik), Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan KJPP di Jalan Kebagusan Raya Nomor 42 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Wiranusa Grahatama sebesar Rp51.410.000,00 berupa Panel Listrik PHB Induk dan Pembagi yang berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 5 - 7 (-6.222849 106.817195) Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.



b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset F asos F asum Peralatan dan Mesin Rp31.256.735.937,00 merupakan reklasifikasi Aset F asos F asum ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang di antaranya berasal dari :

- PT. Asya Mandira Land (Dahulu PT. Astra Modern Land) sebesar Rp12.530.040.685,00 berupa peralatan dan mesin di Revitalisasi Stadion Tugu Tahap Pendahuluan dan Tahap 1 (Pertama) yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Nomor 9 RT 009 RW 004 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp10.722.455.202,00 berupa Kapal Motor dengan spesifikasi Main Unit and Front End Interceptor 001 dan Equipment Interceptor 001;
- PT. TCP Internusa sebesar Rp5.157.803.245,00 berupa peralatan mesin perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung Gedung PKK Melati Jaya dengan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi (Fisik), Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan KJPP di Jalan Kebagusan Raya Nomor 42 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- PT Metropolitan Land, Tbk sebesar Rp1.007.651.397,00 berupa Pembangunan Fasilitas Publik Pembangunan Peningkatan Fasilitas Rumah Susun (KSD 58) Dengan Ruang Lingkup Program Kebun Kota D (Konstruksi) yang terletak di Rumah Susun Daan Mogot Tower 6 dan 7 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
- PT. Dwibina Prima sebesar Rp567.400.753,00 berupa Pembangunan Fasilitas Publik Pembangunan Peningkatan Fasilitas Rumah Susun (KSD 58) Dengan Ruang Lingkup Program Utama A (Pembangunan Coworking Space, Café, dan Lounge Serta Toilet Dilantai 2) Dan Konsultan Perencana) yang terletak di Rusun Tower Daan Mogot Tower 6 dan 7 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

5.3.1.5.4.4.3 F asos F asum – Gedung dan Bangunan

Saldo Aset F asos F asum Gedung Bangunan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp861.493.462.266,00 dan Rp1.179.931.055.828,00 Pada Tahun 2024 mutasi pertambahan sebesar Rp119.578.144.303,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp438.015.737.865,00 dengan rincian sebagai berikut.



<u>a. Mutasi Penambahan</u>		
1) Donasi / Hibah	Rp	6.459.289.605
2) Penerimaan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga	Rp	105.670.930.969
3) Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	7.447.923.729
Jumlah Penambahan	Rp	119.578.144.303
<u>b. Mutasi Pengurangan</u>		
1) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle)	Rp	150.040.014.670
2) Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	277.117.484.946
3) Reklasifikasi ke PI	Rp	10.858.238.249
Jumlah Pengurangan	Rp	438.015.737.865

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Fasos Fasum Gedung dan Bangunan sebesar Rp119.578.144.303,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.459.289.605,00 yang di antaranya berasal dari :
 - Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp5.250.856.311,00 berupa Konstruksi Taman Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) di Jalan Pattimura Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT MRT Jakarta (Perseroda) sebesar Rp946.202.094,00 berupa Rehabilitasi Gudang penyimpanan arkeologi yang berada di Jalan Tongkol Nomor 5 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - Ketua RW 014 Kelurahan Semper Barat - Musafir Maddamang sebesar Rp262.231.200,00 berupa Gedung bangunan Balai Warga yang berada di Jalan Lorong F Nomor 21 A Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 2) Penerimaan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga sebesar Rp105.670.930.969,00 di antaranya:
 - PT. Asya Mandira Land (Dahulu PT. Astra Modern Land) sebesar Rp53.687.544.859,00 berupa Revitalisasi Stadion Tugu Tahap 1 yang berada di Pegangsaan Dua Nomor 9 RT 09 RW 04 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp11.353.857.295,00 berupa Konstruksi Jalur Hijau yang berada di Perumahan Pantai



Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;

- PT. Mitra Sindo Sukses sebesar Rp9.472.708.600,00 berupa Konstruksi Sarana Pendidikan an Konstruksi Sarana Ibadah yang terletak di Jalan Kayu Tinggi Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - PT. Mitra Sindo Makmur sebesar Rp7.631.199.195,00 berupa Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya GPIB Jemaat Koinonia yang berada di Jalan Matraman Raya Nomor 216 Kelurahan Balimester Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - PT. Metropolitan Land, Tbk sebesar Rp6.951.100.000,00 berupa Konstruksi Sarana Sosial Ibadah (Masjid) yang berada di Perumahan Metland Menteng Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.
- 3) Koreksi kurang catat atas penerimaan aset sebelum Tahun 2024 sebesar Rp7.447.923.729,00 yang di antaranya berasal dari
- PT. Candrasa Pranaguna sebesar Rp5.502.538.249,00 berupa Bangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang berada di Perumahan Citra Garden City Blok Bl.12 Citra 2 Ext Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - Yayasan Wahana Visi Indonesia sebesar Rp1.341.485.480,00 berupa bangunan gedung yang berada di RPTRA Vlaboean di Jalan Dermaga Raya Nomor 27 A Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - PT. Bangun Mustika Inti Persada sebesar Rp603.900.000,00 berupa Halte Busway Koridor 13 (Nilai Dikapitalisasi) yang berada di Halte Cipulir - Jalan Ciledug Raya Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Fasos Fasum Gedung dan Bangunan sebesar Rp438.015.737.865,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle) sebesar Rp.150.040.014.670,00 di antaranya :
- Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp.133.430.569.000,00 yang berada di Jalan Raya PKP, RT.1/RW.8 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur;



- Bangunan Gedung Kantor Permanan sebesar Rp9.172.478.115,00 yang berada di Jalan Raya PKP, RT.1/RW.8 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - Bangunan Gedung sebesar Rp5.516.667.545,00 yaitu berupa 16 bangunan gedung yang berada di Rutan Pondok Bambu - Jalan Pahlawan Revolusi No.38, RT.4/RW.3, Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - Bangunan Gedung Tertutup Permanen sebesar Rp1.464.000.000,00 yang berada di Jalan Kerapu Nomor 5 (Tongkol) Pasar Ikan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen sebesar Rp456.300.000,00 yang berada di Jalan Letnan Jenderal MT. Haryono Kavling 52-53 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp277.117.484.946,00 yang di antaranya berasal dari :
- PT. Cahaya Lestari Sentosa sebesar Rp97.059.600.000,00 berupa Konstruksi Waduk yang berada di Perumahan Duta Mas Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Duta Pertiwi sebesar Rp62.789.351.726,00 berupa Rumah Susun Bagi Warga Eks Kampung Bukit Duri yang berada di Jalan Kav DPR (Kampung Pulo Jahe) PIK Pulogadung Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - PT. Asya Mandira Land (Dahulu PT. Astra Modern Land) sebesar Rp53.687.544.859,00 berupa Revitalisasi Stadion Tugu Tahap 1 yang berada di Pegangsaan Dua Nomor 9 RT 09 RW 04 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT Karyabangun Nusantara sebesar Rp17.040.641.987,00 berupa Pembangunan Rumah Susun bagi Warga Eks Kampung Kunir (Bangunan Rumah Susun) yang berada di Jalan Kemukus Nomor 2 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - Gedung Bangunan Pemerintah - Gedung Pinjam Pakai Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.445.055.000,00 yang berada di Jl. Taman Jati Baru No.1 RT.17/RW.1 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat;



3) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke PI sebesar Rp10.858.238.249,00 di antaranya berasal dari:

- PT. Candrasa Pranaguna sebesar Rp5.502.538.249,00 berupa Bangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang berada di Perumahan Citra Garden City Blok Bl.12 Citra 2 Ext Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Yayasan Al-Ikhwan Meruya sebesar Rp5.355.700.000,00 berupa Bangunan Masjid Al-Ikhwan Meruya Beserta Fasilitas (Kantor Pendopo Tempat Wudhu Sekolah TK) yang berada di Taman Meruya Ilir Blok F 1 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat;

5.3.1.5.4.4.4 Fasos Fasum – Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Aset Fasos Fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.716.259.649.900,00 dan Rp1.727.587.288.654,00. Pada Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp586.655.544.264,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp597.983.183.018,00 dengan rincian sebagai berikut.

<u>a. Mutasi Penambahan</u>		
1) Penerimaan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga	Rp	449.483.418.802
2) Donasi/Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	137.172.125.462
Jumlah Penambahan	Rp	586.655.544.264
<u>b. Mutasi Pengurangan</u>		
1) Reklasifikasi Menjadi Aset Tetap JIJ	Rp	597.983.183.018
Jumlah Pengurangan	Rp	597.983.183.018

a. Mutasi Penambahan

- 1) Penambahan aset fasos fasum Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp449.483.418.802,00 merupakan Penerimaan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga yang di antaranya berasal dari:
 - PT. Cakradigdaya Lokaraya sebesar Rp99.529.500.000,00 berupa Konstruksi Prasarana Jalan yang berada di Jalan Peta Barat Komplek Citra 8 Citra Garden City Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp51.970.169.000,00 berupa Konstruksi Jalan, Konstruksi Saluran, dan Konstruksi Koker yang berada di Perumahan Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;



- PT. Mandiri Eka Abadi sebesar Rp50.710.926.071,00 berupa Penataan Kawasan Kota Tua (Jalan Kemukus dan Jalan Lada Dalam) yang berada di Jalan Kemukus dan Jalan Lada Dalam Kelurahan Pinangisia Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Summarecon Agung Tbk sebesar Rp43.171.529.957,00 berupa Konstruksi Marga Drainase (Saluran), dan Konstruksi Marga Jalan (Berm) yang berada di Jalan Boulevard Raya (sisi Barat Timur Utara Selatan) - Jalan Kelapa Nias dan Jalan Kelapa Hybrida Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Aruna Kirana sebesar Rp39.070.131.002,00 berupa Penataan Kawasan Kota Tua Dengan Ruang Lingkup Jalan Lada dan Jalan Kali Besar Timur yang berada di Jalan Lada dan Jalan Kalibesar Timur Kelurahan Pinangisia Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 2) Penambahan aset fasos fasum Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp137.172.125.462,00 merupakan Donasi/Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta yang di antaranya berasal dari:
- PT Paiton Energy sebesar Rp146.520.000,00 berupa Instalasi Pembangkit Listrik tenaga Surya di SMKN 54 Jakarta yang berada di Jalan Bendungan Jago No.53, RT.5/RW.3, Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp137.025.605.462,00 berupa Pembangunan Stasiun Pompa Pasar Ikan - Jl. Kerapu 1, RT.1/RW.8 (Tahun 2012), Pembangunan Stasiun Pompa Wijaya Kusuma - Jl. Pangeran Tubagus Angke, RT.8/RW.4, (Tahun 2013), Pembangunan IPAL Setiabudi - Jl. HOS. Cokroaminoto No.14, RT.14/RW.6 (Tahun 2013), dan Pekerjaan Renovasi Pedestrian / Trotoar dan Saluran Drainase - Jl. Pattimura No.20, RT.4/RW.1, Jl. Pattimura No.20, RT.4/RW.1, (Tahun 2021).

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Fasos Fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp597.983.183.018,00 merupakan Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan di antaranya:

- PT. Mitra Panca Persada sebesar Rp336.377.200.000,00 berupa Simpang Susun Semanggi yang berada di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- PT. Cakradigdaya Lokaraya sebesar Rp99.529.500.000,00 berupa Konstruksi Prasarana Jalan yang berada di Jalan Peta Barat Komplek



Citra 8 Citra Garden City Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;

- PT. Summarecon Agung Tbk sebesar Rp43.171.529.957,00 berupa Konstruksi Marga Drainase (Saluran), dan Konstruksi Marga Jalan (Berm) yang berada di Jalan Boulevard Raya (sisi Barat Timur Utara Selatan) - Jalan Kelapa Nias dan Jalan Kelapa Hybrida Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
- PT. Summarecon Agung Tbk sebesar Rp24.803.200.000,00 berupa Konstruksi Marga Drainase (Saluran), dan Konstruksi Marga Jalan (Berm) yang berada di Perumahan RW 12 , RW 06, RW 11, RW 15 , dan RW 18 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
- PT. Summarecon Agung Tbk sebesar Rp13.257.200.000,00 berupa Konstruksi Marga Jalan (Badan Jalan), Konstruksi Marga Drainase (Saluran), dan Konstruksi Marga Jalan (Berm) yang berada di Perumahan RW 14 17 18 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.

5.3.1.5.4.4.5 Fasos Fasum – Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Fasos Fasum Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.494.026.915,00 dan Rp17.142.185.754,00. Pada Tahun 2024 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp53.020.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp701.178.839,00 rinciannya sebagai berikut

<u>a. Mutasi Penambahan</u>		
1) Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	28.860.000
2) Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	24.160.000
Jumlah Penambahan	Rp	53.020.000
<u>b. Mutasi Pengurangan</u>		
1) Reklasifikasi Menjadi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya	Rp	701.178.839
Jumlah Pengurangan	Rp	701.178.839

a. Mutasi Penambahan

- 1) Penambahan Aset Fasos Fasum Aset Tetap Lainnya sebesar Rp28.860.000,00 merupakan Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta berasal dari Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp28.860.000,00 berupa Pembuatan Maket Taman ASEAN (Skala Maket Studio) yang berada di Taman Pekerjaan Umum dan Tenaga



Listrik (PUTL) Jalan Pattimura Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- 2) Penambahan Aset Fasos Fasum Aset Tetap Lainnya sebesar Rp24.160.000,00 merupakan koreksi kurang catat atas penerimaan aset sebelum Tahun 2024 berasal dari Yayasan Wahana Visi Indonesia sebesar Rp24.160.000,00 berupa aset tetap lainnya yang berada di RPTRA Vlaboean di Jalan Dermaga Raya Nomor 27 A Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Fasos Fasum Aset Tetap Lainnya sebesar Rp701.178.839,00 seluruhnya merupakan reklasifikasi menjadi Aset Tetap yang di antaranya berasal dari:

- PT Metropolitan Land, Tbk sebesar Rp677.018.839,00 dalam rangka Pembangunan Fasilitas Publik Pembangunan Peningkatan Fasilitas Rumah Susun (KSD 58) Dengan Ruang Lingkup Program Kebun Kota D (Konstruksi) yang terletak di Rumah Susun Daan Mogot Tower 6 dan 7 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Yayasan Wahana Visi Indonesia sebesar Rp24.160.000,00 berupa Aset Tetap Lainnya yang berada di RPTRA Vlaboean di Jalan Dermaga Raya Nomor 27 A Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.

Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Fasos Fasum per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.051.770.742.962,00 dan Rp2.193.154.079.554,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83

Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Aset Tetap Fasos Fasum	31 Desember 2023	31 Desember 2024		
	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	(21.058.533.165)	(18.301.909.801)	(358.790.812)	(39.001.652.154)
Gedung dan Bangunan	(813.782.078.036)	(24.622.874.933)	(171.889.922.731)	(666.515.030.238)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.342.850.407.298)	(110.564.333.079)	(107.166.451.805)	(1.346.248.288.572)
Aset Tetap Lainnya	(15.463.061.055)	(5.868.000)	(15.463.157.057)	(5.771.998)
Jumlah	(2.193.154.079.554)	(153.494.985.813)	(294.878.322.405)	(2.051.770.742.962)



Nilai buku Aset Tetap Fasos Fasum per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.329.120.451.307,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84

Nilai Buku Aset Fasos Fasum
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Aset Tetap Fasos Fasum	31 Desember 2024		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	19.745.477.315.067	-	19.745.477.315.067
Peralatan dan Mesin	41.166.740.121	(39.001.652.154)	2.165.087.967
Gedung dan Bangunan	861.493.462.266	(666.515.030.238)	194.978.432.028
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.716.259.649.900	(1.346.248.288.572)	370.011.361.328
Aset Tetap Lainnya	16.494.026.915	(5.771.998)	16.488.254.917
Jumlah	22.380.891.194.269	(2.051.770.742.962)	20.329.120.451.307

5.3.1.5.4.5 Kas yang Dikonsinyasikan

Kas yang Dikonsinyasikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.168.628.752,00,00 dan Rp27.413.446.297,00. Saldo Kas yang Dikonsinyasikan sebesar Rp2.168.628.752,00,00 terdapat pada Dinas Perhubungan yang merupakan ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Fase 2 yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebesar Rp2.168.628.752,00.

5.3.1.5.4.6 Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) merupakan nilai aset yang diterima atas pelampauan KLB/KDB yang belum diterbitkan SK Penggunaannya.

Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp548.652.428.827,00 dan Rp573.280.906.692,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.85

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	46.370.625.000	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	1.022.307.620	0	0	1.022.307.622
3	Gedung dan Bangunan	327.826.135.885	922.915.825	0	328.749.051.710
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	197.967.388.187	20.819.231.308	0	218.786.619.495



No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5	Aset Tetap Lainnya	94.450.000	0	0	94.450.000
Total		573.280.906.692	21.742.147.133	0	548.652.428.827

Penjelasan atas rincian mutasi tambah aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB adalah sebagai berikut:

Penyelesaian kewajiban pemenuhan denda Koefisien Lantai Bangunan sebesar Rp21.742.147.133,00 berasal dari:

- PT. Singapropertindo Haryono sebesar Rp922.915.825,00 berupa Perbaikan Interior Jakarta Creative Hub (Co-Working Space) Beserta Fasilitas Pendukungnya pada Gedung Jakarta UKM Center Promosi Waduk Melati, Pekerjaan Tata Pamer Museum Sejarah Jakarta (Pekerjaan di Bangunan Utama) , dan Pekerjaan di Pintu Masuk Alternatif di Bangunan Etnografi Museum Sejarah Jakarta;
- PT. Kepland Investama sebesar Rp20.819.231.308,00 berupa Hasil Revitalisasi Taman Kota Tebet untuk pekerjaan Perimeter Trotoar, Pekerjaan Penanaman dan Pekerjaan Penyempurnaan berlokasi di Taman Kota Tebet Kelurahan Tebet Barat dan Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)

Saldo akumulasi penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2024 sebesar Rp112.078.627.721,00.

Nilai Buku untuk Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	:	Rp 548.652.428.827,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp 112.078.627.721,00
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2024	:	Rp 436.573.801.106,00

5.3.1.5.4.7 Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Aset dalam proses penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) merupakan Barang Milik Daerah yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan antara lain berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2018, 2023, dan 2024. Saldo aset dalam proses penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.055.700.858.515,00 dan Rp4.475.775.978.273,00. Selama Tahun 2024



mutasi pertambahan sebesar Rp1.579.984.130.566,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp 59.250.324,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan			
1)	Reklasifikasi Antar Aset Lainnya	Rp	51.590.000,00
2)	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	Rp	1.579.932.540.566,00
Jumlah Penambahan		Rp	1.579.984.130.566,00
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap	Rp	59.250.324,00

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) dari Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp1.579.984.130.566,00 terdiri dari :

1. Penambahan Reklasifikasi dari Aset Lainnya berupa software komputer sebesar Rp51.590.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Penambahan Reklasifikasi Ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp1.579.932.540.566,00, di antaranya:
 - Suction dredger, stationary water pump, mobil tangki air, global positioning system, concrete vibrator, sumersible pump, alat pengukur curah hujan, dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total Rp395.184.091.884,00
 - Toolkit set, lemari penyimpanan, lemari besi/metal, rak kayu, filling cabinet besi, lemari kaca, papan pengumuman dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total Rp153.688.731.436,00
 - Transistor Tester Semitest I, Overhead Projector, Wireless, Televisi, Stabilisator, Megaphone, Closed Circuit Television (CCTV), Switch dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total Rp99.993.089.836,00.
 - Server, screen pembaras, alat khusus keamanan lainnya, NComputing, buffet kaca, home theater, PC workstation dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dengan total Rp92.308.232.319,00; dan
 - Pemadat sampah, tool kit set lemari penyimpanan, lemari besi/metal, rak kayu, filling cabinet besi, lemari kaca, lemari kayu dan peralatan



mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total Rp78.539.376.032,00.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset menjadi Aset Tetap berupa kendaraan dinas operasional sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor sebesar Rp59.250.324,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 46 Tahun 2023 tentang penghapusan Barang Milik Daerah pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur.

Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Status Aset (MPSA)

Saldo akumulasi penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.031.268.442.581,00 merupakan akumulasi penyusutan saat dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap.

Nilai Buku untuk Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	:	Rp6.055.700.858.515,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp(3.031.268.442.581,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2024	:	Rp3.024.432.415.934,00

5.3.1.5.4.8 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan akun Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya untuk pengakuan atas Kerugian Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah, terdapat 3 kategori Akuntansi Kerugian Negara/Daerah sebagai berikut:

- Kerugian Negara/Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara,
- Kerugian Negara/Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara,
- Kerugian Negara/Daerah Berdasarkan Putusan Pengadilan.



Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp10.697.454.729,00 dan Rp10.697.454.729,00. Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Kategori		Nilai (Rp)
a.	Kasus Kerugian Daerah dalam Proses	Rp	6.973.458.546
b.	Informasi Kerugian Daerah - LHP BPK	Rp	3.605.265.130
c.	Kasus Kas Operasional BLUD Belum Dipertanggungjawabkan pada Puskesmas Tanah Abang	Rp	108.531.053
d.	Kasus Kehilangan KDO pada Sudin Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Utara	Rp	10.200.000
	Jumlah	Rp	10.697.454.729

Saldo Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 belum termasuk kerugian terkait Aset Tetap dan kerugian pada pihak ketiga dengan nilai Rp537.202.435.699,00. Kerugian tersebut sedang dalam proses rekonsiliasi dengan data Aset Tetap. Rincian atas kerugian terkait Aset Tetap dan kerugian pada pihak ketiga sebagai berikut.

No	Kategori	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Kasus Kerugian Daerah dalam Proses	Aset Tetap	87.825.000
b.	Informasi Kerugian Daerah - LHP BPK	Pihak Ketiga	471.962.069.890
c.	Informasi Kerugian Daerah - LHP APIP	Aset Tetap	103.651.679
	Jumlah	Pihak Ketiga	65.048.889.130
			537.202.435.699

5.3.1.5.4.9 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.481.878.536.635,00 dan Rp5.852.769.750.279,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kategori		Nilai
a	Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp	3.978.745.231.361,00
b	RPBATA (Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun Anggaran)	Rp	287.254.844.083,00
c	Bantuan Sosial	Rp	200.839.374.330,00
d	Hak Pihak Ketiga	Rp	15.021.154.181,00
e	Dana yang masih dalam proses identifikasi kepemilikannya	Rp	17.932.680,00
	Jumlah	Rp	4.481.878.536.635,00

a. *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Bagi Hasil secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.08/2022 dengan mutasi sebagai berikut:



Saldo awal Tahun 2024	Rp	5.635.471.860.000,00
• Penambahan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan KMK 44 Tahun 2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH Pada Tahun 2024 yang penyalurannya dilakukan dalam bentuk non tunai	Rp	727.840.687.000,00
• Pengurang alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan KMK 44 Tahun 2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH Pada Tahun 2024 yang penyalurannya dilakukan dalam bentuk non tunai	Rp	(3.034.835.000,00)
• Penyaluran pada tanggal 25 Maret 2024 dari rekening TDF ke RKUD berdasarkan KMK Nomor 164 Tahun 2024 Tanggal 22 Maret 2024 Tentang Penarikan Dana <i>Treasury Deposit Facility</i> Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (yaitu THR)	Rp	(1.189.691.682.627,00)
• Penyaluran pada tanggal 12 Juni 2024 dari rekening TDF ke RKUD berdasarkan KMK Nomor 267 Tahun 2024 Tanggal 6 Juni 2024 Tentang Penarikan Dana <i>Treasury Deposit Facility</i> Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Gaji Ketiga Belas Di Daerah Tahun Anggaran 2024	Rp	(1.191.840.798.012,00)
Saldo akhir Tahun 2024	Rp	3.978.745.231.361,00

b. RPBATA (Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun Anggaran)

1) Penjelasan RPBATA

Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 31/SE/2024 tentang Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2024, Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun Anggaran adalah rekening khusus milik BUD untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan SPM sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2024 dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran 2024 dan diberi kesempatan untuk dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2025.

Berikut penjelasan singkat mengenai mekanisme pembayaran pekerjaan kontraktual dengan RPBATA:

- a) SKPD mengajukan SPM-LS Kontraktual kepada SBPKD selaku Kuasa BUD di antara batas akhir pengajuan SPM sampai dengan



31 Desember 2024 dengan menghitung sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sebagai dasar perhitungan potongan jaminan pembayaran melalui RPBATA;

- b) atas sisa pekerjaan yang belum terselesaikan tersebut dihitung sebagai nilai potongan jaminan pembayaran dalam potongan SPM-LS Kontraktual;
- c) potongan jaminan pembayaran dalam potongan SPM-LS Kontraktual ditampung dalam RPBATA yang dikelola oleh SBPKD selaku Kuasa BUD sesuai lingkup wilayah kerja;
- d) SKPD mengajukan Surat Permintaan Pencairan Uang Jaminan sesuai dengan BAST pekerjaan;
- e) Kuasa BUD melakukan pemindahbukuan ke:

(1) Penyedia

- Kontrak Harga Satuan:
Pemindahbukuan sebesar bobot pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia.
- Kontrak Termin:
Pemindahbukuan sebesar nilai termin yang telah diselesaikan oleh penyedia.

(2) RKUD

Pemindahbukuan sebesar bobot/ termin yang tidak dapat diselesaikan oleh penyedia.

2) **Saldo RPBATA Per 31 Desember 2024**

Saldo RPBATA per 31 Desember 2024 sebesar Rp 287.254.844.083,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Penampungan potongan jaminan pembayaran ke RPBATA	Rp	299.362.569.753,00
Pemindahbukuan ke pihak penyedia di Tahun 2024	Rp	(12.107.725.670,00)
Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024	Rp	287.254.844.083,00

a) Posisi Saldo RPBATA per 31 Desember 2024

Pengusulan SPM-LS Kontraktual dengan potongan jaminan pembayaran RPBATA dilakukan di SBPKD selaku Kuasa BUD sesuai lingkup wilayah kerja. Berikut posisi saldo potongan jaminan pembayaran per 31 Desember 2024.

Nama Rekening	No Rekening Bank DKI	Saldo 31 Des 2024
RKPBATA SBPKD Jakarta Pusat	11152800212	136.010.480.200,00
RKPBATA SBPKD Jakarta Utara	20152800220	15.400.479.584,00



RKPBATA SBPKD Jakarta Barat	30352800231	4.891.602.712,00
RKPBATA SBPKD Jakarta Selatan	40452800243	13.960.993.986,00
RKPBATA SBPKD Jakarta Timur	50352800250	116.991.287.601,00
Jumlah		287.254.844.083,00

b) Posisi Pekerjaan menggunakan RPBATA

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya di RPBATA atas penyelesaian pekerjaan kontraktual akhir tahun pada 16 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	121.145.021.884,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39.005.328.999,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	18.853.050.000,00
4	Dinas Sumber Daya Air	16.893.201.840,00
5	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	16.326.683.559,00
6	Dinas Kesehatan	13.131.730.326,00
7	Badan Kepegawaian Daerah	13.040.461.637,00
8	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	10.305.116.086,00
9	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	8.229.343.009,00
10	Inspektorat	7.597.280.000,00
11	Dinas Sosial	6.894.703.021,00
12	Dinas Perhubungan	5.303.133.852,00
13	Badan Pendapatan Daerah	5.119.087.134,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.706.773.294,00
15	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	1.397.376.442,00
16	Sekretariat DPRD	306.553.000,00
Jumlah		287.254.844.083,00

Penjelasan atas pekerjaan dengan RPBATA per 31 Desember 2024 di antaranya:

- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp121.145.021.884,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai (Rp)
<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>		
1	Pengadaan KDO khusus	48.046.332.950,00
2	Pengadaan alat laboratorium untuk pemantauan dan pemulihan kualitas udara	38.480.000.000,00
3	Rehabilitasi Gedung Dinas Lingkungan Hidup	8.231.679.460,00
4	Penyusunan kajian dan kebijakan pengolahan sampah	2.057.540.400,00
5	Penyusunan kajian dan kebijakan teknis penanganan sampah	1.755.548.250,00
6	Penyusunan kajian dan kebijakan pengelolaan Sampah	358.724.250,00
7	Sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	235.000.000,00
<i>Jumlah Dinas Lingkungan Hidup</i>		<i>99.164.825.310,00</i>
<i>Unit Penanganan Sampah Badan Air</i>		
1	Pembangunan fasilitas pendukung Saringan Sampah TB. Simatupang	9.524.210.390,00



2	Pengadaan penunjang penanganan sampah	3.309.420.600,00
	<i>Jumlah Unit Penanganan Sampah Badan Air</i>	<i>12.833.630.990,00</i>
	<i>Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara</i>	
1	Peningkatan TPS menjadi TPS 3R	4.529.073.570,00
	<i>Jumlah Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara</i>	<i>4.529.073.570,00</i>
	<i>Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur</i>	
1	Peningkatan TPS menjadi TPS 3R	3.153.742.014,00
	<i>Jumlah Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur</i>	<i>3.153.742.014,00</i>
	<i>Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	
1	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1.463.750.000,00
	<i>Jumlah Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>1.463.750.000,00</i>
	Jumlah	121.145.021.884,00

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk pembangunan rumah susun Jagakarsa – Jakarta Selatan sebesar Rp39.005.328.999,00;
- Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp18.853.050.000,00 dengan rincian untuk pengadaan seragam kerja Satpol PP sebesar Rp18.283.770.000,00 dan pengadaan alat kelengkapan/ atribut lapangan (*multi tactical tools*) sebesar Rp569.280.000,00;
- Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp16.893.201.840,00 dengan rincian Dinas Sumber Daya Air untuk pembangunan Waduk Marunda dan bangunan kelengkapannya di pesisir Jakarta sebesar Rp12.432.186.006,00 dan pengadaan alat monitoring penurunan tanah dan pengembangan kawasan pesisir pantai sebesar Rp3.230.318.122,00 serta Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Pembangunan Saluran, Saluran PHB dan kelengkapannya sebesar Rp1.230.697.712,00; dan
- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp16.326.683.559,00 dengan rincian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk penyelenggaraan Festival Malam Tahun Baru sebesar Rp12.665.778.559,00 dan Unit Pengelola Kawasan Kota Tua untuk penyelenggaraan *Jakarta Lights Festival* sebesar Rp3.660.905.000,00.

3) Penyelesaian RPBATA

Atas pekerjaan yang mendapatkan kesempatan penyelesaian melewati periode pelaporan sebesar Rp287.254.844.083,00, mekanisme pemindahbukuan sampai dengan tanggal 7 Januari 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Penyelesaian RPBATA	Penyedia	RKUD	Total
• Pemindahbukuan penuh ke penyedia	258.099.239.034,00	0	258.099.239.034,00
• Pemindahbukuan sebagian ke penyedia dan sebagian ke RKUD	21.148.819.817,00	2.909.190.397,00	24.058.010.214,00
• Pemindahbukuan penuh ke RKUD	0	5.097.594.835,00	5.097.594.835,00
Jumlah	279.248.058.851,00	8.006.785.232,00	287.254.844.083,00

- a) Pemindahbukuan dari RPBATA ke penyedia sepenuhnya
Pemindahbukuan sebesar Rp258.099.239.034,00 ke penyedia atas sisa pekerjaan yang dapat diselesaikan seluruhnya di antaranya terdapat pada:
- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp98.622.755.310,00 atas semua pekerjaan kecuali 2 kontrak pengadaan KDO khusus; dan
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp39.005.328.999,00 untuk pembangunan rumah susun Jagakarsa – Jakarta Selatan.
- b) Pemindahbukuan dari RPBATA sebagian ke penyedia dan sebagian ke RKUD
Pemindahbukuan sebesar Rp21.148.819.817,00 ke penyedia atas sisa pekerjaan dengan kontrak harga satuan yang telah diselesaikan dan pemindahbukuan ke RKUD sebesar Rp2.909.190.397,00 di antaranya terdapat pada:
- Badan Kepegawaian Daerah atas pengadaan mebel dalam rangka renovasi ruang kerja, pemindahbukuan sebesar Rp9.658.015.299,00 ke penyedia dan sebesar Rp951.307.644,00 ke RKUD.
 - Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah atas pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemindahbukuan sebesar Rp6.941.657.949,00 ke penyedia dan sebesar Rp896.091.403,00.
- c) Pemindahbukuan dari RPBATA ke RKUD sepenuhnya
Pemindahbukuan sebesar Rp5.097.594.835,00 ke RKUD atas pekerjaan dengan kontrak termin yang tidak dapat diselesaikan di antaranya terdapat pada:
- Dinas Sumber Daya Air atas pengadaan alat monitoring penurunan tanah dan pengembangan kawasan pesisir pantai sebesar Rp3.230.318.122,00;
 - Dinas Sosial atas pembuatan *Detail Engineering Design* (DED) dan rehab berat gedung panti sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4 Ciracas sebesar Rp1.179.501.288,00.



c. Bantuan Sosial

Saldo rekening khusus pada Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan merupakan dana bantuan sosial yang akan disalurkan ke penerima pada tahun anggaran berikutnya sebesar Rp200.839.374.330,00 dengan rincian sebagai berikut.

1.	KJP Plus TA 2023	Rp	9.042.835.200,00
2.	KJP Plus TA 2024	Rp	154.978.743.130,00
3.	KJMU TA 2024	Rp	27.333.000.000,00
4.	BPMS TA 2024	Rp	9.424.796.000,00
5.	Beasiswa Anak Nakes TA 2024	Rp	60.000.000,00
Jumlah		Rp	200.839.374.330,00

d. Hak Pihak Ketiga

Hak pihak ketiga yang masih ada di rekening per 31 Desember 2024 dan akan dikembalikan sebesar Rp15.021.154.181,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Saldo rekening khusus pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.484.107.833,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) sebesar Rp7.699.352.973,00 berupa Uang Titipan Sewa Rumah ber-SIP yang di mana rumah tersebut merupakan rumah milik warga negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat kemerdekaan dan tidak berpenghuni saat itu. Sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemakaian suatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih dahulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Sosial”. Selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - b) sebesar Rp784.754.860,00 berupa Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa yang merupakan uang yang dititipkan oleh pemilik sah rumah kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diperuntukkan sebagai kompensasi atas pengosongan rumah kepada penyewa.
- 2) Saldo rekening khusus pada Unit Pengelola Perpustakaan sebesar Rp3.869.544.020,00 merupakan uang jaminan pihak ke 3 dalam rangka



Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan perparkiran. Per 31 Desember 2024, terdapat 73 Perusahaan yang melakukan pengikatan kerja sama dengan UP Perparkiran. Saldo ini masih terdapat uang jaminan lebih setor sebesar Rp24.324.999,00 dan uang jaminan belum dicairkan sehubungan dengan telah berakhir masa kontraknya sebesar Rp351.200.000,00.

- 3) Saldo rekening khusus pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.504.261.554,00 merupakan uang jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan pajak hiburan insidental.
- 4) Saldo rekening khusus pada Dinas Pendidikan sebesar Rp107.270.270,00 merupakan dana untuk pembayaran ke PT Avant Solusi Servispro atas jasa sewa mesin fotocopy periode Oktober 2024 – Desember 2024.
- 5) Saldo rekening khusus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp55.970.504,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) sebesar Rp43.562.242,00 pada rekening khusus pajak di bank CIMB Niaga atas kelebihan transfer yang belum diretur ke wajib pajak;
 - b) sebesar Rp9.515.707,00 pada rekening khusus pajak di BRI atas kelebihan transfer yang belum diretur ke wajib pajak;
 - c) sebesar Rp1.591.487,00 pada rekening khusus pajak di Bank Mandiri atas pembayaran ganda yang belum diretur ke wajib pajak; dan
 - d) sebesar Rp1.301.068,00 merupakan jasa giro rekening penerima hibah milik BPSK yang tertarik oleh BUD.

e. Dana yang masih dalam proses identifikasi kepemilikannya

Saldo rekening khusus per 31 Desember 2024 yang masih dalam proses identifikasi kepemilikannya sebesar Rp17.932.680,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Sebesar Rp16.063.067,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a) pada Rekening Khusus Penerimaan Pajak nomor 0019-01-001755-30-2 di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk sebesar Rp10.774.004,00;
 - b) pada Rekening Khusus Penerimaan Pajak nomor 0018-01-004391-30-7 di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk sebesar Rp5.282.046,00; dan
 - c) pada Rekening Khusus Pajak Daerah nomor 104-00-22062017 di PT Bank Mandiri, Tbk sebesar Rp7.017,00.



2) Sebesar Rp1.869.613,00 pada Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

- a) pada rekening BOS Sekolah Dasar Negeri merupakan penerimaan lain-lain pada SDN Rawa Badak Selatan 07 sebesar Rp50.000,00 dan kelebihan pengembalian saldo rekanan pada SDN Pademangan Barat 09 Pagi Jakarta sebesar Rp600,00;
- b) pada Rekening PKBM Negeri sebesar Rp1.500.000,00 merupakan saldo peng-nonaktifan rekening sekolah (rekening *dormant*) agar rekening tersebut tidak mati yang terdapat di tiga belas jenjang PKBM Negeri dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenjang	Nilai (Rp)
1	PKBM Negeri 23	100.000
2	PKBM Negeri 08	50.000
3	PKBM Negeri 11	150.000
4	PKBM Negeri 10	100.000
5	PKBM Negeri 25	100.000
6	PKBM Negeri 35	50.000
7	PKBM Negeri 33	50.000
8	PKBM Negeri 13	100.000
9	PKBM Negeri 22	250.000
10	PKBM Negeri 38	150.000
11	PKBM Negeri 30	150.000
12	PKBM Negeri 06	150.000
13	PKBM Negeri 37	100.000
Jumlah		1.500.000

- c) pada Rekening TPA Negeri Bina Tunas Jaya X sebesar Rp4.610,00 merupakan penerimaan lain-lain yang terdapat di satu jenjang TPA Negeri; dan
- d) pada Rekening TK Negeri sebesar Rp314.403,00 merupakan pembelian cek yang menggunakan dana sendiri yang disetor ke rekening TK yang terdapat di tiga TK Negeri dengan rincian di bawah ini.

No	Jenjang	Nilai (Rp)
1	TK Negeri Pulau Kelapa 01	214.403
2	TK Negeri Pulau Kelapa 01	50.000
3	TK Negeri Cilincing 01	50.000
Jumlah		314.403

5.3.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp18.006.116.758.451,00 dan Rp17.426.015.191.033,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.86
Kewajiban
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	4.023.225.107.246	4.263.242.971.187
2.	Kewajiban Jangka Panjang	13.982.891.651.205	13.162.772.219.846
JUMLAH		18.006.116.758.451	17.426.015.191.033

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.023.225.107.246,00 dan Rp4.263.242.971.187,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.87
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.615.238.139	652.047.503
2.	Utang Bunga Pinjaman	15.646.130.966	14.739.619.252
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.981.669.834.064	1.861.669.834.064
4.	Pendapatan Diterima Di muka	221.835.170.345	216.488.454.965
5.	Utang Belanja	1.780.943.311.694	2.147.127.573.272
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	15.141.616.464	16.377.359.980
7.	Utang Jaminan	6.373.805.574	6.188.082.151
Jumlah		4.023.225.107.246	4.263.242.971.187

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.615.238.139,00 dan Rp652.047.503,00. Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak seperti PPN, Pajak Penghasilan, atau pungutan lainnya. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.88
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2024 (Rp)		31 Desember 2023 (Rp)	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
A.	Utang PFK Pajak				
1.	Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD	242.071.200	136.199.339	242.071.200	10.127.516



No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2024 (Rp)		31 Desember 2023 (Rp)	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
2.	Utang PPh 21 Dana BLUD	0	7.358.272	0	4.236.597
3.	Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD	0	806.207	0	0
4.	Utang PPh 22 Dana BLUD	0	85.338.007	0	9.407.912
5.	Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD	0	3.055.388	0	3.731.557
6.	Utang PPh 23 Dana BLUD	0	29.745.099	0	17.412.406
7.	Utang PPN di SKPD dan PPKD	0	53.760.134	0	136.394.402
8.	Utang PPN Dana BLUD	0	818.976.945	0	92.612.382
B. Utang Asuransi					
11.	Utang BPJS Kesehatan	0	114.822.685	0	111.955.006
12.	Utang BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	22.947.025
C. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lain-Lain					
13.	Utang PFK Lainnya	0	123.104.863	0	1.151.500
	Jumlah	242.071.200	1.373.166.939	242.071.200	409.976.303
	Jumlah Utang PFK	1.615.238.139		652.047.503	

Secara lebih rinci Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di BPKD, SKPD, dan BLUD

Utang PFK Tahun 2024 merupakan keseluruhan potongan atau pungutan yang dilakukan oleh BUD, bendahara SKPD dan Bendahara BLUD yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetorkan kepada pihak yang berhak. Utang PFK tersebut terdiri dari:

1) Utang PFK Pajak di BPKD

Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK Pajak di BPKD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp242.071.200,00. Utang PFK Pajak di BPKD tersebut merupakan utang PPH Pusat. Hal tersebut merupakan kasus tuntutan perbendaharaan bendahara pengeluaran di Walikota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2009. Surat pembebanan Sementara untuk kasus kerugian ini telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1212 Tahun 2014 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara atas Nama Febuardianto, S.E. NIP 197102261998031009 Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat. Berdasarkan hasil Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) kasus tersebut tidak dapat ditindak lanjuti.

2) Utang PFK Pajak di SKPD

Utang PFK Pajak di SKPD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang



sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK di SKPD terdapat di Dinas Pendidikan pada 89 sekolah (sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah).

Utang PFK Pajak di SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp193.821.068,00 dan Rp150.253.475,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.89

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	136.199.339	10.127.516
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	806.207	0
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	3.055.388	3.731.557
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	0	0
5.	Utang Pemotongan PPN	53.760.134	136.394.402
	Jumlah	193.821.068	150.253.475

3) **Utang PFK Pajak di BLUD**

Utang PFK Pajak di BLUD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di BLUD atas dana BLUD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK Pajak di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp941.418.323,00 dan Rp123.669.297,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.90

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis Utang PFK di BLUD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	7.358.272	4.236.597
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	85.338.007	9.407.912
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	29.745.099	17.412.406
4.	Utang Pemotongan PPN	818.976.945	92.612.382
	Jumlah	941.418.323	123.669.297

Utang PFK di BLUD dengan jumlah dua terbesar terdapat pada RSUD Kalideres sebesar Rp545.656.474,00 dan RSUD Koja sebesar Rp395.687.690,00 dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 5.91

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar
Per 31 Desember 2024

No.	Jenis Pajak	RSUD Kalideres (Rp)	RSUD Koja (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	7.358.272	0
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	49.272.123	36.001.445
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	17.061.761	12.673.618
4.	Utang Pemotongan PPN	471.964.318	347.012.627
	Jumlah	545.656.474	395.687.690

b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke BPJS.

Utang PFK BPJS Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp114.822.685,00 dan Rp111.955.006,00.

Utang PFK BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp22.947.025,00.

Pada Tahun 2024 Utang BPJS Kesehatan tercatat pada:

- 1) RSUD Koja Jakarta Utara sebesar Rp78.817.337,00;
- 2) RSUD Cipayung Jakarta Timur sebesar Rp32.255.472,00; dan
- 3) RSUD Budhi Asih Jakarta Timur sebesar Rp3.749.876,00.

c. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya

Utang PFK Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 Rp123.104.863,00 dan Rp1.151.500,00. Utang PFK Lainnya di antaranya terdapat pada SMKN 57 sebesar Rp123.104.863,00 merupakan utang pajak perhotelan yang belum disetor sampai 31 Desember 2024.

5.3.2.1.2 Utang Bunga Pinjaman

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp15.646.130.966,00 dan Rp14.739.619.252,00. Utang bunga kepada Pemerintah Pusat merupakan perhitungan akrual atas:

- a. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang berupa pinjaman dari Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek JEDI nomor SLA-1247/DSMI/2012 penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah. Utang bunga pinjaman proyek JEDI per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.207.413.707,00. Perhitungan Utang Bunga pinjaman proyek JEDI per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel berikut.



Tabel 5.92
Perhitungan Utang Bunga (Akrual) JEDI
Per 31 Desember 2024

No	Jenis Pinjaman	Periode Bunga	Utang	Bunga Berjalan (Rp)	Utang Bunga Akrual per 31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6=4/3*5
1	SLA-1247/DSMI/2012	6 bulan	4 bulan	13.811.120.560	9.207.413.707

- b. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang berupa pinjaman dari Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek MRT *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) nomor SLA 1263/DSMI/2016 dan *phase II* nomor SLA 1295/DSMI/2023 (Jakarta Kota – Bundaran HI) penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang yen yang dikonversi ke dalam rupiah. Nilai bunga sebesar Rp4.694.656.722,00 dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2024 sebesar Rp102,36 per 1 yen. Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.93
Perhitungan Utang Bunga (Akrual) MRT
Per 31 Desember 2024

No	Jenis Pinjaman	Utang Pokok (Yen)	Suku Bunga (%)	Jumlah Hari AkruaI s.d. 31 Des	Jumlah Periode 1 tahun	Kurs Tengah BI Akhir Tahun 2024 (Rp) *	Utang Bunga per 31 Des 24 (Yen)	Utang Bunga per 31 Des 24 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	$8=((4*3*5)/6)$	$9=7*8$
I	MRT Phase I							
1	Konstruksi	53.111.965.130	0,44%	11	365	102,36	7.042.792	720.917.444
2	Konsultan	3.849.036.997	0,35%	11	365	102,36	405.994	41.558.541
	Total Phase I						7.448.786	762.475.985
II	MRT Phase II terdiri atas 74 transaksi perhitungan bunga							
	Total Phase II						38.414.289	3.932.180.737
TOTAL Phase I & II							45.863.075	4.694.656.722

* Pembulatan dari nilai kurs tengah BI sebesar Rp102,36245

- c. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang berupa Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional dari Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-239B/SMI/1221 Tanggal 30 Desember 2021 yang telah dinyatakan kembali dengan Akta No. 85 Tanggal 23 September 2021. Nilai bunga sebesar Rp1.744.060.537,00 dihitung dengan menggunakan Rupiah. Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel berikut.



Tabel 5.94
Perhitungan Utang Bunga Per 31 Desember 2024

No	Jenis Pinjaman	Nilai yang ditarik pemerintah (Rp)	Periode Bunga	Periode Utang	Pembayaran Bunga Per 25 Jan 2025 (Rp)	Utang Bunga AkruaI per 31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 / 4 * 6
1	PEN_PT SMI	4.074.967.079.587	31 hari	7 hari	7.723.696.663	1.744.060.537
TOTAL						1.744.060.537

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.981.669.834.064,00 dan Rp1.861.669.834.064,00. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 merupakan nilai yang akan dibayarkan pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)
Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI) merupakan bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat atas Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Proyek JEDI Nomor SLA–1247/DSMI/2012 sebesar Rp33.629.623.430,00 yang penilaiannya menggunakan mata uang Rupiah. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Bagian Lancar Utang – PEN
Bagian Lancar Utang – PEN merupakan bagian lancar utang yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN yang didasarkan atas Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-181/SMI/1220 tanggal 21 Desember 2020 atas Perubahan I Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020, Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor 8 tanggal 12 April 2021, dan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor 85 tanggal 23 September 2021. Saldo Bagian Lancar Utang – PEN Per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.828.040.210.634,00.
- c. Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1263 (Proyek MRT)
Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1263 (Proyek MRT) merupakan bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat atas Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Proyek MRT Nomor SLA–1263/DSMI/2016 sebesar JPY933.817.622 yang dikonversi ke dalam rupiah sebesar



Rp120.000.000.000,00. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI).

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum diberikannya pelayanan. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp221.835.170.345,00 dan Rp216.488.454.965,00. Perbandingan tersebut digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.95

Pendapatan Diterima di Muka
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah	2.511.423.274	3.506.186.150
2	Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah	198.463.584.362	24.944.175.550
3	Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	0	112.033.643.034
4	Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame	0	0
5	Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	0	39.266.042.398
6	Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	0	910.687.396
7	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	3.175.331.199	2.988.648.669
8	Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama pihak lain BLUD	17.684.831.510	19.909.645.124
9	Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD yang sah	0	12.929.419.406
10	Pendapatan Diterima di Muka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	0	7.238
	Total	221.835.170.345	216.488.454.965

a. Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah

Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah disajikan sebesar Rp2.511.423.274,00 yang merupakan perolehan pajak yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah yang berasal dari kelebihan pembayaran pokok pajak daerah terdiri dari Pajak PBBP2 sebesar Rp2.076.828.174,00, Pajak Reklame sebesar Rp274.082.656,00, Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar Rp130.657.592,00, dan Pajak Air Tanah sebesar Rp29.854.852,00.

b. Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah

Pendapatan Diterima Di muka Retribusi Daerah sebesar Rp198.463.584.362,00, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.96
Pendapatan Diterima Di muka Retribusi Daerah
Per 31 Desember 2024 dan 2023

NO	SKPD	Uraian	Pendapatan Diterima di Muka s.d Desember 2024 (Rp)	Pendapatan Diterima di Muka s.d Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian	Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana Prasarana Perikanan.	654.086.000	601.772.280
2	Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.155.000	21.905.384
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun	0	135.544.445
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sewa Tanah Makam Tumpangan 25%	0	468.655.972
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perpanjangan Sewa Tanah Makam	0	20.974.861.389
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	9.520.309.861	0
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	60.525.868.675	0
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Kios	1.549.366.000	1.549.366.000
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Pemakaian Ruangan	97.110.000	97.110.000
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Penyediaan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan	1.094.960.080	1.094.960.080
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Retribusi Sewa Rusunawa	9.708.063.550	0
12	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	115.310.665.196	0
		Jumlah	198.463.584.362	24.944.175.550

Saldo Pendapatan Diterima Di muka Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Aset Daerah sebesar Rp115.310.665.196,00 semula berasal dari :

- 1) Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa sebesar Rp72.228.358.503,00;
- 2) Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame sebesar Rp Rp35.697.485.620,00;
- 3) Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah sebesar Rp Rp6.677.254.124,00; dan
- 4) Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna sebesar Rp707.566.949,00.



c. Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dan Rp112.033.643.034,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa mengalami perubahan klasifikasi menjadi Pendapatan Diterima Di Muka Retribusi Daerah. Lebih lanjut penjelasan terkait Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa dijelaskan pada Pendapatan Diterima Di Muka Retribusi Daerah.

d. Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame

Pendapatan Diterima Di muka Hasil Lelang Titik Reklame sebesar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dan Rp,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Diterima Di muka Hasil Lelang Titik Reklame mengalami perubahan klasifikasi menjadi Pendapatan Diterima Di Muka Retribusi Daerah. Lebih lanjut penjelasan terkait Pendapatan Diterima Di muka Hasil Lelang Titik Reklame dijelaskan pada Pendapatan Diterima Di Muka Retribusi Daerah.

e. Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dan Rp39.266.042.398,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah mengalami perubahan klasifikasi menjadi Pendapatan Diterima Di Muka Retribusi Daerah. Lebih lanjut penjelasan terkait Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah dijelaskan pada Pendapatan Diterima Di Muka Retribusi Daerah.

f. Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dan Rp910.687.396,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah



Bangun Serah Guna mengalami perubahan klasifikasi menjadi Pendapatan Diterima Di Muka Retribusi Daerah. Lebih lanjut penjelasan terkait Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna dijelaskan pada Pendapatan Diterima Di Muka Retribusi Daerah.

g. Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD

Pendapatan Diterima Di muka Jasa Layanan Umum BLUD disajikan sebesar Rp3.175.331.199,00 merupakan:

- 1) Uang Muka Pasien dan Uang Titipan BLUD Kesehatan sebesar Rp3.025.930.099,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	21.845.181
2	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Matraman	2.398.597.850
3	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Koja	70.571.257
4	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	60.968.800
5	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	459.647.011
6	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	8.800.000
7	BLUD Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	5.500.000
Total BLUD Kesehatan		3.025.930.099

- 2) Uang Muka Jasa BLUD Non Kesehatan sebesar Rp149.401.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	SMKN 27 Jakarta	8.500.000
2	SMKN 57 Jakarta	134.197.100
3	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	6.704.000
Total BLUD Non Kesehatan		149.401.100

h. Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD

Pendapatan Diterima Di muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD sebesar Rp17.684.831.510,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.97

Pendapatan Diterima Di muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	1.105.262.787
2	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	2.963.261.364
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama	21.241.600
4	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	1.201.993.322
5	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	2.391.187.019
6	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	176.069.550
7	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	805.825.000
8	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	12.693.057
9	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	428.837.122
10	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	4.768.122.130
11	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung	1.246.746.333



No.	SKPD	Jumlah (Rp)
12	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	2.563.592.226
	Total	17.684.831.510

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Rp1.780.943.311.694,00 dan Rp2.147.127.573.272,00. Dari nilai saldo utang belanja per 31 Desember 2024 tersebut dijelaskan secara rinci pada Lampiran 13.1, Lampiran 13.2 dan Lampiran 13.3. Adapun rincian saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.98
Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Rekening	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	773.782.580.212	897.763.135.326
2	Utang Belanja Barang	19.922.520.581	12.002.332.272
3	Utang Belanja Jasa Non TALI	257.558.168.325,00	119.392.881.363
4	Utang Belanja TALI	57.070.645.240	56.801.584.954
5	Utang Belanja Pemeliharaan	30.746.012.909,00	27.093.304.167
6	Utang Belanja Perjalanan Dinas	5.807.866.453	0
7	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	39.621.750.000	1.133.137.500
8	Utang Belanja Modal Tanah	159.840.000	0
9	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.630.836.424	234.425.902
10	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.290.717.717	77.447.682.079
11	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.308.552.213	72.808.520.333
12	Utang Belanja Pegawai BLUD	13.507.051.040	14.696.755.850
13	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	230.510.277.449	176.808.371.586
14	Utang Belanja Modal BLUD	5.187.082.639	2.118.428.162
15	Utang Belanja Subsidi	72.839.410.492	688.827.013.778
	Jumlah	1.780.943.311.694	2.147.127.573.272

Penjelasan lebih rinci atas akun Utang Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp773.782.580.212,00 dan Rp897.763.135.326,00. Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Utang belanja TPP Bulan Desember 2024 sebesar Rp766.288.144.830,00 tercatat pada seluruh SKPD Penggabung;



- 2) Utang kekurangan pembayaran Tunjangan PPh pegawai sebesar Rp7.457.682.952,00 di antaranya tercatat pada Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp3.091.417.751,00;
- 3) Utang kekurangan pembayaran TPP selain bulan Desember 2024 sebesar Rp36.053.670,00 tercatat pada Dinas Pendidikan;
- 4) Utang kekurangan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp698.760,00 di antaranya tercatat pada Dinas Kebudayaan.

Rincian Utang Belanja Pegawai disajikan dalam Lampiran 13.1.

b. Utang Belanja Barang

Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp19.922.520.581,00 dan Rp12.002.332.272,00. Utang Belanja Barang merupakan pembelian barang operasional SKPD. Utang belanja Barang per 31 Desember 2024 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Satpol PP sebesar Rp18.853.050.000,00 di antaranya merupakan utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
- 2) UP Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp421.730.876,00 yang di antaranya merupakan utang atas pengadaan alat lab, *integrated library equipment*, bangku, papan tulis dan mikroskop *digital* observasi;
- 3) Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp187.327.914,00 merupakan utang atas bahan bakar minyak;
- 4) Dinas Sosial sebesar Rp165.906.250,00 merupakan utang atas penyediaan bahan pangan kampung siaga bencana; dan
- 5) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp160.191.031,00 merupakan utang atas bahan bakar minyak.

Rincian Utang Belanja Barang disajikan dalam Lampiran 13.2.

c. Utang Belanja Jasa Non TALI

Saldo Utang Jasa Non TALI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp257.558.168.325,00 dan Rp119.392.881.363,00. Utang belanja Jasa Non TALI per 31 Desember 2024 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) UP Jaminan Kesehatan Jakarta sebesar Rp219.230.240.125,00 merupakan utang kekurangan pencairan dana luran dan Bantuan luran Peserta PBPU/BP Kelas III Tahun 2024;



- 2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp11.364.870.040,00 merupakan utang belanja jasa atas penyelenggaraan festival malam tahun baru;
- 3) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sebesar Rp9.409.024.683,00 di antaranya merupakan utang belanja jasa pengawasan konstruksi bangunan gedung; dan
- 4) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.383.312.900,00 merupakan utang belanja jasa konsultasi penelitian dan bantuan teknik penanganan sampah; dan
- 5) Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp3.795.599.544,00 di antaranya merupakan utang belanja jasa konsultasi layanan khusus Pembangunan fasilitas pendukung Saringan Sampah TB. Simatupang.

Rincian Utang Belanja Jasa Non Tali disajikan dalam Lampiran 13.2.

d. Utang Belanja Jasa TALI

Saldo Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 57.070.645.240,00 dan Rp56.801.584.954,00. Utang Belanja TALI per 31 Desember 2024 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Bina Marga sebesar Rp20.089.781.663,00;
- 2) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp7.103.701.037,00;
- 3) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sebesar Rp1.952.721.402,00;
- 4) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.860.029.121,00; dan
- 5) Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp1.825.962.305,00.

Rincian Utang Belanja TALI disajikan dalam Lampiran 13.2.

e. Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp30.746.012.909,00 dan Rp27.093.304.167,00. Utang belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2024 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp18.464.285.228,00 yang merupakan utang Pengerjaan Pengerukan situ Kodamar, situ Rawa Dongkal, situ Mangga Bolong;
- 2) Suku Dinas Bina Marga Kota Jakarta Pusat sebesar Rp6.488.905.438,00 yang merupakan utang pemeliharaan jalan (layer hotmix);



- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp3.706.773.294,00 yang merupakan utang pemeliharaan gedung kantor;
- 4) Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah sebesar Rp1.345.744.154,00 yang merupakan utang pemeliharaan bangunan gedung kantor; dan
- 5) Dinas Bina Marga sebesar Rp740.304.795,00 yang merupakan utang pemeliharaan trotoar Jalan Yos Sudarso dan trotoar Bus Transjakarta.

Rincian Utang Belanja Pemeliharaan disajikan dalam Lampiran 13.2.

f. Utang Belanja Perjalanan Dinas

Saldo Utang Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.807.866.453,00 dan Rp0,00. Utang belanja perjalanan dinas per 31 Desember 2024 terdapat pada Biro Kerjasama Daerah.

Rincian Utang Belanja Perjalanan Dinas disajikan dalam Lampiran 13.2.

g. Utang Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Saldo Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp39.621.750.000,00 dan Rp1.133.137.500,00. Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2024 terdapat pada Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari utang PPh 21 penghargaan event PEPERNAS XVII dan PON XXI Tahun 2024.

Rincian Utang Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat disajikan dalam Lampiran 13.2.

h. Utang Belanja Modal Tanah

Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp159.840.000,00 dan Rp0,00.

Rincian Utang Belanja Modal Tanah disajikan dalam Lampiran 13.2.

i. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp77.630.836.424,00 dan Rp234.425.902,00. Utang belanja modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut :



- 1) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp43.156.848.450,00 di antaranya merupakan utang pengadaan KDO;
- 2) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp12.089.153.993,00 di antaranya merupakan utang pengadaan mebel;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp6.955.938.180,00 di antaranya merupakan utang pengadaan alat kedokteran umum;
- 4) Inspektorat sebesar Rp6.426.235.908,00 di antaranya merupakan utang pengadaan mebel; dan
- 5) Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp3.309.420.600,00 di antaranya merupakan utang pengadaan pagar.

Dari Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin di atas, terdapat 11 Pekerjaan sebesar Rp73.299.461.021,00 yang telah diselesaikan pembayaran melalui mekanisme RPBATA.

Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam Lampiran 13.2.

j. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp160.290.717.717,00 dan Rp77.447.682.079,00. Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) UP Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp68.752.723.748,00 di antaranya merupakan utang atas pekerjaan rehab total dan rehab berat Gedung beberapa SDN;
- 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp41.836.394.526,00 merupakan utang atas penyusunan dokumen lingkungan dan KMRLR rumah susun;
- 3) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp13.405.323.498,00 di antaranya merupakan utang pembangunan Gedung sekretariat resimen mahasiswa Jayakarta; dan
- 4) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp8.051.321.650,00 merupakan utang atas rehabilitasi Gedung Dinas Lingkungan Hidup.
- 5) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp4.825.918.260,00 di antaranya merupakan utang atas pekerjaan konstruksi perbaikan gedung Samsat – Termin V.

Dari Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan di atas, terdapat 7 Pekerjaan sebesar Rp80.285.603.025,00 yang telah diselesaikan pembayaran melalui mekanisme RPBATA.



Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan di SKPD disajikan dalam Lampiran 13.2.

k. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp36.308.552.213,00 dan Rp72.808.520.333,00. Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp16.192.606.573,00 merupakan utang pembangunan Pintu Air Kali Blencong dan Pantai Utara Marunda dan pembangunan SPALD *Severage* Taman Jagakarsa dan *interceptor* saluran PHB Sentra Primer Barat; dan
- 2) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jaktim sebesar Rp12.398.035.720,00 merupakan utang Pembangunan Rumah Pompa PHB Cipa dan Kelengkapannya;
- 3) Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp3.653.843.520,00 di antaranya merupakan utang Pembangunan fasilitas pendukung Saringan Sampah TB. Simatupang;
- 4) Sudin Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp2.606.827.726,00 di antaranya merupakan pengamanan pantai Pendalaman Kolam Labuh dan Alur Masuk; dan
- 5) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakbar sebesar Rp1.387.238.674,00 merupakan pembangunan sheetpile, rumah pompa, dan pembangunan kolam kolakan.

Dari Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di atas, terdapat 5 Pekerjaan sebesar Rp19.993.554.964,00 yang telah diselesaikan pembayaran melalui mekanisme RPBATA.

Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di SKPD disajikan dalam Lampiran 13.2.

I. Utang Belanja Pegawai BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD merupakan utang kepada pegawai yang antara lain terdiri atas gaji dokter, honorarium *shift* paramedis, honor lembur dan honor petugas gadar. Sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp13.507.051.040,00 dan Rp14.696.755.850,00. Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2024 di antaranya terdapat pada SKPD:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp2.845.638.587,00;



- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp2.444.731.835,00;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebesar Rp2.152.021.976,00;
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp2.070.968.145,00; dan
- 5) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebesar Rp1.721.853.524,00.

Rincian Utang Belanja Pegawai BLUD disajikan dalam Lampiran 13.3.

m. Utang Belanja Barang Jasa BLUD

Utang Belanja Barang Jasa BLUD merupakan utang yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp230.510.277.449,00 dan Rp176.808.371.586,00.

Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.99

Utang Belanja Barang Jasa BLUD
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD	222.225.985.549	170.360.424.126
2	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Dinkes	7.141.783.081	5.571.207.402
3	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan	1.142.508.819	876.740.058
Jumlah		230.510.277.449	176.808.371.586

Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD sebesar Rp222.225.985.549,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.100

Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	SKPD	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Dinas Kesehatan (eks kewajiban RSUD Adhyaksa)	0	7.892.189.410
2	RSUD Pasar Rebo	7.060.367.778	5.968.719.892
3	RSUD Koja	54.698.304.868	55.869.065.905
4	RSUD Cengkareng	12.986.987.252	19.936.963.912
5	RSUD Tarakan	61.205.084.642	16.203.100.837
6	BLUD RS Budhi Asih	26.483.918.891	8.995.639.775
7	RSUD Pasar Minggu	16.525.943.212	15.138.289.766
8	RSUD Tugu Koja	3.607.134.895	804.712.017
9	RSUD Kalideres	366.903.412	438.137.568
10	RSUD Tanjung Priok	117.026.916	394.831.077



No.	SKPD	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
11	RSUD Kebayoran Lama	27.190.894	69.467.021
12	RSUD Jagakarsa	91.108.168	95.768.963
13	RSUD Kemayoran	2.373.303.597	2.110.121.951
14	RSKD Duren Sawit	4.990.421.578	5.440.944.660
15	RSUD Tebet	5.079.874.765	5.404.686.458
16	RSUD Pademangan	1.764.015.432	2.087.843.698
17	RSUD Kramat Jati	1.432.971.490	1.732.023.149
18	RSUD Sawah Besar	568.908.910	16.573.022
19	RSUD Cempaka Putih	1.227.055.862	277.546.923
20	RSUD Johar Baru	506.800.785	28.750.000
21	RSUD Mampang Prapatan	4.469.930.396	5.764.987.380
22	RSUD Tanah Abang	122.305.956	114.237.781
23	RSUD Ciracas	1.551.069.416	2.449.943.263
24	RSUD Cilincing	7.224.311.928	6.449.244.390
25	RSUD Pesanggrahan	1.358.580.302	1.076.666.850
26	RSUD Matraman	1.544.536.580	4.157.873.589
27	RSUD Kembangan	2.155.497.313	23.646.665
28	RSUD Cipayung	671.551.992	18.701.194
29	RSUD Jati Padang	18.625.584	51.430.000
30	RSUD Kepulauan Seribu	14.884.422	10.435.868
31	RSUD Tamansari	1.981.368.313	901.961.281
32	RSUD Kebayoran Baru	0	435.919.861
Jumlah		222.225.985.549	170.360.424.126

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar
Rp7.141.783.081,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.101

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Puskesmas Kecamatan Cakung - Jaktim	1.144.800.367	1.548.893.666
2	Laboratorium Kesehatan Daerah	3.774.837.656	1.209.684.361
3	Puskesmas Kecamatan Cipayung - Jaktim	1.781.550	782.945.079
4	Puskesmas Kecamatan Jagakarsa - Jaksel	3.699.421	482.932.562
5	Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok - Jakut	0	383.846.791
6	Puskesmas Kecamatan Kemayoran - Jakpus	749.370.184	223.794.812
7	Puskesmas Kecamatan Kep.Seribu Selatan	0	168.305.199
8	Pusat Layanan Kesehatan Pegawai	110.537.220	85.597.872
9	Puskesmas Kecamatan Kalideres - Jakbar	376.541.534	82.162.110
10	Puskesmas Kecamatan Duren Sawit - Jaktim	67.655.215	76.171.251
11	Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan – Jaksel	117.649.405	74.615.160
12	Puskesmas Kecamatan Matraman - Jaktim	2.495.746	61.694.899



No.	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
13	Puskesmas Kecamatan Palmerah - Jakbar	54.103.137	58.519.627
14	Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar	53.475.421	57.043.240
15	Puskesmas Kecamatan Cengkareng - Jakbar	49.187.945	56.063.501
16	Puskesmas Kecamatan Kembangan - Jakbar	48.534.789	48.714.133
17	Puskesmas Kecamatan Kep.Seribu Utara	0	36.168.328
18	Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim	6.426.600	27.960.000
19	Puskesmas Kecamatan Tebet - Jaksel	345.410.315	14.604.000
20	Puskesmas Kecamatan Pulogadung - Jaktim	3.401.007	12.327.660
21	Puskesmas Kecamatan Tambora - Jakbar	11.115.550	11.115.550
22	Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	820.000	8.996.590
23	Puskesmas Kecamatan Tanah Abang - Jakpus	3.693.951	7.131.514
24	Puskesmas Kecamatan Kramat Jati - Jaktim	7.284.114	6.783.409
25	Puskesmas Kecamatan Makasar - Jaktim	0	5.621.050
26	Puskesmas Kecamatan Taman Sari - Jakbar	5.089.360	5.505.610
27	Puskesmas Kecamatan Ciracas - Jaktim	47.779.084	5.413.480
28	Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus	4.921.995	4.943.656
29	Puskesmas Kecamatan Koja – Jakut	0	4.852.780
30	Puskesmas Kecamatan Setiabudi - Jaksel	48.005.520	3.681.224
31	Puskesmas Kecamatan Johar Baru - Jakpus	3.517.590	3.570.870
32	Puskesmas Kecamatan Menteng - Jakpus	1.559.550	3.166.830
33	Puskesmas Kecamatan Jatinegara - Jaktim	24.711.480	2.739.753
34	Puskesmas Kecamatan Gambir - Jakpus	0	2.282.160
35	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan – Jakbar	410.700	2.128.980
36	Puskesmas Kecamatan Pademangan - Jakut	1.827.910	1.039.695
37	Puskesmas Kecamatan Sawah Besar - Jakpus	190.000	190.000
38	Puskesmas Kecamatan Pancoran - Jaksel	66.390.756	0
39	Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel	3.799.009	0
40	Puskesmas Kecamatan Cilandak - Jaksel	0	0
41	Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah	759.000	0
Jumlah		7.141.783.081	5.571.207.402

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan sebesar
Rp1.142.508.819,00 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.102

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Pemukiman Pulogadung	784.350.752	599.561.495
2.	Unit Pengelola Perparkiran	11.036.898	41.473.625
3.	SMKN 57	100.707.576	0



No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	246.413.593	235.704.938
	Jumlah	1.142.508.819	876.740.058

Rincian Utang Belanja Barang Jasa BLUD disajikan dalam Lampiran 13.3.

n. Utang Belanja Modal BLUD

Utang Belanja Modal BLUD merupakan utang-utang pembelian Aset Tetap pada BLUD yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.187.082.639,00 dan Rp2.118.428.162,00.

Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2024 terdiri dari:

- 1) Saldo utang belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp420.958.949,00 di antaranya terdapat pada BLUD berikut:
 - a. RSUD Koja sebesar Rp176.563.373,00;
 - b. RSUD Mampang Prapatan sebesar Rp60.200.000,00; dan
 - c. RSUD Tarakan sebesar Rp56.856.500,00.
- 2) Saldo utang belanja modal Gedung dan Bangunan BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.591.446.625,00 terdapat pada RSKD Duren Sawit sebesar Rp4.307.591.030,00 dan RSUD Cipayung sebesar Rp283.855.595,00;
- 3) Saldo utang belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp174.677.065,00 terdapat pada RSUD Pasar Minggu.

Rincian Utang Belanja Modal BLUD disajikan dalam Lampiran 13.3.

o. Utang Belanja Subsidi

Utang belanja subsidi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp72.839.410.492,00 dan Rp688.827.013.778,00. Utang belanja subsidi per 31 Desember 2024 tercatat pada Dinas Perhubungan merupakan utang belanja subsidi transportasi pada PT Transjakarta. Rincian mutasi utang belanja subsidi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Utang subsidi per 31 Desember 2023 <i>Audited</i>	:	688.827.013.778
<u>Penambahan :</u>		
Utang subsidi PT Transjakarta PSO Tahun 2023	:	13.178.105.296
sesuai dengan BA Verifikasi no. 317/PH.05.00		
tanggal 17 Mei 2024		



Utang subsidi prasarana dan sarana LRT Jakarta Tahun 2024	:	2.120.518.427
<u>Pengurangan :</u>		
Pembayaran utang subsidi PT.MRT	:	(109.479.054.097)
Pembayaran utang subsidi LRT Jakarta	:	(105.884.366.450)
Penyesuaian PSO PT Transjakarta tahun 2018,2019	:	(415.922.806.462)
Utang belanja subsidi per 31 Desember 2024	:	72.839.410.492

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp15.141.616.464,00 dan Rp16.377.359.980,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Kompensasi Pajak	4.341.069.296	4.247.474.531
2	Utang Restitusi Pajak	2.011.990.094	1.178.722.745
3	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0	169.040.000
4	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	60.301.439	60.600.192
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.710.322.955	10.628.454.363
6	Kewajiban – Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	17.932.680	93.068.149
Jumlah		15.141.616.464	16.377.359.980

a. Utang Kompensasi Pajak

Utang Kompensasi Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.341.069.296,00 dan Rp4.247.474.531,00 merupakan kewajiban berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPD-LB) atas kelebihan pembayaran pajak daerah yang dapat digunakan untuk pembayaran kurang bayar pajak daerah atau utang pajak. Kompensasi dapat dimanfaatkan pada masa pajak selanjutnya atau terhadap jenis pajak lainnya. Berikut rincian perhitungan Utang Kompensasi Pajak.

Tabel 5.103

Perhitungan Utang Kompensasi Pajak

No	Jenis Pajak	Utang Awal (Rp)	Kompensasi (Rp)	Sisa Utang Awal (Rp)	Utang Berjalan (Rp)	Kompensasi (Rp)	Sisa Utang Berjalan (Rp)	Total Utang (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8 (6-7)	9 (5+8)
1	Pajak Air Tanah	307.432	-	307.432	-	-	-	307.432
2	Pajak Reklame	242.274.131	-	242.274.131	-	-	-	242.274.131



No	Jenis Pajak	Utang Awal (Rp)	Kompensasi (Rp)	Sisa Utang Awal (Rp)	Utang Berjalan (Rp)	Kompensasi (Rp)	Sisa Utang Berjalan (Rp)	Total Utang (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8 (6-7)	9 (5+8)
3	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	721.208.836	29.949.456	691.259.380	197.488.048	50.481.840	147.006.208	838.265.588
4	Pajak Bumi dan Bangunan	1.755.579.934	34.394.543	1.721.185.391	201.077.947	190.145.391	10.932.556	1.732.117.947
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	1.528.104.198	-	1.528.104.198	-	-	-	1.528.104.198
TOTAL		4.247.474.531	64.343.999	4.183.130.532	398.565.995	240.627.231	157.938.764	4.341.069.296

b. Utang Restitusi Pajak

Utang Restitusi Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp2.011.990.094,00 dan Rp1.178.722.745,00 merupakan kewajiban pengembalian pembayaran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah atas kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBJT atas Jasa Perhotelan yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayarkan kepada Wajib Pajak.

c. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp169.040.000,00. Utang Kelebihan Transfer Tahun 2023 merupakan pengembalian Dana BOS ke RKUN berdasarkan Hasil verifikasi Inspektorat atas pengembalian Dana BOS SD Islam Al-Azhar Syuhada tahun 2016 dan 2017.

d. Utang Kelebihan Pembayaran PAD

Utang Kelebihan Pembayaran PAD per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp60.301.439,00 dan Rp60.600.192,00 merupakan hak pihak ketiga yang wajib dikembalikan dengan rincian sebagai berikut:

- sebesar Rp43.562.242,00 pada rekening khusus pajak di bank CIMB Niaga atas kelebihan transfer yang belum diretur ke wajib pajak;
- sebesar Rp9.515.707,00 pada rekening khusus pajak di BRI atas kelebihan transfer yang belum diretur ke wajib pajak;
- sebesar Rp1.591.487,00 pada rekening khusus pajak di Bank Mandiri atas pembayaran ganda yang belum diretur ke wajib pajak;
- sebesar Rp1.301.068,00 merupakan jasa giro rekening penerima hibah milik BPSK yang tertarik oleh BUD; dan
- sebesar Rp4.330.935,00 merupakan kelebihan pembayaran retribusi pemanfaatan aset daerah.



e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp8.710.322.955,00 dan Rp10.628.454.363,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.484.107.833,00 yang merupakan uang titipan sewa rumah ber-SIP sebesar Rp7.699.352.973,00 dan Santunan pengosongan rumah bersengketa sebesar Rp784.754.860,00 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp226.215.122,00 yang merupakan retur pembayaran dan kelebihan pengembalian pihak ketiga pada rekening BOS 45 Satuan Pendidikan sebesar Rp118.944.852,00 dan dana untuk pembayaran ke PT Avant Solusi Servispro atas jasa sewa mesin fotocopy periode Oktober 2024 – Desember 2024 pada rekening khusus Dinas Pendidikan sebesar Rp107.270.270,00.

f. Kewajiban – Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan

Kewajiban - Penerimaan Kas Yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp17.932.680,00 dan Rp93.068.149,00. Terdapat di PPKD sebesar Rp16.063.067,00 yang merupakan penerimaan kas di rekening penampungan penerimaan kas daerah yang belum teridentifikasi kepemilikannya dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.869.613,00 yang merupakan rekening dorman BOP Sekolah.

5.3.2.1.7 Utang Jaminan

Utang Jaminan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.373.805.574,00 dan Rp6.188.082.151,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Jaminan Pajak Daerah

Utang Jaminan Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.504.261.554,00 dan Rp2.958.583.004,00 merupakan jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan Pajak atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidental pada Badan Pendapatan Daerah.

b. Utang Jaminan BLUD

Utang Jaminan BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.869.544.020,00 dan Rp3.229.499.147,00 merupakan uang jaminan yang diberikan oleh pihak penyelenggara parkir yang bekerja sama dalam pengelolaan kawasan perparkiran dengan Unit Pengelola Perparkiran.

Per 31 Desember 2024 terdapat 76 (tujuh puluh enam) PKS yang aktif dan 4 (empat) PKS yang sudah selesai namun uang jaminan masih belum diambil pada Unit Pengelola Perparkiran, masing-masing dari pihak penyelenggara tersebut memberikan uang jaminan atas PKS yang dibuat dengan Unit



Pengelola Perparkiran sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut.

No	Bentuk Jaminan	Nilai (Rp)
1	Rekening Penampungan Uang Jaminan PKS Parkir	3.295.181.520
2	Bank Garansi	574.362.500
Jumlah		3.869.544.020

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Provinsi DKI Jakarta berupa Utang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp13.982.891.651.205,00 dan Rp13.162.772.219.846,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Dalam Negeri - IBRD (Proyek JUFMP/JEDI)	219.097.501.569	252.727.124.999
2	Utang Dalam Negeri - JICA (Proyek MRT)	10.257.674.464.002	7.576.369.926.244
3	Utang PEN	3.506.119.685.634	5.333.675.168.603
Jumlah		13.982.891.651.205	13.162.772.219.846

Uraian Kewajiban (Utang) Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dijelaskan sebagai berikut :

a. Utang Dalam Negeri – IBRD (Proyek JUFMP/JEDI)

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor IBRD SLA 1247 tanggal 16 Mei 2012 yang penilaiannya menggunakan mata uang rupiah untuk pembiayaan proyek JEDI kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Saldo utang proyek JEDI per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp219.097.501.569,00 dan Rp252.727.124.999,00. Rincian atas Utang Dalam Negeri – IBRD (Proyek JUFMP/JEDI) sebagai berikut:

Pokok Utang	Rp504.949.300.724,00
Pembayaran s.d 31 Desember 2024	(Rp252.222.175.725,00)
Utang Per 31 Desember 2023	Rp252.727.124.999,00
Bagian Lancar Tahun 2024	(Rp33.629.623.430,00)
Utang per 31 Desember 2024	Rp219.097.501.569,00

b. Utang Dalam Negeri – JICA (Proyek MRT)

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1263/DSMI/2016 tanggal 4 Februari 2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1295/DSMI/2023 tanggal 2 Oktober 2023 untuk



pembiayaan Proyek MRT Jakarta *Phase II* (Jakarta Kota – Bundaran HI). Pencatatan pokok utang proyek MRT berdasarkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI yang memuat nilai utang dalam mata uang JPY dan Rupiah. Saldo utang proyek MRT per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp10.257.674.464.002,00 dan Rp7.576.369.926.244,00. Nilai bagian lancar Tahun 2024 merupakan nilai anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang terdapat pada APBD Tahun 2025. Rincian atas Utang Dalam Negeri – JICA (Proyek MRT) sebagai berikut:

Tabel 5.104

Rincian atas Utang Dalam Negeri – JICA (Proyek MRT)

No	Pinjaman Daerah	Utang Per 31 Des 2023		Penambahan Pokok Utang Tahun 2024		Bagian Lancar Tahun 2024		Utang Per 31 Des 2024	
		(JPY)	(Rp)	(JPY)	(Rp)	(JPY)	(Rp)	(JPY)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3 + 5 - 7)	10 = (4 + 6 - 8)
1	SLA 1263/DS MI/2016	56.961.002.127	7.290.092.296.108	0	0	933.817.622	120.000.000.000	56.027.184.505	7.170.092.296.108
2	SLA 1295/DS MI/2023	2.750.267.796	286.277.630.136	26.747.443.658	2.801.304.537.758	0	0	29.497.711.454	3.087.582.167.894
	TOTAL	59.711.269.923	7.576.369.926.244	26.747.443.658	2.801.304.537.758	933.817.622	120.000.000.000	85.524.895.959	10.257.674.464.002

c. Utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Utang Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.506.119.685.634,00 dan Rp5.333.675.168.603,00, yang terdiri atas.

Tabel 5.105

Rincian atas Utang Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

31 Desember 2024 dan 2023

No	Nilai Penarikan Pinjaman	Penarikan Dana Pinjaman	Pembayaran s.d 2023	Bagian lancar 2023	Utang PEN per 31 Des 2023	Bagian lancar 2024	Utang PEN Per 31 Des 2024
		(Rp)					
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7	8 = 6 - 7
1	PEN Tahun 2020	2.664.083.583.739	712.154.134.313	390.385.927.362	1.561.543.522.064	390.385.927.362	1.171.157.594.702
2	PEN Tahun 2021	3.192.635.570.093	472.622.445.581	532.105.970.916	2.187.907.153.596	532.105.970.916	1.655.801.182.680
3	Dukungan PEN Tahun 2021	4.074.967.079.587	1.585.194.274.288	905.548.312.356	1.584.224.492.943	905.063.584.691	679.160.908.252
	TOTAL	9.931.686.233.419	2.769.970.854.182	1.828.040.210.634	5.333.675.168.603	1.827.555.482.969	3.506.119.685.634

1) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2020

Merupakan dana pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Pemerintah Pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas Pinjaman PEN Daerah pada tahun 2020 sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 yang ditandatangani



oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 24 September 2020 dan telah diubah melalui Perubahan I Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 Nomor PERJ-181/SMI/1220 tanggal 21 Desember 2020 dengan jumlah pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp2.664.083.583.739,00. Penarikan dana pinjaman seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp2.664.083.583.739,00.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, pinjaman Program PEN digunakan untuk mendanai pelaksanaan dan penyelesaian program kegiatan pembangunan dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 telah digunakan dalam bentuk:

- a) Penyertaan Modal Daerah (PMD) Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp1.382.000.000.000,00.
- b) Belanja Daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan sebesar Rp1.282.083.583.739,00.

Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah.

Tabel 5.106

Rincian Realisasi Per Kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah

No	Jenis Pinjaman SKPD/BUMD	Plafon PEN (Akta No. 24 Tanggal 24-09-2020 serta Perubahan I Tanggal 21-12-2020) (Rp)	Penarikan Dana Pinjaman (Rp)	%	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Saldo (Sisa) (Rp)
1	2	3	4	5 = 4:3	6	7 = 6:3	8 = 4-6
	Pinjaman PEN (Bunga 0%)						
1	Infrastruktur Pengendali Banjir (Dinas Sumber Daya Air)	711.421.299.715	711.421.299.715	100,00	421.127.354.911	59,20	290.293.944.804
2	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Layanan Air Minum (Dinas Sumber Daya Air)	12.320.572.237	12.320.572.237	100,00	11.938.335.091	96,90	382.237.146
3	Peningkatan Infrastruktur Transportasi (Dinas Bina Marga)	473.340.301.771	473.340.301.771	100,00	442.248.276.770	93,43	31.092.025.001



No	Jenis Pinjaman SKPD/BUMD	Plafon PEN (Akta No. 24 Tanggal 24-09-2020 serta Perubahan I Tanggal 21-12-2020) (Rp)	Penarikan Dana Pinjaman (Rp)	%	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Saldo (Sisa) (Rp)
1	2	3	4	5 = 4:3	6	7 = 6:3	8 = 4-6
4	Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta (Dinas Lingkungan Hidup)	85.001.410.016	85.001.410.016	100,00	85.001.410.016	100,00	0
5	Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	200.000.000.000	200.000.000.000	100,00	200.000.000.000	100,00	0
6	Peningkatan Infrastruktur Olahraga (Pembangunan Jakarta International Stadium) (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	1.182.000.000.000	1.182.000.000.000	100,00	1.182.000.000.000	100,00	0
	Jumlah Total	2.664.083.583.739	2.664.083.583.739	100,00	2.342.315.376.788	87,92	321.768.206.951

Bahwa atas saldo (sisa) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 sebesar Rp321.768.206.951,00 telah dilakukan pengembalian kepada PT SMI (Persero) tanggal 20 Desember 2022 dengan Nomor SP2D 1 040233/SP2D/XII/2022 yang diperlakukan sebagai pembayaran pokok pinjaman dipercepat sesuai Pasal 11 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya.

2) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor PERJ-196/SMI/2020 yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2020 dan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 8 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 12 April 2021 serta Perjanjian Perubahan Pertama Terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-239B/SMI/1221 Tanggal 30 Desember 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dana pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp3.192.635.570.093,00 dengan masa penarikan/pencairan pinjaman (*Availability Period*) sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Penarikan pinjaman dilakukan secara bertahap dengan mekanisme berikut:

- Penarikan pertama setinggi-tingginya sebesar 25% dari limit pinjaman.
- Penarikan kedua sebesar 45% dari limit pinjaman setelah dana yang ditarik pada penarikan pertama terserap/direalisasikan minimal 75% pada kegiatan.



c) Penarikan ketiga dilakukan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan setelah dana yang ditarik sebelumnya terserap/direalisasikan minimal 90% pada kegiatan.

Bahwa penarikan dana Pinjaman PEN Daerah seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 dan tahun 2022 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp3.192.635.570.093,00. Penarikan tahap terakhir Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp957.790.671.029,00 pada tanggal 1 April 2022. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 merupakan kegiatan lanjutan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020, yang disalurkan dalam bentuk belanja daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan. Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah sampai dengan 31 Desember 2022.

Tabel 5.107
Rincian Realisasi Per Kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah
s.d 31 Desember 2022

No	Uraian Kegiatan SKPD/BUMD	Plafon PEN (Akta No. 24 Tanggal 24-09-2020 serta Perubahan I Tanggal 21-12- 2020) (Rp)	Nilai Penarikan Pinjaman PEN (Rp)	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Estimasi Saldo (Sisa) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 5:4	7 = 4 - 5
PINJAMAN PEN DAERAH TAHUN 2021						
a	Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir	2.840.433.114.045	2.840.433.114.045	2.741.479.310.308	96,52	98.953.803.737
	Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir (Dinas Sumber Daya Air)	2.754.137.508.989	2.754.137.508.989	2.655.826.449.928	96,43	98.311.059.061
	Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir - Pengendalian Banjir Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Diskominfo & Dinas Sumber Daya Air)	86.295.605.056	86.295.605.056	85.652.860.380	99,26	642.744.676
b	Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Layanan Air Minum (Dinas Sumber Daya Air)	56.784.547.380	56.784.547.380	37.854.104.382	66,66	18.930.442.998
c	Peningkatan Infrastruktur Transportasi (Dinas Bina Marga)	62.985.831.748	62.985.831.748	62.984.946.846	100,00	884.902
d	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Transformasi Digital) (Diskominfo)	232.432.076.920	232.432.076.920	232.432.076.920	100,00	0
	Jumlah	3.192.635.570.093	3.192.635.570.093	3.074.750.438.456	96,31	117.885.131.637

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa per 31 Desember 2022 masih terdapat estimasi saldo (sisa) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 pada RKUD Dana Pinjaman PEN sebesar Rp117.885.131.637,00.



Bahwa atas saldo (sis) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 sebesar Rp117.885.131.637,00 telah dilakukan pengembalian kepada PT SMI (Persero) tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor SP2D 1 042081/SP2D/XII/2023 yang diperlakukan sebagai pembayaran pokok pinjaman dipercepat sesuai Pasal 11 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya.

3) Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor 85 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 23 September 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dana pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp4.075.000.000.000,00 dengan masa pencairan pinjaman (*Availability Period*) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022. Jangka waktu pinjaman selama 60 bulan termasuk masa tenggang/*grace period* pembayaran pokok pinjaman selama 6 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 5,66% per tahun. Penarikan pinjaman dilakukan secara bertahap dengan mekanisme berikut:

- a) Penarikan pertama setinggi-tingginya sebesar 55% dari limit pinjaman.
- b) Penarikan kedua dilakukan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan setelah dana yang ditarik pada penarikan sebelumnya terserap/direalisasikan minimal 90% pada kegiatan.

Penarikan dana pinjaman seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp4.074.967.079.587,00.

Dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 telah digunakan dalam bentuk:

- a) Penyertaan Modal Daerah (PMD) Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp3.703.121.000.000,00.
- b) Belanja Daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan sebesar Rp371.846.079.587,00.

Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2022:



Tabel 5.108
Rincian Realisasi Per Kegiatan atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka
Mendukung Program PEN Tahun 2021 s.d 31 Desember 2022

No	Uraian Kegiatan SKPD/BUMD	Pagu Pinjaman PEN (Rp)	Nilai Penarikan Pinjaman PEN (Rp)	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Estimasi Saldo (Sisa) (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6=5:4	7 = 4 - 5	8
Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021							
a	Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup)	371.879.000.000	371.846.079.587	371.361.351.922	99,87	484.727.665	
b	Peningkatan Infrastruktur Olahraga Proyek Pembangunan Jakarta International Stadium (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	2.460.000.000.000	2.460.000.000.000	2.460.000.000.000	100,00	0	Berupa Penyertaan Modal Daerah
c	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan (Revitalisasi Taman Ismail Marzuki/TIM) (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	1.243.121.000.000	1.243.121.000.000	1.243.121.000.000	100,00	0	Berupa Penyertaan Modal Daerah
	Jumlah	4.075.000.000.000	4.074.967.079.587	4.074.482.351.922	99,99	484.727.665	

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa per 31 Desember 2022 masih terdapat saldo (sisa) dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 pada RKUD Dana Pinjaman PEN sebesar Rp484.727.665,00.

Bahwa atas saldo (sisa) dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 sebesar Rp484.727.665,00 telah dilakukan pengembalian kepada PT SMI (Persero) tanggal 19 Desember 2023 dengan Nomor SP2D 1 038823/SP2D/XII/2023 yang diperlakukan sebagai pembayaran pokok pinjaman dipercepat sesuai Pasal 11 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp727.950.219.245.598,00 dan Rp698.072.284.621.375,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.6.

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.



5.4.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2024, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp30.629.872.757.835,00. Nilai tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp100.121.357.370.829,00 dikurangi dengan jumlah Beban-LO sebesar Rp69.491.484.612.994,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut.

5.4.1.1 Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah.

Pendapatan-LO Tahun 2024 sebesar Rp100.121.357.370.829,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp76.562.506.738.972,00, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp22.335.089.174.685,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp1.223.761.457.172,00.

Rincian Pendapatan-LO Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.109

Rekapitulasi Pendapatan-LO

Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	76.562.506.738.972	76.505.455.312.665	57.051.426.307	0,07
2.	Pendapatan Transfer	22.335.089.174.685	23.778.953.501.314	(1.443.864.326.629)	(6,07)
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.223.761.457.172	3.584.721.532.629	(2.360.960.075.457)	(65,86)
Jumlah		100.121.357.370.829	103.869.130.346.608	(3.747.772.975.779)	(3,61)

Pada Tahun 2024 terjadi penurunan Pendapatan – LO sebesar 3,61% dibandingkan tahun lalu. Penurunan Pendapatan – LO tersebut berasal dari 3 Jenis Pendapatan – LO yaitu Kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,07%, Penurunan Pendapatan Transfer 6,07%, dan Penurunan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 65,86%.

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp76.562.506.738.972,00 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.



Tabel 5.110
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah-LO	46.010.295.342.977	44.365.069.145.521	1.645.226.197.456	3,71
2.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	1.401.893.769.313	461.646.047.887	940.247.721.426	203,67
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.005.268.401.929	3.393.855.897.994	1.611.412.503.935	47,48
4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	24.145.049.224.753	28.284.884.221.263	(4.139.834.996.510)	(14,64)
Jumlah		76.562.506.738.972	76.505.455.312.665	57.051.426.307	0,07

Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp76.505.455.312.665,00 terjadi kenaikan sebesar Rp57.051.426.307,00 atau 0,07%. Penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut.

5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO adalah pendapatan yang diakui ketika adanya realisasi kas diterima atau penetapan ketetapan, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau RKUD tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan ketetapan.

Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan sistem *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Perpajakan. Timbulnya hak menagih adalah pada saat telah diterbitkannya ketetapan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Perpajakan-LO.

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp46.010.295.342.977,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp44.365.069.145.521,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.645.226.197.456,00 atau 3,71%. Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.111
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah-LO
Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	9.655.338.125.600	9.416.151.829.440	239.186.296.160	2,54



No	Jenis Pajak Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.644.445.800.800	6.643.605.545.100	840.255.700	0,01
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.795.757.431.976	1.680.813.642.600	114.943.789.376	6,84
4	Pajak Rokok	883.986.065.225	855.303.949.037	28.682.116.188	3,35
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	8.322.517.925.368	7.886.999.999.183	435.517.926.185	5,52
6	Pajak Reklame	1.024.313.376.462	966.696.053.486	57.617.322.976	5,96
7	Pajak air tanah	88.358.360.981	98.876.897.239	(10.518.536.258)	(10,64)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	11.423.395.398.303	9.750.581.424.261	1.672.813.974.042	17,16
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.172.176.170.262	7.066.039.805.175	(893.863.634.913)	(12,65)
10	Pajak Alat Berat	6.688.000	0	6.688.000	0
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO		46.010.295.342.977	44.365.069.145.521	1.645.226.197.456	3,71

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO Tahun 2024 mencapai Rp9.655.338.125.600,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp9.416.151.829.440,00, terjadi kenaikan sebesar Rp239.189.296.160,00 atau 2,54%. Rincian Pendapatan PKB-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan PKB-LO (Rp)
A	Ketetapan	927.565.937.935
	Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terbit 2024	927.565.937.935
B	Pendapatan:	8.735.566.051.536
	Pembayaran SKKP 2024	8.735.566.051.536
C	Koreksi	(7.793.863.871)
	Pembatalan SKP	(7.793.863.871)
D	Pendapatan PKB-LO (a + b + c)	9.655.338.125.600

Pendapatan PKB-LO merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *Official Assessment* dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) ditambah dengan pembayaran Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP). SKP adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang dengan masa pajak terutang lebih dari 12 (dua belas) bulan, sedangkan SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya PKB untuk masa pajak kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pendapatan PKB-LO tidak termasuk kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah jatuh tempo tetapi Belum Daftar Ulang (BDU) ke Samsat. Jumlah



Kendaraan yang telah jatuh tempo pada Tahun 2024 tetapi BDU sebanyak 3.056.134 Kendaraan Bermotor dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp2.525.319.141.800,00. Berikut disajikan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah yang berasal dari BDU di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.112
Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Daerah Yang Berasal Dari BDU di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2024

NO	JENIS	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK
1	Sedan Dan Sejenisnya	8.073	19.598.121.025	6.620	15.939.186.601	8.665	26.297.636.855	13.405	50.527.383.600	24.234	119.024.040.950	60.997	231.386.369.031
2	Jeep Segala Merk	2.951	14.065.743.325	2.544	12.735.201.400	4.357	23.991.927.826	9.710	63.629.844.050	23.256	171.600.188.200	42.818	286.022.904.801
3	Mini Bus, Micro Bus	25.289	64.758.766.890	20.846	54.384.796.300	36.769	102.225.105.349	79.011	242.518.498.250	178.650	599.204.774.225	340.565	1.063.091.941.014
4	Pick Up, Light Truck, Truck Dan Sejenisnya	4.808	7.068.594.845	4.115	6.426.965.255	5.355	8.794.364.812	7.893	13.969.364.200	13.233	24.718.622.375	35.404	60.977.911.487
5	Bus Tingkat, Wagon, Box, Delivery Van	2.853	7.418.371.555	2.700	7.007.537.450	3.612	10.354.039.028	5.599	17.327.280.850	12.574	40.429.210.425	27.338	82.536.439.308
6	Dum Truck, Truck Tangki Dan Sejenisnya	1.717	6.315.607.750	1.442	5.640.765.340	1.441	4.115.446.100	2.166	5.642.041.100	3.976	11.524.013.700	10.742	33.237.873.990
7	Otolet/Opelet, Microlet	589	71.418.200	421	53.169.365	320	41.372.800	384	53.855.500	850	121.056.400	2.564	340.872.265
8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.292	347.085.800	2.841	193.497.705	2.431	170.736.761	2.841	252.670.600	3.977	377.552.000	17.382	1.341.542.866
9	Sepeda MOTOR	433.803	109.477.388.125	338.584	85.161.613.011	386.695	107.703.173.542	530.257	160.394.739.020	811.061	256.136.558.800	2.500.400	718.873.472.498
10	Alat-Alat Berat	2.168	5.413.682.855	1.882	4.606.778.435	2.068	5.062.270.400	3.634	10.918.205.800	8.172	21.508.877.050	17.924	47.509.814.540
TOTAL		487.543	234.534.780.370	381.995	192.149.510.862	451.713	288.756.073.473	654.900	565.233.882.970	1.079.983	1.244.644.894.125	3.056.134	2.525.319.141.800

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO Tahun 2024 mencapai Rp6.644.445.800.800,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp6.643.605.545.100,00, terjadi kenaikan sebesar Rp840.255.700,00 atau 0,01%. Rincian Pendapatan BBNKB-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan BBNKB-LO (Rp)
a	Pendapatan:	6.644.445.800.800
	Pembayaran SKKP Tahun 2024	6.644.445.800.800
b	Pendapatan BBNKB-LO	6.644.445.800.800

Pendapatan BBNKB-LO merupakan nilai pendapatan pajak secara *official assessment* yang dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) yang terbit.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO Tahun 2024 mencapai Rp1.795.757.431.976,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.680.813.642.600,00, terjadi kenaikan sebesar



Rp114.943.789.376,00 atau 6,84%. Rincian Pendapatan PBBKB-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan PBBKB-LO (Rp)
a	Pendapatan:	1.795.757.431.976
	Setoran Masa PBBKB	1.795.757.431.976
b	Pendapatan PKB-LO	1.795.757.431.976

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*, di mana nilai Pendapatan PBBKB-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima (setoran masa) pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

d. Pajak Rokok-LO

Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun 2024 mencapai Rp883.986.065.225,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp855.303.949.037,00, terjadi kenaikan sebesar Rp28.682.116.188,00 atau 3,35%. Rincian Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Rokok-LO (Rp)
a	Pendapatan:	883.986.065.225
	Setoran Pajak Rokok	883.986.065.225
b	Pendapatan Pajak Rokok-LO	883.986.065.225

Pajak Rokok memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*, di mana nilai Pendapatan Pajak Rokok-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penyetoran Pajak Rokok dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO

Pendapatan PBJT-LO Tahun 2024 mencapai Rp8.322.517.925.368,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.886.999.999.183,00, terjadi kenaikan sebesar Rp435.517.926.185,00 atau 5,52%. Rincian Pendapatan PBJT-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan PBJT-LO (Rp)
a	Ketetapan	108.409.854.287
	SKPDKB Tahun 2024	108.409.854.287
b	Pendapatan:	8.212.922.209.269
	Setoran Masa PBJT	8.212.910.233.976
	Pengakuan PDM atas Lebih Bayar SKPDKB 2023	11.975.293
c	Koreksi	1.185.861.812
	Pembetulan Ketetapan	1.185.861.812
d	Pendapatan Pajak PBJT-LO (a + b + c)	8.322.517.925.368



PBJT memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*. Pendapatan PBJT-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

f. Pajak Reklame-LO

Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2024 mencapai Rp1.024.313.376.462,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp966.696.053.486,00 terjadi kenaikan sebesar Rp57.617.322.976,00 atau 5,96%. Rincian Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Reklame-LO (Rp)
a	Ketetapan	1.021.861.559.348
	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2024	1.021.861.559.348
b	Pendapatan:	1.848.435.889
	Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka	1.848.435.889
c	Koreksi:	603.381.225
	Pembetulan Ketetapan	603.381.225
d	Pendapatan Pajak Reklame-LO (a + b + c)	1.024.313.376.462

Pendapatan Pajak Reklame-LO merupakan nilai pendapatan pajak secara *official assessment* yang dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang terbit.

g. Pajak Air Tanah-LO

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun 2024 mencapai Rp88.358.360.981,00, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp98.876.897.239,00, terjadi penurunan sebesar Rp10.518.536.258,00 atau 10,64%. Rincian Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Air Tanah-LO (Rp)
a	Ketetapan	87.291.778.840
	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2024	87.291.778.840
b	Pendapatan:	16.916
	Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka	16.916
c	Koreksi:	1.066.565.225
	Pembetulan ketetapan	1.066.565.225
d	Pendapatan Pajak Air Tanah-LO (a + b + c)	88.358.360.981

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO merupakan nilai pendapatan pajak secara *official assessment* yang dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang terbit.



h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO Tahun 2024 mencapai Rp11.423.395.398.303,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp9.750.581.424.261,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.672.813.974.042,00 atau 17,16%. Rincian Pendapatan PBBP2-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan PBBP2-LO (Rp)
a	Ketetapan	11.560.015.801.235
	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Tahun 2024	14.945.548.391.332
	Kompensasi/pbk atas ketetapan Tahun 2024	(3.145.291.757)
	Pembebasan Ketetapan Tahun 2024	(2.180.522.465.151)
	Pengenaan Ketetapan (dhi.pengurangan atas ketetapan pajak pada bidang pendidikan swasta) Tahun 2024	(147.118.065.306)
	Pengurangan Ketetapan Tahun 2024	(120.561.751.738)
	Keringanan Ketetapan Tahun 2024	(940.996.721.710)
	Pembetulan Ketetapan Tahun 2024	6.811.705.565
b	Pendapatan:	(313.120.180)
	Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka	1.633.783.052
	Restitusi	(1.946.903.232)
c	Koreksi	(136.307.282.752)
	Utang Kompensasi	23.461.987
	Kompensasi/pbk atas ketetapan tahun sebelumnya	(2.013.812.237)
	Pembebasan Ketetapan Tahun Sebelumnya	(17.388.532.739)
	Pengenaan Ketetapan Tahun Sebelumnya	(1.887.134.877)
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	(32.872.126.560)
	Keringanan Ketetapan Tahun Sebelumnya	(69.714.246.554)
	Pembetulan Ketetapan Tahun Sebelumnya	(12.454.891.772)
d	Pendapatan PBBP2-LO (a + b + c)	11.423.395.398.303

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO merupakan nilai pendapatan pajak secara *official assessment* yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang terbit.

i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO Tahun 2024 mencapai Rp6.172.176.170.262,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.066.039.805.175,00, terjadi penurunan sebesar Rp893.863.634.913,00 atau 12,65%. Rincian Pendapatan BPHTB-LO Tahun 2024 sebagai berikut.



No	Keterangan	Pendapatan BPHTB-LO (Rp)
a	Ketetapan:	24.747.593.353
	SKPDKB dan STPD Tahun 2024	24.747.593.353
b	Pendapatan:	6.148.378.901.010
	Pembayaran Setoran BPHTB	6.150.759.655.905
	Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka	11.975.000
	Restitusi	(2.392.729.895)
c	Koreksi:	(950.324.101)
	Utang Kompensasi	(117.056.752)
	Penambahan Utang Restitusi	(833.267.349)
d	Pendapatan BPHTB-LO (a + b + c)	6.172.176.170.262

BPHTB memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*. Pendapatan BPHTB-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang merupakan hasil penelitian.

j. Pajak Alat Berat (PAB)-LO

Pendapatan Pajak Alat Berat-LO Tahun 2024 mencapai Rp6.688.000,00.

Rincian Pendapatan Pajak Alat Berat-LO Tahun 2024 sebagai

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Alat Berat-LO (Rp)
a	Pendapatan:	6.688.000,00
	Setoran Pajak Alat Berat	6.688.000,00
b	Pendapatan Pajak Alat Berat-LO	6.688.000,00

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Alat Berat-LO (Rp)
a	Pendapatan:	6.688.000,00
	Setoran Pajak Alat Berat	6.688.000,00
b	Pendapatan Pajak Alat Berat-LO	6.688.000,00

Pendapatan Pajak Alat Berat-LO merupakan nilai pendapatan pajak secara *official assessment* yang dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang terbit.

5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO diakui apabila SKPD/UKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD.



Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.401.893.769.313,00 dan Rp461.646.047.887,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dibandingkan dengan 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp940.247.721.426,00 atau 203,67%. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.113
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum-LO	469.966.776.766	133.274.713.759	336.692.063.007	252,63
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	720.741.786.309	90.834.578.853	629.907.207.456	693,47
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	211.185.206.238	237.536.755.275	(26.351.549.037)	(11,09)
Jumlah		1.401.893.769.313	461.646.047.887	940.247.721.426	203,67

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Per 31 Desember 2024 terdiri dari Penetapan Retribusi Daerah setelah keringanan Peraturan Gubernur yang berlaku dan Pembatalan SKRD dikurangi Retribusi Diterima Dimuka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2024 ditambah Pengakuan Retribusi Diterima Dimuka yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024. Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.114
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024

No	Jenis Retribusi	Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2024 (Rp)	Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023) (Rp)	Pengurangan (Kepgub No.835 Tahun 2024) (Rp)	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Rp)	Penetapan Retribusi Daerah setelah Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023), Pengurangan (Kepgub No.835 Tahun 2024) dan Pembatalan SKRD (Rp)	Retribusi Diterima Dimuka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2024	Pengakuan Retribusi Diterima Dimuka yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah- LO Tahun 2024	Pendapatan Retribusi Daerah- LO Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4-5-6	8	9	10 = 7-8+9
1	Retribusi Jasa Umum-LO	417.640.142.361	60.014.000	1.296.775.000	44.927.022	416.238.426.339	12.756.607.188	66.484.957.615	469.966.776.766
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	723.175.486.418	15.523.663	1.428.500.000	956.113.110	720.775.349.645	654.086.000	620.522.664	720.741.786.309
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	274.275.581.406	0	0	2.564.506.493	271.711.074.913	60.525.868.675	0	211.185.206.238
	Jumlah	1.415.091.210.185	75.537.663	2.725.275.000	3.565.546.625	1.408.724.850.897	73.936.561.863	67.105.480.279	1.401.893.769.313

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum – LO

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp469.966.776.766,00 dan Rp133.274.713.759,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2024 dibandingkan dengan



2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp336.692.063.007,00 atau 252,63%. Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.115

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2024

No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2024 (Rp)	Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023) (Rp)	Pengurangan (Kepgub No. 835 Tahun 2024) (Rp)	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Rp)	Penetapan Retribusi Daerah setelah Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023), Pengurangan (Kepgub No.835 Tahun 2024) dan Pembatalan SKRD (Rp)	Retribusi Diterima Dimuka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2024	Pengakuan Retribusi Diterima Dimuka yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Umum-LO Tahun 2024	Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4-5-6	8	9	10 = 7-8+9
1	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2.550.000	0	0	0	2.550.000	0	0	2.550.000
2	Dinas Lingkungan Hidup	54.348.714.535	0	0	0	54.348.714.535	3.236.297.328	44.905.895.810	96.018.313.017
3	Unit Pengelola Sampah Terpadu	26.774.411.062	0	0	0	26.774.411.062	0	0	26.774.411.062
4	Dinas Perhubungan	433.119.000	60.014.000	0	0	373.105.000	0	0	373.105.000
5	Unit Pengelola Perparkiran	23.359.211.001	0	0	0	23.359.211.001	0	0	23.359.211.001
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	417.096.481	0	0	29.927.022	387.169.459	9.520.309.860	21.579.061.805	12.445.921.404
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.376.475.000	0	1.296.775.000	15.000.000	1.064.700.000	0	0	1.064.700.000
8	78 UKPD di bawah koordinasi Dinas Kesehatan (PPK BLUD)	309.928.565.282	0	0	0	309.928.565.283	0	0	309.928.565.283
	Jumlah	417.640.142.361	60.014.000	1.296.775.000	44.927.022	416.238.426.339	12.756.607.188	66.484.957.615	469.966.776.766

b. Retribusi Jasa Usaha – LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp720.741.786.309,00 dan Rp90.834.578.853,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2024 dibandingkan 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp629.907.207.456,00 atau 693,47%. Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Usaha-LO Tahun 2024 sebagai berikut.



Tabel 5.116
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO
Tahun 2024

No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2024 (Rp)	Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023) (Rp)	Pengurangan (Kepgub No. 835 Tahun 2024) (Rp)	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Rp)	Penetapan Retribusi Daerah setelah Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023), Pengurangan (Kepgub No. 835 Tahun 2024) dan Pembatalan SKRD (Rp)	Retribusi Diterima Dimuka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2024	Pengakuan Retribusi Diterima Dimuka yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Usaha-LO Tahun 2024	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4-5-6	8	9	10 = 7-8+9
1	Dinas Bina Marga	4.109.294.400	0	0	0	4.109.294.400	0	0	4.109.294.400
2	Dinas Sumber Daya Air	3.230.898.450	0	0	131.097.610	3.099.800.840	0	0	3.099.800.840
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	76.031.875.048	0	0	9.052.000	76.022.823.048	0	0	76.022.823.048
4	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	680.695.000	0	0	0	680.695.000	0	0	680.695.000
5	Dinas Sosial	53.150.000	0	0	0	53.150.000	0	0	53.150.000
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	2.784.066.032	0	0	172.715.640	2.611.350.392	0	0	2.611.350.392
7	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	21.789.030.390	0	0	267.445.984	21.521.584.406	654.086.000	620.522.664	21.488.021.070
8	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	13.093.769.094	0	0	0	13.093.769.094	0	0	13.093.769.094
9	Dinas Lingkungan Hidup	6.484.429.250	0	0	0	6.484.429.250	0	0	6.484.429.250
10	Dinas Perhubungan	9.641.435.366	15.523.663	0	0	9.625.911.703	0	0	9.625.911.703
11	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	2.321.296.000	0	0	0	2.321.296.000	0	0	2.321.296.000
12	Unit Pengelola Perparkiran	10.019.871.837	0	0	0	10.019.871.837	0	0	10.019.871.837
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.671.879.598	0	0	90.256.000	9.581.623.598	0	0	9.581.623.598
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	15.793.079.954	0	0	31.620.376	15.761.459.578	0	0	15.761.459.578
15	Dinas Kebudayaan	9.528.671.750	0	0	12.502.500	9.516.169.250	0	0	9.516.169.250
16	Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	3.215.675.000	0	0	0	3.215.675.000	0	0	3.215.675.000
17	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	14.182.899.500	0	0	0	14.182.899.500	0	0	14.182.899.500
18	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	1.748.062.506	0	0	0	1.748.062.506	0	0	1.748.062.506
19	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	15.666.917.125	0	0	0	15.666.917.125	0	0	15.666.917.125
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.572.815.900	0	1.428.500.000	241.423.000	6.902.892.900	0	0	6.902.892.900
21	Badan Pengelolaan Aset Daerah	563.320.000	0	0	0	563.320.000	0	0	563.320.000
22	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	1.938.600.000	0	0	0	1.938.600.000	0	0	1.938.600.000
23	Unit Pengelola Jakarta Smart City	650.892.644	0	0	0	650.892.644	0	0	650.892.644
24	Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center	483.530.987.476	0	0	0	483.530.987.476	0	0	483.530.987.476
25	12 UKPD di bawah koordinasi Dinas Pendidikan (PPK BLUD)	4.865.750.056	0	0	0	4.865.750.056	0	0	4.865.750.056
26	10 UKPD di bawah koordinasi Dinas	3.006.124.042	0	0	0	3.006.124.042	0	0	3.006.124.042



No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2024 (Rp)	Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023) (Rp)	Pengurangan (Kepgub No. 835 Tahun 2024) (Rp)	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Rp)	Penetapan Retribusi Daerah setelah Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023), Pengurangan (Kepgub No. 835 Tahun 2024) dan Pembatalan SKRD (Rp)	Retribusi Diterima Dimuka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2024	Pengakuan Retribusi Diterima Dimuka yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Usaha-LO Tahun 2024	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4-5-6	8	9	10 = 7-8+9
	Kesehatan (PPK BLUD)								
	Jumlah	723.175.486.418	15.523.663	1.428.500.000	956.113.110	720.775.349.645	654.086.000	620.522.664	720.741.786.309

c. Retribusi Perizinan Tertentu – LO

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp211.185.206.238,00 dan Rp237.536.755.275,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2024 dibandingkan dengan 2023, maka terdapat penurunan sebesar Rp26.351.549.037,00 atau 11,09%. Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.117

Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2024

No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2024 (Rp)	Keringanan (Pergub No.36 Tahun 2023) (Rp)	Pengurangan (Kepgub No. 835 Tahun 2024) (Rp)	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Rp)	Penetapan Retribusi Daerah setelah Keringanan (Pergub No. 36 Tahun 2023), Pengurangan (Kepgub No. 835 Tahun 2024) dan Pembatalan SKRD (Rp)	Retribusi Diterima Dimuka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu-LO Tahun 2024	Pengakuan Retribusi Diterima Dimuka yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah Perizinan Tertentu-LO Tahun 2024	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4-5-6	8	9	10 = 7-8+9
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	274.275.581.406	0	0	2.564.506.493	271.711.074.913	60.525.868.675	0	211.185.206.238
	Jumlah	274.275.581.406	0	0	2.564.506.493	271.711.074.913	60.525.868.675	0	211.185.206.238

5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.005.268.401.929,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan dividen atas investasi dengan metode biaya dan pendapatan dari kenaikan nilai investasi dengan metode ekuitas.

Pencatatan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode biaya, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Sedangkan pencatatan



investasi dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) tidak diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Tetapi kenaikan nilai investasi yang diperoleh dari bagian laba perusahaan diakui sebagai pendapatan LO.

Rekapitulasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.118

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	PT Kawasan Berikat Nusantara	22.309.541.092	10.050.867.798	12.258.673.294	121,97
2	PT Cemani Toka	3.361.871.240	1.758.443.960	1.603.427.280	91,18
3	PT Asuransi Bangun Askrida	0	2.302.711.241	(2.302.711.241)	(100,00)
4	PT Pakuan International	111.171.340	0	111.171.340	~
5	Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi	4.979.485.818.257	3.379.743.874.995	1.599.741.943.262	47,33
Jumlah		5.005.268.401.929	3.393.855.897.994	1.611.412.503.935	47,48

a. PT Kawasan Berikat Nusantara

Penerimaan dividen dari PT Kawasan Berikat Nusantara Tahun 2024 sebesar Rp22.309.541.092,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 16 tanggal 28 Juni 2024. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

b. PT Cemani Toka

Penerimaan dividen dari PT Cemani Toka Tahun 2024 sebesar Rp3.361.871.240,00, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 1 tanggal 6 Juni 2024. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

c. PT Pakuan International

Penerimaan dividen dari PT Pakuan International Tahun 2024 sebesar Rp111.171.340,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 52 tanggal 14 Juni 2024. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.



d. Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi

Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp4.979.485.818.257,00 merupakan pendapatan atas laba dan komponen ekuitas lainnya BUMD dan PT Patungan yang menggunakan metode ekuitas, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.119
Pendapatan Atas Laba dan Komponen Ekuitas Lainnya BUMD dan PT Patungan
yang Menggunakan Metode Ekuitas

No.	Perusahaan Daerah	% Kepemilikan	Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 (Rp)	Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2023 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
1	Perumda Air Minum Jaya	100%	735.414.791.576	0	735.414.791.576
2	Perumda Dharma Jaya	100%	7.612.943.003	6.112.857.436	13.725.800.439
3	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	100%	27.679.181.674	1.339.947.623	29.019.129.297
4	Perumda Pasar Jaya	100%	19.445.669.969	3.988.521.991	23.434.191.960
5	Perumda PAL Jaya	100%	34.726.471.812	0	34.726.471.812
6	PT Food Station Tjipinang	99,98%	11.587.276.026	280.486	11.587.556.512
7	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	53,05%	2.769.277.455.230	1.557.105.223	2.770.834.560.453
8	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	26,25%	37.352.048.960	14	37.352.048.974
9	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	72,00%	128.009.520.049	0	128.009.520.049
10	PT Jakarta Propertindo	99,998%	0	18.737.400.022	18.737.400.022
11	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	778.920.228.937	12.538.170.638	791.458.399.575
12	PT Jakarta Tourisindo	99,58%	0	140.074.752.369	140.074.752.369
13	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,998%	8.895.815.291	8.555.276.488	17.451.091.779
14	PT Transportasi Jakarta	99,70%	199.965.480.155	0	199.965.480.155
15	PT Penjamin Kredit Daerah	99,17%	27.174.234.990	520.388.295	27.694.623.285
	TOTAL		4.786.061.117.672	193.424.700.585	4.979.485.818.257

5.4.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang sah-LO merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah-LO meliputi antara lain jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan



pendidikan dan pelatihan, dari angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, BLUD dan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum dapat diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya dokumen penagihan atau ketetapan.

Dalam hal hak atas pendapatan diterima atau direalisasi tanpa penetapan, maka pendapatan LO diakui ketika hak diterima atau direalisasi.

Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum diukur sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan / Surat Tagihan / dokumen ketetapan lainnya / naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan. Pendapatan LO berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi.

Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-LO per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp24.145.049.224.753,00 dan Rp28.284.884.221.263,00. Bila dibandingkan dengan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp4.139.834.996.510,00 atau 14,64% Realisasi penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.120

Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
Tahun 2024 dan 2023

NO	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
a	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	3.370.200.000	3.145.400.000	224.800.000	7,15
b	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	168.596.429.440	23.736.855.686.349	(23.568.259.256.909)	(99,29)
c	Jasa Giro-LO	137.201.843.322	165.515.031.835	(28.313.188.513)	(17,11)
d	Pendapatan Bunga-LO	488.490.082.693	350.699.194.121	137.790.888.572	39,29
e	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	10.408.965.208	13.259.035.958	(2.850.070.750)	(21,50)
f	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	19.862.665.976	15.489.416.067	4.373.249.909	28,23
g	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	73.838.014.172	42.527.904.716	31.310.109.456	73,62
h	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	357.135.318.003	478.008.631.155	(120.873.313.152)	(25,29)
i	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	5.077.640.543	1.045.541.564	4.032.098.979	385,65
j	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	71.391.895	204.862.000	(133.470.105)	(65,15)
k	Pendapatan dari Pengembalian-LO	60.200.114.036	26.850.883.877	33.349.230.159	124,20
l	Pendapatan BLUD-LO	2.990.733.136.658	3.364.232.258.340	(373.499.121.682)	(11,10)



NO	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
m	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	67.241.729.190	86.440.088.006	(19.198.358.816)	(22,21)
n	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	117.950.000	610.287.275	(492.337.275)	(80,67)
o	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	19.762.703.743.617	0	19.762.703.743.617	~
	Jumlah	24.145.049.224.753	28.284.884.221.263	(4.139.834.996.510)	(14,64)

Penjelasan lebih lanjut Penerimaan Lain-lain PAD-LO Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2024 sebesar Rp3.370.200.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp3.145.400.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp224.800.000,00 atau 7,15%. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO merupakan penerimaan atas biaya kompensasi bekas tanah Brandgang yang berada di 1 (satu) lokasi yang sebelumnya tidak tercatat sebagai Aset Tetap atau Aset Lainnya. Hasil penjualan tersebut diakui pada saat Surat Keputusan Gubernur tentang Biaya Kompensasi Penggunaan/pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang terbit, sedangkan nilainya diukur berdasarkan besaran biaya kompensasi yang tercantum pada SK Gubernur.

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO adalah pendapatan yang bersumber dari hasil sewa BMD, hasil kerja sama pemanfaatan BMD, hasil dari Bangun Guna Serah (BGS), dan hasil dari Bangun Serah Guna (BSG). Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO berupa hasil sewa BMD, BGS, dan BSG diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun sesuai dengan hak Pemerintah Daerah yang sudah dapat diakui di tahun berkenaan. Nilai Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen Surat Tagihan kepada pihak ketiga.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp168.596.429.440,00,00 dan sebesar Rp23.736.855.686.349,00, terjadi penurunan sebesar Rp23.568.259.256.909,00 atau 99,29%.

Adapun rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2024 sebagai berikut.



No	Nama Akun	Nilai (Rp)
1	Hasil Sewa BMD-LO	128.419.699.646
2	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO	39.266.042.398
3	Hasil dari Bangun Serah Guna-LO	910.687.396
Jumlah		168.596.429.440

c. Jasa Giro – LO

Jasa Giro-LO adalah penerimaan jasa giro atas penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur, baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah maupun Bendaharawan Daerah.

Pendapatan Jasa Giro-LO diakui secara periodik, yaitu pada saat hak Pemerintah Daerah atas penerimaan jasa giro telah jatuh tempo setiap bulan. Sedangkan nilainya diukur sebesar nilai nominal yang tercantum pada Bukti Penerimaan beserta dokumen ketetapan piutang jasa giro pada akhir periode penyusunan laporan keuangan.

Pendapatan Jasa Giro-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp137.201.843.322,00 dan sebesar Rp165.515.031.835,00.

Pendapatan Jasa Giro-LO Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Pendapatan Jasa Giro-LO Tahun 2023 sebesar Rp165.515.031.835,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp28.313.188.513,00 atau 17,11%. Adapun rincian Pendapatan Jasa Giro-LO sebagai berikut.

No	Nama Akun	Nilai (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	131.115.477.159
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	3.920.283.552
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	2.166.082.611
Jumlah		137.201.843.322

d. Pendapatan Bunga – LO

Pendapatan Bunga-LO adalah pendapatan bunga yang berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito, obligasi, dan lain sebagainya.

Pendapatan Bunga-LO diakui sesuai dengan hak pendapatan Pemerintah Daerah atas pendapatan bunga yang timbul selama periode laporan keuangan. Sedangkan nilainya disajikan sebesar nilai nominal deposito/obligasi/lainnya.

Pendapatan Bunga-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp488.490.082.693,00 dan sebesar Rp350.699.194.121,00, yang diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatan dana dalam pada rekening bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 dan pengakuan bunga akrual berdasarkan jatuh tempo deposito. Pendapatan Bunga-LO Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Pendapatan Bunga-LO Tahun 2023



sebesar Rp350.699.194.121,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp137.790.888.572,00 atau 39,29%.

e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO adalah penyetoran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Institusi Pengawas baik internal maupun eksternal. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO diakui berdasarkan penetapan tuntutan ganti rugi dan Surat Tagih yang ditetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi pada Tahun 2023.

Nilai Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO diukur berdasarkan nilai (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara SKP2KS.

Pada Tahun 2024 seluruh Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO berbentuk uang. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp10.408.965.208,00 dan sebesar Rp13.259.035.958,00, atau terjadi penurunan sebesar Rp2.850.070.750,00 atau 21,50%.

f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO adalah penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa, dan kerja sama oleh Pemerintah Daerah. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO diakui saat timbulnya dokumen ketetapan. Sedangkan nilainya diukur sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Tahun 2024 tercatat sebesar Rp19.862.665.976,00, terdiri atas:



- 1) sebesar Rp14.807.082.260,00 merupakan penerimaan komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi;
- 2) sebesar Rp633.580.881,00 merupakan penerimaan angsuran/cicilan uang muka rumah susun dan sewa beli rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- 3) sebesar Rp4.422.002.835,00 merupakan pendapatan atas SMK non BLUD pada Dinas Pendidikan.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp15.489.416.067,00, terjadi peningkatan sebesar Rp4.373.249.909,00 atau 28,23%.

g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO adalah penerimaan atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama dan didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO diakui ketika terbitnya dokumen ketetapan berupa Berita Acara Serah Terima (BAST). Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen BAST.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Tahun 2024 sebesar Rp73.838.014.172,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Tahun 2023 sebesar Rp42.527.904.716,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp31.310.109.456,00 atau 73,62%.

h. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO

Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO adalah pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah setelah jatuh tempo, keterlambatan pendaftaran atau keterlambatan pelaporan. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO diakui saat terbit Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Sedangkan nilainya dihitung berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen STPD/SKPD/SKPDKB.

Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO Tahun 2024 tercatat sebesar Rp357.135.318.003,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp478.008.631.155,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp120.873.313.152,00 atau 25,29%. dengan rincian sebagai berikut.



No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	211.755.267.784
2	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	1.485.372.690
3	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	327.640.252
4	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	14.500.432.525
5	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	42.202.269.321
6	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	9.243.531.032
7	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	9.080.058.014
8	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-LO	1.643.376.150
9	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	2.765.551.112
10	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	1.527.867.587
11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	52.940.127.080
12	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	9.663.824.456
Jumlah		357.135.318.003

i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO adalah Pendapatan denda Retribusi Daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah jatuh tempo, yang bersumber dari pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO diakui pada saat dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terbit. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai tercantum pada dokumen SKRD.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 tercatat sebesar Rp5.077.640.543,00, merupakan pendapatan sanksi retribusi sesuai dengan ketentuan SKRD. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp1.045.541.564,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.032.098.979,00 atau 385,65%. Adapun rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	2.923.224.969
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.154.415.574
Jumlah		5.077.640.543

j. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO adalah pendapatan yang bersumber dari hasil eksekusi atas jaminan pengadaan barang/jasa. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, BUD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan. Nilai Pendapatan Hasil Eksekusi atas



Jaminan-LO diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO Tahun 2024 sebesar Rp71.391.895,00 seluruhnya merupakan hasil eksekusi atas jaminan pemeliharaan pembangunan *amphiteater* Taman Benyamin Suaeb di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya pada Dinas Kebudayaan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp204.862.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp133.470.105,00 atau 65,15%.

k. Pendapatan dari Pengembalian-LO

Pendapatan dari Pengembalian-LO merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja sebelum Tahun 2024 yang diterima pada Tahun 2024.

Pendapatan dari Pengembalian-LO diakui pada saat pengembalian diterima atau hak atas pengembalian ditetapkan, di antaranya melalui penerbitan dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pengembalian belanja. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen STS atau dokumen ketetapan lainnya.

Pendapatan dari Pengembalian-LO Tahun 2024 sebesar Rp60.200.114.036,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp26.850.883.877,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp33.349.230.159,00 atau 124,20%. Adapun rincian Pendapatan dari Pengembalian-LO Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	3.500.000
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa	3.224.588.086
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	500.000
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	44.233.291
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	160.991.966
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	192.475.661
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.738.887.404
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.961.379
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.105.712.596
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah	20.924.081.689
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	3.301.337.601



No	Uraian	Nilai (Rp)
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	715.103.994
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	645.069.258
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1.649.975.960
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO	478.695.151
Jumlah		60.200.114.036

I. Pendapatan BLUD-LO

Pendapatan-LO dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum BLUD, pendapatan hibah BLUD, pendapatan hasil kerja sama BLUD, dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah.

Pendapatan BLUD diakui dengan kriteria:

- 1) telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi Pendapatan dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;
- 2) telah diterbitkan surat ketetapan; dan atau
- 3) telah diterbitkan surat penagihan.

Pendapatan-LO dari BLUD-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.990.733.136.658,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp3.364.232.258.340,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp373.499.121.682,00 atau 11,10%. Adapun rincian Pendapatan-LO dari BLUD-LO Tahun 2024 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.895.288.235.567
2	Pendapatan BLUD dari Hibah	5.514.674.765
3	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	58.002.417.718
4	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	31.927.808.608
Jumlah		2.990.733.136.658

m. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO adalah pendapatan yang berasal dari denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO diakui pada saat terbitnya dokumen penetapan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.



Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai tercantum pada dokumen penetapan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp67.241.729.190,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp86.440.088.006,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp19.198.358.816,00 atau 22,21%.

n. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO adalah pendapatan denda yang timbul atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyetorkan pokok hasil kerja sama penyediaan infrastruktur dan hasil dari pengakhiran sewa BMD ke Kas Daerah sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO diakui pada saat dokumen Surat Tagih terbit. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen Surat Tagih.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2024 sebesar Rp117.950.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp610.287.275,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp492.337.275,00 atau 80,67%.

o. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO adalah pendapatan terkait pemenuhan kewajiban pihak ketiga atas penerbitan SIPPT dan SP3L berupa Aset Fasos Fasum yang nilainya diakui berdasarkan BAST.

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp19.762.703.743.617,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp0,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp19.762.703.743.617,00 atau 100,00%.

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Transfer (LO) merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan. Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp22.335.089.174.685,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang



tercatat sebesar Rp23.778.953.501.314,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp1.443.864.326.629,00 atau 6,07%. Rekapitulasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.121

Rekapitulasi Pendapatan Transfer-LO
Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	18.746.603.810.943	20.669.456.449.952	(1.922.852.639.009)	(9,30)
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	368.173.270.201	22.179.718.000	345.993.552.201	1.559,95
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	0	3.076.020.400	(3.076.020.400)	(100,00)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	3.176.221.876.541	3.049.066.285.962	127.155.590.579	4,17
5	Insentif Fiskal - LO	44.090.217.000	35.175.027.000	8.915.190.000	0
Jumlah		22.335.089.174.685	23.778.953.501.314	(1.443.864.326.629)	(6,07)

Rincian Pendapatan Transfer-LO terdiri dari sebagai berikut:

5.4.1.1.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Realisasi DBH-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp18.746.603.810.943,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp20.669.456.449.952,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.922.852.639.009,00 atau 9,30%. DBH-LO Tahun 2024 terdiri dari penetapan pendapatan transfer, penetapan kurang bayar, dan penetapan lebih bayar, dengan penjelasan sebagai berikut:

- penetapan dan realisasi pendapatan transfer dana bagi hasil Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 sebesar Rp15.561.026.726.000,00;
- Realisasi kurang bayar dana bagi hasil berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 sebesar Rp29.711.000,00;
- Penyesuaian kurang dan lebih bayar tahun berjalan 2024 berdasarkan PMK 89 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar, yang diakui sebagai Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 sebesar Rp3.095.547.373.943,00.

5.4.1.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Penetapan DAU Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 sebesar Rp368.173.270.201,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp22.179.718.000,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp345.993.552.201,00 atau 1.559,95 %.



5.4.1.1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp3.076.020.400,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp3.076.020.400,00 atau 100%.

5.4.1.1.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

DAK Non Fisik-LO Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 sebesar Rp3.176.221.876.541,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp3.049.066.285.962,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp127.155.590.579,00 atau 4,17%. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO terdiri dari:

- a. realisasi DAK Non Fisik Tahun 2024 sebesar Rp3.187.483.559.919,00; dan
- b. pengembalian DAK Non Fisik-BOS Reguler ke RKUN berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat sebesar Rp11.261.683.378,00.

5.4.1.1.2.5 Insentif Fiskal-LO

Insentif Fiskal-LO adalah sebesar Rp44.090.217.000,00 yang terdiri dari Penetapan Insentif Fiskal Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 sebesar Rp32.358.203.000,00 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Fiskal Tahun 2024 Kinerja Tahun Berjalan sebesar Rp11.732.014.000,00.

5.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diakui pada saat hak diterima atau terealisasi berdasarkan dokumen penetapan pendapatan-LO terkait. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diukur berdasarkan pada nilai yang tercantum pada dokumen pendapatan-LO terkait.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.223.761.457.172,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.584.721.532.629,00, sehingga terdapat penurunan sebesar 65,86%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 diantaranya terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Pembangunan MRT dan Pendapatan Hibah dari Jasa Raharja kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dengan total nilai sebesar Rp589.167.782.024,00;



- b. Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Tanah, Peralatan dan Mesin, dan Gedung dan Bangunan dengan total nilai Rp140.402.658.292,00 kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD);
- c. Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan dalam bentuk Vaksin, Obat-obatan dan Laptop sebesar Rp368.280.252.004,00 kepada Dinas Kesehatan;
- d. Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya (Buku) sebesar Rp12.574.277.582,00 kepada Dinas Pendidikan;
- e. Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp510.438.153,00 kepada Dinas Sosial;
- f. Pendapatan Hibah dari BKKBN berbentuk Alat Kontrasepsi dan Non Alat Kontrasepsi sebesar Rp11.711.518.092,00 kepada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- g. Pendapatan Hibah dari PAM Jaya dalam bentuk TV dan Bank DKI dalam bentuk Laptop dan Printer sebesar Rp18.043.000,00 kepada Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- h. Pendapatan Hibah dari Perpustakaan Nasional dalam bentuk PC Komputer, Printer dan Router sebesar Rp36.257.000,00 kepada Kota Administrasi Jakarta Timur;
- i. Pendapatan Hibah dari BPJS Kesehatan dalam bentuk Persediaan Tempat Sampah sebesar Rp37.500.000,00 kepada Kabupaten Kepulauan Seribu;
- j. Pendapatan Hibah dari Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp53.348.536.262,00; dan
- k. Pendapatan Hibah dari BNPB dalam bentuk Persediaan Fasilitas Isolasi Covid-19 sebesar Rp6.561.338.500,00 kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5.4.1.2 Beban Daerah

Beban Daerah Tahun 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya pengeluaran kas maupun konsumsi aset non kas, dan timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Nilai beban dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen tagihan pihak ketiga atau dokumen sumber seperti *listing* pegawai, nota perjanjian, Surat Keputusan dan dokumen lainnya yang direkonsiliasi dengan Utang, reklasifikasi, kapitalisasi Belanja, Beban Dibayar di Muka, dan akun lainnya.

Beban Tahun 2024 sebesar Rp69.491.484.612.994,00 terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp61.717.405.243.317,00, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp7.390.364.255.277,00, dan Beban Transfer sebesar Rp383.715.114.400,00. Beban Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,29% atau sebesar Rp886.434.870.667,00 dari tahun sebelumnya. Kenaikan terbesar berasal dari Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang meningkat 252,65% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dikarenakan meningkatnya partisipasi dalam kompetisi olahraga sehingga terjadi kenaikan dalam pemberian penghargaan kepada atlet, pelatih dan asisten pelatih berprestasi.

Selain itu, terdapat beberapa penurunan Beban Daerah Tahun 2024 yang salah satunya disebabkan oleh penurunan Beban Bantuan Sosial sebesar 19,12% dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan adanya mekanisme verifikasi pemberian bantuan sosial yang lebih selektif dibandingkan dengan yang sebelumnya. Lebih rinci mengenai Beban Daerah Tahun 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.122
Rekapitulasi Beban Daerah
Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Operasi		61.717.405.243.317	61.040.642.496.716	676.762.746.601	1,11
1	Beban Pegawai	19.064.896.423.259	17.978.251.780.755	1.086.644.642.504	6,04
2	Beban Barang	8.210.467.578.487	8.368.039.918.686	(157.572.340.199)	(1,88)
3	Beban Jasa	15.899.306.134.614	15.897.400.048.649	1.906.085.965	0,01
4	Beban Pemeliharaan	2.374.946.418.584	2.347.768.127.910	27.178.290.674	1,16
5	Beban Perjalanan Dinas	214.123.989.688	144.239.199.856	69.884.789.832	48,45
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	632.244.815.800	179.286.179.744	452.958.636.056	252,65
7	Beban Bunga	181.645.376.709	229.413.542.369	(47.768.165.660)	(20,82)
8	Beban Subsidi	5.637.232.604.654	5.482.558.366.839	154.674.237.815	2,82
9	Beban Hibah	2.791.383.055.853	3.623.927.568.369	(832.544.512.516)	(22,97)
10	Beban Bantuan Sosial	3.478.730.711.035	4.300.981.697.194	(822.250.986.159)	(19,12)
11	Beban Penyisihan Piutang	1.394.832.288.718	1.018.310.129.789	376.522.158.929	36,98



No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
12	Beban Lain-lain	1.837.595.845.916	1.470.465.936.556	367.129.909.360	24,97
Beban Penyusutan dan Amortisasi		7.390.364.255.277	7.207.960.765.111	182.403.490.166	2,53
1	Beban Penyusutan	7.324.258.948.985	7.093.345.755.464	230.913.193.521	3,26
2	Beban Amortisasi	66.105.306.292	114.615.009.647	(48.509.703.355)	(42,32)
Beban Transfer		383.715.114.400	356.446.480.500	27.268.633.900	7,65
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	383.715.114.400	356.446.480.500	27.268.633.900	7,65
Jumlah Beban		69.491.484.612.994	68.605.049.742.327	886.434.870.667	1,29

5.4.1.3 Beban Operasi

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan belanja-belanja operasi pada Tahun 2024 yang direkonsiliasi dengan nilai utang per 31 Desember 2024 dan 2023, Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023, koreksi lebih/kurang catat utang Tahun 2023, reklasifikasi Belanja Modal dan Aset Tetap ke Beban Operasi, kapitalisasi belanja ke Aset Tetap dan akun-akun terkait lainnya.

Beban Operasi Tahun 2024 sebesar Rp61.717.405.243.317,00 terdiri dari beban berikut ini.

5.4.1.3.1.a Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp19.064.896.423.259,00 disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai yang di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai Tahun 2024 yang diperhitungkan dengan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023. Apabila dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp17.978.251.780.755,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.086.644.642.504,00 atau 6,04%.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Pegawai - Non BLUD	18.859.300.728.826
	Beban Gaji dan Tunjangan	6.233.852.759.810
	Beban Non Gaji dan Tunjangan	12.625.447.969.016
2	Beban Pegawai – BLUD	205.595.694.433
	Jumlah	19.064.896.423.259

Beban Pegawai Tahun 2024 di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.722.115.148.274,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp2.076.622.351.225,00, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp888.080.857.430,00, Satpol PP sebesar Rp825.581.759.822,00, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp758.158.026.434,00.



5.4.1.3.1.b Beban Barang

Beban Barang merupakan beban yang mencatat pemakaian persediaan dan pembayaran atas pengeluaran barang lainnya selama Tahun 2024. Beban Barang Tahun 2024 sebesar Rp8.210.467.578.487,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Barang Tahun 2023 sebesar Rp8.368.039.918.686,00, terjadi penurunan sebesar Rp157.572.340.199,00 atau 1,88%. Beban Barang Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban barang di SKPD	4.735.908.713.623
2	Beban barang di BLUD	3.474.558.864.864
	Total	8.210.467.578.487

Beban barang di SKPD sebesar Rp4.735.908.713.623,00 tersebut terdiri atas Beban Persediaan dan Beban Non-persediaan yang masing-masing nilainya sebesar Rp2.102.277.704.046,00 dan Rp2.633.631.009.577,00. Nilai beban persediaan dicatat sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan telah memperhitungkan persediaan awal Tahun 2024, pembelian atau perolehan persediaan selama Tahun 2024, persediaan akhir per 31 Desember 2024, belanja barang dibayar di muka dan transaksi-transaksi penambahan/pengurangan persediaan lainnya. Atas beban persediaan sebesar Rp2.102.277.704.046,00 tersebut, terdapat beban persediaan yang terjadi karena persediaan usang sebesar Rp4.772.152.879,00.

Beban Barang sebesar Rp8.210.467.578.487,00 di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp611.159.585.510,00, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp372.575.239.253,00, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp359.800.336.203,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp319.304.725.584,00, dan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp312.917.407.284,00

5.4.1.3.1.c Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp15.899.306.134.614,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Jasa Tahun 2023 sebesar Rp15.897.400.048.649,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.906.085.965,00 atau 0,01%. Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp15.899.306.134.614,00 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	12.231.964.156.507
2	Beban Jasa luran Jaminan/Asuransi	2.256.071.910.018
3	Beban Jasa Sewa Aset Tetap	984.575.818.000
4	Beban Jasa Konsultasi	343.643.892.205
5	Beban Jasa Pendidikan dan Pelatihan	80.373.089.745



No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
6	Beban Jasa Insentif ASN	2.677.268.139
	Jumlah	15.899.306.134.614

Beban jasa di antaranya terdapat pada Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta sebesar Rp2.185.487.509.353,00, Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp457.515.687.877,00, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik sebesar Rp418.368.535.278,00, Dinas Bina Marga sebesar Rp286.865.494.073,00, dan Sudin Pendidikan I – Jakarta Timur sebesar Rp250.497.860.274,00.

5.4.1.3.1.d **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp2.374.946.418.584,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp2.347.768.127.910,00, terjadi kenaikan sebesar Rp27.178.290.674,00 atau 1,16%. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp2.374.946.418.584,00 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	993.086.456
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.089.021.666.229
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	897.131.343.584
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	382.176.593.039
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	599.379.159
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	5.024.350.117
	Jumlah	2.374.946.418.584

Beban pemeliharaan tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp100.504.070.274,00, Sudin Pendidikan I – Jakarta Timur sebesar Rp98.607.589.766,00, Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp85.234.537.515,00, Sudin Pendidikan II – Jakarta Timur sebesar Rp84.882.679.117,00, dan Sudin Sumber Daya Air – Jakarta Utara sebesar Rp82.070.431.945,00.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024 di antaranya termasuk belanja modal Tahun 2024 yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp61.227.257.766,00.

5.4.1.3.1.e **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp214.123.989.688,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp144.239.199.856,00, terjadi kenaikan sebesar Rp69.884.789.832,00 atau



48,45%. Beban Perjalanan Dinas terdiri dari beban perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas luar negeri. Beban Perjalanan Dinas tersebut di antaranya terdapat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp97.141.324.059,00, Biro Kerja Sama Daerah sebesar Rp80.766.476.066,00, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp8.433.334.224,00, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp6.983.276.025,00, dan Inspektorat sebesar Rp6.664.500.000,00.

5.4.1.3.1.f Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp632.244.815.800,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 sebesar Rp179.286.179.744,00, terjadi kenaikan sebesar Rp452.958.636.056,00 atau 252,65%. Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diantaranya terdapat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp498.302.515.240,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp56.830.000.000,00, Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga – Jakarta Selatan sebesar Rp7.336.999.326,00, Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga – Jakarta Timur sebesar Rp6.687.237.669,00, dan Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Jakarta Utara sebesar Rp4.364.476.000,00.

Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat di antaranya merupakan pemberian penghargaan untuk atlet, pelatih, dan asisten pelatih berprestasi pada acara olahraga tingkat nasional, regional, dan internasional pada Dinas Pemuda dan Olah.

5.4.1.3.1.g Beban Bunga

Beban Bunga Tahun 2024 sebesar Rp181.645.376.709,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Bunga Tahun 2023 sebesar Rp229.413.542.369,00, terjadi penurunan sebesar Rp47.768.165.660,00 atau 20,82%. Beban Bunga Tahun 2024 dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Bunga Proyek JEDI	30.562.295.493
2	Beban Bunga Proyek MRT	32.661.824.265
3	Beban Bunga Program PEN	118.421.256.951
	Jumlah	181.645.376.709

a. Beban Bunga Proyek JEDI

Beban Bunga Proyek JEDI sebesar Rp30.562.295.493,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek JEDI sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor SLA-1247/DSMI/2012. Pinjaman tersebut diberikan untuk



pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

b. Beban Bunga Proyek MRT

Beban Bunga Proyek MRT sebesar Rp32.661.824.265,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek MRT sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor 1263/DSMI/2016. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembangunan proyek MRT *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan *Phase II* (Jakarta Kota – Bundaran HI).

c. Beban Bunga Program PEN

Beban Bunga Program PEN sebesar Rp118.421.256.951,00 merupakan beban bunga yang timbul atas pinjaman dalam rangka mendukung program PEN Provinsi DKI Jakarta. Pinjaman tersebut diberikan antara lain untuk pembangunan fasilitas RDF *Plant* dan fasilitas *Landfill Mining* TPST Bantargebang.

5.4.1.3.1.h Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp5.637.232.604.654,00. Nilai tersebut telah direkonsiliasi dengan utang belanja subsidi Tahun 2024 dan 2023. Apabila dibandingkan dengan Beban Subsidi Tahun 2023 sebesar Rp5.482.558.366.839,00, terjadi kenaikan sebesar Rp154.674.237.815,00 atau 2,82%. Beban Subsidi Tahun 2024 yang diberikan kepada BUMD dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	PT Transjakarta	3.640.197.202.964
2	Perumda Dharma Jaya	435.158.599.225
3	PT Food Tjipinang Station	356.020.548.809
4	PT MRT Jakarta	764.583.610.396
5	PT LRT Jakarta	441.272.643.260
Jumlah		5.637.232.604.654

5.4.1.3.1.i Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp2.791.383.055.853,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp3.623.927.568.369,00, terjadi penurunan sebesar Rp832.544.512.516,00 atau 22,97%.

Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp2.791.383.055.853,00 dirinci sebagai berikut.



No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	525.190.033.597
2	Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat	1.494.580.805.623
3	Beban Hibah Dana BOS ke SD Swasta	314.507.817.875
4	Beban Hibah Dana BOS ke SMP/SMPT/SMA Swasta	395.393.866.484
5	Beban Hibah Dana BOS ke Sekolah Khusus/SLB	19.546.159.794
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	41.759.385.000
7	Beban Hibah aset yang diserahkan ke pihak lain di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	404.987.480
Jumlah		2.791.383.055.853

Beban Hibah tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.602.254.768.581,00, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp390.497.673.558,00, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp376.920.180.002,00, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp333.601.750.874,00, dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebesar Rp50.910.000.000,00.

5.4.1.3.1.j **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp3.478.730.711.035,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp4.300.981.697.194,00, terjadi penurunan sebesar Rp822.250.986.159,00 atau 19,12%. Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	8.841.910.000
2	Bantuan Sosial Kepada Individu	3.469.888.801.035
Jumlah		3.478.730.711.035

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 tidak termasuk dengan belanja bantuan sosial yang belum disalurkan kepada penerima di tahun berjalan dan yang akan disalurkan di Tahun 2025. Pencatatan belanja bantuan sosial tersebut disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

Bantuan Sosial yang diberikan antara lain Bantuan Sosial Kepada Individu berupa uang yang diberikan untuk biaya personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS), beasiswa pendidikan untuk anak tenaga kesehatan yang



meninggal karena Covid-19, serta pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyandang disabilitas dan lansia.

5.4.1.3.1.k **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan risiko ketidaktertagihan piutang. Penentuan tingkat risiko ketidaktertagihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang penelitiannya dilakukan berdasarkan umur piutang pada tanggal laporan keuangan.

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp1.394.832.288.718,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp1.018.310.129.789,00, terjadi kenaikan sebesar Rp376.522.158.929,00 atau 36,98%. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp1.394.832.288.718,00 dirinci per jenis piutang sebagai berikut

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.198.564.439.683
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	105.285.735.949
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	90.982.113.086
Jumlah		1.394.832.288.718

5.4.1.3.1.l **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain Tahun 2024 sebesar Rp1.837.595.845.916,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp1.470.465.936.556,00, terjadi kenaikan sebesar Rp367.129.909.360,00 atau 24,97%. Beban Lain-lain Tahun 2024 sebagian besar terdiri atas beban kerugian penghapusan Aset Tetap (selain diperhitungkan surplus defisit) sebesar Rp114.985.528.967,00 yang terdapat pada Pejabat Pengelolaan Aset Daerah, koreksi saldo awal yang berdampak pada pengurangan ekuitas atas PT Jakarta Propertindo sebesar Rp804.792.901.781,00 dan atas PD Dharma Jaya sebesar Rp39.683.051.300,00, serta terdapat beban penurunan nilai investasi sebesar Rp878.134.363.920,00 atas pengumuman rugi BUMD dan PT patungan Tahun 2024 dengan metode pencatatan ekuitas dan kejadian lain yang mengurangi ekuitas dalam laporan keuangan *unaudited investee* dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.123

Beban Penurunan Nilai Investasi BUMD dan PT Patungan Tahun 2024 dengan
Metode Pencatatan Ekuitas
Tahun 2024 dan 2023

No.	Nama	Rugi Tahun 2024 (Rp)	Pengakuan Beban atas Kejadian selain Pengumuman Rugi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	PD AM Jaya	0	55.383.012.215	55.383.012.215
2	PD Dharma Jaya	0	1.078.881.317	1.078.881.317
3	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	0	11.841.286.552	11.841.286.552
4	PD PAL Jaya	0	1	1
5	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	0	94.765.831.264	94.765.831.264
6	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	0	496.806.292	496.806.292
7	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	0	42.804.720.063	42.804.720.063
8	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	517.180.237.172	2.624.609.250	519.804.846.422
9	PT Bank DKI Jakarta	0	99.509.268.424	99.509.268.424
10	PT Jakarta Tourisindo	49.151.702.900	0	49.151.702.900
11	PT Mass Rapid Transit Jakarta	0	70.388.370	70.388.370
12	PT Transportasi Jakarta	0	2.856.149.045	2.856.149.045
13	PT Penjamin Kredit Daerah	0	371.471.055	371.471.055
	Jumlah	566.331.940.072	311.802.423.848	878.134.363.920

5.4.1.3.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.390.364.255.277,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.207.960.765.111,00, mengalami kenaikan sebesar Rp182.403.490.166,00 atau 2,53%.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Beban Amortisasi adalah alokasi nilai Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.390.364.255.277,00 terdiri dari beban berikut ini.



a. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp7.324.258.948.985,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp7.093.345.755.464,00, terjadi kenaikan sebesar Rp230.913.193.521,00 atau 3,26%. Beban Penyusutan Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	2.184.267.229.896
2	Gedung dan Bangunan	1.897.876.424.755
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.094.384.341.814
4	Aset Tetap Lainnya	3.182.155.730
5	Aset Lainnya	143.154.731.399
6	Properti Investasi – Gedung dan Bangunan	685.900.400
7	Properti Investasi – Jalan, Irigasi dan Jaringan	708.164.991
Jumlah		7.324.258.948.985

Beban Penyusutan Tahun 2024 di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp1.622.983.277.971,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp485.378.755.185,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp390.447.369.767,00, Sudin Bina Marga – Jakbar sebesar Rp171.642.200.759,00 dan Sudin Sumber Daya Air – Jakpus sebesar Rp144.611.433.330,00.

b. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp66.105.306.292,00 yang merupakan amortisasi atas aset tidak berwujud antara lain Lisensi Oracle dan *Operating System Windows*. Apabila dibandingkan dengan Beban Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp114.615.009.647,00, terjadi penurunan sebesar Rp48.509.703.355,00 atau 42,32%.

Beban Amortisasi antara lain terdapat pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp27.773.592.721,00, Unit Pengelola Jakarta Smart City sebesar Rp19.712.885.801,00, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp5.988.592.399,00, Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp4.236.297.257,00, dan Pusat Data dan Informasi Keuangan sebesar Rp1.337.918.107,00.

5.4.1.3.3 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Belanja Transfer.

Beban Transfer Tahun 2024 sebesar Rp383.715.114.400,00 merupakan Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Kabupaten/Kota. Apabila dibandingkan dengan



Beban Transfer Tahun 2023 sebesar Rp356.446.480.500,00, terjadi kenaikan sebesar Rp27.268.633.900,00 atau 7,65%.

5.4.2 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional terdiri dari Surplus Non Operasional dan Beban Non Operasional yang dihasilkan dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2024, surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp23.759.653.274,00 yang berasal dari selisih antara Surplus dan Defisit Non Operasional. Penjelasan lebih lanjut mengenai Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

5.4.2.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional merupakan surplus yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, di mana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih besar daripada nilai bukunya.

Selama periode Tahun 2024, Surplus Non Operasional merupakan Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa penjualan aset non lancar sebesar Rp27.717.897.192,00. Sedangkan nilai Surplus Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp3.722.940.118,00.

5.4.2.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional merupakan defisit yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban. Defisit Non Operasional Tahun 2024 merupakan Defisit dari Penghentian Aset Non Lancar sebesar Rp3.958.243.918,00, yang di antaranya berasal dari Penghentian Aset non lancar di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.214.898.707,00 dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp634.172.000,00.

5.4.3 Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar (Rp3.025.742.350,00).

5.4.4 Surplus – LO

Surplus - LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp30.653.632.411.109,00. Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut:



Pendapatan – LO	100.121.357.370.829	
Beban	(69.491.484.612.994)	
Surplus Kegiatan Operasional		30.629.872.757.835
Surplus Kegiatan Non Operasional		23.759.653.274
Pos Luar Biasa		0
Surplus – LO		30.653.632.411.109

5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2024.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2024, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp70.598.385.967.701,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp58.172.616.250.008,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.425.769.717.693,00. Sedangkan untuk Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp67.759.383.857.593,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp57.127.148.778.536,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.632.235.079.057,00. Terdapat kenaikan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp1.793.534.638.636,00 yang di antaranya disebabkan oleh kenaikan arus kas masuk atas penerimaan pajak sebesar Rp931.593.220.027,00 dan penerimaan dana bagi hasil Rp805.251.679.995,00.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Bagi Hasil, Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Dana Insentif Fiskal, dan Penerimaan Hibah. (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran Bunga, Pembayaran Subsidi, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bantuan Keuangan, dan Pembayaran Tak Terduga.

Secara rinci nilai Arus Kas Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 5.124

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	3
1	ARUS KAS MASUK:		
a.	Penerimaan Pajak Daerah	44.448.074.892.860	43.516.481.672.833
b.	Penerimaan Retribusi Daerah	713.719.914.819	454.697.560.911
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	653.700.898.761	545.869.249.987
d.	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	4.895.435.469.115	4.583.119.605.650
e.	Penerimaan Dana Bagi Hasil	17.110.097.019.361	16.304.845.339.366
f.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	3.076.020.400
g.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2.352.167.225.584	2.263.034.544.382
h.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	368.173.270.201	22.179.718.000
i.	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	44.090.217.000	35.175.027.000
j.	Penerimaan Hibah	12.927.060.000	30.905.119.064
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	70.598.385.967.701	67.759.383.857.593
2	ARUS KAS KELUAR:		
a.	Pembayaran Pegawai	19.190.554.701.043	17.977.776.327.870
b.	Pembayaran Barang	26.572.367.215.305	25.824.444.605.296
c.	Pembayaran Bunga	180.738.864.995	229.704.491.741
d.	Pembayaran Subsidi	5.875.837.590.937	5.539.653.281.534
e.	Pembayaran Hibah	2.472.491.761.571	2.835.482.114.927
f.	Pembayaran Bantuan Sosial	3.496.629.048.637	4.363.641.476.668
g.	Pembayaran Bantuan Keuangan	383.997.067.520	356.446.480.500
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	58.172.616.250.008	57.127.148.778.536
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (I-II)	12.425.769.717.693	10.632.235.079.057

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

5.5.1.1.a Penerimaan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp44.448.074.892.860,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp931.593.220.027,00 atau 2,14% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp43.516.481.672.833,00. Rincian penerimaan Pajak Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.1.

5.5.1.1.b Penerimaan Retribusi Daerah

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp713.719.914.819,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp259.022.353.908,00 atau 56,97% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp454.697.560.911,00. Rincian penerimaan Retribusi Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.2.



5.5.1.1.c Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp653.700.898.761,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp107.831.648.774,00 atau 19,75% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp545.869.249.987,00. Rincian penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.3.

5.5.1.1.d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp4.895.435.469.115,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp312.315.863.465,00 atau 6,81% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp4.583.119.605.650,00.

5.5.1.1.e Penerimaan Dana Bagi Hasil

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp17.110.097.019.361,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp805.251.679.995,00 atau 4,94% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp16.304.845.339.366,00.

5.5.1.1.f Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus Fisik tercatat sebesar Rp0,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.076.020.400,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Alokasi Khusus Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp3.076.020.400,00.

5.5.1.1.g Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.352.167.225.584,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp89.132.681.202,00 atau 3,94% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp2.263.034.544.382,00.

5.5.1.1.h Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp368.173.270.201,00. Arus kas masuk tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp345.993.552.201,00 atau 1.559,95% jika



dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp22.179.718.000,00. Rincian Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1.2.

5.5.1.1.i Penerimaan Insentif Fiskal

Arus kas masuk dari Dana Insentif Fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp44.090.217.000,00. Arus kas masuk tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp8.915.190.000,00 atau 25,35% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Insentif Fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp35.175.027.000,00. Rincian Penerimaan Dana Insentif Fiskal disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.2.

5.5.1.1.j Penerimaan Hibah

Arus kas masuk dari Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp12.927.060.000,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp17.978.059.064,00 atau 58,17% jika dibandingkan dengan Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp30.905.119.064,00.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

5.5.1.2.a Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2024.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp19.190.554.701.043,00. Arus kas keluar tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.212.778.373.173,00 atau 6,75% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp17.977.776.327.870,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Pegawai disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.1.a.

5.5.1.2.b Pembayaran Barang

Pembayaran Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Barang pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp26.572.367.215.305,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp747.922.610.009,00 atau 2,90% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Barang pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp25.824.444.605.296,00. Rincian



Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Barang disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.1.b.

5.5.1.2.c Pembayaran Bunga

Pembayaran Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bunga pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp180.738.864.995,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp48.965.626,746,00 atau 21,32% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bunga pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp229.704.491.741,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Bunga disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.1.c.

5.5.1.2.d Pembayaran Subsidi

Pembayaran Subsidi merupakan pembayaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Arus kas keluar untuk Pembayaran Subsidi pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp5.875.837.590.937,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp336.184.309.403,00 atau 6,07% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Subsidi pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp5.539.653.281.534,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Subsidi disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.d.

5.5.1.2.e Pembayaran Hibah

Pembayaran Hibah merupakan jumlah yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Hibah pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.472.491.761.571,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp362.990.353.356,00 atau 12,80% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Hibah pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.835.482.114.927,00.

5.5.1.2.f Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2024. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Sosial pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp3.496.629.048.637,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp867.012.428.031,00 atau 19,87% jika dibandingkan dengan arus kas keluar



untuk Pembayaran Bantuan Sosial pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp4.363.641.476.668,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Bantuan Sosial disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.1.f.

5.5.1.2.g Pembayaran Bantuan Keuangan

Pembayaran Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan keuangan atau sejenisnya. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Keuangan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp383.997.067.520,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.4. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp27.550.587.020,00 atau 7,73% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan keuangan pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp356.446.480.500,00.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang. Selama periode Tahun 2024 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp31.159.943.492,00 dan terdapat arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp13.615.376.015.710,00 sehingga terdapat penurunan arus kas bersih sebesar Rp13.584.216.072.218,00. Sedangkan selama periode Tahun 2023 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp7.058.929.784,00 dan terdapat arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp11.672.131.043.673,00 sehingga terdapat penurunan arus kas bersih sebesar Rp11.665.072.113.889,00.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang, Penjualan Aset Tetap, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.126

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk:		
a.	Pelepasan Hak Atas Tanah <i>Brandgang</i>	3.370.200.000	3.145.400.000
b.	Penjualan Aset Tetap:	27.717.897.192	3.722.940.118
c.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	71.846.300	190.589.666
	Jumlah Arus Kas Masuk (I)	31.159.943.492	7.058.929.784



No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2	Arus Kas Keluar:		
a.	Perolehan Aset Tetap:	11.004.785.255.543	8.857.260.068.298
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.610.590.760.167	2.814.870.975.375
	Jumlah Arus Kas Keluar (II)	13.615.376.015.710	11.672.131.043.673
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (I- II)	(13.584.216.072.218)	(11.665.072.113.889)

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga dan adanya Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen.

5.5.2.1.a Pelepasan Hak atas Tanah *Brandgang*

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 terdapat arus kas masuk dari pelepasan hak atas tanah *brandgang* sebesar Rp3.370.200.000,00 pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Arus kas masuk ini mengalami penurunan sebesar Rp224.800.000,00 atau 7,15% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari pelepasan hak atas tanah *brandgang* untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp3.145.400.000,00.

5.5.2.1.b Penjualan Aset Tetap

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas masuk dari penjualan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp27.717.897.192,00. Arus kas masuk ini mengalami kenaikan sebesar Rp23.994.957.074,00 atau 644,52% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari penjualan Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp3.722.940.118,00.

5.5.2.1.c Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Kembali Penerimaan Investasi Non Permanen sebesar Rp71.846.300,00. Arus kas masuk ini mengalami penurunan sebesar Rp118.743.366,00 atau 62,30% dibandingkan dengan arus kas masuk dari penerimaan kembali Investasi Non Permanen untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp190.589.666,00.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar berasal dari Perolehan Aset Tetap dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

5.5.2.2.a Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat menambah Aset Tetap dan akan menambah Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



memperoleh Aset Tetap yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp11.004.785.255.543,00. Arus kas atas perolehan Aset Tetap pemerintah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.147.525.187.245,00 atau 24,25% dibandingkan dengan perolehan Aset Tetap pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp8.857.260.068.298,00.

5.5.2.2.b Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Jaya, Perumda Dharma Jaya, PT Jakarta Propertindo, dan PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp2.814.870.975.375,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.610.590.760.167,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1)	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	225,000,000,000
2)	PT Jakarta Propertindo	2,183,400,000,000
3)	PT Bank DKI Jakarta	2,190,760,167
4)	PT Penjamin Kredit Daerah	200.000.000.000
Jumlah		2.610.590.760.167

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang. Selama Tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Sedangkan selama Tahun 2024 dan 2023 terdapat arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp938.693.208.121,00 dan Rp1.057.547.795.088.

Rincian Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.126

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk:		
	Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0	0
	Jumlah Arus Kas Masuk (I)	0	0
2	Arus Kas Keluar:		



No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	938.693.208.121	1.057.547.795.088
	Jumlah Arus Kas Keluar (II)	938.693.208.121	1.057.547.795.088
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (I-II)	(938.693.208.121)	(1.057.547.795.088)

5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat Arus kas keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar Rp938.693.208.121,00. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat. Sementara itu Pembayaran Utang Pokok Pinjaman untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.057.547.795.088,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp118.854.586.967,00 atau 11,24%.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening umum Negara/daerah. Selama Tahun 2024 terdapat arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp4.414.125.028.711,00 dan terdapat arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp4.440.393.638.543,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus Rp26.268.609.832,00. Sedangkan selama Tahun 2023 terdapat arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp3.804.167.278.024,00 dan terdapat arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp3.790.246.749.756,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp13.920.528.268,00.

Rincian Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris dijelaskan pada tabel sebagai berikut.



Tabel 5.127

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk:		
a.	Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya (Bansos)	20.617.619.270	0
b.	Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	21.512.667	1
c.	Reklasifikasi Kas dibatasi penggunaannya ke Kas di Bendahara Sekolah Lainnya	958.997.783	0
d.	Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama	961.411.902	1.684.920.147
e.	Penerimaan Deposit Pasien – BLUD	5.246.548.583	6.759.297.420
f.	Penerimaan Deposit Jasa BLUD	1.723.693.572	1.487.097.500
g.	Penerimaan Uang Titipan	67.290.000	1.701.917.859
h.	Penerimaan Kas Lainnya	235.238.706	13.543.921.396
i.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.384.292.716.228	3.778.990.123.701
	Jumlah Arus Kas Masuk (I)	4.414.125.028.711	3.804.167.278.024
2	Arus Kas Keluar:		
a.	Penyetoran Kas BOSP ke RKUN	11.430.723.378	0
b.	Reklasifikasi Kas Lainnya ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya	34.266.759.372	0
c.	Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama	321.367.029	448.402.500
d.	Penyetoran Asuransi pada Kas Bendahara Penerimaan	1.151.500	0
e.	Pengembalian Uang Titipan BLUD	141.203.661	1.743.395.823
f.	Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	318.313.427	22.001.380
g.	Reklasifikasi ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya	3.869.544.020	0
h.	Pengeluaran Deposit Pasien – BLUD	5.056.280.592	6.978.631.689
i.	Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD	1.659.921.472	1.412.672.500
j.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.383.328.374.092	3.779.641.645.864
	Jumlah Arus Kas Keluar (II)	4.440.393.638.543	3.790.246.749.756
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (I-II)	(26.268.609.832)	13.920.528.268

5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

5.5.4.1.a Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya (Bansos)

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas masuk dari Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya (Bansos) sebesar Rp20.617.619.270,00 sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris atas Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya (Bansos).

5.5.4.1.b Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Pembayaran Pihak Ketiga

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat penerimaan kas atas Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Pembayaran Pihak Ketiga



sebesar Rp21.512.667,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat penerimaan kas atas aktivitas arus kas masuk tersebut sebesar Rp1,00.

5.5.4.1.c Reklasifikasi Kas dibatasi penggunaannya ke Kas di Bendahara Sekolah Lainnya

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas masuk dari aktivitas operasi atas Reklasifikasi Kas dibatasi Penggunaannya ke Kas di Bendahara Sekolah Lainnya sebesar Rp958.997.783,00.

5.5.4.1.d Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama

Selama Tahun 2024 terdapat arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp961.411.902,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas masuk dari reklasifikasi ke uang jaminan kerja sama sebesar Rp1.684.920.147,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp723.508.245,00 atau 42,94%.

5.5.4.1.e Penerimaan Deposit Pasien – BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Pasien – BLUD sebesar Rp5.246.548.583,00 yang merupakan penerimaan uang muka pasien selama Tahun 2024, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 arus kas masuk Penerimaan Deposit Pasien – BLUD adalah sebesar Rp6.759.297.420,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.512.748.837,00 atau 22,38%.

5.5.4.1.f Penerimaan Deposit Jasa – BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Jasa BLUD sebesar Rp1.723.693.572,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Jasa BLUD adalah sebesar Rp1.487.097.500,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp236.596.072,00 atau 15,91%.

5.5.4.1.g Penerimaan Uang Titipan

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Titipan sebesar Rp67.290.000,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Titipan adalah sebesar Rp1.701.917.859,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.634.627.859,00 atau 96,05%.

5.5.4.1.h Penerimaan Kas Lainnya

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat Arus Kas Masuk atas Penerimaan Kas Lainnya sebesar Rp235.238.706,00 yaitu merupakan kas yang akan dikembalikan ke Kas Daerah. Sementara itu, pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Kas Lainnya sebesar



Rp13.543.921.396,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp13.308.682.690,00 atau 98,26%.

5.5.4.1.i Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp4.384.292.716.228,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan potongan pajak dan potongan-potongan lain. Sementara itu, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp3.778.990.123.701,00.

Tabel 5.128

Penerimaan Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Kas Di Kas Daerah - Potongan PFK (Rp)	Kas Di Bendahara Pengeluaran - Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor (Rp)	Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan yang Belum Disetor (Rp)	Kas BLUD - Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
	Penerimaan PFK					
1	PPh Pasal 21	1.691.693.660.974	9.415.483.489	1.615.002.149	82.318.171.871	1.785.042.318.483
2	PPh Pasal 22	57.012.559.747	7.242.720.801	141.275.702	16.178.155.581	80.574.711.831
3	PPh Pasal 23	43.963.304.238	13.917.164.026	270.966.542	6.504.605.719	64.656.040.525
4	PPh Pasal 4 (2)	165.371.810.835	400.683.950	16.641.499	3.235.522.621	169.024.658.905
5	PPN	1.358.599.243.708	20.824.094.751	8.184.628.240	164.460.478.231	1.552.068.444.930
6	PPh Pasal 15	0	674.270	0	0	674.270
7	PPh Pasal 26	0	0	0	96.613	96.613
8	BPJS Kesehatan	395.514.393.018	0	0	52.128.907.488	447.643.300.506
9	BPJS Ketenagakerjaan		0	0	65.359.127.050	65.359.127.050
10	Dana Pensiun	116.786.037.254	0	0	0	116.786.037.254
11	Tabungan Hari Tua	102.705.161.335	0	0	0	102.705.161.335
12	Taperum	75.000	0	0	0	75.000
13	Pot Non Pajak Lainnya	0	0	0	432.069.526	432.069.526
	Jumlah	3.931.646.246.109	51.800.821.287	10.228.514.132	390.617.134.700	4.384.292.716.228

5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

5.5.4.2.a Penyetoran Kas BOSP ke RKUN

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar untuk aktivitas transitoris atas penyetoran kas BOSP ke RKUN sebesar Rp11.430.723.378,00 yang dikarenakan terdapat penerima BOSP yang telah tutup/tidak bersedia menerima dana/satuan pendidikan dikelola oleh kementerian atau lembaga lain sehingga diharuskan untuk disetorkan ke RKUN melalui RKUD. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak terdapat arus kas untuk aktivitas transitoris tersebut.



5.5.4.2.b Reklasifikasi Kas Lainnya ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar untuk aktivitas transitoris atas Reklasifikasi Kas Lainnya ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp34.266.759.372,00. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak terdapat arus kas untuk aktivitas transitoris tersebut.

5.5.4.2.c Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar untuk Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama sebesar Rp321.367.029,00. Sementara itu pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas keluar untuk Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama sebesar Rp448.402.500,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp127.035.471,00 atau 28,33%

5.5.4.2.d Penyetoran Asuransi pada Kas Bendahara Penerimaan

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar untuk Penyetoran Asuransi pada Kas Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.151.500,00 sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak terdapat arus kas keluar untuk aktivitas tersebut.

5.5.4.2.e Pengembalian Uang Titipan BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar untuk Pengembalian Uang Titipan BLUD sebesar Rp141.203.661,00 sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas keluar untuk aktivitas tersebut sebesar Rp1.743.395.823,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.602.192.162,00 atau 91,90%.

5.5.4.2.f Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 arus kas keluar atas Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp318.313.427,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas keluar atas Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga adalah sebesar Rp22.001.380,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp296.312.047,00 atau 1346,79%.

5.5.4.2.g Reklasifikasi ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar atas Reklasifikasi ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp3.869.544.020,00. Sedangkan pada periode 31 Desember 2023 tidak terdapat arus kas keluar atas Reklasifikasi ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya. ‘



5.5.4.2.h Pengeluaran Deposit Pasien – BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar atas Pengeluaran Deposit Pasien BLUD sebesar Rp5.056.280.592,00 yang merupakan pengembalian uang muka pasien yang telah diterima selama Tahun 2023, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat Pengembalian Deposit Pasien – BLUD sebesar Rp6.978.631.689,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.922.351.097,00 atau 27,55%

5.5.4.2.i Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar dari Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp1.659.921.472,00. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas keluar dari Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp1.412.672.500,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp247.248.972,00 atau 17,50%.

5.5.4.2.j Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp4.383.328.374.092,00. Nilai tersebut merupakan pengeluaran atas potongan pajak dan potongan-potongan lain. Sedangkan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp3.779.641.645.864,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp603.686.728.228,00 atau 15,97% Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5.129
Pengeluaran Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Kas Di Kas Daerah - Potongan PFK (Rp)	Kas Di Bendahara Pengeluaran - Potongan PFK Di SKPD Yang Belum Disetor (Rp)	Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan Yang Belum Disetor (Rp)	Kas BLUD - Potongan PFK Di BLUD Yang Belum Disetor (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
	Penyetoran PFK					
1	PPh Pasal 21	1.691.693.660.974	9.295.247.425	1.609.166.390	82.315.050.196	1.784.913.124.985
2	PPh Pasal 22	57.012.559.747	7.242.720.801	140.469.495	16.102.225.486	80.497.975.529
3	PPh Pasal 23	43.963.304.238	13.917.044.026	271.762.711	6.492.273.026	64.644.384.001
4	PPh Pasal 4 (2)	165.371.810.835	400.683.950	16.641.499	3.235.522.621	169.024.658.905
5	PPN	1.358.599.243.708	20.824.094.751	8.267.262.508	163.734.113.668	1.551.424.714.635
6	PPh Pasal 15	0	674.270	0	0	674.270
7	PPh Pasal 26	0	0	0	96.613	96.613
8	BPJS Kesehatan	395.514.393.018	0	0	52.126.039.809	447.640.432.827



No.	Uraian	Kas Di Kas Daerah - Potongan PFK (Rp)	Kas Di Bendahara Pengeluaran - Potongan PFK Di SKPD Yang Belum Disetor (Rp)	Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan Yang Belum Disetor (Rp)	Kas BLUD - Potongan PFK Di BLUD Yang Belum Disetor (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
9	BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	65.382.074.075	65.382.074.075
10	Dana Pensiun	116.786.037.254	0	0	0	116.786.037.254
11	Tabungan Hari Tua	102.705.161.335	0	0	0	102.705.161.335
12	Taperum	75.000	0	0	0	75.000
13	Pot Non Pajak Lainnya	0	0	0	308.964.663	308.964.663
	Jumlah	3.931.646.246.109	51.680.465.223	10.305.302.603	389.696.360.157	4.383.328.374.092

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas

Berdasarkan perhitungan arus kas bersih pada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris, selisih kurs dan koreksi, maka terdapat penurunan kas bersih sebesar Rp2.123.408.172.478,00 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024. Dengan total saldo awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Setara Kas BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah, dan Kas Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.562.186.965.985,00, maka saldo akhir total Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Setara Kas BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah, dan Kas Lainnya menjadi sebesar Rp4.438.778.793.507,00.

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya selama periode Tahun 2024. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 adalah sebesar Rp727.950.219.245.598,00. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 terdapat pada tabel berikut:

Tabel 5.130
Rinci Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2024

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Ekuitas Awal	698.072.284.621.375	665.549.886.851.294
2	Surplus/Defisit – LO	30.653.632.411.109	35.264.777.802.049
3	Koreksi Ekuitas	(775.697.786.886)	(2.742.380.031.968)
4	Ekuitas Akhir	727.950.219.245.598	698.072.284.621.375



Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah Rp698.072.284.621.375,00.

5.6.2 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Surplus/Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp30.653.632.411.109,00 yang dijelaskan pada CaLK 5.4.4 Surplus-LO.

5.6.3 Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 adalah sebesar (Rp775.697.786.886,00), yang terdiri dari:

5.6.3.a Koreksi Penyajian Piutang

Koreksi Ekuitas atas Penyajian Piutang adalah sebesar Rp100.775.674.212,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Koreksi Kurang Catat Piutang	104.113.044.342
2	Koreksi Lebih Catat Piutang	(2.736.324.820)
3	Koreksi Beban Dibayar di Muka atas Pekerjaan Lewat Tahun	(600.801.944)
4	Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang Obat	(243.366)
	Jumlah	100.775.674.212

- 1) Koreksi Kurang Catat Piutang sebesar Rp104.113.044.342,00 di antaranya terdapat pada:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp92.952.928.159,00 merupakan koreksi atas piutang BPJS yang disebabkan Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) Piutang BPJS atas pelayanan sebelum Tahun 2024 baru dicatat pada Tahun 2024 yang di antaranya terdapat pada RSUD Tarakan sebesar Rp68.483.670.704,00, RSUD Budhi Asih sebesar Rp15.314.340.513,00, dan RSUD Koja sebesar Rp2.650.351.361,00; dan
 - b) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp8.782.868.770,00 atas piutang pemanfaatan barang milik daerah dan denda keterlambatan pelaksanaan pembangunan.
 - c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp835.886.410,00 yang terdiri dari koreksi kurang catat Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Koreksi Lebih Catat Piutang sebesar (Rp2.736.324.820,00), di antaranya terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp2.040.172.748,00) merupakan koreksi pengurangan atas piutang BPJS yang disebabkan terdapat koreksi



BAHV atas pelayanan sebelum Tahun 2024 yang baru dicatat pada Tahun 2024 yang di antaranya terdapat pada RSKD Duren Sawit sebesar (Rp713.619.000,00), RSUD Koja sebesar (Rp582.902.819,00), dan RSUD Tarakan sebesar (Rp317.573.700,00).

- 3) Koreksi Beban Dibayar di Muka atas Pekerjaan Lewat Tahun sebesar (Rp600.801.944,00); dan
- 4) Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang Obat sebesar (Rp243.366,00).

5.6.3.b Koreksi Penyajian Penyisihan Piutang

Koreksi Ekuitas atas Penyajian Penyisihan Piutang adalah sebesar Rp14.868.906.540,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang	65.246.564
2	Penyisihan atas Piutang yang terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang	25.505.031.337
3	Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang	(10.701.371.361)
	Jumlah	14.868.906.540

- 1) Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang sebesar Rp65.246.564,00 di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp46.191.668 merupakan dampak dari penyesuaian piutang yang di antaranya terdapat pada RSUD Budhi Asih sebesar Rp39.461.641,00, RSKD Duren Sawit sebesar Rp3.568.095,00, dan RSUD Tarakan sebesar Rp1.587.869,00; dan
 - b) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp12.478.600,00 yang merupakan koreksi lebih catat Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha; dan
- 2) Penyisihan atas Piutang yang Terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang sebesar Rp25.505.031.337,00 di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
 - a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp23.571.482.429,00 yaitu atas Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB yang telah dibayar dan pembatalan penyisihan piutang denda retribusi; dan
 - b) Unit Pengelola Jakarta *Asset Management Center* sebesar Rp1.034.573.990,00 yaitu koreksi lebih catat atas Penyisihan Piutang yang terbayar/pembatalan Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD dan Piutang Pendapatan Denda.
- 3) Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang sebesar (Rp10.701.371.361,00) di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
 - a) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar (Rp8.782.868.770,00) yang merupakan kurang penyisihan atas



pemanfaatan barang milik daerah dan denda keterlambatan pelaksanaan pembangunan; dan

- b) Dinas Kesehatan sebesar (Rp1.225.939.279,00) yang di antaranya terdapat pada RSUD Budhi Asih sebesar (Rp864.693.060,00) dan RSUD Tarakan sebesar (Rp342.418.354,00).

5.6.3.c Koreksi Penyajian Persediaan

Koreksi Ekuitas pada Penyajian Persediaan yaitu sebesar Rp749.286.737,00 yang di antaranya terdapat pada SKPD berikut:

- 1) Koreksi Kurang Catat Persediaan Awal sebesar Rp1.333.748.153,00 yang di antaranya terdapat pada:
 - a) Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat sebesar Rp474.000.000,00;
 - b) RSUD Kramat Jati sebesar Rp349.485.732,00; dan
 - c) Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian sebesar Rp84.959.406,00.
- 2) Lebih Catat Persediaan Awal sebesar (Rp584.461.416,00) yang di antaranya terdapat pada:
 - a) Puskesmas Kepulauan Seribu Utara sebesar Rp537.319.253,00;
 - b) Dinas Pendidikan sebesar Rp37.993.881,00; dan
 - c) Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian sebesar Rp9.148.282,00.

5.6.3.d Koreksi Penyajian investasi

Koreksi Ekuitas Penyajian Investasi yaitu sebesar Rp71.846.300,00 yang merupakan koreksi atas penyajian Investasi Non Permanen terkait pembatalan atas penyisihan Piutang Dana Bergulir yang telah terbayar di Tahun 2024.

5.6.3.e Koreksi Penyajian Saldo Awal Aset Tetap dan Aset Lainnya

Koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar (Rp1.257.534.477.431,00) dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Kurang Catat Aset Tetap dan Lainnya	811.962.524.712
2	Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap	56.566.321
3	Lebih Catat Aset Tetap dan Lainnya	(2.069.551.084.864)
4	Koreksi Belanja Modal Sebelum Tahun 2024 atas Temuan	(2.483.600)
Jumlah		(1.257.534.477.431,00)

- 1) Kurang catat Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp811.962.524.712,00 merupakan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang tahun perolehannya sebelum Tahun 2024 namun baru dilakukan pencatatan pada Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada CaLK bagian Aset Tetap dan aset lainnya. Aset-aset tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Nama Akun	CaLK	Nilai (Rp)
Tanah	5.3.1.4.1.6)	702.140.847.000
Peralatan dan Mesin	5.3.1.4.2.8)	111.151.114



Nama Akun	CaLK	Nilai (Rp)
Gedung dan Bangunan	5.3.1.4.3.10)	98.825.294.023
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.4.4.8)	9.501.980.434
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3.3)	961.220.920
Aset Tetap - Rusak Berat	5.3.1.5.4.1.2)	422.031.221
Jumlah		811.962.524.712

- 2) Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap sebesar Rp56.566.321,00 merupakan koreksi yang sebelumnya berada di Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap yang terdapat pada Aset Tetap – Gedung dan Bangunan di Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 3) Lebih catat saldo awal Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar (Rp2.069.551.084.864,00) merupakan kelebihan pencatatan aset yang disebabkan karena aset tercatat ganda, penghapusan yang SK Penghapusan diterbitkan tahun sebelumnya, dan koreksi kelebihan nilai aset sebagaimana dijelaskan dalam CaLK bagian Aset Tetap dan Aset Lain-lain. Koreksi lebih catat Aset Tetap dan Aset Lain-lain dapat dirinci sebagai berikut.

Nama Akun	CaLK	Nilai (Rp)
Tanah	5.5.1.4.1.b.4)	(1.327.427.690.689)
Peralatan dan Mesin	5.5.1.4.2.b.6)	(94.627.290)
Gedung dan Bangunan	5.5.1.4.3.b.7)	(348.700.830.200)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.1.4.4.b.5)	(32.551.474.060)
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.4.5.b.4)	(49.868.625)
Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	5.3.1.5.2.4.b.2)	(16.985.600.000)
Aset Tetap - Fasos Fasum	5.3.1.5.4.4	(297.370.369.000)
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	5.3.1.5.4.6	(46.370.625.000)
Jumlah		(2.069.551.084.864)

- 4) Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2024 atas Temuan sebesar (Rp2.483.600,00) merupakan pengurangan nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang diperoleh sebelum Tahun 2024 di Kelurahan Pulau Harapan Kabupaten Kepulauan Seribu.

5.6.3.f Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya

Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar (Rp50.102.248.068,00) dapat dirinci sebagai berikut.

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi	628.082.419.513
2	Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya, Denda	496.720
3	Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel	849.505
4	Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi	(678.186.013.806)
	Jumlah	(50.102.248.068)



- 1) Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Rp628.082.419.513,00 merupakan koreksi lebih catat akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut.

Nama Akun	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.532.059.893
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	474.111.247.031
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	97.464.203.605
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	99.228.375
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (<i>Build, Transfer and Operate/BTO</i>)	8.884.480.002
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjamkaikan	1.195.812.115
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	24.347.612.868
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	1.984.714.537
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	15.463.061.062
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses	24
Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	1
Jumlah	628.082.419.513

- 2) Koreksi lebih catat atas Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya, Denda sebesar Rp496.720,00 merupakan Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya, Denda atas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Kelurahan Pulau Harapan Kabupaten Kepulauan Seribu.
- 3) Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel Rp849.505,00 merupakan koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
- 4) Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi (Rp678.186.013.806,00) merupakan koreksi kurang catat akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut.

Nama Akun	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.208.912.319)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(421.244.629.174)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(99.291.354.423)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(276.767.225)
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjamkaikan	(49)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(144.183.138)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(44.573.846.955)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	(9)
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(214)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(104.738.155.310)



Nama Akun	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(708.164.990)
Jumlah	(678.186.013.806)

5.6.3.g Koreksi Penyajian Kewajiban

Koreksi Ekuitas Penyajian Kewajiban sebesar Rp406.979.281.332,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Akun	Nilai (Rp)
1	Utang Belanja Modal	519.860.785
2	Utang Belanja Pemeliharaan	445.940.400
3	Utang Belanja Barang Jasa	21.677.562
4	Utang Belanja Subsidi	415.922.806.462
5	Utang Barang Jasa BLUD	(222.940.327)
6	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima di Muka	(9.708.063.550)
	Jumlah	406.979.281.332

- 1) Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Belanja Modal sebesar Rp519.860.785,00 di antaranya terdapat pada:
 - a) Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp413.959.500,00 yang merupakan koreksi lebih catat atas utang belanja modal Gedung dan Bangunan; dan
 - b) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp105.847.280,00 yang merupakan utang belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
- 2) Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp445.940.400,00 yang terdapat pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Timur;
- 3) Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp21.677.562,00 yang terdapat pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Timur;
- 4) Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Subsidi sebesar Rp415.922.806.462,00 yang terdapat pada Dinas Perhubungan;
- 5) Koreksi Ekuitas atas Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar (Rp222.940.327,00); dan
- 6) Koreksi atas kurang catat pendapatan diterima di muka sebesar (Rp9.708.063.550,00) merupakan koreksi atas retribusi penyewaan tanah dan bangunan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

5.6.3.h Koreksi Penyesuaian Lainnya

Koreksi Ekuitas atas Penyesuaian Lainnya Tahun 2024 terdiri dari:

- 1) Hasil Perkembangbiakan Hewan/Tanaman sebesar Rp8.375.908.492,00 yang terdapat pada Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil



Perikanan sebesar Rp7.462.280.900,00 dan Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan sebesar Rp913.627.592,00;

- 2) Koreksi Uang Titipan Kas BLUD sebesar (Rp405.000,00) yang terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta; dan
- 3) Penerimaan Pengembalian Bansos sebelum Tahun 2024 sebesar Rp118.440.000,00

5.6.4 Ekuitas Akhir

Berdasarkan perhitungan atas perubahan nilai ekuitas akhir yang diperoleh dari ekuitas awal, surplus laporan operasional, dan koreksi ekuitas. Maka nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp727.950.219.245.598,00.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN



BAB VI

CATATAN PENTING LAINNYA

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas yaitu dengan Laut Jawa di sebelah utara, dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten di sebelah barat, dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan, serta dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat di sebelah timur. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administratif yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah sebesar 7.660 km², dengan luas daratan termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu sebesar 662 km² serta luas lautan sebesar 6.998 km². DKI Jakarta terletak pada posisi 50 19' 12" Lintang Selatan - 60 23' 54" Lintang Selatan dan 1060 22' 42" Bujur Timur - 1060 58' 18" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata $\pm$ 7 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan khusus di bidang keuangan daerah, di antaranya terkait dengan kewenangan atas sumber dan tarif pendapatan tertentu, penerusan pinjaman dari lembaga asing, dan pengaturan kekhususan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan susunan organisasi perangkat daerah. Selain itu pada aspek pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan pengaturan kekhususan yang mendukung pencapaian Kota Global, di antaranya terkait dengan pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan investasi dan pengusulan pemanfaatan barang milik negara yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.



6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkananya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yang telah diundangkan pada tanggal 10 Juni 2022 dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013, yang bertujuan sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan periode Tahun 2023-2026 lingkup Perangkat Daerah;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di mana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
- c. Mewujudkan implementasi kebijakan daerah dan nasional terkait penanganan dan pemulihan akibat pandemi COVID-19 di berbagai bidang pembangunan.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yaitu:

a. Visi

Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 adalah “Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
- 2) Jakarta yang aman bermakna terciptanya kehidupan yang tertib, tenteram, damai dan mampu mengatasi ancaman bencana alam, cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
- 3) Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya ruang kehidupan yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia.



- 4) Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik di mana masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, damai dan memiliki keseimbangan lahir dan batin.
- 5) Jakarta yang produktif bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan hasil dan manfaat serta nilai tambah yang secara ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota.
- 6) Jakarta yang berkelanjutan bermakna terwujudnya proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keutuhan, kelestarian, keasrian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 7) Jakarta yang berdaya saing global bermakna terbangunnya kemampuan dan kapasitas daerah yang mampu bersaing dalam peningkatan standar kehidupan warganya, pengembangan aktivitas ekonomi dan penyediaan pelayanan yang luas dan berkualitas.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
- 2) Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang andal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.
- 4) Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.
- 5) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 6) Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam



menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong-royong. Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu:

- 1) Keadilan dan keberpihakan;
- 2) Orientasi pada warga dan ruang interaksi;
- 3) Birokrasi efektif dan penguatan tata kelola.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 digambarkan dengan tahapan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dituangkan melalui kebijakan yaitu:

a. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Program Pembangunan Daerah. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja, Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta, Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan.

b. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kriteria umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu menjadi perhatian antara lain:

- 1) Pemahaman standar pelayanan publik minimal di daerah;
- 2) Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;
- 3) Keseimbangan anggaran, terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;



- 4) Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
- 5) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi masyarakat.

Dari kriteria umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelompokan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.
- b) Dana Perimbangan, terdiri dari:
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi:

- a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
- b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;
- c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi:

- a) Belanja Daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah Dan Bantuan Sosial), Belanja Modal, Belanja Tak Terduga Dan Belanja Transfer;
- b) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari; urusan wajib dan urusan pilihan;
- c) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Arah kebijakan belanja daerah antara lain:

- a) Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah;



- b) Menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi;
 - c) Melakukan efisiensi belanja;
 - d) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*),
 - e) Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD;
 - f) Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT;
 - g) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
- 2) Kebijakan Pembiayaan Daerah
- Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

6.3 Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk mempercepat penanganan pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 pasal 15, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah untuk melaksanakan Program PEN dalam bentuk Pemberian Pinjaman kepada BUMN, Pemberian Pinjaman kepada Lembaga, dan/atau Pinjaman PEN Daerah.

Realisasi Pinjaman PEN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1
Realisasi Pinjaman PEN Tahun 2020 – 2022

Uraian	SKPD/UKPD Pengguna	Nilai Pinjaman (Rp)	Penggunaan Dana PEN (Rp)				Pengembalian (Rp)
			TA 2020	TA 2021	TA 2022	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6	8 = 3 - 7
PINJAMAN PEN DAERAH							
Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir	Dinas Sumber Daya Air	3.465.558.808.704	421.127.354.911	1.572.528.175.155	1.083.298.274.773	3.076.953.804.839	388.605.003.865
Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Pelayanan Air Minum	Dinas Sumber Daya Air	69.105.119.617	11.938.335.091	37.854.104.382	0	49.792.439.473	19.312.680.144
Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah	Unit Pengelola Sampah Terpadu	85.001.410.016	85.001.410.016	0	0	85.001.410.016	0
Peningkatan Infrastruktur Transportasi	Dinas Bina Marga	536.326.133.519	442.248.276.770	47.881.945.368	15.103.001.478	505.233.223.616	31.092.909.903
Peningkatan Infrastruktur Pengendalian	UP Jakarta Smart City (Dinas	86.295.605.056	0	85.652.860.380	0	85.652.860.380	642.744.676



Uraian	SKPD/UKPD Pengguna	Nilai Pinjaman (Rp)	Penggunaan Dana PEN (Rp)				Pengembalian (Rp)
			TA 2020	TA 2021	TA 2022	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6	8 = 3 - 7
Banjir-Pengendalian Banjir Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Komunikasi, Informatika dan Statistik)						
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Transformasi Digital)	UP Jakarta Smart City (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)	232.432.076.920	0	232.432.076.920	0	232.432.076.920	0
Jumlah Pinjaman PEN Daerah (I)		4.474.719.153.832	960.315.376.788	1.976.349.162.205	1.098.401.276.251	4.035.065.815.244	439.653.338.588
PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEN							
Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	371.846.079.587	0	105.084.302.456	266.277.049.466	371.361.351.922	484.727.665
Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan (Revitalisasi Taman Ismail Marzuki/TIM)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PMD kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	1.443.121.000.000	200.000.000.000	1.243.121.000.000	0	1.443.121.000.000	0
Peningkatan Infrastruktur Olahraga Proyek Jakarta International Stadium	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PMD kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	3.642.000.000.000	1.182.000.000.000	2.460.000.000.000	0	3.642.000.000.000	0
Jumlah Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN (II)		5.456.967.079.587	1.382.000.000.000	3.808.205.302.456	266.277.049.466	5.456.482.351.922	484.727.665
Jumlah Pendanaan PEN (I + II)		9.931.686.233.419	2.342.315.376.788	5.784.554.464.661	1.364.678.325.717	9.491.548.167.166	440.138.066.253

Sisa pinjaman PEN per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.333.675.168.603,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nilai Penarikan Pinjaman	Nilai Pinjaman (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)
1	2	3	4	5
1	PEN Tahun 2020	2.664.083.583.739	1.102.540.061.675	1.561.543.522.064
2	PEN Tahun 2021	3.192.635.570.093	1.004.728.416.497	2.187.907.153.596
3	Dukungan PEN Tahun 2021	4.074.967.079.587	2.490.742.586.644	1.584.224.492.943
Total		9.931.686.233.419	4.598.011.064.816	5.333.675.168.603

6.4 Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 104 BLUD yang berasal dari 12 SKPD Penggabung, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.2

Daftar Badan Layanan Umum Daerah dan SKPD Penggabungannya Tahun 2024

No.	Nama SKPD Penggabung	Nama OPD	
1	2	3	
1	Dinas Pendidikan	1	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 13 Jakarta



No.	Nama SKPD Penggabung	Nama OPD	
1	2	3	
		2	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 20 Jakarta
		3	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 Jakarta
		4	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 26 Jakarta
		5	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta
		6	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 32 Jakarta
		7	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 33 Jakarta
		8	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta
		9	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 37 Jakarta
		10	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 51 Jakarta
		11	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta
		12	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta
2	Dinas Kesehatan	13	Laboratorium Kesehatan Daerah
		14	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung - Jaktim
		15	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus
		16	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cengkareng - Jakbar
		17	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilandak - Jaksel
		18	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing - Jakut
		19	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayang - Jaktim
		20	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas - Jaktim
		21	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
		22	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gambir - Jakpus
		23	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar
		24	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa - Jaksel
		25	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara - Jaktim
		26	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru - Jakpus
		27	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres - Jakbar
		28	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel
		29	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama - Jaksel
		30	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar
		31	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kelapa Gading - Jakut
		32	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemayoran - Jakpus
		33	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kembangan - Jakbar
		34	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu
		35	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Utara - Kep. Seribu
		36	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja - Jakut
		37	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati - Jaktim
		38	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makassar - Jaktim
		39	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel
		40	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman - Jaktim
		41	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng - Jakpus
		42	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pademangan - Jakut
		43	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pal Merah - Jakbar



No.	Nama SKPD Penggabung	Nama OPD	
1	2	3	
		44	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran - Jaksel
		45	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel
		46	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim
		47	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Penjaringan - Jakut
		48	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel
		49	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pulo Gadung - Jaktim
		50	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawah Besar - Jakpus
		51	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Senen - Jakpus
		52	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Setiabudi - Jaksel
		53	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari - Jakbar
		54	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora - Jakbar
		55	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanah Abang - Jakpus
		56	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok - Jakut
		57	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet - Jaksel
		58	Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah
		59	Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah
		60	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai
		61	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit
		62	Rumah Sakit Umum Adhyaksa
		63	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih
		64	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih
		65	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng
		66	Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing
		67	Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung
		68	Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas
		69	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa
		70	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang
		71	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru
		72	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres
		73	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru
		74	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama
		75	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran
		76	Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan
		77	Rumah Sakit Umum Daerah Koja
		78	Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati
		79	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan
		80	Rumah Sakit Umum Daerah Matraman
		81	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan
		82	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu
		83	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo
		84	Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan
		85	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar
		86	Rumah Sakit Umum Daerah Tamansari
		87	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang



No.	Nama SKPD Penggabung	Nama OPD	
1	2	3	
		88	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok
		89	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
		90	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet
		91	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja
		92	Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	93	Unit Pengelola Dana Perumahan
4	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	94	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan
5	Dinas Lingkungan Hidup	95	Unit Pengelola Sampah Terpadu
6	Dinas Perhubungan	96	Unit Pengelola Perparkiran
		97	Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik
		98	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	99	Unit Pengelola Jakarta Smart City
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung
9	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	101	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
10	Dinas Kebudayaan	102	Unit Pengelola Taman Ismail Marzuki
11	Badan Pengelolaan Aset Daerah	103	Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center
12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	104	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Pada komponen Laporan Operasional BLUD Tahun 2024, total Pendapatan BLUD Tahun 2024 sebesar Rp8.288.957.392.809,00 yang terdiri dari Pendapatan Dana BLUD sebesar Rp3.917.058.450.967,00 dan Pendapatan Alokasi APBD sebesar Rp4.371.898.941.842,00. Beban BLUD Tahun 2024 sebesar Rp7.462.905.047.631,00, sehingga total keseluruhan BLUD terdapat Defisit sebesar Rp3.544.951.820.272,00. Pada komponen Neraca BLUD Tahun 2024, total Aset BLUD Tahun 2024 sebesar Rp17.990.612.967.635,00, total Kewajiban BLUD Tahun 2024 sebesar Rp406.316.002.476,00, dan total Ekuitas sebesar Rp17.584.296.965.159,00.

Rincian kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2024 disajikan pada lampiran 15 dan lampiran 16.

6.5 Potensi Piutang

Selain nilai Aset dan Piutang yang telah diuraikan pada BAB V, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi penerimaan aset sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga, yaitu potensi penerimaan aset atas pemenuhan kewajiban yang bersumber dari penerbitan Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan Potensi SIPPT/IPPT/IPPR yang Dikenakan Kewajiban RSM/S:

a. Potensi Penerimaan Aset atas Pemenuhan Kewajiban yang bersumber dari SIPPT

SIPPT diterbitkan sejak tahun 1971 yang diberikan kepada badan dan/atau perusahaan *real estate* dan/atau perusahaan properti dan/atau *developer* dan/atau yayasan dan/atau



perorangan untuk membangun perumahan, perkantoran, perdagangan dan/atau kegiatan fisik lainnya dan/atau permohonan hak atas tanah dalam wilayah DKI Jakarta.

Terdapat 3 kelompok jenis SIPPT terkait dengan pemenuhan kewajibannya:

- 1) SIPPT yang tidak mencantumkan secara jelas jenis dan luasan/besaran kewajiban penyerahan dan/atau penyediaan fasos fasum;
- 2) SIPPT yang mencantumkan jenis dan luasan/besaran kewajiban penyerahan dan/atau penyediaan fasos fasum berbentuk lahan, di antaranya berupa sub zona Marga Jalan (Mjl), Penyempurna Hijau Umum (Phu), Penyempurna Hijau Taman (Pht), Prasarana Jalan (Pj), dan lain-lain; dan
- 3) SIPPT yang hanya mencantumkan kewajiban untuk menyediakan Fasos Fasum.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Inspektorat, Badan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu, dan Walikota di 5 Wilayah Kota Administrasi pada tanggal 26 Februari 2025 jumlah seluruh dokumen SIPPT yang terbit dari tahun 1971 sampai dengan 2024 adalah sebanyak 3.621 dokumen SIPPT/IPPT/IPPR yang meliputi SIPPT/IPPT/IPPR Baru, Pembaharuan, Pemecahan, Penyempurnaan, Perpanjangan, Revisi, Pengalihan, dan SK Penetapan Kewajiban dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Jumlah SIPPT
Data SIPPT yang terhitung pada Tahun 2023	
Tahun 2023	3.618
Data SIPPT Tahun 2023 setelah Koreksi	3.618
Penambahan Baru SIPPT Tahun 2024	
Dokumen SIPPT Tahun 2024	3
Total Penambahan Baru SIPPT Tahun 2024	3
Total SIPPT yang diterbitkan s.d Tahun 2024	3.621

Pada proses rekonsiliasi, dari keseluruhan dokumen SIPPT/IPPT/IPPR yang telah diinventarisasi, selanjutnya dilakukan pengelompokan data dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pemutakhiran *database* SIPPT/IPPT/IPPR;
- 2) Pengelompokan dokumen SIPPT/IPPT/IPPR berbasis lokasi fisik lahan;
- 3) Pemilahan per lokasi fisik SIPPT/IPPT/IPPR yang memiliki kewajiban penyerahan lahan/tanah Fasos Fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- 4) Penetapan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif, yaitu SIPPT/IPPT/IPPR hasil pemilahan berbasis lokasi dan memiliki kewajiban penyerahan lahan/tanah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yang dimaksud di dalam Laporan Keuangan ini adalah lokasi efektif dari seluruh penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR baru maupun SIPPT/IPPT/IPPR turunannya yang meliputi SIPPT/IPPT/IPPR Pembaharuan, Pemecahan, Penyempurnaan, Perpanjangan, Revisi dan Pengalihan, dan merupakan lokasi efektif yang dalam penerbitannya telah mencantumkan dan mendefinisikan jenis dan luasan/besaran kewajiban menyerahkan dan menyediakan Fasos Fasum berbentuk lahan, misalnya lahan sub zona Marga Jalan (Mjl), Penyempurna Hijau Umum (Phu), Penyempurna Hijau Taman (Pht), dan lain-lain.



Di samping itu, SIPPT/IPPT/IPPR Efektif juga termasuk surat Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan yang diterbitkan dalam rangka penetapan kembali jenis dan/atau luasan kewajiban fasos Fasum SIPPT/IPPT/IPPR yang menjadi acuan pihak Walikota dalam melakukan penagihan kewajiban Fasos Fasum kepada para pemegang SIPPT/IPPT/IPPR.

Hasil pengelompokan 3621 dokumen SIPPT/IPPT/IPPR yang sudah terbit sampai dengan Tahun 2024, jumlah SIPPT/IPPT/IPPR yang terhitung Efektif adalah sebanyak 1.314 lokasi, dengan total luas kewajiban lahan Fasos Fasum yaitu seluas 26.923.090 m², dijabarkan dalam tabel rincian per wilayah kota administrasi / kabupaten administrasi sebagai berikut.

No.	Wilayah	Dokumen SIPPT yang terbit 1971-2024	SIPPT berbasis Lokasi Fisik	Pengelompokan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif (1971-2024)	
				Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m ²)
1	Jakarta Pusat	493	375	126	360.723
2	Jakarta Utara	571	457	259	7.788.118
3	Jakarta Barat	716	545	293	9.114.498
4	Jakarta Selatan	1.163	809	380	2.644.845
5	Jakarta Timur	651	542	236	5.964.588
6	Kepulauan Seribu	27	26	20	1.050.318
	Jumlah	3.621	2.754	1.314	26.923.090

Apabila dibandingkan dengan jumlah SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2023 sebanyak 1.312 lokasi dengan total luas kewajiban penyerahan lahan fasos fasum yaitu seluas 26.273.675 m² terdapat koreksi data sebagaimana pada tabel berikut.

Uraian	Jumlah SIPPT Efektif	Luas Kewajiban (m ²)
Koreksi Terhadap Data SIPPT yang terhitung pada Tahun 2023		
Tahun 2023	1.312	26.273.675
Mutasi Tambah		
SIPPT Tahun 1971 - 2024 yang baru tercatat efektif berdasarkan hasil rekonsiliasi SIPPT	4	175.367
Pembaharuan Data Luasan Kewajiban SIPPT Tahun 1971-2024 hasil rekonsiliasi	0	529.968
Subtotal Mutasi Tambah	4	705.335
Mutasi Kurang		
Pembaharuan Data Luasan Kewajiban SIPPT Tahun 1971-2024 hasil rekonsiliasi	0	46.083
Cleansing Data SIPPT 1971-2024 dari lokasi efektif	2	9.837
Subtotal Mutasi Kurang	2	55.920
Total SIPPT Tahun 2023 setelah Koreksi	1.314	26.923.090
Penambahan Baru SIPPT Tahun 2024		
SIPPT Tahun 2024 yang menambah SIPPT Efektif	0	0
Total Penambahan Baru Tahun 2024	0	0
Total SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban s/d 2024	1.314	26.923.090

Koreksi data SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dan Luas Kewajiban lahan Fasos Fasum Tahun 2024 terdiri dari:

- 1) Koreksi atas mutasi tambah SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yaitu terdapat 4 SIPPT/IPPT/IPPR tercatat Efektif yang sebelumnya telah tercatat dalam master data SIPPT/IPPT/IPPR berbasis lokasi, namun berstatus Tidak Aktif (*cleansing data* pada kategori SIPPT yang kewajibannya tidak terdefinisi dengan jelas), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 SIPPT karena telah ditetapkan jenis dan luasan kewajiban fasos fasumnya melalui surat Penetapan Kewajiban.



- b) 3 SIPPT dilakukan pencatatan kewajiban fasos fasumnya atas kewajiban yang diserahkan pada Tahun 2024 sesuai dokumen BAST yang diterbitkan.
- 2) Koreksi atas mutasi kurang SIPPT/IPPT/IPPR atas 2 SIPPT yang masuk kategori cleansing data SIPPT Efektif karena penggabungan delineasi lahan perencanaan SIPPT dan peninjauan kembali rencana kota melalui surat Penetapan Kewajiban.
- 3) Koreksi atas mutasi kurang dan mutasi tambah luasan kewajiban fasos fasum, yang mengacu pada:
 - a) Terdapat surat Penetapan Kewajiban atas penetapan kembali bentuk dan luasan kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR sebagaimana diterbitkan 29 surat Penetapan Kewajiban;
 - b) Dokumen BAST yang diterbitkan Tahun 2024, atas identifikasi sebanyak 39 SIPPT melakukan serah terima kewajiban Fasos Fasum; dan
 - c) Pemutakhiran data kewajiban Fasos Fasum pada beberapa SIPPT.
- 4) Terdapat penambahan 2 IPPR yang diterbitkan oleh DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas IPPR yang telah diterbitkan sebelumnya sehingga berstatus Aktif Administratif (tidak diperhitungkan sebagai SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dalam Laporan Keuangan Tahun 2024).

Mempertimbangkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4580/1999 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D-Iv-8125/Ee/21/1975 tanggal 20 Desember 1975 tentang Penguasaan Perencanaan dan Peruntukan Penggunaan Tanah di Sepanjang Jalur-Jalur Jalan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta mempertimbangkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 209 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang, maka telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan Rekonsiliasi yang diselenggarakan oleh Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada tanggal 26 Februari 2025 (surat undangan Nomor e-0064/KR.04.00 tanggal 21 Februari 2024) yang dihadiri oleh unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, unsur Inspektorat, unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah, unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan unsur Walikota di lima Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, bahwa akan dilakukan pembaruan potensi SIPPT/IPPT/IPPR terhadap perhitungan lokasi efektif.

Pembaharuan perhitungan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yang telah berbasis lokasi dilakukan sebagaimana tahapan berikut:

- 1) Mengecualikan data SIPPT yang luas lahannya kurang dari 5.000 m²;
- 2) Mengecualikan data SIPPT/IPPT/IPPR yang kepemilikan lahan dan/atau penyelenggaraan kegiatannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD;



- 3) Mengecualikan data dengan kategori SIPPT/IPPT/IPPR yang kewajiban fasos fasumnya tidak terdefinisi dengan jelas; dan
- 4) Memutakhirkan data SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dengan kategori sebagai berikut:
 - a) Terdapat penetapan jenis dan luas kewajiban Fasos Fasum melalui surat Penetapan Kewajiban;
 - b) Terdapat pencatatan kewajiban Fasos Fasum dari dokumen BAST terhadap SIPPT yang belum terdefinisi dengan jelas kewajibannya; dan
 - c) Mengakomodasi IPPR yang diterbitkan oleh DPMPTSP pada Tahun 2024.

Pengelompokan pada angka 2 (dua) di atas tidak dilakukan terhadap SIPPT/IPPT/IPPR milik Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD yang telah menyerahkan lahan kewajiban fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2023.

Sampai dengan Tahun 2024, total BAST Kewajiban Fasos Fasum yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 571 lokasi SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dengan total perolehan luas lahan aset seluas 18.244.850 m², dengan rincian sebagai berikut.

No	Wilayah	SIPPT/IPPT/IPPR Yang Telah BAST Tahun 1971-2024	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan (m ²)
1	2	3	4
1	Jakarta Pusat	56	157.373
2	Jakarta Utara	126	5.419.917
3	Jakarta Barat	150	6.652.543
4	Jakarta Selatan	138	1.605.890
5	Jakarta Timur	96	4.201.874
6	Kepulauan Seribu	5	207.253
	Jumlah	571	18.244.850

Perbandingan antara data lokasi SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dengan data BAST Fasos Fasum yang terbit hingga Tahun 2024, diperoleh sisa kewajiban sebagai berikut.

No.	Wilayah	SIPPT Efektif (1971-2023)		BAST (1971-2023)		Sisa Kewajiban SIPPT Efektif	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m ²)	Jumlah Lokasi BAST	Luas Lahan (m ²)	Jumlah Lokasi	Luas Lahan (m ²)
1	2	3	4	5	7	8=3- 5	9=4-7
1	Jakarta Pusat	126	360.723	56	157.373	70	203.350
2	Jakarta Utara	259	7.788.118	126	5.419.917	133	2.368.201
3	Jakarta Barat	293	9.114.498	150	6.652.543	143	2.461.955
4	Jakarta Selatan	380	2.644.845	138	1.605.890	242	1.038.955
5	Jakarta Timur	236	5.964.588	96	4.201.874	140	1.762.714
6	Kepulauan Seribu	20	1.050.318	5	207.253	15	843.065
	Jumlah	1.314	26.923.090	571	18.244.850	743	8.678.240

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi penerimaan aset sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga berupa konstruksi bangunan Fasos fasum yang saat ini masih memerlukan proses rekonsiliasi dengan SKPD terkait.



Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban dari para pemegang SIPPT/IPPT/IPPR, sejak tahun 2009 sampai dengan 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dengan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pihak pemegang SIPPT/IPPT/IPPR dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam dokumen PPK dituangkan bentuk dan luasan kewajiban yang harus diserahkan dan/atau disediakan, serta batas waktu penyelesaian masing-masing kewajiban fasos fasum. Namun demikian, baik dokumen SIPPT/IPPT/IPPR maupun PPK tidak menyebutkan nilai dari kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR, sehingga Fasos Fasum yang berpotensi menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat diukur dan diestimasi secara andal dalam satuan rupiah tertentu, dan sangat mungkin nilainya berbeda dengan nilai pada saat dilakukan serah terima kewajiban.

Atas kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR yang belum diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka kewajiban tersebut belum diakui dan dicatat sebagai Piutang pada neraca karena belum memenuhi kualifikasi pencatatan aset (belum ada nilai yang pasti). Nilai aset baru diketahui secara pasti pada saat ditandatanganinya dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai perhitungan nilai appraisal yang dicantumkan di BAST. Nilai tersebut kemudian digunakan sebagai nilai wajar atas potensi nilai pendapatan dari kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR.

Di samping itu, tingkat ke tertagihan atas pemenuhan kewajiban Fasos Fasum SIPPT/IPPT/IPPR mempunyai nilai ketidakpastian yang tinggi, antara lain disebabkan oleh:

- 1) Adanya penguasaan lahan SIPPT yang tidak tuntas;
- 2) Adanya pembaharuan SIPPT/IPPT/IPPR karena perubahan kepemilikan;
- 3) Adanya pembaharuan SIPPT/IPPT/IPPR karena habis masa berlaku;
- 4) Adanya perubahan kegiatan utama yang diselenggarakan di lokasi SIPPT/IPPT/IPPR, misalnya pada SIPPT/IPPT/IPPR awal kegiatan yang diselenggarakan adalah untuk hunian namun kemudian SIPPT diperbarui menjadi penyelenggaraan kegiatan bisnis/komersial;
- 5) Adanya fasos fasum yang dibangun tidak sesuai dengan penetapan kewajiban dalam SIPPT/IPPT/IPPR;
- 6) Rencana kota yang dinamis;
- 7) SIPPT/IPPT/IPPR belum dimanfaatkan sesuai tujuan penerbitannya (belum ada pembangunan di lokasi);
- 8) Pengembang pailit atau sulit ditemukan keberadaannya; dan
- 9) Belum adanya sanksi yang jelas atas keterlambatan penyelesaian kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR.



Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan Aset Tetap – Fasos Fasum yang berasal dari pemenuhan kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya perbaikan penatausahaan Aset Tetap – Fasos Fasum melalui:

- 1) Kegiatan rekonsiliasi secara periodik atas pemenuhan kewajiban Fasos Fasum, dengan membandingkan data lokasi SIPPT/IPPT/IPPR dengan jumlah kewajiban yang sudah diserahkan pada lokasi tersebut;
- 2) Melakukan pengkajian dan penetapan kewajiban Fasos Fasum di antaranya terhadap SIPPT/IPPT/IPPR yang belum terdefinisi jelas jenis dan besaran/luasan kewajibannya;
- 3) Melakukan penagihan kepada pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang belum menyelesaikan kewajibannya;
- 4) Melakukan pemutakhiran basis data SIPPT/IPPT/IPPR, kewajiban Fasos Fasum, dan progres BAST penyerahan kewajiban Fasos Fasum; dan
- 5) Melakukan pengembangan sistem informasi terintegrasi mulai dari penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR sampai dengan pencatatan penerimaan Aset Tetap – Fasos Fasum.

b. Potensi SIPPT/IPPT/IPPR yang Dikenakan Kewajiban RSM/S

Selain nilai piutang di atas, terdapat potensi SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban membiayai dan membangun RSM/S. Pada tanggal 20 Maret 2025 telah dilakukan pembahasan bersama Perangkat Daerah terkait serta penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Jumlah SIPPT/IPPT/IPPR yang Dikenakan Kewajiban Membiayai dan Membangun Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S) sampai dengan 31 Desember 2024. Adapun hasil sementara proses rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah potensi pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S per 31 Desember 2023 berdasarkan CaLK LKPD Tahun Anggaran 2023	425
A. Mutasi Tambah		
1	SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban membiayai dan membangun RSM/S, namun belum terakomodasi dalam potensi yang tercantum pada CaLK LKPD Tahun Anggaran 2024	324
Jumlah Mutasi Tambah		324
Jumlah seluruh pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S per 31 Desember 2024		749
B. Mutasi Kurang		
1	SIPPT/IPPT/IPPR yang telah melaksanakan konversi kewajiban RSM/S melalui mekanisme penyetoran dana tunai sesuai SK Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002	135
2	SIPPT/IPPT/IPPR yang telah melaksanakan pembangunan Rumah Susun	21
3	SIPPT/IPPT/IPPR yang telah memperoleh pembebasan atau pengecualian kewajiban RSM/S	23
4	SIPPT/IPPT/IPPR yang penerbitannya guna penyertifikatan hak atas tanah	24
5	SIPPT/IPPT/IPPR yang sudah ditetapkan nilai konversinya namun belum menyelesaikan sehingga masih tercatat sebagai piutang	3
6	SIPPT/IPPT/IPPR yang melaksanakan konversi kewajiban RSM/S melalui pembangunan fasilitas publik (PSU) sesuai Pergub No. 112 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah melalui Pergub No. 78 Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:	
	a. SIPPT/IPPT/IPPR yang telah menandatangani berita acara nilai konversi dan/atau melaksanakan pembangunan PSU belum sesuai nilai konversi	63
	b. SIPPT/IPPT/IPPR yang melaksanakan pembangunan PSU telah BAST sesuai nilai konversi	17
Jumlah Mutasi Kurang		286
Total Potensi Sementara Terkait SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban membiayai dan membangun RSM/S s.d 31 Desember 2024		463



Rincian SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S per Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang diuraikan sebagai berikut:

Wilayah	Jenis Pengenaan Kewajiban RSM/S			Total	
	SK Gub 540	SK Gub 640	SK Gub 540 & SK Gub 640	Kewajiban RSM/S	Luas Lahan Efektif (M ²)
Jakarta Pusat	14	19	5	38	722,280
Jakarta Utara	20	54	13	87	4,076,768
Jakarta Selatan	59	75	16	150	3,710,815
Jakarta Barat	33	60	12	105	6,572,179
Jakarta Timur	18	58	5	81	4,696,321
Kepulauan Seribu	0	2	0	2	47,679
Total	144	268	51	463	19,826,042

Nilai potensi tersebut masih terus dilakukan pembaruan, dengan kriteria antara lain:

1. SIPPT/IPPT/IPPR yang telah menyelesaikan kewajiban melalui mekanisme pembangunan rumah susun,
2. SIPPT/IPPT/IPPR yang telah menyelesaikan kewajiban melalui mekanisme konversi berupa pembangunan fasilitas publik,
3. SIPPT/IPPT/IPPR yang memperoleh pengecualian dari kewajiban RSM/S, dan/atau
4. Dimungkinkan ditemukannya data SIPPT/IPPT/IPPR lainnya yang akan diperhitungkan dalam pelaksanaan rekonsiliasi kewajiban RSM/S berikutnya.

6.6 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sedangkan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada Tahun 2024 dapat dijelaskan dalam uraian berikut:



a. Dasar Hukum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dasar hukum pelaksanaan Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

b. Tugas Pembantuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 21 ayat (2) bahwa penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk Tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta menerima tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Untuk Tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta menerima tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Pagu anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp4.901.522.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.170.265.379,00 atau 85,08%. Adapun instansi penerima TP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.3

Daftar Tugas Pembantuan Tahun 2024

No.	OPD	K/L		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	1.441.252.000	1.089.591.298	75,60
		2.	Kementerian Pertanian RI	592.213.000	379.426.784	64,07
2.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.	Kementerian Pariwisata dan	1.520.000.000	1.439.936.897	94,73



No.	OPD	K/L	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Ekonomi Kreatif RI			
3.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4. Kementerian Perindustrian RI	1.079.081.000	1.054.933.000	97,76
		5. Kementerian Perdagangan	268.976.000	206.377.400	76,73
Jumlah			4.901.522.000	4.170.265.379	85,08

c. Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dibebankan pada APBN melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk Tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta menerima dana dekonsentrasi dengan pagu anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp18.593.238.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp16.937.810.557,00 atau 91,10%. Adapun instansi penerima dana dekonsentrasi secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.4
Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta
Per 31 Desember 2024

No.	OPD	K/L	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Biro Pemerintahan	1. Kementerian Dalam Negeri RI	226.279.000	224.601.519	99,26
2.	Dinas Kesehatan	2. Kementerian Kesehatan RI	6.150.107.000	5.832.269.456	94,83
3.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	3. Kementerian Pertanian RI	826.342.000	783.270.349	94,79
		4. Badan Pangan Nasional RI	2.440.325.000	2.396.879.504	98,22
4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI	1.670.298.000	1.094.147.100	65,51
		6. Kementerian Perdagangan RI	129.560.000	124.956.660	96,45
5.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	7. Kementerian Ketenagakerjaan RI	5.066.114.000	4.485.487.568	88,54
6.	Dinas Pemuda dan Olahraga	8. Kemenpora RI	1.376.550.000	1.375.642.600	99,93
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9. Badan Koordinasi Penanaman Modal RI	499.137.000	473.515.000	94,87
8.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10. Perpustnas RI	208.526.000	147.040.801	70,51
Jumlah			18.593.238.000	16.937.810.557	91,10

6.7 Penugasan kepada BUMD

Penugasan kepada BUMD merujuk pada Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur yang di antaranya adalah penugasan Pemerintah Daerah. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan Pemerintah kepada BUMD tertuang dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menjelaskan bahwa penugasan kepada BUMD dilakukan untuk mendukung perekonomian daerah dan



menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD. Pelaksanaan penugasan pada BUMD dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lingkup usaha/kegiatan BUMD dengan aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penugasan kepada BUMD yang masih berlangsung sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.5

Penugasan kepada BUMD yang Masih Berlangsung Sampai Dengan Tahun 2024

No	BUMD	Dasar Aturan	Penugasan	Bentuk Dukungan Pendanaan dari Pemerintah Provinsi DKI
1	2	3	4	6
1	PT Food Station Tjipinang Jaya dan Dharma Jaya	Pergub Nomor 208 Tahun 2016	Penyediaan dan pendistribusian pangan murah bagi masyarakat tertentu.	Subsidi
2	PT Food Station Tjipinang Jaya	Pergub Nomor 140 Tahun 2016	Penyediaan Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Tidak ada
3	PD AM Jaya	Pergub Nomor 62 Tahun 2019	Penugasan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dengan teknologi <i>Sea Water Reverse Osmosis</i> di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	- Pengurangan biaya sewa pemanfaatan aset IPA SWRO - Pemberian subsidi air minum IPA SWRO
4	PT Transportasi Jakarta	Pergub Nomor 160 Tahun 2016	Pelayanan Transjakarta gratis dan bus gratis bagi masyarakat.	Subsidi
		Pergub Nomor 62 Tahun 2016	Kewajiban pelayanan publik dan pemberian subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta.	Subsidi
		Pergub Nomor 52 Tahun 2022 (Perubahan Atas Pergub 20 tahun 2019)	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk melaksanakan Pembangunan, revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan halte dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka integrasi transportasi umum	Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk 4 Halte Revitalisasi:
		Kepgub Nomor 1326 Tahun 2021	Penetapan Penambahan Halte terkait Penugasan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Halte dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum	1. Pulogadung 2. Kalideres 3. Kampung Melayu 4. Ragunan
		Kepgub Nomor 1049 Tahun 2020. Kepgub Nomor 2348 Tahun 2015	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Mengintegrasikan Sistem Angkutan Umum Pengumpan Dengan Mobil Bus Sedang Ke Dalam Sistem Bus Rapid Transit	
5	PT MRT Jakarta	Pergub Nomor 136 Tahun 2019	Penugasan PT MRT Jakarta untuk melaksanakan kerja sama dengan Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PERSERO) dalam pengintegrasian perkeretaapian umum.	Direncanakan PMD
		Pergub Nomor 53 Tahun 2017	Penugasan kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan sarana dan prasarana Mass Rapid Transit.	1. PMD (APBD+LOAN) 2. Subsidi
		Pergub Nomor 140 Tahun 2017	Penugasan PT MRT Jakarta sebagai operator utama pengelola kawasan transit oriented development koridor (utara-selatan) fase I Mass Rapi Transit Jakarta.	Tidak ada
		Pergub Nomor 15 Tahun 2020 jo. Pergub 65 Tahun 2021	Penugasan PT MRT Jakarta sebagai operator utama pengelola kawasan <i>transit oriented development</i> koridor (utara-selatan) fase I <i>Mass Rapi Transit</i> Jakarta.	Pendanaan infrastruktur dapat



No	BUMD	Dasar Aturan	Penugasan	Bentuk Dukungan Pendanaan dari Pemerintah Provinsi DKI
1	2	3	4	6
				menggunakan APBD
6	Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perumda Pasar Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Bank DKI dan PT Jamkrida Jakarta	Pergub Nomor 51 Tahun 2019	Penugasan kepada BUMD terkait untuk penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	PMD
7	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Pergub Nomor 134 Tahun 2019	Penugasan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam pengelolaan alat produksi PT Jakarta Tourisindo.	PMD
		Pergub Nomor 71 Tahun 2020	Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam penyelenggaraan fasilitas pengelolaan sampah antara di dalam kota.	Tidak ada
		Pergub Nomor 70 Tahun 2020	Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu.	Tidak ada
		Pergub Nomor 41 Tahun 2014	Pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang di Kelurahan Kampung Bali dan kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.	PMD
8	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	Pergub Nomor 14 Tahun 2019	Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam pengembangan kawasan olahraga terpadu.	PMD
		Pergub Nomor 118 Tahun 2019	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan infrastruktur.	Tidak ada
		Pergub Nomor 63 Tahun 2019	Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.	PMD
		Pergub Nomor 33 Tahun 2018	Penugasan lanjutan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan fasilitas pengolahan sampah di dalam kota/ <i>intermediate treatment facility</i> .	Direncanakan PMD
		Pergub Nomor 65 Tahun 2019	Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan fasilitas pengolahan sampah antara di dalam kota.	Tidak ada
		Pergub Nomor 94 Tahun 2019	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam pengelolaan Jakarta International Velodrome.	PMD
		Pergub Nomor Nomor 110 Tahun 2019	Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu	Tidak ada
		Pergub Nomor 154 Tahun 2017	Penugasan kepada perseroan terbatas Jakarta Propertindo untuk penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta api ringan/LRT	1. PMD 2. Subsidi
		Pergub Nomor 83 Tahun 2019 Pergub Nomor 30 Tahun 2022	Penugasan kepada perseroan terbatas Jakarta Propertindo (perseroan daerah) dalam penyelenggaraan kegiatan formula e	-
9	PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)	Pergub Nomor 38 Tahun 2022	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) untuk Penyelenggaraan Aktivasi Ruang Publik, Sarana dan Prasarana Pariwisata, dan Produk Kreatif	PMD



Berdasarkan tabel di atas salah satu penugasan kepada PT Jakarta Propertindo adalah penyelenggaraan kegiatan Formula E dengan penjelasan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kegiatan Balap Mobil Formula E

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 adalah “Jakarta Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”. Selain itu, dalam visi jangka menengah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017-2022 dinyatakan “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam RPJMD 2017-2022 antara lain:

- a. Misi kelima “Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebinekaan”;
- b. Tujuan ketiga “Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian Kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia”;
- c. Sasaran Pertama “Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional”; dan
- d. Strategi pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan *E-Tourism*.

Dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, secara resmi pada Tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan kota-kota lainnya di dunia, untuk menjadi bagian dari kota penyelenggara Kegiatan balap mobil Formula E pada tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024. Kejuaraan balap mobil Formula E adalah kejuaraan balap mobil internasional dengan teknologi ramah lingkungan yang sedang tumbuh menjadi salah satu ajang kejuaraan global yang diselenggarakan oleh kota-kota global di dunia.

Untuk memberikan informasi atas manfaat dan dampak ekonomi dari penyelenggaraan balap mobil tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan *SMG Insight* telah membuat studi kelayakan atas dampak ekonomi penyelenggaraan Formula E di Jakarta yang hasilnya menyatakan bahwa dampak Ekonomi bagi Jakarta atas Penyelenggaraan Formula E diperkirakan sebesar £78,3 juta atau Rp1,2 Triliun per tahun.

Sedangkan potensi jangkauan global pelaksanaan Jakarta *E-Prix* sebagai berikut:

- a. 38.500 potensi jumlah penonton umum (*general admission*) lokal dan internasional;
- b. 3.500 potensi jumlah penonton khusus (*hospitality attendees*) lokal dan internasional; dan
- c. 197 jumlah negara yang menyiarkan Formula E secara langsung.

Di samping itu, penyelenggaraan Formula E memberikan dampak yang lebih luas dalam kebijakan dan inisiatif baik Pemerintah Daerah maupun pusat, antara lain:



- a. Menggerakkan sektor riil;
- b. Kampanye ramah lingkungan;
- c. Kampanye perubahan iklim;
- d. Menggiatkan olahraga dengan Jakarta sebagai kota global kejuaraan motor sport dunia;
- e. Promosi wisata internasional;
- f. Rekognisi global melalui media eksposur;
- g. Kampanye kendaraan listrik dan ekosistemnya; dan
- h. Memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan olahraga berskala global.

Secara ringkas, hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E adalah sebagai berikut:

- a. Formula E merupakan salah satu kejuaraan internasional balap dengan teknologi ramah lingkungan yang sedang tumbuh menjadi salah satu ajang kejuaraan global yang diselenggarakan oleh kota-kota global seperti New York, London, Paris dan Berlin.
- b. Indonesia, khususnya Jakarta, melalui kejuaraan Jakarta *E-Prix* Formula E memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan visibilitas positifnya di mata dunia, mendorong dampak ekonomi lokal dan kawasan, dan menjadi pionir kota global ramah lingkungan.
- c. Jakarta *E-Prix* akan memberikan dorongan kuat bagi ekonomi lokal, hal ini diproyeksikan untuk memberikan total £78,3 juta atau sekitar Rp1,2 Triliun per tahun untuk kota tuan rumah melalui pengeluaran yang berdampak, baik langsung dan tidak langsung ke sektor-sektor lain juga.
- d. Perhitungan perkiraan keuntungan atas terselenggaranya Formula E di Jakarta tidak semata-mata hanya memperhitungkan untung dan rugi dari sisi finansial, namun juga mengedepankan dampak kontribusi peningkatan ekonomi dan citra Kota Jakarta secara keseluruhan.

Sebagai kebijakan pembiayaan penganggaran atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan:

- a. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2019 kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tentang Dukungan dalam Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Formula E.

Hal ini selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah kewenangan Bidang Keolahragaan, yang meliputi:

- 1) Penetapan, dalam bentuk penyelenggaraan keolahragaan;
- 2) Pelaksanaan, aktivitas keolahragaan skala daerah, nasional, dan internasional;
- 3) Koordinasi bidang olahraga, dalam bentuk koordinasi antar dinas/ instansi terkait;
- 4) Pembinaan dan pengawasan, dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.

Selain itu kegiatan Formula E merupakan salah satu bentuk kegiatan Internasional yang merupakan implementasi bahwa Jakarta sebagai wilayah strategis memiliki potensi pengembangan untuk menjadi wilayah yang bertaraf internasional.



- b. Surat Kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani *Parent Company Guarantee* (Jaminan Perusahaan Induk) kegiatan Formula E. *Parent Company Guarantee* tersebut merupakan bentuk perjanjian jaminan Pemerintah DKI Jakarta kepada pihak FEO yang menjamin kewajiban-kewajiban PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak FEO.
- c. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT Jakpro dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E di Provinsi DKI Jakarta. Rencana pelaksanaan Formula E yang dilakukan oleh PT Jakpro berdasarkan lisensi dari pihak FEO Ltd. selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Penunjukan PT Jakpro sebagai penyelenggara didasarkan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri yang memberikan pertimbangan bahwa kontrak perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Formula E dengan pihak FEO Ltd. bersifat komersial (*business to business*). Atas penugasan tersebut, PT Jakpro telah melakukan perjanjian kerjasama yang mengikat (*Binding Agreement*) dengan pihak FEO Ltd.

Proses penganggaran penyelenggaraan Formula E telah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pembahasan anggaran *commitment fee* dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Komisi E di mana Komisi E menyetujui penganggaran *commitment fee* dibayarkan dalam DPA Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. Pembahasan kegiatan Formula E dilakukan antara TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD baik di Komisi E maupun Rapat Banggar;
- c. Pembahasan APBD disahkan dalam sidang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dan ditetapkan dalam Persetujuan Bersama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang di dalamnya termasuk alokasi anggaran *commitment fee* penyelenggaraan Formula E di DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
- d. Dokumen Rancangan Perda APBD disampaikan dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD.

Dalam hal persiapan kegiatan penyelenggaraan Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI terkait fasilitasi dan rekomendasi penyelenggaraan Formula E tahun 2020 dan Kemenpora telah memberikan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan Formula E dengan pokok-pokok dukungan sebagai berikut:
 - 1) Mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Formula E.
 - 2) Segala hal yang berkaitan dengan pendanaan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penggunaan APBD Provinsi DKI Jakarta.



- b. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait:
- 1) Permohonan rekomendasi dan fasilitasi kerja sama terkait penyelenggaraan Formula E Tahun 2020; dan
 - 2) Permintaan saran dan pendapat terkait penganggaran dan penyelenggaraan Formula E Tahun 2020.
- Kementerian Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi saran, pertimbangan dan dukungan atas rencana penyelenggaraan Formula E 2020 dengan pokok-pokok sebagai berikut:
- 1) Pada prinsipnya Kementerian Dalam Negeri menyambut baik terhadap rencana penyelenggaraan kejuaraan Formula E di Jakarta, yang akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing dan akan memicu peningkatan pendapatan ekonomi di masyarakat;
 - 2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam pengalokasian dan penggunaan APBD untuk membiayai sebagian atau keseluruhan penyelenggaraan kejuaraan Formula E;
 - 3) Penyediaan alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan dimaksud harus cukup tersedia dalam APBD; dan
 - 4) Pendapatan atas hasil penyelenggaraan Formula E dimaksud, yang menjadi hak daerah harus dimasukkan dalam APBD.
- c. Berkoordinasi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI Jakarta terkait persiapan pelaksanaan Formula E.

Pelaksanaan kegiatan Formula E dalam kontrak awal direncanakan akan dilaksanakan dalam lima musim, mulai tahun 2020 s.d 2024. Dalam kontrak awal tersebut biaya penyelenggaraan Formula E yang akan dikeluarkan terdiri dari biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Total biaya tetap berupa *commitment fee* yang setiap tahun wajib dibayarkan selama lima musim penyelenggaraan adalah sebesar GBP122.102.000,00. Sedangkan asumsi biaya variabel berupa biaya pelaksanaan Formula E yang akan dikeluarkan oleh PT Jakpro adalah sebesar Rp1.239.000.000.000,00.

Penyelenggaraan Formula E pada tahun 2022 tertunda karena dampak dari pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan studi kelayakan kembali penyelenggaraan Formula E dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19. Hasil studi kelayakan tersebut menyatakan bahwa kelanjutan penyelenggaraan Formula E akan dilakukan dengan pembiayaan mandiri oleh PT Jakpro dengan skema *Business to Business*. Selain itu hasil studi kelayakan juga menunjukkan bahwa terdapat potensi manfaat finansial, manfaat ekonomi dan manfaat reputasional. Berdasarkan hasil studi kelayakan tersebut maka penyelenggaraan Formula E layak dilaksanakan.

Selain itu, PT Jakpro telah melakukan negosiasi dengan pihak FEO dengan hasil kesepakatan Formula E akan dilaksanakan selama 3 tahun mulai 2022 s.d. 2024 dan akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022. Total *commitment fee* untuk 3 (tahun) penyelenggaraan adalah sebesar



£36.000.000,00 dan sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar £31.000.000,00 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sisa kewajiban *commitment fee* sebesar £5.000.000,00 akan dibayarkan oleh PT Jakpro di tahun ke-3 dengan dana non APBD. Terkait dengan perlakuan akuntansi atas pembayaran *commitment fee* kegiatan Formula E tersebut telah dijelaskan lebih rinci pada CaLK 5.5.1.1.3.

Uraian	City Host Agreement (CHA) Sebelum Pandemi	City Host Agreement (CHA) Addendum No.3 (Renegosiasi) tanggal 27 September 2021																					
Periode pelaksanaan kegiatan	5 tahun (2020 – 2024)	3 tahun (2022 – 2024)																					
Bank Garansi	£22 juta	Tidak Ada																					
<i>Commitment Fee</i>	2020: £20,0 juta, sudah dibayar 2021: £22,0 juta, sudah dibayar £11,0 juta 2022: £24,2 juta 2023: £26,6 juta 2024: £29,3 juta	<i>Commitment Fee</i> untuk 3 tahun £36 juta - Nilai yang sudah dibayarkan sebesar £31 juta dialokasikan untuk 3 tahun, dengan alokasi sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Tahun</th><th>Keterangan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2020</td><td>Batal (Pandemi COVID)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2021</td><td>Batal (Pandemi COVID)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2022</td><td>Telah dibayar di muka £ 7 juta</td></tr> <tr> <td>4</td><td>2023</td><td>Telah dibayar di muka £ 14 juta</td></tr> <tr> <td>5</td><td>2024</td><td>Telah dibayar di muka £ 10 juta</td></tr> <tr> <td>Jumlah</td><td></td><td>Telah dibayar di muka £ 31 juta</td></tr> </tbody> </table> - Kekurangan £5 juta (ditambah 10% <i>revenue</i> 2023) akan dibayarkan oleh Jakpro pada tahun ke-3 dengan dana non-APBD	No	Tahun	Keterangan	1	2020	Batal (Pandemi COVID)	2	2021	Batal (Pandemi COVID)	3	2022	Telah dibayar di muka £ 7 juta	4	2023	Telah dibayar di muka £ 14 juta	5	2024	Telah dibayar di muka £ 10 juta	Jumlah		Telah dibayar di muka £ 31 juta
No	Tahun	Keterangan																					
1	2020	Batal (Pandemi COVID)																					
2	2021	Batal (Pandemi COVID)																					
3	2022	Telah dibayar di muka £ 7 juta																					
4	2023	Telah dibayar di muka £ 14 juta																					
5	2024	Telah dibayar di muka £ 10 juta																					
Jumlah		Telah dibayar di muka £ 31 juta																					

Gelaran Formula E tahun pertama di Indonesia berhasil diselenggarakan pada bulan Juni 2022. Atas penyelenggaraan tersebut dilakukan analisis oleh tim independen dari INDEF untuk mengetahui dampak ekonomi secara makro dari penyelenggaraan Formula E baik di level Provinsi dan Nasional. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui dampak sosial-ekonomi serta manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat DKI Jakarta secara langsung ataupun tidak langsung dari penyelenggaraan Formula E tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh tim INDEF, penyelenggaraan Jakarta *E-Prix* 2022 memberikan dampak yang cukup luas terhadap banyak aspek. Mulai dari aspek mikro yang meliputi keuntungan finansial dalam jangka panjang, keuntungan industri yang terkait termasuk UMKM, hingga aspek makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan banyak efek lainnya.

Sebagai komitmen penyelenggaraan Formula E yang tertuang dalam CHA antara Jakpro dan FEO, pada Tahun 2023 Jakpro kembali menyelenggarakan kegiatan Formula E yang berlangsung pada 3 dan 4 Juni 2023 yang diselenggarakan di AGI Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta. Kegiatan ini disebut dengan 2023 Jakarta E-Prix.

Atas penyelenggaraan 2023 Jakarta E-Prix, dilakukan Analisa Dampak Ekonomi dan Analisa Dampak Sosial bagi Jakarta dan Indonesia, oleh konsultan dari Inggris, The Sports Consultancy (TSC). Menurut TSC penyelenggaraan 2023 Jakarta E-Prix memberikan dampak sebagai berikut:



a. Dampak Ekonomi

Menggunakan *Augmented Impact Methodology* dalam menghitung dampak ekonomi, total *Gross Event Impact* bagi Jakarta sebagai *Host* dari 2023 Jakarta E-Prix adalah sekitar USD100.5 million (Rp 1,5 triliun). Dengan perincian sebagai berikut.

Keterangan	
Dampak ekonomi langsung	\$ 50.900.000
Dampak ekonomi tidak langsung	\$ 35.000.000
<i>Total dampak ekonomi</i>	\$ 85.900.000
Valuasi dampak sosial	\$ 900.000
Valuasi dampak media	\$ 8.400.000
Penerimaan Pajak	\$ 5.300.000
Gross Total Dampak Event	\$ 100.500.000

b. Dampak Sosial

Sebagai rangkaian dalam penyelenggaraan 2023 Jakarta E-Prix, FEO bersama-sama dengan Jakpro melaksanakan beberapa program tambahan dalam rangka mensosialisasikan *Sustainability* pada masyarakat Indonesia dengan beberapa program yang dilakukan di antaranya adalah *Beach Clean Up* dan *Volunteer*.

Selain dari *intangible value* yang didapatkan dari rangkaian acara penyelenggaraan Formula E, dampak sosial yang bisa dirasakan salah satunya adalah menumbuhkan inspirasi dalam mengubah kebiasaan untuk melestarikan lingkungan. Menurut TSC, *Total Gross Social Value* bagi Jakarta sebagai *Host* dari 2023 Jakarta E-Prix adalah sekitar USD743,700 (Rp11,5 milyar).

Dan selanjutnya untuk penyelenggaraan Formula E Tahun 2024 yang dijadwalkan pada bulan Juni 2024, ditunda ke Tahun 2025 sesuai dengan kesepakatan Jakpro dan FEO yang tertuang dalam Adendum CHA Nomor 4 tertanggal 30 November 2023. Hal ini mempertimbangkan kondisi politik atas penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2024. Terkait dengan kesepakatan tersebut, maka kewajiban pembayaran *commitment fee* £5 juta juga dilakukan penjadwalan ulang di Tahun 2025.

6.8 Penjabat Gubernur DKI Jakarta

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 125/P/2024 Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melaksanakan tugas untuk periode tahun 2022-2024. Mulai tanggal 17 Oktober 2024, jabatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta beralih ke Teguh Setyabudi yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 125/P/2024 dengan periode jabatan sampai dengan pelantikan gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Pada tanggal 20 Februari 2025 Pramono Anung dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode Tahun 2025 – 2030.



BAB VII

PENUTUP



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 753 UKPD/SKPD yang memiliki fungsi sebagai entitas akuntansi dan 42 SKPD sebagai entitas akuntansi penggabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan menyusun Laporan Keuangan yang kemudian digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi 42 Laporan Keuangan SKPD Penggabung. Laporan Keuangan dari 42 SKPD Penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp72.952.092.296.153,00 atau 97,34% dari anggaran sebesar Rp74.946.825.859.889,00, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp70.012.717.839.886,00 atau 92,09% dari anggaran sebesar Rp76.023.113.210.933,00. Dengan demikian terdapat Surplus antara Pendapatan dengan Belanja sebesar Rp2.939.374.456.267,00. Selain itu, realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp1.494.476.377.779,00, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.433.850.834.046,00;
2. Saldo Anggaran Lebih pada awal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.542.421.120.069,00. Nilai tersebut merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang diakui sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024. Pada akhir Tahun Anggaran 2024 terdapat SiLPA sebesar Rp4.433.850.834.046,00;
3. Berdasarkan Laporan Operasional Tahun 2024 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp100.121.357.370.829,00, Beban sebesar Rp69.491.484.612.994,00, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp23.759.653.274,00 sehingga Surplus-LO sebesar Rp30.653.632.411.109,00;



4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar Rp698.072.284.621.375,00, Surplus-LO sebesar Rp30.653.632.411.109,00 dan koreksi Ekuitas sebesar (Rp775.697.786.886,00), sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp727.950.219.245.598,00;
5. Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp745.956.336.004.049,00, Kewajiban sebesar Rp18.006.116.758.451,00, dan Ekuitas sebesar Rp727.950.219.245.598,00; dan
6. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp12.425.769.717.693,00, Aktivitas Investasi sebesar (Rp13.584.216.072.218,00), Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp938.693.208.121,00), dan Aktivitas Transitoris sebesar (Rp26.268.609.832,00), sehingga terjadi penurunan bersih kas selama periode tahun 2024 sebesar Rp2.123.408.172.478,00. Total saldo awal Kas sebesar Rp6.562.186.965.985,00, sehingga saldo akhir Kas adalah sebesar Rp4.438.778.793.507,00.

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2024 (*Audited*) yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.





LAMPIRAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2024 *AUDITED***

DAFTAR RINCIAN REALISASI BELANJA OPERASI
PER 31 DESEMBER 2024

NO	KODE SKPD	SKPD PENGGABUNG	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA BUNGA	BELANJA SUBSIDI	BELANJA HIBAH	BELANJA BANTUAN SOSIAL	TOTAL
1	10101000	DINAS PENDIDIKAN	7.758.586.314.299	3.218.253.672.976	-	-	1.602.254.768.581	2.825.856.578.637	15.404.951.334.493
2	10201000	DINAS KESEHATAN	2.300.073.485.011	7.288.374.367.363	-	-	8.142.879.288	-	9.596.590.731.662
3	10301000	DINAS BINA MARGA	168.556.722.822	727.422.588.043	-	-	-	-	895.979.310.865
4	10302000	DINAS SUMBER DAYA AIR	157.103.592.762	1.407.071.220.196	-	-	-	-	1.564.174.812.958
5	10303000	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN	192.448.246.199	141.859.895.061	-	-	-	-	334.308.141.260
6	10402000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	121.763.349.016	563.677.231.826	-	-	-	-	685.440.580.842
7	10501000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	830.247.805.822	316.247.793.117	-	-	-	-	1.146.495.598.939
8	10502000	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	763.207.959.335	297.741.766.077	-	-	-	-	1.060.949.725.412
9	10503000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	26.040.939.199	57.113.642.309	-	-	-	-	83.154.581.508
10	10601000	DINAS SOSIAL	241.813.652.444	440.827.344.094	-	-	1.300.000.000	670.772.470.000	1.354.713.466.538
11	20101000	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	186.737.709.754	176.514.716.828	-	-	-	-	363.252.426.582
12	20201000	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	145.369.641.910	525.255.133.730	-	-	1.322.513.000	-	671.947.288.640
13	20301000	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	130.117.895.290	152.176.288.301	-	791.179.148.034	-	-	1.073.473.331.625
14	20502000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	198.838.278.071	2.016.370.802.498	-	-	-	-	2.215.209.080.569
15	20601000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	166.773.148.564	143.036.498.328	-	-	50.910.000.000	-	360.719.646.892
16	20901000	DINAS PERHUBUNGAN	414.752.500.617	830.787.104.461	-	5.084.658.442.903	-	-	6.330.198.047.981
17	21001000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	104.452.756.841	538.220.145.011	-	-	4.564.006.265	-	647.236.908.117
18	21101000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	126.581.292.787	209.101.948.346	-	-	2.644.311.289	-	338.327.552.422
19	21201000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	513.061.022.299	519.642.071.212	-	-	-	-	732.703.093.511
20	21301000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	101.460.977.464	792.258.117.908	-	-	390.497.673.558	-	1.284.216.768.930
21	21601000	DINAS KEBUDAYAAN	104.773.055.759	229.323.876.658	-	-	14.823.802.741	-	348.920.735.158
22	21701000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	91.022.676.384	112.328.252.434	-	-	-	-	203.350.928.818
23	30204000	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	88.373.616.305	279.941.494.424	-	-	-	-	368.315.110.729
24	30401000	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	181.321.881.458	925.784.436.783	-	-	-	-	1.107.106.318.241
25	40101000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	93.936.722.219	44.229.298.180	-	-	-	-	138.166.020.399
26	40201000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100.799.849.754	38.190.844.794	180.738.864.995	-	-	-	319.729.559.543
27	40202000	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	103.336.248.244	131.128.114.370	-	-	-	-	234.464.362.614
28	40203000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	889.990.314.080	193.839.279.707	-	-	-	-	1.083.829.593.787
29	40301000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	129.459.528.507	30.245.775.338	-	-	2.337.507.397	-	162.042.811.242
30	40302000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	49.182.124.912	58.020.612.054	-	-	-	-	107.202.736.966
31	40501000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	51.132.581.390	37.603.243.752	-	-	893.076.609.679	-	981.812.434.821
32	40601907	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH	672.449.033.546	277.590.501.206	-	-	335.934.024.108	-	1.285.973.558.860
33	40603000	SEKRETARIAT DPRD	197.878.032.100	578.953.942.200	-	-	-	-	776.831.974.300
34	40604000	INSPEKTORAT	115.995.881.570	57.575.038.930	-	-	-	-	173.570.920.500
35	40605000	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA	74.338.766.943	9.244.641.394	-	-	-	-	83.583.408.337
36	40606000	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	22.160.299.173	5.036.854.252	-	-	-	-	27.197.153.425
37	50110000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	244.672.216.044	494.094.448.729	-	-	-	-	738.766.664.773
38	50120000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	195.742.096.566	581.935.306.748	-	-	-	-	777.677.403.314
39	50130000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	290.756.509.480	688.497.471.233	-	-	-	-	979.253.980.713
40	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	377.000.582.906	761.534.465.186	-	-	-	-	1.138.535.048.092
41	50150000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	391.040.553.799	866.973.431.064	-	-	-	-	1.258.013.984.863
42	50160000	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU	77.204.839.398	108.343.538.184	-	-	-	-	185.548.377.582
		JUMLAH	19.190.554.701.043	26.572.367.215.305	180.738.864.995	5.875.837.590.937	3.307.808.095.906	3.496.629.048.637	58.623.935.516.823

DAFTAR SALDO KAS DAN SETARA KAS BLUD
PER 31 DESEMBER 2024

No	Nama SKPD/UKPD	Kas Tunai	Kas di Bank	Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Uang Muka Pasien RSUD/RSKD	Uang Jaminan Kerjasama	Uang Titipan	Uang Muka Jasa BLUD	Kas dan Setara Kas BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10
1	Unit Pengelola Dana Perumahan	-	25.870.662.517,00	-	-	-	-	-	-	25.870.662.517,00
2	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	-	3.815.320.349,00	-	-	-	-	-	-	3.815.320.349,00
3	Unit Pengelola Perparkiran	54.890.500,00	1.874.890.832,00	-	-	-	-	-	-	1.929.781.332,00
4	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	4.910.000,00	96.331.330,00	-	-	-	-	-	-	101.241.330,00
5	Laboratorium Kesehatan Daerah	2.743.000,00	13.387.463.121,00	-	-	-	-	-	-	13.390.206.121,00
6	Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah	-	28.561.585,00	-	-	-	-	-	-	28.561.585,00
7	Pusat Layanan Kesehatan Pegawai	-	716.637.575,00	-	-	-	-	-	-	716.637.575,00
8	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	162.000,00	101.514.252,00	-	-	-	-	-	-	101.676.252,00
9	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	50.758.161,00	12.825.807.604,00	-	-	19.932.284,00	-	1.912.897,00	-	12.898.410.946,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	6.150.349,00	2.472.121.817,00	-	-	-	-	-	-	2.478.272.166,00
11	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar	17.144.580,00	4.957.007.546,00	-	-	-	-	-	-	4.974.152.126,00
12	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	6.306.000,00	565.136.789,00	-	-	-	-	-	-	571.442.789,00
13	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	1.457.170,00	1.291.026.012,00	-	-	-	-	-	-	1.292.483.182,00
14	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	7.377.100,00	8.651.857.005,00	-	-	-	-	-	-	8.659.234.105,00
15	Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing	3.287.988,00	7.126.350.188,00	-	-	-	-	-	-	7.129.638.176,00
16	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan	5.647.000,00	2.284.551.257,00	-	-	-	-	-	-	2.290.198.257,00
17	Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan	56.455.956,00	3.268.521.779,00	-	-	-	-	-	-	3.324.977.735,00
18	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	6.403.900,00	5.348.256.537,00	545.656.475,00	-	-	-	-	-	5.900.316.912,00
19	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	6.258.802,00	4.760.199.684,00	-	-	-	-	-	-	4.766.458.486,00
20	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	10.151.800,00	2.301.352.903,00	-	-	-	-	-	-	2.311.504.703,00
21	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan	8.905.000,00	1.319.072.701,00	-	-	-	-	-	-	1.327.977.701,00
22	Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan	20.281.577,00	2.938.159.751,00	-	-	-	-	-	-	2.958.441.328,00
23	Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati	1.184.700,00	3.199.727.691,00	-	1,00	-	-	-	-	3.200.912.390,00
24	Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas	1.068.000,00	1.947.339.377,00	-	-	-	-	-	-	1.948.407.377,00
25	Rumah Sakit Umum Daerah Matraman	1.534.167,00	454.032.996,00	-	-	-	-	2.398.597.850,00	-	2.854.165.013,00
26	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari	14.137.500,00	3.002.015.013,00	-	-	-	-	-	-	3.016.152.513,00
27	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok	15.681.050,00	2.970.113.399,00	-	-	-	-	-	-	2.985.794.449,00
28	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang	3.608.000,00	12.622.965.055,00	-	-	-	-	-	-	12.626.573.055,00
29	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru	3.160.823,00	1.308.815.378,00	-	-	-	-	-	-	1.311.976.201,00
30	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang	18.254.950,00	1.345.153.917,00	-	-	-	-	-	-	1.363.408.867,00
31	Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung	25.102.800,00	3.896.842.519,00	-	32.255.472,00	-	-	-	-	3.954.200.791,00
32	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama	13.908.300,00	1.369.695.713,00	-	-	-	-	-	-	1.383.604.013,00
33	Pusat Krisis Dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah	-	5.923.857.196,00	-	-	-	-	-	-	5.923.857.196,00
34	Puskesmas Tanah Abang	530.000,00	2.728.919.432,00	-	-	-	-	-	-	2.729.449.432,00
35	Puskesmas Menteng	648.120,00	786.883.941,00	-	-	-	-	-	-	787.532.061,00
36	Puskesmas Senen	115.000,00	1.738.562.854,00	-	-	-	-	-	-	1.738.677.854,00
37	Puskesmas Cempaka Putih	340.000,00	735.554.147,00	-	-	-	-	-	-	735.894.147,00
38	Puskesmas Johar Baru	315.000,00	2.555.271.758,00	-	-	-	-	-	-	2.555.586.758,00
39	Puskesmas Kemayoran	160.000,00	3.147.508.169,00	-	-	-	-	-	-	3.147.668.169,00
40	Puskesmas Sawah Besar	2.975.000,00	1.016.207.217,00	-	-	-	-	-	-	1.019.182.217,00
41	Puskesmas Gambir	445.000,00	1.015.769.786,00	-	-	-	-	-	-	1.016.214.786,00
42	Puskesmas Penjaringan	-	1.101.632.153,00	-	-	-	-	-	-	1.101.632.153,00
43	Puskesmas Pademangan	740.000,00	1.159.905.818,00	-	-	-	-	-	-	1.160.645.818,00
44	Puskesmas Tanjung Priok	675.000,00	1.140.216.862,00	-	-	-	-	-	-	1.140.891.862,00
45	Puskesmas Koja	1.085.000,00	737.188.077,00	-	-	-	-	-	-	738.273.077,00
46	Puskesmas Kelapa Gading	-	1.687.650.842,00	-	-	-	-	-	-	1.687.650.842,00
47	Puskesmas Cilincing	310.000,00	2.868.255.686,00	-	-	-	-	-	-	2.868.565.686,00
48	Puskesmas Kebon Jeruk	1.950.000,00	506.415.532,00	-	-	-	-	-	-	508.365.532,00
49	Puskesmas Kembangan	605.000,00	2.910.103.634,00	-	-	-	-	-	-	2.910.708.634,00
50	Puskesmas Cengkareng	6.600.000,00	1.387.943.398,00	-	-	-	-	-	-	1.394.543.398,00
51	Puskesmas Kalideres	385.000,00	1.863.046.613,00	-	-	-	-	-	-	1.863.431.613,00
52	Puskesmas Grogol Petamburan	180.000,00	1.237.312.259,00	-	-	-	-	-	-	1.237.492.259,00
53	Puskesmas Pal Merah	-	2.671.221.304,00	-	-	-	-	-	-	2.671.221.304,00
54	Puskesmas Tambora	2.040.000,00	687.767.380,00	-	-	-	-	-	-	689.807.380,00
55	Puskesmas Taman Sari	1.445.000,00	1.160.196.613,00	-	-	-	-	-	-	1.161.641.613,00
56	Puskesmas Kebayoran Lama	6.320.000,00	1.612.724.753,00	-	-	-	-	-	-	1.619.044.753,00
57	Puskesmas Pesanggrahan	200.000,00	827.473.966,00	-	-	-	-	-	-	827.673.966,00
58	Puskesmas Pasar Minggu	335.000,00	909.292.257,00	-	-	-	-	-	-	909.627.257,00
59	Puskesmas Jagakarsa	900.000,00	1.132.598.192,00	-	-	-	-	-	-	1.133.498.192,00

No	Nama SKPD/UKPD	Kas Tunai	Kas di Bank	Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Uang Muka Pasien RSUD/RSKD	Uang Jaminan Kerjasama	Uang Titipan	Uang Muka Jasa BLUD	Kas dan Setara Kas BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10
60	Puskesmas Mampang Prapatan	110.000,00	1.508.735.418,00	-	-	-	-	-	-	1.508.845.418,00
61	Puskesmas Pancoran	460.000,00	1.132.881.182,00	-	-	-	-	-	-	1.133.341.182,00
62	Puskesmas Kebayoran Baru	14.275.000,00	1.735.801.493,00	-	-	-	-	-	-	1.750.076.493,00
63	Puskesmas Setiabudi	305.000,00	1.202.564.359,00	-	-	-	-	-	-	1.202.869.359,00
64	Puskesmas Tebet	1.240.000,00	1.761.584.685,00	-	-	-	-	-	-	1.762.824.685,00
65	Puskesmas Cilandak	650.000,00	1.292.425.872,00	64.439,00	-	-	-	-	-	1.293.140.311,00
66	Puskesmas Pasar Rebo	880.000,00	1.931.368.986,00	-	-	-	-	-	-	1.932.248.986,00
67	Puskesmas Ciracas	330.000,00	1.458.239.593,00	-	-	-	-	-	-	1.458.569.593,00
68	Puskesmas Cipayung	160.000,00	1.287.585.709,00	-	-	-	-	-	-	1.287.745.709,00
69	Puskesmas Kramat Jati	2.345.000,00	2.174.350.392,00	-	-	-	-	-	-	2.176.695.392,00
70	Puskesmas Makasar	315.000,00	575.059.815,00	-	-	-	-	-	-	575.374.815,00
71	Puskesmas Jatinegara	430.000,00	1.335.994.457,00	-	-	-	-	-	-	1.336.424.457,00
72	Puskesmas Duren Sawit	340.000,00	3.035.404.269,00	-	-	-	-	-	-	3.035.744.269,00
73	Puskesmas Matraman	120.000,00	134.301.182,00	-	-	-	-	-	-	134.421.182,00
74	Puskesmas Pulo Gadung	-	915.929.386,00	-	-	-	-	-	-	915.929.386,00
75	Puskesmas Cakung	640.000,00	4.593.619.938,00	-	-	-	-	-	-	4.594.259.938,00
76	Puskesmas Kepulauan Seribu Utara	-	134.718.142,00	-	-	-	-	-	-	134.718.142,00
77	Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan	-	91.510.446,00	-	-	-	-	-	-	91.510.446,00
78	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	48.026.267,00	2.716.884.218,00	395.687.690,00	78.817.337,00	10.571.257,00	60.000.000,00	-	-	3.309.986.769,00
79	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	14.466.890,00	41.483.214.165,00	-	-	60.968.800,00	-	-	-	41.558.649.855,00
80	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	34.676.000,00	29.957.286.917,00	-	-	459.647.011,00	-	-	-	30.451.609.928,00
81	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	138.864.934,00	12.060.234.115,00	-	-	8.800.000,00	-	-	-	12.207.899.049,00
82	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	-	19.841.243.500,00	9.720,00	3.749.876,00	-	-	-	-	19.845.003.096,00
83	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	45.403.475,00	19.728.273.602,00	-	-	5.500.000,00	-	-	-	19.779.177.077,00
84	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta	-	342.846.153,00	-	-	-	-	-	8.500.000,00	351.346.153,00
85	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta	-	15.715.385,00	-	-	-	-	-	-	15.715.385,00
86	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta	-	306.324.858,00	-	123.104.863,00	-	-	-	134.197.100,00	563.626.821,00
87	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta	-	27.078.965,00	-	-	-	-	-	-	27.078.965,00
88	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 26 Jakarta	-	4.222.102,00	-	-	-	-	-	-	4.222.102,00
89	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 20 Jakarta	-	75.691.623,00	-	-	-	-	-	-	75.691.623,00
90	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 13 Jakarta	-	95.950.739,00	-	-	-	-	-	-	95.950.739,00
91	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 51 Jakarta	-	64.206.138,00	-	-	-	-	-	-	64.206.138,00
92	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 Jakarta	-	18.200.462,00	-	-	-	-	-	-	18.200.462,00
93	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 32 Jakarta	-	24.646.989,00	-	-	-	-	-	-	24.646.989,00
94	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 33 Jakarta	-	30.145.700,00	-	-	-	-	-	-	30.145.700,00
95	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 37 Jakarta	-	81.529.500,00	-	-	-	-	-	-	81.529.500,00
96	Pusat Pengembangan Kompetensi Dan Kebijakan Publik	-	1.939.035.838,00	-	-	-	-	-	-	1.939.035.838,00
97	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung	-	2.813.716.865,00	-	-	-	-	-	-	2.813.716.865,00
98	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Peternakan	-	4.324.765.344,00	-	-	-	-	-	-	4.324.765.344,00
99	Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center	-	580.141.667.456,00	-	-	-	-	-	-	580.141.667.456,00
100	Unit Pengelola Sampah Terpadu	-	8.998.688.528,00	-	-	-	-	-	-	8.998.688.528,00
101	Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	-	1.281.696.901,00	-	-	-	-	-	-	1.281.696.901,00
102	Unit Pengelola Jakarta Smart City	-	1.251.334.048,00	-	-	-	-	-	-	1.251.334.048,00
Jumlah		700.266.859,00	937.293.659.466,00	941.418.323,00	237.927.548,00	565.419.352,00	60.000.000,00	2.400.510.747,00	142.697.100,00	942.341.899.395,00

**DAFTAR KAS DANA BOS DAN BOP KESETARAAN
PER 31 DESEMBER 2024**

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SilPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SilPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SilPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1	20100216	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 JAKARTA	SMA	10154123415	52.809.495	0	52.809.495	0	52.809.495	0	52.809.495
2	20100211	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 JAKARTA	SMA	10854123170	44.734.829	0	44.734.829	0	44.734.829	0	44.734.829
3	20100210	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 JAKARTA	SMA	50054123293	249.726.758	11.138	249.715.620	0	249.715.620	0	249.715.620
4	20100200	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 JAKARTA	SMA	11354123567	162.802.201	0	162.802.201	0	162.802.201	0	162.802.201
5	20100217	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 JAKARTA	SMA	10254123391	60.736.274	0	60.736.274	0	60.736.274	0	60.736.274
6	20100218	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 20 JAKARTA	SMA	10454123428	33.785.759	0	33.785.759	0	33.785.759	0	33.785.759
7	20100219	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 24 JAKARTA	SMA	11354123532	31.235.138	0	31.235.138	0	31.235.138	0	31.235.138
8	20100221	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 25 JAKARTA	SMA	11154123188	72.081.896	134.300	71.947.596	0	71.947.596	0	71.947.596
9	20100223	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 27 JAKARTA	SMA	50054123234	211.589.522	0	211.589.522	0	211.589.522	0	211.589.522
10	20100224	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 30 JAKARTA	SMA	50054123137	263.476.843	0	263.476.843	0	263.476.843	0	263.476.843
11	20100212	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 35 JAKARTA	SMA	11354123559	259.228.843	0	259.228.843	0	259.228.843	0	259.228.843
12	20100199	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 68 JAKARTA	SMA	50054123455	284.076.275	0	284.076.275	0	284.076.275	0	284.076.275
13	20100201	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 77 JAKARTA	SMA	12254123141	105.528.949	0	105.528.949	0	105.528.949	0	105.528.949
14	20100806	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 13 JAKARTA	SMA	20054125726	227.741.004	7.100	227.733.904	0	227.733.904	0	227.733.904
15	20100807	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 15 JAKARTA	SMA	30254125991	62.309.567	0	62.309.567	0	62.309.567	0	62.309.567
16	20100809	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 18 JAKARTA	SMA	20154126071	411.863.417	0	411.863.417	0	411.863.417	112.500	411.975.917
17	20100810	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 40 JAKARTA	SMA	14054125761	301.733.386	0	301.733.386	0	301.733.386	0	301.733.386
18	20100811	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 41 JAKARTA	SMA	10454126001	297.047.488	165.709	296.881.779	0	296.881.779	0	296.881.779
19	20100812	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 45 JAKARTA	SMA	20054125629	277.991.205	0	277.991.205	0	277.991.205	0	277.991.205
20	20100797	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 52 JAKARTA	SMA	20054125505	152.630.763	0	152.630.763	0	152.630.763	0	152.630.763
21	20100796	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 72 JAKARTA	SMA	23054125604	248.292.961	0	248.292.961	0	248.292.961	1.810.000	250.102.961
22	20100795	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 73 JAKARTA	SMA	20054125556	64.948.673	0	64.948.673	0	64.948.673	0	64.948.673
23	20100779	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 75 JAKARTA	SMA	20054125513	130.227.736	0	130.227.736	0	130.227.736	932.800	131.160.536
24	20100780	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 80 JAKARTA	SMA	20054126013	190.914.752	5.189.805	185.724.947	0	185.724.947	2.900	185.727.847
25	20100781	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 83 JAKARTA	SMA	20154125571	68.853.318	1.137.750	67.715.568	0	67.715.568	0	67.715.568
26	20100782	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 92 JAKARTA	SMA	20054125521	188.726.591	9.970.000	178.756.591	0	178.756.591	0	178.756.591
27	20100802	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 110 JAKARTA	SMA	20154125732	215.529.298	0	215.529.298	0	215.529.298	0	215.529.298
28	20100803	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 111 JAKARTA	SMA	30254125869	17.948.382	0	17.948.382	0	17.948.382	0	17.948.382
29	20100804	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 114 JAKARTA	SMA	20054125483	154.996.821	0	154.996.821	0	154.996.821	0	154.996.821
30	20100805	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 115 JAKARTA	SMA	20054125491	120.830.337	0	120.830.337	0	120.830.337	0	120.830.337
31	20101622	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 JAKARTA	SMA	30054123002	141.039.730	13.244.675	127.795.055	0	127.795.055	5.800	127.800.855
32	20101625	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 16 JAKARTA	SMA	11354122960	166.296.529	0	166.296.529	0	166.296.529	0	166.296.529
33	20101624	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 17 JAKARTA	SMA	30054123037	82.882.459	0	82.882.459	0	82.882.459	0	82.882.459
34	20101623	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 19 JAKARTA	SMA	30054123096	66.647.883	0	66.647.883	0	66.647.883	0	66.647.883
35	20101621	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 23 JAKARTA	SMA	11854122596	13.053.079	0	13.053.079	1.386.000	11.667.079	0	11.667.079
36	20101620	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 33 JAKARTA	SMA	30354122302	47.165.936	0	47.165.936	0	47.165.936	0	47.165.936
37	20101605	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 56 JAKARTA	SMA	30354122744	141.593.502	0	141.593.502	0	141.593.502	0	141.593.502
38	20101604	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 57 JAKARTA	SMA	41154122822	318.350.617	0	318.350.617	0	318.350.617	0	318.350.617
39	20101589	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 65 JAKARTA	SMA	41154122784	17.227.414	0	17.227.414	0	17.227.414	0	17.227.414
40	20101588	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA	SMA	11354122935	139.150.785	0	139.150.785	0	139.150.785	0	139.150.785
41	20101587	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 84 JAKARTA	SMA	30354122647	38.226.043	0	38.226.043	0	38.226.043	0	38.226.043
42	20101586	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 85 JAKARTA	SMA	41154122920	10.207.943	0	10.207.943	0	10.207.943	0	10.207.943
43	20101585	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 94 JAKARTA	SMA	30354122710	103.971.618	0	103.971.618	0	103.971.618	0	103.971.618
44	20101584	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 95 JAKARTA	SMA	30354122680	1.533.005.017	0	1.533.005.017	0	1.533.005.017	0	1.533.005.017
45	20101583	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 96 JAKARTA	SMA	30354122396	189.957.816	0	189.957.816	0	189.957.816	0	189.957.816
46	20101627	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 101 JAKARTA	SMA	41154122849	213.451.319	0	213.451.319	0	213.451.319	0	213.451.319
47	20101626	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 112 JAKARTA	SMA	30354122906	53.398.047	0	53.398.047	0	53.398.047	0	53.398.047
48	20102216	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 JAKARTA	SMA	11354124270	101.507.506	0	101.507.506	0	101.507.506	0	101.507.506
49	20102574	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 JAKARTA	SMA	40054123840	291.887.789	485.000	291.402.789	0	291.402.789	2.900	291.405.689
50	20102568	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 JAKARTA	SMA	40454124288	146.648.227	0	146.648.227	0	146.648.227	0	146.648.227

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
51	20102218	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 26 JAKARTA	SMA	40454124342	53.683.435	0	53.683.435	0	53.683.435	0	53.683.435
52	20107319	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 28 JAKARTA	SMA	40454124121	122.099.691	0	122.099.691	0	122.099.691	0	122.099.691
53	20102217	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 29 JAKARTA	SMA	40454123991	157.703.338	0	157.703.338	0	157.703.338	0	157.703.338
54	20102215	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 32 JAKARTA	SMA	40454123966	211.464.762	0	211.464.762	0	211.464.762	0	211.464.762
55	20102214	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 34 JAKARTA	SMA	40154123651	260.185.136	0	260.185.136	0	260.185.136	0	260.185.136
56	20102213	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 37 JAKARTA	SMA	40254124303	107.882.349	0	107.882.349	0	107.882.349	0	107.882.349
57	20102212	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 38 JAKARTA	SMA	40454123745	205.888.368	0	205.888.368	0	205.888.368	0	205.888.368
58	20102211	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 43 JAKARTA	SMA	50054124257	99.536.139	0	99.536.139	0	99.536.139	0	99.536.139
59	20102210	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 46 JAKARTA	SMA	40054123807	929.601.376	0	929.601.376	0	929.601.376	0	929.601.376
60	20102193	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 47 JAKARTA	SMA	40454124008	639.695.807	0	639.695.807	0	639.695.807	0	639.695.807
61	20102592	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 49 JAKARTA	SMA	40454123702	200.171.996	0	200.171.996	0	200.171.996	0	200.171.996
62	20102575	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 55 JAKARTA	SMA	40454124083	177.534.643	0	177.534.643	0	177.534.643	0	177.534.643
63	20102573	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 60 JAKARTA	SMA	40454124041	372.256.756	0	372.256.756	0	372.256.756	0	372.256.756
64	20102572	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 63 JAKARTA	SMA	32254124239	74.298.677	0	74.298.677	0	74.298.677	0	74.298.677
65	20102571	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 66 JAKARTA	SMA	40454123664	208.581.210	0	208.581.210	0	208.581.210	0	208.581.210
66	20102570	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 70 JAKARTA	SMA	40054123858	185.217.077	0	185.217.077	0	185.217.077	0	185.217.077
67	20102569	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 74 JAKARTA	SMA	40454123982	227.507.438	0	227.507.438	0	227.507.438	0	227.507.438
68	20107320	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 79 JAKARTA	SMA	40454124261	282.548.206	0	282.548.206	0	282.548.206	0	282.548.206
69	20102566	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 82 JAKARTA	SMA	40454123931	123.540.795	0	123.540.795	0	123.540.795	0	123.540.795
70	20102565	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 86 JAKARTA	SMA	40454124181	44.558.888	0	44.558.888	0	44.558.888	0	44.558.888
71	20102564	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 87 JAKARTA	SMA	40454124199	97.663.440	0	97.663.440	0	97.663.440	0	97.663.440
72	20102563	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 90 JAKARTA	SMA	40454124229	155.690.076	0	155.690.076	0	155.690.076	0	155.690.076
73	20102562	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 97 JAKARTA	SMA	40454123681	111.976.562	0	111.976.562	0	111.976.562	0	111.976.562
74	20102230	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 108 JAKARTA	SMA	40454124202	20.882.198	0	20.882.198	0	20.882.198	0	20.882.198
75	20102219	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 109 JAKARTA	SMA	50254123761	75.354.221	0	75.354.221	0	75.354.221	0	75.354.221
76	20102576	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI RAGUNAN JAKARTA	SMA	40454124130	130.814.193	0	130.814.193	0	130.814.193	0	130.814.193
77	20103279	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 JAKARTA	SMA	52354125171	192.888.468	0	192.888.468	0	192.888.468	0	192.888.468
78	20103287	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 JAKARTA	SMA	12354124471	98.828.363	0	98.828.363	0	98.828.363	0	98.828.363
79	20103285	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 12 JAKARTA	SMA	50054124745	77.122.580	0	77.122.580	0	77.122.580	0	77.122.580
80	20103284	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 14 JAKARTA	SMA	50054125059	63.180.725	0	63.180.725	0	63.180.725	0	63.180.725
81	20103283	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 21 JAKARTA	SMA	50054125407	80.082.138	0	80.082.138	0	80.082.138	0	80.082.138
82	20103282	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 22 JAKARTA	SMA	50054125237	68.001.870	0	68.001.870	0	68.001.870	0	68.001.870
83	20103281	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 31 JAKARTA	SMA	50054125245	526.575.876	0	526.575.876	37.500	526.538.376	0	526.538.376
84	20103280	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 36 JAKARTA	SMA	50054125377	73.914.407	0	73.914.407	232.000	73.682.407	11.322.000	85.004.407
85	20103296	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 39 JAKARTA	SMA	50254125268	146.050.580	148.500	145.902.080	0	145.902.080	0	145.902.080
86	20103297	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 42 JAKARTA	SMA	50054125130	177.556.543	0	177.556.543	0	177.556.543	0	177.556.543
87	20103298	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 44 JAKARTA	SMA	50354124782	188.771.601	0	188.771.601	1.155.000	187.616.601	0	187.616.601
88	20103314	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 48 JAKARTA	SMA	51154125186	134.771.001	0	134.771.001	0	134.771.001	0	134.771.001
89	20103313	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 50 JAKARTA	SMA	50054124991	235.312.403	0	235.312.403	0	235.312.403	0	235.312.403
90	20103312	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 51 JAKARTA	SMA	51354125034	267.254.924	0	267.254.924	0	267.254.924	0	267.254.924
91	20103311	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 53 JAKARTA	SMA	50154124964	87.156.952	0	87.156.952	0	87.156.952	0	87.156.952
92	20103310	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 54 JAKARTA	SMA	50054125008	211.293.684	0	211.293.684	0	211.293.684	0	211.293.684
93	20103309	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 58 JAKARTA	SMA	50254124610	225.802.552	0	225.802.552	0	225.802.552	0	225.802.552
94	20103308	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 59 JAKARTA	SMA	50154124751	74.611.327	0	74.611.327	0	74.611.327	0	74.611.327
95	20103307	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 61 JAKARTA	SMA	51254124803	84.442.318	0	84.442.318	0	84.442.318	0	84.442.318
96	20103306	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 62 JAKARTA	SMA	51154125097	61.871.186	0	61.871.186	0	61.871.186	0	61.871.186
97	20103305	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 64 JAKARTA	SMA	51154124546	204.082.526	0	204.082.526	0	204.082.526	0	204.082.526
98	20103304	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 67 JAKARTA	SMA	51354125140	204.900.389	0	204.900.389	0	204.900.389	0	204.900.389
99	20103303	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 71 JAKARTA	SMA	51254124722	237.327.064	0	237.327.064	0	237.327.064	0	237.327.064
100	20103302	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 76 JAKARTA	SMA	50354124383	70.059.128	232.000	69.827.128	348.000	69.479.128	116.000	69.595.128
101	20103301	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 81 JAKARTA	SMA	51254125117	262.681.500	0	262.681.500	0	262.681.500	0	262.681.500
102	20103300	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 88 JAKARTA	SMA	51154125275	78.786.442	0	78.786.442	0	78.786.442	0	78.786.442
103	20103299	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 89 JAKARTA	SMA	12354124421	73.782.712	0	73.782.712	0	73.782.712	0	73.782.712
104	20103278	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 91 JAKARTA	SMA	51254124862	107.614.247	0	107.614.247	0	107.614.247	0	107.614.247
105	20103258	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 93 JAKARTA	SMA	51154125089	225.444.385	0	225.444.385	0	225.444.385	0	225.444.385

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
106	20103257	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 98 JAKARTA	SMA	51154125348	166.661.156	8.700	166.652.456	0	166.652.456	0	166.652.456
107	20103256	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 99 JAKARTA	SMA	51154124601	132.540.439	0	132.540.439	0	132.540.439	0	132.540.439
108	20103294	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 100 JAKARTA	SMA	50054124958	218.624.480	0	218.624.480	0	218.624.480	0	218.624.480
109	20103293	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 102 JAKARTA	SMA	12354124412	151.060.036	0	151.060.036	0	151.060.036	0	151.060.036
110	20103292	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 103 JAKARTA	SMA	50354124774	296.040.416	5.055	296.035.361	0	296.035.361	0	296.035.361
111	20103291	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 104 JAKARTA	SMA	51154125321	363.516.050	0	363.516.050	0	363.516.050	0	363.516.050
112	20103290	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 105 JAKARTA	SMA	51154124635	266.349.978	0	266.349.978	27.000	266.322.978	0	266.322.978
113	20103289	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 106 JAKARTA	SMA	51154125356	155.941.306	0	155.941.306	0	155.941.306	0	155.941.306
114	20103288	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 107 JAKARTA	SMA	12354124447	451.272.847	0	451.272.847	0	451.272.847	0	451.272.847
115	20103286	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 113 JAKARTA	SMA	51154124571	291.118.959	0	291.118.959	0	291.118.959	0	291.118.959
116	20109933	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MH. THAMRIN JAKARTA	SMA	10354124515	282.484.817	0	282.484.817	0	282.484.817	0	282.484.817
117	20107185	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 69 JAKARTA	SMA	30154122292	128.421.260	0	128.421.260	0	128.421.260	0	128.421.260
118	20100251	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 JAKARTA	SMP	10854134694	151.648.640	0	151.648.640	0	151.648.640	0	151.648.640
119	20100236	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 JAKARTA	SMP	12254134401	65.546.104	0	65.546.104	0	65.546.104	0	65.546.104
120	20100274	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 JAKARTA	SMP	10154134883	141.304.480	0	141.304.480	0	141.304.480	0	141.304.480
121	20100277	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 JAKARTA	SMP	10154134891	38.480.278	0	38.480.278	0	38.480.278	0	38.480.278
122	20100260	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 JAKARTA	SMP	50054134767	78.314.639	0	78.314.639	0	78.314.639	0	78.314.639
123	20100252	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 JAKARTA	SMP	12254134649	18.748.275	0	18.748.275	0	18.748.275	0	18.748.275
124	20100231	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 17 JAKARTA	SMP	10454134837	97.521.921	0	97.521.921	0	97.521.921	0	97.521.921
125	20100232	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 18 JAKARTA	SMP	10854134741	31.562.532	0	31.562.532	0	31.562.532	0	31.562.532
126	20100270	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 28 JAKARTA	SMP	12254134428	13.758.917	0	13.758.917	0	13.758.917	0	13.758.917
127	20100272	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 38 JAKARTA	SMP	11354135069	34.765.978	0	34.765.978	0	34.765.978	0	34.765.978
128	20106401	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 39 JAKARTA	SMP	11154134341	101.349.102	0	101.349.102	0	101.349.102	0	101.349.102
129	20100275	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 40 JAKARTA	SMP	11354135026	120.089.780	0	120.089.780	0	120.089.780	0	120.089.780
130	20100276	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 47 JAKARTA	SMP	12254134215	65.079.700	0	65.079.700	0	65.079.700	0	65.079.700
131	20100278	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 59 JAKARTA	SMP	10854134635	117.153.237	0	117.153.237	0	117.153.237	0	117.153.237
132	20100279	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 60 JAKARTA	SMP	11154134295	55.359.539	0	55.359.539	0	55.359.539	0	55.359.539
133	20100280	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 64 JAKARTA	SMP	10454134845	97.782.280	0	97.782.280	0	97.782.280	0	97.782.280
134	20100269	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 70 JAKARTA	SMP	11854135116	57.119.960	0	57.119.960	0	57.119.960	0	57.119.960
135	20106410	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 71 JAKARTA	SMP	12254134223	9.875.589	0	9.875.589	0	9.875.589	0	9.875.589
136	20100267	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 72 JAKARTA	SMP	11154134350	150.529.185	0	150.529.185	0	150.529.185	0	150.529.185
137	20100256	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 76 JAKARTA	SMP	12254134436	67.557.857	0	67.557.857	0	67.557.857	0	67.557.857
138	20100257	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 77 JAKARTA	SMP	12254134231	33.701.284	0	33.701.284	0	33.701.284	0	33.701.284
139	20100258	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 78 JAKARTA	SMP	12254134606	52.708.168	0	52.708.168	0	52.708.168	0	52.708.168
140	20100259	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 79 JAKARTA	SMP	12254134622	125.351.906	0	125.351.906	0	125.351.906	0	125.351.906
141	20100261	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 93 JAKARTA	SMP	10854134546	87.341.552	0	87.341.552	0	87.341.552	0	87.341.552
142	20100262	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 94 JAKARTA	SMP	11854134306	68.196.997	0	68.196.997	0	68.196.997	0	68.196.997
143	20100241	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 118 JAKARTA	SMP	12254134240	7.606.971	0	7.606.971	0	7.606.971	0	7.606.971
144	20100240	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 119 JAKARTA	SMP	12254134487	45.412.544	0	45.412.544	0	45.412.544	0	45.412.544
145	20100228	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 137 JAKARTA	SMP	12254134207	13.495.721	0	13.495.721	0	13.495.721	0	13.495.721
146	20100230	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 156 JAKARTA	SMP	12254134410	26.284.784	0	26.284.784	0	26.284.784	0	26.284.784
147	20100233	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 181 JAKARTA	SMP	11354135051	297.813.342	0	297.813.342	0	297.813.342	0	297.813.342
148	20100235	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 183 JAKARTA	SMP	12254134495	10.699.930	0	10.699.930	0	10.699.930	0	10.699.930
149	20100237	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 216 JAKARTA	SMP	50054134929	109.144.448	0	109.144.448	0	109.144.448	0	109.144.448
150	20100238	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 228 JAKARTA	SMP	12254134657	192.160.783	0	192.160.783	0	192.160.783	0	192.160.783
151	20100253	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 269 JAKARTA	SMP	12254134592	97.239.895	930.743	96.309.152	0	96.309.152	0	96.309.152
152	20100255	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 273 JAKARTA	SMP	11854135043	25.033.469	0	25.033.469	0	25.033.469	0	25.033.469
153	20100770	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 21 JAKARTA	SMP	30254140434	234.461.146	0	234.461.146	0	234.461.146	0	234.461.146
154	20100772	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 23 JAKARTA	SMP	10454140217	11.315.454	0	11.315.454	0	11.315.454	0	11.315.454
155	20100746	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30 JAKARTA	SMP	20054140032	30.497.995	0	30.497.995	0	30.497.995	0	30.497.995
156	20100747	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 34 JAKARTA	SMP	10454140225	100.359.632	0	100.359.632	0	100.359.632	0	100.359.632
157	20100748	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 42 JAKARTA	SMP	10454140233	8.329.711	0	8.329.711	0	8.329.711	0	8.329.711
158	20100749	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 53 JAKARTA	SMP	20054139476	48.196.493	0	48.196.493	0	48.196.493	0	48.196.493
159	20100750	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 55 JAKARTA	SMP	20154140898	59.063.666	0	59.063.666	0	59.063.666	0	59.063.666
160	20100751	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 65 JAKARTA	SMP	20054140652	19.580.103	0	19.580.103	0	19.580.103	0	19.580.103

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
161	20100752	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 84 JAKARTA	SMP	20054139930	153.005.949	0	153.005.949	0	153.005.949	0	153.005.949
162	20100753	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 95 JAKARTA	SMP	20154140693	41.035.913	0	41.035.913	0	41.035.913	0	41.035.913
163	20100717	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 112 JAKARTA	SMP	30254140353	65.143.357	0	65.143.357	0	65.143.357	0	65.143.357
164	20100718	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 113 JAKARTA	SMP	10454140161	983.711	0	983.711	0	983.711	0	983.711
165	20100719	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 114 JAKARTA	SMP	20054140091	75.864.982	0	75.864.982	0	75.864.982	0	75.864.982
166	20100720	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 116 JAKARTA	SMP	20154140740	3.181.122	0	3.181.122	1.897.500	1.283.622	0	1.283.622
167	20100721	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 120 JAKARTA	SMP	30454140261	40.420.221	0	40.420.221	0	40.420.221	0	40.420.221
168	20100740	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 121 JAKARTA	SMP	20054140067	6.256.934	0	6.256.934	0	6.256.934	0	6.256.934
169	20100741	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 122 JAKARTA	SMP	30254140299	21.369.431	0	21.369.431	0	21.369.431	0	21.369.431
170	20100760	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 123 JAKARTA	SMP	20054139786	121.805.298	0	121.805.298	0	121.805.298	0	121.805.298
171	20100761	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 129 JAKARTA	SMP	20154140642	36.670.465	0	36.670.465	0	36.670.465	0	36.670.465
172	20106716	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 136 JAKARTA	SMP	20154140073	183.244.697	0	183.244.697	0	183.244.697	0	183.244.697
173	20100762	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 140 JAKARTA	SMP	20054140750	24.835.205	0	24.835.205	0	24.835.205	0	24.835.205
174	20100763	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 143 JAKARTA	SMP	20054139387	14.150.194	0	14.150.194	0	14.150.194	0	14.150.194
175	20100764	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 151 JAKARTA	SMP	20054139981	9.150.933	0	9.150.933	0	9.150.933	0	9.150.933
176	20100765	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 152 JAKARTA	SMP	20054140857	55.101.484	0	55.101.484	0	55.101.484	0	55.101.484
177	20100766	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 162 JAKARTA	SMP	20054139506	95.958.801	0	95.958.801	0	95.958.801	0	95.958.801
178	20100767	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 170 JAKARTA	SMP	20054139841	31.529.794	0	31.529.794	0	31.529.794	0	31.529.794
179	20100768	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 173 JAKARTA	SMP	20054140016	27.526.917	0	27.526.917	0	27.526.917	0	27.526.917
180	20100769	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 200 JAKARTA	SMP	20054139531	28.104.159	0	28.104.159	0	28.104.159	0	28.104.159
181	20100771	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 221 JAKARTA	SMP	20054140768	202.216.385	0	202.216.385	0	202.216.385	0	202.216.385
182	20100773	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 231 JAKARTA	SMP	20054139565	73.865.865	0	73.865.865	0	73.865.865	0	73.865.865
183	20100759	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 244 JAKARTA	SMP	20054139395	47.697.872	0	47.697.872	0	47.697.872	0	47.697.872
184	20100758	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 261 JAKARTA	SMP	30154140495	24.489.400	0	24.489.400	0	24.489.400	0	24.489.400
185	20100757	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 266 JAKARTA	SMP	20054139409	43.341.805	0	43.341.805	0	43.341.805	0	43.341.805
186	20100742	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 270 JAKARTA	SMP	20054139859	91.270.986	0	91.270.986	0	91.270.986	0	91.270.986
187	20100743	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 277 JAKARTA	SMP	20054140024	49.240.623	0	49.240.623	0	49.240.623	0	49.240.623
188	20100744	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 279 JAKARTA	SMP	20054139921	63.753.766	0	63.753.766	0	63.753.766	0	63.753.766
189	20100745	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 282 JAKARTA	SMP	20154140774	36.307.573	0	36.307.573	0	36.307.573	0	36.307.573
190	69800097	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 289 JAKARTA	SMP	20054139735	51.057.466	0	51.057.466	0	51.057.466	0	51.057.466
191	20107034	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16 JAKARTA	SMP	11354135921	62.667.514	0	62.667.514	0	62.667.514	0	62.667.514
192	20101529	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 22 JAKARTA	SMP	10454133873	60.899.380	0	60.899.380	0	60.899.380	0	60.899.380
193	20101546	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 32 JAKARTA	SMP	30054134110	45.749.619	0	45.749.619	0	45.749.619	0	45.749.619
194	20101545	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 45 JAKARTA	SMP	30454131890	6.349.081	0	6.349.081	0	6.349.081	0	6.349.081
195	20101544	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 54 JAKARTA	SMP	30054133822	40.987.521	0	40.987.521	0	40.987.521	0	40.987.521
196	20101543	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 61 JAKARTA	SMP	11354133805	107.923.956	0	107.923.956	0	107.923.956	0	107.923.956
197	20101542	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 63 JAKARTA	SMP	30054134144	23.560.934	0	23.560.934	0	23.560.934	0	23.560.934
198	20101541	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 69 JAKARTA	SMP	11354132507	12.189.220	0	12.189.220	0	12.189.220	0	12.189.220
199	20101540	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 75 JAKARTA	SMP	41154133221	28.430.165	0	28.430.165	0	28.430.165	0	28.430.165
200	20101539	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 82 JAKARTA	SMP	30054132613	23.175.371	0	23.175.371	0	23.175.371	0	23.175.371
201	20101538	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 83 JAKARTA	SMP	30054132451	38.298.966	0	38.298.966	0	38.298.966	0	38.298.966
202	20101537	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 88 JAKARTA	SMP	11354133724	25.011.017	0	25.011.017	0	25.011.017	0	25.011.017
203	20101522	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 89 JAKARTA	SMP	11354132566	29.594.574	0	29.594.574	0	29.594.574	0	29.594.574
204	20101558	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 100 JAKARTA	SMP	30454132217	77.268.155	0	77.268.155	0	77.268.155	0	77.268.155
205	20101557	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 101 JAKARTA	SMP	11354133783	19.385.211	0	19.385.211	0	19.385.211	0	19.385.211
206	20101556	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 105 JAKARTA	SMP	41154133514	170.564.515	0	170.564.515	0	170.564.515	0	170.564.515
207	20101554	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 108 JAKARTA	SMP	30454131873	13.717.348	0	13.717.348	0	13.717.348	0	13.717.348
208	20101553	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 111 JAKARTA	SMP	11354133716	28.622.576	0	28.622.576	0	28.622.576	0	28.622.576
209	20101552	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 125 JAKARTA	SMP	30454132870	13.704.419	0	13.704.419	0	13.704.419	0	13.704.419
210	20101551	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 127 JAKARTA	SMP	41154133204	105.243.898	0	105.243.898	0	105.243.898	0	105.243.898
211	20101550	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 130 JAKARTA	SMP	11854133750	34.238.622	0	34.238.622	0	34.238.622	0	34.238.622
212	20101562	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 132 JAKARTA	SMP	30454132250	9.492.742	0	9.492.742	0	9.492.742	0	9.492.742
213	20101563	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 134 JAKARTA	SMP	41154133620	110.047.775	0	110.047.775	0	110.047.775	0	110.047.775
214	20101564	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 142 JAKARTA	SMP	41154133425	24.756.397	0	24.756.397	0	24.756.397	0	24.756.397
215	20101576	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 159 JAKARTA	SMP	30054134012	39.752.548	0	39.752.548	0	39.752.548	0	39.752.548

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
216	20101574	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 169 JAKARTA	SMP	30054132885	34.003.688	0	34.003.688	0	34.003.688	0	34.003.688
217	20101573	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 176 JAKARTA	SMP	30354132090	109.665.352	0	109.665.352	0	109.665.352	0	109.665.352
218	20101572	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 186 JAKARTA	SMP	30454132675	37.804.037	0	37.804.037	0	37.804.037	0	37.804.037
219	20101571	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 187 JAKARTA	SMP	30454132977	25.319.036	0	25.319.036	0	25.319.036	0	25.319.036
220	20101570	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 189 JAKARTA	SMP	41154133344	13.519.160	0	13.519.160	0	13.519.160	0	13.519.160
221	20101569	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 190 JAKARTA	SMP	30454132781	3.034.905	0	3.034.905	0	3.034.905	0	3.034.905
222	20101568	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 191 JAKARTA	SMP	41154133158	34.980.724	0	34.980.724	0	34.980.724	0	34.980.724
223	20101566	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 197 JAKARTA	SMP	41154133301	45.443.806	0	45.443.806	0	45.443.806	0	45.443.806
224	20101565	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 201 JAKARTA	SMP	30454132021	131.183.918	0	131.183.918	0	131.183.918	0	131.183.918
225	20101549	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 204 JAKARTA	SMP	30054132893	10.525.607	0	10.525.607	0	10.525.607	0	10.525.607
226	20101548	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 205 JAKARTA	SMP	30054132982	36.988.002	0	36.988.002	0	36.988.002	0	36.988.002
227	20101533	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 206 JAKARTA	SMP	41154133565	6.156.335	0	6.156.335	0	6.156.335	0	6.156.335
228	20101532	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 207 JAKARTA	SMP	41154133689	23.670.817	0	23.670.817	0	23.670.817	0	23.670.817
229	20101531	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 215 JAKARTA	SMP	41154133638	39.879.918	0	39.879.918	0	39.879.918	0	39.879.918
230	20101530	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 219 JAKARTA	SMP	41154133433	12.154.478	0	12.154.478	0	12.154.478	0	12.154.478
231	20101528	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 220 JAKARTA	SMP	41154133166	32.467.538	0	32.467.538	0	32.467.538	0	32.467.538
232	20101527	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 224 JAKARTA	SMP	30054132796	7.969.211	0	7.969.211	0	7.969.211	0	7.969.211
233	20101526	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 225 JAKARTA	SMP	30054132681	25.524.346	0	25.524.346	100.000	25.424.346	0	25.424.346
234	20109212	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 229 JAKARTA	SMP	41154133212	4.475.481	0	4.475.481	0	4.475.481	0	4.475.481
235	20101524	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 248 JAKARTA	SMP	30054132036	61.919.114	0	61.919.114	0	61.919.114	0	61.919.114
236	20101523	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 249 JAKARTA	SMP	30454131881	43.835.482	0	43.835.482	0	43.835.482	0	43.835.482
237	20101534	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 264 JAKARTA	SMP	30454132292	21.999.622	0	21.999.622	0	21.999.622	0	21.999.622
238	20101535	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 271 JAKARTA	SMP	41154133379	15.514.838	180.000	15.334.838	0	15.334.838	0	15.334.838
239	20101536	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 274 JAKARTA	SMP	30054132443	32.423.396	0	32.423.396	0	32.423.396	0	32.423.396
240	20101547	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 278 JAKARTA	SMP	30054132800	11.167.447	0	11.167.447	0	11.167.447	0	11.167.447
241	20108854	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 286 JAKARTA	SMP	30054132583	19.165.626	0	19.165.626	0	19.165.626	0	19.165.626
242	20102470	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 JAKARTA	SMP	50054136875	64.406.235	0	64.406.235	0	64.406.235	0	64.406.235
243	20102402	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 JAKARTA	SMP	40054135741	61.292.222	0	61.292.222	0	61.292.222	0	61.292.222
244	20102509	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 JAKARTA	SMP	40054135805	29.969.216	46.920	29.922.296	0	29.922.296	0	29.922.296
245	20102507	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 JAKARTA	SMP	40054135813	51.394.781	0	51.394.781	0	51.394.781	0	51.394.781
246	20102503	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15 JAKARTA	SMP	40254136913	213.409.508	0	213.409.508	0	213.409.508	0	213.409.508
247	20102522	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 19 JAKARTA	SMP	40054135759	250.139.919	0	250.139.919	0	250.139.919	0	250.139.919
248	20102471	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 29 JAKARTA	SMP	40054135767	37.989.273	0	37.989.273	0	37.989.273	0	37.989.273
249	20102469	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 31 JAKARTA	SMP	41154136033	94.798.710	0	94.798.710	669.240	94.129.470	0	94.129.470
250	20102468	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 33 JAKARTA	SMP	40254136867	96.853.995	0	96.853.995	0	96.853.995	0	96.853.995
251	20102467	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 37 JAKARTA	SMP	40154135170	76.729.818	0	76.729.818	0	76.729.818	0	76.729.818
252	20102480	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 41 JAKARTA	SMP	40054136518	16.464.696	0	16.464.696	0	16.464.696	0	16.464.696
253	20102481	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 43 JAKARTA	SMP	40054136135	23.020.387	0	23.020.387	0	23.020.387	0	23.020.387
254	20102482	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 46 JAKARTA	SMP	40054136488	57.626.561	0	57.626.561	0	57.626.561	0	57.626.561
255	20102495	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 48 JAKARTA	SMP	41154135886	85.050.567	0	85.050.567	0	85.050.567	0	85.050.567
256	20102494	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 56 JAKARTA	SMP	40054136321	37.252.954	0	37.252.954	0	37.252.954	0	37.252.954
257	20102493	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 57 JAKARTA	SMP	40254136701	135.919.585	0	135.919.585	0	135.919.585	0	135.919.585
258	20102492	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 58 JAKARTA	SMP	40254136824	107.164.507	0	107.164.507	0	107.164.507	0	107.164.507
259	20102491	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 66 JAKARTA	SMP	41154135916	5.331.221	1.000.000	4.331.221	0	4.331.221	478.940	4.810.161
260	20102490	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 67 JAKARTA	SMP	50054136786	19.258.481	0	19.258.481	0	19.258.481	0	19.258.481
261	20102489	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 68 JAKARTA	SMP	40054135236	48.451.987	0	48.451.987	0	48.451.987	0	48.451.987
262	20102488	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 73 JAKARTA	SMP	40254136964	37.871.771	0	37.871.771	0	37.871.771	0	37.871.771
263	20102487	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 85 JAKARTA	SMP	40154135340	58.570.922	0	58.570.922	0	58.570.922	0	58.570.922
264	20102486	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 86 JAKARTA	SMP	40054135180	67.316.847	0	67.316.847	0	67.316.847	0	67.316.847
265	20102485	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 87 JAKARTA	SMP	41154136084	172.429.044	0	172.429.044	0	172.429.044	0	172.429.044
266	20102484	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 96 JAKARTA	SMP	40154135358	16.112.267	0	16.112.267	0	16.112.267	0	16.112.267
267	20102483	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 98 JAKARTA	SMP	40054135554	40.976.855	0	40.976.855	0	40.976.855	0	40.976.855
268	20102420	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 104 JAKARTA	SMP	40054136216	17.297.451	0	17.297.451	0	17.297.451	0	17.297.451
269	20102419	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 107 JAKARTA	SMP	40054136453	54.515.849	0	54.515.849	0	54.515.849	0	54.515.849
270	20102527	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 110 JAKARTA	SMP	41154136602	83.455.710	0	83.455.710	0	83.455.710	0	83.455.710

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
271	20102510	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 115 JAKARTA	SMP	40254136956	28.333.324	0	28.333.324	0	28.333.324	0	28.333.324
272	20102508	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 124 JAKARTA	SMP	40054136119	55.039.340	0	55.039.340	0	55.039.340	0	55.039.340
273	20102506	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 131 JAKARTA	SMP	40054135422	2.393.018	0	2.393.018	0	2.393.018	0	2.393.018
274	20102505	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 141 JAKARTA	SMP	40054136186	20.253.925	0	20.253.925	0	20.253.925	0	20.253.925
275	20102504	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 145 JAKARTA	SMP	40254136778	24.034.507	0	24.034.507	297.000	23.737.507	0	23.737.507
276	20102502	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 153 JAKARTA	SMP	41154135908	20.734.613	0	20.734.613	0	20.734.613	0	20.734.613
277	20102501	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 154 JAKARTA	SMP	40054136283	9.853.082	0	9.853.082	0	9.853.082	0	9.853.082
278	20102500	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 155 JAKARTA	SMP	40254136239	56.738.964	0	56.738.964	0	56.738.964	0	56.738.964
279	20102499	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 161 JAKARTA	SMP	41154136025	66.000.233	0	66.000.233	0	66.000.233	0	66.000.233
280	20102498	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 163 JAKARTA	SMP	40054136470	71.176.910	0	71.176.910	0	71.176.910	0	71.176.910
281	20102511	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 164 JAKARTA	SMP	41154135967	73.297.357	0	73.297.357	0	73.297.357	0	73.297.357
282	20102512	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 166 JAKARTA	SMP	40054135473	41.471.760	0	41.471.760	0	41.471.760	0	41.471.760
283	20102513	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 175 JAKARTA	SMP	40054135465	3.041.040	0	3.041.040	0	3.041.040	0	3.041.040
284	20102526	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 177 JAKARTA	SMP	41154136564	116.599.729	0	116.599.729	0	116.599.729	0	116.599.729
285	20102525	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 178 JAKARTA	SMP	41154136530	357.485.307	0	357.485.307	0	357.485.307	0	357.485.307
286	20102524	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 182 JAKARTA	SMP	40054136267	30.247.880	0	30.247.880	0	30.247.880	0	30.247.880
287	20102523	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 185 JAKARTA	SMP	11354135930	2.008.113	0	2.008.113	0	2.008.113	0	2.008.113
288	20102521	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 211 JAKARTA	SMP	40054135619	2.722.111	0	2.722.111	0	2.722.111	0	2.722.111
289	20102520	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 212 JAKARTA	SMP	40054136313	26.660.656	0	26.660.656	0	26.660.656	0	26.660.656
290	20102519	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 218 JAKARTA	SMP	40054136356	52.622.199	0	52.622.199	0	52.622.199	0	52.622.199
291	20102518	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 226 JAKARTA	SMP	40154135331	101.789.553	0	101.789.553	0	101.789.553	0	101.789.553
292	20102517	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 227 JAKARTA	SMP	40054136461	22.768.762	0	22.768.762	0	22.768.762	0	22.768.762
293	20102516	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 235 JAKARTA	SMP	41154136572	38.718.232	0	38.718.232	0	38.718.232	0	38.718.232
294	20102515	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 238 JAKARTA	SMP	40054136259	61.537.814	0	61.537.814	0	61.537.814	0	61.537.814
295	20102514	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 239 JAKARTA	SMP	40054135686	6.761.802	0	6.761.802	0	6.761.802	0	6.761.802
296	20102497	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 240 JAKARTA	SMP	40054135716	8.456.367	0	8.456.367	0	8.456.367	0	8.456.367
297	20102496	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 242 JAKARTA	SMP	40054135546	60.613.096	0	60.613.096	0	60.613.096	0	60.613.096
298	20102479	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 245 JAKARTA	SMP	41154136653	167.434.471	0	167.434.471	0	167.434.471	0	167.434.471
299	20102478	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 247 JAKARTA	SMP	40054136224	31.650.885	0	31.650.885	0	31.650.885	0	31.650.885
300	20102477	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 250 JAKARTA	SMP	40054135708	43.431.101	0	43.431.101	0	43.431.101	0	43.431.101
301	20102476	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 253 JAKARTA	SMP	40054135431	52.502.446	0	52.502.446	0	52.502.446	0	52.502.446
302	20102475	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 254 JAKARTA	SMP	40054135481	38.878.587	0	38.878.587	0	38.878.587	0	38.878.587
303	20102474	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 265 JAKARTA	SMP	40254136859	36.817.897	0	36.817.897	0	36.817.897	0	36.817.897
304	20102473	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 267 JAKARTA	SMP	41154136688	80.090.935	0	80.090.935	0	80.090.935	0	80.090.935
305	20102472	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 276 JAKARTA	SMP	40054135627	18.196.715	0	18.196.715	0	18.196.715	0	18.196.715
306	20102466	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI RAGUNAN JAKARTA	SMP	40054136526	11.334.542	0	11.334.542	0	11.334.542	0	11.334.542
307	20103596	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 JAKARTA	SMP	50154137918	18.308.925	0	18.308.925	0	18.308.925	0	18.308.925
308	20103594	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 JAKARTA	SMP	50054138894	54.649.332	0	54.649.332	0	54.649.332	0	54.649.332
309	20103590	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 JAKARTA	SMP	51154137745	89.448.239	0	89.448.239	0	89.448.239	0	89.448.239
310	20103516	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 JAKARTA	SMP	50054138185	210.475.743	0	210.475.743	0	210.475.743	0	210.475.743
311	20103620	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 20 JAKARTA	SMP	51154138580	32.044.604	0	32.044.604	0	32.044.604	0	32.044.604
312	20103624	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 24 JAKARTA	SMP	51154138512	41.282.449	0	41.282.449	0	41.282.449	0	41.282.449
313	20103602	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 25 JAKARTA	SMP	50054138339	129.606.636	0	129.606.636	0	129.606.636	0	129.606.636
314	20103575	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 26 JAKARTA	SMP	50054138371	121.029.882	0	121.029.882	0	121.029.882	0	121.029.882
315	20103571	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 27 JAKARTA	SMP	50154137870	27.531.777	0	27.531.777	0	27.531.777	0	27.531.777
316	20107182	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 35 JAKARTA	SMP	51154138431	107.926.219	0	107.926.219	0	107.926.219	0	107.926.219
317	20103584	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 36 JAKARTA	SMP	50054138304	14.106.356	0	14.106.356	0	14.106.356	0	14.106.356
318	20103601	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 44 JAKARTA	SMP	50054139262	86.846.944	0	86.846.944	0	86.846.944	0	86.846.944
319	20109183	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 49 JAKARTA	SMP	51154138601	54.880.157	0	54.880.157	0	54.880.157	0	54.880.157
320	20103599	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 50 JAKARTA	SMP	51154138610	3.043.237	0	3.043.237	0	3.043.237	0	3.043.237
321	20103598	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 51 JAKARTA	SMP	51254138006	77.135.989	0	77.135.989	0	77.135.989	0	77.135.989
322	20103597	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 52 JAKARTA	SMP	50054138347	13.434.210	0	13.434.210	0	13.434.210	0	13.434.210
323	20103595	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 62 JAKARTA	SMP	50054138398	186.803.088	350.020	186.453.068	0	186.453.068	0	186.453.068
324	20103593	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 74 JAKARTA	SMP	50054139343	2.116.728	0	2.116.728	0	2.116.728	0	2.116.728
325	20103592	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 80 JAKARTA	SMP	51154138709	62.771.191	0	62.771.191	0	62.771.191	0	62.771.191

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
326	20103591	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 81 JAKARTA	SMP	51154137532	38.719.917	0	38.719.917	0	38.719.917	0	38.719.917
327	20103589	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 90 JAKARTA	SMP	50154137101	206.319.229	0	206.319.229	0	206.319.229	0	206.319.229
328	20103588	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 91 JAKARTA	SMP	51154139098	48.745.009	0	48.745.009	0	48.745.009	0	48.745.009
329	20103587	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 92 JAKARTA	SMP	50054139149	67.860.857	0	67.860.857	0	67.860.857	0	67.860.857
330	20103586	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 97 JAKARTA	SMP	50054138878	153.237.581	0	153.237.581	0	153.237.581	0	153.237.581
331	20103565	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 99 JAKARTA	SMP	50054139211	211.869.060	0	211.869.060	0	211.869.060	0	211.869.060
332	20103507	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 102 JAKARTA	SMP	51154139012	952.229	0	952.229	0	952.229	0	952.229
333	20103508	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 103 JAKARTA	SMP	50254138971	12.599.918	0	12.599.918	0	12.599.918	0	12.599.918
334	20103524	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 106 JAKARTA	SMP	51154137672	31.885.931	0	31.885.931	0	31.885.931	0	31.885.931
335	20103523	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 109 JAKARTA	SMP	51254138651	81.856.281	0	81.856.281	0	81.856.281	0	81.856.281
336	20103522	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 117 JAKARTA	SMP	51254137972	98.874.448	0	98.874.448	0	98.874.448	0	98.874.448
337	20103521	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 126 JAKARTA	SMP	51154138458	115.339.823	0	115.339.823	0	115.339.823	0	115.339.823
338	20103520	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 128 JAKARTA	SMP	51254138685	16.250.565	0	16.250.565	0	16.250.565	0	16.250.565
339	20103519	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 135 JAKARTA	SMP	51254137981	66.995.413	50.000	66.945.413	0	66.945.413	0	66.945.413
340	20103518	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 138 JAKARTA	SMP	50354137248	153.927.452	0	153.927.452	483.750	153.443.702	0	153.443.702
341	20103517	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 139 JAKARTA	SMP	50354137922	6.764.813	0	6.764.813	0	6.764.813	0	6.764.813
342	20103515	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 144 JAKARTA	SMP	12254136994	88.947.697	0	88.947.697	450.000	88.497.697	0	88.497.697
343	20103514	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 146 JAKARTA	SMP	12254137338	25.031.865	0	25.031.865	0	25.031.865	0	25.031.865
344	20103513	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 147 JAKARTA	SMP	51154137630	14.327.304	0	14.327.304	0	14.327.304	0	14.327.304
345	20103512	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 148 JAKARTA	SMP	50154138329	46.943.797	0	46.943.797	0	46.943.797	0	46.943.797
346	20103511	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 149 JAKARTA	SMP	50054138223	8.097.891	0	8.097.891	0	8.097.891	0	8.097.891
347	20103510	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 150 JAKARTA	SMP	51354138578	99.823.478	0	99.823.478	237.600	99.585.878	0	99.585.878
348	20103509	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 157 JAKARTA	SMP	51154137494	107.913.565	0	107.913.565	0	107.913.565	0	107.913.565
349	20103489	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 158 JAKARTA	SMP	50054139181	69.775.812	0	69.775.812	0	69.775.812	0	69.775.812
350	20103564	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 160 JAKARTA	SMP	51154137419	22.755.729	0	22.755.729	0	22.755.729	0	22.755.729
351	20103639	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 165 JAKARTA	SMP	50154137993	49.463.507	0	49.463.507	0	49.463.507	0	49.463.507
352	20103619	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 167 JAKARTA	SMP	50154137837	82.832.991	0	82.832.991	0	82.832.991	0	82.832.991
353	20103618	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 168 JAKARTA	SMP	50354137001	77.110.067	0	77.110.067	0	77.110.067	0	77.110.067
354	20103617	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 171 JAKARTA	SMP	51154137770	94.270.456	1.366.244	92.904.212	0	92.904.212	0	92.904.212
355	20103616	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 172 JAKARTA	SMP	50354137256	141.153.716	0	141.153.716	0	141.153.716	0	141.153.716
356	20103615	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 174 JAKARTA	SMP	51154137818	13.040.768	0	13.040.768	0	13.040.768	0	13.040.768
357	20103614	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 179 JAKARTA	SMP	51154139047	270.978.589	0	270.978.589	0	270.978.589	0	270.978.589
358	20109257	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 180 JAKARTA	SMP	51154137371	14.750.777	0	14.750.777	99.000	14.651.777	0	14.651.777
359	20103612	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 184 JAKARTA	SMP	51154139080	80.437.522	0	80.437.522	0	80.437.522	0	80.437.522
360	20103611	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 188 JAKARTA	SMP	51154137788	48.623.853	0	48.623.853	0	48.623.853	0	48.623.853
361	20103610	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 192 JAKARTA	SMP	51254137506	5.836.982	0	5.836.982	0	5.836.982	0	5.836.982
362	20103609	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 193 JAKARTA	SMP	12354137344	31.438.399	0	31.438.399	0	31.438.399	0	31.438.399
363	20103608	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 194 JAKARTA	SMP	51254137841	85.852.489	0	85.852.489	0	85.852.489	0	85.852.489
364	20103607	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 195 JAKARTA	SMP	50354137850	192.574.943	0	192.574.943	0	192.574.943	0	192.574.943
365	20103606	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 196 JAKARTA	SMP	51154137605	15.562.181	0	15.562.181	0	15.562.181	0	15.562.181
366	20103605	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 198 JAKARTA	SMP	50154137900	35.715.405	0	35.715.405	0	35.715.405	0	35.715.405
367	20103604	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 199 JAKARTA	SMP	50354138147	102.511.628	0	102.511.628	0	102.511.628	0	102.511.628
368	20103621	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 202 JAKARTA	SMP	51254137964	113.807.528	0	113.807.528	0	113.807.528	0	113.807.528
369	20103622	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 203 JAKARTA	SMP	51154139055	27.497.150	0	27.497.150	0	27.497.150	0	27.497.150
370	20103638	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 208 JAKARTA	SMP	51154137681	2.020.361	0	2.020.361	0	2.020.361	0	2.020.361
371	20103637	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 209 JAKARTA	SMP	51154138547	115.415.896	0	115.415.896	0	115.415.896	0	115.415.896
372	20103636	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 210 JAKARTA	SMP	51154137699	7.283.577	0	7.283.577	0	7.283.577	0	7.283.577
373	20103635	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 213 JAKARTA	SMP	50354137957	142.942.190	0	142.942.190	0	142.942.190	0	142.942.190
374	20103634	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 214 JAKARTA	SMP	51354138691	66.413.365	0	66.413.365	0	66.413.365	0	66.413.365
375	20103633	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 217 JAKARTA	SMP	51154138920	165.847.491	0	165.847.491	0	165.847.491	0	165.847.491
376	20103632	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 222 JAKARTA	SMP	51154137427	11.449.104	0	11.449.104	0	11.449.104	0	11.449.104
377	20103631	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 223 JAKARTA	SMP	51154139021	49.445.127	0	49.445.127	0	49.445.127	0	49.445.127
378	20103630	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 230 JAKARTA	SMP	51154137613	34.443.971	0	34.443.971	0	34.443.971	0	34.443.971
379	20103629	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 232 JAKARTA	SMP	50054139254	43.800.896	0	43.800.896	0	43.800.896	0	43.800.896
380	20103628	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 233 JAKARTA	SMP	51154137648	34.065.168	0	34.065.168	0	34.065.168	0	34.065.168

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
381	20103627	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 234 JAKARTA	SMP	12254137052	168.027.516	0	168.027.516	0	168.027.516	0	168.027.516
382	20103626	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 236 JAKARTA	SMP	50354137191	121.894.223	0	121.894.223	0	121.894.223	0	121.894.223
383	20103625	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 237 JAKARTA	SMP	51154137443	28.779.419	0	28.779.419	0	28.779.419	0	28.779.419
384	20103623	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 243 JAKARTA	SMP	50354138252	7.735.372	0	7.735.372	0	7.735.372	0	7.735.372
385	20103603	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 246 JAKARTA	SMP	51154137516	51.211.562	0	51.211.562	0	51.211.562	0	51.211.562
386	20103582	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 251 JAKARTA	SMP	51154138989	631.535	0	631.535	0	631.535	0	631.535
387	20103581	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 252 JAKARTA	SMP	51254138073	133.540.459	0	133.540.459	0	133.540.459	0	133.540.459
388	20103580	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 255 JAKARTA	SMP	50354137868	97.262.572	0	97.262.572	0	97.262.572	0	97.262.572
389	20103579	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 256 JAKARTA	SMP	50354137060	46.267.255	0	46.267.255	0	46.267.255	0	46.267.255
390	20103578	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 257 JAKARTA	SMP	51154137796	12.304.054	0	12.304.054	0	12.304.054	0	12.304.054
391	20103577	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 258 JAKARTA	SMP	51154137656	213.354.647	0	213.354.647	0	213.354.647	0	213.354.647
392	20103576	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 259 JAKARTA	SMP	51154137389	26.065.047	0	26.065.047	0	26.065.047	0	26.065.047
393	20103574	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 262 JAKARTA	SMP	12254137079	78.304.055	0	78.304.055	0	78.304.055	0	78.304.055
394	20103573	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 263 JAKARTA	SMP	51154138521	5.196.949	0	5.196.949	0	5.196.949	0	5.196.949
395	20103572	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 268 JAKARTA	SMP	51154138725	66.107.004	0	66.107.004	0	66.107.004	0	66.107.004
396	20103570	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 272 JAKARTA	SMP	51354137521	63.608.959	0	63.608.959	0	63.608.959	0	63.608.959
397	20103569	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 275 JAKARTA	SMP	51154138733	36.248.056	0	36.248.056	0	36.248.056	0	36.248.056
398	20103568	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 281 JAKARTA	SMP	51154138598	16.377.945	0	16.377.945	0	16.377.945	0	16.377.945
399	20107179	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 283 JAKARTA	SMP	51154137397	21.709.963	0	21.709.963	0	21.709.963	0	21.709.963
400	20107180	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 284 JAKARTA	SMP	50354137264	81.302.336	0	81.302.336	0	81.302.336	0	81.302.336
401	20107181	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 287 JAKARTA	SMP	51354138764	23.186.973	0	23.186.973	0	23.186.973	0	23.186.973
402	20106342	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 133 JAKARTA	SMP	30154131801	1.549.536	0	1.549.536	0	1.549.536	0	1.549.536
403	20106343	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 241 JAKARTA	SMP	20054131769	4.711.000	0	4.711.000	0	4.711.000	0	4.711.000
404	20106346	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 260 JAKARTA	SMP	20154131783	179.215	0	179.215	0	179.215	0	179.215
405	20106347	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 285 JAKARTA	SMP	20054131777	1.522.657	0	1.522.657	0	1.522.657	0	1.522.657
406	20106344	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 288 JAKARTA	SMP	20054131742	1.190.089	0	1.190.089	0	1.190.089	0	1.190.089
407	20107183	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 01 PULAU PARI JAKARTA	SMP	20154131759	90.300	0	90.300	0	90.300	0	90.300
408	20107711	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 02 PULAU SABIRA JAKARTA	SMP	20054131793	1.168.500	0	1.168.500	0	1.168.500	0	1.168.500
409	20104643	SEKOLAH DASAR NEGERI MERDEKA TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	10854105937	1.127.847	0	1.127.847	0	1.127.847	0	1.127.847
410	20104498	SEKOLAH DASAR NEGERI CIDENG 02 JAKARTA	SD	11054105785	6.425.049	0	6.425.049	0	6.425.049	0	6.425.049
411	20104499	SEKOLAH DASAR NEGERI CIDENG 04 JAKARTA	SD	11054105793	27.259.971	0	27.259.971	0	27.259.971	0	27.259.971
412	20104501	SEKOLAH DASAR NEGERI CIDENG 07 JAKARTA	SD	10154105808	64.102.148	0	64.102.148	0	64.102.148	0	64.102.148
413	20104503	SEKOLAH DASAR NEGERI CIDENG 09 JAKARTA	SD	11054105815	61.932.547	0	61.932.547	0	61.932.547	0	61.932.547
414	20104504	SEKOLAH DASAR NEGERI CIDENG 10 JAKARTA	SD	11054105823	35.427.474	0	35.427.474	0	35.427.474	0	35.427.474
415	20104506	SEKOLAH DASAR NEGERI CIDENG 13 JAKARTA	SD	11054105831	16.144.674	0	16.144.674	0	16.144.674	0	16.144.674
416	20104663	SEKOLAH DASAR NEGERI PETOJO UTARA 01 JAKARTA	SD	11154105996	14.236.414	0	14.236.414	0	14.236.414	0	14.236.414
417	20104664	SEKOLAH DASAR NEGERI PETOJO UTARA 03 JAKARTA	SD	11054106013	17.242.887	0	17.242.887	0	17.242.887	0	17.242.887
418	20104667	SEKOLAH DASAR NEGERI PETOJO UTARA 05 JAKARTA	SD	11054106021	77.588.125	0	77.588.125	0	77.588.125	0	77.588.125
419	20104668	SEKOLAH DASAR NEGERI PETOJO UTARA 09 JAKARTA	SD	11054106005	16.987.498	0	16.987.498	0	16.987.498	0	16.987.498
420	20104669	SEKOLAH DASAR NEGERI PETOJO UTARA 13 JAKARTA	SD	11154106038	3.658.887	0	3.658.887	914.760	2.744.127	0	2.744.127
421	20104659	SEKOLAH DASAR NEGERI PETOJO SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	11054105963	60.202.198	0	60.202.198	0	60.202.198	0	60.202.198
422	20104662	SEKOLAH DASAR NEGERI PETOJO SELATAN 06 JAKARTA	SD	11054105980	24.825.429	0	24.825.429	0	24.825.429	0	24.825.429
423	20104590	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KELAPA 02 PAGI JAKARTA	SD	11054105947	42.731.929	0	42.731.929	1.932.700	40.799.229	0	40.799.229
424	20104515	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI PULO 01 PAGI JAKARTA	SD	10154105841	14.760.398	0	14.760.398	0	14.760.398	0	14.760.398
425	20104516	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI PULO 02 PAGI JAKARTA	SD	11054105904	44.965.596	0	44.965.596	0	44.965.596	0	44.965.596
426	20104517	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI PULO 03 PAGI JAKARTA	SD	10154105859	20.121.134	0	20.121.134	0	20.121.134	0	20.121.134
427	20104518	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI PULO 04 PAGI JAKARTA	SD	10154105867	33.176.666	0	33.176.666	0	33.176.666	0	33.176.666
428	20104519	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI PULO 05 PAGI JAKARTA	SD	10154105875	14.709.706	116.046	14.593.660	0	14.593.660	0	14.593.660
429	20104521	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI PULO 07 JAKARTA	SD	11154105911	91.371.501	0	91.371.501	0	91.371.501	0	91.371.501
430	20104522	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI PULO 08 JAKARTA	SD	10154105883	18.436.445	0	18.436.445	0	18.436.445	0	18.436.445
431	20104524	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI PULO 10 JAKARTA	SD	10154105891	5.550.516	0	5.550.516	0	5.550.516	0	5.550.516
432	20104644	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR BARU 01 JAKARTA	SD	10454107503	20.868.921	0	20.868.921	0	20.868.921	0	20.868.921
433	20100476	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR BARU 03 JAKARTA	SD	10454107511	31.689.355	0	31.689.355	0	31.689.355	0	31.689.355
434	20100464	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR BARU 05 JAKARTA	SD	10454107520	37.360.986	0	37.360.986	0	37.360.986	0	37.360.986
435	20104645	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR BARU 07 JAKARTA	SD	10454107538	111.752.994	4.680.000	107.072.994	0	107.072.994	0	107.072.994

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
436	20104646	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR BARU 11 JAKARTA	SD	10454107546	45.906.038	0	45.906.038	0	45.906.038	0	45.906.038
437	20104577	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANG ANYAR 01 PAGI JAKARTA	SD	10454107341	21.156.980	0	21.156.980	0	21.156.980	0	21.156.980
438	20100513	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANG ANYAR 02 PETANG JAKARTA	SD	10454107392	38.053.324	0	38.053.324	0	38.053.324	0	38.053.324
439	20100514	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANG ANYAR 03 PAGI JAKARTA	SD	10454107350	28.383.444	0	28.383.444	0	28.383.444	0	28.383.444
440	20100515	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANG ANYAR 04 PETANG JAKARTA	SD	10454107368	14.586.360	0	14.586.360	0	14.586.360	0	14.586.360
441	20104579	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANG ANYAR 05 PAGI JAKARTA	SD	10454107376	16.471.357	0	16.471.357	0	16.471.357	0	16.471.357
442	20100516	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANG ANYAR 06 PETANG JAKARTA	SD	10454107384	6.472.725	0	6.472.725	0	6.472.725	0	6.472.725
443	20100517	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANG ANYAR 07 PAGI JAKARTA	SD	10454107406	4.521.556	0	4.521.556	0	4.521.556	0	4.521.556
444	20100532	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANG ANYAR 08 PAGI JAKARTA	SD	10454107414	23.610.532	0	23.610.532	0	23.610.532	0	23.610.532
445	20104584	SEKOLAH DASAR NEGERI KARTINI 01 PAGI JAKARTA	SD	10454107431	38.124.220	0	38.124.220	232.093	37.892.127	0	37.892.127
446	20104535	SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG SAHARI UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	10454107295	9.896.601	0	9.896.601	0	9.896.601	0	9.896.601
447	20104638	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGA DUA SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	10454107473	59.364.915	0	59.364.915	0	59.364.915	0	59.364.915
448	20104639	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGA DUA SELATAN 05 PAGI JAKARTA	SD	10454107465	22.034.249	0	22.034.249	50.000	21.984.249	0	21.984.249
449	20104614	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMAYORAN 01 PAGI JAKARTA	SD	10954106834	33.520.982	0	33.520.982	0	33.520.982	0	33.520.982
450	20104618	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMAYORAN 07 PAGI JAKARTA	SD	10954106761	3.566.818	0	3.566.818	0	3.566.818	0	3.566.818
451	20104620	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMAYORAN 09 PAGI JAKARTA	SD	12254106777	6.914.735	0	6.914.735	0	6.914.735	0	6.914.735
452	20104622	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMAYORAN 11 PAGI JAKARTA	SD	10154106782	22.062	0	22.062	0	22.062	0	22.062
453	20104624	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMAYORAN 13 PAGI JAKARTA	SD	12254106793	208.737	0	208.737	0	208.737	0	208.737
454	20104626	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMAYORAN 15 PAGI JAKARTA	SD	10154106812	22.540.332	0	22.540.332	0	22.540.332	0	22.540.332
455	20104591	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KOSONG 01 PAGI JAKARTA	SD	10154106669	14.699.398	0	14.699.398	0	14.699.398	0	14.699.398
456	20104592	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KOSONG 02 PAGI JAKARTA	SD	10154106677	2.518.138	0	2.518.138	0	2.518.138	0	2.518.138
457	20104593	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KOSONG 03 PAGI JAKARTA	SD	10154106685	24.267.097	0	24.267.097	0	24.267.097	0	24.267.097
458	20104595	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KOSONG 05 PAGI JAKARTA	SD	10154106693	6.075.954	0	6.075.954	0	6.075.954	0	6.075.954
459	20104596	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KOSONG 07 PAGI JAKARTA	SD	10154106758	3.574.257	0	3.574.257	0	3.574.257	0	3.574.257
460	20104597	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KOSONG 09 PAGI JAKARTA	SD	10154106707	21.424.330	0	21.424.330	0	21.424.330	0	21.424.330
461	20104600	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KOSONG 13 PAGI JAKARTA	SD	10154106715	22.219.771	0	22.219.771	0	22.219.771	0	22.219.771
462	20104602	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KOSONG 15 PAGI JAKARTA	SD	10154106723	10.552.423	0	10.552.423	0	10.552.423	0	10.552.423
463	20104603	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KOSONG 16 PAGI JAKARTA	SD	10154106731	1.829.308	0	1.829.308	0	1.829.308	0	1.829.308
464	20104604	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KOSONG 17 PAGI JAKARTA	SD	10154106740	66.341.876	0	66.341.876	0	66.341.876	0	66.341.876
465	20104536	SEKOLAH DASAR NEGERI HARAPAN MULIA 01 PAGI JAKARTA	SD	12254106611	3.085.250	0	3.085.250	0	3.085.250	0	3.085.250
466	20104538	SEKOLAH DASAR NEGERI HARAPAN MULIA 03 PAGI JAKARTA	SD	12254106645	15.774.368	0	15.774.368	0	15.774.368	0	15.774.368
467	20104675	SEKOLAH DASAR NEGERI SERDANG 01 PAGI JAKARTA	SD	10154106863	1.414.462	0	1.414.462	0	1.414.462	0	1.414.462
468	20104676	SEKOLAH DASAR NEGERI SERDANG 03 JAKARTA	SD	10154106871	20.217.438	0	20.217.438	0	20.217.438	0	20.217.438
469	20104679	SEKOLAH DASAR NEGERI SERDANG 05 PAGI JAKARTA	SD	10154106880	24.460.034	0	24.460.034	0	24.460.034	0	24.460.034
470	20104681	SEKOLAH DASAR NEGERI SERDANG 07 PAGI JAKARTA	SD	10154106898	45.085.473	0	45.085.473	0	45.085.473	0	45.085.473
471	20104683	SEKOLAH DASAR NEGERI SERDANG 11 JAKARTA	SD	10154106901	173.423	0	173.423	0	173.423	0	173.423
472	20104685	SEKOLAH DASAR NEGERI SERDANG 13 PAGI JAKARTA	SD	10154106910	46.589.121	0	46.589.121	0	46.589.121	0	46.589.121
473	20104533	SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG SAHARI SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	10154106545	17.144.755	0	17.144.755	0	17.144.755	0	17.144.755
474	20104482	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA BARU 01 PAGI JAKARTA	SD	10154106464	11.181.297	0	11.181.297	0	11.181.297	0	11.181.297
475	20104484	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA BARU 03 PAGI JAKARTA	SD	10154106456	3.840.677	0	3.840.677	0	3.840.677	0	3.840.677
476	20104485	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA BARU 05 PAGI JAKARTA	SD	12254106475	11.626.373	0	11.626.373	0	11.626.373	0	11.626.373
477	20104487	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA BARU 07 PAGI JAKARTA	SD	12254106483	16.684.145	0	16.684.145	0	16.684.145	0	16.684.145
478	20104488	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA BARU 09 PAGI JAKARTA	SD	10154106499	4.890.684	0	4.890.684	0	4.890.684	0	4.890.684
479	20104489	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA BARU 11 PAGI JAKARTA	SD	10154106502	9.407.115	0	9.407.115	0	9.407.115	0	9.407.115
480	20104490	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA BARU 12 PAGI JAKARTA	SD	10154106511	12.253.432	0	12.253.432	0	12.253.432	0	12.253.432
481	20104687	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMUR BATU 01 PAGI JAKARTA	SD	10154106936	15.982.736	0	15.982.736	0	15.982.736	0	15.982.736
482	20104688	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMUR BATU 03 PAGI JAKARTA	SD	10154106944	17.603.932	0	17.603.932	0	17.603.932	0	17.603.932
483	20104690	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMUR BATU 06 PAGI JAKARTA	SD	10154106961	5.951.098	0	5.951.098	0	5.951.098	0	5.951.098
484	20104692	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMUR BATU 08 PAGI JAKARTA	SD	10154106979	771.125	0	771.125	0	771.125	0	771.125
485	20104694	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMUR BATU 12 PAGI JAKARTA	SD	10154106987	8.357.780	0	8.357.780	0	8.357.780	0	8.357.780
486	20104695	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMUR BATU 14 PAGI JAKARTA	SD	10154106995	33.765.106	0	33.765.106	0	33.765.106	0	33.765.106
487	20104707	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN PANJANG 01 PAGI JAKARTA	SD	10154107037	7.733.201	0	7.733.201	0	7.733.201	0	7.733.201
488	20104709	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN PANJANG 03 PAGI JAKARTA	SD	10154107045	36.225.331	0	36.225.331	0	36.225.331	0	36.225.331
489	20104674	SEKOLAH DASAR NEGERI SENEN 03 PAGI JAKARTA	SD	10954107890	7.921.301	0	7.921.301	0	7.921.301	0	7.921.301
490	20104629	SEKOLAH DASAR NEGERI KENARI 01 PAGI JAKARTA	SD	10954107598	52.717.744	0	52.717.744	0	52.717.744	0	52.717.744

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
491	20100539	SEKOLAH DASAR NEGERI KENARI 07 PAGI JAKARTA	SD	50054107603	23.684.668	0	23.684.668	0	23.684.668	0	23.684.668
492	20104631	SEKOLAH DASAR NEGERI KENARI 08 PAGI JAKARTA	SD	50054107611	22.468.470	0	22.468.470	0	22.468.470	0	22.468.470
493	20104648	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEBAN 01 PAGI JAKARTA	SD	50054107794	10.066.820	0	10.066.820	0	10.066.820	0	10.066.820
494	20100459	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEBAN 03 PAGI JAKARTA	SD	50054107808	4.158.058	0	4.158.058	0	4.158.058	0	4.158.058
495	20100460	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEBAN 05 PAGI JAKARTA	SD	50054107816	5.154.118	0	5.154.118	0	5.154.118	0	5.154.118
496	20104649	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEBAN 07 PAGI JAKARTA	SD	50054107824	2.255.914	0	2.255.914	42.966	2.212.948	0	2.212.948
497	20100477	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEBAN 09 PAGI JAKARTA	SD	50054107832	410.690	0	410.690	0	410.690	0	410.690
498	20104651	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEBAN 11 PAGI JAKARTA	SD	50054107841	10.620.599	0	10.620.599	0	10.620.599	0	10.620.599
499	20104652	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEBAN 15 PAGI JAKARTA	SD	50054107859	653.776	0	653.776	0	653.776	0	653.776
500	20100496	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEBAN 18 PAGI JAKARTA	SD	50054107867	9.405.983	0	9.405.983	0	9.405.983	0	9.405.983
501	20100545	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMAT 01 JAKARTA	SD	10954107652	155.110	0	155.110	0	155.110	0	155.110
502	20104632	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMAT 03 PAGI JAKARTA	SD	50054107662	22.115.715	0	22.115.715	0	22.115.715	0	22.115.715
503	20100467	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMAT 06 PAGI JAKARTA	SD	10954107687	4.521.622	0	4.521.622	0	4.521.622	0	4.521.622
504	20100469	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMAT 08 PAGI JAKARTA	SD	10954107709	6.831.851	0	6.831.851	0	6.831.851	0	6.831.851
505	20104636	SEKOLAH DASAR NEGERI KWITANG 01 PAGI JAKARTA	SD	10954107768	18.955.214	0	18.955.214	0	18.955.214	0	18.955.214
506	20100370	SEKOLAH DASAR NEGERI BUNGUR 01 JAKARTA	SD	10954107563	14.065.726	0	14.065.726	0	14.065.726	0	14.065.726
507	20100372	SEKOLAH DASAR NEGERI BUNGUR 03 JAKARTA	SD	12254107579	31.280.415	0	31.280.415	0	31.280.415	0	31.280.415
508	20100528	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	12254105673	11.036.606	0	11.036.606	0	11.036.606	0	11.036.606
509	20100530	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH TIMUR 03 PAGI JAKARTA	SD	12254105681	2.248.900	0	2.248.900	0	2.248.900	0	2.248.900
510	20100374	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH BARAT 01 PAGI JAKARTA	SD	12254105614	5.278.287	0	5.278.287	0	5.278.287	0	5.278.287
511	20100375	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH BARAT 03 PAGI JAKARTA	SD	12254105576	5.475.205	0	5.475.205	0	5.475.205	0	5.475.205
512	20100377	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH BARAT 05 PAGI JAKARTA	SD	12254105631	11.570.434	0	11.570.434	0	11.570.434	0	11.570.434
513	20100378	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH BARAT 07 PAGI JAKARTA	SD	12254105584	3.615.480	0	3.615.480	0	3.615.480	0	3.615.480
514	20100521	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH BARAT 15 PAGI JAKARTA	SD	12254105592	10.127.432	0	10.127.432	0	10.127.432	0	10.127.432
515	20100522	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH BARAT 17 PAGI JAKARTA	SD	12254105622	19.604.732	0	19.604.732	0	19.604.732	0	19.604.732
516	20100523	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH BARAT 19 PAGI JAKARTA	SD	12254105606	7.767.627	0	7.767.627	0	7.767.627	0	7.767.627
517	20104670	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWASARI 01 PAGI JAKARTA	SD	12254105738	3.485.260	0	3.485.260	0	3.485.260	0	3.485.260
518	20104671	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWASARI 02 PAGI JAKARTA	SD	12254105746	297.110	0	297.110	0	297.110	0	297.110
519	20100480	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWASARI 03 PAGI JAKARTA	SD	12254105754	10.675.635	0	10.675.635	0	10.675.635	0	10.675.635
520	20104672	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWASARI 05 PAGI JAKARTA	SD	12254105762	16.857.931	0	16.857.931	0	16.857.931	0	16.857.931
521	20104640	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG 01 JAKARTA	SD	50054107174	61.900.119	0	61.900.119	0	61.900.119	0	61.900.119
522	20104641	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG 02 JAKARTA	SD	50054107182	18.042.800	0	18.042.800	0	18.042.800	0	18.042.800
523	20104642	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG 03 JAKARTA	SD	50054107166	112.815.572	0	112.815.572	0	112.815.572	0	112.815.572
524	20104653	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGANGSAAN 01 PAGI JAKARTA	SD	11154107221	142.246.871	0	142.246.871	1.383.153	140.863.718	0	140.863.718
525	20104508	SEKOLAH DASAR NEGERI CIKINI 01 JAKARTA	SD	50054107085	13.830.580	0	13.830.580	0	13.830.580	0	13.830.580
526	20104509	SEKOLAH DASAR NEGERI CIKINI 02 JAKARTA	SD	50054107093	46.798.359	0	46.798.359	0	46.798.359	0	46.798.359
527	20104529	SEKOLAH DASAR NEGERI GONDANGDIA 01 JAKARTA	SD	10854107140	13.072.034	0	13.072.034	0	13.072.034	0	13.072.034
528	20104530	SEKOLAH DASAR NEGERI GONDANGDIA 03 JAKARTA	SD	11154107123	37.452.947	0	37.452.947	0	37.452.947	0	37.452.947
529	20104532	SEKOLAH DASAR NEGERI GONDANGDIA 05 JAKARTA	SD	10854107131	13.282.709	0	13.282.709	1.115.057	12.167.652	0	12.167.652
530	20104612	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON SIRIH 04 JAKARTA	SD	10854107158	28.096.782	0	28.096.782	0	28.096.782	0	28.096.782
531	20100390	SEKOLAH DASAR NEGERI BENDUNGAN HILIR 01 PAGI JAKARTA	SD	11354107910	76.521.873	0	76.521.873	0	76.521.873	0	76.521.873
532	20100392	SEKOLAH DASAR NEGERI BENDUNGAN HILIR 05 PAGI JAKARTA	SD	11354107928	44.676.401	0	44.676.401	40.700	44.635.701	0	44.635.701
533	20100379	SEKOLAH DASAR NEGERI BENDUNGAN HILIR 09 PAGI JAKARTA	SD	11354107936	3.836.754	0	3.836.754	0	3.836.754	0	3.836.754
534	20104481	SEKOLAH DASAR NEGERI BENDUNGAN HILIR 12 PAGI JAKARTA	SD	11354107944	3.399.705	0	3.399.705	772.869	2.626.836	0	2.626.836
535	20104582	SEKOLAH DASAR NEGERI KARET TENGSIN 13 JAKARTA	SD	11354108011	14.147.632	0	14.147.632	568.150	13.579.482	0	13.579.482
536	20100550	SEKOLAH DASAR NEGERI KARET TENGSIN 15 JAKARTA	SD	11354108029	7.016.204	0	7.016.204	0	7.016.204	0	7.016.204
537	20100552	SEKOLAH DASAR NEGERI KARET TENGSIN 21 JAKARTA	SD	11354108002	8.762.759	0	8.762.759	0	8.762.759	0	8.762.759
538	20104655	SEKOLAH DASAR NEGERI PETAMBURAN 01 JAKARTA	SD	11854108097	2.352.761	0	2.352.761	0	2.352.761	0	2.352.761
539	20100501	SEKOLAH DASAR NEGERI PETAMBURAN 03 JAKARTA	SD	11854108101	36.956.179	0	36.956.179	0	36.956.179	0	36.956.179
540	20104657	SEKOLAH DASAR NEGERI PETAMBURAN 05 JAKARTA	SD	11854108119	137.818.785	0	137.818.785	0	137.818.785	0	137.818.785
541	20104658	SEKOLAH DASAR NEGERI PETAMBURAN 07 JAKARTA	SD	11354108126	26.682.605	0	26.682.605	0	26.682.605	0	26.682.605
542	20104607	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON MELATI 01 JAKARTA	SD	11354108061	34.039.996	0	34.039.996	0	34.039.996	0	34.039.996
543	20104586	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KACANG 01 JAKARTA	SD	11854108046	80.348.692	0	80.348.692	0	80.348.692	0	80.348.692
544	20104588	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KACANG 05 JAKARTA	SD	11354108053	12.604.226	0	12.604.226	0	12.604.226	0	12.604.226
545	20104571	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMPUNG BALI 01 PAGI JAKARTA	SD	11154107964	4.682.917	0	4.682.917	0	4.682.917	0	4.682.917

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
546	20104573	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMPUNG BALI 03 PAGI JAKARTA	SD	11354107979	31.156.039	0	31.156.039	0	31.156.039	0	31.156.039
547	20104574	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMPUNG BALI 07 PAGI JAKARTA	SD	11854107988	13.678.775	0	13.678.775	0	13.678.775	0	13.678.775
548	20104540	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 01 PAGI JAKARTA	SD	12254106114	2.571.885	0	2.571.885	0	2.571.885	0	2.571.885
549	20104541	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 03 PAGI JAKARTA	SD	12254106122	23.256.966	0	23.256.966	0	23.256.966	0	23.256.966
550	20104542	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 04 JAKARTA	SD	12254106131	498.954	0	498.954	0	498.954	0	498.954
551	20104544	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 07 PAGI JAKARTA	SD	12254106157	19.097.387	0	19.097.387	0	19.097.387	0	19.097.387
552	20104545	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 09 PAGI JAKARTA	SD	12254106165	1.776.200	0	1.776.200	0	1.776.200	0	1.776.200
553	20104546	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 10 PAGI JAKARTA	SD	12254106173	6.937.226	0	6.937.226	0	6.937.226	0	6.937.226
554	20104548	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 13 PAGI JAKARTA	SD	12254106181	12.370.038	0	12.370.038	0	12.370.038	0	12.370.038
555	20104550	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 15 PAGI JAKARTA	SD	12254106203	545.160	0	545.160	0	545.160	0	545.160
556	20104552	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 17 PAGI JAKARTA	SD	12254106220	22.037.711	0	22.037.711	0	22.037.711	0	22.037.711
557	20104554	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 19 PAGI JAKARTA	SD	12254106246	8.786.820	0	8.786.820	0	8.786.820	0	8.786.820
558	20104559	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 29 PAGI JAKARTA	SD	12254106289	26.022.446	0	26.022.446	0	26.022.446	0	26.022.446
559	20104576	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMPUNG RAWA 02 PETANG JAKARTA	SD	12254106327	5.463.262	0	5.463.262	0	5.463.262	0	5.463.262
560	20104525	SEKOLAH DASAR NEGERI GALUR 01 JAKARTA	SD	12254106092	4.256.802	0	4.256.802	0	4.256.802	0	4.256.802
561	20104527	SEKOLAH DASAR NEGERI GALUR 03 JAKARTA	SD	12254106084	19.393.537	0	19.393.537	0	19.393.537	0	19.393.537
562	20104697	SEKOLAH DASAR NEGERI TANAH TINGGI 01 PAGI JAKARTA	SD	12254106424	8.932.237	0	8.932.237	0	8.932.237	0	8.932.237
563	20104699	SEKOLAH DASAR NEGERI TANAH TINGGI 03 PAGI JAKARTA	SD	12254106351	420.323	0	420.323	0	420.323	0	420.323
564	20104701	SEKOLAH DASAR NEGERI TANAH TINGGI 05 PAGI JAKARTA	SD	12254106378	5.041.473	0	5.041.473	0	5.041.473	0	5.041.473
565	20104704	SEKOLAH DASAR NEGERI TANAH TINGGI 09 PAGI JAKARTA	SD	12254106394	17.627.619	0	17.627.619	0	17.627.619	0	17.627.619
566	20104706	SEKOLAH DASAR NEGERI TANAH TINGGI 11 PAGI JAKARTA	SD	12254106416	4.807.820	0	4.807.820	0	4.807.820	0	4.807.820
567	20100652	SEKOLAH DASAR NEGERI PENJARINGAN 01 JAKARTA	SD	30254120581	67.408.758	0	67.408.758	0	67.408.758	0	67.408.758
568	20100651	SEKOLAH DASAR NEGERI PENJARINGAN 03 JAKARTA	SD	30254120590	80.747.274	0	80.747.274	0	80.747.274	0	80.747.274
569	20100636	SEKOLAH DASAR NEGERI PENJARINGAN 06 JAKARTA	SD	30254120611	33.118.836	0	33.118.836	0	33.118.836	0	33.118.836
570	20100638	SEKOLAH DASAR NEGERI PENJARINGAN 08 JAKARTA	SD	30254120620	22.779.167	0	22.779.167	0	22.779.167	0	22.779.167
571	20100639	SEKOLAH DASAR NEGERI PENJARINGAN 10 JAKARTA	SD	30254120603	26.361.716	0	26.361.716	0	26.361.716	0	26.361.716
572	20104849	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL MUARA 01 JAKARTA	SD	30154120419	46.298.715	0	46.298.715	0	46.298.715	0	46.298.715
573	20104850	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK MUARA 03 JAKARTA	SD	30254120433	19.936.967	0	19.936.967	0	19.936.967	0	19.936.967
574	20104891	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJAGALAN 01 JAKARTA	SD	30254120468	21.968.070	0	21.968.070	0	21.968.070	0	21.968.070
575	20100659	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJAGALAN 03 JAKARTA	SD	30254120476	9.507.820	0	9.507.820	0	9.507.820	0	9.507.820
576	20104892	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJAGALAN 05 JAKARTA	SD	30254120484	6.736.564	0	6.736.564	0	6.736.564	0	6.736.564
577	20100664	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJAGALAN 09 JAKARTA	SD	30254120492	17.950.920	0	17.950.920	0	17.950.920	0	17.950.920
578	20104895	SEKOLAH DASAR NEGERI PLUIT 01 JAKARTA	SD	30254120719	33.565.841	0	33.565.841	0	33.565.841	0	33.565.841
579	20104896	SEKOLAH DASAR NEGERI PLUIT 03 JAKARTA	SD	30154120729	32.604.458	0	32.604.458	0	32.604.458	0	32.604.458
580	20104946	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG PRIOK 01 JAKARTA	SD	20054121321	36.571.619	0	36.571.619	0	36.571.619	0	36.571.619
581	20104947	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG PRIOK 02 JAKARTA	SD	20154121338	26.698.538	0	26.698.538	0	26.698.538	0	26.698.538
582	20104949	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG PRIOK 04 JAKARTA	SD	20154121311	7.764.247	0	7.764.247	0	7.764.247	0	7.764.247
583	20104937	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER JAYA 01 PAGI JAKARTA	SD	20154121231	27.060.687	0	27.060.687	0	27.060.687	0	27.060.687
584	20100579	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER JAYA 03 JAKARTA	SD	20154121206	67.295.315	0	67.295.315	0	67.295.315	0	67.295.315
585	20104940	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER JAYA 05 JAKARTA	SD	20154121214	6.852.930	0	6.852.930	0	6.852.930	0	6.852.930
586	20104942	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER JAYA 07 JAKARTA	SD	20154121249	20.509.033	0	20.509.033	0	20.509.033	0	20.509.033
587	20104944	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER JAYA 09 JAKARTA	SD	20154121222	24.742.573	0	24.742.573	0	24.742.573	0	24.742.573
588	20104877	SEKOLAH DASAR NEGERI PAPANGGO 01 JAKARTA	SD	20154120897	38.201.031	0	38.201.031	0	38.201.031	0	38.201.031
589	20104879	SEKOLAH DASAR NEGERI PAPANGGO 03 PAGI JAKARTA	SD	20154120757	26.318.578	0	26.318.578	0	26.318.578	0	26.318.578
590	20104919	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNGAI BAMBU 01 JAKARTA	SD	20154120951	15.298.668	0	15.298.668	0	15.298.668	0	15.298.668
591	20104921	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNGAI BAMBU 03 PAGI JAKARTA	SD	20154120960	12.100.784	0	12.100.784	0	12.100.784	0	12.100.784
592	20104923	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNGAI BAMBU 05 JAKARTA	SD	20154120978	50.046.936	0	50.046.936	0	50.046.936	0	50.046.936
593	20104852	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BAWANG 01 PAGI JAKARTA	SD	20054120775	40.285.209	0	40.285.209	0	40.285.209	0	40.285.209
594	20104854	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BAWANG 03 JAKARTA	SD	20054120791	14.451.084	0	14.451.084	0	14.451.084	0	14.451.084
595	20104856	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BAWANG 05 JAKARTA	SD	20154120803	25.071.184	0	25.071.184	165.000	24.906.184	0	24.906.184
596	20104858	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BAWANG 07 PAGI JAKARTA	SD	20154120781	1.934.095	0	1.934.095	1.392.558	541.537	0	541.537
597	20104860	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BAWANG 09 JAKARTA	SD	20154120820	16.927.861	0	16.927.861	0	16.927.861	0	16.927.861
598	20104925	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 01 JAKARTA	SD	20154121079	18.233.468	0	18.233.468	232.094	18.001.374	0	18.001.374
599	20104927	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 03 JAKARTA	SD	20154121052	8.404.321	0	8.404.321	0	8.404.321	0	8.404.321
600	20104929	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 05 PAGI JAKARTA	SD	20154121087	1.518.508	0	1.518.508	0	1.518.508	0	1.518.508

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
601	20104930	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 07 JAKARTA	SD	20154121095	27.858.835	0	27.858.835	0	27.858.835	0	27.858.835
602	20104932	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 09 JAKARTA	SD	20154121061	4.013.048	0	4.013.048	0	4.013.048	0	4.013.048
603	20104934	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 11 JAKARTA	SD	20154121109	136.409.090	0	136.409.090	0	136.409.090	0	136.409.090
604	20104935	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 12 PAGI JAKARTA	SD	20154121117	28.745.947	0	28.745.947	0	28.745.947	0	28.745.947
605	20104936	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 13 PAGI JAKARTA	SD	20154121125	1.336.775	0	1.336.775	0	1.336.775	0	1.336.775
606	20104965	SEKOLAH DASAR NEGERI WARAKAS 01 JAKARTA	SD	20154121419	50.966.549	0	50.966.549	843.300	50.123.249	0	50.123.249
607	20104967	SEKOLAH DASAR NEGERI WARAKAS 03 JAKARTA	SD	20154121427	33.913.775	0	33.913.775	0	33.913.775	0	33.913.775
608	20104969	SEKOLAH DASAR NEGERI WARAKAS 05 JAKARTA	SD	20154121435	1.909.854	0	1.909.854	0	1.909.854	0	1.909.854
609	20104971	SEKOLAH DASAR NEGERI WARAKAS 07 JAKARTA	SD	20154121401	28.459.179	0	28.459.179	0	28.459.179	0	28.459.179
610	20104952	SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	20054120082	95.323.489	0	95.323.489	0	95.323.489	0	95.323.489
611	20104954	SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU UTARA 03 JAKARTA	SD	20054120058	9.606.421	0	9.606.421	0	9.606.421	912.420	10.518.841
612	20104956	SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU UTARA 05 JAKARTA	SD	20054120066	91.795	0	91.795	0	91.795	0	91.795
613	20104958	SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU UTARA 07 PAGI JAKARTA	SD	20054120091	138.296.925	0	138.296.925	0	138.296.925	0	138.296.925
614	20100575	SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU UTARA 09 JAKARTA	SD	20054120104	16.472.001	0	16.472.001	0	16.472.001	0	16.472.001
615	20100577	SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU UTARA 11 JAKARTA	SD	20054120074	2.640.189	0	2.640.189	0	2.640.189	0	2.640.189
616	20100598	SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU UTARA 13 PAGI JAKARTA	SD	20054120112	7.174.873	0	7.174.873	0	7.174.873	0	7.174.873
617	20100618	SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU UTARA 14 PAGI JAKARTA	SD	20054120121	7.595	0	7.595	0	7.595	0	7.595
618	20100619	SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU UTARA 15 PAGI JAKARTA	SD	20054120139	2.258.380	0	2.258.380	0	2.258.380	0	2.258.380
619	20104963	SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU UTARA 17 PAGI JAKARTA	SD	20054120147	829.718	0	829.718	0	829.718	0	829.718
620	20100622	SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU UTARA 19 PAGI JAKARTA	SD	20054120155	47.574.374	0	47.574.374	0	47.574.374	0	47.574.374
621	20100624	SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU UTARA 21 PAGI JAKARTA	SD	20154120161	11.121.729	0	11.121.729	893.574	10.228.155	0	10.228.155
622	20100625	SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU UTARA 22 PAGI JAKARTA	SD	20054120171	22.175.231	0	22.175.231	0	22.175.231	0	22.175.231
623	20104869	SEKOLAH DASAR NEGERI LAGOA 01 PAGI JAKARTA	SD	20054119670	7.945.502	0	7.945.502	0	7.945.502	0	7.945.502
624	20101054	SEKOLAH DASAR NEGERI LAGOA 02 PAGI JAKARTA	SD	20154119686	5.325.759	0	5.325.759	798.138	4.527.621	0	4.527.621
625	20101057	SEKOLAH DASAR NEGERI LAGOA 05 PAGI JAKARTA	SD	20154119694	8.155.103	0	8.155.103	0	8.155.103	0	8.155.103
626	20101059	SEKOLAH DASAR NEGERI LAGOA 07 PAGI JAKARTA	SD	20054119700	518.459	0	518.459	0	518.459	0	518.459
627	20101061	SEKOLAH DASAR NEGERI LAGOA 09 PAGI JAKARTA	SD	20054119661	43.955.321	0	43.955.321	0	43.955.321	0	43.955.321
628	20101062	SEKOLAH DASAR NEGERI LAGOA 11 JAKARTA	SD	20054119718	3.018.590	0	3.018.590	0	3.018.590	0	3.018.590
629	20100693	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	20054120007	7.925.350	0	7.925.350	0	7.925.350	0	7.925.350
630	20100695	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 03 PETANG JAKARTA	SD	20054119904	43.552.761	0	43.552.761	0	43.552.761	0	43.552.761
631	20100697	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 05 PAGI JAKARTA	SD	20054119912	38.869.066	0	38.869.066	0	38.869.066	0	38.869.066
632	20100699	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 07 PAGI JAKARTA	SD	20054119882	2.863.934	0	2.863.934	0	2.863.934	0	2.863.934
633	20100702	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 11 PAGI JAKARTA	SD	20054119891	1.845.923	0	1.845.923	0	1.845.923	0	1.845.923
634	20100689	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 15 PAGI JAKARTA	SD	20054119947	4.402.085	0	4.402.085	0	4.402.085	0	4.402.085
635	20100671	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 19 PAGI JAKARTA	SD	20154119953	21.530.105	0	21.530.105	0	21.530.105	0	21.530.105
636	20100673	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 21 JAKARTA	SD	20154119961	2.256.175	0	2.256.175	0	2.256.175	0	2.256.175
637	20104906	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 23 PAGI JAKARTA	SD	20154119970	209.506	0	209.506	0	209.506	0	209.506
638	20100568	SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	20054120015	104.850	0	104.850	0	104.850	0	104.850
639	20100565	SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU SELATAN 03 PAGI JAKARTA	SD	20154120021	7.748.871	0	7.748.871	0	7.748.871	0	7.748.871
640	20100645	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	20154119830	9.018.024	0	9.018.024	0	9.018.024	0	9.018.024
641	20100647	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK SELATAN 03 PAGI JAKARTA	SD	20054119793	67.592.263	0	67.592.263	0	67.592.263	0	67.592.263
642	20100648	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK SELATAN 05 JAKARTA	SD	20054119807	720.648	0	720.648	0	720.648	0	720.648
643	20100669	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK SELATAN 07 JAKARTA	SD	20154119848	4.743.377	0	4.743.377	348.138	4.395.239	0	4.395.239
644	20100690	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK SELATAN 09 PAGI JAKARTA	SD	20154119813	42.138.434	0	42.138.434	0	42.138.434	0	42.138.434
645	20100691	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK SELATAN 11 JAKARTA	SD	20054119823	33.945.159	0	33.945.159	464.184	33.480.975	0	33.480.975
646	20104844	SEKOLAH DASAR NEGERI CILINCING 01 PAGI JAKARTA	SD	20054118550	3.969.297	0	3.969.297	0	3.969.297	0	3.969.297
647	20104845	SEKOLAH DASAR NEGERI CILINCING 02 PAGI JAKARTA	SD	20154118566	2.016.524	0	2.016.524	0	2.016.524	0	2.016.524
648	20101026	SEKOLAH DASAR NEGERI CILINCING 03 PAGI JAKARTA	SD	20054118576	723.761	0	723.761	0	723.761	0	723.761
649	20101028	SEKOLAH DASAR NEGERI CILINCING 05 PAGI JAKARTA	SD	20154118621	10.831.897	0	10.831.897	0	10.831.897	0	10.831.897
650	20104846	SEKOLAH DASAR NEGERI CILINCING 07 PAGI JAKARTA	SD	20054118592	6.105	0	6.105	0	6.105	0	6.105
651	20104847	SEKOLAH DASAR NEGERI CILINCING 08 PAGI JAKARTA	SD	20054118631	472.500	0	472.500	0	472.500	0	472.500
652	20101010	SEKOLAH DASAR NEGERI CILINCING 09 JAKARTA	SD	20054118606	109.905	0	109.905	0	109.905	0	109.905
653	20100593	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAPURA 01 PAGI JAKARTA	SD	20154119317	5.905.474	0	5.905.474	0	5.905.474	0	5.905.474
654	20104916	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAPURA 02 JAKARTA	SD	20154119325	10.908.235	0	10.908.235	0	10.908.235	0	10.908.235
655	20100596	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAPURA 04 PAGI JAKARTA	SD	20054119301	4.289.182	0	4.289.182	0	4.289.182	0	4.289.182

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
656	20104917	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAPURA 05 PAGI JAKARTA	SD	20054119335	19.935.432	0	19.935.432	0	19.935.432	0	19.935.432
657	20104871	SEKOLAH DASAR NEGERI MARUNDA 01 PAGI JAKARTA	SD	20054118819	1.622.652	0	1.622.652	1.069.378	553.274	0	553.274
658	20104872	SEKOLAH DASAR NEGERI MARUNDA 02 PAGI JAKARTA	SD	20054118827	3.192.260	0	3.192.260	0	3.192.260	0	3.192.260
659	20104873	SEKOLAH DASAR NEGERI MARUNDA 03 PAGI JAKARTA	SD	20054118801	3.914.699	0	3.914.699	0	3.914.699	0	3.914.699
660	20104848	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 01 PAGI JAKARTA	SD	20054118703	11.670.140	0	11.670.140	0	11.670.140	0	11.670.140
661	20100997	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 03 JAKARTA	SD	20054118711	14.060.991	0	14.060.991	0	14.060.991	0	14.060.991
662	20101001	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 05 PAGI JAKARTA	SD	20154118728	149.301	0	149.301	0	149.301	0	149.301
663	20101003	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 07 PAGI JAKARTA	SD	20054118690	20.316.471	0	20.316.471	0	20.316.471	0	20.316.471
664	20101005	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 09 JAKARTA	SD	20054118738	5.422.419	0	5.422.419	508.585	4.913.834	0	4.913.834
665	20104912	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	20054119211	749.630	0	749.630	0	749.630	0	749.630
666	20104914	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER TIMUR 03 JAKARTA	SD	20154119180	16.250.676	0	16.250.676	0	16.250.676	0	16.250.676
667	20100591	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER TIMUR 05 JAKARTA	SD	20054119190	295.087	0	295.087	0	295.087	0	295.087
668	20104915	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER TIMUR 07 JAKARTA	SD	20054119203	116.288	0	116.288	0	116.288	0	116.288
669	20100677	SEKOLAH DASAR NEGERI ROROTAN 01 PAGI JAKARTA	SD	20054118894	23.042.030	0	23.042.030	0	23.042.030	0	23.042.030
670	20100679	SEKOLAH DASAR NEGERI ROROTAN 02 PAGI JAKARTA	SD	20054118908	2.483.806	0	2.483.806	0	2.483.806	0	2.483.806
671	20104907	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 03 PAGI JAKARTA	SD	20054118916	36.342.651	0	36.342.651	0	36.342.651	0	36.342.651
672	20109047	SEKOLAH DASAR NEGERI ROROTAN 07 PAGI JAKARTA	SD	20054118932	71.023.760	0	71.023.760	0	71.023.760	0	71.023.760
673	20100682	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 01 PAGI JAKARTA	SD	20154118973	4.789.825	0	4.789.825	0	4.789.825	0	4.789.825
674	20100684	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 03 PAGI JAKARTA	SD	20154118990	68.804	0	68.804	0	68.804	0	68.804
675	20100686	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 05 JAKARTA	SD	20054119009	33.189.337	0	33.189.337	0	33.189.337	0	33.189.337
676	20100633	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 07 JAKARTA	SD	20054118967	21.411.250	0	21.411.250	0	21.411.250	0	21.411.250
677	20100582	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 09 PAGI JAKARTA	SD	20054119025	11.672.830	0	11.672.830	0	11.672.830	0	11.672.830
678	20100584	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 11 PAGI JAKARTA	SD	20154119031	730.212	0	730.212	0	730.212	0	730.212
679	20100586	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 13 JAKARTA	SD	20154119040	2.268.102	0	2.268.102	0	2.268.102	0	2.268.102
680	20104911	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 15 PAGI JAKARTA	SD	20154119058	4.654.367	0	4.654.367	0	4.654.367	0	4.654.367
681	20101044	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	20154120340	22.576.934	0	22.576.934	0	22.576.934	0	22.576.934
682	20101064	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN TIMUR 03 PAGI JAKARTA	SD	20154120358	72.289.227	0	72.289.227	0	72.289.227	0	72.289.227
683	20100653	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN TIMUR 05 PAGI JAKARTA	SD	20154120366	42.153.591	0	42.153.591	0	42.153.591	0	42.153.591
684	20100654	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN TIMUR 06 PAGI JAKARTA	SD	20154120374	18.278.760	0	18.278.760	0	18.278.760	0	18.278.760
685	20101031	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 01 JAKARTA	SD	20154120242	43.530.429	0	43.530.429	0	43.530.429	0	43.530.429
686	20101033	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 03 PAGI JAKARTA	SD	20154120251	31.705.226	0	31.705.226	0	31.705.226	0	31.705.226
687	20101035	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 05 PAGI JAKARTA	SD	20154120269	19.194.193	0	19.194.193	386.780	18.807.413	0	18.807.413
688	20101036	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 07 JAKARTA	SD	20154120277	9.163.162	0	9.163.162	0	9.163.162	0	9.163.162
689	20104874	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 09 PAGI JAKARTA	SD	20154120285	12.582.257	0	12.582.257	0	12.582.257	0	12.582.257
690	20104875	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 11 JAKARTA	SD	20154120293	28.537.532	0	28.537.532	0	28.537.532	0	28.537.532
691	20104841	SEKOLAH DASAR NEGERI ANCOL 01 PAGI JAKARTA	SD	20154120226	5.065.844	0	5.065.844	0	5.065.844	0	5.065.844
692	20104842	SEKOLAH DASAR NEGERI ANCOL 03 JAKARTA	SD	20154120234	35.951.445	0	35.951.445	0	35.951.445	0	35.951.445
693	20104863	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA GADING TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	20054119424	6.935.428	0	6.935.428	0	6.935.428	0	6.935.428
694	20104865	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA GADING TIMUR 03 PAGI JAKARTA	SD	20054119432	8.940.119	0	8.940.119	0	8.940.119	0	8.940.119
695	20104880	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGANGSAAN DUA 01 PAGI JAKARTA	SD	20054119505	72.173	0	72.173	0	72.173	0	72.173
696	20104882	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGANGSAAN DUA 03 JAKARTA	SD	20054119513	20.022.610	0	20.022.610	0	20.022.610	0	20.022.610
697	20104884	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGANGSAAN DUA 05 PAGI JAKARTA	SD	20054119521	3.975.144	0	3.975.144	0	3.975.144	0	3.975.144
698	20104885	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGANGSAAN DUA 06 PAGI JAKARTA	SD	20054119530	37.161.526	0	37.161.526	1.836.468	35.325.058	4.077.600	39.402.658
699	20104886	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGANGSAAN DUA 07 PAGI JAKARTA	SD	20054119491	7.131.933	0	7.131.933	0	7.131.933	0	7.131.933
700	20104861	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA GADING BARAT 01 PAGI JAKARTA	SD	20054119386	26.853.398	0	26.853.398	0	26.853.398	0	26.853.398
701	20105145	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 01 PAGI JAKARTA	SD	30054100207	2.202.212	0	2.202.212	0	2.202.212	0	2.202.212
702	20102023	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 03 PAGI JAKARTA	SD	30054100223	10.519.651	0	10.519.651	0	10.519.651	0	10.519.651
703	20102022	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 04 PETANG JAKARTA	SD	30054100231	637.847	0	637.847	0	637.847	0	637.847
704	20105149	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 05 PAGI JAKARTA	SD	30054100240	15.081.836	0	15.081.836	0	15.081.836	0	15.081.836
705	20105151	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 07 PAGI JAKARTA	SD	30454100269	58.293.603	0	58.293.603	0	58.293.603	0	58.293.603
706	20105153	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 09 PAGI JAKARTA	SD	30054100282	46.470.550	0	46.470.550	0	46.470.550	0	46.470.550
707	20105154	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 10 PAGI JAKARTA	SD	30054100291	3.793.068	0	3.793.068	0	3.793.068	0	3.793.068
708	20102044	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 11 JAKARTA	SD	30054100304	28.556.124	0	28.556.124	0	28.556.124	0	28.556.124
709	20105157	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 13 PAGI JAKARTA	SD	30054100321	25.762.754	0	25.762.754	0	25.762.754	0	25.762.754
710	20105158	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 14 PAGI JAKARTA	SD	30454100331	6.276.888	0	6.276.888	0	6.276.888	0	6.276.888

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
711	20105159	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 15 PAGI JAKARTA	SD	30054100347	5.822.065	0	5.822.065	200.000	5.622.065	0	5.622.065
712	20105160	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 16 PAGI JAKARTA	SD	30054100355	6.859.949	0	6.859.949	0	6.859.949	0	6.859.949
713	20105163	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 19 PAGI JAKARTA	SD	30454100374	1.352.870	0	1.352.870	0	1.352.870	0	1.352.870
714	20108950	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 20 PETANG JAKARTA	SD	30054100193	7.546.047	0	7.546.047	0	7.546.047	0	7.546.047
715	20102083	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 01 PAGI JAKARTA	SD	30454100641	22.062.048	0	22.062.048	0	22.062.048	0	22.062.048
716	20102082	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 02 PAGI JAKARTA	SD	30354100651	9.119.336	0	9.119.336	0	9.119.336	0	9.119.336
717	20102080	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 04 PAGI JAKARTA	SD	30354100660	33.686	0	33.686	0	33.686	0	33.686
718	20105199	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 05 PETANG JAKARTA	SD	30054100673	7.894.628	0	7.894.628	0	7.894.628	0	7.894.628
719	20105200	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 06 PAGI JAKARTA	SD	30054100681	11.546.923	0	11.546.923	0	11.546.923	0	11.546.923
720	20102077	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 07 PAGI JAKARTA	SD	30054100690	2.754.820	0	2.754.820	0	2.754.820	0	2.754.820
721	20102087	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 09 PAGI JAKARTA	SD	30354100708	7.936.035	0	7.936.035	0	7.936.035	0	7.936.035
722	20109050	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 10 PAGI JAKARTA	SD	30454100714	2.555.893	0	2.555.893	0	2.555.893	0	2.555.893
723	20105205	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 11 PETANG JAKARTA	SD	30354100724	1.332.747	0	1.332.747	0	1.332.747	0	1.332.747
724	20101414	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUAYA 01 PAGI JAKARTA	SD	30354101305	3.859.651	0	3.859.651	0	3.859.651	0	3.859.651
725	20101413	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUAYA 02 PAGI JAKARTA	SD	30454101222	15.912.771	0	15.912.771	0	15.912.771	0	15.912.771
726	20105474	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUAYA 03 PAGI JAKARTA	SD	30354101232	106.904	0	106.904	0	106.904	0	106.904
727	20105476	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUAYA 05 PETANG JAKARTA	SD	30354101259	1.050.102	0	1.050.102	0	1.050.102	0	1.050.102
728	20101424	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUAYA 07 PAGI JAKARTA	SD	30354101267	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000
729	20101436	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUAYA 09 PAGI JAKARTA	SD	30054101289	5.652.726	0	5.652.726	0	5.652.726	0	5.652.726
730	20105322	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 01 PAGI JAKARTA	SD	30454101061	4.978.506	0	4.978.506	0	4.978.506	0	4.978.506
731	20102011	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 03 PAGI JAKARTA	SD	30454101079	4.099.227	0	4.099.227	0	4.099.227	0	4.099.227
732	20102009	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 05 PAGI JAKARTA	SD	30454101087	19.566.200	0	19.566.200	0	19.566.200	0	19.566.200
733	20105326	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 06 JAKARTA	SD	30454101095	28.607.242	0	28.607.242	0	28.607.242	0	28.607.242
734	20105327	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 07 PETANG JAKARTA	SD	30454101109	10.954.297	0	10.954.297	0	10.954.297	0	10.954.297
735	20101990	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 08 PAGI JAKARTA	SD	30454101117	17.598.227	0	17.598.227	0	17.598.227	0	17.598.227
736	20105329	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 09 PETANG JAKARTA	SD	30454101125	10.086.478	0	10.086.478	0	10.086.478	0	10.086.478
737	20105330	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 10 JAKARTA	SD	30454101133	12.176.838	0	12.176.838	0	12.176.838	0	12.176.838
738	20105331	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 11 PAGI JAKARTA	SD	30454101141	26.709.906	0	26.709.906	0	26.709.906	0	26.709.906
739	20101973	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 12 PAGI JAKARTA	SD	30454101150	4.932.588	0	4.932.588	0	4.932.588	0	4.932.588
740	20101972	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 13 PAGI JAKARTA	SD	30454101168	5.793.467	0	5.793.467	0	5.793.467	0	5.793.467
741	20101971	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 14 JAKARTA	SD	30054101173	29.419.472	0	29.419.472	0	29.419.472	0	29.419.472
742	20105286	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 01 PAGI JAKARTA	SD	30454100790	18.050.213	0	18.050.213	0	18.050.213	0	18.050.213
743	20105287	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 02 PAGI JAKARTA	SD	30054100801	1.680.764	0	1.680.764	0	1.680.764	0	1.680.764
744	20105288	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 03 PAGI JAKARTA	SD	30054100819	163.900	0	163.900	0	163.900	0	163.900
745	20101933	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 04 PETANG JAKARTA	SD	30454100820	21.071.793	0	21.071.793	0	21.071.793	0	21.071.793
746	20101932	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 05 PAGI JAKARTA	SD	30054100835	27.661.788	0	27.661.788	0	27.661.788	0	27.661.788
747	20105291	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 06 PAGI JAKARTA	SD	30454100846	719.147	0	719.147	0	719.147	0	719.147
748	20101930	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 07 PETANG JAKARTA	SD	30454100854	812.660	0	812.660	0	812.660	0	812.660
749	20101929	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 08 PETANG JAKARTA	SD	30054100860	126.470	0	126.470	0	126.470	0	126.470
750	20105294	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 09 PAGI JAKARTA	SD	30054100878	2.027.337	0	2.027.337	0	2.027.337	0	2.027.337
751	20105295	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 10 PETANG JAKARTA	SD	30454100889	1.108.146	0	1.108.146	0	1.108.146	0	1.108.146
752	20105296	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 11 PAGI JAKARTA	SD	30454100897	296.596	0	296.596	0	296.596	0	296.596
753	20101926	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 12 PETANG JAKARTA	SD	30054100941	4.252.463	0	4.252.463	0	4.252.463	0	4.252.463
754	20101925	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 13 PETANG JAKARTA	SD	30054100908	9.521.309	0	9.521.309	0	9.521.309	0	9.521.309
755	20105299	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 14 PAGI JAKARTA	SD	30454100919	40.397.374	0	40.397.374	0	40.397.374	0	40.397.374
756	20102020	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 15 PAGI JAKARTA	SD	30054100924	5.101.973	0	5.101.973	0	5.101.973	0	5.101.973
757	20105301	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 16 PAGI JAKARTA	SD	30054100932	884.673	0	884.673	0	884.673	0	884.673
758	20105165	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	30354100431	1.742.869	0	1.742.869	0	1.742.869	0	1.742.869
759	20105167	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 03 PAGI JAKARTA	SD	30054100444	15.080.081	0	15.080.081	0	15.080.081	0	15.080.081
760	20105168	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 04 PAGI JAKARTA	SD	30054100452	2.082.186	0	2.082.186	0	2.082.186	0	2.082.186
761	20105169	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 05 PAGI JAKARTA	SD	30054100461	11.399.283	0	11.399.283	0	11.399.283	0	11.399.283
762	20105171	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 07 PAGI JAKARTA	SD	30054100410	35.568.075	0	35.568.075	0	35.568.075	0	35.568.075
763	20105172	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 09 PAGI JAKARTA	SD	30054100479	210.817	0	210.817	0	210.817	0	210.817
764	20105173	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 10 PAGI JAKARTA	SD	30054100487	653.836	0	653.836	0	653.836	0	653.836
765	20102107	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 11 PETANG JAKARTA	SD	30054100495	656.780	0	656.780	0	656.780	0	656.780

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
766	20105175	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 12 PAGI JAKARTA	SD	30054100509	7.324.330	0	7.324.330	0	7.324.330	0	7.324.330
767	20105176	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 13 PETANG JAKARTA	SD	30054100517	3.058.575	0	3.058.575	0	3.058.575	0	3.058.575
768	20105177	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 14 PAGI JAKARTA	SD	30454100528	17.780.834	0	17.780.834	0	17.780.834	0	17.780.834
769	20105178	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 15 PAGI JAKARTA	SD	30054100533	5.017.412	0	5.017.412	0	5.017.412	0	5.017.412
770	20102104	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 16 PETANG JAKARTA	SD	30454100421	11.454.278	0	11.454.278	0	11.454.278	0	11.454.278
771	20105180	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 17 PAGI JAKARTA	SD	30054100541	3.665.597	0	3.665.597	0	3.665.597	0	3.665.597
772	20105181	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 18 PAGI JAKARTA	SD	30054100550	11.971.787	0	11.971.787	0	11.971.787	0	11.971.787
773	20102116	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 19 PETANG JAKARTA	SD	30454100561	10.940.830	0	10.940.830	0	10.940.830	0	10.940.830
774	20109049	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 21 PAGI JAKARTA	SD	30454100587	65.825	0	65.825	0	65.825	0	65.825
775	20102130	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 22 PETANG JAKARTA	SD	30454100595	10.125.460	0	10.125.460	0	10.125.460	0	10.125.460
776	20105212	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL 01 PAGI JAKARTA	SD	30054101386	16.695.888	0	16.695.888	0	16.695.888	0	16.695.888
777	20105213	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL 05 PAGI JAKARTA	SD	10154101390	607.147	0	607.147	0	607.147	0	607.147
778	20105215	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL 11 PAGI JAKARTA	SD	30354101411	1.803.958	0	1.803.958	0	1.803.958	0	1.803.958
779	20105539	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG DUREN SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	30054101602	13.160.090	0	13.160.090	0	13.160.090	0	13.160.090
780	20105542	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG DUREN SELATAN 05 PAGI JAKARTA	SD	30054101351	675.085	0	675.085	0	675.085	0	675.085
781	20105544	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG DUREN UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	30054101629	13.186.558	0	13.186.558	0	13.186.558	0	13.186.558
782	20105545	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG DUREN UTARA 02 PAGI JAKARTA	SD	30054101637	85.784	0	85.784	0	85.784	0	85.784
783	20105547	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG DUREN UTARA 06 PAGI JAKARTA	SD	30354101640	23.195.367	0	23.195.367	0	23.195.367	0	23.195.367
784	20105581	SEKOLAH DASAR NEGERI TOMANG 01 PAGI JAKARTA	SD	10154101691	402.454	0	402.454	0	402.454	0	402.454
785	20101172	SEKOLAH DASAR NEGERI TOMANG 03 PAGI JAKARTA	SD	30054101700	12.493.189	0	12.493.189	0	12.493.189	0	12.493.189
786	20101170	SEKOLAH DASAR NEGERI TOMANG 08 PAGI JAKARTA	SD	30054101718	3.639.123	0	3.639.123	0	3.639.123	0	3.639.123
787	20105587	SEKOLAH DASAR NEGERI TOMANG 11 PAGI JAKARTA	SD	10154101721	1.426.909	0	1.426.909	0	1.426.909	0	1.426.909
788	20101940	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR 01 PAGI JAKARTA	SD	30354101453	461.918	0	461.918	0	461.918	0	461.918
789	20101939	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR 03 PAGI JAKARTA	SD	30054101467	10.838.809	0	10.838.809	0	10.838.809	0	10.838.809
790	20101949	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR 06 PAGI JAKARTA	SD	30054101475	286.274	0	286.274	0	286.274	0	286.274
791	20105230	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR 08 PAGI JAKARTA	SD	30054101483	609.573	0	609.573	0	609.573	0	609.573
792	20101961	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR BARU 01 PAGI JAKARTA	SD	10154101527	1.094.828	0	1.094.828	0	1.094.828	0	1.094.828
793	20109105	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR BARU 03 PAGI JAKARTA	SD	30054101530	387.481	0	387.481	0	387.481	0	387.481
794	20101957	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR BARU 05 PAGI JAKARTA	SD	10154101543	1.215.023	0	1.215.023	0	1.215.023	0	1.215.023
795	20101955	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR BARU 07 JAKARTA	SD	30054101556	8.257.499	0	8.257.499	0	8.257.499	0	8.257.499
796	20105241	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR BARU 09 PAGI JAKARTA	SD	10154101560	953.773	0	953.773	0	953.773	0	953.773
797	20105590	SEKOLAH DASAR NEGERI WIJAYA KUSUMA 01 PAGI JAKARTA	SD	30054101751	10.303.260	0	10.303.260	0	10.303.260	0	10.303.260
798	20105591	SEKOLAH DASAR NEGERI WIJAYA KUSUMA 02 PAGI JAKARTA	SD	30054101769	1.346.833	0	1.346.833	0	1.346.833	0	1.346.833
799	20105594	SEKOLAH DASAR NEGERI WIJAYA KUSUMA 05 PAGI JAKARTA	SD	30054101785	938.919	0	938.919	0	938.919	0	938.919
800	20105596	SEKOLAH DASAR NEGERI WIJAYA KUSUMA 07 PAGI JAKARTA	SD	30054101793	5.908.134	0	5.908.134	0	5.908.134	0	5.908.134
801	20105525	SEKOLAH DASAR NEGERI TAMAN SARI 01 PAGI JAKARTA	SD	10254104788	660.155	0	660.155	0	660.155	0	660.155
802	20105526	SEKOLAH DASAR NEGERI TAMAN SARI 03 PAGI JAKARTA	SD	10254104796	25.709	0	25.709	0	25.709	0	25.709
803	20105527	SEKOLAH DASAR NEGERI TAMAN SARI 05 PAGI JAKARTA	SD	10254104800	1.813.857	0	1.813.857	0	1.813.857	0	1.813.857
804	20105529	SEKOLAH DASAR NEGERI TAMAN SARI 07 PAGI JAKARTA	SD	10254104818	4.989.340	0	4.989.340	0	4.989.340	0	4.989.340
805	20105530	SEKOLAH DASAR NEGERI TAMAN SARI 08 PAGI JAKARTA	SD	10254104826	10.817.964	0	10.817.964	0	10.817.964	0	10.817.964
806	20105531	SEKOLAH DASAR NEGERI TAMAN SARI 09 PAGI JAKARTA	SD	10254104834	1.354.268	0	1.354.268	0	1.354.268	0	1.354.268
807	20101362	SEKOLAH DASAR NEGERI KRUKUT 01 PAGI JAKARTA	SD	30054104610	2.340.182	0	2.340.182	0	2.340.182	0	2.340.182
808	20101361	SEKOLAH DASAR NEGERI KRUKUT 03 PAGI JAKARTA	SD	10254104621	3.653.350	0	3.653.350	0	3.653.350	0	3.653.350
809	20105401	SEKOLAH DASAR NEGERI MAPHAR 01 JAKARTA	SD	30054104717	16.193.541	19.291	16.174.250	0	16.174.250	0	16.174.250
810	20105393	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGA BESAR 01 PAGI JAKARTA	SD	30054104644	339.913	0	339.913	0	339.913	0	339.913
811	20101359	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGA BESAR 03 PAGI JAKARTA	SD	30054104652	1.761.666	0	1.761.666	0	1.761.666	0	1.761.666
812	20105396	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGA BESAR 05 PAGI JAKARTA	SD	30054104695	251.639	0	251.639	0	251.639	0	251.639
813	20101370	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGA BESAR 07 PAGI JAKARTA	SD	30054104661	50.075	0	50.075	0	50.075	0	50.075
814	20105399	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGA BESAR 11 PAGI JAKARTA	SD	30054104679	1.131.194	0	1.131.194	0	1.131.194	0	1.131.194
815	20105400	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGA BESAR 15 PAGI JAKARTA	SD	30054104687	352.316	0	352.316	0	352.316	0	352.316
816	20102004	SEKOLAH DASAR NEGERI KEAGUNGAN 01 PAGI JAKARTA	SD	30054104547	36.395.289	0	36.395.289	0	36.395.289	0	36.395.289
817	20102002	SEKOLAH DASAR NEGERI KEAGUNGAN 03 PAGI JAKARTA	SD	30054104563	21.533.506	0	21.533.506	0	21.533.506	0	21.533.506
818	20105306	SEKOLAH DASAR NEGERI KEAGUNGAN 05 PAGI JAKARTA	SD	30054104580	16.633.072	0	16.633.072	0	16.633.072	0	16.633.072
819	20101419	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANGSIA 01 PAGI JAKARTA	SD	30054104725	16.539.335	0	16.539.335	0	16.539.335	0	16.539.335
820	20101417	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANGSIA 03 PAGI JAKARTA	SD	30054104733	376.719	0	376.719	0	376.719	0	376.719

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
821	20101415	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANGSIA 06 PAGI JAKARTA	SD	30054104741	217.949	0	217.949	0	217.949	0	217.949
822	20105532	SEKOLAH DASAR NEGERI TAMBORA 01 PAGI JAKARTA	SD	30054105454	16.822.034	0	16.822.034	0	16.822.034	0	16.822.034
823	20105533	SEKOLAH DASAR NEGERI TAMBORA 02 PETANG JAKARTA	SD	30054105462	4.935.663	0	4.935.663	0	4.935.663	0	4.935.663
824	20105534	SEKOLAH DASAR NEGERI TAMBORA 03 PAGI JAKARTA	SD	30054105471	26.870.655	0	26.870.655	0	26.870.655	0	26.870.655
825	20105261	SEKOLAH DASAR NEGERI KALI ANYAR 01 PAGI JAKARTA	SD	30054105314	56.536.582	0	56.536.582	0	56.536.582	0	56.536.582
826	20101924	SEKOLAH DASAR NEGERI KALI ANYAR 02 PETANG JAKARTA	SD	30054105322	6.366.933	0	6.366.933	0	6.366.933	0	6.366.933
827	20105206	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	30054105063	12.946.735	0	12.946.735	0	12.946.735	0	12.946.735
828	20102100	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI UTARA 02 PETANG JAKARTA	SD	30054105101	12.277.386	0	12.277.386	0	12.277.386	0	12.277.386
829	20105208	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI UTARA 03 PAGI JAKARTA	SD	30054105071	12.405.377	0	12.405.377	0	12.405.377	0	12.405.377
830	20105209	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI UTARA 04 PETANG JAKARTA	SD	30054105110	10.299.535	0	10.299.535	0	10.299.535	0	10.299.535
831	20105210	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI UTARA 05 PAGI JAKARTA	SD	30054105080	16.216.303	0	16.216.303	0	16.216.303	0	16.216.303
832	20102096	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI UTARA 06 PETANG JAKARTA	SD	30054105098	6.516.577	0	6.516.577	0	6.516.577	0	6.516.577
833	20105535	SEKOLAH DASAR NEGERI TANAH SEREAL 01 PAGI JAKARTA	SD	30054105501	20.119.795	0	20.119.795	0	20.119.795	0	20.119.795
834	20105536	SEKOLAH DASAR NEGERI TANAH SEREAL 02 PETANG JAKARTA	SD	30054105535	12.303.303	0	12.303.303	0	12.303.303	0	12.303.303
835	20105537	SEKOLAH DASAR NEGERI TANAH SEREAL 03 PAGI JAKARTA	SD	30054105519	16.190.558	0	16.190.558	0	16.190.558	0	16.190.558
836	20105242	SEKOLAH DASAR NEGERI JEMBATAN BESI 01 PAGI JAKARTA	SD	30054105152	17.055.700	0	17.055.700	0	17.055.700	0	17.055.700
837	20105243	SEKOLAH DASAR NEGERI JEMBATAN BESI 02 PETANG JAKARTA	SD	30054105161	22.851.041	0	22.851.041	0	22.851.041	0	22.851.041
838	20105244	SEKOLAH DASAR NEGERI JEMBATAN BESI 03 PAGI JAKARTA	SD	30054105179	2.141.960	0	2.141.960	0	2.141.960	0	2.141.960
839	20101921	SEKOLAH DASAR NEGERI JEMBATAN BESI 04 PETANG JAKARTA	SD	30054105187	21.841.126	0	21.841.126	0	21.841.126	0	21.841.126
840	20105139	SEKOLAH DASAR NEGERI ANGKE 01 PAGI JAKARTA	SD	30054104938	2.958.565	0	2.958.565	0	2.958.565	0	2.958.565
841	20102028	SEKOLAH DASAR NEGERI ANGKE 03 PAGI JAKARTA	SD	30054104946	10.992.150	0	10.992.150	0	10.992.150	0	10.992.150
842	20105143	SEKOLAH DASAR NEGERI ANGKE 05 PAGI JAKARTA	SD	30054104954	5.634.858	0	5.634.858	0	5.634.858	0	5.634.858
843	20102025	SEKOLAH DASAR NEGERI ANGKE 06 PAGI JAKARTA	SD	30054104920	13.659.990	0	13.659.990	0	13.659.990	0	13.659.990
844	20105246	SEKOLAH DASAR NEGERI JEMBATAN LIMA 01 PAGI JAKARTA	SD	30054105225	2.119.631	0	2.119.631	0	2.119.631	0	2.119.631
845	20105248	SEKOLAH DASAR NEGERI JEMBATAN LIMA 03 PAGI JAKARTA	SD	30054105241	13.866.689	0	13.866.689	0	13.866.689	0	13.866.689
846	20105461	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKOJAN 01 PAGI JAKARTA	SD	30054105373	27.373.090	0	27.373.090	0	27.373.090	0	27.373.090
847	20105463	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKOJAN 03 PAGI JAKARTA	SD	30054105390	1.104.816	0	1.104.816	0	1.104.816	0	1.104.816
848	20105465	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKOJAN 05 PAGI JAKARTA	SD	30054105411	22.667.323	0	22.667.323	0	22.667.323	0	22.667.323
849	20105308	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 01 JAKARTA	SD	41154102961	61.993	0	61.993	0	61.993	0	61.993
850	20105309	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 02 PAGI JAKARTA	SD	41154102970	1.179.712	0	1.179.712	0	1.179.712	0	1.179.712
851	20101996	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 04 PAGI JAKARTA	SD	41154102988	2.412.613	0	2.412.613	0	2.412.613	0	2.412.613
852	20101994	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 06 PAGI JAKARTA	SD	41154102996	20.195.293	0	20.195.293	0	20.195.293	0	20.195.293
853	20105314	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 08 PAGI JAKARTA	SD	41154103003	45.161	0	45.161	0	45.161	0	45.161
854	20102006	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 10 JAKARTA	SD	41154103011	1.803.642	0	1.803.642	0	1.803.642	0	1.803.642
855	20105316	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 11 PAGI JAKARTA	SD	41154103020	849.039	0	849.039	0	849.039	0	849.039
856	20102017	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 15 PAGI JAKARTA	SD	41154103038	770.527	0	770.527	0	770.527	0	770.527
857	20105321	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 17 PAGI JAKARTA	SD	41154103046	14.030.278	0	14.030.278	0	14.030.278	0	14.030.278
858	20105519	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKABUMI UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	41154103348	5.292.724	0	5.292.724	0	5.292.724	0	5.292.724
859	20101188	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKABUMI UTARA 03 PAGI JAKARTA	SD	41154103356	1.304.195	0	1.304.195	0	1.304.195	0	1.304.195
860	20101199	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKABUMI UTARA 04 PAGI JAKARTA	SD	41154103364	2.081.087	0	2.081.087	0	2.081.087	0	2.081.087
861	20105521	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKABUMI UTARA 05 JAKARTA	SD	41154103372	9.845.967	0	9.845.967	0	9.845.967	0	9.845.967
862	20105522	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKABUMI UTARA 07 PAGI JAKARTA	SD	41154103381	7.737.069	0	7.737.069	0	7.737.069	0	7.737.069
863	20105524	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKABUMI UTARA 09 PAGI JAKARTA	SD	41154103402	8.980.866	0	8.980.866	0	8.980.866	0	8.980.866
864	20105514	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKABUMI SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	41154103275	3.755.095	0	3.755.095	0	3.755.095	0	3.755.095
865	20105516	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKABUMI SELATAN 05 PAGI JAKARTA	SD	41154103291	646.460	0	646.460	0	646.460	0	646.460
866	20105517	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKABUMI SELATAN 06 PAGI JAKARTA	SD	41154103305	1.092.688	0	1.092.688	0	1.092.688	0	1.092.688
867	20105518	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKABUMI SELATAN 07 PAGI JAKARTA	SD	41154103313	1.453.500	0	1.453.500	0	1.453.500	0	1.453.500
868	20105349	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA 01 PAGI JAKARTA	SD	41154103186	34.711.836	0	34.711.836	0	34.711.836	0	34.711.836
869	20101984	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA 03 PAGI JAKARTA	SD	41154103194	5.554.925	0	5.554.925	0	5.554.925	0	5.554.925
870	20101982	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA 05 PAGI JAKARTA	SD	41154103208	899.333	0	899.333	0	899.333	0	899.333
871	20101981	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA 06 PAGI JAKARTA	SD	41154103216	11.011.544	0	11.011.544	0	11.011.544	0	11.011.544
872	20105186	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 01 PAGI JAKARTA	SD	41154102848	7.007.589	0	7.007.589	0	7.007.589	0	7.007.589
873	20105187	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 03 JAKARTA	SD	41154102856	4.984.967	0	4.984.967	0	4.984.967	0	4.984.967
874	20105188	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 05 PAGI JAKARTA	SD	41154102864	1.822.373	0	1.822.373	0	1.822.373	0	1.822.373
875	20105189	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 07 PAGI JAKARTA	SD	41154102872	112.478	0	112.478	0	112.478	0	112.478

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
876	20102119	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 11 PAGI JAKARTA	SD	41154102881	33.867.578	0	33.867.578	0	33.867.578	0	33.867.578
877	20105192	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 13 JAKARTA	SD	41154102899	1.479.779	0	1.479.779	0	1.479.779	0	1.479.779
878	20102085	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 16 PAGI JAKARTA	SD	41154102902	711.920	0	711.920	0	711.920	0	711.920
879	20105194	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 17 PAGI JAKARTA	SD	41154102911	553.848	0	553.848	0	553.848	0	553.848
880	20101965	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDOYA UTARA 01 JAKARTA	SD	41154103127	1.777.852	0	1.777.852	0	1.777.852	0	1.777.852
881	20105344	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDOYA UTARA 03 PAGI JAKARTA	SD	41154103135	2.152.103	0	2.152.103	0	2.152.103	0	2.152.103
882	20105346	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDOYA UTARA 04 JAKARTA	SD	41154103143	3.078.416	0	3.078.416	45.000	3.033.416	0	3.033.416
883	20105348	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDOYA UTARA 09 PAGI JAKARTA	SD	41154103151	32.950.443	0	32.950.443	0	32.950.443	0	32.950.443
884	20105338	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDOYA SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	41154103089	4.736.232	0	4.736.232	0	4.736.232	0	4.736.232
885	20105340	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDOYA SELATAN 04 PAGI JAKARTA	SD	41154103097	16.225.210	0	16.225.210	0	16.225.210	0	16.225.210
886	20105263	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 01 PAGI JAKARTA	SD	30054101947	40.482.561	0	40.482.561	0	40.482.561	0	40.482.561
887	20101935	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 02 PETANG JAKARTA	SD	30054101955	1.481.049	0	1.481.049	0	1.481.049	0	1.481.049
888	20105265	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 03 PAGI JAKARTA	SD	30054101963	2.595.226	0	2.595.226	0	2.595.226	0	2.595.226
889	20105266	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 04 PETANG JAKARTA	SD	30054101971	182.576	0	182.576	0	182.576	0	182.576
890	20105267	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 05 PAGI JAKARTA	SD	30054101904	2.029.006	0	2.029.006	0	2.029.006	0	2.029.006
891	20105268	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 06 PAGI JAKARTA	SD	30054101980	4.517.990	0	4.517.990	0	4.517.990	0	4.517.990
892	20105269	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 07 PAGI JAKARTA	SD	30054101998	17.320.419	0	17.320.419	0	17.320.419	0	17.320.419
893	20105271	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 09 PAGI JAKARTA	SD	30054102005	4.363.684	0	4.363.684	0	4.363.684	0	4.363.684
894	20105272	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 10 PAGI JAKARTA	SD	30054102013	73.568	0	73.568	0	73.568	0	73.568
895	20105273	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 12 PAGI JAKARTA	SD	30054101912	13.932.970	0	13.932.970	0	13.932.970	0	13.932.970
896	20105274	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 13 PETANG JAKARTA	SD	30054101921	1.897.253	0	1.897.253	0	1.897.253	0	1.897.253
897	20105275	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 14 PETANG JAKARTA	SD	30054101939	3.277.712	0	3.277.712	0	3.277.712	0	3.277.712
898	20105481	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 01 PAGI JAKARTA	SD	30054102391	2.092.449	0	2.092.449	0	2.092.449	0	2.092.449
899	20105482	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 02 PETANG JAKARTA	SD	30054102404	1.813.507	0	1.813.507	0	1.813.507	0	1.813.507
900	20105483	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 03 PAGI JAKARTA	SD	30054102412	8.696.034	0	8.696.034	0	8.696.034	0	8.696.034
901	20105484	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 04 PAGI JAKARTA	SD	30054102421	11.510.744	0	11.510.744	0	11.510.744	0	11.510.744
902	20105485	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 05 PAGI JAKARTA	SD	30054102510	29.518.958	0	29.518.958	0	29.518.958	0	29.518.958
903	20105486	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 06 PAGI JAKARTA	SD	30054102439	6.499.819	0	6.499.819	0	6.499.819	0	6.499.819
904	20105487	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 07 PETANG JAKARTA	SD	30054102447	604.338	0	604.338	0	604.338	0	604.338
905	20105488	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 08 PAGI JAKARTA	SD	30054102455	10.271.433	0	10.271.433	0	10.271.433	0	10.271.433
906	20105489	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 09 PAGI JAKARTA	SD	30054102528	13.274.972	0	13.274.972	0	13.274.972	0	13.274.972
907	20105490	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 10 PETANG JAKARTA	SD	30054102463	72.133	0	72.133	0	72.133	0	72.133
908	20105492	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 12 PAGI JAKARTA	SD	30054102480	10.721.332	0	10.721.332	0	10.721.332	0	10.721.332
909	20105493	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 13 PETANG JAKARTA	SD	30054102498	595.175	0	595.175	0	595.175	0	595.175
910	20105494	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 14 PETANG JAKARTA	SD	30054102501	157.875	0	157.875	0	157.875	0	157.875
911	20105549	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 01 PAGI JAKARTA	SD	30054102579	9.919.218	0	9.919.218	0	9.919.218	0	9.919.218
912	20105560	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 02 PAGI JAKARTA	SD	30054102692	17.060.844	0	17.060.844	0	17.060.844	0	17.060.844
913	20105561	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 03 PAGI JAKARTA	SD	30054102587	1.070.278	0	1.070.278	0	1.070.278	0	1.070.278
914	20105562	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 04 PAGI JAKARTA	SD	30054102595	6.749.010	0	6.749.010	0	6.749.010	0	6.749.010
915	20105564	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 06 PAGI JAKARTA	SD	30054102706	3.470.456	0	3.470.456	0	3.470.456	0	3.470.456
916	20105565	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 07 PAGI JAKARTA	SD	30054102609	64.521	0	64.521	0	64.521	0	64.521
917	20105566	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 08 PAGI JAKARTA	SD	30054102617	243.177	0	243.177	0	243.177	0	243.177
918	20105568	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 09 PAGI JAKARTA	SD	30054102714	2.467.866	0	2.467.866	0	2.467.866	0	2.467.866
919	20105569	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 10 PAGI JAKARTA	SD	30054102625	17.090.690	0	17.090.690	0	17.090.690	0	17.090.690
920	20105570	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 11 PAGI JAKARTA	SD	30054102633	3.578.707	0	3.578.707	0	3.578.707	0	3.578.707
921	20105571	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 12 PETANG JAKARTA	SD	30054102641	152.048	0	152.048	0	152.048	0	152.048
922	20105572	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 13 PETANG JAKARTA	SD	30054102722	12.397.674	0	12.397.674	0	12.397.674	0	12.397.674
923	20105574	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 15 PAGI JAKARTA	SD	30054102650	94.437	0	94.437	0	94.437	0	94.437
924	20105575	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 16 PETANG JAKARTA	SD	30054102668	1.401.164	0	1.401.164	0	1.401.164	0	1.401.164
925	20105576	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 17 JAKARTA	SD	30054102749	10.898.624	0	10.898.624	0	10.898.624	0	10.898.624
926	20105578	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 19 PETANG JAKARTA	SD	30054102757	1.188.720	0	1.188.720	0	1.188.720	0	1.188.720
927	20105579	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 20 PETANG JAKARTA	SD	30054102676	752.155	0	752.155	0	752.155	0	752.155
928	20105580	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 21 PETANG JAKARTA	SD	30054102684	21.315.632	0	21.315.632	0	21.315.632	0	21.315.632
929	20105276	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL 01 PAGI JAKARTA	SD	30054102056	1.408.527	0	1.408.527	0	1.408.527	0	1.408.527
930	20105277	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL 02 PAGI JAKARTA	SD	30054102064	1.911.255	0	1.911.255	0	1.911.255	0	1.911.255

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
931	20105278	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL 03 JAKARTA	SD	30054102072	1.151.819	0	1.151.819	0	1.151.819	0	1.151.819
932	20105280	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL 05 PAGI JAKARTA	SD	30054102129	9.612.761	0	9.612.761	0	9.612.761	0	9.612.761
933	20105281	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL 06 PAGI JAKARTA	SD	30054102081	1.602.624	0	1.602.624	0	1.602.624	0	1.602.624
934	20105282	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL 07 PAGI JAKARTA	SD	30054102137	1.097.767	0	1.097.767	0	1.097.767	0	1.097.767
935	20105283	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL 08 PETANG JAKARTA	SD	30054102099	39.711	0	39.711	0	39.711	0	39.711
936	20105284	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL 09 JAKARTA	SD	30054102102	24.043.329	0	24.043.329	0	24.043.329	0	24.043.329
937	20105445	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 01 PAGI JAKARTA	SD	30054102218	1.391.550	0	1.391.550	499.400	892.150	0	892.150
938	20105446	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 02 PAGI JAKARTA	SD	30054102293	1.763.014	0	1.763.014	0	1.763.014	0	1.763.014
939	20105447	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 03 PAGI JAKARTA	SD	30054102226	853.154	0	853.154	0	853.154	0	853.154
940	20105449	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 05 PAGI JAKARTA	SD	30054102234	15.021.730	0	15.021.730	0	15.021.730	0	15.021.730
941	20105450	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 06 PAGI JAKARTA	SD	30054102315	18.085.543	0	18.085.543	0	18.085.543	0	18.085.543
942	20109142	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 07 PAGI JAKARTA	SD	30054102242	99.181	0	99.181	0	99.181	0	99.181
943	20105452	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 08 PETANG JAKARTA	SD	30054102323	489.904	0	489.904	0	489.904	0	489.904
944	20105455	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 11 PAGI JAKARTA	SD	30054102331	718.766	0	718.766	0	718.766	0	718.766
945	20105457	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 12 PAGI JAKARTA	SD	30054102269	13.679.972	0	13.679.972	0	13.679.972	0	13.679.972
946	20105458	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 13 PAGI JAKARTA	SD	30054102277	509.466	0	509.466	0	509.466	0	509.466
947	20108945	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 14 PAGI JAKARTA	SD	30054102285	28.888.667	0	28.888.667	0	28.888.667	0	28.888.667
948	20105424	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 01 JAKARTA	SD	11354104406	13.793.213	0	13.793.213	0	13.793.213	0	13.793.213
949	20105425	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 03 JAKARTA	SD	11354104279	413.821	0	413.821	0	413.821	0	413.821
950	20105427	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 05 JAKARTA	SD	11354104287	2.091.386	0	2.091.386	0	2.091.386	0	2.091.386
951	20105428	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 07 JAKARTA	SD	11354104295	111.458	0	111.458	0	111.458	0	111.458
952	20109268	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 09 JAKARTA	SD	11354104309	24.201.631	0	24.201.631	0	24.201.631	0	24.201.631
953	20101452	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 13 JAKARTA	SD	11354104317	8.962.524	0	8.962.524	0	8.962.524	0	8.962.524
954	20105434	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 15 JAKARTA	SD	11354104325	28.109.132	0	28.109.132	0	28.109.132	0	28.109.132
955	20105435	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 17 JAKARTA	SD	11354104333	2.627.542	100.000	2.527.542	0	2.527.542	0	2.527.542
956	20105436	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 19 JAKARTA	SD	11354104341	1.643.051	0	1.643.051	0	1.643.051	0	1.643.051
957	20101463	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 20 JAKARTA	SD	11354104350	26.740.995	0	26.740.995	0	26.740.995	0	26.740.995
958	20101462	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 21 JAKARTA	SD	11354104368	416.239	0	416.239	0	416.239	0	416.239
959	20101461	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 22 JAKARTA	SD	11354104376	29.330.497	0	29.330.497	0	29.330.497	0	29.330.497
960	20101460	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 23 JAKARTA	SD	11354104384	2.996.408	0	2.996.408	0	2.996.408	0	2.996.408
961	20105442	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 25 JAKARTA	SD	11354104392	44.925.345	0	44.925.345	0	44.925.345	0	44.925.345
962	20105495	SEKOLAH DASAR NEGERI SLIPI 01 JAKARTA	SD	11854104458	3.625.800	0	3.625.800	0	3.625.800	0	3.625.800
963	20105499	SEKOLAH DASAR NEGERI SLIPI 07 JAKARTA	SD	11354104465	4.532.008	0	4.532.008	0	4.532.008	0	4.532.008
964	20105501	SEKOLAH DASAR NEGERI SLIPI 11 JAKARTA	SD	11354104473	5.499.605	0	5.499.605	165.000	5.334.605	0	5.334.605
965	20101428	SEKOLAH DASAR NEGERI SLIPI 15 JAKARTA	SD	11854104482	29.716.277	0	29.716.277	0	29.716.277	0	29.716.277
966	20105382	SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA BAMBU 01 PAGI JAKARTA	SD	11854104229	7.384.760	0	7.384.760	0	7.384.760	0	7.384.760
967	20105383	SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA BAMBU 02 PETANG JAKARTA	SD	30054104237	10.492.975	0	10.492.975	0	10.492.975	0	10.492.975
968	20105216	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPULO 01 PAGI JAKARTA	SD	11354104023	16.463.612	0	16.463.612	0	16.463.612	0	16.463.612
969	20101947	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPULO 03 PAGI JAKARTA	SD	30054104032	1.558.259	0	1.558.259	230.000	1.328.259	0	1.328.259
970	20105219	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPULO 05 PAGI JAKARTA	SD	30054104059	14.709.570	0	14.709.570	0	14.709.570	0	14.709.570
971	20105220	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPULO 06 PAGI JAKARTA	SD	30054104067	23.971.142	0	23.971.142	0	23.971.142	0	23.971.142
972	20101943	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPULO 07 JAKARTA	SD	11354104074	72.808	0	72.808	0	72.808	0	72.808
973	20101942	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPULO 08 PAGI JAKARTA	SD	30054104083	427.045	0	427.045	0	427.045	0	427.045
974	20101980	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 01 PAGI JAKARTA	SD	11354104091	2.461.735	0	2.461.735	0	2.461.735	0	2.461.735
975	20105353	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 03 PAGI JAKARTA	SD	11354104104	18.909.718	0	18.909.718	0	18.909.718	0	18.909.718
976	20105354	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 05 PAGI JAKARTA	SD	11354104112	5.074.579	0	5.074.579	0	5.074.579	0	5.074.579
977	20101410	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 06 PAGI JAKARTA	SD	11354104121	15.286.583	0	15.286.583	0	15.286.583	0	15.286.583
978	20101395	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 08 PAGI JAKARTA	SD	11354104139	10.325.552	0	10.325.552	0	10.325.552	0	10.325.552
979	20101394	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 10 PAGI JAKARTA	SD	11354104147	11.526.779	0	11.526.779	0	11.526.779	0	11.526.779
980	20101393	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 12 JAKARTA	SD	11354104155	7.006.655	0	7.006.655	0	7.006.655	0	7.006.655
981	20105361	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 14 JAKARTA	SD	11354104171	1.800.894	0	1.800.894	0	1.800.894	0	1.800.894
982	20105363	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 17 PAGI JAKARTA	SD	11354104163	6.743.741	0	6.743.741	0	6.743.741	0	6.743.741
983	20105384	SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA BAMBU 03 JAKARTA	SD	11854104199	793.430	0	793.430	0	793.430	0	793.430
984	20105385	SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA BAMBU 04 JAKARTA	SD	11854104202	1.976.090	0	1.976.090	0	1.976.090	0	1.976.090
985	20105388	SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA BAMBU 07 PAGI JAKARTA	SD	11854104211	9.738.672	0	9.738.672	0	9.738.672	0	9.738.672

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
986	20105366	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	30354103561	16.416.987	0	16.416.987	0	16.416.987	0	16.416.987
987	20105368	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN SELATAN 03 PAGI JAKARTA	SD	30354103570	1.687.392	0	1.687.392	0	1.687.392	0	1.687.392
988	20105370	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	30354103596	31.611.292	0	31.611.292	0	31.611.292	0	31.611.292
989	20105373	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN UTARA 04 PAGI JAKARTA	SD	32254103606	5.541.900	0	5.541.900	0	5.541.900	0	5.541.900
990	20109301	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN UTARA 05 PAGI JAKARTA	SD	30354103618	1.882.015	0	1.882.015	0	1.882.015	0	1.882.015
991	20101406	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN UTARA 06 PAGI JAKARTA	SD	30354103626	1.132.033	0	1.132.033	0	1.132.033	0	1.132.033
992	20105376	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN UTARA 07 PETANG JAKARTA	SD	30354103634	2.004.093	0	2.004.093	0	2.004.093	0	2.004.093
993	20105377	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN UTARA 08 PETANG JAKARTA	SD	30354103642	8.222.453	0	8.222.453	0	8.222.453	0	8.222.453
994	20105378	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN UTARA 09 PAGI JAKARTA	SD	30354103651	16.785.030	0	16.785.030	0	16.785.030	0	16.785.030
995	20105379	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN UTARA 10 PAGI JAKARTA	SD	30354103669	11.063.614	0	11.063.614	0	11.063.614	0	11.063.614
996	20105411	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA UTARA 02 PAGI JAKARTA	SD	30354103774	20.813.517	0	20.813.517	0	20.813.517	0	20.813.517
997	20105412	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA UTARA 03 PAGI JAKARTA	SD	30354103782	2.456.247	0	2.456.247	0	2.456.247	50.000	2.506.247
998	20101373	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA UTARA 05 PAGI JAKARTA	SD	30354103804	7.833.462	5.641.600	2.191.862	0	2.191.862	0	2.191.862
999	20105416	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA UTARA 07 PAGI JAKARTA	SD	41154103810	6.387.681	0	6.387.681	0	6.387.681	0	6.387.681
1000	20105417	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA UTARA 08 PAGI JAKARTA	SD	30354103821	1.943.991	0	1.943.991	0	1.943.991	0	1.943.991
1001	20105418	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA UTARA 09 PAGI JAKARTA	SD	41154103836	1.002.934	0	1.002.934	0	1.002.934	0	1.002.934
1002	20105419	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA UTARA 10 PAGI JAKARTA	SD	41154103844	159.429	0	159.429	0	159.429	0	159.429
1003	20105421	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA UTARA 12 PAGI JAKARTA	SD	30354103863	12.590.731	0	12.590.731	0	12.590.731	0	12.590.731
1004	20101447	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA UTARA 13 PAGI JAKARTA	SD	41154103879	2.551.159	0	2.551.159	0	2.551.159	0	2.551.159
1005	20105403	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA SELATAN 01 JAKARTA	SD	30354103715	14.414.253	0	14.414.253	0	14.414.253	0	14.414.253
1006	20105405	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA SELATAN 03 JAKARTA	SD	30354103723	6.550.275	0	6.550.275	0	6.550.275	0	6.550.275
1007	20105406	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA SELATAN 04 JAKARTA	SD	30354103731	6.758.053	0	6.758.053	0	6.758.053	0	6.758.053
1008	20105408	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA SELATAN 06 JAKARTA	SD	30354103740	6.756.692	0	6.756.692	0	6.756.692	0	6.756.692
1009	20105506	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG 01 PAGI JAKARTA	SD	41154103941	24.555.844	0	24.555.844	0	24.555.844	0	24.555.844
1010	20105508	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG 03 PAGI JAKARTA	SD	30354103952	13.295.762	0	13.295.762	0	13.295.762	0	13.295.762
1011	20105509	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG 04 PAGI JAKARTA	SD	41154103968	3.582.035	0	3.582.035	0	3.582.035	0	3.582.035
1012	20105510	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG 05 PAGI JAKARTA	SD	41154103976	299.531	0	299.531	0	299.531	0	299.531
1013	20105511	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG 06 PAGI JAKARTA	SD	41154103984	19.326.098	0	19.326.098	0	19.326.098	0	19.326.098
1014	20109067	SEKOLAH DASAR NEGERI JOGLO 01 PAGI JAKARTA	SD	30354103448	15.328.166	0	15.328.166	0	15.328.166	50.000	15.378.166
1015	20101916	SEKOLAH DASAR NEGERI JOGLO 03 PAGI JAKARTA	SD	30354103464	34.653.672	0	34.653.672	0	34.653.672	100.000	34.753.672
1016	20105254	SEKOLAH DASAR NEGERI JOGLO 05 PAGI JAKARTA	SD	30354103481	2.023.889	0	2.023.889	0	2.023.889	0	2.023.889
1017	20101913	SEKOLAH DASAR NEGERI JOGLO 06 PAGI JAKARTA	SD	30354103499	4.920.344	0	4.920.344	0	4.920.344	0	4.920.344
1018	20101912	SEKOLAH DASAR NEGERI JOGLO 08 PAGI JAKARTA	SD	30354103511	2.132.014	0	2.132.014	0	2.132.014	0	2.132.014
1019	20108940	SEKOLAH DASAR NEGERI JOGLO 09 PAGI JAKARTA	SD	30354103529	18.010.634	0	18.010.634	0	18.010.634	0	18.010.634
1020	20105259	SEKOLAH DASAR NEGERI JOGLO 10 PAGI JAKARTA	SD	30354103537	4.809.973	0	4.809.973	432.420	4.377.553	0	4.377.553
1021	20102259	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	40254112496	760.056	0	760.056	0	760.056	0	760.056
1022	20102255	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET TIMUR 07 JAKARTA	SD	40254112500	12.290.065	0	12.290.065	0	12.290.065	0	12.290.065
1023	20102253	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET TIMUR 11 PAGI JAKARTA	SD	40254112461	3.582.596	0	3.582.596	0	3.582.596	0	3.582.596
1024	20106214	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET TIMUR 15 PAGI JAKARTA	SD	40254112470	8.280.585	0	8.280.585	0	8.280.585	0	8.280.585
1025	20102233	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET TIMUR 17 PAGI JAKARTA	SD	40254112488	4.616.068	0	4.616.068	0	4.616.068	0	4.616.068
1026	20102251	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET BARAT 01 JAKARTA	SD	40254112411	1.437.397	0	1.437.397	0	1.437.397	0	1.437.397
1027	20102264	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET BARAT 03 PAGI JAKARTA	SD	40254112437	1.305.202	0	1.305.202	0	1.305.202	0	1.305.202
1028	20102263	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET BARAT 05 JAKARTA	SD	40254112445	11.120.768	0	11.120.768	0	11.120.768	0	11.120.768
1029	20102260	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET BARAT 08 PAGI JAKARTA	SD	40254112429	13.277.152	0	13.277.152	0	13.277.152	0	13.277.152
1030	20102372	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG DALAM 01 PAGI JAKARTA	SD	40254112356	5.481.928	0	5.481.928	0	5.481.928	0	5.481.928
1031	20106063	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG DALAM 05 PAGI JAKARTA	SD	40254112364	7.264.860	0	7.264.860	66.000	7.198.860	0	7.198.860
1032	20102387	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG DALAM 07 PAGI JAKARTA	SD	40254112372	24.440.568	0	24.440.568	0	24.440.568	0	24.440.568
1033	20106066	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG DALAM 11 PAGI JAKARTA	SD	40254112381	3.131.542	0	3.131.542	0	3.131.542	0	3.131.542
1034	20102300	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BARU 03 PAGI JAKARTA	SD	40254112216	3.528.065	0	3.528.065	314.392	3.213.673	0	3.213.673
1035	20102299	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BARU 05 JAKARTA	SD	40254112241	1.715.940	0	1.715.940	0	1.715.940	0	1.715.940
1036	20102313	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BARU 07 PAGI JAKARTA	SD	40254112224	24.829.296	0	24.829.296	0	24.829.296	0	24.829.296
1037	20102314	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BARU 09 PAGI JAKARTA	SD	40254112232	46.705.154	0	46.705.154	0	46.705.154	0	46.705.154
1038	20102326	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BARU 11 JAKARTA	SD	40254112259	32.793.521	0	32.793.521	0	32.793.521	0	32.793.521
1039	20103161	SEKOLAH DASAR NEGERI BUKIT DURI 01 PAGI JAKARTA	SD	40254112160	292.438	0	292.438	0	292.438	0	292.438
1040	20103163	SEKOLAH DASAR NEGERI BUKIT DURI 03 PAGI JAKARTA	SD	40254112178	28.719	0	28.719	0	28.719	0	28.719

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1041	20105821	SEKOLAH DASAR NEGERI BUKIT DURI 05 PAGI JAKARTA	SD	40254112186	13.420.022	0	13.420.022	0	13.420.022	0	13.420.022
1042	20106050	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI SELATAN 01 JAKARTA	SD	40254112313	33.829.519	0	33.829.519	0	33.829.519	0	33.829.519
1043	20106052	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI SELATAN 03 JAKARTA	SD	40254112321	1.558.641	0	1.558.641	0	1.558.641	0	1.558.641
1044	20102283	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI 01 PAGI JAKARTA	SD	40254112267	3.414.906	0	3.414.906	0	3.414.906	0	3.414.906
1045	20102295	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI 03 PAGI JAKARTA	SD	40254112275	179.563	0	179.563	0	179.563	0	179.563
1046	20106040	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI 05 PAGI JAKARTA	SD	40254112283	1.234.354	0	1.234.354	0	1.234.354	0	1.234.354
1047	20102289	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI 09 PAGI JAKARTA	SD	40254112291	661.840	0	661.840	0	661.840	0	661.840
1048	20106186	SEKOLAH DASAR NEGERI SETIABUDI 01 JAKARTA	SD	40254112127	3.919.466	0	3.919.466	0	3.919.466	0	3.919.466
1049	20105957	SEKOLAH DASAR NEGERI KARET KUNINGAN 03 PAGI JAKARTA	SD	40254111937	4.004.969	0	4.004.969	0	4.004.969	0	4.004.969
1050	20105952	SEKOLAH DASAR NEGERI KARET 01 JAKARTA	SD	40254111902	48.054.215	0	48.054.215	0	48.054.215	0	48.054.215
1051	20102983	SEKOLAH DASAR NEGERI KARET 04 JAKARTA	SD	40254111911	18.305.169	0	18.305.169	0	18.305.169	0	18.305.169
1052	20106054	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG ATAS 01 PAGI JAKARTA	SD	40254112038	2.507.971	0	2.507.971	0	2.507.971	0	2.507.971
1053	20106055	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG ATAS 02 JAKARTA	SD	40254111996	2.689.443	0	2.689.443	0	2.689.443	0	2.689.443
1054	20106056	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG ATAS 05 PAGI JAKARTA	SD	40254112011	1.110.216	0	1.110.216	0	1.110.216	0	1.110.216
1055	20106057	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG ATAS 11 JAKARTA	SD	40254112046	277.499	0	277.499	40.678	236.821	0	236.821
1056	20102376	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG ATAS 14 PAGI JAKARTA	SD	40254112054	23.242.281	0	23.242.281	0	23.242.281	0	23.242.281
1057	20106074	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MANGGIS 03 JAKARTA	SD	40254112071	2.215.279	0	2.215.279	0	2.215.279	0	2.215.279
1058	20105921	SEKOLAH DASAR NEGERI GUNTUR 01 PAGI JAKARTA	SD	40254111872	14.293	0	14.293	0	14.293	0	14.293
1059	20105922	SEKOLAH DASAR NEGERI GUNTUR 03 PAGI JAKARTA	SD	40254111881	1.272	0	1.272	0	1.272	0	1.272
1060	20102297	SEKOLAH DASAR NEGERI KUNINGAN TIMUR 01 JAKARTA	SD	40254111961	434.294	0	434.294	0	434.294	0	434.294
1061	20106032	SEKOLAH DASAR NEGERI MAMPANG PRAPATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110225	1.674.650	0	1.674.650	0	1.674.650	0	1.674.650
1062	20102269	SEKOLAH DASAR NEGERI MAMPANG PRAPATAN 02 PAGI JAKARTA	SD	40054110241	8.316.869	0	8.316.869	0	8.316.869	0	8.316.869
1063	20102268	SEKOLAH DASAR NEGERI MAMPANG PRAPATAN 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110250	328.948	0	328.948	0	328.948	0	328.948
1064	20106035	SEKOLAH DASAR NEGERI MAMPANG PRAPATAN 05 PAGI JAKARTA	SD	40054110233	15.415.862	0	15.415.862	0	15.415.862	0	15.415.862
1065	20103134	SEKOLAH DASAR NEGERI BANGKA 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110136	3.645.332	0	3.645.332	0	3.645.332	0	3.645.332
1066	20105813	SEKOLAH DASAR NEGERI BANGKA 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110144	6.284.790	0	6.284.790	0	6.284.790	0	6.284.790
1067	20103146	SEKOLAH DASAR NEGERI BANGKA 05 PAGI JAKARTA	SD	40054110152	12.409.960	0	12.409.960	0	12.409.960	0	12.409.960
1068	20103144	SEKOLAH DASAR NEGERI BANGKA 07 PAGI JAKARTA	SD	40054110179	2.661.405	0	2.661.405	0	2.661.405	0	2.661.405
1069	20106108	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 01 JAKARTA	SD	40054110306	3.129.175	0	3.129.175	0	3.129.175	0	3.129.175
1070	20106110	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110314	12.790.426	0	12.790.426	0	12.790.426	0	12.790.426
1071	20106113	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 05 PAGI JAKARTA	SD	40054110322	13.131.954	0	13.131.954	0	13.131.954	0	13.131.954
1072	20106114	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 07 JAKARTA	SD	40054110292	3.207.236	0	3.207.236	0	3.207.236	0	3.207.236
1073	20106115	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 08 JAKARTA	SD	40054110331	1.684.006	0	1.684.006	0	1.684.006	0	1.684.006
1074	20102362	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 09 JAKARTA	SD	40054110349	1.774.162	0	1.774.162	0	1.774.162	0	1.774.162
1075	20106117	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 11 PAGI JAKARTA	SD	40054110357	300.328	0	300.328	0	300.328	0	300.328
1076	20106118	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 12 PAGI JAKARTA	SD	40054110365	630.212	0	630.212	0	630.212	0	630.212
1077	20106119	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 14 PAGI JAKARTA	SD	40054110381	5.884.422	0	5.884.422	0	5.884.422	0	5.884.422
1078	20102203	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL PARANG 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110438	4.650.587	0	4.650.587	0	4.650.587	0	4.650.587
1079	20102202	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL PARANG 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110420	3.791.250	0	3.791.250	0	3.791.250	0	3.791.250
1080	20102201	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL PARANG 05 JAKARTA	SD	40054110446	4.536.467	0	4.536.467	0	4.536.467	0	4.536.467
1081	20102200	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL PARANG 06 PAGI JAKARTA	SD	40054110454	23.579.836	0	23.579.836	0	23.579.836	0	23.579.836
1082	20106014	SEKOLAH DASAR NEGERI KUNINGAN BARAT 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110195	10.823.020	0	10.823.020	0	10.823.020	0	10.823.020
1083	20106076	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MINGGU 01 PAGI JAKARTA	SD	40054111051	5.020.289	0	5.020.289	0	5.020.289	0	5.020.289
1084	20106077	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MINGGU 02 PAGI JAKARTA	SD	40054111019	6.368.374	0	6.368.374	0	6.368.374	0	6.368.374
1085	20106078	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MINGGU 03 PAGI JAKARTA	SD	40054111027	7.781.854	0	7.781.854	0	7.781.854	0	7.781.854
1086	20106079	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MINGGU 04 PAGI JAKARTA	SD	40054111035	4.258.822	0	4.258.822	0	4.258.822	0	4.258.822
1087	20105942	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPADANG 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110870	2.024.822	0	2.024.822	0	2.024.822	0	2.024.822
1088	20105944	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPADANG 05 PAGI JAKARTA	SD	40054110888	38.590.126	0	38.590.126	0	38.590.126	0	38.590.126
1089	20103104	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110811	13.998.942	0	13.998.942	0	13.998.942	0	13.998.942
1090	20103116	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK TIMUR 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110829	4.683.436	0	4.683.436	0	4.683.436	0	4.683.436
1091	20103118	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK TIMUR 05 PAGI JAKARTA	SD	40054110837	14.825.137	0	14.825.137	0	14.825.137	0	14.825.137
1092	20102134	SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN 01 JAKARTA	SD	40054111299	3.880.883	0	3.880.883	0	3.880.883	0	3.880.883
1093	20106172	SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN 05 PAGI JAKARTA	SD	40054111345	9.560.443	0	9.560.443	0	9.560.443	0	9.560.443
1094	20102145	SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN 07 PAGI JAKARTA	SD	40054111302	1.226.506	0	1.226.506	0	1.226.506	0	1.226.506
1095	20102146	SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN 08 PAGI JAKARTA	SD	40054111353	21.742.866	0	21.742.866	0	21.742.866	0	21.742.866

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1096	20102160	SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN 10 PAGI JAKARTA	SD	40054111311	1.963.613	0	1.963.613	0	1.963.613	0	1.963.613
1097	20106174	SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN 12 JAKARTA	SD	40054111370	14.289.975	0	14.289.975	0	14.289.975	0	14.289.975
1098	20106176	SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN 14 PAGI JAKARTA	SD	40054111337	3.199.008	0	3.199.008	0	3.199.008	0	3.199.008
1099	20106092	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	40054111191	9.055.708	0	9.055.708	0	9.055.708	0	9.055.708
1100	20102334	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 05 PAGI JAKARTA	SD	40054111205	14.172.149	0	14.172.149	0	14.172.149	0	14.172.149
1101	20106097	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 07 JAKARTA	SD	40054111264	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400
1102	20106099	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 11 PAGI JAKARTA	SD	40054111213	6.100.356	0	6.100.356	707.965	5.392.391	0	5.392.391
1103	20106102	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 15 PAGI JAKARTA	SD	40054111221	136.875	0	136.875	0	136.875	0	136.875
1104	20106103	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 17 PAGI JAKARTA	SD	40054111230	125.692	0	125.692	0	125.692	0	125.692
1105	20106105	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 20 JAKARTA	SD	40054111272	3.150.333	0	3.150.333	0	3.150.333	0	3.150.333
1106	20106107	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 22 PAGI JAKARTA	SD	40054111256	2.075.212	0	2.075.212	0	2.075.212	0	2.075.212
1107	20106081	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN BARAT 01 PAGI JAKARTA	SD	40054111108	10.010.136	0	10.010.136	0	10.010.136	0	10.010.136
1108	20106084	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN BARAT 05 PAGI JAKARTA	SD	40054111167	19.619	0	19.619	0	19.619	0	19.619
1109	20106085	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN BARAT 06 PAGI JAKARTA	SD	40054111116	339.590	0	339.590	0	339.590	0	339.590
1110	20106087	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN BARAT 08 PAGI JAKARTA	SD	40054111124	40.866.294	0	40.866.294	0	40.866.294	0	40.866.294
1111	20106088	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN BARAT 09 PAGI JAKARTA	SD	40054111132	3.876.865	0	3.876.865	41.250	3.835.615	0	3.835.615
1112	20106090	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN BARAT 11 PAGI JAKARTA	SD	40054111159	7.298.773	0	7.298.773	0	7.298.773	0	7.298.773
1113	20105987	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAGUSAN 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110951	2.583.395	0	2.583.395	0	2.583.395	0	2.583.395
1114	20102976	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAGUSAN 02 PAGI JAKARTA	SD	40054110969	67.375	0	67.375	0	67.375	0	67.375
1115	20102975	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAGUSAN 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110977	4.558.037	0	4.558.037	0	4.558.037	0	4.558.037
1116	20105989	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAGUSAN 04 PAGI JAKARTA	SD	40054110985	22.218.109	0	22.218.109	0	22.218.109	0	22.218.109
1117	20105975	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA UTARA 01 JAKARTA	SD	41154110018	75.404	0	75.404	0	75.404	0	75.404
1118	20105977	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA UTARA 03 JAKARTA	SD	41154110034	2.717.096	0	2.717.096	0	2.717.096	0	2.717.096
1119	20105980	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA UTARA 07 PAGI JAKARTA	SD	41154109982	4.345.250	0	4.345.250	0	4.345.250	0	4.345.250
1120	20105982	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA UTARA 09 PAGI JAKARTA	SD	41154110026	20.078.598	0	20.078.598	0	20.078.598	0	20.078.598
1121	20105984	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA UTARA 11 JAKARTA	SD	41154109991	2.022.211	0	2.022.211	0	2.022.211	0	2.022.211
1122	20105986	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA UTARA 13 PAGI JAKARTA	SD	41154110000	16.741.130	0	16.741.130	0	16.741.130	0	16.741.130
1123	20109299	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK PINANG 01 JAKARTA	SD	41154110069	19.572.178	0	19.572.178	0	19.572.178	0	19.572.178
1124	20102180	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK PINANG 05 JAKARTA	SD	41154110085	11.905.299	0	11.905.299	0	11.905.299	0	11.905.299
1125	20102144	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK PINANG 08 JAKARTA	SD	41154110093	10.876.301	0	10.876.301	0	10.876.301	0	10.876.301
1126	20102140	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK PINANG 10 JAKARTA	SD	41154110107	3.299.194	0	3.299.194	0	3.299.194	0	3.299.194
1127	20105870	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPULIR 01 JAKARTA	SD	41154109630	1.248.069	0	1.248.069	0	1.248.069	0	1.248.069
1128	20105872	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPULIR 03 JAKARTA	SD	41154109648	94.084.492	0	94.084.492	0	94.084.492	0	94.084.492
1129	20105874	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPULIR 05 JAKARTA	SD	41154109656	1.852.671	0	1.852.671	0	1.852.671	0	1.852.671
1130	20105876	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPULIR 07 JAKARTA	SD	41154109672	11.099.965	0	11.099.965	0	11.099.965	0	11.099.965
1131	20105879	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPULIR 11 JAKARTA	SD	41154109664	8.535.466	0	8.535.466	0	8.535.466	0	8.535.466
1132	20105907	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL UTARA 01 JAKARTA	SD	41154109796	2.151.776	0	2.151.776	0	2.151.776	0	2.151.776
1133	20105909	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL UTARA 03 PAGI JAKARTA	SD	41154109800	19.439.919	0	19.439.919	0	19.439.919	0	19.439.919
1134	20106270	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL UTARA 05 JAKARTA	SD	41154109818	2.451.154	0	2.451.154	0	2.451.154	0	2.451.154
1135	20105913	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL UTARA 09 JAKARTA	SD	41154109788	106.664.313	0	106.664.313	0	106.664.313	0	106.664.313
1136	20105916	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL UTARA 13 JAKARTA	SD	41154109834	8.242.609	0	8.242.609	0	8.242.609	0	8.242.609
1137	20105919	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL UTARA 16 JAKARTA	SD	41154109842	13.881.812	0	13.881.812	0	13.881.812	2.474.000	16.355.812
1138	20105898	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	41154109702	28.542.692	0	28.542.692	0	28.542.692	0	28.542.692
1139	20105900	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL SELATAN 05 JAKARTA	SD	41154109711	9.102.711	0	9.102.711	0	9.102.711	0	9.102.711
1140	20102742	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL SELATAN 08 JAKARTA	SD	41154109729	4.323.707	0	4.323.707	0	4.323.707	0	4.323.707
1141	20102921	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL SELATAN 09 PAGI JAKARTA	SD	41154109737	21.988.488	0	21.988.488	348.141	21.640.347	0	21.640.347
1142	20105904	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL SELATAN 13 PAGI JAKARTA	SD	41154109745	25.012.778	0	25.012.778	0	25.012.778	0	25.012.778
1143	20105906	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL SELATAN 17 PAGI JAKARTA	SD	41154109753	1.902.966	0	1.902.966	0	1.902.966	0	1.902.966
1144	20105961	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 03 JAKARTA	SD	41154109915	23.414.351	0	23.414.351	0	23.414.351	0	23.414.351
1145	20105962	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 05 PAGI JAKARTA	SD	41154109923	2.188.368	0	2.188.368	0	2.188.368	0	2.188.368
1146	20105964	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 09 PAGI JAKARTA	SD	41154109931	24.414.062	0	24.414.062	0	24.414.062	0	24.414.062
1147	20105966	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 11 PAGI JAKARTA	SD	41154109877	599.730	0	599.730	0	599.730	0	599.730
1148	20105967	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 12 PAGI JAKARTA	SD	41154109885	5.663.305	0	5.663.305	0	5.663.305	0	5.663.305
1149	20105969	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 14 PAGI JAKARTA	SD	41154109940	329.590	0	329.590	0	329.590	0	329.590
1150	20105970	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 16 PAGI JAKARTA	SD	41154109893	57.850	0	57.850	0	57.850	0	57.850

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1151	20105971	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 17 PAGI JAKARTA	SD	41154109907	599.172	0	599.172	0	599.172	0	599.172
1152	20105972	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 19 JAKARTA	SD	41154109958	98.021.626	0	98.021.626	0	98.021.626	0	98.021.626
1153	20105830	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK BARAT 01 PAGI JAKARTA	SD	40054108204	11.442.996	0	11.442.996	5.904.822	5.538.174	0	5.538.174
1154	20105831	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK BARAT 03 JAKARTA	SD	40054108174	11.176.007	0	11.176.007	0	11.176.007	0	11.176.007
1155	20103106	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK BARAT 04 JAKARTA	SD	40054108212	3.869.477	0	3.869.477	0	3.869.477	0	3.869.477
1156	20105833	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK BARAT 07 PAGI JAKARTA	SD	40054108191	5.522.057	0	5.522.057	0	5.522.057	0	5.522.057
1157	20105834	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK BARAT 08 JAKARTA	SD	40054108221	17.632.884	0	17.632.884	0	17.632.884	0	17.632.884
1158	20105837	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK BARAT 12 PAGI JAKARTA	SD	40054108239	16.576.450	0	16.576.450	0	16.576.450	0	16.576.450
1159	20105840	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK BARAT 15 JAKARTA	SD	40054108255	3.669.900	0	3.669.900	0	3.669.900	0	3.669.900
1160	20105841	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK BARAT 17 PAGI JAKARTA	SD	40054108263	5.187.744	0	5.187.744	486.720	4.701.024	0	4.701.024
1161	20106019	SEKOLAH DASAR NEGERI LEBAK BULUS 01 JAKARTA	SD	40054108425	39.721.672	0	39.721.672	0	39.721.672	0	39.721.672
1162	20106020	SEKOLAH DASAR NEGERI LEBAK BULUS 02 JAKARTA	SD	40054108417	8.414.933	0	8.414.933	0	8.414.933	0	8.414.933
1163	20106021	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK BARAT 03 JAKARTA	SD	40054108433	11.626.980	0	11.626.980	331.650	11.295.330	0	11.295.330
1164	20106022	SEKOLAH DASAR NEGERI LEBAK BULUS 04 JAKARTA	SD	40054108441	85.287.720	0	85.287.720	62.920	85.224.800	0	85.224.800
1165	20106025	SEKOLAH DASAR NEGERI LEBAK BULUS 07 JAKARTA	SD	40054108450	8.273.051	0	8.273.051	0	8.273.051	0	8.273.051
1166	20106145	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA	SD	40054108522	17.542.910	0	17.542.910	0	17.542.910	0	17.542.910
1167	20106146	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 02 JAKARTA	SD	40054108531	3.819.365	0	3.819.365	0	3.819.365	0	3.819.365
1168	20106147	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 03 JAKARTA	SD	40054108549	49.747.660	0	49.747.660	0	49.747.660	0	49.747.660
1169	20106150	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 07 JAKARTA	SD	40054108492	99.192.157	11.070.400	88.121.757	0	88.121.757	0	88.121.757
1170	20106154	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 11 JAKARTA	SD	40054108557	18.621.270	0	18.621.270	0	18.621.270	0	18.621.270
1171	20106155	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 12 JAKARTA	SD	40054108506	7.058.579	0	7.058.579	0	7.058.579	0	7.058.579
1172	20106156	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 13 JAKARTA	SD	40054108565	4.416.768	0	4.416.768	0	4.416.768	0	4.416.768
1173	20106157	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 14 JAKARTA	SD	40054108573	31.727.383	0	31.727.383	0	31.727.383	0	31.727.383
1174	20106159	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 16 JAKARTA	SD	40054108514	4.520.018	0	4.520.018	0	4.520.018	0	4.520.018
1175	20105884	SEKOLAH DASAR NEGERI GANDARIA SELATAN 01 JAKARTA	SD	40054108344	9.041.157	0	9.041.157	0	9.041.157	0	9.041.157
1176	20105885	SEKOLAH DASAR NEGERI GANDARIA SELATAN 03 JAKARTA	SD	40054108352	61.863.474	0	61.863.474	0	61.863.474	0	61.863.474
1177	20105851	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPETE SELATAN 01 JAKARTA	SD	40054108301	12.089.119	0	12.089.119	0	12.089.119	0	12.089.119
1178	20105853	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPETE SELATAN 03 JAKARTA	SD	40054108298	8.061.472	0	8.061.472	0	8.061.472	0	8.061.472
1179	20105855	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPETE SELATAN 05 JAKARTA	SD	40054108310	17.628.968	0	17.628.968	0	17.628.968	0	17.628.968
1180	20105923	SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG 01 JAKARTA	SD	40054109405	7.644.370	0	7.644.370	0	7.644.370	0	7.644.370
1181	20105927	SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG 05 JAKARTA	SD	40054109391	14.876.624	0	14.876.624	0	14.876.624	0	14.876.624
1182	20106004	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMAT PELA 01 PAGI JAKARTA	SD	40054109421	1.310.098	0	1.310.098	0	1.310.098	0	1.310.098
1183	20102322	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMAT PELA 07 JAKARTA	SD	40054109430	1.237.432	0	1.237.432	0	1.237.432	0	1.237.432
1184	20102321	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMAT PELA 09 JAKARTA	SD	40054109413	126.792	0	126.792	0	126.792	0	126.792
1185	20102248	SEKOLAH DASAR NEGERI SELONG 04 JAKARTA	SD	40054109618	57.491.432	0	57.491.432	0	57.491.432	0	57.491.432
1186	20102156	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BARAT 05 JAKARTA	SD	40054109570	5.213.605	0	5.213.605	0	5.213.605	0	5.213.605
1187	20106184	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BARAT 09 JAKARTA	SD	40054109588	9.885.463	0	9.885.463	0	9.885.463	0	9.885.463
1188	20106164	SEKOLAH DASAR NEGERI PULO 01 PAGI JAKARTA	SD	40054109511	3.491.159	0	3.491.159	0	3.491.159	0	3.491.159
1189	20109298	SEKOLAH DASAR NEGERI PULO 07 PAGI JAKARTA	SD	40054109545	3.898.595	0	3.898.595	0	3.898.595	0	3.898.595
1190	20105887	SEKOLAH DASAR NEGERI GANDARIA UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	40054109341	615.936	219.377	396.559	0	396.559	0	396.559
1191	20105891	SEKOLAH DASAR NEGERI GANDARIA UTARA 03 PAGI JAKARTA	SD	40054109359	8.259.049	0	8.259.049	0	8.259.049	0	8.259.049
1192	20105895	SEKOLAH DASAR NEGERI GANDARIA UTARA 08 PAGI JAKARTA	SD	40054109332	7.522.982	0	7.522.982	0	7.522.982	0	7.522.982
1193	20105896	SEKOLAH DASAR NEGERI GANDARIA UTARA 11 PAGI JAKARTA	SD	40054109367	3.367.630	0	3.367.630	0	3.367.630	0	3.367.630
1194	20103126	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPETE UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	40054109243	6.454.254	0	6.454.254	0	6.454.254	0	6.454.254
1195	20105860	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPETE UTARA 05 PAGI JAKARTA	SD	40054109235	312.536	0	312.536	0	312.536	0	312.536
1196	20105862	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPETE UTARA 09 PAGI JAKARTA	SD	40054109251	18.182.319	0	18.182.319	0	18.182.319	0	18.182.319
1197	20105866	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPETE UTARA 13 PAGI JAKARTA	SD	40054109294	4.827.254	0	4.827.254	0	4.827.254	0	4.827.254
1198	20105868	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPETE UTARA 15 PAGI JAKARTA	SD	40054109308	387.097	0	387.097	0	387.097	0	387.097
1199	20106067	SEKOLAH DASAR NEGERI PANCORAN 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110616	56.545.455	0	56.545.455	0	56.545.455	0	56.545.455
1200	20106069	SEKOLAH DASAR NEGERI PANCORAN 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110659	553.195	0	553.195	0	553.195	0	553.195
1201	20102396	SEKOLAH DASAR NEGERI PANCORAN 05 PAGI JAKARTA	SD	40054110667	481.493	0	481.493	0	481.493	0	481.493
1202	20102395	SEKOLAH DASAR NEGERI PANCORAN 07 PAGI JAKARTA	SD	40054110632	17.341.823	0	17.341.823	0	17.341.823	0	17.341.823
1203	20102394	SEKOLAH DASAR NEGERI PANCORAN 08 PAGI JAKARTA	SD	40054110641	485.532	0	485.532	0	485.532	0	485.532
1204	20102392	SEKOLAH DASAR NEGERI PANCORAN 10 PAGI JAKARTA	SD	40054110624	17.095.658	0	17.095.658	0	17.095.658	0	17.095.658
1205	20105945	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBATA 01 JAKARTA	SD	40054110560	6.518.595	0	6.518.595	0	6.518.595	0	6.518.595

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1206	20105946	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBATA 03 JAKARTA	SD	40054110578	4.719.028	0	4.719.028	0	4.719.028	0	4.719.028
1207	20105947	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBATA 04 JAKARTA	SD	40054110586	9.957.319	0	9.957.319	0	9.957.319	0	9.957.319
1208	20105949	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBATA 07 JAKARTA	SD	40054110594	1.510.527	0	1.510.527	0	1.510.527	0	1.510.527
1209	20105951	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBATA 11 JAKARTA	SD	40054110608	18.800.697	0	18.800.697	0	18.800.697	0	18.800.697
1210	20102152	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAJATI 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110721	3.474.170	0	3.474.170	0	3.474.170	0	3.474.170
1211	20102150	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAJATI 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110730	28.213.974	0	28.213.974	0	28.213.974	0	28.213.974
1212	20102149	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAJATI 05 PAGI JAKARTA	SD	40054110748	93.639.889	0	93.639.889	0	93.639.889	0	93.639.889
1213	20102148	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAJATI 06 PAGI JAKARTA	SD	40054110756	1.630.773	0	1.630.773	0	1.630.773	0	1.630.773
1214	20102161	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAJATI 07 PAGI JAKARTA	SD	40054110764	3.464.984	0	3.464.984	0	3.464.984	0	3.464.984
1215	20106183	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAJATI 08 PAGI JAKARTA	SD	40054110713	12.033.135	0	12.033.135	0	12.033.135	0	12.033.135
1216	20102944	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN TIGA 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110527	8.795.300	0	8.795.300	0	8.795.300	0	8.795.300
1217	20102943	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN TIGA 05 PAGI JAKARTA	SD	40054110489	29.225.670	0	29.225.670	0	29.225.670	0	29.225.670
1218	20102956	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN TIGA 07 JAKARTA	SD	40054110535	9.761.708	0	9.761.708	0	9.761.708	0	9.761.708
1219	20102958	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN TIGA 09 JAKARTA	SD	40054110497	70.517.933	0	70.517.933	0	70.517.933	0	70.517.933
1220	20105881	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN TIGA 13 PAGI JAKARTA	SD	40054110501	999.626	0	999.626	0	999.626	0	999.626
1221	20105882	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN TIGA 14 PAGI JAKARTA	SD	40054110519	4.074.421	0	4.074.421	0	4.074.421	0	4.074.421
1222	20102192	SEKOLAH DASAR NEGERI PENGADegan 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110675	13.604.967	0	13.604.967	0	13.604.967	0	13.604.967
1223	20102173	SEKOLAH DASAR NEGERI PENGADegan 07 PAGI JAKARTA	SD	40054110683	53.482.090	0	53.482.090	0	53.482.090	0	53.482.090
1224	20103112	SEKOLAH DASAR NEGERI CIKOKO 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110462	50.288.188	0	50.288.188	0	50.288.188	0	50.288.188
1225	20109302	SEKOLAH DASAR NEGERI CIKOKO 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110471	18.820.222	0	18.820.222	0	18.820.222	0	18.820.222
1226	20105929	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 01 JAKARTA	SD	40054108794	7.207.197	0	7.207.197	0	7.207.197	0	7.207.197
1227	20105930	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 02 JAKARTA	SD	40054108808	4.443.771	0	4.443.771	0	4.443.771	0	4.443.771
1228	20105931	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 03 JAKARTA	SD	40054108816	8.736.423	0	8.736.423	0	8.736.423	0	8.736.423
1229	20105932	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 04 JAKARTA	SD	40054108824	188.256	0	188.256	0	188.256	0	188.256
1230	20105933	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 05 JAKARTA	SD	40054108832	28.547.916	0	28.547.916	0	28.547.916	0	28.547.916
1231	20105934	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 06 JAKARTA	SD	40054108841	12.644.377	0	12.644.377	1.403.600	11.240.777	0	11.240.777
1232	20105935	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 07 JAKARTA	SD	40054108859	33.112.089	0	33.112.089	0	33.112.089	0	33.112.089
1233	20105937	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 09 JAKARTA	SD	40054108875	672.909	0	672.909	0	672.909	0	672.909
1234	20103022	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 10 JAKARTA	SD	40054108778	7.334.058	0	7.334.058	0	7.334.058	0	7.334.058
1235	20105938	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 11 JAKARTA	SD	40054108883	3.029.278	0	3.029.278	0	3.029.278	0	3.029.278
1236	20105939	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 12 JAKARTA	SD	40054108891	5.971.282	0	5.971.282	234.300	5.736.982	0	5.736.982
1237	20105940	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 13 JAKARTA	SD	40054108905	3.357.688	0	3.357.688	0	3.357.688	0	3.357.688
1238	20105941	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 14 JAKARTA	SD	40054108786	12.109.006	0	12.109.006	0	12.109.006	0	12.109.006
1239	20102247	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG SAWAH 01 PAGI JAKARTA	SD	40054109057	27.890.629	0	27.890.629	0	27.890.629	0	27.890.629
1240	20102246	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG SAWAH 04 PAGI JAKARTA	SD	40054109090	43.156.179	0	43.156.179	0	43.156.179	0	43.156.179
1241	20106193	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG SAWAH 07 JAKARTA	SD	40054109103	25.019.769	0	25.019.769	0	25.019.769	0	25.019.769
1242	20106195	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG SAWAH 11 PAGI JAKARTA	SD	40054109111	3.864.715	0	3.864.715	0	3.864.715	0	3.864.715
1243	20106196	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG SAWAH 12 PAGI JAKARTA	SD	40054109065	41.310.826	0	41.310.826	0	41.310.826	0	41.310.826
1244	20106199	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG SAWAH 15 PAGI JAKARTA	SD	40054109120	905.250	0	905.250	0	905.250	0	905.250
1245	20106201	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG SAWAH 17 PAGI JAKARTA	SD	40054109081	12.775.938	0	12.775.938	0	12.775.938	0	12.775.938
1246	20103151	SEKOLAH DASAR NEGERI CIGANJUR 01 PAGI JAKARTA	SD	40054108620	73.513.450	0	73.513.450	0	73.513.450	0	73.513.450
1247	20103133	SEKOLAH DASAR NEGERI CIGANJUR 02 PAGI JAKARTA	SD	40054108638	315.544	0	315.544	0	315.544	0	315.544
1248	20105828	SEKOLAH DASAR NEGERI CIGANJUR 04 PAGI JAKARTA	SD	40054108646	220.375.107	0	220.375.107	0	220.375.107	0	220.375.107
1249	20106026	SEKOLAH DASAR NEGERI LENTENG AGUNG 01 PAGI JAKARTA	SD	40054108999	892.515	0	892.515	0	892.515	0	892.515
1250	20102278	SEKOLAH DASAR NEGERI LENTENG AGUNG 03 JAKARTA	SD	40054108956	35.765.630	0	35.765.630	0	35.765.630	0	35.765.630
1251	20102276	SEKOLAH DASAR NEGERI LENTENG AGUNG 05 PAGI JAKARTA	SD	40054109006	58.433.547	0	58.433.547	0	58.433.547	0	58.433.547
1252	20106028	SEKOLAH DASAR NEGERI LENTENG AGUNG 06 JAKARTA	SD	40054108964	9.869.304	0	9.869.304	0	9.869.304	0	9.869.304
1253	20102275	SEKOLAH DASAR NEGERI LENTENG AGUNG 07 PAGI JAKARTA	SD	40054108972	14.053.113	0	14.053.113	0	14.053.113	0	14.053.113
1254	20106029	SEKOLAH DASAR NEGERI LENTENG AGUNG 09 JAKARTA	SD	40054108981	5.978.440	0	5.978.440	0	5.978.440	0	5.978.440
1255	20102271	SEKOLAH DASAR NEGERI LENTENG AGUNG 11 JAKARTA	SD	40054108913	5.463.063	0	5.463.063	0	5.463.063	0	5.463.063
1256	20106202	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG BARAT 01 PAGI JAKARTA	SD	40054109171	3.081.304	0	3.081.304	0	3.081.304	0	3.081.304
1257	20102239	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG BARAT 03 JAKARTA	SD	40054109189	1.161.039	0	1.161.039	0	1.161.039	0	1.161.039
1258	20102238	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG BARAT 04 PAGI JAKARTA	SD	40054109227	296.819	0	296.819	0	296.819	0	296.819
1259	20106203	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG BARAT 05 PAGI JAKARTA	SD	40054109197	2.380.168	0	2.380.168	0	2.380.168	0	2.380.168
1260	20102237	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG BARAT 07 JAKARTA	SD	40054109201	6.381.757	880.000	5.501.757	372.636	5.129.121	0	5.129.121

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1261	20102249	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG BARAT 09 PAGI JAKARTA	SD	40054109219	6.341.001	0	6.341.001	0	6.341.001	0	6.341.001
1262	20105846	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPEDAK 01 PAGI JAKARTA	SD	40054108689	121.244.779	0	121.244.779	0	121.244.779	0	121.244.779
1263	20105848	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPEDAK 03 PAGI JAKARTA	SD	40054108697	25.839.783	0	25.839.783	0	25.839.783	0	25.839.783
1264	20105849	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPEDAK 05 PAGI JAKARTA	SD	40054108701	98.091.393	0	98.091.393	0	98.091.393	0	98.091.393
1265	20106120	SEKOLAH DASAR NEGERI PESANGGRAHAN 01 JAKARTA	SD	41154111511	31.828.475	0	31.828.475	0	31.828.475	0	31.828.475
1266	20106121	SEKOLAH DASAR NEGERI PESANGGRAHAN 02 JAKARTA	SD	41154111529	33.387.847	0	33.387.847	0	33.387.847	0	33.387.847
1267	20106122	SEKOLAH DASAR NEGERI PESANGGRAHAN 03 JAKARTA	SD	41154111537	528.692	0	528.692	0	528.692	0	528.692
1268	20106124	SEKOLAH DASAR NEGERI PESANGGRAHAN 04 JAKARTA	SD	41154111553	37.155.801	0	37.155.801	465.037	36.690.764	0	36.690.764
1269	20106125	SEKOLAH DASAR NEGERI PESANGGRAHAN 05 JAKARTA	SD	41154111561	700.123	0	700.123	0	700.123	0	700.123
1270	20106129	SEKOLAH DASAR NEGERI PESANGGRAHAN 09 JAKARTA	SD	41154111545	15.813.099	0	15.813.099	0	15.813.099	0	15.813.099
1271	20106130	SEKOLAH DASAR NEGERI PESANGGRAHAN 10 JAKARTA	SD	41154111570	298.211	0	298.211	0	298.211	0	298.211
1272	20103143	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 01 JAKARTA	SD	41154111405	1.768.909	0	1.768.909	0	1.768.909	0	1.768.909
1273	20103142	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 02 JAKARTA	SD	41154111448	7.761.191	0	7.761.191	0	7.761.191	0	7.761.191
1274	20105814	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 03 JAKARTA	SD	41154111456	8.659.534	0	8.659.534	0	8.659.534	0	8.659.534
1275	20103140	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 04 JAKARTA	SD	41154111413	7.189.328	0	7.189.328	0	7.189.328	0	7.189.328
1276	20103139	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 05 JAKARTA	SD	41154111464	4.727.206	0	4.727.206	0	4.727.206	0	4.727.206
1277	20103137	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 08 JAKARTA	SD	41154111421	16.641.198	0	16.641.198	0	16.641.198	0	16.641.198
1278	20103136	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 09 JAKARTA	SD	41154111472	19.071.868	0	19.071.868	0	19.071.868	0	19.071.868
1279	20103149	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 12 JAKARTA	SD	41154111481	84.067.414	0	84.067.414	0	84.067.414	0	84.067.414
1280	20103159	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 14 JAKARTA	SD	41154111499	56.281.302	0	56.281.302	0	56.281.302	0	56.281.302
1281	20106139	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN UTARA 01 JAKARTA	SD	41154111723	19.220.602	0	19.220.602	0	19.220.602	0	19.220.602
1282	20102190	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN UTARA 02 JAKARTA	SD	41154111766	14.594.959	0	14.594.959	96.100	14.498.859	0	14.498.859
1283	20106140	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN UTARA 05 JAKARTA	SD	41154111774	40.881.336	0	40.881.336	0	40.881.336	0	40.881.336
1284	20106141	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN UTARA 06 JAKARTA	SD	41154111782	8.480.247	0	8.480.247	0	8.480.247	0	8.480.247
1285	20106142	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN UTARA 07 JAKARTA	SD	41154111791	2.914.154	0	2.914.154	0	2.914.154	0	2.914.154
1286	20106143	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN UTARA 08 JAKARTA	SD	41254111730	10.933.267	0	10.933.267	0	10.933.267	0	10.933.267
1287	20106144	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN UTARA 09 JAKARTA	SD	41154111740	28.953.278	0	28.953.278	3.556.240	25.397.038	0	25.397.038
1288	20102184	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN UTARA 10 JAKARTA	SD	41154111758	13.384.924	0	13.384.924	0	13.384.924	0	13.384.924
1289	20106131	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN SELATAN 01 JAKARTA	SD	41154111642	18.439.784	0	18.439.784	0	18.439.784	0	18.439.784
1290	20106132	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN SELATAN 02 JAKARTA	SD	41154111651	17.212.885	0	17.212.885	0	17.212.885	0	17.212.885
1291	20106133	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN SELATAN 03 JAKARTA	SD	41154111669	5.630.170	0	5.630.170	0	5.630.170	0	5.630.170
1292	20106135	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN SELATAN 05 JAKARTA	SD	41154111677	26.454.490	0	26.454.490	0	26.454.490	0	26.454.490
1293	20102196	SEKOLAH DASAR NEGERI ULUJAMI 01 JAKARTA	SD	41154111812	60.408.329	0	60.408.329	0	60.408.329	0	60.408.329
1294	20102195	SEKOLAH DASAR NEGERI ULUJAMI 02 JAKARTA	SD	41154111821	9.338.815	0	9.338.815	0	9.338.815	0	9.338.815
1295	20102207	SEKOLAH DASAR NEGERI ULUJAMI 04 JAKARTA	SD	41154111839	44.331.911	0	44.331.911	0	44.331.911	0	44.331.911
1296	20102208	SEKOLAH DASAR NEGERI ULUJAMI 06 JAKARTA	SD	41154111847	18.390.407	0	18.390.407	0	18.390.407	0	18.390.407
1297	20109029	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN BARU 01 JAKARTA	SD	50054117170	29.858.810	0	29.858.810	0	29.858.810	5.050	29.863.860
1298	20109164	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN BARU 05 PAGI JAKARTA	SD	50054117188	1.553.416	0	1.553.416	0	1.553.416	0	1.553.416
1299	20108309	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN BARU 07 PAGI JAKARTA	SD	50054117196	139.402.588	0	139.402.588	0	139.402.588	0	139.402.588
1300	20108311	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN BARU 09 PAGI JAKARTA	SD	50054117200	58.064.226	0	58.064.226	0	58.064.226	0	58.064.226
1301	20109031	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN BARU 13 PAGI JAKARTA	SD	50054117234	309.897	0	309.897	0	309.897	0	309.897
1302	20108844	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU UTARA 01 JAKARTA	SD	50054117455	62.901.449	0	62.901.449	0	62.901.449	0	62.901.449
1303	20108411	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU UTARA 07 PAGI JAKARTA	SD	50054117463	464.882	0	464.882	0	464.882	0	464.882
1304	20108849	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU UTARA 11 PAGI JAKARTA	SD	50054117447	61.154.649	0	61.154.649	0	61.154.649	3.514.873	64.669.522
1305	20108316	SEKOLAH DASAR NEGERI KAYUMANIS 01 PAGI JAKARTA	SD	50054116998	8.041.646	0	8.041.646	393.374	7.648.272	0	7.648.272
1306	20108302	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERIAM 01 PAGI JAKARTA	SD	50054117111	65.514.415	0	65.514.415	0	65.514.415	0	65.514.415
1307	20108288	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON MANGGIS 01 PAGI JAKARTA	SD	50054117072	18.430.297	0	18.430.297	0	18.430.297	0	18.430.297
1308	20108344	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON MANGGIS 08 PAGI JAKARTA	SD	50054117081	1.008.033	0	1.008.033	0	1.008.033	0	1.008.033
1309	20108298	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON MANGGIS 11 PAGI JAKARTA	SD	50054117064	7.565.978	0	7.565.978	0	7.565.978	0	7.565.978
1310	20108378	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	50054117323	108.279.598	0	108.279.598	0	108.279.598	0	108.279.598
1311	20108382	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU SELATAN 05 JAKARTA	SD	50054117358	15.392.427	0	15.392.427	0	15.392.427	0	15.392.427
1312	20108414	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU SELATAN 09 PAGI JAKARTA	SD	50054117269	320.371	0	320.371	0	320.371	0	320.371
1313	20108416	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU SELATAN 11 PAGI JAKARTA	SD	50054117366	12.707.207	0	12.707.207	0	12.707.207	0	12.707.207
1314	20108418	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU SELATAN 13 PAGI JAKARTA	SD	50054117277	13.316.053	0	13.316.053	0	13.316.053	0	13.316.053
1315	20108419	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU SELATAN 14 PAGI JAKARTA	SD	50054117374	51.791.441	0	51.791.441	0	51.791.441	0	51.791.441

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1316	20103439	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU SELATAN 17 PAGI JAKARTA	SD	50054117382	1.116.278	0	1.116.278	0	1.116.278	0	1.116.278
1317	20103419	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU SELATAN 18 PAGI JAKARTA	SD	50054117293	33.531.554	0	33.531.554	0	33.531.554	0	33.531.554
1318	20103418	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU SELATAN 20 PAGI JAKARTA	SD	50054117404	20.463.792	0	20.463.792	0	20.463.792	0	20.463.792
1319	20108422	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU SELATAN 21 JAKARTA	SD	50054117412	8.098.800	0	8.098.800	0	8.098.800	0	8.098.800
1320	20109169	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU SELATAN 27 PAGI JAKARTA	SD	50054117315	12.153.220	0	12.153.220	668.883	11.484.337	0	11.484.337
1321	20103396	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGADUNG 01 JAKARTA	SD	50154118379	14.802.238	0	14.802.238	0	14.802.238	0	14.802.238
1322	20103394	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGADUNG 03 JAKARTA	SD	50154118361	29.015.750	0	29.015.750	0	29.015.750	0	29.015.750
1323	20103392	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGADUNG 05 JAKARTA	SD	50154118387	4.158.587	0	4.158.587	0	4.158.587	0	4.158.587
1324	20103391	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGADUNG 07 JAKARTA	SD	50154118395	14.257.279	0	14.257.279	0	14.257.279	0	14.257.279
1325	20103794	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	50154118280	3.950.908	0	3.950.908	0	3.950.908	0	3.950.908
1326	20103380	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN TIMUR 05 PAGI JAKARTA	SD	50154118298	12.198.703	0	12.198.703	0	12.198.703	0	12.198.703
1327	20103377	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN TIMUR 10 PAGI JAKARTA	SD	50154118301	2.486.402	0	2.486.402	0	2.486.402	0	2.486.402
1328	20103376	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN TIMUR 11 JAKARTA	SD	50154118310	19.806.588	0	19.806.588	0	19.806.588	0	19.806.588
1329	20103374	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN TIMUR 13 JAKARTA	SD	50154118328	85.676.102	0	85.676.102	0	85.676.102	0	85.676.102
1330	20103371	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN TIMUR 18 JAKARTA	SD	50154118336	249.763.333	0	249.763.333	0	249.763.333	0	249.763.333
1331	20108545	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG 01 PAGI JAKARTA	SD	50154117976	15.595.968	0	15.595.968	0	15.595.968	0	15.595.968
1332	20104337	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG 03 PAGI JAKARTA	SD	50154117984	64.324.060	0	64.324.060	0	64.324.060	0	64.324.060
1333	20104335	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG 05 PAGI JAKARTA	SD	50154117992	18.325.270	0	18.325.270	0	18.325.270	0	18.325.270
1334	20104138	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 01 JAKARTA	SD	50154118140	3.901.324	0	3.901.324	0	3.901.324	0	3.901.324
1335	20104116	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 03 PAGI JAKARTA	SD	50154118158	12.545.648	0	12.545.648	0	12.545.648	0	12.545.648
1336	20104114	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 05 JAKARTA	SD	50154118166	31.549.554	0	31.549.554	0	31.549.554	0	31.549.554
1337	20104113	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 06 JAKARTA	SD	50154118174	57.745.785	0	57.745.785	0	57.745.785	0	57.745.785
1338	20104112	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 07 JAKARTA	SD	50154118123	13.263.524	0	13.263.524	0	13.263.524	0	13.263.524
1339	20104108	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 11 PAGI JAKARTA	SD	50154118131	52.757.628	0	52.757.628	0	52.757.628	0	52.757.628
1340	20104106	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 14 PAGI JAKARTA	SD	50154118182	15.597.056	0	15.597.056	0	15.597.056	0	15.597.056
1341	20104105	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 15 PAGI JAKARTA	SD	50154118191	1.628.148	0	1.628.148	0	1.628.148	0	1.628.148
1342	20103356	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAMANGUN 01 JAKARTA	SD	50154118441	30.921.400	0	30.921.400	0	30.921.400	0	30.921.400
1343	20103354	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAMANGUN 02 JAKARTA	SD	50154118450	13.678.681	0	13.678.681	0	13.678.681	0	13.678.681
1344	69862980	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAMANGUN 07 PAGI JAKARTA	SD	50154118425	20.845.487	0	20.845.487	2.886.785	17.958.702	0	17.958.702
1345	20103348	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAMANGUN 09 JAKARTA	SD	50154118433	23.833.826	0	23.833.826	0	23.833.826	0	23.833.826
1346	20109221	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAMANGUN 12 PAGI JAKARTA	SD	50054118478	13.001.581	0	13.001.581	0	13.001.581	0	13.001.581
1347	20109170	SEKOLAH DASAR NEGERI KAYU PUTIH 01 PAGI JAKARTA	SD	50154118212	1.452.724	0	1.452.724	0	1.452.724	0	1.452.724
1348	20104104	SEKOLAH DASAR NEGERI KAYU PUTIH 03 JAKARTA	SD	50154118221	136.750	0	136.750	0	136.750	0	136.750
1349	20104118	SEKOLAH DASAR NEGERI KAYU PUTIH 08 PAGI JAKARTA	SD	50154118239	52.544	0	52.544	0	52.544	0	52.544
1350	20104119	SEKOLAH DASAR NEGERI KAYU PUTIH 09 PAGI JAKARTA	SD	50154118247	4.208.358	0	4.208.358	0	4.208.358	0	4.208.358
1351	20104156	SEKOLAH DASAR NEGERI JATI 01 PAGI JAKARTA	SD	50154118051	23.039.016	0	23.039.016	0	23.039.016	0	23.039.016
1352	20104157	SEKOLAH DASAR NEGERI JATI 03 JAKARTA	SD	50154118085	26.882.464	0	26.882.464	0	26.882.464	0	26.882.464
1353	20104174	SEKOLAH DASAR NEGERI JATI 05 PAGI JAKARTA	SD	50154118069	2.429.328	0	2.429.328	0	2.429.328	0	2.429.328
1354	20104173	SEKOLAH DASAR NEGERI JATI 06 JAKARTA	SD	50154118093	29.733.414	0	29.733.414	0	29.733.414	0	29.733.414
1355	20104172	SEKOLAH DASAR NEGERI JATI 07 JAKARTA	SD	50154118077	3.052.269	0	3.052.269	0	3.052.269	0	3.052.269
1356	20108574	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMPUNG MELAYU 01 PAGI JAKARTA	SD	51154115831	26.998.328	0	26.998.328	5.311.086	21.687.242	0	21.687.242
1357	20108715	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMPUNG MELAYU 02 PETANG JAKARTA	SD	51154115849	879.791	0	879.791	0	879.791	0	879.791
1358	20108976	SEKOLAH DASAR NEGERI BALIMESTER 06 PAGI JAKARTA	SD	51154115181	8.954.764	0	8.954.764	0	8.954.764	0	8.954.764
1359	20109019	SEKOLAH DASAR NEGERI BIDARACINA 01 JAKARTA	SD	51154115237	1.615.748	0	1.615.748	48.096	1.567.652	0	1.567.652
1360	20108387	SEKOLAH DASAR NEGERI BIDARACINA 03 JAKARTA	SD	51154115245	5.597.150	2.000.000	3.597.150	0	3.597.150	0	3.597.150
1361	20108389	SEKOLAH DASAR NEGERI BIDARACINA 05 JAKARTA	SD	51154115253	318.158	0	318.158	0	318.158	0	318.158
1362	20108665	SEKOLAH DASAR NEGERI BALIMESTER 01 JAKARTA	SD	51154115172	17.506.332	0	17.506.332	0	17.506.332	0	17.506.332
1363	20108668	SEKOLAH DASAR NEGERI BALIMESTER 03 PETANG JAKARTA	SD	51154115164	2.939.158	0	2.939.158	0	2.939.158	0	2.939.158
1364	20108657	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUNGA 01 JAKARTA	SD	51154115881	6.354.305	0	6.354.305	0	6.354.305	0	6.354.305
1365	20108659	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUNGA 11 PAGI JAKARTA	SD	51154115890	11.283.115	0	11.283.115	0	11.283.115	0	11.283.115
1366	20108660	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUNGA 12 JAKARTA	SD	51154115903	13.284.725	0	13.284.725	0	13.284.725	0	13.284.725
1367	20108463	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 01 PAGI JAKARTA	SD	51154115601	3.996.604	0	3.996.604	0	3.996.604	2.900	3.999.504
1368	20108521	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 02 PAGI JAKARTA	SD	51154115610	4.993.350	0	4.993.350	0	4.993.350	0	4.993.350
1369	20108523	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 04 JAKARTA	SD	51154115628	17.953.460	0	17.953.460	0	17.953.460	0	17.953.460
1370	20108524	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 05 PAGI JAKARTA	SD	51154115636	25.652	0	25.652	0	25.652	0	25.652

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1371	20108526	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 07 JAKARTA	SD	51154115652	255.281	0	255.281	0	255.281	0	255.281
1372	20108528	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 09 PAGI JAKARTA	SD	51154115661	5.012.490	0	5.012.490	0	5.012.490	0	5.012.490
1373	20108529	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 01 JAKARTA	SD	51154115679	8.429	0	8.429	0	8.429	0	8.429
1374	20108530	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 02 PAGI JAKARTA	SD	50054115681	3.630.630	0	3.630.630	0	3.630.630	702.294	4.332.924
1375	20108532	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 04 JAKARTA	SD	51154115741	150.176	0	150.176	0	150.176	0	150.176
1376	20108533	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 05 PAGI JAKARTA	SD	50054115690	2.027.264	0	2.027.264	0	2.027.264	0	2.027.264
1377	20108534	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 06 JAKARTA	SD	51154115709	24.609.343	0	24.609.343	0	24.609.343	0	24.609.343
1378	20108535	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 07 JAKARTA	SD	51154115750	1.474.557	0	1.474.557	0	1.474.557	0	1.474.557
1379	20108538	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 12 JAKARTA	SD	51154115717	52.676	0	52.676	0	52.676	0	52.676
1380	20108540	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 14 JAKARTA	SD	51154115768	100.711	0	100.711	0	100.711	0	100.711
1381	20108541	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 15 PAGI JAKARTA	SD	51154115776	29.787.577	0	29.787.577	460.578	29.326.999	0	29.326.999
1382	20108547	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 16 PAGI JAKARTA	SD	51154115784	41.343	0	41.343	0	41.343	0	41.343
1383	20108548	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 17 PAGI JAKARTA	SD	51154115792	652.728	0	652.728	0	652.728	0	652.728
1384	20108690	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 18 PAGI JAKARTA	SD	51154115725	207.752	0	207.752	0	207.752	0	207.752
1385	20108550	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 19 PAGI JAKARTA	SD	51154115806	319.305	0	319.305	0	319.305	0	319.305
1386	20108551	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 20 PAGI JAKARTA	SD	51154115814	1.702	0	1.702	0	1.702	0	1.702
1387	20108393	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	51154115342	3.775.258	0	3.775.258	0	3.775.258	0	3.775.258
1388	20108400	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 02 PAGI JAKARTA	SD	51154115351	6.447.930	0	6.447.930	0	6.447.930	0	6.447.930
1389	20109214	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 03 PAGI JAKARTA	SD	51154115288	5.302.558	0	5.302.558	0	5.302.558	0	5.302.558
1390	20108401	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 04 JAKARTA	SD	51154115369	4.622.602	0	4.622.602	0	4.622.602	0	4.622.602
1391	20108402	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 05 JAKARTA	SD	51154115377	2.584	0	2.584	0	2.584	0	2.584
1392	20108390	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 07 JAKARTA	SD	51154115296	289.350	0	289.350	0	289.350	0	289.350
1393	20108440	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 08 JAKARTA	SD	51154115300	84.096	0	84.096	0	84.096	0	84.096
1394	20109021	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 12 PAGI JAKARTA	SD	51154115318	98.190	70.000	28.190	0	28.190	0	28.190
1395	20108442	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 13 PAGI JAKARTA	SD	51154115326	255.246	0	255.246	0	255.246	0	255.246
1396	20108445	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 15 PAGI JAKARTA	SD	51154115385	2.617.375	0	2.617.375	0	2.617.375	0	2.617.375
1397	20108446	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 16 JAKARTA	SD	51154115393	5.738.304	0	5.738.304	0	5.738.304	0	5.738.304
1398	20108447	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 17 JAKARTA	SD	51154115407	173.383	0	173.383	134.710	38.673	0	38.673
1399	20108449	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 19 PAGI JAKARTA	SD	51154115334	559.794	0	559.794	0	559.794	0	559.794
1400	20108450	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 20 JAKARTA	SD	51154115423	207.823	0	207.823	0	207.823	0	207.823
1401	20108451	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	51154115440	44.322.869	50.000	44.322.869	0	44.322.869	0	44.322.869
1402	20108453	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 03 JAKARTA	SD	51154115466	84.065	0	84.065	0	84.065	0	84.065
1403	20108455	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 05 PAGI JAKARTA	SD	51154115491	165.799	36.000	129.799	1.218.703	-1.088.904	1.223.975	135.071
1404	20108459	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 08 JAKARTA	SD	51154115512	17.547.968	0	17.547.968	0	17.547.968	0	17.547.968
1405	20108460	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 09 PETANG JAKARTA	SD	51154115521	4.403.487	0	4.403.487	0	4.403.487	0	4.403.487
1406	20108461	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 10 PAGI JAKARTA	SD	51154115539	4.773	0	4.773	0	4.773	0	4.773
1407	20108462	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 11 PAGI JAKARTA	SD	51154115547	7.895	0	7.895	0	7.895	0	7.895
1408	20104228	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 01 PAGI JAKARTA	SD	51354116361	48.250.024	0	48.250.024	0	48.250.024	0	48.250.024
1409	20104227	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 02 PAGI JAKARTA	SD	51154116373	3.585.227	0	3.585.227	0	3.585.227	0	3.585.227
1410	20104226	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 03 JAKARTA	SD	51354116388	44.832.295	0	44.832.295	0	44.832.295	0	44.832.295
1411	20104221	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 07 JAKARTA	SD	51354116396	6.494.884	0	6.494.884	0	6.494.884	0	6.494.884
1412	20104218	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 11 JAKARTA	SD	51354116400	1.507.992	0	1.507.992	0	1.507.992	0	1.507.992
1413	20104232	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 16 PAGI JAKARTA	SD	51154116411	6.091.459	0	6.091.459	0	6.091.459	0	6.091.459
1414	20104233	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 18 PAGI JAKARTA	SD	51154116420	251.751	0	251.751	0	251.751	0	251.751
1415	20104235	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 19 PAGI JAKARTA	SD	51154116438	12.611.205	0	12.611.205	0	12.611.205	0	12.611.205
1416	20104248	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 24 JAKARTA	SD	51154116446	7.593.675	0	7.593.675	0	7.593.675	0	7.593.675
1417	20104247	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 25 PAGI JAKARTA	SD	51154116454	18.610.064	0	18.610.064	0	18.610.064	0	18.610.064
1418	20103441	SEKOLAH DASAR NEGERI TENGAH 01 PAGI JAKARTA	SD	51154116292	14.640.108	0	14.640.108	0	14.640.108	0	14.640.108
1419	20103469	SEKOLAH DASAR NEGERI TENGAH 03 PAGI JAKARTA	SD	51154116306	47.505.129	0	47.505.129	0	47.505.129	0	47.505.129
1420	20103486	SEKOLAH DASAR NEGERI TENGAH 05 PAGI JAKARTA	SD	51154116314	33.567.537	0	33.567.537	0	33.567.537	0	33.567.537
1421	20103485	SEKOLAH DASAR NEGERI TENGAH 06 PAGI JAKARTA	SD	51154116322	12.422.392	0	12.422.392	0	12.422.392	0	12.422.392
1422	20103484	SEKOLAH DASAR NEGERI TENGAH 07 PAGI JAKARTA	SD	51154116331	61.005.062	0	61.005.062	0	61.005.062	0	61.005.062
1423	20103483	SEKOLAH DASAR NEGERI TENGAH 08 PAGI JAKARTA	SD	51154116349	28.876.158	0	28.876.158	0	28.876.158	0	28.876.158
1424	20104151	SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUH 01 JAKARTA	SD	51154116233	73.730.976	0	73.730.976	0	73.730.976	0	73.730.976
1425	20104148	SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUH 04 JAKARTA	SD	51354116248	9.784.920	0	9.784.920	0	9.784.920	0	9.784.920

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1426	20104147	SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUH 05 PAGI JAKARTA	SD	51154116250	1.558.874	0	1.558.874	0	1.558.874	0	1.558.874
1427	20104144	SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUH 08 PAGI JAKARTA	SD	51154116268	741.602	0	741.602	0	741.602	0	741.602
1428	20104143	SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUH 09 PAGI JAKARTA	SD	51354116272	8.891.540	3.360.282	5.531.258	0	5.531.258	0	5.531.258
1429	20104270	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 01 PAGI JAKARTA	SD	51154115962	27.070.454	0	27.070.454	0	27.070.454	0	27.070.454
1430	20104269	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 02 JAKARTA	SD	51154115971	25.768.071	0	25.768.071	0	25.768.071	0	25.768.071
1431	20104266	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 05 PAGI JAKARTA	SD	51154115989	37.304.843	0	37.304.843	0	37.304.843	0	37.304.843
1432	20104265	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 06 JAKARTA	SD	51154115997	167.248.729	0	167.248.729	0	167.248.729	0	167.248.729
1433	20104264	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 07 PAGI JAKARTA	SD	51154116004	14.183.058	0	14.183.058	0	14.183.058	0	14.183.058
1434	20104263	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 08 PAGI JAKARTA	SD	51154116012	13.653.931	0	13.653.931	0	13.653.931	0	13.653.931
1435	20109225	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 09 PAGI JAKARTA	SD	51154116021	44.196.216	0	44.196.216	0	44.196.216	0	44.196.216
1436	20108788	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 10 PAGI JAKARTA	SD	51154116039	68.329.158	0	68.329.158	0	68.329.158	0	68.329.158
1437	20104262	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 11 PAGI JAKARTA	SD	51154116047	15.402.659	0	15.402.659	0	15.402.659	0	15.402.659
1438	20104261	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 12 PAGI JAKARTA	SD	51154116055	8.558.919	0	8.558.919	0	8.558.919	0	8.558.919
1439	20104260	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 13 PAGI JAKARTA	SD	51154116063	13.673.707	0	13.673.707	0	13.673.707	0	13.673.707
1440	20104316	SEKOLAH DASAR NEGERI BALEKAMBANG 01 PAGI JAKARTA	SD	51154115920	42.613.539	4.556.772	38.056.767	0	38.056.767	0	38.056.767
1441	20104315	SEKOLAH DASAR NEGERI BALEKAMBANG 03 PAGI JAKARTA	SD	51354115918	56.576.609	0	56.576.609	0	56.576.609	0	56.576.609
1442	20104391	SEKOLAH DASAR NEGERI CILILITAN 01 PAGI JAKARTA	SD	51354116183	73.829.591	0	73.829.591	0	73.829.591	0	73.829.591
1443	20104390	SEKOLAH DASAR NEGERI CILILITAN 02 JAKARTA	SD	51354116191	15.908.408	0	15.908.408	0	15.908.408	0	15.908.408
1444	20104389	SEKOLAH DASAR NEGERI CILILITAN 03 PAGI JAKARTA	SD	51154116209	5.056.570	0	5.056.570	0	5.056.570	0	5.056.570
1445	20104383	SEKOLAH DASAR NEGERI CAWANG 01 PAGI JAKARTA	SD	51354116094	733.970	0	733.970	0	733.970	0	733.970
1446	20104380	SEKOLAH DASAR NEGERI CAWANG 04 JAKARTA	SD	51154116101	86.913.810	0	86.913.810	0	86.913.810	0	86.913.810
1447	20104377	SEKOLAH DASAR NEGERI CAWANG 07 PAGI JAKARTA	SD	51154116110	16.717.715	0	16.717.715	0	16.717.715	0	16.717.715
1448	20104375	SEKOLAH DASAR NEGERI CAWANG 09 JAKARTA	SD	51154116128	30.475.800	0	30.475.800	0	30.475.800	0	30.475.800
1449	20104372	SEKOLAH DASAR NEGERI CAWANG 12 PAGI JAKARTA	SD	51154116136	100.312	0	100.312	0	100.312	0	100.312
1450	20108834	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 01 JAKARTA	SD	51154117868	1.484.548	0	1.484.548	0	1.484.548	0	1.484.548
1451	20108836	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 03 PAGI JAKARTA	SD	51154117876	3.672.101	0	3.672.101	0	3.672.101	0	3.672.101
1452	20108838	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 05 JAKARTA	SD	51154117884	9.088.412	0	9.088.412	0	9.088.412	0	9.088.412
1453	20108839	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 07 PAGI JAKARTA	SD	51154117892	17.854.578	0	17.854.578	0	17.854.578	0	17.854.578
1454	20108981	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 09 PAGI JAKARTA	SD	51154117906	19.327.224	0	19.327.224	0	19.327.224	0	19.327.224
1455	20108841	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 10 PAGI JAKARTA	SD	51154117914	14.054.481	0	14.054.481	0	14.054.481	0	14.054.481
1456	20108842	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 11 PAGI JAKARTA	SD	51154117922	18.640.199	0	18.640.199	0	18.640.199	0	18.640.199
1457	20108829	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 12 JAKARTA	SD	51154117931	39.840.035	0	39.840.035	0	39.840.035	0	39.840.035
1458	20108830	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 15 PAGI JAKARTA	SD	51154117949	15.921.539	0	15.921.539	0	15.921.539	0	15.921.539
1459	20108831	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 16 PAGI JAKARTA	SD	51154117957	1.526.337	0	1.526.337	0	1.526.337	0	1.526.337
1460	20108833	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 18 PAGI JAKARTA	SD	51154117965	5.991.918	5.000	5.986.918	0	5.986.918	0	5.986.918
1461	20108967	SEKOLAH DASAR NEGERI KALISARI 01 PAGI JAKARTA	SD	51154117809	23.722.331	0	23.722.331	0	23.722.331	0	23.722.331
1462	20108710	SEKOLAH DASAR NEGERI KALISARI 02 PAGI JAKARTA	SD	51154117817	14.353.390	0	14.353.390	45.126	14.308.264	0	14.308.264
1463	20108826	SEKOLAH DASAR NEGERI KALISARI 03 PAGI JAKARTA	SD	51154117825	26.234.930	0	26.234.930	0	26.234.930	0	26.234.930
1464	20108711	SEKOLAH DASAR NEGERI KALISARI 05 JAKARTA	SD	51154117833	153.132.504	0	153.132.504	0	153.132.504	0	153.132.504
1465	20108989	SEKOLAH DASAR NEGERI BARU 01 PAGI JAKARTA	SD	51154117523	11.433	0	11.433	0	11.433	0	11.433
1466	20108997	SEKOLAH DASAR NEGERI BARU 02 PAGI JAKARTA	SD	51154117531	3.725.648	0	3.725.648	0	3.725.648	0	3.725.648
1467	20108990	SEKOLAH DASAR NEGERI BARU 03 PAGI JAKARTA	SD	51154117540	6.806.123	0	6.806.123	0	6.806.123	0	6.806.123
1468	20108812	SEKOLAH DASAR NEGERI BARU 05 PAGI JAKARTA	SD	51154117558	11.937.392	0	11.937.392	0	11.937.392	0	11.937.392
1469	20108813	SEKOLAH DASAR NEGERI BARU 06 PAGI JAKARTA	SD	51154117566	250.302	0	250.302	0	250.302	0	250.302
1470	20108670	SEKOLAH DASAR NEGERI BARU 07 PAGI JAKARTA	SD	51154117574	663.619	0	663.619	0	663.619	0	663.619
1471	20109093	SEKOLAH DASAR NEGERI BARU 08PAGI JAKARTA	SD	51154117582	62.661.624	0	62.661.624	0	62.661.624	0	62.661.624
1472	20108814	SEKOLAH DASAR NEGERI CIJANTUNG 01 PAGI JAKARTA	SD	51154117591	4.241.076	0	4.241.076	0	4.241.076	0	4.241.076
1473	20109179	SEKOLAH DASAR NEGERI CIJANTUNG 02PAGI JAKARTA	SD	51154117604	6.750.321	0	6.750.321	0	6.750.321	0	6.750.321
1474	20108815	SEKOLAH DASAR NEGERI CIJANTUNG 03 PAGI JAKARTA	SD	51154117612	2.093.791	0	2.093.791	0	2.093.791	0	2.093.791
1475	20108816	SEKOLAH DASAR NEGERI CIJANTUNG 05 PAGI JAKARTA	SD	51154117621	1.438.216	0	1.438.216	0	1.438.216	0	1.438.216
1476	20108817	SEKOLAH DASAR NEGERI CIJANTUNG 06 PAGI JAKARTA	SD	51154117639	11.256.323	0	11.256.323	0	11.256.323	0	11.256.323
1477	20109262	SEKOLAH DASAR NEGERI CIJANTUNG 07 PAGI JAKARTA	SD	51154117647	4.123.217	0	4.123.217	0	4.123.217	0	4.123.217
1478	20108821	SEKOLAH DASAR NEGERI GEDONG 01 JAKARTA	SD	51154117701	21.388.499	0	21.388.499	0	21.388.499	0	21.388.499
1479	20109110	SEKOLAH DASAR NEGERI GEDONG 03 JAKARTA	SD	51154117710	11.278.284	0	11.278.284	0	11.278.284	0	11.278.284
1480	20108822	SEKOLAH DASAR NEGERI GEDONG 05 JAKARTA	SD	51154117728	5.155.452	0	5.155.452	0	5.155.452	0	5.155.452

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1481	20109024	SEKOLAH DASAR NEGERI GEDONG 08 PAGI JAKARTA	SD	51154117736	7.399.203	0	7.399.203	0	7.399.203	0	7.399.203
1482	20108824	SEKOLAH DASAR NEGERI GEDONG 10 PAGI JAKARTA	SD	51154117744	19.576.652	0	19.576.652	0	19.576.652	0	19.576.652
1483	20108996	SEKOLAH DASAR NEGERI GEDONG 11 PAGI JAKARTA	SD	51154117752	15.689.541	0	15.689.541	0	15.689.541	0	15.689.541
1484	20108994	SEKOLAH DASAR NEGERI GEDONG 12 PAGI JAKARTA	SD	51154117761	44.726.935	0	44.726.935	0	44.726.935	0	44.726.935
1485	20104278	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG TIMUR 01 JAKARTA	SD	50354112661	17.188.319	0	17.188.319	0	17.188.319	0	17.188.319
1486	20104277	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG TIMUR 02 PAGI JAKARTA	SD	50354112679	1.402.228	0	1.402.228	0	1.402.228	0	1.402.228
1487	20104276	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG TIMUR 03 JAKARTA	SD	50354112709	8.511.242	0	8.511.242	0	8.511.242	0	8.511.242
1488	20104275	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG TIMUR 04 JAKARTA	SD	50354112687	15.245.055	0	15.245.055	0	15.245.055	0	15.245.055
1489	20104274	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG TIMUR 05 PAGI JAKARTA	SD	50354112717	1.266.506	0	1.266.506	0	1.266.506	0	1.266.506
1490	20104254	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG TIMUR 06 JAKARTA	SD	50354112695	12.627.359	0	12.627.359	0	12.627.359	0	12.627.359
1491	20109211	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG TIMUR 09 JAKARTA	SD	50354112725	4.549.105	0	4.549.105	0	4.549.105	0	4.549.105
1492	20104168	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA 01 PAGI JAKARTA	SD	50354112750	23.991.156	0	23.991.156	0	23.991.156	0	23.991.156
1493	20104167	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA 02 JAKARTA	SD	50354112768	16.327.989	0	16.327.989	0	16.327.989	0	16.327.989
1494	20108706	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA 03 JAKARTA	SD	50354112776	25.045.372	0	25.045.372	0	25.045.372	0	25.045.372
1495	21104166	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA 05 JAKARTA	SD	50354112784	1.541.145	0	1.541.145	0	1.541.145	0	1.541.145
1496	20108708	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA 06 JAKARTA	SD	50354112822	18.819.892	0	18.819.892	0	18.819.892	0	18.819.892
1497	20104164	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA 08 JAKARTA	SD	50354112831	36.555.495	0	36.555.495	0	36.555.495	0	36.555.495
1498	20104163	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA 09 JAKARTA	SD	50354112792	30.307.106	0	30.307.106	0	30.307.106	0	30.307.106
1499	20104162	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA 10 PAGI JAKARTA	SD	50354112806	7.562.628	0	7.562.628	0	7.562.628	0	7.562.628
1500	20104139	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA 15 PAGI JAKARTA	SD	50354112849	10.090.388	0	10.090.388	0	10.090.388	0	10.090.388
1501	20108774	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWATERATE 01 PAGI JAKARTA	SD	50354113187	15.124.324	0	15.124.324	0	15.124.324	0	15.124.324
1502	20108781	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWATERATE 03 PAGI JAKARTA	SD	50354113195	9.156.412	0	9.156.412	0	9.156.412	0	9.156.412
1503	20104212	SEKOLAH DASAR NEGERI PENGGLINGAN 01 JAKARTA	SD	50354112911	11.565.867	0	11.565.867	0	11.565.867	0	11.565.867
1504	20104205	SEKOLAH DASAR NEGERI PENGGLINGAN 03 PAGI JAKARTA	SD	50354112920	2.809.350	0	2.809.350	0	2.809.350	0	2.809.350
1505	20108743	SEKOLAH DASAR NEGERI PENGGLINGAN 05 JAKARTA	SD	50354112946	1.192.780	0	1.192.780	0	1.192.780	0	1.192.780
1506	20104209	SEKOLAH DASAR NEGERI PENGGLINGAN 06 PETANG JAKARTA	SD	50354112954	3.779.434	0	3.779.434	0	3.779.434	0	3.779.434
1507	20104206	SEKOLAH DASAR NEGERI PENGGLINGAN 09 PAGI JAKARTA	SD	50354112962	21.531.308	0	21.531.308	0	21.531.308	0	21.531.308
1508	20103387	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 01 JAKARTA	SD	50354113012	31.328.497	0	31.328.497	0	31.328.497	0	31.328.497
1509	20103386	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 02 JAKARTA	SD	50354113063	76.334.551	0	76.334.551	0	76.334.551	0	76.334.551
1510	20103385	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 03 PAGI JAKARTA	SD	50354113071	9.196.235	0	9.196.235	0	9.196.235	0	9.196.235
1511	20103365	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 04 JAKARTA	SD	50354113021	10.413.639	0	10.413.639	0	10.413.639	0	10.413.639
1512	20103364	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 05 JAKARTA	SD	50354113080	16.335.422	0	16.335.422	0	16.335.422	0	16.335.422
1513	20103343	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 06 JAKARTA	SD	50354113098	24.014.145	0	24.014.145	0	24.014.145	0	24.014.145
1514	20103342	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 07 JAKARTA	SD	50354113101	7.516.154	0	7.516.154	0	7.516.154	0	7.516.154
1515	20103341	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 08 PAGI JAKARTA	SD	50354113110	10.247.734	0	10.247.734	0	10.247.734	0	10.247.734
1516	20103340	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 09 JAKARTA	SD	50354113128	6.281.070	0	6.281.070	0	6.281.070	0	6.281.070
1517	20103328	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 11 JAKARTA	SD	50354113136	30.891.307	0	30.891.307	467.750	30.423.557	0	30.423.557
1518	20103326	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 13 JAKARTA	SD	50354113039	12.166.356	0	12.166.356	28.000	12.138.356	0	12.138.356
1519	20103320	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 20 JAKARTA	SD	50354113144	17.042.048	0	17.042.048	0	17.042.048	0	17.042.048
1520	20103346	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 24 PAGI JAKARTA	SD	50354113055	14.014.898	0	14.014.898	0	14.014.898	0	14.014.898
1521	20109289	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 25 PAGI JAKARTA	SD	50354113152	25.951.455	0	25.951.455	0	25.951.455	0	25.951.455
1522	20108744	SEKOLAH DASAR NEGERI UJUNG MENTENG 01 PAGI JAKARTA	SD	50354113233	3.481.415	0	3.481.415	0	3.481.415	0	3.481.415
1523	20103479	SEKOLAH DASAR NEGERI UJUNG MENTENG 02 JAKARTA	SD	50354113268	10.941.014	0	10.941.014	585.508	10.355.506	0	10.355.506
1524	20103478	SEKOLAH DASAR NEGERI UJUNG MENTENG 03 JAKARTA	SD	50354113241	37.041.872	0	37.041.872	0	37.041.872	0	37.041.872
1525	20104195	SEKOLAH DASAR NEGERI UJUNG MENTENG 04 PAGI JAKARTA	SD	50354113276	4.454.746	0	4.454.746	0	4.454.746	0	4.454.746
1526	20103475	SEKOLAH DASAR NEGERI UJUNG MENTENG 07 PAGI JAKARTA	SD	50354113250	426.107	0	426.107	0	426.107	0	426.107
1527	20104259	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG BARAT 01 JAKARTA	SD	50354112547	63.065.988	0	63.065.988	0	63.065.988	0	63.065.988
1528	20104258	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG BARAT 02 PAGI JAKARTA	SD	50354112555	15.317.798	0	15.317.798	0	15.317.798	0	15.317.798
1529	20104257	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG BARAT 03 PAGI JAKARTA	SD	50354112563	1.086.469	0	1.086.469	0	1.086.469	0	1.086.469
1530	20104256	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG BARAT 04 PAGI JAKARTA	SD	50354112601	33.389.729	0	33.389.729	0	33.389.729	0	33.389.729
1531	20104255	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG BARAT 05 JAKARTA	SD	50354112571	19.925	0	19.925	0	19.925	0	19.925
1532	20104271	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG BARAT 06 PAGI JAKARTA	SD	50354112610	12.660.575	0	12.660.575	0	12.660.575	0	12.660.575
1533	20104272	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG BARAT 07 PAGI JAKARTA	SD	50354112580	2.272.656	0	2.272.656	102.443	2.170.213	0	2.170.213
1534	20104273	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG BARAT 08 PAGI JAKARTA	SD	50354112628	41.476.494	0	41.476.494	0	41.476.494	0	41.476.494
1535	20104283	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG BARAT 15 PAGI JAKARTA	SD	50354112636	15.117.644	0	15.117.644	0	15.117.644	0	15.117.644

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1536	20108557	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 01 JAKARTA	SD	51254114298	27.390.867	0	27.390.867	0	27.390.867	0	27.390.867
1537	20108558	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 02 JAKARTA	SD	51254114301	13.483.765	0	13.483.765	0	13.483.765	0	13.483.765
1538	20108560	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 05 JAKARTA	SD	51254114310	32.684.516	0	32.684.516	0	32.684.516	0	32.684.516
1539	20108561	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 06 JAKARTA	SD	51254114328	8.215.084	0	8.215.084	0	8.215.084	0	8.215.084
1540	20108562	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 07 PAGI JAKARTA	SD	51254114255	9.748.064	0	9.748.064	0	9.748.064	257.731	10.005.795
1541	20108563	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 08 PAGI JAKARTA	SD	51254114263	23.867.756	0	23.867.756	0	23.867.756	0	23.867.756
1542	20108565	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 10 JAKARTA	SD	51254114271	48.288.419	0	48.288.419	4.161.578	44.126.841	0	44.126.841
1543	20108568	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 13 PAGI JAKARTA	SD	51254114336	25.501.512	0	25.501.512	0	25.501.512	0	25.501.512
1544	20108569	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 14 JAKARTA	SD	51254114280	1.799.678	0	1.799.678	0	1.799.678	0	1.799.678
1545	20108570	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 15 PAGI JAKARTA	SD	51254114344	213.328	0	213.328	0	213.328	0	213.328
1546	20108571	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 16 JAKARTA	SD	51254114352	50.828.047	0	50.828.047	0	50.828.047	0	50.828.047
1547	20108573	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 18 JAKARTA	SD	51254114361	10.448.589	0	10.448.589	0	10.448.589	0	10.448.589
1548	20108623	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 01 JAKARTA	SD	51254114743	10.497.973	0	10.497.973	0	10.497.973	0	10.497.973
1549	20108624	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 02 PAGI JAKARTA	SD	51254114751	3.205.404	0	3.205.404	0	3.205.404	0	3.205.404
1550	20108626	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 04 JAKARTA	SD	51254114794	7.336.918	0	7.336.918	0	7.336.918	0	7.336.918
1551	20108628	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 06 JAKARTA	SD	51254114808	32.546.857	0	32.546.857	0	32.546.857	0	32.546.857
1552	20108629	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 07 PAGI JAKARTA	SD	51254114816	13.145.674	0	13.145.674	0	13.145.674	0	13.145.674
1553	20108425	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 10 JAKARTA	SD	51254114824	1.342.486	1.685.970	-343.484	3.240.282	-3.583.766	4.542.912	959.146
1554	20108632	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 11 PAGI JAKARTA	SD	51254114832	4.973.454	0	4.973.454	4.836.500	136.954	0	136.954
1555	20108634	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 13 PAGI JAKARTA	SD	51254114760	12.964.266	0	12.964.266	0	12.964.266	0	12.964.266
1556	20108751	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 14 JAKARTA	SD	51254114778	4.835.924	0	4.835.924	0	4.835.924	0	4.835.924
1557	20108635	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 15 PAGI JAKARTA	SD	51254114786	2.312.138	0	2.312.138	0	2.312.138	0	2.312.138
1558	20108576	SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 01 JAKARTA	SD	51254114441	20.580.547	0	20.580.547	0	20.580.547	0	20.580.547
1559	20108578	SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 03 PAGI JAKARTA	SD	51254114450	17.611.045	0	17.611.045	0	17.611.045	0	17.611.045
1560	20108579	SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 04 PAGI JAKARTA	SD	51254114468	5.750.732	0	5.750.732	0	5.750.732	0	5.750.732
1561	20108580	SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 06 JAKARTA	SD	51254114395	47.594.009	0	47.594.009	0	47.594.009	0	47.594.009
1562	20108583	SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 10 PAGI JAKARTA	SD	51254114476	624.488	0	624.488	75.000	549.488	0	549.488
1563	20108584	SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 12 PAGI JAKARTA	SD	51254114484	1.303	0	1.303	0	1.303	0	1.303
1564	20108585	SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 13 JAKARTA	SD	51254114492	72.613.449	0	72.613.449	0	72.613.449	0	72.613.449
1565	20108586	SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 14 JAKARTA	SD	51254114409	1.775.452	0	1.775.452	0	1.775.452	0	1.775.452
1566	20108587	SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 15 PAGI JAKARTA	SD	51254114417	1.302.593	0	1.302.593	0	1.302.593	0	1.302.593
1567	20108588	SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 16 PAGI JAKARTA	SD	51254114506	632.589	0	632.589	0	632.589	0	632.589
1568	20108593	SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 22 PAGI JAKARTA	SD	51254114433	5.514.895	0	5.514.895	0	5.514.895	0	5.514.895
1569	20108638	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KELAPA 01 PAGI JAKARTA	SD	51254114921	116.238.886	0	116.238.886	0	116.238.886	0	116.238.886
1570	20108640	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KELAPA 03 JAKARTA	SD	51254114930	1.780.113	0	1.780.113	0	1.780.113	0	1.780.113
1571	20108641	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KELAPA 04 JAKARTA	SD	51254114981	3.826.628	0	3.826.628	0	3.826.628	0	3.826.628
1572	20108642	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KELAPA 05 PAGI JAKARTA	SD	51254114948	4.840.191	0	4.840.191	0	4.840.191	0	4.840.191
1573	20108643	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KELAPA 06 JAKARTA	SD	51254114956	153	0	153	0	153	20.476.500	20.476.653
1574	20108644	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KELAPA 07 PAGI JAKARTA	SD	51254114964	21.228.153	0	21.228.153	0	21.228.153	0	21.228.153
1575	20108646	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KELAPA 09 PAGI JAKARTA	SD	51254114999	6.442.867	0	6.442.867	0	6.442.867	0	6.442.867
1576	20108647	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KELAPA 10 PAGI JAKARTA	SD	51254114972	31.200.646	0	31.200.646	0	31.200.646	0	31.200.646
1577	20108612	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA SARI 01 PAGI JAKARTA	SD	51254114654	6.776.544	0	6.776.544	0	6.776.544	0	6.776.544
1578	20108613	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA SARI 02 PAGI JAKARTA	SD	51254114662	6.749.892	0	6.749.892	0	6.749.892	0	6.749.892
1579	20108614	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA SARI 03 PAGI JAKARTA	SD	51254114689	42.004.022	0	42.004.022	0	42.004.022	0	42.004.022
1580	20108615	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA SARI 04 PAGI JAKARTA	SD	51254114671	3.889.403	0	3.889.403	0	3.889.403	0	3.889.403
1581	20108616	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA SARI 05 PAGI JAKARTA	SD	51254114697	13.208.586	0	13.208.586	0	13.208.586	0	13.208.586
1582	20108620	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA SARI 13 JAKARTA	SD	51254114701	2.654.944	0	2.654.944	0	2.654.944	0	2.654.944
1583	20108597	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA JAYA 01 JAKARTA	SD	51254114557	13.000.777	0	13.000.777	0	13.000.777	0	13.000.777
1584	20108599	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA JAYA 04 PAGI JAKARTA	SD	51254114565	47.231.621	77.573	47.154.048	0	47.154.048	0	47.154.048
1585	20108600	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA JAYA 05 PAGI JAKARTA	SD	51254114549	1.817.539	0	1.817.539	0	1.817.539	0	1.817.539
1586	20108601	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA JAYA 06PAGI JAKARTA	SD	51254114573	17.844.698	0	17.844.698	0	17.844.698	0	17.844.698
1587	20108602	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA JAYA 07 JAKARTA	SD	51254114581	11.223.098	0	11.223.098	0	11.223.098	0	11.223.098
1588	20108603	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA JAYA 08 JAKARTA	SD	51254114590	22.946.924	0	22.946.924	0	22.946.924	0	22.946.924
1589	20108604	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA JAYA 09 JAKARTA	SD	51254114603	54.662.439	0	54.662.439	100.000	54.562.439	0	54.562.439
1590	20108605	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA JAYA 10 JAKARTA	SD	51254114611	1.567.559	0	1.567.559	521.452	1.046.107	0	1.046.107

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1591	20108606	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA JAYA 11 JAKARTA	SD	51254114620	81.034.897	0	81.034.897	0	81.034.897	0	81.034.897
1592	20108607	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA JAYA 12 PAGI JAKARTA	SD	51254114638	2.302.830	0	2.302.830	0	2.302.830	0	2.302.830
1593	20108650	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KOPI 01 JAKARTA	SD	51254115065	24.989.677	0	24.989.677	0	24.989.677	0	24.989.677
1594	20108651	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KOPI 02 PAGI JAKARTA	SD	51254115073	49.011.073	0	49.011.073	0	49.011.073	0	49.011.073
1595	20108652	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KOPI 03 PAGI JAKARTA	SD	51254115111	598.811	99.000	499.811	0	499.811	0	499.811
1596	20108653	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KOPI 04 PAGI JAKARTA	SD	51254115081	21.934.090	0	21.934.090	0	21.934.090	0	21.934.090
1597	20108655	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KOPI 07 JAKARTA	SD	51254115090	20.597.177	0	20.597.177	3.438.741	17.158.436	0	17.158.436
1598	20108656	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KOPI 08 JAKARTA	SD	51254115103	25.517.534	0	25.517.534	0	25.517.534	0	25.517.534
1599	20109084	SEKOLAH DASAR NEGERI MAKASAR 01 PAGI JAKARTA	SD	51154116829	7.477.589	0	7.477.589	0	7.477.589	0	7.477.589
1600	20104187	SEKOLAH DASAR NEGERI MAKASAR 02 PAGI JAKARTA	SD	51154116837	27.687.668	0	27.687.668	0	27.687.668	0	27.687.668
1601	20104186	SEKOLAH DASAR NEGERI MAKASAR 03 PAGI JAKARTA	SD	51154116845	11.482.390	0	11.482.390	0	11.482.390	0	11.482.390
1602	20104184	SEKOLAH DASAR NEGERI MAKASAR 05 PAGI JAKARTA	SD	51154116853	9.307.962	0	9.307.962	0	9.307.962	0	9.307.962
1603	20104183	SEKOLAH DASAR NEGERI MAKASAR 06 PAGI JAKARTA	SD	51154116861	48.518	0	48.518	0	48.518	0	48.518
1604	20104182	SEKOLAH DASAR NEGERI MAKASAR 07 PAGI JAKARTA	SD	51154116870	34.563.854	0	34.563.854	287.500	34.276.354	0	34.276.354
1605	20104181	SEKOLAH DASAR NEGERI MAKASAR 08 PAGI JAKARTA	SD	51154116888	116.929.435	0	116.929.435	0	116.929.435	0	116.929.435
1606	20109104	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANG RANTI 01 JAKARTA	SD	51354116922	57.518.734	0	57.518.734	0	57.518.734	22.513.100	80.031.834
1607	20104204	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANG RANTI 02 JAKARTA	SD	51154116934	7.577.974	0	7.577.974	0	7.577.974	0	7.577.974
1608	20104202	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANG RANTI 04 PAGI JAKARTA	SD	51154116942	192.831	0	192.831	0	192.831	0	192.831
1609	20104201	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANG RANTI 05 PAGI JAKARTA	SD	51154116951	1.424.356	0	1.424.356	0	1.424.356	0	1.424.356
1610	20104199	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANG RANTI 07 PAGI JAKARTA	SD	51354116965	763.740	0	763.740	0	763.740	0	763.740
1611	20104197	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANG RANTI 09 PAGI JAKARTA	SD	51154116985	60.536.587	0	60.536.587	0	60.536.587	0	60.536.587
1612	20108716	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 01 PAGI JAKARTA	SD	51154116705	11.934.978	0	11.934.978	0	11.934.978	0	11.934.978
1613	20104135	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 02 PAGI JAKARTA	SD	51154116713	9.919.443	34.400	9.885.043	0	9.885.043	0	9.885.043
1614	20104134	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 03 PAGI JAKARTA	SD	51354116728	79.137	0	79.137	0	79.137	0	79.137
1615	20104133	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 04 PAGI JAKARTA	SD	51354116736	9.668.753	0	9.668.753	0	9.668.753	0	9.668.753
1616	20104132	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 05 PAGI JAKARTA	SD	51354116744	194.499	0	194.499	0	194.499	0	194.499
1617	20104130	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 07 PAGI JAKARTA	SD	51154116756	4.114.911	0	4.114.911	0	4.114.911	0	4.114.911
1618	20104128	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 09 PAGI JAKARTA	SD	51154116764	12.277.723	0	12.277.723	0	12.277.723	0	12.277.723
1619	20104126	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 11 PAGI JAKARTA	SD	51154116772	2.145.910	0	2.145.910	0	2.145.910	0	2.145.910
1620	20104125	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 12 PAGI JAKARTA	SD	51154116781	9.324.759	0	9.324.759	0	9.324.759	0	9.324.759
1621	20104124	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 13 PAGI JAKARTA	SD	51154116799	1.622.701	0	1.622.701	0	1.622.701	0	1.622.701
1622	20104122	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 14 PAGI JAKARTA	SD	51154116802	5.582.183	0	5.582.183	0	5.582.183	0	5.582.183
1623	20109002	SEKOLAH DASAR NEGERI HALIM 01 JAKARTA	SD	51154116616	83.952.419	0	83.952.419	0	83.952.419	0	83.952.419
1624	20104334	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MELAYU 01 PAGI JAKARTA	SD	51254116487	13.232	0	13.232	0	13.232	0	13.232
1625	20104331	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MELAYU 03 PAGI JAKARTA	SD	51254116495	2.250.409	0	2.250.409	0	2.250.409	0	2.250.409
1626	20104330	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MELAYU 04 PAGI JAKARTA	SD	51254116509	69.560.296	0	69.560.296	0	69.560.296	0	69.560.296
1627	20104348	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MELAYU 05 PAGI JAKARTA	SD	51254116517	2.985.552	0	2.985.552	0	2.985.552	0	2.985.552
1628	20109161	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MELAYU 07 PAGI JAKARTA	SD	51254116525	9.582.215	0	9.582.215	0	9.582.215	0	9.582.215
1629	20104365	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MELAYU 09 PAGI JAKARTA	SD	51254116541	311.791	0	311.791	0	311.791	0	311.791
1630	20104364	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MELAYU 10 PAGI JAKARTA	SD	51254116550	1.440.559	0	1.440.559	0	1.440.559	0	1.440.559
1631	20108696	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 01 JAKARTA	SD	51154113846	9.853.510	0	9.853.510	0	9.853.510	0	9.853.510
1632	20109242	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 03 PAGI JAKARTA	SD	51154113854	31.627.290	0	31.627.290	0	31.627.290	0	31.627.290
1633	20104357	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 05 JAKARTA	SD	51154113862	18.503.824	0	18.503.824	0	18.503.824	0	18.503.824
1634	20104356	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 06 PAGI JAKARTA	SD	51154113871	2.837.350	0	2.837.350	0	2.837.350	0	2.837.350
1635	20104355	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 07 JAKARTA	SD	51154113889	4.167.494	0	4.167.494	0	4.167.494	0	4.167.494
1636	20104353	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 09 PAGI JAKARTA	SD	51154113897	43.395.428	0	43.395.428	0	43.395.428	0	43.395.428
1637	20104352	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 10 JAKARTA	SD	51154113901	1.580.287	0	1.580.287	0	1.580.287	0	1.580.287
1638	20104351	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 11 PAGI JAKARTA	SD	51154113919	33.294.090	0	33.294.090	0	33.294.090	0	33.294.090
1639	20104253	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 13 PAGI JAKARTA	SD	51154113927	28.597.168	0	28.597.168	0	28.597.168	0	28.597.168
1640	20104175	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 14 PAGI JAKARTA	SD	51154113935	11.268.683	0	11.268.683	0	11.268.683	0	11.268.683
1641	20104155	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 15 PAGI JAKARTA	SD	51154113943	1.746.668	0	1.746.668	0	1.746.668	0	1.746.668
1642	20104403	SEKOLAH DASAR NEGERI CIBUBUR 01 JAKARTA	SD	51154113757	25.478.239	0	25.478.239	0	25.478.239	0	25.478.239
1643	20104401	SEKOLAH DASAR NEGERI CIBUBUR 03 PAGI JAKARTA	SD	51154113765	14.978.685	0	14.978.685	0	14.978.685	0	14.978.685
1644	20104400	SEKOLAH DASAR NEGERI CIBUBUR 04 PAGI JAKARTA	SD	51154113773	950	0	950	0	950	0	950
1645	20109115	SEKOLAH DASAR NEGERI CIBUBUR 05 JAKARTA	SD	51154113781	21.650.582	0	21.650.582	0	21.650.582	0	21.650.582

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1646	20108671	SEKOLAH DASAR NEGERI CIBUBUR 09 JAKARTA	SD	51154113790	8.890.909	0	8.890.909	0	8.890.909	0	8.890.909
1647	20109151	SEKOLAH DASAR NEGERI CIBUBUR 10 PAGI JAKARTA	SD	51154113803	844.629	0	844.629	0	844.629	0	844.629
1648	20108672	SEKOLAH DASAR NEGERI CIBUBUR 11 PAGI JAKARTA	SD	51154113811	25.116.831	0	25.116.831	0	25.116.831	0	25.116.831
1649	20104176	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA WETAN 01 PAGI JAKARTA	SD	51154113986	651.878	0	651.878	0	651.878	0	651.878
1650	20104252	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA WETAN 02 PAGI JAKARTA	SD	51154113994	23.514.037	0	23.514.037	0	23.514.037	0	23.514.037
1651	20109194	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA WETAN 03 PAGI JAKARTA	SD	51154114001	211.982	0	211.982	0	211.982	0	211.982
1652	20108968	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA WETAN 04 PAGI JAKARTA	SD	51154114010	11.345.918	2.000	11.343.918	105.000	11.238.918	0	11.238.918
1653	20104229	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA WETAN 06 PAGI JAKARTA	SD	51154114028	29.427.580	0	29.427.580	0	29.427.580	0	29.427.580
1654	20108782	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 01 JAKARTA	SD	51154114109	6.819.902	0	6.819.902	0	6.819.902	0	6.819.902
1655	20103461	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 02 PAGI JAKARTA	SD	51154114117	10.277.479	0	10.277.479	0	10.277.479	0	10.277.479
1656	20103460	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 03 PAGI JAKARTA	SD	51154114125	20.774.671	0	20.774.671	0	20.774.671	0	20.774.671
1657	20103449	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 04 PAGI JAKARTA	SD	51154114133	18.633.353	0	18.633.353	0	18.633.353	0	18.633.353
1658	20103448	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 05 PAGI JAKARTA	SD	51154114141	7.342.304	0	7.342.304	0	7.342.304	4.394.800	11.737.104
1659	20103447	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 06 PAGI JAKARTA	SD	51154114150	7.633.427	0	7.633.427	0	7.633.427	0	7.633.427
1660	20103446	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 07 PAGI JAKARTA	SD	51154114168	1.250.129	0	1.250.129	0	1.250.129	0	1.250.129
1661	20103445	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 08 PAGI JAKARTA	SD	51154114176	58.853	0	58.853	0	58.853	0	58.853
1662	20109126	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 09 PAGI JAKARTA	SD	51154114184	76.575.000	0	76.575.000	0	76.575.000	0	76.575.000
1663	20103362	SEKOLAH DASAR NEGERI RAMBUTAN 01 JAKARTA	SD	51154114044	16.121.019	720.000	15.401.019	0	15.401.019	0	15.401.019
1664	20103361	SEKOLAH DASAR NEGERI RAMBUTAN 02 JAKARTA	SD	51154114052	4.874.162	120.000	4.754.162	0	4.754.162	0	4.754.162
1665	20103360	SEKOLAH DASAR NEGERI RAMBUTAN 03 JAKARTA	SD	51154114061	226	0	226	0	226	0	226
1666	20103359	SEKOLAH DASAR NEGERI RAMBUTAN 05 JAKARTA	SD	51154114079	39.770.859	0	39.770.859	0	39.770.859	0	39.770.859
1667	20103358	SEKOLAH DASAR NEGERI RAMBUTAN 06 JAKARTA	SD	51154114087	5.741	0	5.741	0	5.741	0	5.741
1668	20104368	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPAYUNG 01 JAKARTA	SD	51154113447	31.782.223	0	31.782.223	0	31.782.223	0	31.782.223
1669	20104367	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPAYUNG 02 JAKARTA	SD	51154113455	4.218.992	0	4.218.992	0	4.218.992	0	4.218.992
1670	20104347	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPAYUNG 03 PAGI JAKARTA	SD	51154113463	11.629.568	0	11.629.568	0	11.629.568	0	11.629.568
1671	20104346	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPAYUNG 04 PAGI JAKARTA	SD	51154113471	67.307.454	0	67.307.454	0	67.307.454	0	67.307.454
1672	20104344	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPAYUNG 05 JAKARTA	SD	51154113480	37.918.293	0	37.918.293	120.000	37.798.293	0	37.798.293
1673	20104396	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANGKAP 01 PAGI JAKARTA	SD	51154113382	5.420.430	0	5.420.430	198.198	5.222.232	0	5.222.232
1674	20104394	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANGKAP 03 PAGI JAKARTA	SD	51154113391	91.649.112	0	91.649.112	0	91.649.112	0	91.649.112
1675	20103397	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK RANGGON 01 PAGI JAKARTA	SD	51154113668	2.257.914	0	2.257.914	0	2.257.914	0	2.257.914
1676	20103382	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK RANGGON 02 JAKARTA	SD	51154113676	39.046.473	0	39.046.473	0	39.046.473	0	39.046.473
1677	20103383	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK RANGGON 03 PAGI JAKARTA	SD	51154113684	149.289.080	0	149.289.080	0	149.289.080	0	149.289.080
1678	20103384	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK RANGGON 04 JAKARTA	SD	51154113692	73.293.800	0	73.293.800	0	73.293.800	0	73.293.800
1679	20104178	SEKOLAH DASAR NEGERI MUNJUL 01 PAGI JAKARTA	SD	51154113633	70.862.553	0	70.862.553	0	70.862.553	0	70.862.553
1680	20103465	SEKOLAH DASAR NEGERI SETU 01 JAKARTA	SD	51154113706	92.592.634	0	92.592.634	0	92.592.634	0	92.592.634
1681	20103464	SEKOLAH DASAR NEGERI SETU 02 JAKARTA	SD	51154113714	82.594.260	0	82.594.260	0	82.594.260	0	82.594.260
1682	20104314	SEKOLAH DASAR NEGERI BAMBU APUS 01 PAGI JAKARTA	SD	51154113293	24.925.240	0	24.925.240	0	24.925.240	0	24.925.240
1683	20104312	SEKOLAH DASAR NEGERI BAMBU APUS 03 PAGI JAKARTA	SD	51154113307	38.537.030	0	38.537.030	0	38.537.030	0	38.537.030
1684	20104311	SEKOLAH DASAR NEGERI BAMBU APUS 04 PAGI JAKARTA	SD	51154113315	92.451.496	0	92.451.496	0	92.451.496	0	92.451.496
1685	20104244	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 01 JAKARTA	SD	51154113528	9.033.439	0	9.033.439	0	9.033.439	0	9.033.439
1686	20104242	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 03 JAKARTA	SD	51154113536	28.588.996	0	28.588.996	0	28.588.996	0	28.588.996
1687	20104241	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 04 PAGI JAKARTA	SD	51154113544	26.255.738	0	26.255.738	0	26.255.738	0	26.255.738
1688	20104240	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 05 PAGI JAKARTA	SD	51154113552	13.329.024	0	13.329.024	0	13.329.024	0	13.329.024
1689	20104239	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 06 PAGI JAKARTA	SD	51154113561	890.558	0	890.558	0	890.558	0	890.558
1690	20104237	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 08 PAGI JAKARTA	SD	51154113579	2.134.845	0	2.134.845	0	2.134.845	0	2.134.845
1691	20104213	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 11 PAGI JAKARTA	SD	51154113595	10.767.291	0	10.767.291	0	10.767.291	0	10.767.291
1692	20104193	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 12 PAGI JAKARTA	SD	51154113609	39.327.851	0	39.327.851	0	39.327.851	0	39.327.851
1693	20104192	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 13 JAKARTA	SD	51154113617	20.586.242	0	20.586.242	0	20.586.242	0	20.586.242
1694	20104369	SEKOLAH DASAR NEGERI CEGER 01 JAKARTA	SD	51154113331	53.933.202	0	53.933.202	0	53.933.202	0	53.933.202
1695	20104385	SEKOLAH DASAR NEGERI CEGER 02 JAKARTA	SD	51154113340	8.495.650	0	8.495.650	0	8.495.650	0	8.495.650
1696	20104468	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU PANGGANG 01 PAGI JAKARTA	SD	20054100120	357.911	0	357.911	0	357.911	0	357.911
1697	20104469	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU PANGGANG 02 PAGI JAKARTA	SD	20054100138	8.354.754	0	8.354.754	0	8.354.754	0	8.354.754
1698	20104470	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU PANGGANG 03 PAGI JAKARTA	SD	20054100146	7.194.891	0	7.194.891	0	7.194.891	0	7.194.891
1699	20104466	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU KELAPA 01 PAGI JAKARTA	SD	20154100101	777.057	0	777.057	0	777.057	0	777.057
1700	20104467	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU KELAPA 02 PAGI JAKARTA	SD	20154100110	67.998.428	0	67.998.428	0	67.998.428	0	67.998.428

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1701	20104464	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU HARAPAN 01 PAGI JAKARTA	SD	20054100081	1.244.942	0	1.244.942	0	1.244.942	0	1.244.942
1702	20104465	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU HARAPAN 02 PAGI JAKARTA	SD	20154100098	818.240	0	818.240	0	818.240	0	818.240
1703	20104473	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU TIDUNG 01 PAGI JAKARTA	SD	20154100039	2.456.926	0	2.456.926	0	2.456.926	0	2.456.926
1704	20104474	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU TIDUNG 02 PAGI JAKARTA	SD	20154100047	1.326.894	0	1.326.894	0	1.326.894	0	1.326.894
1705	20104475	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU TIDUNG 03 PAGI JAKARTA	SD	20054100057	5.956.508	0	5.956.508	0	5.956.508	0	5.956.508
1706	20104476	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU TIDUNG 04 PAGI JAKARTA	SD	20154100063	1.207.439	0	1.207.439	0	1.207.439	0	1.207.439
1707	20104471	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU PARI 01 PAGI JAKARTA	SD	20154100012	12.379.225	0	12.379.225	0	12.379.225	0	12.379.225
1708	20104472	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU PARI 02 PAGI JAKARTA	SD	20054100022	765.432	0	765.432	0	765.432	0	765.432
1709	20104477	SEKOLAH DASAR NEGERI PERCONTOHAN PULAU UNTUNG JAWA 01 PAGI JAKARTA	SD	20154100071	6.442.431	0	6.442.431	0	6.442.431	0	6.442.431
1710	20100143	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 JAKARTA	SMK	10154127615	277.977.128	0	277.977.128	0	277.977.128	0	277.977.128
1711	20100161	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 JAKARTA	SMK	10154127313	58.624.457	0	58.624.457	0	58.624.457	0	58.624.457
1712	20100164	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 JAKARTA	SMK	10454127423	106.442.283	0	106.442.283	0	106.442.283	0	106.442.283
1713	20100158	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 14 JAKARTA	SMK	12254127375	32.466.938	0	32.466.938	0	32.466.938	0	32.466.938
1714	20100159	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 16 JAKARTA	SMK	50054127540	118.707.206	0	118.707.206	0	118.707.206	0	118.707.206
1715	20100160	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 19 JAKARTA	SMK	11354127716	13.964.316	0	13.964.316	0	13.964.316	0	13.964.316
1716	20100162	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 21 JAKARTA	SMK	10154127496	134.981.950	0	134.981.950	0	134.981.950	0	134.981.950
1717	20100163	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	SMK	10154127623	60.895.227	0	60.895.227	0	60.895.227	0	60.895.227
1718	20100165	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 31 JAKARTA	SMK	50054127388	36.494.433	0	36.494.433	0	36.494.433	0	36.494.433
1719	20100166	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 34 JAKARTA	SMK	50054127647	32.177.912	0	32.177.912	0	32.177.912	0	32.177.912
1720	20100167	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 38 JAKARTA	SMK	10854127736	386.292.664	0	386.292.664	0	386.292.664	0	386.292.664
1721	20100168	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 39 JAKARTA	SMK	12254127286	121.543.480	0	121.543.480	0	121.543.480	0	121.543.480
1722	20100157	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 44 JAKARTA	SMK	12254127405	189.234.162	0	189.234.162	0	189.234.162	0	189.234.162
1723	20100156	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 54 JAKARTA	SMK	11154127515	116.532.216	0	116.532.216	1.795.538	114.736.678	0	114.736.678
1724	20107436	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 JAKARTA	SMK	20154131091	174.350.874	1.044.417	173.306.457	0	173.306.457	0	173.306.457
1725	20100783	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 12 JAKARTA	SMK	20754131529	248.751.072	0	248.751.072	0	248.751.072	0	248.751.072
1726	20107433	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 23 JAKARTA	SMK	10454131412	761.115.011	0	761.115.011	0	761.115.011	0	761.115.011
1727	20107434	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	SMK	20054131211	132.743.623	0	132.743.623	0	132.743.623	0	132.743.623
1728	20107435	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	SMK	20954131002	160.212.184	0	160.212.184	0	160.212.184	0	160.212.184
1729	20107437	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 49 JAKARTA	SMK	20954131037	367.482.102	0	367.482.102	0	367.482.102	0	367.482.102
1730	20107438	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 55 JAKARTA	SMK	10454131421	83.465.336	0	83.465.336	0	83.465.336	0	83.465.336
1731	20107439	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 56 JAKARTA	SMK	30254131508	1.350.692.181	0	1.350.692.181	0	1.350.692.181	0	1.350.692.181
1732	20101496	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 9 JAKARTA	SMK	30054127237	294.678.837	0	294.678.837	175.000	294.503.837	0	294.503.837
1733	20101504	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 11 JAKARTA	SMK	30054127105	57.788.072	0	57.788.072	0	57.788.072	0	57.788.072
1734	20101503	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	SMK	41154126992	6.280.564	0	6.280.564	0	6.280.564	0	6.280.564
1735	20101502	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 17 JAKARTA	SMK	11354127015	151.734.471	0	151.734.471	0	151.734.471	0	151.734.471
1736	20101501	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 35 JAKARTA	SMK	30054127067	200.434.960	0	200.434.960	0	200.434.960	0	200.434.960
1737	20101500	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 42 JAKARTA	SMK	30354126154	334.491.275	0	334.491.275	0	334.491.275	0	334.491.275
1738	20101499	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 45 JAKARTA	SMK	41154126836	476.309.925	0	476.309.925	0	476.309.925	0	476.309.925
1739	20101498	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 53 JAKARTA	SMK	30454127116	386.297.890	47.651.065	338.646.825	0	338.646.825	0	338.646.825
1740	20101497	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 60 JAKARTA	SMK	41154126712	142.575.089	0	142.575.089	0	142.575.089	0	142.575.089
1741	20102579	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 JAKARTA	SMK	40454128267	73.547.900	0	73.547.900	0	73.547.900	0	73.547.900
1742	20102597	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 JAKARTA	SMK	40454128755	107.271.502	0	107.271.502	0	107.271.502	0	107.271.502
1743	20102578	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA	SMK	40454128330	189.153.226	0	189.153.226	0	189.153.226	0	189.153.226
1744	20102589	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 18 JAKARTA	SMK	40454128496	173.437.621	0	173.437.621	0	173.437.621	0	173.437.621
1745	20102587	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	SMK	40454127791	20.826.782	0	20.826.782	0	20.826.782	0	20.826.782
1746	20102586	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 25 JAKARTA	SMK	40454128674	83.341.833	0	83.341.833	0	83.341.833	0	83.341.833
1747	20102585	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 28 JAKARTA	SMK	40454127805	307.322.146	0	307.322.146	0	307.322.146	0	307.322.146
1748	20102602	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 29 JAKARTA	SMK	40454128305	261.806.872	0	261.806.872	0	261.806.872	0	261.806.872
1749	20102582	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 30 JAKARTA	SMK	40454128241	247.576.657	0	247.576.657	0	247.576.657	0	247.576.657
1750	20102581	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	SMK	40454129026	54.105.946	0	54.105.946	0	54.105.946	0	54.105.946
1751	20102601	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	SMK	40454128704	92.130.206	0	92.130.206	0	92.130.206	0	92.130.206
1752	20102580	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 41 JAKARTA	SMK	40454127881	8.390.475	0	8.390.475	0	8.390.475	0	8.390.475
1753	20102600	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 43 JAKARTA	SMK	40454128348	85.860.806	0	85.860.806	0	85.860.806	0	85.860.806
1754	20102599	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 47 JAKARTA	SMK	40454128747	15.053.822	0	15.053.822	0	15.053.822	0	15.053.822
1755	20102598	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	SMK	40454128682	1.136.168.669	0	1.136.168.669	0	1.136.168.669	0	1.136.168.669

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SilPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SilPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SilPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1756	20107358	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 59 JAKARTA	SMK	40454128470	35.468.663	0	35.468.663	0	35.468.663	0	35.468.663
1757	20109246	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 62 JAKARTA	SMK	40454128046	14.580.574	0	14.580.574	0	14.580.574	0	14.580.574
1758	20112443	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	SMK	40454127970	177.356.740	0	177.356.740	0	177.356.740	0	177.356.740
1759	20103783	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 JAKARTA	SMK	50054130575	147.995.548	0	147.995.548	0	147.995.548	0	147.995.548
1760	20103778	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 JAKARTA	SMK	50054130834	489.132.733	0	489.132.733	0	489.132.733	0	489.132.733
1761	20103791	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 10 JAKARTA	SMK	50054130281	137.652.923	0	137.652.923	1.891.055	135.761.868	0	135.761.868
1762	20103790	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 22 JAKARTA	SMK	51154130724	42.075.069	0	42.075.069	0	42.075.069	0	42.075.069
1763	20103788	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	SMK	50054129399	112.283.754	0	112.283.754	0	112.283.754	0	112.283.754
1764	20103787	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	SMK	50154130930	447.092.962	0	447.092.962	22.500	447.070.462	0	447.070.462
1765	20103786	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 40 JAKARTA	SMK	50054130605	135.543.256	0	135.543.256	0	135.543.256	0	135.543.256
1766	20103785	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 46 JAKARTA	SMK	50054130141	115.422.648	0	115.422.648	0	115.422.648	0	115.422.648
1767	20103784	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 48 JAKARTA	SMK	50354129831	178.638.101	0	178.638.101	0	178.638.101	0	178.638.101
1768	20103782	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 50 JAKARTA	SMK	50054130192	112.342.208	0	112.342.208	0	112.342.208	0	112.342.208
1769	20103781	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	SMK	51154129408	32.810.876	42.000	32.768.876	150.000	32.618.876	105.800	32.724.676
1770	20103780	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 52 JAKARTA	SMK	51154129602	60.159.442	0	60.159.442	0	60.159.442	0	60.159.442
1771	20103779	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 58 JAKARTA	SMK	51154129416	557.807.508	0	557.807.508	0	557.807.508	9.488.215	567.295.723
1772	20109165	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 61 JAKARTA	SMK	20154126089	23.062.478	0	23.062.478	0	23.062.478	0	23.062.478
1773	20109425	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 JAKARTA	SLB	40054121758	23.946.009	0	23.946.009	0	23.946.009	0	23.946.009
1774	20103089	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 2 JAKARTA	SLB	40054121782	26.539.982	0	26.539.982	0	26.539.982	0	26.539.982
1775	20109970	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 3 JAKARTA	SLB	12254121717	68.673.750	0	68.673.750	0	68.673.750	0	68.673.750
1776	20110821	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 4 JAKARTA	SLB	20154122237	3.873.067	0	3.873.067	0	3.873.067	0	3.873.067
1777	20112403	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 5 JAKARTA	SLB	11854121646	37.086.133	0	37.086.133	0	37.086.133	0	37.086.133
1778	20109529	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 6 JAKARTA	SLB	30354121624	7.923.938	0	7.923.938	0	7.923.938	0	7.923.938
1779	20109280	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 7 JAKARTA	SLB	51354122078	163.941.055	0	163.941.055	0	163.941.055	0	163.941.055
1780	20103099	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI A PEMBINA TINGKAT NASIONAL	SLB	40054121740	63.049.163	0	63.049.163	0	63.049.163	0	63.049.163
1781	20100271	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 280 JAKARTA	SMP	10854134759	81.655.693	0	81.655.693	0	81.655.693	0	81.655.693
1782	20101009	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK MUARA 01 JAKARTA	SD	30254120425	14.510.442	0	14.510.442	0	14.510.442	0	14.510.442
1783	20103351	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAMANGUN 05 JAKARTA	SD	50154118468	1.637.876	0	1.637.876	0	1.637.876	7.136.873	8.774.749
1784	20106060	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG AATAS 21 PAGI JAKARTA	SD	40254111988	1.420.838	0	1.420.838	0	1.420.838	0	1.420.838
1785	20106072	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MANGGIS 01 PAGI JAKARTA	SD	40254112089	281.392	0	281.392	0	281.392	0	281.392
1786	20109795	TAMAN KANAK KANAK NEGERI PENGKILINGAN JAKARTA	TK	50354501314	83.587	0	83.587	0	83.587	0	83.587
1787	20110450	TAMAN KANAK KANAK NEGERI KEBON KACANG JAKARTA	TK	11854504201	14.487	0	14.487	0	14.487	0	14.487
1788	20110491	TAMAN KANAK KANAK NEGERI BESUKI JAKARTA	TK	50054504319	238.413	0	238.413	0	238.413	0	238.413
1789	20110492	TAMAN KANAK KANAK NEGERI CILACAP JAKARTA	TK	11154504327	477.311	0	477.311	0	477.311	0	477.311
1790	69949368	TAMAN KANAK KANAK NEGERI BENDUNGAN HILIR JAKARTA	TK	11354532912	2.562.476	0	2.562.476	0	2.562.476	0	2.562.476
1791	20110494	TAMAN KANAK KANAK NEGERI TEGAL JAKARTA	TK	10854504335	2.959.744	0	2.959.744	0	2.959.744	0	2.959.744
1792	20110688	TAMAN KANAK KANAK NEGERI SUNTER AGUNG JAKARTA	TK	20154504652	302.824	0	302.824	0	302.824	0	302.824
1793	69857113	TK NEGERI ROROTAN	TK	20154526036	565.518	0	565.518	0	565.518	0	565.518
1794	20110716	TAMAN KANAK KANAK NEGERI PAPANGGO JAKARTA	TK	20154504687	420.873	0	420.873	0	420.873	0	420.873
1795	20111015	TAMAN KANAK KANAK NEGERI MERUYA UTARA 01 JAKARTA	TK	30354506038	22.868	0	22.868	0	22.868	0	22.868
1796	20111016	TAMAN KANAK KANAK NEGERI MERUYA UTARA 02 JAKARTA	TK	30354506046	508.766	0	508.766	0	508.766	0	508.766
1797	20111017	TAMAN KANAK KANAK NEGERI MERUYA SELATAN JAKARTA	TK	30354506054	1.371.090	0	1.371.090	0	1.371.090	0	1.371.090
1798	69830838	TK NEGERI BINTARO	TK	43154519042	18.281	0	18.281	0	18.281	0	18.281
1799	20111591	TAMAN KANAK KANAK NEGERI CIPETE JAKARTA	TK	40054507443	28.163	0	28.163	0	28.163	0	28.163
1800	69830867	TAMAN KANAK KANAK NEGERI PEMBINA TINGKAT NASIONAL	TK	41154519293	41.149	0	41.149	0	41.149	0	41.149
1801	20112079	TAMAN KANAK KANAK NEGERI PEMBINA DKI JAKARTA	TK	50154508355	207.520	0	207.520	0	207.520	0	207.520
1802	69831047	TAMAN KANAK KANAK NEGERI LATIHAN II JAKARTA	TK	50054520713	54.415	0	54.415	0	54.415	0	54.415
1803	69920820	TK Negeri Menteng 01	TK	11154530999	108.222	0	108.222	0	108.222	0	108.222
1804	69946822	TK Negeri Sawah Besar 01	TK	11154532673	89.214	0	89.214	0	89.214	0	89.214
1805	69820326	TK Negeri Kemayoran 01	TK	12254513577	873.345	0	873.345	0	873.345	0	873.345
1806	69820409	TK Negeri Kemayoran 02	TK	12254514212	119.008	0	119.008	0	119.008	0	119.008
1807	69922070	TK Negeri Cilincing 01	TK	43254531024	4.687	0	4.687	0	4.687	0	4.687
1808	69857065	TK Negeri Koja 01	TK	20154525684	69.100	0	69.100	0	69.100	0	69.100
1809	69790218	TK Negeri Kebayoran Lama 01	TK	41254511835	132.331	0	132.331	0	132.331	0	132.331
1810	69820655	TK Negeri Jagakarsa 01	TK	40154514243	5.569	0	5.569	0	5.569	0	5.569

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1811	69945300	TK Negeri Cilandak 01	TK	40154532543	29.782	0	29.782	0	29.782	0	29.782
1812	69978626	TK Negeri Mampang Prapatan 01	TK	40454536799	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500
1813	69785991	TK Negeri Kebayoran Baru 01	TK	40054511564	5.120	0	5.120	0	5.120	0	5.120
1814	69820775	TK Negeri Duren Sawit 01	TK	51254514563	14.153	0	14.153	0	14.153	0	14.153
1815	69827381	TK Negeri Duren Sawit 02	TK	51254518127	1.321.604	0	1.321.604	0	1.321.604	0	1.321.604
1816	20109732	TK Negeri Pulogadung 01	TK	54054500886	15.945	0	15.945	0	15.945	0	15.945
1817	69917839	TK Negeri Kramat Jati 01	TK	51354530699	79.533	0	79.533	0	79.533	0	79.533
1818	20110174	TK Negeri Kramat Jati 02	TK	51354502920	29.709	0	29.709	0	29.709	0	29.709
1819	69917439	TK Negeri Pasar Rebo 01	TK	51354530648	38.187	0	38.187	0	38.187	0	38.187
1820	20177833	TK Negeri Pasar Rebo 02	TK	51354509126	17.571	0	17.571	0	17.571	0	17.571
1821	20112469	TK Negeri Pasar Rebo 03	TK	51354508944	211.100	0	211.100	0	211.100	0	211.100
1822	20109948	TK Negeri Pasar Rebo 04	TK	51354502041	97.707	0	97.707	0	97.707	0	97.707
1823	69830164	TK Negeri Cipayung 01	TK	51354518133	142.623	0	142.623	0	142.623	0	142.623
1824	69917840	TK Negeri Cipayung 02	TK	51354530702	123.820	0	123.820	0	123.820	0	123.820
1825	69963091	TK Negeri Kebon Jeruk 01	TK	42854534173	1.500.910	0	1.500.910	0	1.500.910	0	1.500.910
1826	69768536	TK Negeri Pulau Untung Jawa 01	TK	20154509387	289.050	0	289.050	0	289.050	0	289.050
1827	69768531	TK Negeri Pulau Tidung 01	TK	20154509336	37.416	0	37.416	0	37.416	0	37.416
1828	69768532	TK Negeri Pulau Tidung 02	TK	20154509344	54.381	0	54.381	0	54.381	0	54.381
1829	69768533	TK Negeri Pulau Tidung 03	TK	20154509352	44.277	0	44.277	0	44.277	0	44.277
1830	69768535	TK Negeri Pulau Pari 01	TK	20154509379	21.468	0	21.468	0	21.468	0	21.468
1831	20112492	TK Negeri Pulau Kelapa 01	TK	20154508984	149.331	0	149.331	0	149.331	0	149.331
1832	69768538	TK Negeri Pulau Harapan 01	TK	20154509409	311.538	0	311.538	0	311.538	0	311.538
1833	69768537	TK Negeri Pulau Panggang 01	TK	20154509395	367.137	0	367.137	0	367.137	0	367.137
1834	69857136	TK NEGERI SEMPER	TK	20154526150	106.918	0	106.918	0	106.918	0	106.918
1835	69980881	SLBN 8	SLB	20054122212	1.191.344	0	1.191.344	0	1.191.344	0	1.191.344
1836	69980874	SMPN 290	SMP	20054139492	47.195.309	0	47.195.309	42.552	47.152.757	0	47.152.757
1837	69980873	SDN Marunda 05	SD	20054118835	848.482	0	848.482	0	848.482	0	848.482
1838	P2965974	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 01	SKB	10954301688	1.037.213	0	1.037.213	0	1.037.213	0	1.037.213
1839	P2965971	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 02	SKB	11354301694	1.899.640	0	1.899.640	0	1.899.640	0	1.899.640
1840	P2966171	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 03	SKB	20054301702	796.304	0	796.304	0	796.304	0	796.304
1841	P2966295	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 04	SKB	21354301712	6.904.786	0	6.904.786	0	6.904.786	0	6.904.786
1842	P9926222	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 05	SKB	32054301720	405.849	0	405.849	0	405.849	0	405.849
1843	P2969301	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 06	SKB	42854301730	12.950	0	12.950	0	12.950	0	12.950
1844	P9908916	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 07	SKB	30454301744	3.855.000	0	3.855.000	0	3.855.000	0	3.855.000
1845	P2966606	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 08	SKB	43554301759	259.028	0	259.028	0	259.028	0	259.028
1846	P2966639	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 09	SKB	43654300017	523.377	0	523.377	0	523.377	0	523.377
1847	P2966615	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 10	SKB	12754300027	5.149.469	0	5.149.469	0	5.149.469	0	5.149.469
1848	P2966608	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 11	SKB	50054300039	14.434.116	0	14.434.116	0	14.434.116	0	14.434.116
1849	P2966872	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 12	SKB	52354301760	821.256	0	821.256	0	821.256	0	821.256
1850	P2967206	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 13	SKB	15354301774	1.428.163	0	1.428.163	0	1.428.163	0	1.428.163
1851	P2967200	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 14	SKB	50154301785	1.322.723	0	1.322.723	0	1.322.723	0	1.322.723
1852	P2965963	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 15	SKB	11054301797	9.788.050	0	9.788.050	0	9.788.050	0	9.788.050
1853	P2965967	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 16	SKB	15554301801	3.227.900	0	3.227.900	0	3.227.900	0	3.227.900
1854	P2966315	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 17	SKB	20154301816	4.494.213	0	4.494.213	0	4.494.213	0	4.494.213
1855	P9926496	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 18	SKB	30454301825	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400
1856	P2967365	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 19	SKB	62254301831	1.782.180	0	1.782.180	0	1.782.180	0	1.782.180
1857	P9934360	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 20	SKB	30454301841	69.440	0	69.440	0	69.440	0	69.440
1858	P2966612	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 21	SKB	40254300047	3.120.641	0	3.120.641	0	3.120.641	0	3.120.641
1859	P2967208	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 22	SKB	51354301851	2.655.791	0	2.655.791	0	2.655.791	0	2.655.791
1860	P2965972	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 23	SKB	11854301865	12.027	0	12.027	0	12.027	0	12.027
1861	P2969409	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 24	SKB	32054302017	1.964.431	0	1.964.431	0	1.964.431	0	1.964.431
1862	P2966616	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 25	SKB	43354301876	8.011.239	0	8.011.239	0	8.011.239	0	8.011.239
1863	P2966649	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 26	SKB	43154301888	707.498	0	707.498	0	707.498	0	707.498
1864	P2966648	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 27	SKB	41254301890	262.938	0	262.938	0	262.938	0	262.938
1865	P2967209	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 28	SKB	51354301908	12.823.915	0	12.823.915	0	12.823.915	0	12.823.915

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1866	P2965982	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 29	SKB	10954301912	16.019	0	16.019	0	16.019	0	16.019
1867	P2967896	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 30	SKB	42854301926	4.378.250	0	4.378.250	0	4.378.250	0	4.378.250
1868	P2966652	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 31	SKB	43454300053	8.421.749	0	8.421.749	0	8.421.749	0	8.421.749
1869	P2967199	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 32	SKB	50354301935	9.929.981	0	9.929.981	0	9.929.981	0	9.929.981
1870	P2967201	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 33	SKB	50354301943	2.257.555	0	2.257.555	0	2.257.555	0	2.257.555
1871	P2967175	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 34	SKB	52354301956	820.823	0	820.823	0	820.823	0	820.823
1872	P2966660	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 35	SKB	43554301961	2.242	0	2.242	0	2.242	0	2.242
1873	P2967957	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 36	SKB	30054301971	6.567.531	0	6.567.531	538.560	6.028.971	0	6.028.971
1874	P9908823	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 37	SKB	30054301989	3.493.520	0	3.493.520	0	3.493.520	0	3.493.520
1875	P2967314	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 38	SKB	42854301993	1.084.855	0	1.084.855	0	1.084.855	0	1.084.855
1876	69991741	SPS Negeri Bale Bermain Alpukat	SPS	41354538511	509	0	509	0	509	0	509
1877	69988000	TK Negeri Kramat Jati 03	TK	52354537828	2.423.857	0	2.423.857	0	2.423.857	0	2.423.857
1878	69988919	TK Negeri Matraman 01	TK	50054538019	457	0	457	0	457	0	457
1879	69990088	SPS Negeri Bale Bermain Sahabat Anak	SPS	31454538156	17.700	0	17.700	0	17.700	0	17.700
1880	69990099	SPS Negeri Bale Bermain Palembang Merah	SPS	14954538172	53.514	0	53.514	0	53.514	0	53.514
1881	69990294	TPA Negeri Bale Bermain Maju Bersama	TPA	11154538256	27.029	0	27.029	0	27.029	0	27.029
1882	69990299	SPS Negeri Bale Bermain Bunda Menteng	SPS	14654538267	102.200	0	102.200	0	102.200	0	102.200
1883	69991331	TPA Negeri Bina Tunas Jaya IX	TPA	55854538428	56.939	0	56.939	0	56.939	0	56.939
1884	69992317	SMK Negeri 66 Jakarta	SMK	43254129510	59.961.284	0	59.961.284	0	59.961.284	25.155.000	85.116.284
1885	69986230	TK Negeri Pademangan 01	TK	14054537547	50.600	0	50.600	0	50.600	0	50.600
1886	69988621	TK Negeri Penjaringan 01	TK	30154537981	63.993	0	63.993	0	63.993	0	63.993
1887	69988862	TK Negeri Tebet 01	TK	40254537993	132	0	132	0	132	0	132
1888	69989585	TPA Negeri Bina Tunas Jaya V	TPA	50254538112	7.406	0	7.406	0	7.406	0	7.406
1889	69990387	SPS Negeri Bale Bermain Petura	SPS	31154538283	175.653	0	175.653	0	175.653	0	175.653
1890	69990758	SPS Negeri Bale Bermain Abdi Praja	SPS	20554538347	20.800	0	20.800	0	20.800	0	20.800
1891	69992318	SMK Negeri 67 Jakarta	SMK	43254130771	267.534.282	0	267.534.282	0	267.534.282	0	267.534.282
1892	69992322	SMK Negeri 71 Jakarta	SMK	43254129145	182.598.030	0	182.598.030	0	182.598.030	20.300	182.618.330
1893	69987433	TPA Negeri Bale Bermain Yos Sudarso	TPA	20154537763	12.798	0	12.798	0	12.798	0	12.798
1894	69987715	TK Negeri Kelapa Gading 01	TK	23054537791	33.416	0	33.416	0	33.416	0	33.416
1895	69988920	TK Negeri Pulogadung 02	TK	50154538025	350.975	0	350.975	0	350.975	0	350.975
1896	69989277	TK Negeri Pancoran 01	TK	51354538070	415.455	0	415.455	0	415.455	0	415.455
1897	69989306	TPA Negeri Bina Tunas Jaya II	TPA	43954538093	3.523	0	3.523	0	3.523	0	3.523
1898	69990120	SPS Negeri Bale Bermain Mawar Cipayung	SPS	52654538217	36.854	0	36.854	0	36.854	0	36.854
1899	69992319	SMK Negeri 68 Jakarta	SMK	43254129714	29.916.637	0	29.916.637	0	29.916.637	0	29.916.637
1900	69992346	SMK Negeri 72 Jakarta	SMK	43254126090	16.943.264	0	16.943.264	0	16.943.264	0	16.943.264
1901	69980385	TK Negeri Koja 02	TK	20154536988	158.623	0	158.623	0	158.623	0	158.623
1902	69989178	TK Negeri Pasar Minggu 01	TK	43354538051	93.556	0	93.556	0	93.556	0	93.556
1903	69990708	SPS Negeri Bale Bermain Gading Kuncup Harmoni	SPS	43254538304	3.046	0	3.046	0	3.046	0	3.046
1904	69990878	TPA Negeri Bale Bermain Anwari	TPA	50354538358	129.663	0	129.663	0	129.663	0	129.663
1905	69991431	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XIII	TPA	55354538443	2.076	0	2.076	0	2.076	0	2.076
1906	69992314	SMK Negeri 70 Jakarta	SMK	43254129935	173.210.645	0	173.210.645	0	173.210.645	0	173.210.645
1907	69992323	SMK Negeri 73 Jakarta	SMK	43254126162	119.883.025	0	119.883.025	0	119.883.025	0	119.883.025
1908	69988293	TK Negeri Cengkareng 01	TK	30454537918	848.564	0	848.564	0	848.564	0	848.564
1909	69988921	TK Negeri Jatinegara 01	TK	50054538035	90	0	90	0	90	0	90
1910	69990121	SPS Negeri Bale Bermain Makasar Meriah (Meraih Ridho Allah)	SPS	52754538223	33.445	0	33.445	0	33.445	0	33.445
1911	69990347	SPS Negeri Bale Bermain Bahagia	SPS	14454538279	19.309	0	19.309	0	19.309	0	19.309
1912	69991016	SPS Negeri Bale Bermain Manggala Praja	SPS	40654538381	66	0	66	0	66	0	66
1913	69991042	TPA Negeri Bale Bermain Serasi	TPA	40454538392	569.140	0	569.140	0	569.140	0	569.140
1914	69991277	SPS Negeri Bale Bermain Cerdas Ceria	SPS	53554538402	511.513	0	511.513	0	511.513	0	511.513
1915	69992316	SMK Negeri 65 Jakarta	SMK	43254130101	474.422.725	0	474.422.725	0	474.422.725	0	474.422.725
1916	69992321	SMK Negeri 69 Jakarta	SMK	43254129137	6.258.969	0	6.258.969	0	6.258.969	0	6.258.969
1917	69981918	TK Negeri Cilincing 02	TK	20154537208	88.192	0	88.192	0	88.192	0	88.192
1918	69987999	TK Negeri Makasar 01	TK	52354537810	37.815	0	37.815	0	37.815	0	37.815
1919	69988460	SLBN 11 Jakarta	SLB	43254121951	61.920.431	0	61.920.431	0	61.920.431	0	61.920.431
1920	69988475	SLBN 10 Jakarta	SLB	43254121527	37.625.354	0	37.625.354	0	37.625.354	0	37.625.354

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1921	69990089	SPS Negeri Bale Bermain Demang Ceria	SPS	21054538165	41.230	0	41.230	0	41.230	0	41.230
1922	69990116	SPS Negeri Bale Bermain Harapan Jaya	SPS	30654538180	871.581	0	871.581	0	871.581	0	871.581
1923	69990205	SPS Negeri Bale Bermain Cempaka Putih Ceria	SPS	12454538240	582	0	582	0	582	0	582
1924	69990946	TPA Negeri Bina Tunas Jaya III	TPA	16054538360	11.960	0	11.960	0	11.960	0	11.960
1925	69991012	SPS Negeri Bale Bermain Unggul dan Terdepan	SPS	40954538377	252	0	252	0	252	0	252
1926	69991740	TPA Negeri Bina Tunas Jaya X	TPA	41654538507	15.362	0	15.362	0	15.362	0	15.362
1927	69979428	TPA Negeri Bale Bermain Balai Kota	TPA	10854536881	290	0	290	0	290	0	290
1928	69988059	TK Negeri Ciracas 01	TK	52354537836	1.882.364	0	1.882.364	0	1.882.364	0	1.882.364
1929	69988210	SLBN 9 Jakarta	SLB	43254122281	36.153.168	0	36.153.168	0	36.153.168	0	36.153.168
1930	69988258	TK Negeri Kalideres 01	TK	62254537877	208.399	0	208.399	0	208.399	0	208.399
1931	69988567	TK Negeri Tambora 01	TK	30554537967	845.379	0	845.379	0	845.379	0	845.379
1932	69990117	SPS Negeri Bale Bermain Melati	SPS	31754538193	193.148	0	193.148	0	193.148	0	193.148
1933	69990118	TPA Negeri Bale Bermain Pelangi	TPA	30354538207	6.480	0	6.480	0	6.480	0	6.480
1934	69990204	SPS Negeri Bale Bermain Johar Baru	SPS	13554538237	388	0	388	0	388	0	388
1935	69991742	SPS Negeri Bale Bermain Ceria	SPS	41654538523	2.123	0	2.123	0	2.123	0	2.123
1936	69992315	SMK Negeri 64 Jakarta	SMK	43254130259	97.017.451	0	97.017.451	0	97.017.451	0	97.017.451
1937	69988193	TK Negeri Cipayung 03	TK	52054537866	188.929	0	188.929	0	188.929	0	188.929
1938	69988408	SLBN 12 Jakarta	SLB	43254121802	35.577.998	0	35.577.998	0	35.577.998	0	35.577.998
1939	69989245	TPA Negeri Bina Tunas Jaya IV	TPA	15454538063	574.815	0	574.815	0	574.815	0	574.815
1940	69990038	SPS Negeri Bale Bermain Ciracas Cerdas	SPS	52854538141	121.720	0	121.720	0	121.720	0	121.720
1941	P9984389	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 39	SKB	50354302001	1.145.065	0	1.145.065	0	1.145.065	0	1.145.065
1942	70004168	TK Negeri Satu Atap Kemanggisan 10	TK	43254539491	34.368	0	34.368	0	34.368	0	34.368
1943	69768543	SPS NEGERI BALE BERMAIN TUNAS BAHARI	SPS	43254509452	25.047	0	25.047	0	25.047	0	25.047
1944	69768544	SPS NEGERI BALE BERMAIN PERMATA BUNDA	SPS	43254509461	69.452	0	69.452	0	69.452	0	69.452
1945	69768546	SPS NEGERI BALE BERMAIN NUSA INDAH	SPS	43254509487	178.230	0	178.230	0	178.230	0	178.230
1946	70000830	SPS NEGERI BALE BERMAIN PAYUNG CERIA	SPS	43254539041	15.150	0	15.150	0	15.150	0	15.150
1947	69768550	SPS NEGERI BALE BERMAIN TUNAS HARAPAN	SPS	43254509525	51.288	0	51.288	0	51.288	0	51.288
1948	69856954	SPS NEGERI BALE BERMAIN ALAM PESISIR	SPS	43254524770	208.698	0	208.698	0	208.698	0	208.698
1949	69856956	SPS NEGERI BALE BERMAIN RAKIT TIANG	SPS	43254524796	77.615	0	77.615	0	77.615	0	77.615
1950	69856957	SPS NEGERI BALE BERMAIN INSAN UTAMA	SPS	43254524800	30.407	0	30.407	0	30.407	0	30.407
1951	69768551	SPS NEGERI BALE BERMAIN PULAU SABIRA	SPS	43254509533	59.076	0	59.076	0	59.076	0	59.076
1952	69768540	SPS NEGERI BALE BERMAIN BUNGA MAWAR	SPS	43254509428	21.776	0	21.776	0	21.776	0	21.776
1953	70002269	SPS NEGERI BALE BERMAIN KH HASYIM ASYARI	SPS	43254539203	865.898	0	865.898	0	865.898	0	865.898
1954	70002414	TPA Negeri Bale Bermain Raden Ajeng Kartini	TPA	43254539271	524	0	524	0	524	0	524
1955	70002818	TPA NEGERI BINA TUNAS JAYA VI	TPA	43254539343	24.538	0	24.538	0	24.538	0	24.538
1956	70000265	TPA NEGERI BINA TUNAS JAYA XVI	TPA	43254538975	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500
1957	70001759	TPA NEGERI BINA TUNAS JAYA XV	TPA	43254539106	42.812	0	42.812	0	42.812	0	42.812
1958	70002268	TPA NEGERI BINA TUNAS JAYA XX	TPA	43254539190	25.105	0	25.105	0	25.105	0	25.105
1959	70002389	SPS NEGERI BALE BERMAIN SAKINAH	SPS	43254539262	32.552	0	32.552	0	32.552	0	32.552
1960	70002605	SPS NEGERI BALE BERMAIN TUNAS BAHARI	SPS	20054539326	81.500	0	81.500	0	81.500	0	81.500
1961	70005694	TPA NEGERI BINA TUNAS JAYA XIV	TPA	50054539686	254	0	254	0	254	0	254
1962	70003287	SPS NEGERI BALE BERMAIN RAWASARI CERIA	SPS	15554539432	5.956	0	5.956	0	5.956	0	5.956
1963	70003443	SPS NEGERI BALE BERMAIN CENDIKIA KEMAYORAN	SPS	14754539440	422.243	0	422.243	0	422.243	0	422.243
1964	70002276	SPS NEGERI BALE BERMAIN GEMA CERIA	SPS	12154539225	83.085	0	83.085	0	83.085	0	83.085
1965	70006861	SPS NEGERI BALE BERMAIN CERDAS CERIA MUTIARA HATI	SPS	50354539842	101.397	0	101.397	0	101.397	0	101.397
1966	70005687	TPA NEGERI BINA TUNAS JAYA XXII	TPA	15454539671	2.084	0	2.084	0	2.084	0	2.084
1967	70002274	SPS NEGERI BALE BERMAIN PESTA CERIA	SPS	11154539210	26.190	0	26.190	0	26.190	0	26.190
1968	70002448	SPS NEGERI BALE BERMAIN TUNAS BANGSA	SPS	51254539281	9.378	0	9.378	0	9.378	0	9.378
1969	70002449	SPS NEGERI BALE BERMAIN RUBAH	SPS	51654539291	244.882	0	244.882	0	244.882	0	244.882
1970	70005754	SPS NEGERI BALE BERMAIN KAMURA	SPS	31854539694	11.771	0	11.771	0	11.771	0	11.771
1971	70002388	SPS NEGERI BALE BERMAIN SUKAPURA CERDAS	SPS	43254539254	25.600	0	25.600	0	25.600	0	25.600
1972	70004659	TPA NEGERI BINA TUNAS JAYA XIX	TPA	33054539537	1.554.329	0	1.554.329	0	1.554.329	0	1.554.329
1973	70005248	TK NEGERI PULAU PANGGANG 02	TK	20454539591	2.850.004	0	2.850.004	0	2.850.004	0	2.850.004
1974	70006966	SPS NEGERI BALE BERMAIN PINANG INDAH	SPS	43754539867	33.363	0	33.363	0	33.363	0	33.363
1975	70011414	TK Negeri Johar Baru 01	TK	43254540490	55.610	0	55.610	0	55.610	0	55.610

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	SILPA di Rekening Bank (Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan) Per 31 Desember 2024 (Rp)	SILPA di Luar Rekening Bank (Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga) (Rp)	Total SILPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10 = (8 - 9)	11	12 = (10 + 11)
1976	70011362	TK Negeri Senen 01	TK	43254540465	273.877	0	273.877	0	273.877	0	273.877
1977	70011371	TK Negeri Cempaka Putih 01	TK	43254540481	97.128	0	97.128	0	97.128	0	97.128
1978	70010976	TK Negeri Taman Sari 01	TK	43254540384	22.248	0	22.248	0	22.248	0	22.248
1979	70012409	TK Negeri Satu Atap Cilincing 08	TK	43254540601	39.998	0	39.998	0	39.998	0	39.998
1980	70012679	TK Negeri Satu Atap Manggarai 01	TK	43254540651	45.399	0	45.399	0	45.399	0	45.399
1981	70012680	TK Negeri Satu Atap Kalibata 07	TK	43254540660	3.354	0	3.354	0	3.354	0	3.354
1982	70012601	TK Negeri Satu Atap Susukan 09	TK	43254540643	21.903	0	21.903	0	21.903	0	21.903
1983	70007268	TPA Negeri Bina Tunas Jaya VIII	TPA	43254539891	20.430	0	20.430	0	20.430	0	20.430
1984	70010985	KB Negeri 01 Kebon Kosong	KB	43254540392	10.086	0	10.086	0	10.086	0	10.086
1985	70010637	KB Negeri 03 Cilincing	KB	43254540309	6.401	0	6.401	0	6.401	0	6.401
1986	69857160	KB Negeri 04 Pademangan Timur	KB	14054526316	28.982	0	28.982	0	28.982	0	28.982
1987	69948988	KB Negeri 05 Jelambar	KB	43254532870	140.038	0	140.038	0	140.038	0	140.038
1988	69939827	KB Negeri 06 Meruya Utara	KB	42854632205	548.934	0	548.934	0	548.934	0	548.934
1989	69932668	KB Negeri 07 Cengkareng	KB	30454631698	32.914	0	32.914	0	32.914	0	32.914
1990	70010822	KB Negeri 10 Guntur	KB	43254540368	717	0	717	0	717	0	717
1991	70010797	KB Negeri 11 Manggarai	KB	43254540333	119.685	0	119.685	0	119.685	0	119.685
1992	70010521	KB Negeri 12 Tengah	KB	43254540228	20.785	0	20.785	0	20.785	0	20.785
1993	70010622	KB Negeri 15 Cideng	KB	43254540287	127.677	0	127.677	0	127.677	0	127.677
1994	70010522	KB Negeri 22 Makasar	KB	43254540236	23.174	0	23.174	0	23.174	0	23.174
1995	70010577	KB Negeri 23 Kebon Melati	KB	43254540252	82.262	0	82.262	0	82.262	0	82.262
1996	69981533	KB Negeri 24 Tomang	KB	43254637124	549.781	0	549.781	0	549.781	0	549.781
1997	70010808	KB Negeri 25 Pasar Minggu	KB	43254540350	16	0	16	0	16	0	16
1998	70010618	KB Negeri 27 Petukangan Selatan	KB	43254540279	11.269	0	11.269	0	11.269	0	11.269
1999	70010587	KB Negeri 28 Kebon Pala	KB	43254540261	827.622	0	827.622	0	827.622	0	827.622
2000	70010935	KB Negeri 29 Cempaka Baru	KB	43254540376	1.395.530	0	1.395.530	0	1.395.530	0	1.395.530
2001	69864592	KB Negeri 30 Duri Kepa	KB	30354527809	763.467	0	763.467	0	763.467	0	763.467
2002	70010801	KB Negeri 31 Bangka	KB	43254540341	19.231	0	19.231	0	19.231	0	19.231
2003	70010529	KB Negeri 32 Duren Sawit	KB	43254540244	278.761	0	278.761	0	278.761	0	278.761
2004	69964711	KB Negeri 33 Malaka Sari	KB	12354534271	28.096	0	28.096	0	28.096	0	28.096
2005	70010762	KB Negeri 35 Jagakarsa	KB	43254540325	28.567	0	28.567	0	28.567	0	28.567
2006	69856746	KB Negeri 38 Kebon Jeruk	KB	42854524186	108.345	0	108.345	0	108.345	0	108.345
2007	70028934	TK Negeri Gambir 01	TK	14554541197	48.200	0	48.200	0	48.200	0	48.200
2008	70030266	TK Negeri Jagakarsa 02	TK	40854541205	12.130	0	12.130	0	12.130	0	12.130
Total Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah					75.339.988.134	118.944.852	75.221.043.282	73.465.004	75.147.578.278	121.988.183	75.269.566.461

REKAPITULASI PIUTANG PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

NO	JENIS PAJAK	MUTASI PIUTANG TAHUN DIBAWAH 2024									MUTASI PIUTANG TAHUN BERJALAN 2024							SALDO AKHIR PIUTANG PAJAK DAERAH PER 30 JUN 2024
		SALDO AWAL PIUTANG PAJAK (AUDITED 31 DES 2023)	KOREKSI ATAS SALDO AWAL PIUTANG PAJAK	PEMBAYARAN ATAS PIUTANG PAJAK TAHUN LALU	KOMPENSASI DAN PEMINDAHBUKUAN ATAS PIUTANG PAJAK TAHUN LALU	KEPUTUSAN KEBERATAN/ PENGURANGAN/ KERINGANAN ATAS PIUTANG TAHUN LALU	PEMBEBASAN/PENG ENAAAN/PEMBETULA N/PEMBATALAN/PE NGHAPUSAN ATAS PIUTANG TAHUN LALU	PDM TAHUN LALU	HAPUS BUKU	SISA PIUTANG PAJAK TAHUN LALU PER 30 JUN 2024	PIUTANG PAJAK TAHUN BERJALAN	PEMBAYARAN ATAS PIUTANG PAJAK TAHUN BERJALAN	KOMPENSASI DAN PEMINDAHBUKUAN ATAS PIUTANG PAJAK TAHUN BERJALAN	KEPUTUSAN KEBERATAN/ PENGURANGAN/ KERINGANAN ATAS PIUTANG TAHUN BERJALAN	PEMBEBASAN/PENG ENAAAN/PEMBETULA N/PEMBATALAN/PE NGHAPUSAN ATAS PIUTANG TAHUN BERJALAN	PDM TAHUN BERJALAN	SISA PIUTANG TAHUN BERJALAN PER 30 JUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+4-(5-9)-6-7-8-10	12	13	14	15	16	17	18=12-(13-17)-14-15-16	19=11+18
1	PKB	127.437.900.750	-	-	-	-	7.793.863.871	-	-	119.644.036.879	927.565.937.935	915.361.307.135	-	-	-	-	12.204.630.800	131.848.667.679
2	BBN-KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PBB-KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	P A T	591.166.273.424	-	13.993.125.544	-	-	1.066.565.225	27.293.735	-	578.267.006.840	87.291.778.840	73.691.721.041	-	-	-	2.561.117	13.602.618.916	591.869.625.756
5	REKLAME	555.601.209.780	-	74.180.416.776	-	-	603.381.225	1	-	482.024.174.230	1.021.861.559.348	887.192.315.927	-	-	-	274.082.655	134.943.326.076	616.967.500.306
6	BPHTB	217.487.284.324	-	1.746.586.048	-	-	-	-	-	215.740.698.276	24.747.593.353	9.683.277.533	-	-	-	-	15.064.315.820	230.805.014.096
7	PBB-P2	9.926.116.872.186	-	843.045.135.009	2.013.812.237	102.586.373.114	31.730.559.388	281.534.544	-	8.947.022.526.982	14.945.548.391.332	9.113.833.148.336	3.145.291.757	1.061.558.473.448	2.320.828.824.892	1.795.293.630	2.447.977.946.529	11.395.000.473.511
8	PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.688.000	5.978.000	-	-	-	-	710.000	710.000
9	PBJT	261.976.700.673	-	27.160.892.323	-	-	1.185.861.812	130.657.592	-	236.132.327.754	108.409.854.287	69.095.382.897	-	-	-	-	39.314.471.390	275.446.799.144
Grand Total		11.679.786.241.137	-	960.126.155.700	2.013.812.237	102.586.373.114	36.668.614.997	439.485.872	-	10.578.830.770.961	17.115.431.803.095	11.068.863.130.869	3.145.291.757	1.061.558.473.448	2.320.828.824.892	2.071.937.402	2.663.108.019.531	13.241.938.790.492

**REKAPITULASI PERSEDIAAN USANG/RUSAK
PER 31 DESEMBER 2024**

No.	JENIS PERSEDIAAN/SKPD	Persediaan Usang/Rusak Sudah Dikeluarkan dari Neraca		Total Nilai Persediaan Usang/Rusak	Keterangan
		Belum diusulkan untuk dimusnahkan	Diusulkan untuk dimusnahkan		
1	1	2	3	5=2+3+4	6
	1.1.12.01 - Barang Pakai Habis	3.849.014.307	24.084.939.089	27.933.953.396	
1	DINAS PENDIDIKAN	100.523.716	-	100.523.716	1. Toner Printer HP 12A Jumlah 2 unit Senilai Rp. 2.864.000,00 2. Toner Printer HP 80A Jumlah 2 Buah Rp. 3.124.000,00 3. Catridge 932 Jumlah 3 Buah Rp. 786.720,00 4. Toner Printer HP 305A Jumlah 40 buah Senilai Rp. 47.999.996,00 5. Toner Printer HP 35A Jumlah 2 Buah senilai Rp. 2.090.000,00 6. Toner Tinta HP 49A Jumlah 27 Buah Senilai Rp. 43.659.000,00 Total barang 76 buah senilai Rp. 100.523.716, 00
2	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	2.337.934.095	-	2.337.934.095	Obat Program Kadaluarsa
3	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	-	3.180.950.367	3.180.950.367	Obat Program Kadaluarsa
4	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	-	1.055.801.982	1.055.801.982	Obat Program Kadaluarsa
5	DINAS BINA MARGA	7.857.850	-	7.857.850	Lampu
6	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	222.577.850	-	222.577.850	Lampu
7	SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKPUS	2.811.900	450.498.395	453.310.295	Alat kontrasepsi
8	SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKUT	-	369.523.652	369.523.652	Alat kontrasepsi
9	SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKTIM	2.057.550	259.385.782	261.443.332	Alat kontrasepsi
10	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	154.282.788	-	154.282.788	Cetakan khusus dan obat kadaluarsa
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	1.182.260.804	1.182.260.804	
12	SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	-	168.482.699	168.482.699	
13	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	121.671.000	-	121.671.000	Cetakan khusus/umum tidak digunakan lagi sesuai Permendagri No. 109 Tahun 2019, usulan tahun 2020
14	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	-	232.253.430	232.253.430	Cetakan khusus/umum tidak digunakan lagi sesuai Permendagri No. 109 Tahun 2019, usulan tahun 2020
14	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	15.400.000	397.237.500	412.637.500	Cetakan khusus/umum tidak digunakan lagi sesuai Permendagri No. 109 Tahun 2019, usulan tahun 2020
15	UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN	86.664.660	-	86.664.660	Karcis dan pita printer
16	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KEDAUNG ANGKE	-	4.999.805.656	4.999.805.656	Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor
17	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PULO GADUNG	-	432.853.080	432.853.080	Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor
18	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UJUNG MENTENG	-	6.614.190.385	6.614.190.385	Bukti Lulus Uji dan Barang cetakan lainnya
19	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR CILINCING	-	2.916.926.889	2.916.926.889	Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor
20	UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN	39.008.453	-	39.008.453	Cetakan umum dan cetakan khusus
21	UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI	8.808.800	-	8.808.800	Total ada 1.001 buku karcis yang RUSAK dikarenakan dimakan Rayap yang terdiri dari Karcis Dewasa sebanyak 301 buku, karcis anak/pelajar sebanyak 300 buku, dan karcis rombongan anak/pelajar sebanyak 400 buku (harga satuan @8.800 per buku)
22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.772.467	-	8.772.467	Cetakan umum
23	PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI	-	71.900.534	71.900.534	
24	PUSKESMAS KALIDERES	-	10.215.587	10.215.587	Obat Expired dan Lab Rusak
25	PUSKESMAS TAMBORA	-	40.165.188	40.165.188	Persediaan usang/rusak (kadaluarsa)

No.	JENIS PERSEDIAAN/SKPD	Persediaan Usang/Rusak Sudah Dikeluarkan dari Neraca		Total Nilai Persediaan Usang/Rusak	Keterangan
		Belum diusulkan untuk dimusnahkan	Diusulkan untuk dimusnahkan		
26	PUSKESMAS TAMAN SARI	-	31.975.000	31.975.000	Persediaan usang/rusak (kadaluarsa)
27	PUSKESMAS PASAR MINGGU	4.470.783	311.834	4.782.617	Vaksin
28	PUSKESMAS JAGAKARSA	-	193.562.769	193.562.769	Reagen
29	PUSKESMAS JAGAKARSA	-	245.598.171	245.598.171	FAVIPIRAVIR 200MG TAB
30	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO	430.200.000	-	430.200.000	PAXLOVID 150 MG/100 MG
31	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO	16.473.760	-	16.473.760	Obat expired
32	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU	-	12.582.665	12.582.665	BARANG PAKAI HABIS
33	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI	260.372.223	-	260.372.223	Obat kadaluarsa
34	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMANSARI	17.723.574	-	17.723.574	Obat kadaluarsa
35	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG	9.811.090	9.811.090	19.622.180	Obat kadaluarsa
36	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU	1.591.748	-	1.591.748	Obat dan BMHP yang sudah kadaluarsa
37	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG	-	59.904.801	59.904.801	
38	UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU		1.148.740.829	1.148.740.829	
	1.1.12.02 - Barang Tak Pakai Habis	-	550.000	550.000	
	PUSKESMAS TAMBORA		550.000	550.000	
				-	
	JUMLAH	3.849.014.307	24.085.489.089	27.934.503.396	
		3.849.014.307	24.085.489.089	27.934.503.396	

IKHTISAR PERHITUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH (PMP)
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Perusahaan Daerah	Lapkeu Tahun	Tahun Penyertaan	Dasar Hukum	Bentuk Penyertaan	%	Saldo per 31 Desember 2023 (Audited)	Mutasi Tambah Tahun 2024				Mutasi Kurang Tahun 2024			Nilai PMP per 31 Desember 2024 (Audited)
								Tambahan Modal Disetor	Pengumuman Laba	Lain-lain	Koreksi Ekuitas	Pembagian Dividen	Pengumuman Rugi	lain-lain	
A	METODE EKUITAS														
1	Perumda Air Minum Jaya	Audited 2024	1992	Perda No. 13/1992	Lainnya	100,00%	3.449.544.925.780	-	735.414.791.576	-	-	62.367.973.726	-	55.383.012.215	4.067.208.731.415
2	Perumda Dharma Jaya	Audited 2024	1985	Perda No.20/2010	Lainnya	100,00%	466.125.029.737	-	7.612.943.003	6.112.857.436	- 39.683.051.248	-	-	1.078.881.317	439.088.897.611
3	Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	Audited 2024	1982	Perda No. 6/1990	Lainnya	100,00%	5.554.928.504.064	-	27.679.181.674	1.339.947.623	-	-	-	11.841.286.552	5.572.106.346.809
4	Perumda Pasar Jaya	Audited 2024	1982	Perda No. 2/2009	Lainnya	100,00%	1.530.748.892.361	-	19.445.669.969	3.988.521.991	-	21.964.518.857	-	-	1.532.218.565.464
5	Perumda PAL Jaya	Audited 2024	1991	Perda No. 14/1997	Lainnya	100,00%	1.246.431.260.941	-	34.726.471.812	-	-	18.369.375.441	-	1	1.262.788.357.311
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah						12.247.778.612.883	-	824.879.058.034	11.441.327.050	- 39.683.051.248	102.701.868.024	-	68.303.180.085	12.873.410.898.610
6	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	Audited 2024	1997	Akta No. 293/30-06-05	Saham	99,998%	23.991.197.246.177	2.183.400.000.000	-	18.737.400.022	- 804.792.901.781	-	517.180.237.172	2.624.609.250	24.868.736.897.996
7	PT Mass Rapid Transit Jakarta	Audited 2024	2008	Perda No. 4 Tahun 2008	Saham	99,998%	23.887.901.546.678	3.377.545.259.782	8.895.815.291	8.555.276.488	-	-	-	70.388.370	27.282.827.509.869
8	PT Bank DKI Jakarta	Audited 2024	1999	Akta No. 12/14-01-10	Saham	99,98%	10.982.535.682.062	2.190.760.167	778.920.228.937	12.538.170.638	-	326.362.883.842	-	99.509.268.424	11.350.312.689.538
9	PT Food Station Tjipinang	Audited 2024	1972	RUPS 26-08-1991	Saham	99,98%	617.635.223.340	-	11.587.276.026	280.486	-	1.856.956.748	-	-	627.365.823.104
10	PT Transportasi Jakarta	Audited 2024	2014	Perda No. 4 Tahun 2014	Saham	99,70%	4.701.221.698.896	-	199.965.480.155	-	-	55.452.326.932	-	2.856.149.045	4.842.878.703.074
11	PT Jakarta Tourindo	Audited 2024	2004	Akta No. 6/17-09-04	Saham	99,58%	567.235.405.681	-	-	123.212.831.795	- 16.861.920.574	-	49.151.702.900	-	658.158.455.150
12	PT Penjamin Kredit Daerah	Audited 2024	2013	Perda No.13 Tahun 2013	Saham	99,17%	413.139.843.427	200.000.000.000	27.174.234.990	520.388.295	-	7.686.754.330	-	371.471.055	632.776.241.327
13	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	Audited 2024	1991	Akta No. 13/1-04-2004	Saham	72,00%	1.185.955.200.453	-	128.009.520.049	-	-	36.863.999.968	-	42.804.720.063	1.234.296.000.471
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Perseroan Daerah						66.346.821.846.714	5.763.136.019.949	1.154.552.555.448	163.564.347.724	- 787.930.981.207	428.222.921.820	566.331.940.072	148.236.606.207	71.497.352.320.529
14	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2024	1973	Akta No.77/19-02-2009	Saham	53,06%	187.918.474.113	225.000.000.000	2.769.277.455.230	1.557.105.223	-	9.127.128.545	-	94.765.831.264	3.079.860.074.757
15	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2023	1961	Akta No.256-265/2005	Saham	38,80%	4.688.253.593.788	-	-	-	-	28.800.000.000	-	-	4.659.453.593.788
16	PT Ratax Armada	Unaudited 2014	1971	Akta No. 23/11-05-99	Saham	28,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	Audited 2024	1970	Laporan Keuangan th. 2005	Saham	26,25%	244.322.763.251	-	37.352.048.960	14	-	59.066.396.700	-	496.806.292	222.111.609.233
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan						5.120.494.831.152	225.000.000.000	2.806.629.504.190	1.557.105.237	-	96.993.525.245	-	95.262.637.556	7.961.425.277.778
	Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas						83.715.095.290.749	5.988.136.019.949	4.786.061.117.672	176.562.780.011	- 827.614.032.455	627.918.315.089	566.331.940.072	311.802.423.848	92.332.188.496.917
B	METODE BIAYA														
18	PT Cemani Toka	Audited 2024	1971	Akta No. 5/7-07-99	Saham	27,42%	27.059.360.000	-	-	-	-	-	-	-	27.059.360.000
19	PT Kawasan Berikat Nusantara	Unaudited 2024	2002	Akta No. 13/05-06-03	Saham	26,85%	209.692.695.000	-	-	-	-	-	-	-	209.692.695.000
20	PT Jakarta International Expo	Audited 2022	2004	Akta Hibah No. 67/22-07-2004	Saham	13,13%	39.375.000.000	-	-	-	-	-	-	-	39.375.000.000
21	PT Grahasahari Suryajaya	Audited 2020	1992	Akta No. 172/20-07-1992	Saham	8,08%	3.951.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.951.000.000
22	PT Asuransi Bangun Askrida	Audited 2023	1989	Akta No. 1192/25-7-05	Saham	4,10%	13.080.000.000	-	-	-	-	-	-	-	13.080.000.000
23	PT Pakuan International	Audited 2023	1971	-	Saham	1,11%	1.345.900.000	-	-	-	-	-	-	-	1.345.900.000
	Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Biaya						294.503.955.000	-	-	-	-	-	-	-	294.503.955.000
	Jumlah Investasi Permanen						84.009.599.245.749	5.988.136.019.949	4.786.061.117.672	176.562.780.011	- 827.614.032.455	627.918.315.089	566.331.940.072	311.802.423.848	92.626.692.451.917

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Ribuan Rupiah)																				
No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Hak Minoritas	Modal Disorot	Tambahan Modal Disorot	Ekuitas Lainnya	Lab a Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Penyesuaian	Kepemilikan Daerah		
																		Cost Method	Equity Method	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 a	18 b	19=(16 X 17)	20=(18a + 19)
1	Bidang Perbankan																			
	PT Bank DKI Jakarta	Audited 2024	79.941.227.000	1.746.530.000	682.884.000	82.370.641.000	63.389.266.000	7.628.501.000	71.017.767.000	-	6.579.944.000		1.133.117.000	3.639.813.000	11.352.874.000	99,98%	-		11.350.312.690	11.350.312.690
	Sub Total 1		79.941.227.000	1.746.530.000	682.884.000	82.370.641.000	63.389.266.000	7.628.501.000	71.017.767.000	-	6.579.944.000	-	1.133.117.000	3.639.813.000	11.352.874.000			-	11.350.312.690	11.350.312.690
2	Bidang Asuransi																			
	PT Asuransi Bangun Askrida	Audited 2023	4.713.586.660	181.896.675		4.895.483.336	676.191.966	2.909.114.661	3.585.306.627	18.544.965	5.770.000	18.285.907	21.985.753	715.985.001	762.026.661	4,10%	-	13.080.000		13.080.000
	Sub Total 2		4.713.586.660	181.896.675	-	4.895.483.336	676.191.966	2.909.114.661	3.585.306.627	18.544.965	5.770.000	18.285.907	21.985.753	715.985.001	762.026.661			13.080.000	-	13.080.000
3	Bidang Konstruksi																			
	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	Audited 2024	5.669.773.850	20.590.509.400	-	26.260.283.250	840.968.464	370.343.176	1.211.311.640	179.839.123	17.403.730.231	4.599.745.117	2.048.325	2.863.608.814	24.869.132.487	100,00%	-		24.868.736.898	24.868.736.898
	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2023	5.948.905.691	16.722.051.743	-	22.670.957.434	5.440.157.096	921.258.004	6.361.415.100	3.997.218.530	3.117.000	510.202.073	842.294.813	10.727.473.969	12.083.087.855	0,3880013	(28.800.000)		4.688.253.594	4.659.453.594
	Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	Audited 2024	1.309.425.458	4.901.276.290	-	6.210.701.748	208.742.770	429.509.471	638.252.241	343.161	5.625.000.000	-	(5.382.152)	(47.511.501)	5.572.106.347	100,00%	-		5.572.106.347	5.572.106.347
	Sub Total 3		12.928.104.999	42.213.837.433	-	55.141.942.432	6.489.868.330	1.721.110.651	8.210.978.981	4.177.400.814	23.031.847.231	5.109.947.190	838.960.986	13.543.571.282	42.524.326.689			-	35.129.096.839	35.100.296.839
4	Bidang Jasa Lainnya																			
	PT Jakarta International Expo	Audited 2022	282.866.683	1.907.310.610	-	2.190.177.293	355.769.243	1.501.390.244	1.857.159.486		300.000.000	2.800.000		30.217.807	333.017.807	13,13%	-	39.375.000		39.375.000
	Perumda Air Minum Jaya	Audited 2024	2.503.430.319	2.966.686.665	-	5.470.116.984	1.185.449.062	217.459.190	1.402.908.252		1.351.133.601	602.092.736	(101.770.871)	2.215.753.265	4.067.208.731	100,00%	-		4.067.208.731	4.067.208.731
	Perumda PAL Jaya	Audited 2024	696.181.925	614.142.576	-	1.310.324.502	32.473.206	15.062.939	47.536.145		1.025.971.763	15.195	186.304.163	50.497.236	1.262.788.357	100,00%	-		1.262.788.357	1.262.788.357
	Perumda Pasar Jaya	Audited 2024	830.478.469	2.742.408.041	-	3.572.886.510	380.435.927	1.660.232.017	2.040.667.944		1.259.125.545	-	(121.121.549)	394.214.569	1.532.218.565	100,00%	-		1.532.218.565	1.532.218.565
	PT Penjamin Kredit Daerah	Audited 2024	435.415.451	715.335.458	-	1.150.750.909	319.783.772	192.893.449	512.657.220		800.000.000	-	1.201.441	36.892.247	638.093.689	99,17%	-		632.776.241	632.776.241
	Sub Total 4		4.748.372.847	8.945.883.350	-	13.694.256.197	2.273.891.209	3.587.037.839	5.860.929.048	-	4.536.230.909	604.907.931	(35.386.815)	2.727.575.125	7.833.327.150			39.375.000	7.494.991.896	7.534.366.896
5	Bidang Perdagangan																			
	PT Food Station Tjipinang	Audited 2024	584.740.617	148.302.146	-	733.042.763	97.679.647	7.902.518	105.582.165		483.297.000	-	-	144.163.598	627.460.598	99,98%	-		627.365.823	627.365.823
	Perumda Dharma Jaya	Audited 2024	441.962.397	70.329.613	-	512.292.010	56.040.315	17.162.797	73.203.112		497.171.123	18.373.233	3.888.373	(80.343.832)	439.088.898	100,00%	-		439.088.898	439.088.898
	Sub Total 5		1.026.703.014	218.631.759	-	1.245.334.773	153.719.962	25.065.315	178.785.277	-	980.468.123	18.373.233	3.888.373	63.819.767	1.066.549.496			-	1.066.454.721	1.066.454.721
6	Bidang Pariwisata																			
	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	Audited 2024	394.466.000	3.197.263.000	-	3.591.729.000	569.550.000	1.288.302.000	1.857.852.000	19.577.000	400.000.000	40.404.000	(195.159.000)	1.469.055.000	1.714.300.000	72,00%	-		1.234.296.000	1.234.296.000
	PT Jakarta Tourindo	Audited 2024	131.148.369	745.052.731	-	876.201.100	157.315.791	57.948.036	215.263.827		713.545.000	731	19.197.443	(71.805.900)	660.937.273	99,58%	-		658.158.455	658.158.455
	PT Grahasahari Suryajaya	Audited 2020	1.421.672	233.389.973	-	234.811.646	119.503.345	268.960.176	388.463.521		48.870.000		95.546.748	(298.068.624)	(153.651.876)	8,08%	-	3.951.000		3.951.000
	PT Pakuan International	Audited 2023	623.711.749	833.358.294	-	1.457.070.043	838.627.193	376.700.534	1.215.327.727	3.598	121.000.000	5.875.031	114.863.685		241.738.717	1,11%	-	1.345.900		1.345.900
	Sub Total 6		1.150.747.790	5.009.063.998	-	6.159.811.788	1.684.996.329	1.991.910.746	3.676.907.075	19.580.598	1.283.415.000	46.279.762	34.448.877	1.099.180.476	2.463.324.114			5.296.900	1.892.454.456	1.897.751.356
7	Bidang Kawasan Industri																			
	PT Jakarta Industrial Estate Puloagung	Audited 2024	818.233.225	5.708.185.187	-	6.526.418.412	176.150.277	545.591.574	721.741.851		200.000.000	225.000.000	1.899.912	5.377.776.649	5.804.676.561	53,06%	-	-	3.079.860.075	3.079.860.075
	PT Kawasan Berikat Nusantara	Unaudited 2024	1.000.197.404	647.142.607	3.542.357.820	5.189.697.831	525.213.035	774.472.564	1.299.685.598	739.861	475.912.695		1.034.211.981	2.379.147.696	3.889.272.372	26,85%	-	209.692.695		209.692.695
	Sub Total 7		1.818.430.630	6.355.327.794	3.542.357.820	11.716.116.243	701.363.311	1.320.064.138	2.021.427.449	739.861	675.912.695	225.000.000	1.036.111.893	7.756.924.345	9.693.948.933			209.692.695	3.079.860.075	3.289.552.770
8	Bidang Angkutan Darat																			
	PT Ratax Armada	Unaudited 2014	135.826	3.385.949		3.521.775	253.635	5.322.734	5.576.369		5.500.000		-	(7.554.594)	(2.054.594)	28,00%	-	-	-	-
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	Audited 2024	3.504.037.000	25.592.467.000	-	29.096.504.000	621.053.000	1.190.126.000	1.811.179.000	1.931.000	24.081.085.000	3.377.546.000	3.520.000	(178.757.000)	27.283.394.000	100,00%	-	-	27.282.827.510	27.282.827.510
	PT Transportasi Jakarta	Audited 2024	3.297.837.000	4.360.849.000	-	7.658.686.000	879.129.000	1.922.183.000	2.801.312.000		3.351.000.000		-	1.506.374.000	4.857.374.000	99,70%	-	-	4.842.878.703	4.842.878.703
	Sub Total 8		6.802.009.826	29.956.701.949	-	36.758.711.775	1.500.435.635	3.117.631.734	4.618.067.369	1.931.000	27.437.585.000	3.377.546.000	3.520.000	1.320.062.406	32.138.713.406			-	32.125.706.213	32.125.706.213
9	Bidang Aneka Industri																			
	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	Audited 2024	959.222.731	158.954.457	-	1.118.177.188	216.736.168	206.921.572	61.351.496	3.876.157	16.013.181	19.015.656		810.999.126	846.027.963	26,25%	-	-	222.111.609	222.111.609
	PT Cemari Toka	Audited 2024	371.865.248	95.028.296	-	466.893.544	119.217.894	88.425.346	207.643.240		112.968.859		(2.869.839)	281.844.076	391.943.096	27,42%	-	27.059.360	-	27.059.360
	Sub Total 9		1.331.087.979	253.982.753	-	1.585.070.732	335.954.062	295.346.918	268.994.736	3.876.157	128.982.040	19.015.656	(2.869.839)	1.092.843.202	1.237.971.059			27.059.360	222.111.609	249.170.969
	Total Seluruh Bidang Industri		114.460.270.745	94.881.855.712	4.225.241.820	213.567.368.276	77.205.686.804	22.595.783.002	99.439.163.562	4.222.073.395	64.660.154.998	9.419.355.679	3.033.776.227	31.959.774.603	109.073.061.507	-		294.503.955	92.360.988.497	92.626.692.452

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Lab a (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain / Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Lab a (Rugi) Setelah pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Perbankan								
1.	PT Bank DKI Jakarta	Audited 2024	5.790.998.000	(2.943.723.000)	2.847.275.000	669.027.000	(2.508.803.000)	(228.403.000)	779.096.000
	Sub Total 1		5.790.998.000	(2.943.723.000)	2.847.275.000	669.027.000	(2.508.803.000)	(228.403.000)	779.096.000
2	Bidang Asuransi								
1.	PT Asuransi Bangun Askrida	Audited 2023	6.825.426.261	(6.672.541.686)	152.884.576	-	(24.333.497)	(12.402.977)	116.148.102
	Sub Total 2		6.825.426.261	(6.672.541.686)	152.884.576	-	(24.333.497)	(12.402.977)	116.148.102
3	Bidang Konstruksi								
1.	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	Audited 2024	1.475.331.878	(1.596.107.280)	(120.775.402)	304.894.524	(720.607.964)	18.072.809	(518.416.033)
2.	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2023	7.724.404.772	(6.315.987.791)	1.408.416.981	172.602.368	(188.122.901)	(81.303.217)	1.311.593.231
3.	Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	Audited 2024	342.987.311	(295.287.641)	47.699.670	1.817.685	(17.835.569)	(4.356.540)	27.325.247
	Sub Total 3		9.542.723.961	(8.207.382.712)	1.335.341.249	479.314.577	(926.566.434)	(67.586.948)	820.502.445
4	Bidang Jasa Lainnya								
1.	PT Jakarta International Expo	Audited 2022	412.697.874	(290.828.660)	121.869.213	-	(59.340.520)	(125.728)	62.402.966
2.	Perumda Air Minum Jaya	Audited 2024	2.973.926.648	(2.183.065.854)	790.860.794	179.582.173	(22.140.322)	(212.887.853)	735.414.792
3.	Perumda PAL Jaya	Audited 2024	125.169.873	(104.163.752)	21.006.121	29.073.471	(6.832.627)	(8.520.494)	34.726.472
4.	Perumda Pasar Jaya	Audited 2024	1.066.320.797	(1.079.805.398)	(13.484.601)	45.601.030	(10.181.052)	(2.489.707)	19.445.670
5.	PT Penjamin Kredit Daerah	Audited 2024	349.017.906	(311.343.120)	37.674.786	49.250.566	(53.567.734)	(5.955.029)	27.402.590
	Sub Total 4		4.927.133.099	(3.969.206.784)	957.926.314	303.507.240	(152.062.254)	(229.978.811)	879.392.489
5	Bidang Perdagangan								
1.	PT Food Station Tjipinang	Audited 2024	2.287.905.987	(2.265.808.837)	22.097.151	7.608.388	(14.239.046)	(3.877.466)	11.589.027
2.	Perumda Dharma Jaya	Audited 2024	808.613.158	(731.851.174)	76.761.984	5.903.780	(73.706.403)	(1.346.418)	7.612.943
	Sub Total 5		3.096.519.145	(2.997.660.010)	98.859.135	13.512.167	(87.945.448)	(5.223.884)	19.201.970
6	Bidang Pariwisata								
1.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	Audited 2024	1.306.886.000	(934.524.000)	372.362.000	983.000	(124.083.000)	(72.976.000)	176.286.000
2.	PT Jakarta Tourisindo	Audited 2024	97.250.321	(156.381.674)	(59.131.354)	5.207.190	(667.193)	5.232.130	(49.359.227)
3.	PT Grahasahari Suryajaya	Audited 2020	4.444.606	(25.319.260)	(20.874.654)	4.846.741	(20.076.603)	4.073.388	(32.031.128)
4.	PT Pakuan International	Audited 2023	539.041.194	(317.563.361)	221.477.834	43.134.399	(3.386.588)		261.225.645
	Sub Total 6		1.947.622.121	(1.433.788.295)	513.833.825	54.171.331	(148.213.384)	(63.670.482)	356.121.290

No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain / Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Laba (Rugi) Setelah pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Bidang Kawasan Industri								
1.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2024	199.267.926	(166.836.166)	32.431.760	5.356.237.855	(146.755.059)	(22.599.540)	5.219.315.016
2.	PT Kawasan Berikat Nusantara	Unaudited 2024	1.006.183.000	(391.126.000)	615.057.000	91.152.000	(388.399.000)	(2.686.000)	315.124.000
	Sub Total 7		1.205.450.926	(557.962.166)	647.488.760	5.447.389.855	(535.154.059)	(25.285.540)	5.534.439.016
			.						
8	Bidang Angkutan Darat								
1.	PT Ratax Armada	Unaudited 2014	1.591.567	(3.740.272)	(2.148.705)	97	-	-	(2.148.608)
2.	PT Mass Rapid Transit Jakarta	Audited 2024	1.385.873.000	(1.421.039.000)	(35.166.000)	152.100.000	(13.519.000)	(94.330.000)	9.085.000
3.	PT Transportasi Jakarta	Audited 2024	4.473.952.000	(3.962.728.000)	511.224.000	109.903.000	(374.013.000)	(46.549.000)	200.565.000
	Sub Total 8		5.861.416.567	(5.387.507.272)	473.909.295	262.003.097	(387.532.000)	(140.879.000)	207.501.392
9	Bidang Aneka Industri								
1.	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	Audited 2024	646.763.576	(197.801.959)	448.961.617	27.564.004	(295.168.480)	(38.989.742)	142.367.399
2.	PT Cemani Toka	Audited 2024	552.165.931	(485.625.779)	66.540.152	18.191.365	(2.377.058)	(17.631.490)	64.722.969
	Sub Total 9		1.198.929.507	(683.427.738)	515.501.769	45.755.369	(297.545.538)	(56.621.232)	207.090.368
	Total Seluruh Bidang		40.396.219.586	(32.853.199.664)	7.543.019.923	7.274.680.637	(5.068.155.614)	(830.051.874)	8.919.493.071

**DAFTAR ASET PROPERTI INVESTASI
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2024**

No	Nama Aset/Alamat	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 31 Desember 2024			
			Tanah	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Total
1	RT 10 RW 02 Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung Jakarta Timur	KSU Ceger Raya (24 April 2018)	664.734.000	184.464.000		849.198.000
2	Jl. Suryopranoto No.8	PT. Bank DKI	24.096.000.000	90.610.320.132		114.706.320.132
3	Jalan Kalibaru Timur VI Nomor 106A Kota Administrasi Jakarta Pusat	DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat	1.860.000.000	507.000.000		2.367.000.000
4	Jalan Kesatrian Pasar Pagi Nomor 3 Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara	DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara	849.600.000	507.000.000		1.356.600.000
5	Jalan Raya Joglo RT 03 RW 06 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta	1.982.400.000	540.800.000		2.523.200.000
6	Jalan Semanan Pintu Air RT 10 RW 08 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat	DPC PDI Perjuangan Jakarta Barat	1.968.624.000	507.000.000		2.475.624.000
7	Jalan Pasir Nomor 3 Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan	1.945.300.000	507.000.000		2.452.300.000
8	Tanah dan Gedung di Jalan H. Naman Nomor 3 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur	DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur	746.697.000	507.000.000		1.253.697.000
9	spbu Pompa Bensin DB-539 Tebet	GERINDRA	872.200.000	-		872.200.000
10	Kawasan Taman Impian Jaya Ancol Jalan Lodan Timur Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara	PT Pembangunan Jaya Ancol	24.780.000.000	4.309.094.400		29.089.094.400
11	Jalan Baladewa No.34 Rt 05/Rw 05, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat	Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI)	2.154.375.000	397.171.000		2.551.546.000
12	Jalan Otto Iskandardinata Raya No. 64 D, Kota Administrasi Jakarta Timur	Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Kota Jakarta Timur	6.725.550.000	144.143.000		6.869.693.000
13	Blok F5 Perumahan Citra Garden 1 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Tanimbar Lestari(8 Mei 2017)	1.087.020.000	92.630.000		1.179.650.000
14	Jalan Prang Trilis IX Blok B4/B Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara	Yayasan Ancol Barat (11 April 2017)	585.480.000	-		585.480.000
15	Jalan Gading Putih IV Kelapa Gading Permai, Jalan Gading Putih II Kelapa Gading Permai, Jalan Kelapa Hybrida VII Kelapa Gading Permai, Jalan Pelapa	Yayasan Pendidikan Elka (23 Maret 2018)	70.795.025.000	760.000.000		71.555.025.000
16	Perumahan Vila Gading Indah Blok D Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara	Yayasan Mahatma Gading(27 Oktober 2018)	3.311.250.000	6.352.289.364		9.663.539.364
17	Jalan Karya Selatan RT. 01/13 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok	Yayasan Al - Amanah Sunter Agung (8 Januari 2019)	452.748.274	28.149.979		480.898.253
18	Jalan Harsono RM Nomor 28 Belakang Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan	Yayasan Sapta Nawami Bhakti (15 Oktober 2017)	23.164.125.000	2.469.840.000		25.633.965.000
19	JALAN KRAMAT RAYA NO 47 KEL. KRAMAT KEC. SENEN JAKARTA PUSAT	PALANG MERAH INDONESIA	97.760.740.000	-		97.760.740.000
20	Tanah Klinik Medical Karya Blok CF1 dan Lap Tennis Mandiri- Kelapa Gading	Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara(BAST)	14.011.250.000	8.205.000.000		22.216.250.000
21	Kompleks Perumahan Taman Duta Mas Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat	PT Bumi Bintang Bersatu(2 Juli 2019)	40.932.850.000	5.246.947.886		46.179.797.886
22	Jalan Raya Boulevard Kelapa Gading Blok B2, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading	Mesjid Al Musyawara (13 Oktober 2019)	175.341.600.000	-		175.341.600.000
23	Komplek Perumahan Citra 1 Ext. Blok AA-5 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Tanimbar Lestari(25 April 2021)	1.509.000.000	-		1.509.000.000
24	Perumahan Citra 5 Blok E 7 Nomor 1 -2 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Pelita Bangsa(22 Desember 2020)	1.412.814.000	6.567.415.000		7.980.229.000
25	Perumahan Daan Mogot Baru Blok NA-1, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Pelita Harapan(30 Juni 2020)	52.156.615.000	23.870.840.000		76.027.455.000
26	Kawasan Rumah Susun Cengkareng Nomor 2, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Cengkareng 1	-	23.375.289.300		23.375.289.300
27	Gedung kantor dinas pariwisata jl. Kuningan Barat 1 Jakarta Selatan	Koppeg Dinas Pariwisata	-	532.350.000		532.350.000
28	PERUMAHAN TAMAN MERUYA ILIR BLOK F-1, KEL. MERUYA UTARA, KEC. KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	YAYASAN AL IKHWAN MERUYA	1.401.570.000	162.000.000		1.563.570.000
29	PERUMAHAN TAMAN MERUYA ILIR BLOK F-1, KEL. MERUYA UTARA, KEC. KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	YAYASAN AL IKHWAN MERUYA		5.355.700.000		5.355.700.000
30	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		56.678.102.450		56.678.102.450
31	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		2.112.033.000		2.112.033.000
32	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		2.619.804.000		2.619.804.000
33	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		3.296.832.000		3.296.832.000
34	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		56.419.000		56.419.000
35	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		4.165.194.000		4.165.194.000
36	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		1.493.877.000		1.493.877.000
37	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		1.442.364.000		1.442.364.000
38	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		58.872.000		58.872.000
39	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		404.745.000		404.745.000
40	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		1.226.500.000		1.226.500.000
41	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		7.035.204.000		7.035.204.000
42	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		9.591.230.000		9.591.230.000
43	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		39.248.000		39.248.000
44	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		1.668.040.000		1.668.040.000
45	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		367.950.000		367.950.000
46	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		9.812.000		9.812.000
47	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		58.872.000		58.872.000
48	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		156.992.000		156.992.000
49	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		895.345.000		895.345.000
50	Jalan Raya PKP Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur	PKP STIKES		1.579.732.000		1.579.732.000
51	Perumahan Taman Kedoya Baru, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat.	TK Lady Bird	531.456.000	-		531.456.000
52	Jl. Bhakti IV No 3 Komplek Dijen Pajak, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pajak	14.947.900.000	-		14.947.900.000
53	Jl. Pegangsaan Barat No 4, Kec. Menteng Jakarta Pusat	DPD Golkar	139.770.000.000	-		139.770.000.000
54	Jalan Pintu Air Raya, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat	PT PANCA PERMATA ISTANA PASAR BARU	50.857.380.000	18.961.520.000		69.818.900.000
55	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81 Komplek THR Lokasari Tangki Tamansari Jakarta Barat	PT Mitra Inti Prima	4.859.800.000			4.859.800.000
56	Jalan Musik Raya Blok Z-2 RT 003 RW 09, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara	Yayasan Al Huda	11.241.608.000			11.241.608.000
57	Jl. Alu-Alu No. 12 RT. 005 RW. 07, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur	Koperasi Simpan Pinjam Relasi Hafizh Nusantara	1.222.000.000			1.222.000.000
58	Jl Raya Kelapa Nias	PT GAMMA INVESTA LESTARI	120.720.075.000			120.720.075.000
59	Perumahan Citra Garden	Yayasan Bina Kusuma Mulia	1.332.606.000			1.332.606.000

No	Nama Aset/Alamat	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 31 Desember 2024			
			Tanah	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Total
60	jl. industri no 9-11 jakpus	PT Tunas Dipta Persada	9.256.610.000			9.256.610.000
61	Jalan Raya Meruya Selatan RW 01 (Sebelah Kampus Mercubuana Meruya Selatan) Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat	PT BBM Garden Pratama	31.636.584.000			31.636.584.000
62	Blok A 6 Perumahan Citra 3 Ekstension Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Harapan Bangsa	323.328.000			323.328.000
63	Perumahan Bintaro Jaya Sektor 1 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesangrahan Jakarta Selatan	PT Metro Djakarta Muda Angkasa	14.581.413.000			14.581.413.000
64	Perumahan Taman Alfa Indah di Blok G1 Kel. Joglo, Kec. Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat		12.562.572.000			12.562.572.000
65	jl rawa sumur timur, kavling blok III AA no 9-10	PT Majuan Masitah Latif	7.500.000.000			7.500.000.000
66	Jalan Teuku Umar Nomor 1 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat	PT Lingkar Seni Indonesia	42.643.125.000			42.643.125.000
67	Perumahan Kali Deres Permai	-	1.602.084.000			1.602.084.000
68	Jalan Raya Kebayoran Nomor 12 Kebayoran Lama Jakarta Selatan	PT Catur Manunggal Jati Motor	15.660.000.000			15.660.000.000
69	Jalan KH. Mas Mansur Kelurahan Kebon Melati Kecamatan tanah Abang Jakarta Pusat	PT Swadaya Niaga Jaya	52.617.390.000			52.617.390.000
70	Papanggo	Papanggo	1.964.655.000			1.964.655.000
71	Papanggo	Papanggo	7.853.760.000			7.853.760.000
72	Papanggo	Papanggo	6.112.665.000			6.112.665.000
73	jl insinyur h.juanda no 19,kel.kebon kelapa, kec.gambir, jakarta pusat	PT. Adicipta Boga Intiprima	12.997.500.000			12.997.500.000
74	Jl. Pulau Matahari III Blok B2 No.1 RT.007 RW.003	Yayasan E & P	1.801.762.000			1.801.762.000
75	Cengkareng Jakarta Barat	Yayasan Cengkareng 1	40.175.520.000			40.175.520.000
76	Jalan Taman Pejatan Mas Raya Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan	-	54.468.400.000			54.468.400.000
77	Pertokoan Glodok Blustru Jl. Blustru No.29 RT.1/RW.6, Mangga Besar Kec. Taman Sari Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11180	PT Gerakmaju Abadi	18.243.975.000			18.243.975.000
78	Perumahan Citra 2 Blok G 6 Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Diananda (TK)	441.500.000			441.500.000
79	Perumahan Taman Surya Blok -MM Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Suhargo	7.814.016.000			7.814.016.000
80	Jalan Puri Indah - Pasar Puri Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	PT Antilope Madju Puri Indah	20.775.000.000			20.775.000.000
81	Blok N3 Perumahan Citra 2 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Diananda (SD)	1.519.000.000			1.519.000.000
82	Jl. Pulau Sebaru Blok L1 No.21 Perumahan Permata Buana RT.010 RW.009	Yayasan Pelatihan E & P	14.750.250.000			14.750.250.000
83	Jl. Tamaran Indah Blok II J2A Pantai Indah Kapuk, Kapuk Muara Penjaringan Jak-Barat	Bapak Erwanto (RW 11)Kp.Muara	9.794.835.000			9.794.835.000
84	Kompleks Perumahan Taman Surya 5 Kelurahan Pegadungan Kacamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Suhargo	21.015.383.000			21.015.383.000
85	Jalan TB. Simatupang Nomor 1 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan	PT. Antam	56.802.850.000			56.802.850.000
86	Jalan Perbanas / Jalan Genteng Hijau RT.004 RW.017	Koperasi JKMB/	52.703.910.000			52.703.910.000
87	Jalan Perbanas / Jalan Genteng Hijau RT.004 RW.017	Koperasi JKMB keterangan di KIB belum dimanfaatkan	92.001.420.000			92.001.420.000
88	Jalan Tiang Bendera III dan IV RT 07 RW 03 Roa Malaka Tambora Jakarta Barat	PT Bank Jasa Jakarta	13.679.820.000			13.679.820.000
89	Jalan Raya Kembangan	PT Graha Royal Property	17.542.572.000			17.542.572.000
90	Jalan Kampung Semanan Semanan Kalideres Jakarta Barat	PT. Citra Adyapataka	47.943.105.000			47.943.105.000
91	Jalan TB Simatupang Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan	PT Antam	520.695.000			520.695.000
92	Jalan TB Simatupang Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan	PT Antam	28.610.820.000			28.610.820.000
93	Jalan TB Simatupang Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan	PT Antam	1.452.465.000			1.452.465.000
94	Jalan TB Simatupang Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan	PT Antam	1.918.350.000			1.918.350.000
95	Jalan Bantar Jati (Lingkar Luar Selatan) Setu Cipayung Jakarta Timur	PT. Liverpool Indonesia	67.863.885.000			67.863.885.000
96	Jalan Bantar Jati (Lingkar Luar Selatan) Setu Cipayung Jakarta Timur	PT. Liverpool Indonesia	21.887.565.000			21.887.565.000
97	Jalan Bantar Jati (Lingkar Luar Selatan) Setu Cipayung Jakarta Timur	PT. Liverpool Indonesia	612.465.000			612.465.000
98	Jalan Lingkar Luar Selatan Kav. 5 - 6 Susukan Ciracas Jakarta Timur	PT. Liverpool Indonesia	123.287.778.000			123.287.778.000
99	Jalan Raya Bogor KM. 26 Ciracas Ciracas Jakarta Timur	Frisian Flag	114.342.701.000			114.342.701.000
100	Jalan Raya Bogor KM. 26 Ciracas Ciracas Jakarta Timur	Frisian Flag	56.068.122.000			56.068.122.000
101	-6.159344, 106.921199 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	4.161.705.000			4.161.705.000
102	-6.158976, 106.916673 - Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	16.236.861.000			16.236.861.000
103	-6.160964, 106.918614 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	15.802.056.000			15.802.056.000
104	-6.161074, 106.920512 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	28.473.516.000			28.473.516.000
105	-6.159381, 106.921099 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	14.982.138.000			14.982.138.000
106	-6.160546, 106.921237 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	4.715.100.000			4.715.100.000
107	-6.160989, 106.920752 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	2.969.097.000			2.969.097.000
108	-6.161025, 106.920427 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	658.419.000			658.419.000
109	-6.161074, 106.920181 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	1.602.567.000			1.602.567.000
110	-6.161435, 106.920059 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	3.192.711.000			3.192.711.000
111	-6.161187, 106.920767 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	12.112.425.000			12.112.425.000
112	-6.161077, 106.918395 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	38.138.610.000			38.138.610.000
113	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	82.727.382.000			82.727.382.000
114	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	7.963.197.000			7.963.197.000
115	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	17.174.544.000			17.174.544.000
116	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	9.086.532.000			9.086.532.000
117	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	524.223.000			524.223.000
118	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	159.613.422.000			159.613.422.000
119	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	449.358.963.000			449.358.963.000
120	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	10.035.126.000			10.035.126.000
121	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	16.750.173.000			16.750.173.000
122	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	848.742.000			848.742.000
123	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	5.267.193.000			5.267.193.000

No	Nama Aset/Alamat	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 31 Desember 2024			
			Tanah	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Total
124	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	10.110.015.000			10.110.015.000
125	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	186.997.833.000			186.997.833.000
126	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	9.835.422.000			9.835.422.000
127	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	54.344.451.000			54.344.451.000
128	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	6.041.046.000			6.041.046.000
129	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	43.136.064.000			43.136.064.000
130	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	16.350.765.000			16.350.765.000
131	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81 Komplek THR Lokasari Tangki Tamansari Jakarta Barat	PT Mitra Inti Prima		413.200.000		413.200.000
132	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81 Komplek THR Lokasari Tangki Tamansari Jakarta Barat	PT Mitra Inti Prima		7.310.200.000		7.310.200.000
133	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81 Komplek THR Lokasari Tangki Tamansari Jakarta Barat	PT Mitra Inti Prima		361.800.000		361.800.000
134	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81 Komplek THR Lokasari Tangki Tamansari Jakarta Barat	PT Mitra Inti Prima		119.500.000		119.500.000
135	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81 Komplek THR Lokasari Tangki Tamansari Jakarta Barat	PT Mitra Inti Prima		12.000.000		12.000.000
136	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81 Komplek THR Lokasari Tangki Tamansari Jakarta Barat	PT Mitra Inti Prima		68.500.000		68.500.000
137	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81 Komplek THR Lokasari Tangki Tamansari Jakarta Barat	PT Mitra Inti Prima		96.800.000		96.800.000
138	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81 Komplek THR Lokasari Tangki Tamansari Jakarta Barat	PT Mitra Inti Prima		21.000.000		21.000.000
139	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81 Komplek THR Lokasari Tangki Tamansari Jakarta Barat	PT Mitra Inti Prima		30.700.000		30.700.000
140	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81 Komplek THR Lokasari Tangki Tamansari Jakarta Barat	Yayasan Bina Kusuma Mulia		39.600.000		39.600.000
141	Komplek Citra Garden I, Kalideres, Cengkareng, Jakarta Barat	Yayasan Diananda (SD)		393.120.000		393.120.000
142	Blok N3 Perumahan Citra 2 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	PT Gerak Maju Abadi		1.463.805.158		1.463.805.158
143	Jalan Blustru glodok RT 001 RW 006, Kel.Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota adm Jakarta Barat.	PT Mitra Inti Prima		1.900.000.000		1.900.000.000
144	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81 Komplek THR Lokasari Tangki Tamansari Jakarta Barat	PT Mitra Inti Prima		6.177.600.000		6.177.600.000
145	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81 Komplek THR Lokasari Tangki Tamansari Jakarta Barat	PT Mitra Inti Prima		14.383.700.000		14.383.700.000
146	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81 Komplek THR Lokasari Tangki Tamansari Jakarta Barat	PT Mitra Inti Prima		3.008.400.000		3.008.400.000
147	Perumahan Taman Alfa Indah Blok G 1 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat Joglo Kembangan Jakarta Barat	Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah		1.139.600.000		1.139.600.000
148	Jalan KH. Mas Mansur Kelurahan Kebon Melati Kecamatan tanah Abang Jakarta Pusat	PT Swadaya Niaga Jaya		52.558.200.000		52.558.200.000
149	Jalan Teuku Umar Nomor 1 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat	PT Lingkar Seni Indonesia		2.772.000.000		2.772.000.000
150	Jalan Ir. H. Juanda No. 19, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	PT Adicipta Boga Intiprima		915.000.000		915.000.000
151	Blok A 6 Perumahan Citra 3 Ekstension Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Harapan Bangsa		1.394.873.232		1.394.873.232
152	Perumahan Citra 2 Blok G 6 Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Diananda (TK)		218.450.000		218.450.000
153	Perumahan Taman Surya Blok-MM Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Suhargo		6.139.188.493		6.139.188.493
154	Perumahan Bintaro Jaya Sektor 1 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesangrahan Jakarta Selatan	PT Metro Djakarta Muda Angkasa		3.108.450.000		3.108.450.000
155	Jalan Puri Indah - Pasar Puri Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	PT Antilope Madiu Puri Indah		1.830.000.000		1.830.000.000
156	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		3.281.671.140		3.281.671.140
157	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		3.281.671.140		3.281.671.140
158	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		3.281.671.140		3.281.671.140
159	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		3.281.671.140		3.281.671.140
160	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		3.281.671.140		3.281.671.140
161	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		3.281.671.140		3.281.671.140
162	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		3.281.671.140		3.281.671.140
163	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		3.281.671.140		3.281.671.140
164	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		5.151.229.244	-	5.151.229.244
165	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		5.151.229.244		5.151.229.244
166	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		5.151.229.244		5.151.229.244
167	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		5.151.229.244		5.151.229.244
168	Cengkareng Jakarta Barat	Yayasan Cengkareng 1		11.355.820.000		11.355.820.000
169	Jl. Pulau Selayar I-1 Blok B1 Perumahan Permata Buana,Kemban	Yayasan Pelatihan E & P		17.216.524.646		17.216.524.646
170	Kompleks Perumahan Taman Surya 5 Kelurahan Pegadungan Kacamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Suhargo Gondokusumo		27.916.000.000		27.916.000.000
171	jl kartika utama/1 terusan kartika utama kelurahan pondok pinang.	PT Metropolitan Kentjana TBK		24.535.642.069		24.535.642.069
172	jl kartika utama/1 terusan kartika utama kelurahan pondok pinang.	PT Metropolitan Kentjana TBK		18.116.873.208		18.116.873.208
173	Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48 Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan	Perumda Pasar Jaya		975.732.250.111		975.732.250.111
174	Jalan Lingkar Luar Kamal Raya dan Jalan Kamal Outer Ring Road Cengkareng Barat Cengkareng Jakarta Barat	-		1.411.200.000		1.411.200.000
175	Jalan Lingkar Luar Kamal Raya dan Jalan Kamal Outer Ring Road Cengkareng Barat Cengkareng Jakarta Barat	-		227.600.000		227.600.000
176	Jalan Lingkar Luar Kamal Raya dan Jalan Kamal Outer Ring Road Cengkareng Barat Cengkareng Jakarta Barat	-		803.900.000		803.900.000
177	Jalan Lingkar Luar Kamal Raya dan Jalan Kamal Outer Ring Road Cengkareng Barat Cengkareng Jakarta Barat	-		30.500.000		30.500.000
178	Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48 Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan	PD PASAR JAYA			5.423.088.154	5.423.088.154
179	Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48 Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan	PD PASAR JAYA			4.585.186.294	4.585.186.294
180	Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48 Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan	PD PASAR JAYA			4.155.025.375	4.155.025.375
181	Jalan Sunter Garden Blok B 3 Nomor 10 B Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara	Yayasan Bait-EI Indonesia(29 Agustus 2016)	5.842.200.000	106.890.315		5.949.090.315
182	Perumahan Bisma Setjen Dewan Hankamnas Blok B8, C6, dan Perumahan Sunter Garden Blok B7 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok	Yayasan Harapan Bangsa (4 Juni 2017)	23.962.500.000	1.250.340.000		25.212.840.000
183	Perumahan Citra Garden Ext. 1 Blok AE 4 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat	Yayasan Haleluya Jakarta (17 November 2020)	1.346.796.000	2.499.130.379		3.845.926.379
184	Blok EE4 Perumahan Taman Ratu Indah Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat	Yayasan Abdi Karya (Yadika) (25 Februari 2020)	2.172.360.000			2.172.360.000
185	Blok B.6 dan A3 Perum Citra II Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Kemurnian	512.193.228			512.193.228
186	Blok B.6 dan A3 Perum Citra II Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Kemurnian	873.500.000			873.500.000
187	Jalan Lampiri Raya Nomor 28 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur	Yayasan Perguruan Rakyat (1 Februari 2019)	4.155.864.000	3.402.000.000		7.557.864.000

No	Nama Aset/Alamat	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 31 Desember 2024			
			Tanah	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Total
188	Kompleks Perumahan Citra 5 Blok D-6 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat	Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat(22 Juli 2019)	8.075.520.000	2.034.480.000		10.110.000.000
189	BLOK A.6, PERUMAHAN CITRA 3 EKSTENSION, KELURAHAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADM. JAKARTA BARAT	Yayasan Harapan Bangsa	1.042.734.000	212.940.000		1.255.674.000
190	Perumahan Taman Ratu Blok F-7 Dan Blok F 13 Nomor 2 Kelurahan Duri Kapa Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Rasa Sayang Mandiri(25 Oktober 2020)	4.074.336.000	2.424.240.000		6.498.576.000
191	Jalan Tanggul Cengkareng Drain Nomor 1 Basmol, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	Yayasan Anak Bangsa Basmol	2.256.512.000	1.837.800.000		4.094.312.000
192	Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Blok A10, Kel. Joglo, Kec. Kembangan	PT. Alfa Indah Sportindo (14 Maret 2017)	2.285.200.000	1.025.000.000		3.310.200.000
193	kompleks Perumahan Taman Semanan Indah, Jalan Dharma Raya Blok C1-2 Kel. Semanan Kec. Kalideres Kota Adm Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Kristen Tiara Kasih (25 Oktober 2022)	858.132.000			858.132.000
194	Perumahan Citra 2 Extention Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Citra Kasih	10.912.314.000	5.037.200.000		15.949.514.000
195	Perumahan Citra 2 Extention Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Citra Kasih		5.502.538.249		5.502.538.249
196	Jalan Agung Perkasa Blok J 14 Sunter Agung, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara	Yayasan Bait-El Indonesia (29 Agustus 2016)	28.566.000.000	2.525.600.000		31.091.600.000
197	Perumahan Taman Alfa Indah Blok A 9 Joglo Kembangan Jakarta Barat	GEREJA JAWA JOGLO	787.932.000			787.932.000
198	Jalan Harsono RM Nomor 10 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan	Yayasan Peduli Lingkungan Indonesia	51.767.856.000			51.767.856.000
199	Kompleks Perumahan Citra 5 Blok A-6 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan El Shaddai Jakarta Barat (21 November 2019)	835.040.000	198.906.861		1.033.946.861
200	Jalan Kumala Artha Gading Blok D - 11 Kawasan Sentra Bisnis Artha Gading Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara	PT Swadaya Panduartha (30 Oktober 2019)	5.964.000.000			5.964.000.000
201	Jalan Kumala Artha Gading Blok D - 11 Kawasan Sentra Bisnis Artha Gading Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara	PT Swadaya Panduartha (30 Oktober 2019)	19.629.015.000			19.629.015.000
202	Jl. RS. Fatmawati No. 20 Jakarta Selatan	PT Duta Pertiwi	3.648.000.000			3.648.000.000
203	Jalan Kedoya Pesing Komplek Perumahan Sunrise Garden Kedoya Kebon Jeruk Jakarta Barat	Yayasan Islam Taman Cahaya	10.382.344.000			10.382.344.000
204	Kelapa Gading	Al Hidayah Kelapa Gading	3.025.750.000			3.025.750.000
205	Perumahan Citra 3 Ext	Yayasan Harapan BangsaYayasan Harapan Bangsa	60.800.000			60.800.000
206	Perumahan Taman Permata Buana	Yayasan Pendidikan E&P Indonesia	273.436.000			273.436.000
207	Perumahan Menteng Metropolitan	Yayasan Ashabul JanatilUlya	5.167.371.000			5.167.371.000
208	Jalan Belimbing Raya Blok B.5, Kompleks Perumahan Bojong Indah, Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng	Yayasan Muslim Bojong Indah	163.800.000			163.800.000
209	Tanah Normalisasi Kali Pesanggrahan Jl. Meruya Ilir RT/RW 012/007 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat a.n Hendrawan Subiana	Koperasi Jasa Karya Muda Bersama	22.500.759.680			22.500.759.680
210	Jalan Pegangsaan Dua RT 001 / RW 003 (-6.158945 106.921202) Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT Astra Honda Motor	6.851.250.000			6.851.250.000
211	Jalan Pegangsaan Dua RT 001 / RW 003 (-6.158415 106.920871) Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT Astra Honda Motor	1.566.000.000			1.566.000.000
212	Jalan Pegangsaan Dua RT 001 / RW 003 (-6.159257 106.921114) Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT Astra Honda Motor	5.963.625.000			5.963.625.000
213	Jalan Pegangsaan Dua RT 001 / RW 003 (-6.158471 106.920735) Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT Astra Honda Motor	3.918.375.000			3.918.375.000
214	Bedugul	Dewan Pimpinan Pusat Gema Sadhana	52.372.300.000			52.372.300.000
215	JALAN GENTENG IJO KELURAHAN KARET KUNINGAN KECAMATAN SETIABUDI JAKARTA SELATAN	PT Zaman Bangun Pervita	31.668.459.000			31.668.459.000
216	JALAN TB. SIMATUPANG / LEBAK BULUS RAYA KELURAHAN LEBAK BULUS KECAMATAN CILANDAK JAKARTA SELATAN	PT MRTJ	88.568.724.000			88.568.724.000
217	Perumahan Taman Surya 5 Pegadungan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Suhargo Gondokusumo	12.730.500.000			12.730.500.000
218	Jalan Raya Bogor KM. 28 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur	PT Meiyume Manufacturing Indonesia	2.814.945.000			2.814.945.000
219	Jalan Raya Bogor KM. 28 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur	PT Meiyume Manufacturing Indonesia	1.073.975.000			1.073.975.000
220	Jalan Raya Bogor KM. 28 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur	PT Meiyume Manufacturing Indonesia	1.266.160.000			1.266.160.000
221	Jalan Raya Bogor KM. 28 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur	PT Meiyume Manufacturing Indonesia	3.289.755.000			3.289.755.000
222	Jalan Raya Bogor KM. 28 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur	PT Meiyume Manufacturing Indonesia	2.080.120.000			2.080.120.000
223	Jalan Raya Bogor KM. 28 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur	PT Meiyume Manufacturing Indonesia	825.265.000			825.265.000
224	Green Bay Pluit , Jalan Pluit Karang Ayu Pluit Penjaringan Jakarta Utara	PT Kencana Unggul Sukses	236.948.796.000			236.948.796.000
225	Jalan Peta Selatan Kalideres Kalideres Jakarta Barat	PT Ragamsehat Multifita	13.957.713.000			13.957.713.000
226	Jalan Pantai Mutiara (Mulai Dari Café Jetski, Polairud, Basarnas) Pluit Penjaringan Jakarta Utara	PT Pantai Mutiara Jetski	89.064.885.000			89.064.885.000
227	Jalan Pejaten Barat Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan	Yayasan Sekolah Internasional Australia	6.777.285.000			6.777.285.000
228	Pulau Tengah (-5.858778 106.604762) Pulau Pari Kepulauan Seribu Selatan Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	PT Setia Utama Island	154.739.548.280			154.739.548.280
229	Jl. Manggarai Utara 7 Manggarai Selatan Tebet Jakarta Selatan	Daruttaqwa Berlan	7.880.000.000			7.880.000.000
	TOTAL		4.178.110.485.462	1.553.795.480.328	14.163.299.823	5.746.069.265.613

**DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024**

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah Aset Tetap
Saldo per 31 Desember 2023	515.882.640.362.479,00	32.771.280.763.093,00	47.160.243.335.958,00	61.937.757.653.148,00	1.388.435.196.833,00	2.516.920.525.377,00	661.657.277.836.888,00
Mutasi Penambahan							
Belanja Modal TA 2024							
Belanja Modal TA 2024	433.525.287.650,00	2.961.717.289.383,00	2.385.010.773.455,00	4.975.949.887.118,00	119.496.671.697,00	2.288.369.743.420,00	13.164.069.652.723,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 yang tidak memenuhi kriteria/tidak menghasilkan Aset Tetap:	6.715.345.213,00	14.121.844.858,00	86.943.642.663,00	103.807.959.528,00	33.863.168.042,00	-	245.451.960.304,00
Pembayaran Utang atas Aset Telah Diakui tahun sebelumnya	-	1.234.347.102,00	75.771.592.587,00	77.926.504.446,00	-	-	154.932.444.135,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 yang menjadi Beban :	6.715.345.213,00	12.887.497.756,00	11.172.050.076,00	25.881.455.082,00	33.863.168.042,00	-	90.519.516.169,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 yang menjadi Persediaan	1.186.657.666,00	10.960.961.898,00	988.987.278,00	281.226.300,00	33.863.168.042,00	-	47.281.001.184,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 yang merupakan pembayaran Jasa	5.528.687.547,00	631.176.950,00	404.223.985,00	3.219.793.621,00	-	-	9.783.882.103,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 yang merupakan pembayaran pemeliharaan	-	1.295.358.908,00	9.778.838.813,00	22.380.435.161,00	-	-	33.454.632.882,00
Pengurang	2.521.467.890,00	200.481.629.794,00	716.008.404.783,00	1.649.003.203.225,00	-	72.744.541.038,00	2.640.759.246.730,00
Belanja Modal Tahun 2024 yang masih Dalam Proses Pengerjaan	2.521.467.890,00	149.801.506.774,00	673.903.210.435,00	1.462.143.558.321,00	-	-	2.288.369.743.420,00
Belanja Modal yang di akui sebagai Uang Muka	-	-	13.978.875.153,00	57.150.309.759,00	-	-	71.129.184.912,00
Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka	-	1.488.776.749,00	24.607.733.525,00	127.286.127.282,00	-	71.168.705.446,00	224.551.343.002,00
Belanja Modal pada Rekening Penampungan	-	48.702.830.358,00	2.398.606.038,00	529.486.942,00	-	1.242.459.446,00	52.873.382.784,00
Belanja Modal Tahun 2024 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	-	488.515.913,00	1.119.979.632,00	1.893.720.921,00	-	333.376.146,00	3.835.592.612,00
Belanja Modal TA 2024 yang Menjadi Aset Tetap	424.288.474.547,00	2.747.113.814.731,00	1.582.058.726.009,00	3.223.138.724.365,00	85.633.503.655,00	2.215.625.202.382,00	10.277.858.445.689,00
Kapitalisasi selain dari belanja modal	-	74.331.542.666,00	76.970.647.140,00	44.780.482.402,00	2.999.725.412,00	-	199.082.397.620,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang :	-	62.419.572.392,00	963.578.915,00	11.944.812.624,00	22.497.660,00	-	75.350.461.591,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang - APBD	-	62.168.931.190,00	658.610.160,00	-	22.497.660,00	-	62.850.039.010,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa - BLUD	-	101.866.202,00	-	-	-	-	406.834.957,00
Kapitalisasi dari Belanja Persediaan	-	148.775.000,00	-	11.944.812.624,00	-	-	12.093.587.624,00
Kapitalisasi dari Belanja Jasa	-	244.826.000,00	8.212.909.480,00	6.934.778.649,00	-	-	15.392.514.129,00
Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	-	11.667.144.274,00	67.794.158.745,00	25.900.891.129,00	2.977.227.752,00	-	108.339.421.900,00
Penambah	-	71.086.467.583,00	87.092.551.881,00	169.351.472.466,00	179.367.606,00	-	327.709.859.536,00
Uang Muka tahun sebelumnya	-	-	35.337.761.418,00	64.591.165.290,00	-	-	99.928.926.708,00
Beban Dibayar Di Muka tahun sebelumnya	-	442.800.000,00	42.793.221.592,00	104.760.307.176,00	-	-	147.996.328.768,00
Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-	70.643.667.583,00	8.961.568.871,00	-	179.367.606,00	-	79.784.604.060,00
Penyelesaian Aset KLB	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan yang belum Dibayarkan:	-	3.871.507.873,00	83.674.239.214,00	21.538.828.641,00	-	-	109.084.575.728,00
Pengadaan yang belum Dibayarkan - APBD	-	3.450.548.924,00	79.082.792.589,00	21.538.828.641,00	-	-	104.072.170.154,00
Pengadaan yang belum Dibayarkan - BLUD	-	420.958.949,00	4.591.446.625,00	-	-	-	5.012.405.574,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap:	109.459.885.610,00	233.704.983.955,00	645.357.493.851,00	453.885.533.488,00	9.223.614.254,00	546.450.809.555,00	1.998.082.320.713,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JIJ/ATL	109.459.885.610,00	184.855.896.377,00	101.144.777.503,00	275.148.675.230,00	9.223.614.254,00	546.450.809.555,00	1.226.283.658.529,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JIJ/ATL APBD	109.459.885.610,00	184.240.558.654,00	101.144.777.503,00	275.148.675.230,00	9.223.614.254,00	546.450.809.555,00	1.225.668.320.806,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JIJ/ATL (Dari Belanja Modal BLUD)	-	615.337.723,00	-	-	-	-	615.337.723,00
Reklasifikasi Dari KDP yang sudah selesai	-	48.849.087.578,00	544.212.716.348,00	178.736.858.258,00	-	-	771.798.662.184,00
Reklasifikasi ke KDP masih dalam proses pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi dari Aset Lainnya:	12.097.342.802.083,00	43.880.007.841,00	385.649.452.936,00	598.029.442.568,00	1.295.062.203,00	-	13.126.196.767.631,00
Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga:	15.887.256.000,00	1.921.586.129,00	16.760.750.000,00	-	-	-	34.569.592.129,00
Reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	2.560.536.000,00	-	11.476.550.000,00	-	-	-	14.037.086.000,00
Reklasifikasi dari Aset Kerjasama Pemanfaatan	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi dari Aset Kerjasama Bangun Guna Serah	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi dari Aset Kerjasama Bangun Serah Guna	13.326.720.000,00	-	5.284.200.000,00	-	-	-	18.610.920.000,00
Reklasifikasi dari Aset Pinjam Pakai	-	1.921.586.129,00	-	-	-	-	1.921.586.129,00
Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain:	12.081.455.546.083,00	41.958.421.712,00	368.888.702.936,00	598.029.442.568,00	1.295.062.203,00	-	13.091.627.175.502,00
Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	-	10.278.101.723,00	19.775.317.854,00	46.259.550,00	593.883.364,00	-	30.693.562.491,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah	3.763.536.000,00	364.333.728,00	71.995.900.136,00	-	-	-	76.123.769.864,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi dari Fasos Fasum	12.050.278.563.786,00	31.256.735.937,00	277.117.484.946,00	597.983.183.018,00	701.178.839,00	-	12.957.337.146.526,00
Reklasifikasi Kas Konsinyasi Menjadi Aset Tetap	27.413.446.297,00	-	-	-	-	-	27.413.446.297,00
Reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	59.250.324,00	-	-	-	-	59.250.324,00

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah Aset Tetap
Reklasifikasi dari Properti Investasi	10.302.090.000,00	-	-	-	-	-	10.302.090.000,00
Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel	-	-	56.566.321,00	-	-	-	56.566.321,00
Kurang Catat:	702.140.847.000,00	111.151.114,00	98.825.294.023,00	9.501.980.434,00	-	-	810.579.272.571,00
Kurang Catat Nilai	-	1.722.359,00	4.111.010,00	23.093.293,00	-	-	28.926.662,00
Kurang Catat Barang	702.140.847.000,00	109.428.755,00	98.821.183.013,00	9.478.887.141,00	-	-	810.550.345.909,00
							-
Jumlah Penambahan	13.343.534.099.240,00	3.174.099.475.763,00	2.959.684.971.375,00	4.520.226.464.364,00	99.331.273.130,00	2.762.076.011.937,00	26.858.952.295.809,00
							-
Pengurangan							-
Penghapusan	90.630.000.000,00	19.462.275.885,00	28.495.579.432,00	1.051.485.490,00	-	-	139.639.340.807,00
Penghapusan	90.630.000.000,00	19.389.860.545,00	28.495.579.432,00	1.051.485.490,00	-	-	139.566.925.467,00
Penghapusan sebelum Tahun 2024	-	72.415.340,00	-	-	-	-	72.415.340,00
							-
Hibah Keluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain TA 2024	-	145.771.000,00	-	-	-	-	145.771.000,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap:	13.962.083.754,00	44.721.685.220,00	949.570.449.253,00	163.917.603.057,00	14.867.755.351,00	811.042.744.078,00	1.998.082.320.713,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JIJ/ATL	13.962.083.754,00	44.721.685.220,00	949.570.449.253,00	163.917.603.057,00	14.867.755.351,00	39.244.081.894,00	1.226.283.658.529,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JIJ/ATL APBD	13.962.083.754,00	44.721.685.220,00	948.955.111.530,00	163.917.603.057,00	14.867.755.351,00	39.244.081.894,00	1.225.668.320.806,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JIJ/ATL (Dari Belanja Modal BLUD)	-	-	615.337.723,00	-	-	-	615.337.723,00
Reklasifikasi KDP yang sudah selesai	-	-	-	-	-	771.798.662.184,00	771.798.662.184,00
							-
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya:	39.862.885.352,00	5.417.926.918.982,00	283.862.128.696,00	41.093.513.250,00	263.673.955.661,00	470.499.740,00	6.046.889.901.681,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga:	37.140.411.000,00	1.093.780.000,00	7.900.945.803,00	-	-	-	46.135.136.803,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	37.140.411.000,00	-	-	-	-	-	37.140.411.000,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Pemanfaatan	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai	-	1.093.780.000,00	7.900.945.803,00	-	-	-	8.994.725.803,00
							-
Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	553.845.600,00	6.397.795.130,00	-	-	-	-	6.951.640.730,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Lain-Lain:	2.168.628.752,00	5.410.435.343.852,00	275.961.182.893,00	41.093.513.250,00	263.673.955.661,00	470.499.740,00	5.993.803.124.148,00
Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat	-	3.758.339.073.619,00	275.961.182.893,00	16.115.243.250,00	259.117.339.399,00	-	4.309.532.839.161,00
Reklasifikasi ke Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	470.499.740,00	470.499.740,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	-	95.389.999.667,00	-	1.752.000.000,00	4.556.616.262,00	-	101.698.615.929,00
Reklasifikasi ke Fasos Fasum	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi ke Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	1.556.706.270.566,00	-	23.226.270.000,00	-	-	1.579.932.540.566,00
Reklasifikasi ke Kas Konsinyasi	2.168.628.752,00						
							-
Reklasifikasi ke Aset PI	497.059.353.000,00	-	-	-	-	-	497.059.353.000,00
Reklasifikasi ke Beban Dibayar di Muka	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap yang tidak memenuhi Kriteria:	1.789.567.000,00	700.114.637,00	54.446.523.347,00	310.179.967.724,00	95.070.537.658,00	-	462.186.710.366,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Beban Barang	-	458.355.527,00	11.495.909.301,00	310.087.153.724,00	94.754.888.384,00	-	416.796.306.936,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Persediaan	-	101.149.110,00	-	-	-	-	101.149.110,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Jasa	1.789.567.000,00	140.610.000,00	407.407.611,00	-	-	-	2.337.584.611,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2024) ke Pemeliharaan	-	-	42.543.206.435,00	92.814.000,00	315.649.274,00	-	42.951.669.709,00
							-
Pengembalian atas temuan pemeriksaan	-	2.483.600,00	-	-	-	-	2.483.600,00
Lebih Catat	1.327.427.690.689,00	94.627.290,00	348.700.830.200,00	32.551.474.060,00	49.868.625,00	3.958.243.918,00	1.712.782.734.782,00
Koreksi Lebih Catat Nilai	-	2.269.740,00	418.070.510,00	-	49.868.625,00	-	470.208.875,00
Koreksi Lebih Catat Barang	1.327.427.690.689,00	92.357.550,00	348.282.759.690,00	32.551.474.060,00	-	-	1.708.354.281.989,00
Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	3.958.243.918,00	3.958.243.918,00
Koreksi Pencatatan Ganda	-	-	-	-	-	-	-
							-
Jumlah Mutasi Pengurangan	1.970.731.579.795,00	5.483.053.876.614,00	1.665.075.510.928,00	548.794.043.581,00	373.662.117.295,00	815.471.487.736,00	10.856.788.615.949,00
Saldo Per 31 Desember 2024	527.255.442.881.924,00	30.462.326.362.242,00	48.454.852.796.405,00	65.909.190.073.931,00	1.114.104.352.668,00	4.463.525.049.578,00	677.659.441.516.748,00

**DAFTAR SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN LAHAN
ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023**

No	HPL	Luas (m ²)	Wilayah	Alamat	Pemegang Hak
1	HPL No. 1/Cideng	13.395	Jakarta Pusat	Jln. Biak B. Stadion V.I.J	Pemprov DKI Jakarta
2	HPL No. 1/Mangga Dua Selatan	134.442	Jakarta Pusat	Mangga Dua Selatan	Pemprov DKI Jakarta
3	HPL No. 2/Mangga Dua Selatan	14.790	Jakarta Pusat	Jln Mangga Dua Abdad/Jln Pangeran Jayakarta	Pemprov DKI Jakarta
4	HPL No. 3/Kebon Kacang	1.262	Jakarta Pusat	Jl. Jati Bunder Rt.0016/09	Pemprov DKI Jakarta
5	HPL No. 1/Karet Tengsin	4.014	Jakarta Pusat	Jalan Karet Pasar Baru Barat I Rt 014/07	Pemprov DKI Jakarta
6	HPL No. 1/Papanggo	144.240	Jakarta Utara	Jl. Bisma Barat	Pemprov DKI Jakarta
7	HPL No. 1/Sunter Jaya	139.145	Jakarta Utara	Jl. Tepi Danau Permai	Pemprov DKI Jakarta
8	HPL No. 1/Semper Barat	4.770	Jakarta Utara	Kampung Semper Barat	Pemprov DKI Jakarta
9	HPL No. 45/Kamal Muara	3.120.000	Jakarta Utara	Pulau 2A (Pulau D)	Pemprov DKI Jakarta
10	HPL No. 46/Kamal Muara	1.093.580	Jakarta Utara	Pulau 2B (Pulau C)	Pemprov DKI Jakarta
11	HPL No. 6/Ancol	124.289	Jakarta Utara	Jl. Arteri Mangga Dua	Pemprov DKI Jakarta
12	HPL No. 1 / Ancol	4.779.120	Jakarta Utara	Jl. RE Martadinata	Pemprov DKI Jakarta
13	HPL No. 12 / Ancol	536.823	Jakarta Utara	Jl. Komplek Perumahan Puri Marina Ancol	Pemprov DKI Jakarta
14	HPL No. 1 / Pluit	208.665	Jakarta Utara	Jl. Pluit Indah / Pluit Permai	Pemprov DKI Jakarta
15	HPL No. 2 / Pluit	752.000	Jakarta Utara	Jl. Pantai Mutiara	Pemprov DKI Jakarta
16	HPL No. 3 / Pluit	24.880	Jakarta Utara	Jl. Pluit Timur	Pemprov DKI Jakarta
17	HPL No. 9 / Pluit	2.230	Jakarta Utara	Jl. Taman Pluit Kencana	Pemprov DKI Jakarta
18	HPL No. 1 / Kamal Muara	178.020	Jakarta Utara	Jl. Kamal Muara Raya	Pemprov DKI Jakarta
19	HPL No. 3 / Penjaringan	13.590	Jakarta Utara	Jl. Muara Baru	Pemprov DKI Jakarta
20	HPL No. 48/Ancol	200.000	Jakarta Utara	Kawasan Rekreasi Ancol Timur	Pemprov DKI Jakarta
21	HPL No.00001/Pluit	5.000	Jakarta Utara	Jl. Pantai Mutiara	Pemprov DKI Jakarta
22	HPL No. 52 / Pluit	10.944	Jakarta Utara	Jl. Pantai Mutiara	Pemprov DKI Jakarta
23	HPL No.00049/Penjaringan	10.575	Jakarta Utara	Kampung Aquarium RT 012 RW 004	Pemprov DKI Jakarta
24	HPL No.55 / Kalibaru	39.288	Jakarta Utara	Kalibaru	Pemprov DKI Jakarta
25	HPL No.53 / Cilincing	24.830	Jakarta Utara	Cilincing	Pemprov DKI Jakarta
26	HPL No. 54/ Pluit	97.207	Jakarta Utara	Jl. Muara Angke	Pemprov DKI Jakarta
27	HPL No. 1/Glodok	10.480	Jakarta Barat	Jl. Gajah mada No. 211 dan 212	Pemprov DKI Jakarta

No	HPL	Luas (m ²)	Wilayah	Alamat	Pemegang Hak
28	HPL No. 1/Taman Sari	1.230	Jakarta Barat	Jl. Mangga Besar IV/I,	Pemprov DKI Jakarta
29	HPL No. 2/Taman Sari	2.198	Jakarta Barat	Jl. Mangga Besar VIII,	Pemprov DKI Jakarta
30	HPL No. 1/Tangki	54.395	Jakarta Barat	Jl. Mangga Besar IX	Pemprov DKI Jakarta
31	HPL No. 1/Karet Kuningan	160.920	Jakarta Selatan	Jl. Rasuna Said	Pemprov DKI Jakarta
32	HPL No. 1/Tebet Barat	13.890	Jakarta Selatan	Jalan Tebet Barat Raya	Pemprov DKI Jakarta
33	HPL No. 1/Penggilingan	60.319	Jakarta Timur	Penggilingan	Pemprov DKI Jakarta
34	HPL No. 2/Penggilingan	272.569	Jakarta Timur	Penggilingan	Pemprov DKI Jakarta
35	HPL No. 4/Jatinegara	29.070	Jakarta Timur	Kav DPR (Kampung Pulo Jahe)	Pemprov DKI Jakarta
36	HPL No. 10/Jatinegara	151.797	Jakarta Timur	Jatinegara	Pemprov DKI Jakarta
37	HPL No. 11/Jatinegara	40.605	Jakarta Timur	Jatinegara	Pemprov DKI Jakarta
38	HPL No. 00001/Penggilingan	371.480	Jakarta Timur	Jl. Raya Penggilingan	Pemprov DKI Jakarta
39	HPL No. 1/Kayu Putih	88.200	Jakarta Timur	Jl. Pacuan Kuda	Pemprov DKI Jakarta
40	HPL No. 1/Cikini	2.221	Jakarta Pusat	Cikini	Pemprov DKI Jakarta
41	HPL No. 3/Mangga Dua Selatan	907	Jakarta Pusat	Mangga Dua Selatan	Pemprov DKI Jakarta
42	HPL No. 4/Mangga Dua Selatan	333	Jakarta Pusat	Mangga Dua Selatan	Pemprov DKI Jakarta
43	HPL No. 1/Wijaya Kusuma	86.074	Jakarta Barat	Wijaya Kusuma	Pemprov DKI Jakarta
44	HPL No. 16/Kapuk Muara	5.628	Jakarta Utara	Kapuk Muara	Pemprov DKI Jakarta
45	HPL No. 2/Tebet Barat	5.812	Jakarta Selatan	Tebet Barat	Pemprov DKI Jakarta
	Total	13.035.227			

DAFTAR ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA BOT, BTO, DAN KSP
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2024

No	Nama Pihak Ketiga	Lokasi	Jenis Aset	Nilai Aset Kerjasama BOT		Nilai Aset Kerjasama BTO			Nilai Aset Kerjasama Pemanfaatan	
				Tanah	Gedung dan Bangunan	Tanah	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	Tanah	Gedung dan Bangunan
ASET BANGUN GUNA SERAH (BUILD, OPERATE AND TRANSFER / BOT)										
1	PT Wahana Nusantara	Jl. H R Rasuna Said Kav C-22A, Kota Adm. Jakarta Selatan	Tanah	297.031.875.000	-					
2	PT. Metropolitan Kencana	JPO & JPO Multiguna PIM I dan PIM 2	Jembatan		0					
3	PT. Gerak Maju Abadi	Pengelolaan Gd. Pertokoan Jl. Blustro	Gedung	-	-					
4	PT. Duta Pertiwi	JPU Gd JICT dengan Gd. Dusit Mangga dua JP	Jembatan	-	0					
5	PT. Duta Pertiwi	JPU Harco Madu & Gedung Mangga dua Jl. Aquarium Jakarta Pusat	Jembatan	-	-					
6	PT. Duta Pertiwi	Jembatan/Bangunan Multiguna Mangdu	Jembatan	-	-					
7	PT. Kempas Indah Indonesia		Jembatan	-	-					
8	PT. Rointa Eka Jaya	JPO Grosir Tanah Abang & Pertokoan	Jembatan	-	-					
9	PT. Pacific Bangun Mas*	JPO Pasar Cipulir Jaksel	Jembatan	-	-					
10	PT. Dharma Alumas Sakti	Pengelolaan GOR Sumantri Kuningan	Gedung	577.563.000.000	-					
11	PT. Bina Citra Tataswati*	JPO Pertokoan Glodok	Jembatan	-	-					
12	PT. Bumi Grafika jaya	Pengembangan BUMD DKI Jaya, Tanah dan Bangunan Jl. MT. Haryono Luas 12.127 M	Tanah	48.508.000.000	-					
13	PT. Pacific Prima Buana Mas	Jl. Bekasi Barat Raya,Rawa Bunga Jaktim Nomor Aset 01.11.04.01 Luas 5300M2	Tanah Bangunan Toko dan SRO	24.406.500.000	-					
14	PT. AGB Tuna (pabrik es)	Pelelangan Ikan Muare Angke Pluit Jakarta Utara Luas 2800 M2	Tanah	-	-					
15	PT. AGB Tuna (cold storage)	Jl. Dermaga Kav.I Pluit Penjaringan Jakarta Utara 3234 m2	Tanah	-	-					
16	PT. Gading Raya Propertindo*	Pengelolaan JPO beserta fasilitasnya/ Pasar Ragional Tanah Abang Blok A Seluas 5858M	Jembatan	71.438.310.000	-					
17	PT. Duta Masa Nusa*	JPO Jl. Karel ST. Tubun & PS Kebon Jati Tnh Abang Blok D luas tanah 8310,52M	Jembatan	-	-					
18	PT. Perwita Margasakti*	JPO Mal Ambassador Kuningan, Jembatan 1.338M dan 1.662M	Jembatan	-	-					
19	PT. Hotel Cikini Realty*	Pembangunan Hotel Cikini Raya luas 5.115 M2 dengan Nomor Aset 01.11.04.08.00001	Tanah	49.334.175.000	-					
20	PT. Grand Indonesia*	Jembatan Multiguna di Jl. Teluk Betung Kel. Kebon Melati Kec.Tanah Abang Jak-Pus.	Jembatan Multiguna							
21	PT Bakrie (Gedung Nyl Ageng Serang)	Jl. H R Rasuna Said Kav C-22, Kota Adm. Jakarta Selatan	Tanah Kantor	123.282.652.500						
22	PT. Wahana Sejahtera	Tanah Terminal Transit Cililitan	Tanah	17.550.000.000	-					
JUMLAH ASET BANGUN GUNA SERAH (BUILD, OPERATE AND TRANSFER / BOT)				1.209.114.512.500	0	0	0	0	0	0
ASET BANGUN SERAH GUNA (BUILD, TRANSFER AND OPERATE / BTO)										
1	Yayasan Pendidikan Tiara Kasih	Perumahan Taman Semanan Kalideres Jakbar	Tanah Sekolah		-	6.223.392.000	6.254.605.100			
2	Yayasan Pendidikan Tunas Muda*	Tanah seluas 2.149m2 Kedoya Selatan	Tanah Sekolah			9.896.145.000	4.403.361.276			
3	Pengelolaan Lingkungan Terminal Blok M	PT LANGGENG AYOM LESTARI	Tanah Terminal			390.687.955.050	47.701.292.300			
4	PT. Fajar Setia Mandiri (Jaktim)*	Tanah Seluas 2.000 m2 Jl. Di Penjaitan Jatinegara Jakarta Timur	Tanah SPBU			7.128.225.000	4.883.444.400			
5	PT. Fajar Setia Mandiri (Jakut)	Tanah Seluas 3.088 m2 Jl. Danau Sunter Selatan Sunter Jaya Tg.Priok Jakut	Tanah SPBU			11.564.560.000	4.313.800.000			
6	Yayasan Patmos	Tanah di Taman Meruya ilir Blok E7 Kembangan Jakarta Barat	Bangunan Sekolah				4.090.967.000			
7	Yayasan Patmos	Tanah di Taman Meruya ilir Blok E7 Kembangan Jakarta Barat	Tanah Keseluruhan			2.599.080.000				
8	Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia	Tanah di Perumahan Permata Buana Blok L4 Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah			10.387.500.000	6.600.000.000			
9	PT. Pesona Marga Mandiri	Pembangunan Pengelolaan Kios Petak Psr Pagi luas 3300m.Jl. Petak Baru Pasar pagi	Tanah			16.813.500.000	10.482.000.000			
10	Yayasan Pendidikan Katolik Mardi Luhur*	Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Blok A9 Joglo Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah			5.309.436.000	4.170.342.000			
11	Yayasan Pendidikan Katolik Mardi Luhur*	Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Blok A9 Joglo Kembangan Jakarta Barat	Bangunan lantai 3				2.479.300.000			
12	Yayasan Bukit Sion*	Tanah Seluas 5,180 m2 di Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok.G.VII.Srengseng Kembangan Jakbar	Tanah Sekolah			21.522.900.000	10.689.612.352	1.919.950.000		
13	PT. Gama Investa Lestari	Komplek Bola Basket Internasional Kelapa Gading Jakarta Utara	Tanah			195.432.825.000	170.647.000.000			
14	Yayasan Tugasku	Jl. Pulo Mas Jaya Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jaktim seluas 4000 M2	Tanah			12.400.000.000	12.000.000.000			
15	Gereja Protestan Minahasa Sidang Yeremia Jakarta	Sarana Ibadah di Blok HF 4 Kel. Kelapa gading Barat Jakarta Utara.	Gereja			19.329.075.000	1.465.000.000			
16	Yayasan Al-Muhajirin Kelapa Gading*	Sarana Ibadah di Jl. Pendet RW 07 Kel. Kelapa gading Timur Jakarta Utara.	Masjid							
17	Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ecclesia*	Sarana Ibadah di Kompleks Taman Semanan Indah Blok NA No.1 Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat.	Gereja			6.039.936.000	3.080.986.780			
18	Yayasan Darul Ma'arif*	Sarana Ibadah di Jl. Lembah Aren Blok K3 Kavling DKI Kel.Pondok Kelapa Jakarta Timur.	Masjid			1.699.200.000	2.797.818.600			
JUMLAH ASET BANGUN SERAH GUNA (BUILD, TRANSFER AND OPERATE / BTO)						717.033.729.050	296.059.529.808	1.919.950.000		
ASET KERJASAMA PEMANFAATAN										
1	PT BAKRIE SWASAKTI UTAMA	KAWASAN GELANGGANG REMAJA SOEMANTRI BROJONEGORO, JL. HR RASUNA SAID, KUNINGAN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	Tanah						1.735.201.597.500	41.990.830.572
2	PT BAKRIE SWASAKTI UTAMA	KAWASAN GELANGGANG REMAJA SOEMANTRI BROJONEGORO, JL. HR RASUNA SAID, KUNINGAN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	BIAYA REHAB HALL A SUMANTRI						0	4.935.638.186
3	PT CAKRA SARANA PERSADA	Pengembangan dan Pembangunan Proyek Lingkungan Permukiman dalam Areal Kerja BP LIP	Tanah						119.047.220.000	
JUMLAH ASET KERJASAMA PEMANFAATAN				1.209.114.512.500	0	717.033.729.050	296.059.529.808	1.919.950.000	1.854.248.817.500	46.926.468.758
JUMLAH ASET BOT, BTO dan KSP				1.209.114.512.500			1.015.013.208.858			1.901.175.286.258

**DAFTAR ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA SEWA DAN PINJAM PAKAI
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2024**

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 31 Desember 2024							Keterangan	
			Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin			Jalan, irigasi, Jaringan	Aset tetap lainnya		Total
					Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga				
ASET KEKAYAAN DAERAH YANG DISEWAKAN											
1	j. kali besar timur no 31 jakarta barat	Eks. PD. Tastra Jaya	22.583.847.000							22.583.847.000	
2	j. raya bekasi km 17 klender, jakarta timur	Eks. PD. Undagi Jaya Klender	1.832.550.000							1.832.550.000	
3	j. pulo gadung kavling no 1 C.2	Tanah kavling No.1.C2	6.547.875.000							6.547.875.000	
4	j. pulo kembang no 5 kapling no II/J 14	Tanah kavling blok II/J.44/Eks.PD Parwita Jaya	5.293.200.000							5.293.200.000	
5	Tanah yang terletak di Jalan Pulau Pantara IV, Blok N.2, Perumahan Taman Permata Buana Kota Administrasi	Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Puri Indah	1.868.660.000							1.868.660.000	
6	Jalan Agung Timur 8 Blok O 2 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara	Yayasan Al Hikmah Sunter Jaya(30 Oktober 2019)	20.266.875.000							20.266.875.000	
7	Kompleks Perumahan Qaryah Thuyyibah Blok B Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)	1.225.588.000	1.913.589.000						3.139.177.000	
8	Perumahan Taman Kedoya Baru Jalan Angsana Raya Blok D8 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Je	Majelis Jemaat GKI Kedoya(15 November 2022)	5.673.360.000	990.000.000						6.663.360.000	
9	Kavling Mariner Blok Ae Pondok Kelapa, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi	Yayasan Baiturrahim	1.989.792.000							1.989.792.000	
10	Taman Villa Meruya Kelurahan Meruya Selatan Kec. Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	Paritita Pembangunan Masjid Al Tabayyun	1.236.466.000							1.236.466.000	
11	Jl Lodan Timur no.7 Kel Ancol, Kec.Pademangan, Kota Adm.Jakarta Timur	Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam	906.300.000.000							906.300.000.000	
12	Toyota new Avanza Veloz 1.5 AT	Dekranasda		1	189.960.000	189.960.000				189.960.000	
13	Stationary Water Pump	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	2.750.000	2.750.000				2.750.000	
14	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	200.000	200.000				200.000	
15	Lemari Besi/Metal	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	350.000	350.000				350.000	
16	Lemari Besi/Metal	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	650.000	650.000				650.000	
17	Lemari Besi/Metal	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	2.500.000	2.500.000				2.500.000	
18	Papan Visual/Papan Nama	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	570.000	570.000				570.000	
19	Papan Visual/Papan Nama	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	675.000	675.000				675.000	
20	White Board	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	450.000	450.000				450.000	
21	Alat Penghancur Kertas	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	1.050.000	1.050.000				1.050.000	
22	Mesin Absensi	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	1.200.000	1.200.000				1.200.000	
23	Alat Pemotong Kertas	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	250.000	250.000				250.000	
24	Headmachine Besar	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	70.000	70.000				70.000	
25	Overhead Projector	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	2.100.000	2.100.000				2.100.000	
26	Papan Pengumuman	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	385.000	385.000				385.000	
27	Meja Kerja Kayu	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	750.000	750.000				750.000	
28	Jam Mekanis	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	3.250.000	3.250.000				3.250.000	
29	Jam Mekanis	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	150.000	150.000				150.000	
30	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	1.350.000	1.350.000				1.350.000	
31	A.C. Split	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	2.450.000	2.450.000				2.450.000	
32	Kipas Angin	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	350.000	350.000				350.000	
33	Kipas Angin	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	4.800.000	4.800.000				4.800.000	
34	Kipas Angin	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	300.000	300.000				300.000	
35	Kipas Angin	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	3.150.000	3.150.000				3.150.000	
36	Loudspeaker	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	1.750.000	1.750.000				1.750.000	
37	Sound System	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	29.500.000	29.500.000				29.500.000	
38	Sound System	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	1.050.000	1.050.000				1.050.000	
39	Dispenser	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	450.000	450.000				450.000	
40	Mimbar/Podium	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	2.500.000	2.500.000				2.500.000	
41	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	1.200.000	1.200.000				1.200.000	
42	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	300.000	300.000				300.000	
43	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	175.000	175.000				175.000	
44	Microphone/Wireless MIC	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	250.000	250.000				250.000	
45	Microphone/Wireless MIC	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	900.000	900.000				900.000	
46	Pesawat Telephone	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	450.000	450.000				450.000	
47	Mesin Power Station White Emergency Diesel Generating	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	3.500.000	3.500.000				3.500.000	
48	P.C Unit	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	3.250.000	3.250.000				3.250.000	
49	Jl.Mangga Dua Raya Kel.Ancol,Kec.Pademangan Jakut dan Kel.Mangga Dua Selatan Kec.Sawah Besar Jakarta	PT Duta Pertiwi, Tbk						518.000.000		518.000.000	JPO/ KIB D
50	Jl.Mangga Dua Raya Kel.Ancol,Kec.Pademangan Jakut dan Kel.Mangga Dua Selatan Kec.Sawah Besar Jakarta	PT Duta Pertiwi, Tbk						10.026.000.000		10.026.000.000	JPO/ KIB D
51	Kotak amal kecil/kayu	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							200.000		
52	Kotak amal besar/besi	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							600.000		
53	Keranda Jenazah	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							3.750.000		
54	Karpet Sholat	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							4.425.000		
55	Kantong amal Sholat led	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							200.000		
56	Kain Panggung	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							750.000		
57	Tengki/Tandem air 1000 L	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							3.060.000		
58	Tirai pemisah jamaah pria dan wanita	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							7.500.000		
59	Rambu Lalu Lintas	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							300.000		
60	Tiang Mic pendek	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							275.000		
61	Tutup keranda jenazah	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							650.000		

			Saldo Akhir 31 Desember 2024							Keterangan	
No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin			Jalan, irigasi, Jaringan	Aset tetap lainnya		Total
					Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga				
62	Sepeda	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							200.000	200.000	
63	Tempat pemandian jenazah	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							2.000.000	2.000.000	
64		Bank DKI		57.798.000,00						57.798.000	
65	Perumahan Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara	Yayasan Elka	7.618.128.000							7.618.128.000	TK SD Tunas Karya
66	Perumahan Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara	Yayasan Elka	12.263.600.000							12.263.600.000	SMP SMA Tunas Karya
67	Jl. Janur Elok Raya Blok HF 4, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota administrasi Jakarta Utara	Gereja KGPM Sidang Yeremia	1.463.451.000							1.463.451.000	
68	Perumahan Tman Aries	Yayasan Al Hikmah Taman Aries	5.756.400.000							5.756.400.000	
69	Perumahan Citra 6 Kampung Menceng	Yayasan Madha Tantri	2.631.216.000							2.631.216.000	
70	Jl. Kepala Nias Blok HT 60, Kel Kelapa Gading Barat, Kec Kelapa Gading, Jakarta Utara	Gereja Tiberias Indonesia	34.509.195.000							34.509.195.000	
TOTAL ASET SEWA (I)			1.039.060.203.000	2.961.387.000			264.985.000	10.544.000.000	23.910.000	1.052.854.485.000	
ASET KEKAYAAN DAERAH YANG DIPINJAMPAKAIKAN											
1	Jl. Raya Kebon Jeruk No. 64 RT 04/RW 03, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi	BAWASLU JAKARTA BARAT	1.082.494.000	390.000.000						1.472.494.000	KANTOR
2	Jl. Prof. Satrio Kota Adm. Jakarta selatan	BADAN NARKOTIKA REPUBLIK INDONESIA	14.700.000.000	574.600.000						15.274.600.000	
3	Jl Kumala No. F1, Permata Hijau, Jakarta Selatan	KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN	494.884.000	289.674.000						784.558.000	RUMAH DINAS
4	Jl. Raya Kembangan Rt.001/02 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat 11610	Komando Garnisun Tetap I/Jakarta	2.886.000.000	1.110.362.000						3.996.362.000	
5	Jl. Tanah Abang II No. 102	Kantor BNN Prov. DKI Jakarta	7.216.470.000	12.898.867.460						20.115.337.460	
6	Jalan Salemba Raya No.15, Jakarta Pusat, ex Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm. Jakarta	DIGUNAKAN KPUD/KPU 5 Wilayah	12.869.100.000	21.479.076.750						34.348.176.750	
7	Jl. Anggrek Rosilana Blok E No.30RT 5/RW 2, Kemanggisan Kec. Palmerah Kota Jakarta Barat Daerah Khusus	Dewan Harian Cabang (DHC) Angkatan 45 Jak. Barat	164.034.000							164.034.000	
8	Jl. TB Simatupang no 2, Jakarta Timur	Kodam Jaya	24.800.000.000							24.800.000.000	
9	Jl. LAP- TEMBAK NO.75, RT.12/RW.2, CIBUBUR, KEC. CIRACAS, KOTA JAKARTA TIMUR, DAERAH KHU	Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI	22.586.616.000							22.586.616.000	
10	Jalan Kopelatif Blok A1 Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan tanjung Priok Jakarta Utara	Komis Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta	1.595.790.000	520.672.000						2.116.462.000	
11	Jl. RADEN INTEN II NO.3, RT.5/RW.14, DUREN SAWIT, KEC. DUREN SAWIT, KOTA JAKARTA TIMUR, D	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Timur	6.745.780.000	4.095.086.630						10.840.866.630	
12	Jalan Panjang C Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat	Komis Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta	2.151.772.000	936.067.000						3.087.839.000	
13	JALAN PULO MAS BARART VI KAV.14-16, KAYU PUTIH, PULO GADUNG, RT.3/RW.10, KAYU PUTIH, KEC	Komis Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta	2.658.800.000	2.023.489.000						4.682.289.000	
14	JALAN YOS SUDARSO KELURAHAN SUNGAI BAMBUI KECAMATAN TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA	Kemenkumham Nomor BAST 3910/-076.25 Tgl. 01-10-2015	17.507.875.000							17.507.875.000	
15	Jalan Sungai Landak No. 7, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara	Karwil Dep Kehakiman dan Ham DKI Jakarta (RUPBASAN)	1.911.000.000	819.280.000						2.730.280.000	
16	Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kota Administrasi Jakarta Timur	Kantor Regional V BKN	14.929.740.000							14.929.740.000	
17	Jalan Pantai Kuta V/I Ancol Pademangan Jakarta Utara	TNI Angkatan Laut	248.146.780.000							248.146.780.000	
18	Jl. Pahlawan Revolusi No. 38 Pondok Bambu Duren Sawit JakTim	Karwil DKI Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indone	104.062.035.000	985.150.000						105.047.185.000	
19	Jl. Sunter Permai Raya Papanggo Tanjung Priok Jakarta Utara	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) F	689.583.936.000							689.583.936.000	
20	Jalan Pejambon 7 Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat	KPU 5 Wilayah	77.884.560.000	2.388.994.000						80.273.554.000	
21	Jl. Bungur Kel. Rambutan (Lahan Pengganti Lantamal)	Pangkalan Utama TNI AL III	5.757.294.000							5.757.294.000	
22	Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan	KPU JAKARTA SELATAN	1.534.851.000							1.534.851.000	
23	Jl. Warung Buncit Raya no 11 Jakarta selatan	Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta JAKARTA SELATAN		1.000.600.000						1.000.600.000	
24	Gedung Perkantoran Krapu P. Karya Kel. Pulau Panggang, Kec. Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Kepulauan	BAWASLU PULAU SERIBU		532.671.000						532.671.000	
25	Jl. Danau Agung III No. 5, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	BADAN NARKOTIKA NATIONAL JAKARTA UTARA		1.337.819.300						1.337.819.300	
26	Gedung Graha Mental Spritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Bawaslu Jakarta Pusat		113.508.000						113.508.000	
27	Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		107.184.000						107.184.000	
28	Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
29	Jalan Hasyim Ashari Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
30	Jalan Raya Pasar Jumat Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
31	Jalan Sisengamaharaja - Trunojoyo Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
32	Jalan Pangeran Antasari - Panglima Polim / Melawai Blok M Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
33	Jalan Jend. S Parman Simpang Grogol Jakarta Barat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
34	Jalan Pluit Selatan, Simpang Pluit Jakarta Utara	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
35	Jalan A Yani, Simpang Pramuka Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
36	Jalan Kalimalang Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
37	Jalan Raya Taman Mini Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
38	Jalan Lapangan Banteng Utara Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
39	Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
40	Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
41	Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
42	Jalan Diponegoro Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
43	Jalan Mayjen Sutoyo Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
44	Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		107.184.000						107.184.000	
45	Jalan Menteng Raya Prapatan Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		107.184.000						107.184.000	
46	Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		61.820.000						61.820.000	
47	Jalan Salemba Raya Depan RS Carolus Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
48	Jalan MT Haryono Jakarta Selatan simpang pancoran	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
49	Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
50	Jalan Jend. S Parman Simpang Tomang Jakarta Barat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
51	Jalan Jend. S Parman Simpang Slipi Jakarta Barat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
52	Jalan Mayjen Sutoyo UKI Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 31 Desember 2024							Keterangan	
			Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin			Jalan, irigasi, Jaringan	Aset tetap lainnya		Total
					Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga				
53	Jalan Pustika Cibubur Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
54	Jalan Raya Kalibata Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
55	Jalan Suprpto / Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
56	Jalan Yos Sudarso Jakarta Utara	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
57	Jalan Raya Kembangan nomor 1 kelurahan kembangan utara kecamatan kembangan jakarta barat	Kejaksanaan Negeri Jakarta Barat		6.782.025.803						6.782.025.803	
58	Jl. Pahlawan Revolusi No. 38 Pondok Bambu Duren Sawit JakTim	Kanwil DKI Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia		1.118.920.000						1.118.920.000	
59	Transportable Generating Set				7	14.168.000	99.176.000			99.176.000	Highlander
60	Transportable Generating Set				1	33.000.000	33.000.000			33.000.000	
61	Transportable Generating Set				4	14.168.000	56.672.000			56.672.000	
62	Transportable Generating Set				1	25.300.000	25.300.000			25.300.000	
63	Transportable Generating Set				1	20.588.700	20.588.700			20.588.700	
64	Baggage Trolly				30	635.690	19.070.700			19.070.700	
65	Elektrik Panel Control				1	6.388.250	6.388.250			6.388.250	
66	Elektrik Panel Control				1	4.490.750	4.490.750			4.490.750	
67	Tool Kit Set				3	7.431.930	22.295.790			22.295.790	
68	Tool Kit Set				21	10.120.000	212.520.000			212.520.000	
69	Tool Kit Set				3	7.431.930	22.295.790			22.295.790	
70	Tool Kit Set				4	10.120.000	40.480.000			40.480.000	
71	Tool Kit Set				12	7.431.930	89.183.160			89.183.160	
72	Lemari Besi/Metal				42	2.415.600	101.455.200			101.455.200	
73	Lemari Besi/Metal				1	3.486.230	3.486.230			3.486.230	
74	Lemari Besi/Metal				9	3.820.300	34.382.700			34.382.700	
75	Lemari Besi/Metal				1	3.486.230	3.486.230			3.486.230	
76	Lemari Besi/Metal				1	3.820.300	3.820.300			3.820.300	
77	Lemari Besi/Metal				4	3.486.230	13.944.920			13.944.920	
78	Rak Besi				1	3.415.500	3.415.500			3.415.500	
79	Rak Besi				2	3.795.000	7.590.000			7.590.000	
80	Rak Besi				8	3.415.500	27.324.000			27.324.000	
81	Brandkas				2	6.650.820	13.301.640			13.301.640	
82	Brandkas				2	6.650.160	13.300.320			13.300.320	
83	Brandkas				3	6.650.820	19.952.460			19.952.460	
84	CCTV - Camera Control Television System				7	9.992.290	69.946.030			69.946.030	
85	CCTV - Camera Control Television System				6	12.016.290	72.097.740			72.097.740	
86	CCTV - Camera Control Television System				1	7.906.250	7.906.250			7.906.250	
87	CCTV - Camera Control Television System				2	3.795.000	7.590.000			7.590.000	
88	CCTV - Camera Control Television System				1	1.391.500	1.391.500			1.391.500	
89	Alat Penghancur Kertas				1	14.610.750	14.610.750			14.610.750	
90	Overhead Projector				1	6.578.000	6.578.000			6.578.000	
91	Overhead Projector				2	4.048.000	8.096.000			8.096.000	
92	Overhead Projector				3	6.578.000	19.734.000			19.734.000	
93	Overhead Projector				1	1.391.500	1.391.500			1.391.500	
94	Overhead Projector				1	6.578.000	6.578.000			6.578.000	
95	Overhead Projector				2	4.427.500	8.855.000			8.855.000	
96	Overhead Projector				2	6.578.000	13.156.000			13.156.000	
97	Overhead Projector				1	1.391.500	1.391.500			1.391.500	
98	Overhead Projector				1	6.578.000	6.578.000			6.578.000	
99	Overhead Projector				1	1.391.500	1.391.500			1.391.500	
100	Overhead Projector				1	6.578.000	6.578.000			6.578.000	
101	Overhead Projector				1	1.391.500	1.391.500			1.391.500	
102	Overhead Projector				6	6.578.000	39.468.000			39.468.000	
103	Display				3	1.707.750	5.123.250			5.123.250	
104	Display				2	2.150.500	4.301.000			4.301.000	
105	Display				1	3.415.500	3.415.500			3.415.500	
106	Display				1	2.150.500	2.150.500			2.150.500	
107	Papan Tulis				1	1.368.070	1.368.070			1.368.070	
108	Papan Tulis				7	963.930	6.747.510			6.747.510	
109	Papan Tulis				1	1.368.070	1.368.070			1.368.070	
110	Papan Tulis				1	963.930	963.930			963.930	
111	Papan Tulis				4	1.368.070	5.472.280			5.472.280	
112	Meja Kerja Besi/Metal				48	635.690	30.513.120			30.513.120	
113	Meja Kerja Kayu				31	1.823.800	56.537.800			56.537.800	
114	Meja Kerja Kayu				12	1.912.717	22.952.604			22.952.604	
115	Kursi Besi/Metal				200	535.150	107.030.000			107.030.000	

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 31 Desember 2024							Keterangan	
			Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin			Jalan, irigasi, Jaringan	Aset tetap lainnya		Total
					Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga				
116	Kursi Besi/Metal				100	347.270	34.727.000			34.727.000	
117	Kursi Besi/Metal				100	535.150	53.515.000			53.515.000	
118	Kursi Besi/Metal				45	466.840	21.007.800			21.007.800	
119	Kursi Besi/Metal				300	347.270	104.181.000			104.181.000	
120	Kursi Besi/Metal				75	535.150	40.136.250			40.136.250	
121	Kursi Besi/Metal				40	896.830	35.873.200			35.873.200	
122	Kursi Besi/Metal				255	535.150	136.463.250			136.463.250	Chairman
123	Kursi Besi/Metal				12	1.808.950	21.707.400			21.707.400	Chairman
124	Meja Rapat				36	1.914.550	68.923.800			68.923.800	Orbitrend
125	Kursi Rapat				8	1.640.540	13.124.320			13.124.320	Savelo Kingdom
126	Kursi Rapat				20	1.168.860	23.377.200			23.377.200	Savelo Kingdom
127	Kursi Rapat				5	918.390	4.591.950			4.591.950	Chairman
128	Kursi Rapat				15	635.690	9.535.350			9.535.350	VIP
129	Kursi Rapat				20	918.390	18.367.800			18.367.800	Chairman
130	Kursi Rapat				8	1.640.540	13.124.320			13.124.320	Savello
131	Kursi Rapat				5	918.390	4.591.950			4.591.950	Chairman
132	Kursi Rapat				32	1.640.540	52.497.280			52.497.280	Savelo Kingdom
133	Kursi Rapat				4	6.932.200	27.728.800			27.728.800	Ichiko Felcio
134	Kursi Rapat				9	5.199.150	46.792.350			46.792.350	Ichiko Felcio
135	Kursi Rapat				18	2.239.050	40.302.900			40.302.900	Chairman
136	Kursi Rapat				16	6.932.200	110.915.200			110.915.200	Ichiko
137	Kursi Tamu				1	11.021.340	11.021.340			11.021.340	Asean
138	Kursi Tamu				9	7.242.180	65.179.620			65.179.620	Scorpion
139	Kursi Tamu				19	4.427.500	84.122.500			84.122.500	Asean
140	Kursi Tamu				1	11.021.340	11.021.340			11.021.340	Asean
141	Kursi Tamu				3	4.427.500	13.282.500			13.282.500	Resit Minimalis
142	Kursi Tamu				4	11.021.340	44.085.360			44.085.360	Asean 321
143	A.C. Split				1	6.050.000	6.050.000			6.050.000	Sharp Plasmacluster
144	A.C. Split				3	5.692.500	17.077.500			17.077.500	Sharp Plasmacluster
145	A.C. Split				2	5.313.000	10.626.000			10.626.000	Sharp Plasmacluster
146	A.C. Split				1	17.710.000	17.710.000			17.710.000	Panasonic
147	A.C. Split				14	5.692.500	79.695.000			79.695.000	Sharp Plasmacluster
148	A.C. Split				2	6.050.000	12.100.000			12.100.000	Sharp Plasmacluster
149	A.C. Split				42	6.894.250	289.558.500			289.558.500	Dalkin
150	A.C. Split				6	5.692.500	34.155.000			34.155.000	Sharp Plasmacluster
151	Teko Listrik				6	3.273.160	19.638.960			19.638.960	Sharp
152	Kitchen Set				1	1.100.000	1.100.000			1.100.000	Expo
153	Loudspeaker				1	85.387.500	85.387.500			85.387.500	Yamaha
154	Sound System				1	7.235.800	7.235.800			7.235.800	TOA
155	Sound System				1	5.566.000	5.566.000			5.566.000	
156	Sound System				1	7.235.800	7.235.800			7.235.800	TOA
157	Sound System				1	5.566.000	5.566.000			5.566.000	Krezt
158	Sound System				4	7.235.800	28.943.200			28.943.200	TOA
159	Microphone				3	49.183.200	147.549.600			147.549.600	Auderpro
160	Microphone				1	15.534.200	15.534.200			15.534.200	Auderpro
161	Microphone				3	49.183.200	147.549.600			147.549.600	Auderpro
162	Microphone Table Stand				1	49.335.000	49.335.000			49.335.000	Auderpro
163	Dispenser				5	3.273.160	16.365.800			16.365.800	Sharp
164	Vertikal Blind				45	1.082.840	48.727.800			48.727.800	
165	Alat Pemadam/Portable				2	3.159.970	6.319.940			6.319.940	Gunnebo
166	Alat Pemadam/Portable				15	6.261.750	93.926.250			93.926.250	Gunnebo
167	Meja Kerja Pejabat Eselon II				30	5.275.050	158.251.500			158.251.500	Ichiko
168	Kursi Kerja Pejabat Eselon II				4	6.932.200	27.728.800			27.728.800	Ichiko
169	Layar Film/Projector				2	759.000	1.518.000			1.518.000	Screen G-lite
170	Layar Film/Projector				1	1.391.500	1.391.500			1.391.500	Letsec
171	Layar Film/Projector				4	759.000	3.036.000			3.036.000	Screen G-lite
172	Facsimile				3	12.207.250	36.621.750			36.621.750	
173	Facsimile				2	5.629.250	11.258.500			11.258.500	Printer Laser Jet M402D
174	Facsimile				3	3.542.000	10.626.000			10.626.000	Epson L365
175	Facsimile				1	5.629.250	5.629.250			5.629.250	Printer Laser Jet M402D
176	Facsimile				9	3.542.000	31.878.000			31.878.000	Epson L365
177	Facsimile				1	5.629.250	5.629.250			5.629.250	
178	Facsimile				3	3.542.000	10.626.000			10.626.000	Epson L365

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 31 Desember 2024							Keterangan	
			Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin			Jalan, irigasi, Jaringan	Aset tetap lainnya		Total
					Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga				
179	Facsimile				1	2.150.500	2.150.500			2.150.500	Panasonic KX-FT983
180	Facsimile				1	1.707.750	1.707.750			1.707.750	
181	Facsimile				2	2.150.500	4.301.000			4.301.000	
182	P.C Unit				3	12.016.290	36.048.870			36.048.870	Asua X450J
183	P.C Unit				12	11.891.000	142.692.000			142.692.000	Asua X450J
184	P.C Unit				5	9.992.290	49.961.450			49.961.450	Lenovo IP500s
185	P.C Unit				9	12.016.290	108.146.610			108.146.610	Asua X450J
186	Scanner (Peralatan Mini Komputer)				4	12.650.000	50.600.000			50.600.000	Fujitsu Scansnap
187	Modem				12	866.580	10.398.960			10.398.960	Bolt
188	Air Conditioning (AC)				8	4.300.000	34.400.000			34.400.000	Daikin
189	Kursi Besi/Metal				50	347.270	17.363.500			17.363.500	Chitose
190	Mobil Ambulance				1	325.250.000	325.250.000			325.250.000	
191	Sedan	BNN PROVINSI			1	260.331.000	260.331.000			260.331.000	Toyota Altis
192	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	610.350.000	610.350.000			610.350.000	
193	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	166.701.108	166.701.108			166.701.108	Toyota Avanza
194	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	166.701.108	166.701.108			166.701.108	Toyota Avanza
195	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	166.701.108	166.701.108			166.701.108	Toyota Avanza
196	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	331.320.000	331.320.000			331.320.000	Ford escape
197	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
198	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
199	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
200	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
201	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
202	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
203	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
204	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
205	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
206	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
207	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
208	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
209	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
210	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
211	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
212	Sedan Corolla Altis (B 1274 PQA)	KPU			1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
214	Sedan Corolla Altis (B 1316 PQA)	KPU			1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
215	Sedan Corolla Altis (B 1304 PQA)	KPU			1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
216	Sedan Corolla Altis (B 1336 PQA)	KPU			1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
217	Sedan Corolla Altis (B 1334 PQA)	KPU			1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
218	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) (B 1232 PQP)	KPU			1	235.628.571	235.628.571			235.628.571	Isuzu Panther
221	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) (B 1226 PQP)	KPU			1	235.628.571	235.628.571			235.628.571	Isuzu Panther
222	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) (B 9134 PSD)	KPU			1	317.521.250	317.521.250			317.521.250	Ford Ranger
223	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	242.521.250	242.521.250			242.521.250	Ford Ranger
224	Sedan				1	345.200.000	345.200.000			345.200.000	Toyota Altis
225	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) (B 1514 PQR)	KPU			1	274.600.011	274.600.011			274.600.011	Isuzu Panther
226	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) (B 1519 PQR)	KPU			1	274.600.011	274.600.011			274.600.011	Isuzu Panther
227	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) (B 1520 PQR)	KPU			1	274.600.011	274.600.011			274.600.011	Isuzu Panther
228	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	274.600.011	274.600.011			274.600.011	Isuzu Panther
229	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	274.600.011	274.600.011			274.600.011	Isuzu Panther
230	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	429.660.000	429.660.000			429.660.000	Toyota Fortuner 2.5
231	Sepeda Motor				1	15.000.000	15.000.000			15.000.000	Yamaha Jupiter Z CW
232	Sepeda Motor				1	15.000.000	15.000.000			15.000.000	Yamaha Jupiter Z CW
233	Sepeda Motor				1	16.500.000	16.500.000			16.500.000	Yamaha All New Soul
234	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	235.950.000	235.950.000			235.950.000	Mitsubishi Xpander
235	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	235.950.000	235.950.000			235.950.000	Mitsubishi Xpander
236	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	235.950.000	235.950.000			235.950.000	Mitsubishi Xpander
237	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	235.950.000	235.950.000			235.950.000	Mitsubishi Xpander
238	Sedan (B 1082 PQB)	BPN Jakarta Utara			1	406.830.000	406.830.000			406.830.000	
239	Sedan (B 1057 PQB)	Polda Metro Jaya			1	406.830.000	406.830.000			406.830.000	
240	Sedan (B 1073 PQB)	BPN Jakarta Timur			1	406.830.000	406.830.000			406.830.000	
241	Pick Up (B 9784 PSD)	Kodamjaya			1	451.000.000	451.000.000			451.000.000	
242	Pick Up (B 9812 PSD)	BPN Jakarta Utara			1	451.000.000	451.000.000			451.000.000	
243	MINIBUS TOYOTA KIJANG KF80 (B 2720 PQ)	KPU			1	145.000.000	145.000.000			145.000.000	
244	MINIBUS TOYOTA KIJANG KF80 (B 2719 PQ)	KPU			1	145.000.000	145.000.000			145.000.000	

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 31 Desember 2024							Keterangan	
			Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin			Jalan, irigasi, Jaringan	Aset tetap lainnya		Total
					Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga				
245	MINIBUS TOYOTA KIJANG KF80 (B 2718 PQ)	KPU			1	145.000.000	145.000.000			145.000.000	
246	MINIBUS TOYOTA KIJANG KF80 (B 2717 PQ)	KPU			1	145.000.000	145.000.000			145.000.000	
247	MINIBUS TOYOTA KIJANG KF80 (B 2716 PQ)	KPU			1	145.000.000	145.000.000			145.000.000	
248	MINIBUS TOYOTA KIJANG KF80 (B 2715 PQ)	KPU			1	145.000.000	145.000.000			145.000.000	
250	MINIBUS ISUZU PANTER TBR 54F TURBO H TOUR (B 1517 POR)	KPU			1	274.600.011	274.600.011			274.600.011	
251	MINIBUS TOYOTA KIJANG KF80 (B 2295 PQ)	KPP PRATAMA SETIABUDI			1	145.000.000	145.000.000			145.000.000	
252	MINI BUS SUZUKI AVP GC (B 2789 BQ)	KPP PRATAMA PANCORAN			1	66.000.000	66.000.000			66.000.000	
253	SUZUKI A 100 ECOMOS SUPER (B 6925 AQ)	KPU			1	12.925.000	12.925.000			12.925.000	
254	SUZUKI A 100 ECOMOS SUPER (B 6926 AQ)	KPU			1	12.925.000	12.925.000			12.925.000	
255	SUZUKI A 100 ECOMOS SUPER (B 6927 AQ)	KPU			1	12.925.000	12.925.000			12.925.000	
256	SUZUKI A 100 ECOMOS SUPER (B 6932 AQ)	KPU			1	12.925.000	12.925.000			12.925.000	
257	SUZUKI A 100 ECOMOS SUPER (B 6931 AQ)	KPU			1	12.925.000	12.925.000			12.925.000	
258	SUZUKI A 100 ECOMOS SUPER (B 6928 AQ)	KPU			1	12.925.000	12.925.000			12.925.000	
259	SUZUKI A 100 ECOMOS SUPER (B 6929 AQ)	KPU			1	12.925.000	12.925.000			12.925.000	
260	SUZUKI A 100 ECOMOS SUPER (B 6930 AQ)	KPU			1	12.925.000	12.925.000			12.925.000	
261	SUZUKI SMASH FD11- XCSD10 (B 6544 PQC)	KPP PRATAMA SETIABUDI			1	4.500.000	4.500.000			4.500.000	
262	NISSAN NAVARA (B 9786 PSD)	Kejaksanaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta			1	451.000.000	451.000.000			451.000.000	
263	MITSUBISHI EXPANDER (B 1976 PQT)	Kejaksanaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta			1	235.950.000	235.950.000			235.950.000	
264	TOYOTA COROLLA ALTIS (B 1006 PQB)	Kejaksanaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta			1	406.830.000	406.830.000			406.830.000	
TOTAL ASET PINJAM PAKAI (II)			1.261.269.811.000	61.882.104.783			22.871.232.996	-	-	1.346.023.208.779	
TOTAL ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA (I+II)										2.398.877.693.779	

**DAFTAR UTANG BELANJA PEGAWAI
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2024**

Lampiran 13.1

NO. URUT	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4-5-6)	8	9 = (7+8)
1	Dinas Pendidikan	290.346.651.230	-	-	290.346.651.230	-	253.875.485.205	253.875.485.205
2	Dinas Kesehatan	120.763.405.322	-	-	120.763.405.322	-	104.509.870.143	104.509.870.143
3	Dinas Bina Marga	9.987.718.969	-	-	9.987.718.969	-	8.839.660.584	8.839.660.584
4	Dinas Sumber Daya Air	9.328.657.233	-	-	9.328.657.233	-	8.071.625.069	8.071.625.069
5	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	10.974.299.964	-	-	10.974.299.964	-	9.831.121.173	9.831.121.173
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	7.277.019.247	-	-	7.277.019.247	-	6.391.751.147	6.391.751.147
7	Satuan Polisi Pamong Praja	46.566.810.330	-	-	46.566.810.330	-	41.900.764.330	41.900.764.330
8	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	43.862.423.773	-	-	43.862.423.773	-	38.812.490.872	38.812.490.872
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.671.132.999	-	-	-	1.671.132.999	1.401.072.775	3.072.205.774
10	Dinas Sosial	14.634.847.714	-	-	14.634.847.714	-	12.307.596.080	12.307.596.080
11	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	11.129.674.061	-	-	11.129.674.061	-	9.458.435.768	9.458.435.768
12	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	8.740.349.439	-	-	8.740.349.439	-	7.951.464.668	7.951.464.668
13	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	7.699.203.183	-	-	7.699.203.183	-	6.357.513.339	6.357.513.339
14	Dinas Lingkungan Hidup	11.522.584.382	-	-	11.522.584.382	-	9.915.369.776	9.915.369.776
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.941.589.776	-	-	9.941.589.776	-	9.990.346.653	9.990.346.653
16	Dinas Perhubungan	23.500.593.377	-	-	23.500.593.377	-	20.409.352.780	20.409.352.780
17	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	6.226.662.764	-	-	6.226.662.764	-	5.469.313.780	5.469.313.780
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.546.390.625	-	-	30.546.390.625	-	26.694.711.877	26.694.711.877
19	Dinas Pemuda Dan Olahraga	5.697.400.391	-	-	5.697.400.391	-	5.233.194.728	5.233.194.728
20	Dinas Kebudayaan	6.236.312.697	-	-	6.236.312.697	-	5.347.875.022	5.347.875.022
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.466.822.186	-	-	5.466.822.186	-	4.631.698.219	4.631.698.219
22	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5.263.434.111	-	-	5.263.434.111	-	5.189.343.911	5.189.343.911
23	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	10.688.316.243	-	-	10.688.316.243	-	9.086.952.208	9.086.952.208
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	7.641.077.295	-	-	7.641.077.295	-	6.457.498.837	6.457.498.837
25	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah	33.011.774.129	-	-	33.011.774.129	-	13.103.716.299	13.103.716.299
26	Sekretariat Dprd	2.241.256.477	-	-	2.241.256.477	-	1.766.170.759	1.766.170.759
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.687.460.754	-	-	5.687.460.754	-	4.826.177.596	4.826.177.596
28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.060.020.665	-	-	6.060.020.665	-	5.886.367.590	5.886.367.590
29	Badan Pengelolaan Aset Daerah	6.306.529.542	-	-	6.306.529.542	-	7.316.096.226	7.316.096.226
30	Badan Pendapatan Daerah	16.793.115.966	-	-	16.793.115.966	-	14.883.659.316	14.883.659.316
31	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4.306.738.601	-	-	4.306.738.601	-	3.834.370.130	3.834.370.130
32	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	1.312.882.959	-	-	1.312.882.959	-	1.138.119.222	1.138.119.222
33	Badan Kepegawaian Daerah	6.058.707.137	-	-	6.058.707.137	-	5.250.220.287	5.250.220.287
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.954.282.802	-	-	2.954.282.802	-	2.416.869.094	2.416.869.094
35	Inspektorat	6.971.901.549	-	-	6.971.901.549	-	5.982.962.689	5.982.962.689
36	Kota Administrasi Jakarta Pusat	14.703.787.037	-	-	14.703.787.037	-	12.741.470.259	12.741.470.259
37	Kota Administrasi Jakarta Utara	12.135.444.927	-	-	12.135.444.927	-	10.133.927.120	10.133.927.120
38	Kota Administrasi Jakarta Barat	17.699.578.704	-	-	17.699.578.704	-	15.059.849.438	15.059.849.438
39	Kota Administrasi Jakarta Selatan	22.878.280.751	-	-	22.878.280.751	-	19.500.810.064	19.500.810.064
40	Kota Administrasi Jakarta Timur	25.036.487.664	-	-	25.036.487.664	-	23.044.208.327	23.044.208.327
41	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	4.733.489.297	-	-	4.733.489.297	-	4.514.512.803	4.514.512.803
42	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.158.019.054	-	-	3.158.019.054	-	2.577.431.050	2.577.431.050
	Utang Belanja Pegawai	897.763.135.326	-	-	896.092.002.327	1.671.132.999	772.111.447.213	773.782.580.212

**DAFTAR UTANG BELANJA BARANG DAN JASA, BELANJA MODAL SKPD
PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2024**

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
	Utang Belanja Barang								
1	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	114.309.593	-	-	-	114.309.593	-	114.309.593
2	Dinas Pendidikan	Unit Pengelola Prasarana Dan Sarana Pendidikan	421.730.876	-	-	-	421.730.876	-	421.730.876
3	Dinas Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air	10.340.703.456	-	-	10.340.703.456	-	-	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	18.853.050.000	18.853.050.000
5	Dinas Sosial	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	165.906.250	165.906.250
6	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	160.191.031	160.191.031
7	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Pengelola Sampah Terpadu	689.106.175	-	-	689.106.175	-	187.327.914	187.327.914
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	4.370.000	-	-	4.370.000	-	-	-
9	Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	2.268.000	-	-	2.268.000	-	-	-
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	-	-	-	-	-	454.564	454.564
11	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	391.000	-	-	391.000	-	-	-
12	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat	-	-	-	-	-	1.755.000	1.755.000
13	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Krendang - Jakbar	1.800.000	-	-	1.800.000	-	-	-
14	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Jembatan Lima - Jakbar	416.210.210	-	-	416.210.210	-	-	-
15	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Jatipadang - Jaksel	11.442.962	-	-	11.442.962	-	7.455.173	7.455.173
16	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Cipete Utara - Jaksel	-	-	-	-	-	10.340.180	10.340.180
	Jumlah Utang Belanja Barang		12.002.332.272	-	-	11.466.291.803	536.040.469	19.386.480.112	19.922.520.581
	Utang Belanja Jasa Non TALI								
1	Dinas Pendidikan	Unit Pengelola Prasarana Dan Sarana Pendidikan	879.946.537	-	-	-	879.946.537	-	879.946.537
2	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur						57.097.845	57.097.845
3	Dinas Kesehatan	Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta	115.735.475.300	-	-	115.735.475.300	-	219.230.240.125	219.230.240.125
4	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok	595.782.961	-	-	595.782.961	-	-	-
5	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gambir	-	-	-	-	-	470.000	470.000
6	Dinas Kesehatan	Puskesmas Cempaka Putih	-	-	-	-	-	1.677.423	1.677.423
7	Dinas Kesehatan	Puskesmas Setiabudi	-	-	-	-	-	1.430.000	1.430.000
8	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jatinegara	745.724.472	-	-	745.724.472	-	747.740.638	747.740.638
9	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepulauan Seribu Utara	-	-	-	-	-	610.000	610.000
10	Dinas Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air	19.299.500	-	-	-	19.299.500	-	19.299.500
11	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	142.578.079	-	-	142.578.079	-	-	-

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
12	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	172.447.326	-	-	87.356.826	85.090.500	-	85.090.500
13	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	21.677.562	-	21.677.562	-	-	-	-
14	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	189.023.225	-	-	189.023.225	-	1.418.868	1.418.868
15	Dinas Sosial	Dinas Sosial	10.535.412	-	-	10.535.412	-	498.687.500	498.687.500
16	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah	-	-	-	-	-	824.694.411	824.694.411
17	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup						4.383.312.900	4.383.312.900
18	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota - Jaktim						14.112.332	14.112.332
19	Dinas Lingkungan Hidup	Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	98.338.826	-	-	98.338.826	-	-	-
20		Unit Penanganan Sampah Badan Air						3.795.599.544	3.795.599.544
21	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	705.008.625	-	-	-	705.008.625	112.116.277	817.124.902
22	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan	18.326.656	-	-	18.130.584	196.072	-	196.072
23	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas						234.558.540	234.558.540
24	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Angkutan Perairan	54.843.268	-	-	54.843.268	-	-	-
25	Dinas Kebudayaan	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakbar	-	-	-	-	-	218.910	218.910
26	Dinas Kebudayaan	Unit Pengelola Museum Kesejarahahan Jakarta						504.435.750	504.435.750
27	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						11.364.870.040	11.364.870.040
28	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Unit Pengelola Kawasan Kota Tua						3.660.905.000	3.660.905.000
29	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah						9.409.024.683	9.409.024.683
30	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD						306.553.000	306.553.000
31	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah						642.756.725	642.756.725
32	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Serdang - Jakpus	-	-	-	-	-	12.263.227	12.263.227
33	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Gambir - Jakpus	1.176.314	-	-	1.176.314	-	-	-
34	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara	-	-	-	-	-	8.525.742	8.525.742
35	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Jembatan Lima - Jakbar	2.697.300	-	-	2.697.300	-	-	-
36	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Petukangan Utara - Jaksel	-	-	-	-	-	2.024.924	2.024.924
37	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Tengah - Jaktim	-	-	-	-	-	53.282.687	53.282.687
	Jumlah Utang Belanja Jasa Non TALI		119.392.881.363	-	21.677.562	117.681.662.567	1.689.541.234	255.868.627.091	257.558.168.325
	Utang Belanja TALI								
1	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	4.651.564	-	-	4.651.564	-	-	-
2	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakpus	1.218.440	-	-	1.218.440	-	1.097.401	1.097.401
3	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakpus	-	-	-	-	-	2.251.272	2.251.272
4	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakut	-	-	-	-	-	516.074.110	516.074.110
5	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakut	11.751.906	-	-	11.751.906	-	5.138.682	5.138.682

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
6	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakbar	-	-	-	-	-	150.640	150.640
7	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaksel	2.692.152	-	-	2.692.152	-	2.325.236	2.325.236
8	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jaksel	165.478	-	-	165.478	-	3.016.792	3.016.792
9	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	8.079.083	-	-	8.079.083	-	11.376.686	11.376.686
10	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jaktim	7.052.500	-	-	7.052.500	-	-	-
11	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Kabupaten - Kep. Seribu	69.695.545	-	-	69.695.545	-	25.363.507	25.363.507
12	Dinas Pendidikan	Pusat Pelayanan Pendanaan Personal Dan Operasional Pendidikan	-	-	-	-	-	30.362.246	30.362.246
13	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin	42.874.087	-	-	42.874.087	-	50.732.804	50.732.804
14	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta	33.489.285	-	-	33.489.285	-	31.851.750	31.851.750
15	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta	37.233.889	-	-	37.233.889	-	24.917.110	24.917.110
16	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta	34.845.137	-	-	34.845.137	-	33.965.472	33.965.472
17	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta	9.935.271	-	-	9.935.271	-	9.041.823	9.041.823
18	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 26 Jakarta	35.424.580	-	-	35.424.580	-	43.100.140	43.100.140
19	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 20 Jakarta	12.927.375	-	-	12.927.375	-	11.451.852	11.451.852
20	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 13 Jakarta	24.273.941	-	-	24.273.941	-	17.799.805	17.799.805
21	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 51 Jakarta	13.702.600	-	-	13.702.600	-	22.883.600	22.883.600
22	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 Jakarta	23.235.622	-	-	23.235.622	-	19.580.986	19.580.986
23	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 32 Jakarta	12.509.865	-	-	12.509.865	-	19.333.144	19.333.144
24	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 33 Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 37 Jakarta	10.213.208	-	-	10.213.208	-	17.416.305	17.416.305
26	Dinas Pendidikan	Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan - Jakpus	20.357.998	-	-	20.357.998	-	35.899.106	35.899.106
27	Dinas Pendidikan	Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan - Jakbar	1.159.512	-	-	1.159.512	-	-	-
28	Dinas Pendidikan	Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan - Jaksel	11.293.713	-	-	11.293.713	-	11.295.281	11.295.281

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
29	Dinas Pendidikan	Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan - Jakut & Kep.Seribu	11.944.372	-	-	11.944.372	-	380.437.360	380.437.360
30	Dinas Pendidikan	Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan - Jaktim	28.117.850	-	-	28.117.850	-	23.475.829	23.475.829
31	Dinas Pendidikan	Unit Pengelola Prasarana Dan Sarana Pendidikan	13.484.782	-	-	13.484.782	-	-	-
32	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	144.835.901	144.835.901
33	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	24.980.019	24.980.019
34	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	6.854.099	-	-	6.854.099	-	6.231.670	6.231.670
35	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	3.705.656	-	-	3.705.656	-	953.502	953.502
36	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	27.623.262	-	-	27.623.262	-	26.165.311	26.165.311
37	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	-	-	-	-	-	-	-
38	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	11.752.915	-	-	11.752.915	-	-	-
39	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	11.981.695	11.981.695
40	Dinas Kesehatan	Laboratorium Kesehatan Daerah	242.388.618	-	-	242.388.618	-	158.833.781	158.833.781
41	Dinas Kesehatan	Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	17.240.691	17.240.691
42	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu	22.446.730	-	-	22.446.730	-	19.879.300	19.879.300
43	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	-	-	-	-	-	997.798.941	997.798.941
44	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	766.400.117	-	-	766.400.117	-	715.933.275	715.933.275
45	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	569.705.970	-	-	569.705.970	-	566.701.942	566.701.942
46	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	-	-	-	-	-	-	-
47	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	-	-	-	-	-	51.923.467	51.923.467
48	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar	-	-	-	-	-	47.390.600	47.390.600
49	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	-	-	-	-	-	46.023.263	46.023.263
50	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	80.604.189	-	-	80.604.189	-	110.132.040	110.132.040
51	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing	551.001	-	-	551.001	-	-	-
52	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan	-	-	-	-	-	-	-
53	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan	107.885.100	-	-	107.885.100	-	-	-
54	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	303.892.882	-	-	303.892.882	-	321.467.883	321.467.883

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
55	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	-	-	-	-	-	49.264.843	49.264.843
56	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	-	-	-	-	-	-	-
57	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan	62.342.220	-	-	62.342.220	-	58.646.900	58.646.900
58	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan	65.786.475	-	-	65.786.475	-	70.205.530	70.205.530
59	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Matraman	-	-	-	-	-	-	-
60	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tamansari	56.996.020	-	-	56.996.020	-	-	-
61	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok	75.192.275	-	-	75.192.275	-	54.529.845	54.529.845
62	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru	60.801.143	-	-	60.801.143	-	60.006.683	60.006.683
63	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang	71.604.819	-	-	71.604.819	-	70.035.214	70.035.214
64	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama	62.417.380	-	-	62.417.380	-	62.830.450	62.830.450
65	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung	58.052.290	-	-	58.052.290	-	46.898.153	46.898.153
66	Dinas Kesehatan	Pusat Krisis Dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	117.864.558	117.864.558
67	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanah Abang	63.754.181	-	-	63.754.181	-	57.427.108	57.427.108
68	Dinas Kesehatan	Puskesmas Menteng	48.339.183	-	-	48.339.183	-	47.240.025	47.240.025
69	Dinas Kesehatan	Puskesmas Senen	33.485.122	-	-	33.485.122	-	64.402.326	64.402.326
70	Dinas Kesehatan	Puskesmas Cempaka Putih	56.829.993	-	-	56.829.993	-	50.369.019	50.369.019
71	Dinas Kesehatan	Puskesmas Johar Baru	50.435.801	-	-	50.435.801	-	43.364.808	43.364.808
72	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sawah Besar	43.158.066	-	-	43.158.066	-	39.923.906	39.923.906
73	Dinas Kesehatan	Puskesmas Gambir	39.310.230	-	-	39.310.230	-	-	-
74	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pademangan	26.729.326	-	-	26.729.326	-	32.134.688	32.134.688
75	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanjung Priok	77.247.158	-	-	77.247.158	-	57.881.479	57.881.479
76	Dinas Kesehatan	Puskesmas Koja	-	-	-	-	-	79.902.750	79.902.750
77	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kelapa Gading	45.625.270	-	-	45.625.270	-	31.193.121	31.193.121
78	Dinas Kesehatan	Puskesmas Cilincing	67.573.904	-	-	67.573.904	-	61.601.473	61.601.473
79	Dinas Kesehatan	Puskesmas Grogol Petamburan	-	-	-	-	-	72.031.512	72.031.512
80	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tambora	49.522.711	-	-	49.522.711	-	51.721.529	51.721.529
81	Dinas Kesehatan	Puskesmas Taman Sari	34.896.380	-	-	34.896.380	-	25.493.276	25.493.276
82	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebayoran Lama	-	-	-	-	-	44.127.622	44.127.622
83	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pesanggrahan	36.432.874	-	-	36.432.874	-	35.287.462	35.287.462
84	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pasar Minggu	47.180.061	-	-	47.180.061	-	79.892.028	79.892.028
85	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jagakarsa	-	-	-	-	-	45.253.064	45.253.064
86	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mampang Prapatan	48.960.195	-	-	48.960.195	-	51.447.013	51.447.013
87	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pancoran	56.021.161	-	-	56.021.161	-	-	-
88	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kebayoran Baru	55.605.483	-	-	55.605.483	-	50.225.471	50.225.471
89	Dinas Kesehatan	Puskesmas Setiabudi	38.971.331	-	-	38.971.331	-	30.225.048	30.225.048
90	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tebet	-	-	-	-	-	61.019.912	61.019.912
91	Dinas Kesehatan	Puskesmas Cilandak	47.827.007	-	-	47.827.007	-	-	-
92	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pasar Rebo	53.805.554	-	-	53.805.554	-	49.302.315	49.302.315

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
93	Dinas Kesehatan	Puskesmas Ciracas	49.294.093	-	-	49.294.093	-	-	-
94	Dinas Kesehatan	Puskesmas Cipayung	90.278.242	-	-	90.278.242	-	72.837.329	72.837.329
95	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kramat Jati	71.959.252	-	-	71.959.252	-	65.613.994	65.613.994
96	Dinas Kesehatan	Puskesmas Makasar	61.338.406	-	-	61.338.406	-	57.199.966	57.199.966
97	Dinas Kesehatan	Puskesmas Jatinegara	75.269.891	-	-	75.269.891	-	74.890.121	74.890.121
98	Dinas Kesehatan	Puskesmas Matraman	62.673.331	-	-	62.673.331	-	61.131.985	61.131.985
99	Dinas Kesehatan	Puskesmas Pulo Gadung	48.536.957	-	-	48.536.957	-	-	-
100	Dinas Kesehatan	Puskesmas Cakung	80.277.081	-	-	80.277.081	-	85.658.435	85.658.435
101	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan	20.054.080	-	-	20.054.080	-	18.794.512	18.794.512
102	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga	20.580.500.451	-	-	20.580.500.451	-	20.089.781.663	20.089.781.663
103	Dinas Bina Marga	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakpus	42.354.175	-	-	42.354.175	-	35.458.205	35.458.205
104	Dinas Bina Marga	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakut	5.639.523	-	-	5.639.523	-	4.666.565	4.666.565
105	Dinas Bina Marga	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakbar	21.419.017	-	-	21.419.017	-	24.096.962	24.096.962
106	Dinas Bina Marga	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaksel	50.082.583	-	-	50.082.583	-	51.959.492	51.959.492
107	Dinas Bina Marga	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	18.402.016	-	-	18.402.016	-	18.295.492	18.295.492
108	Dinas Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air	9.668.833.170	-	-	9.668.833.170	-	7.103.701.037	7.103.701.037
109	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	307.977.749	-	-	307.977.749	-	336.165.876	336.165.876
110	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	119.493.912	-	-	119.493.912	-	125.285.144	125.285.144
111	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Unit Pengelola Rumah Susun I	-	-	-	-	-	-	-
112	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Unit Pengelola Rumah Susun Ii	136.058	-	-	136.058	-	-	-
113	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Unit Pengelola Rumah Susun Iii	216.450	-	-	216.450	-	-	-
114	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Unit Pengelola Rumah Susun Iv	-	-	-	-	-	-	-
115	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Unit Pengelola Rumah Susun V	106.840.840	-	-	106.840.840	-	105.678.640	105.678.640
116	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Unit Pengelola Rumah Susun Vi	-	-	-	-	-	-	-
117	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Unit Pengelola Rumah Susun Vii	-	-	-	-	-	-	-
118	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Unit Pengelola Rumah Susun Viii	-	-	-	-	-	-	-
119	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	1.042.274	-	-	1.042.274	-	-	-
120	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara	127.134	-	-	127.134	-	363.854	363.854
121	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat	7.737.690	-	-	7.737.690	-	3.200.142	3.200.142
122	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan	485.276	-	-	485.276	-	477.744	477.744
123	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	354.487.083	-	-	354.487.083	-	279.875.993	279.875.993

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
124	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	47.657.153	-	-	47.657.153	-	-	-
125	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	54.979.005	54.979.005
126	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	108.513.801	-	-	108.513.801	-	-	-
127	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	-	-	-	-	-	110.248.124	110.248.124
128	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	111.803.753	-	-	111.803.753	-	-	-
129	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	-	-	-	-	-	112.831.254	112.831.254
130	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	129.028.525	-	-	129.028.525	-	-	-
131	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	-	-	-	-	-	198.735.002	198.735.002
132	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	94.421.894	-	-	94.421.894	-	-	-
133	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	-	-	-	-	-	99.461.152	99.461.152
134	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Laboratorium Kebakaran Dan Penyelamatan	16.362.513	-	-	16.362.513	-	16.892.676	16.892.676
135	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	87.982.800	-	-	87.982.800	-	139.730.443	139.730.443
136	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Pusat Data Dan Informasi Kebencanaan	-	-	-	-	-	1.542.120	1.542.120
137	Dinas Sosial	Dinas Sosial	132.481.120	-	-	132.481.120	-	133.682.143	133.682.143
138	Dinas Sosial	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	6.539.012	-	-	6.539.012	-	6.177.574	6.177.574
139	Dinas Sosial	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	12.993.654	-	-	12.993.654	-	9.304.174	9.304.174
140	Dinas Sosial	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	6.383.970	-	-	6.383.970	-	5.312.578	5.312.578
141	Dinas Sosial	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	25.651.848	-	-	25.651.848	-	26.914.844	26.914.844
142	Dinas Sosial	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	31.354.363	-	-	31.354.363	-	30.967.138	30.967.138
143	Dinas Sosial	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	8.682.753	-	-	8.682.753	-	10.167.490	10.167.490

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
144	Dinas Sosial	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	22.334.812	-	-	22.334.812	-	21.963.614	21.963.614
145	Dinas Sosial	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3	-	-	-	-	-	16.776.402	16.776.402
146	Dinas Sosial	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	19.830.960	-	-	19.830.960	-	15.548.230	15.548.230
147	Dinas Sosial	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2	31.991.698	-	-	31.991.698	-	31.662.764	31.662.764
148	Dinas Sosial	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	21.410.153	-	-	21.410.153	-	22.595.673	22.595.673
149	Dinas Sosial	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	16.444.461	-	-	16.444.461	-	13.339.600	13.339.600
150	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Netra Dan Rungu Wicara Cahaya Batin	15.167.818	-	-	15.167.818	-	15.520.196	15.520.196
151	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	16.224.617	-	-	16.224.617	-	14.028.603	14.028.603
152	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	18.831.460	-	-	18.831.460	-	-	-
153	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	24.039.327	-	-	24.039.327	-	28.611.137	28.611.137
154	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	12.240.563	-	-	12.240.563	-	27.211.728	27.211.728
155	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	21.331.345	-	-	21.331.345	-	17.711.711	17.711.711
156	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	-	-	-	-	-	28.970.239	28.970.239
157	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	7.405.761	-	-	7.405.761	-	8.119.645	8.119.645
158	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	10.970.901	-	-	10.970.901	-	14.703.318	14.703.318
159	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	625.836	-	-	625.836	-	15.823.816	15.823.816
160	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	-	-	-	-	-	23.115.218	23.115.218
161	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	25.503.217	-	-	25.503.217	-	28.267.994	28.267.994
162	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4	21.787.209	-	-	21.787.209	-	21.758.124	21.758.124
163	Dinas Sosial	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	17.598.661	-	-	17.598.661	-	10.190.608	10.190.608
164	Dinas Sosial	Pusat Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	246.812	246.812
165	Dinas Sosial	Sekretariat Masjid Raya Kh Hasyim Asy'Ari	44.783.741	-	-	44.783.741	-	-	-
166	Dinas Sosial	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Islam Jakarta	245.379.489	-	-	245.379.489	-	221.301.354	221.301.354
167	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	82.061.372	-	-	82.061.372	-	100.443.330	100.443.330

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
168	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jakut	22.492.064	-	-	22.492.064	-	26.307.541	26.307.541
169	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakpus	238.428	-	-	238.428	-	-	-
170	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakut	41.103.196	-	-	41.103.196	-	19.047.559	19.047.559
171	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakbar	31.689.892	-	-	31.689.892	-	37.292.392	37.292.392
172	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaksel	16.870.344	-	-	16.870.344	-	19.297.587	19.297.587
173	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	46.873.744	-	-	46.873.744	-	82.736.312	82.736.312
174	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las	50.930.821	-	-	50.930.821	-	24.257.347	24.257.347
175	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	141.215.087	-	-	141.215.087	-	49.716.137	49.716.137
176	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	19.155.926	-	-	19.155.926	-	19.061.901	19.061.901
177	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah	16.597.787	-	-	16.597.787	-	15.954.044	15.954.044
178	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	101.671.485	-	-	101.671.485	-	106.766.939	106.766.939
179	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Jakpus	11.157.223	-	-	11.157.223	-	11.684.473	11.684.473
180	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Jakut	10.767.138	-	-	10.767.138	-	7.255.970	7.255.970
181	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Jaksel	5.829.698	-	-	5.829.698	-	6.299.601	6.299.601
182	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Jaktim	13.859.030	-	-	13.859.030	-	10.479.210	10.479.210
183	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Kab. Adm - Kep. Seribu	66.600	-	-	66.600	-	-	-
184	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak	26.113.253	-	-	26.113.253	-	32.090.012	32.090.012
185	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Serta Keluarga Berencana	6.873.140	-	-	6.873.140	-	7.087.280	7.087.280
186	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	301.592.967	-	-	301.592.967	-	268.416.466	268.416.466
187	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat	3.830.255	-	-	3.830.255	-	9.650.548	9.650.548

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
188	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan	13.867.839	-	-	13.867.839	-	11.842.967	11.842.967
189	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	331.408	-	-	331.408	-	662.816	662.816
190	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2.512.959	-	-	2.512.959	-	4.686.849	4.686.849
191	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Pusat Produksi, Inspeksi Dan Sertifikasi Hasil Perikanan	107.325.567	-	-	107.325.567	-	102.694.998	102.694.998
192	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	95.634.803	-	-	95.634.803	-	107.714.694	107.714.694
193	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Pusat Budidaya Dan Konservasi Laut	30.771.353	-	-	30.771.353	-	26.535.226	26.535.226
194	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Pusat Pengembangan Benih Dan Proteksi Tanaman	65.078.120	-	-	65.078.120	-	62.169.790	62.169.790
195	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Pusat Promosi Dan Sertifikasi Hasil Pertanian	93.564.616	-	-	93.564.616	-	86.304.089	86.304.089
196	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	185.861.454	-	-	185.861.454	-	-	-
197	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat	64.565.835	-	-	64.565.835	-	86.442.694	86.442.694
198	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	-	-	-	-	-	-	-
199	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat	54.460.629	-	-	54.460.629	-	-	-
200	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan	54.555.331	-	-	54.555.331	-	-	-
201	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur	90.575.516	-	-	90.575.516	-	94.678.538	94.678.538
202	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	-	-
203	Dinas Lingkungan Hidup	Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	61.805.558	-	-	61.805.558	-	46.280.429	46.280.429
204	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Pengelola Sampah Terpadu	989.281.968	-	-	989.281.968	-	-	-
205	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Penanganan Sampah Badan Air	132.665.260	-	-	132.665.260	-	-	-
206	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	93.921.190	-	-	93.921.190	-	90.267.474	90.267.474
207	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	18.710.998	-	-	18.710.998	-	19.242.338	19.242.338
208	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	29.707.476	-	-	29.707.476	-	23.315.545	23.315.545
209	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	22.475.273	-	-	22.475.273	-	21.694.479	21.694.479

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
210	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	14.620.114	-	-	14.620.114	-	37.023.432	37.023.432
211	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	65.891.889	-	-	65.891.889	-	112.447.992	112.447.992
212	Dinas Perhubungan	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	12.411.097	-	-	12.411.097	-	11.452.918	11.452.918
213	Dinas Perhubungan	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara	5.197.762	-	-	5.197.762	-	35.594.877	35.594.877
214	Dinas Perhubungan	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat	15.940.500	-	-	15.940.500	-	14.069.141	14.069.141
215	Dinas Perhubungan	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan	50.547.065	-	-	50.547.065	-	60.383.110	60.383.110
216	Dinas Perhubungan	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	91.686	-	-	91.686	-	-	-
217	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan	175.174.551	-	-	175.174.551	-	196.652.679	196.652.679
218	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Angkutan Sekolah	23.162.167	-	-	23.162.167	-	24.421.434	24.421.434
219	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas	496.542.181	-	-	496.542.181	-	772.877.114	772.877.114
220	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	527.418.384	-	-	527.418.384	-	513.337.913	513.337.913
221	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke	37.749.800	-	-	37.749.800	-	81.550.017	81.550.017
222	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung	37.573.575	-	-	37.573.575	-	67.519.582	67.519.582
223	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng	48.914.656	-	-	48.914.656	-	45.886.065	45.886.065
224	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing	36.543.956	-	-	36.543.956	-	-	-
225	Dinas Perhubungan	Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	6.218.399	-	-	6.218.399	-	-	-
226	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa	24.580.320	-	-	24.580.320	-	34.373.624	34.373.624
227	Dinas Perhubungan	Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah	-	-	-	-	-	122.018.899	122.018.899
228	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	1.001.497	-	-	1.001.497	-	-	-
229	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-
230	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	21.148.529	21.148.529
231	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jakpus	-	-	-	-	-	6.549.021	6.549.021
232	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jakut	12.124.845	-	-	12.124.845	-	20.212.083	20.212.083

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
233	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jakbar	-	-	-	-	-	11.893.416	11.893.416
234	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	-	-	-	-	-	10.853.489	10.853.489
235	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaksel	-	-	-	-	-	7.540.603	7.540.603
236	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	-	-	-	-	-	131.245.009	131.245.009
237	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat	922.854	-	-	922.854	-	-	-
238	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	117.057.702	117.057.702
239	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Utara	-	-	-	-	-	411.915.301	411.915.301
240	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Barat	836.274	-	-	836.274	-	-	-
241	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Barat	-	-	-	-	-	75.121.317	75.121.317
242	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Timur	355.485.075	-	-	355.485.075	-	-	-
243	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Timur	-	-	-	-	-	421.508.242	421.508.242
244	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Selatan	161.596.064	-	-	161.596.064	-	-	-
245	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Selatan	-	-	-	-	-	312.251.180	312.251.180
246	Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	44.400	-	-	44.400	-	3.006.715	3.006.715
247	Dinas Kebudayaan	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakpus	-	-	-	-	-	-	-
248	Dinas Kebudayaan	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakut	7.105.204	-	-	7.105.204	-	9.355.721	9.355.721
249	Dinas Kebudayaan	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakbar	-	-	-	-	-	11.602.388	11.602.388
250	Dinas Kebudayaan	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaksel	9.040.113	-	-	9.040.113	-	-	-
251	Dinas Kebudayaan	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	-	-	-	-	-	19.273.509	19.273.509
252	Dinas Kebudayaan	Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta	24.713.702	-	-	24.713.702	-	-	-
253	Dinas Kebudayaan	Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	44.965.373	-	-	44.965.373	-	69.527.102	69.527.102
254	Dinas Kebudayaan	Unit Pengelola Museum Seni	-	-	-	-	-	-	-
255	Dinas Kebudayaan	Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	-	-	-	-	-	111.222	111.222
256	Dinas Kebudayaan	Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi	71.459.571	-	-	71.459.571	-	64.622.533	64.622.533
257	Dinas Kebudayaan	Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya	132.690.456	-	-	132.690.456	-	-	-
258	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	-	-

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
259	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara	-	-	-	-	-	-	-
260	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan	-	-	-	-	-	14.991.344	14.991.344
261	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur	-	-	-	-	-	-	-
262	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.089.406	-	-	1.089.406	-	983.081	983.081
263	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional	88.168.690	-	-	88.168.690	-	-	-
264	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	11.120.349	-	-	11.120.349	-	11.316.749	11.316.749
265	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	1.457.486.709	-	-	1.457.486.709	-	1.402.515.098	1.402.515.098
266	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakut	3.100.915	-	-	3.100.915	-	-	-
267	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	322.413.127	-	-	322.413.127	-	307.646.575	307.646.575
268	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	39.866.208	-	-	39.866.208	-	34.167.454	34.167.454
269	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	10.322.088	-	-	10.322.088	-	10.307.047	10.307.047
270	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakpus	13.568.700	-	-	13.568.700	-	-	-
271	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakpus	-	-	-	-	-	13.051.171	13.051.171
272	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakut	-	-	-	-	-	-	-
273	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakbar	12.900.630	-	-	12.900.630	-	-	-
274	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakbar	-	-	-	-	-	15.791.078	15.791.078
275	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	15.436.227	-	-	15.436.227	-	-	-
276	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	-	-	-	-	-	12.375.953	12.375.953

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
277	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perinsdustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	6.201.739	-	-	6.201.739	-	6.170.750	6.170.750
278	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan Dan Barang Teknik	71.706	-	-	71.706	-	71.429	71.429
279	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, Dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	108.558	-	-	108.558	-	110.223	110.223
280	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah	Biro Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-
281	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah	1.945.101.912	-	-	1.945.101.912	-	1.952.721.402	1.952.721.402
282	Sekretariat Dprd	Sekretariat Dprd	-	-	-	-	-	-	-
283	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.184.411	-	-	2.184.411	-	2.196.722	2.196.722
284	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota - Jakbar	-	-	-	-	-	17.082.171	17.082.171
285	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota - Jaksel	-	-	-	-	-	-	-
286	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Pusat Penyimpanan Barang Daerah	-	-	-	-	-	-	-
287	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	1.864.782.554	-	-	1.864.782.554	-	1.860.029.121	1.860.029.121
288	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.764.333	-	-	14.764.333	-	-	-
289	Inspektorat	Inspektorat	470.418	-	-	470.418	-	492.122	492.122
290	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat	598.047.491	-	-	598.047.491	-	602.891.756	602.891.756
291	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Tanah Abang - Jakpus	24.660.795	-	-	24.660.795	-	21.927.100	21.927.100
292	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Gelora - Jakpus	9.095.687	-	-	9.095.687	-	9.573.595	9.573.595
293	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Bendungan Hilir - Jakpus	11.656.248	-	-	11.656.248	-	10.358.106	10.358.106
294	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Karet Tengsin - Jakpus	11.038.336	-	-	11.038.336	-	9.928.821	9.928.821
295	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Petamburan - Jakpus	8.669.584	-	-	8.669.584	-	8.363.116	8.363.116
296	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Melati - Jakpus	11.745.010	-	-	11.745.010	-	12.555.646	12.555.646
297	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Kacang - Jakpus	11.126.912	-	-	11.126.912	-	10.875.849	10.875.849
298	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kampung Bali - Jakpus	12.643.961	-	-	12.643.961	-	12.338.520	12.338.520
299	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Menteng - Jakpus	27.277.217	-	-	27.277.217	-	25.366.137	25.366.137
300	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Menteng - Jakpus	-	-	-	-	-	12.048.148	12.048.148
301	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Pegangsaan - Jakpus	15.221.541	-	-	15.221.541	-	12.175.431	12.175.431
302	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Gondangdia - Jakpus	-	-	-	-	-	10.391.966	10.391.966
303	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Sirih - Jakpus	9.678.282	-	-	9.678.282	-	-	-
304	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Senen - Jakpus	-	-	-	-	-	24.211.293	24.211.293
305	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kenari - Jakpus	10.688.354	-	-	10.688.354	-	9.415.976	9.415.976
306	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Paseban - Jakpus	10.049.228	-	-	10.049.228	-	10.798.195	10.798.195
307	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kramat - Jakpus	10.969.688	-	-	10.969.688	-	10.241.654	10.241.654
308	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kwitang - Jakpus	7.688.028	-	-	7.688.028	-	11.813.890	11.813.890
309	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Senen - Jakpus	12.442.887	-	-	12.442.887	-	10.851.764	10.851.764
310	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Bungur - Jakpus	10.259.515	-	-	10.259.515	-	11.572.951	11.572.951
311	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus	23.244.008	-	-	23.244.008	-	21.448.189	21.448.189

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023		SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN			
					KOREKSI PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9 = 8+9
312	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Rawasari - Jakpus	-	-	-	-	-	-
313	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Cempaka Putih Timur - Jakpus	-	-	-	-	-	-
314	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Cempaka Putih Barat - Jakpus	-	-	-	-	9.515.527	9.515.527
315	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Johar Baru - Jakpus	29.421.747	-	-	29.421.747	-	27.717.348
316	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Johar Baru - Jakpus	12.656.532	-	-	12.656.532	-	12.219.417
317	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kampung Rawa - Jakpus	9.366.867	-	-	9.366.867	-	9.239.437
318	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Galur - Jakpus	-	-	-	-	-	-
319	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Tanah Tinggi - Jakpus	11.893.735	-	-	11.893.735	-	11.350.502
320	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Kemayoran - Jakpus	23.970.356	-	-	23.970.356	-	51.471.203
321	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Harapan Mulia - Jakpus	14.408.589	-	-	14.408.589	-	11.637.352
322	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Cempaka Baru - Jakpus	-	-	-	-	-	-
323	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Sumur Batu - Jakpus	10.239.091	-	-	10.239.091	-	7.697.773
324	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Serdang - Jakpus	9.181.404	-	-	9.181.404	-	10.877.717
325	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Kosong - Jakpus	11.443.821	-	-	11.443.821	-	-
326	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kemayoran - Jakpus	11.871.515	-	-	11.871.515	-	10.308.720
327	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Utan Panjang - Jakpus	14.333.576	-	-	14.333.576	-	23.995.330
328	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Gunung Sahari Selatan - Jakpus	6.997.116	-	-	6.997.116	-	6.690.470
329	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Sawah Besar - Jakpus	23.703.727	-	-	23.703.727	-	16.838.753
330	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Karang Anyar - Jakpus	17.274.928	-	-	17.274.928	-	16.719.870
331	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kartini - Jakpus	13.770.994	-	-	13.770.994	-	13.522.705
332	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Gunung Sahari Utara - Jakpus	11.916.978	-	-	11.916.978	-	11.401.224
333	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Gambir - Jakpus	24.147.405	-	-	24.147.405	-	23.194.308
334	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Cideng - Jakpus	2.539.480	-	-	2.539.480	-	11.417.515
335	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Petojo Selatan - Jakpus	1.838.824	-	-	1.838.824	-	-
336	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Gambir - Jakpus	10.034.994	-	-	10.034.994	-	8.475.182
337	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Kelapa - Jakpus	-	-	-	-	-	12.837.312
338	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Petojo Utara - Jakpus	-	-	-	-	-	25.712.887
339	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Duri Pulo - Jakpus	10.905.761	-	-	10.905.761	-	10.019.938
340	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara	823.092.232	-	-	823.092.232	-	1.825.962.305
341	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kecamatan Penjaringan - Jakut	-	-	-	-	-	35.908.010
342	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Kamal Muara - Jakut	8.667.800	-	-	8.667.800	-	7.938.104
343	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Kapuk Muara - Jakut	-	-	-	-	-	16.714.859
344	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Pejagalan - Jakut	9.029.376	-	-	9.029.376	-	10.596.756
345	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan - Jakut	14.668.986	-	-	14.668.986	-	13.172.483
346	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Pluit - Jakut	13.214.149	-	-	13.214.149	-	17.840.763
347	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kecamatan Pademangan - Jakut	19.999.393	-	-	19.999.393	-	5.551.930
348	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Ancol - Jakut	7.120.078	-	-	7.120.078	-	13.322.827
349	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Pademangan Barat - Jakut	7.906.830	-	-	7.906.830	-	-
350	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kecamatan Tanjung Priok - Jakut	38.974.054	-	-	38.974.054	-	-
351	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Sunter Jaya - Jakut	18.355.905	-	-	18.355.905	-	19.108.440
352	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Sunter Agung - Jakut	19.292.812	-	-	19.292.812	-	18.501.864
353	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Papanggo - Jakut	-	-	-	-	-	14.964.342
354	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Warakas - Jakut	-	-	-	-	-	13.420.150
355	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Sungai Bambu - Jakut	14.880.339	-	-	14.880.339	-	12.845.079

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
356	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Kebon Bawang - Jakut	14.161.366	-	-	14.161.366	-	15.116.455	15.116.455
357	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Tanjung Priok - Jakut	16.825.113	-	-	16.825.113	-	17.170.994	17.170.994
358	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kecamatan Koja - Jakut	28.692.816	-	-	28.692.816	-	31.949.681	31.949.681
359	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Tugu Utara - Jakut	12.573.413	-	-	12.573.413	-	-	-
360	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Tugu Selatan - Jakut	9.917.954	-	-	9.917.954	-	13.839.584	13.839.584
361	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Rawa Badak Utara - Jakut	12.829.875	-	-	12.829.875	-	11.069.655	11.069.655
362	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Koja - Jakut	8.452.240	-	-	8.452.240	-	11.864.529	11.864.529
363	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Rawa Badak Selatan - Jakut	8.343.670	-	-	8.343.670	-	12.361.996	12.361.996
364	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Lagoa - Jakut	10.377.407	-	-	10.377.407	-	11.236.975	11.236.975
365	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kecamatan Kelapa Gading - Jakut	247.308	-	-	247.308	-	23.955.801	23.955.801
366	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Kelapa Gading Timur - Jakut	12.328.304	-	-	12.328.304	-	11.064.434	11.064.434
367	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Kelapa Gading Barat - Jakut	13.121.795	-	-	13.121.795	-	10.777.455	10.777.455
368	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Pegangsaan Dua - Jakut	15.156.471	-	-	15.156.471	-	12.742.601	12.742.601
369	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kecamatan Cilincing - Jakut	13.743.222	-	-	13.743.222	-	-	-
370	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Sukapura - Jakut	-	-	-	-	-	-	-
371	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Rorotan - Jakut	-	-	-	-	-	-	-
372	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Marunda - Jakut	8.146.049	-	-	8.146.049	-	-	-
373	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Cilincing - Jakut	-	-	-	-	-	7.615.018	7.615.018
374	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Sempur Barat - Jakut	31.837.467	-	-	31.837.467	-	8.737.896	8.737.896
375	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Kalibaru - Jakut	7.901.189	-	-	7.901.189	-	12.313.691	12.313.691
376	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat	920.074.193	-	-	920.074.193	-	945.358.872	945.358.872
377	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
378	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Sukabumi Selatan - Jakbar	8.427.077	-	-	8.427.077	-	7.250.945	7.250.945
379	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Sukabumi Utara - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
380	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Kelapa Dua - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
381	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Duri Kepa - Jakbar	12.082.671	-	-	12.082.671	-	9.308.034	9.308.034
382	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Kedoya Utara - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
383	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Kebon Jeruk - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
384	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Kedoya Selatan - Jakbar	9.303.863	-	-	9.303.863	-	8.350.227	8.350.227
385	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kecamatan Kembangan - Jakbar	-	-	-	-	-	19.032.159	19.032.159
386	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Kembangan Selatan - Jakbar	9.768.825	-	-	9.768.825	-	8.646.239	8.646.239
387	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Meruya Utara - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
388	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Meruya Selatan - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
389	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Srengseng - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
390	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Joglo - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
391	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Kembangan Utara - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
392	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kecamatan Cengkareng - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
393	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Cengkareng Barat - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
394	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Cengkareng Timur - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
395	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Kapuk - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
396	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Duri Kosambi - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
397	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Rawa Buaya - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
398	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kecamatan Kalideres - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
399	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Tegal Alur - Jakbar	-	-	-	-	-	14.704.666	14.704.666
400	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Kalideres - Jakbar	-	-	-	-	-	6.764.111	6.764.111
401	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
402	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Tomang - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
403	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Tanjung Duren Utara - Jakbar	-	-	-	-	-	4.099.512	4.099.512
404	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Grogol - Jakbar	-	-	-	-	-	8.285.287	8.285.287
405	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Jelambar - Jakbar	-	-	-	-	-	18.457.700	18.457.700
406	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Jelambar Baru - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
407	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Wijaya Kusuma - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
408	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Tanjung Duren Selatan - Jakbar	9.122.529	-	-	9.122.529	-	8.120.386	8.120.386
409	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kecamatan Palmerah - Jakbar	22.578.533	-	-	22.578.533	-	18.862.001	18.862.001
410	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Palmerah - Jakbar	7.941.353	-	-	7.941.353	-	6.271.487	6.271.487
411	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Kemanggisian - Jakbar	-	-	-	-	-	5.276.058	5.276.058
412	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Slipi - Jakbar	9.130.831	-	-	9.130.831	-	8.289.839	8.289.839
413	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Kota Bambu Utara - Jakbar	9.257.626	-	-	9.257.626	-	10.607.815	10.607.815
414	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Jati Pulo - Jakbar	-	-	-	-	-	11.510.434	11.510.434
415	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kecamatan Tambora - Jakbar	-	-	-	-	-	26.616.074	26.616.074
416	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Kali Anyar - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
417	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Duri Utara - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
418	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Tanah Sereal - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
419	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Krendang - Jakbar	-	-	-	-	-	8.962.313	8.962.313
420	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Jembatan Besi - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
421	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Duri Selatan - Jakbar	2.638.176	-	-	2.638.176	-	-	-
422	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Tambora - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
423	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Roa Malaka - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
424	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kecamatan Taman Sari - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
425	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Krukut - Jakbar	10.403.016	-	-	10.403.016	-	10.419.519	10.419.519
426	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Maphar - Jakbar	11.023.501	-	-	11.023.501	-	21.555.471	21.555.471
427	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Taman Sari - Jakbar	-	-	-	-	-	7.757.681	7.757.681
428	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Tangki - Jakbar	10.797.257	-	-	10.797.257	-	7.905.676	7.905.676
429	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Mangga Besar - Jakbar	-	-	-	-	-	8.468.453	8.468.453
430	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Keagungan - Jakbar	66.600	-	-	66.600	-	7.395.206	7.395.206
431	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Glodok - Jakbar	-	-	-	-	-	-	-
432	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Pinangsia - Jakbar	-	-	-	-	-	8.897.124	8.897.124
433	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	842.624.320	-	-	842.624.320	-	1.213.055.972	1.213.055.972
434	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Kebayoran Lama - Jaksel	29.439.995	-	-	29.439.995	-	20.755.037	20.755.037
435	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara - Jaksel	14.079.943	-	-	14.079.943	-	11.949.824	11.949.824
436	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan - Jaksel	12.281.357	-	-	12.281.357	-	12.282.433	12.282.433
437	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pondok Pinang - Jaksel	9.096.000	-	-	9.096.000	-	9.295.813	9.295.813

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
438	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Cipulir - Jaksel	9.238.511	-	-	9.238.511	-	11.793.440	11.793.440
439	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Grogol Selatan - Jaksel	11.717.438	-	-	11.717.438	-	12.713.798	12.713.798
440	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Grogol Utara - Jaksel	12.352.966	-	-	12.352.966	-	12.448.533	12.448.533
441	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel	18.293.408	-	-	18.293.408	-	18.542.624	18.542.624
442	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pesanggrahan - Jaksel	11.113.817	-	-	11.113.817	-	12.370.241	12.370.241
443	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Petukangan Selatan - Jaksel	13.306.834	-	-	13.306.834	-	26.606.292	26.606.292
444	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Petukangan Utara - Jaksel	11.947.520	-	-	11.947.520	-	10.460.851	10.460.851
445	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Ulujami - Jaksel	13.178.913	-	-	13.178.913	-	25.305.061	25.305.061
446	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro - Jaksel	14.640.521	-	-	14.640.521	-	24.446.513	24.446.513
447	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	19.585.218	-	-	19.585.218	-	44.195.997	44.195.997
448	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pasar Minggu - Jaksel	10.349.969	-	-	10.349.969	-	9.877.121	9.877.121
449	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Jatipadang - Jaksel	13.154.158	-	-	13.154.158	-	11.491.420	11.491.420
450	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Ragunan - Jaksel	10.169.169	-	-	10.169.169	-	19.445.956	19.445.956
451	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Cilandak Timur - Jaksel	11.355.901	-	-	11.355.901	-	10.690.451	10.690.451
452	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Kebagusan - Jaksel	14.762.521	-	-	14.762.521	-	12.006.275	12.006.275
453	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pejaten Barat - Jaksel	11.410.560	-	-	11.410.560	-	21.575.806	21.575.806
454	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pejaten Timur - Jaksel	9.078.794	-	-	9.078.794	-	9.676.824	9.676.824
455	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Jagakarsa - Jaksel	20.113.246	-	-	20.113.246	-	19.890.752	19.890.752
456	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Jagakarsa - Jaksel	8.386.629	-	-	8.386.629	-	8.020.009	8.020.009
457	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Ciganjur - Jaksel	7.974.949	-	-	7.974.949	-	8.781.469	8.781.469
458	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Srengseng Sawah - Jaksel	33.559.670	-	-	33.559.670	-	15.933.330	15.933.330
459	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Lenteng Agung - Jaksel	10.505.245	-	-	10.505.245	-	10.658.892	10.658.892
460	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Tanjung Barat - Jaksel	15.607.280	-	-	15.607.280	-	15.816.870	15.816.870
461	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Cipadak - Jaksel	13.343.751	-	-	13.343.751	-	10.998.930	10.998.930
462	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel	19.561.997	-	-	19.561.997	-	39.174.069	39.174.069
463	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Tegal Parang - Jaksel	8.946.591	-	-	8.946.591	-	13.754.109	13.754.109
464	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Mampang Prapatan - Jaksel	9.285.530	-	-	9.285.530	-	9.310.078	9.310.078
465	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pela Mampang - Jaksel	10.137.536	-	-	10.137.536	-	7.612.714	7.612.714
466	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Kuningan Barat - Jaksel	14.612.691	-	-	14.612.691	-	16.178.842	16.178.842
467	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Bangka - Jaksel	13.363.601	-	-	13.363.601	-	10.040.670	10.040.670
468	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Pancoran - Jaksel	22.762.961	-	-	22.762.961	-	24.552.465	24.552.465
469	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pancoran - Jaksel	10.364.740	-	-	10.364.740	-	9.171.121	9.171.121
470	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Duren Tiga - Jaksel	11.739.950	-	-	11.739.950	-	13.670.204	13.670.204
471	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Kalibata - Jaksel	10.525.443	-	-	10.525.443	-	12.281.993	12.281.993
472	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Rawajati - Jaksel	8.427.921	-	-	8.427.921	-	8.369.023	8.369.023
473	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pangadegan - Jaksel	11.781.566	-	-	11.781.566	-	10.954.995	10.954.995
474	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Cikoko - Jaksel	8.578.580	-	-	8.578.580	-	8.081.577	8.081.577
475	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel	19.051.887	-	-	19.051.887	-	16.774.953	16.774.953
476	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Gandaria Utara - Jaksel	13.049.936	-	-	13.049.936	-	11.095.818	11.095.818
477	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Cipete Utara - Jaksel	12.292.669	-	-	12.292.669	-	11.687.908	11.687.908
478	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pulo - Jaksel	7.726.974	-	-	7.726.974	-	14.405.116	14.405.116
479	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Petogogan - Jaksel	7.259.049	-	-	7.259.049	-	9.505.852	9.505.852
480	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Melawai - Jaksel	5.380.365	-	-	5.380.365	-	4.532.771	4.532.771
481	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Kramat Pela - Jaksel	10.130.149	-	-	10.130.149	-	9.381.549	9.381.549
482	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Gunung - Jaksel	11.891.577	-	-	11.891.577	-	10.616.899	10.616.899

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
483	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Selong - Jaksel	8.261.757	-	-	8.261.757	-	8.856.932	8.856.932
484	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Rawa Barat - Jaksel	10.185.343	-	-	10.185.343	-	9.069.588	9.069.588
485	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Senayan - Jaksel	15.547.353	-	-	15.547.353	-	15.973.923	15.973.923
486	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Setiabudi - Jaksel	19.433.990	-	-	19.433.990	-	22.373.837	22.373.837
487	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Karet Semanggi - Jaksel	7.146.722	-	-	7.146.722	-	8.702.491	8.702.491
488	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Kuningan Timur - Jaksel	5.395.096	-	-	5.395.096	-	5.153.229	5.153.229
489	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Karet Kuningan - Jaksel	7.533.070	-	-	7.533.070	-	7.936.083	7.936.083
490	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Karet - Jaksel	13.491.414	-	-	13.491.414	-	14.218.429	14.218.429
491	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Menteng Atas - Jaksel	11.602.175	-	-	11.602.175	-	13.416.029	13.416.029
492	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pasar Manggis - Jaksel	11.588.034	-	-	11.588.034	-	10.654.992	10.654.992
493	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Guntur - Jaksel	9.455.201	-	-	9.455.201	-	9.674.493	9.674.493
494	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Setia Budi - Jaksel	9.163.050	-	-	9.163.050	-	7.826.163	7.826.163
495	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Tebet - Jaksel	23.497.139	-	-	23.497.139	-	23.612.544	23.612.544
496	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Menteng Dalam - Jaksel	10.034.827	-	-	10.034.827	-	8.492.312	8.492.312
497	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Tebet Barat - Jaksel	12.610.293	-	-	12.610.293	-	12.438.165	12.438.165
498	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Tebet Timur - Jaksel	10.361.774	-	-	10.361.774	-	9.353.247	9.353.247
499	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Kebon Baru - Jaksel	14.535.593	-	-	14.535.593	-	11.749.163	11.749.163
500	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Bukit Duri - Jaksel	15.909.320	-	-	15.909.320	-	14.600.977	14.600.977
501	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Manggarai Selatan - Jaksel	8.339.472	-	-	8.339.472	-	8.478.394	8.478.394
502	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Manggarai - Jaksel	11.408.455	-	-	11.408.455	-	10.223.001	10.223.001
503	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Cilandak - Jaksel	23.143.024	-	-	23.143.024	-	24.899.266	24.899.266
504	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Lebak Bulus - Jaksel	12.921.342	-	-	12.921.342	-	10.831.676	10.831.676
505	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pondok Labu - Jaksel	10.801.234	-	-	10.801.234	-	11.705.502	11.705.502
506	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Cilandak Barat - Jaksel	11.233.270	-	-	11.233.270	-	13.468.122	13.468.122
507	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Gandaria Selatan - Jaksel	11.508.589	-	-	11.508.589	-	10.733.977	10.733.977
508	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Cipete Selatan - Jaksel	7.283.680	-	-	7.283.680	-	6.649.003	6.649.003
509	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur	1.223.688.010	-	-	1.223.688.010	-	1.028.387.873	1.028.387.873
510	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim	22.060.269	-	-	22.060.269	-	18.086.428	18.086.428
511	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pekayon - Jaktim	10.769.058	-	-	10.769.058	-	8.982.418	8.982.418
512	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Kalisari - Jaktim	8.995.979	-	-	8.995.979	-	8.716.899	8.716.899
513	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Baru - Jaktim	9.178.274	-	-	9.178.274	-	8.211.232	8.211.232
514	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cijantung - Jaktim	10.844.015	-	-	10.844.015	-	10.270.084	10.270.084
515	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Gedong - Jaktim	7.948.288	-	-	7.948.288	-	7.699.555	7.699.555
516	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Ciracas - Jaktim	12.175.098	-	-	12.175.098	-	12.988.836	12.988.836
517	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cibubur - Jaktim	11.994.292	-	-	11.994.292	-	10.798.116	10.798.116
518	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Rambutan - Jaktim	11.121.835	-	-	11.121.835	-	9.677.455	9.677.455
519	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Kelapa Dua Wetan - Jaktim	24.095.404	-	-	24.095.404	-	20.414.748	20.414.748
520	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Susukan - Jaktim	15.180.968	-	-	15.180.968	-	15.730.982	15.730.982
521	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Ciracas - Jaktim	20.159.147	-	-	20.159.147	-	18.661.554	18.661.554
522	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Cipayung - Jaktim	35.179.305	-	-	35.179.305	-	26.361.463	26.361.463
523	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cipayung - Jaktim	10.030.815	-	-	10.030.815	-	9.037.871	9.037.871
524	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Lubang Buaya - Jaktim	8.795.196	-	-	8.795.196	-	8.897.571	8.897.571
525	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Ceger - Jaktim	6.739.266	-	-	6.739.266	-	6.757.417	6.757.417
526	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Bambu Apus - Jaktim	10.023.155	-	-	10.023.155	-	9.488.602	9.488.602
527	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Setu - Jaktim	6.850.761	-	-	6.850.761	-	7.627.039	7.627.039
528	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cilangkap - Jaktim	9.709.298	-	-	9.709.298	-	9.731.897	9.731.897
529	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Munjul - Jaktim	8.811.780	-	-	8.811.780	-	8.133.769	8.133.769

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
530	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pondok Ranggon - Jaktim	10.677.727	-	-	10.677.727	-	13.103.871	13.103.871
531	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Kramat Jati - Jaktim	38.495.786	-	-	38.495.786	-	21.887.446	21.887.446
532	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Tengah - Jaktim	13.378.736	-	-	13.378.736	-	11.173.187	11.173.187
533	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Kampung Dukuh - Jaktim	13.851.569	-	-	13.851.569	-	14.785.178	14.785.178
534	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Kramat Jati - Jaktim	32.966.069	-	-	32.966.069	-	33.373.182	33.373.182
535	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Batu Ampar - Jaktim	9.290.445	-	-	9.290.445	-	21.250.526	21.250.526
536	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Bale Kambang - Jaktim	-	-	-	-	-	11.791.529	11.791.529
537	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cililitan - Jaktim	11.193.453	-	-	11.193.453	-	12.277.521	12.277.521
538	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cawang - Jaktim	13.508.518	-	-	13.508.518	-	14.425.787	14.425.787
539	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Makasar - Jaktim	30.231.057	-	-	30.231.057	-	6.056.778	6.056.778
540	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang Melayu - Jaktim	12.678.991	-	-	12.678.991	-	16.366.513	16.366.513
541	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Halim Perdana Kusuma - Jaktim	10.428.324	-	-	10.428.324	-	9.893.260	9.893.260
542	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Kebon Pala - Jaktim	12.723.032	-	-	12.723.032	-	11.788.968	11.788.968
543	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Makasar - Jaktim	12.450.409	-	-	12.450.409	-	11.410.678	11.410.678
544	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pinang Ranti - Jaktim	9.265.712	-	-	9.265.712	-	9.900.953	9.900.953
545	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Jatinegara - Jaktim	27.350.236	-	-	27.350.236	-	45.714.491	45.714.491
546	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	10.238.910	-	-	10.238.910	-	9.565.777	9.565.777
547	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Bidara Cina - Jaktim	17.100.445	-	-	17.100.445	-	14.705.358	14.705.358
548	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	8.282.573	-	-	8.282.573	-	8.491.386	8.491.386
549	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	18.424.967	-	-	18.424.967	-	12.402.325	12.402.325
550	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim	9.544.071	-	-	9.544.071	-	8.402.346	8.402.346
551	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	-	-	-	-	-	12.627.520	12.627.520
552	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	18.934.995	-	-	18.934.995	-	17.712.854	17.712.854
553	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang Besar Utara - Jaktim	-	-	-	-	-	11.225.647	11.225.647
554	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Duren Sawit - Jaktim	23.662.149	-	-	23.662.149	-	26.889.812	26.889.812
555	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Klender - Jaktim	15.596.599	-	-	15.596.599	-	18.945.379	18.945.379
556	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pondok Bambu - Jaktim	8.978.463	-	-	8.978.463	-	10.099.466	10.099.466
557	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Duren Sawit - Jaktim	28.425.095	-	-	28.425.095	-	16.212.414	16.212.414
558	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Malaka Sari - Jaktim	-	-	-	-	-	10.239.923	10.239.923
559	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Malaka Jaya - Jaktim	-	-	-	-	-	9.034.346	9.034.346
560	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pondok Kopi - Jaktim	-	-	-	-	-	15.100.179	15.100.179
561	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pondok Kelapa - Jaktim	10.084.112	-	-	10.084.112	-	9.366.472	9.366.472
562	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Matraman - Jaktim	14.906.446	-	-	14.906.446	-	15.991.898	15.991.898
563	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pisangan Baru - Jaktim	8.910.383	-	-	8.910.383	-	9.601.613	9.601.613
564	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Utan Kayu Selatan - Jaktim	8.113.640	-	-	8.113.640	-	11.210.985	11.210.985
565	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Utan Kayu Utara - Jaktim	10.267.613	-	-	10.267.613	-	9.345.647	9.345.647
566	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Kayu Manis - Jaktim	20.545.213	-	-	20.545.213	-	12.131.880	12.131.880
567	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Palmeriam - Jaktim	15.609.792	-	-	15.609.792	-	9.694.951	9.694.951
568	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Kebon Manggis - Jaktim	10.899.381	-	-	10.899.381	-	11.341.057	11.341.057
569	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Pulogadung - Jaktim	8.042.124	-	-	8.042.124	-	23.544.825	23.544.825
570	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pisangan Timur - Jaktim	12.645.925	-	-	12.645.925	-	12.710.218	12.710.218
571	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang - Jaktim	196.485.308	-	-	196.485.308	-	11.140.143	11.140.143
572	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Jatinegara Kaum - Jaktim	20.402.363	-	-	20.402.363	-	22.771.037	22.771.037

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
573	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pulogadung - Jaktim	12.259.777			12.259.777	-	12.670.798	12.670.798
574	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Rawamangun - Jaktim	13.619.421			13.619.421	-	10.955.389	10.955.389
575	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Jati - Jaktim	195.969.411			195.969.411	-	9.753.012	9.753.012
576	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Kayu Putih - Jaktim	14.316.422	-	-	14.316.422	-	12.674.949	12.674.949
577	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Cakung - Jaktim	57.763.756	-	-	57.763.756	-	16.904.388	16.904.388
578	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Jatinegara - Jaktim	13.849.343	-	-	13.849.343	-	13.212.442	13.212.442
579	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Rawa Terate - Jaktim	10.085.597	-	-	10.085.597	-	8.623.696	8.623.696
580	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Penggilingan - Jaktim	15.099.189	-	-	15.099.189	-	12.673.220	12.673.220
581	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pulo Gebang - Jaktim	16.010.581	-	-	16.010.581	-	12.217.568	12.217.568
582	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Ujung Menteng - Jaktim	21.003.648	-	-	21.003.648	-	13.168.773	13.168.773
583	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cakung Timur - Jaktim	13.919.338	-	-	13.919.338	-	11.082.237	11.082.237
584	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cakung Barat - Jaktim	8.373.624	-	-	8.373.624	-	11.077.798	11.077.798
585	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	185.034.458	-	-	185.034.458	-	368.499.099	368.499.099
586	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	Kecamatan Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu	6.626.185	-	-	6.626.185	-	7.010.647	7.010.647
587	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	Kelurahan P.Panggang - Kep. Seribu	-	-	-	-	-	9.300.275	9.300.275
588	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	Kelurahan P.Kelapa - Kep. Seribu	-	-	-	-	-	8.343.814	8.343.814
589	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	Kelurahan P.Harapan - Kep. Seribu	-	-	-	-	-	5.785.683	5.785.683
590	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	Kecamatan Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu	7.543.309	-	-	7.543.309	-	7.069.421	7.069.421
591	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	Kelurahan P.Untung Jawa - Kep. Seribu	-	-	-	-	-	9.266.332	9.266.332
592	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	Kelurahan P.Tidung - Kep. Seribu	-	-	-	-	-	4.506.057	4.506.057
593	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	Kelurahan P.Pari - Kep. Seribu	-	-	-	-	-	10.397.201	10.397.201
	Jumlah Utang Belanja TALI		56.801.584.954	-	-	56.801.584.954	-	57.070.645.240	57.070.645.240
	Utang Belanja Pemeliharaan								
1	Dinas Kesehatan	Pusat Krisis Dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	1.345.744.154	1.345.744.154
2	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga	740.304.795	-	-	-	740.304.795	-	740.304.795
3	Dinas Bina Marga	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakpus	6.488.905.438	-	-	-	6.488.905.438	-	6.488.905.438
4	Dinas Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air	18.464.285.228	-	-	-	18.464.285.228	-	18.464.285.228
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	815.682.912	-	-	815.682.912	-	-	-
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	445.940.400	-	445.940.400	-	-	-	-
7	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	44.794.050	-	-	44.794.050	-	-	-
8	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing	93.391.344	-	-	93.391.344	-	-	-
9	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	-	-	3.706.773.294	3.706.773.294
	Jumlah Utang Belanja Pemeliharaan		27.093.304.167	-	445.940.400	953.868.306	25.693.495.461	5.052.517.448	30.746.012.909
	Utang Belanja Perjalanan Dinas								

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
1	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah	Biro Kerjasama Daerah	-					5.807.866.453,00	5.807.866.453
	Jumlah Utang Belanja Perjalanan Dinas		-	-	-	-	-	5.807.866.453	5.807.866.453
	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat								
1	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.133.137.500	-	-	1.133.137.500	-	39.621.750.000	39.621.750.000
	Jumlah Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		1.133.137.500	-	-	1.133.137.500	-	39.621.750.000	39.621.750.000
	Utang Belanja Modal Tanah								
1	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	159.840.000	159.840.000
	Jumlah Utang Belanja Modal Tanah		-	-	-	-	-	159.840.000	159.840.000
	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
1	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang	59.200.000	-	-	59.200.000	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan						6.955.938.180	6.955.938.180
3	Dinas Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air	-	-	-	-	-	2.981.819.439	2.981.819.439
4	Dinas Sosial	Dinas Sosial	-					704.735.800	704.735.800
5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup						43.156.848.450	43.156.848.450
6	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Penanganan Sampah Badan Air						3.309.420.600	3.309.420.600
7	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas	175.225.902	-	-	175.225.902	-	1.196.223.485	1.196.223.485
8	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						810.460.569	810.460.569
9	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah						12.089.153.993	12.089.153.993
10	Inspektorat	Inspektorat	-	-	-	-	-	6.426.235.908	6.426.235.908
	Jumlah Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		234.425.902	-	-	234.425.902	-	77.630.836.424	77.630.836.424
	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
1	Dinas Pendidikan	Unit Pengelola Prasarana Dan Sarana Pendidikan	50.631.600.464	-	222.319.279	48.371.757.004	2.037.524.181	66.353.648.116	68.391.172.297
2	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	212.600.000	-	-	212.600.000	-	-	-
3	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	644.853.304	-	-	644.853.304	-	944.097.681	944.097.681
4	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	7.713.469.037	-	-	7.710.450.212	3.018.825	1.295.215.427	1.298.234.252
5	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	274.542.128	-	-	274.542.128	-	384.615.000	384.615.000
6	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu						2.704.311.352	2.704.311.352
7	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	1.652.191.290	-	-	1.652.191.290	-	13.405.323.498	13.405.323.498
8	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	Pusat Data Dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan						887.724.969	887.724.969
9	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	7.262.451.240	-	-	7.097.088.362	165.362.878	41.671.031.648	41.836.394.526

NO. URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DESEMBER 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 DES 2024
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = 8+9
10	Dinas Sosial	Dinas Sosial	5.103.895.017	-	-	5.103.895.017	-	4.674.663.755	4.674.663.755
11	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah						744.521.567	744.521.567
12	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup						8.051.321.650	8.051.321.650
13	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat						1.463.750.000	1.463.750.000
14	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara						4.302.619.892	4.302.619.892
15	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur						2.836.596.418	2.836.596.418
16	Dinas Lingkungan Hidup	Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	3.952.079.595	-	-	3.952.079.595	-	-	-
17	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Penanganan Sampah Badan Air						2.074.767.326	2.074.767.326
18	Dinas Perhubungan	Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu						1.464.685.274	1.464.685.274
19	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	4.825.918.260	4.825.918.260
20	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat	4	-	4	-	-	-	-
	Jumlah Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		77.447.682.079	-	222.319.283	75.019.456.912	2.205.905.884	158.084.811.833	160.290.717.717
	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan								
1	Dinas Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air	6.012.543.169	-	105.847.276	4.855.786.653	1.050.909.240	15.141.697.333	16.192.606.573
2	Dinas Sumber Daya Air	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat	156.540.962	-	-	-	156.540.962	1.230.697.712	1.387.238.674
3	Dinas Sumber Daya Air	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	684.267.340	-	-	-	684.267.340	11.713.768.380	12.398.035.720
4	Dinas Sosial	Dinas Sosial						70.000.000	70.000.000
5	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Pengelola Sampah Terpadu	-	1	-	-	-	-	-
6	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Penanganan Sampah Badan Air	65.955.168.863	-	-	65.955.168.863	-	3.653.843.520	3.653.843.520
7	Dinas Perhubungan	Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	2.606.827.726	2.606.827.726
	Jumlah Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan		72.808.520.333	1	105.847.276	70.810.955.516	1.891.717.542	34.416.834.671	36.308.552.213

**DAFTAR UTANG BELANJA BLUD
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2024**

No	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 Desember 2024
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4-5-6)	8	9 = (7+8)
	Utang Belanja Pegawai BLUD							
1	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	2.751.757.825	0	0	2.751.757.825	0	2.070.968.145	2.070.968.145
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	2.732.596.949	0	0	2.732.596.949	0	2.845.638.587	2.845.638.587
3	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	2.283.748.950	0	0	2.283.748.950	0	2.152.021.976	2.152.021.976
4	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.503.789.051	0	0	2.503.789.051	0	2.444.731.835	2.444.731.835
5	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	1.668.188.624	0	0	1.668.188.624	0	1.603.745.017	1.603.745.017
6	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	1.847.428.094	0	0	1.847.428.094	0	1.721.853.524	1.721.853.524
7	Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing	276.952.662	0	0	276.952.662	0	0	0
8	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	186.442.263	0	0	186.442.263	0	119.636.684	119.636.684
9	Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan	175.103.773	0	0	175.103.773	0	159.470.008	159.470.008
10	Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati	270.747.659	0	0	270.747.659	0	235.544.398	235.544.398
11	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	0			0	0	153.440.866	153.440.866
			0	0		0	0	0
	Jumlah Utang Belanja Pegawai BLUD	14.696.755.850	0	0	14.696.755.850	0	13.507.051.040	13.507.051.040
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD							
1	Dinas Kesehatan	7.892.189.410	0	0	7.892.189.410	0	0	0
2	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	85.597.872	0	0	85.597.872	0	110.537.220	110.537.220
3	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.209.684.361	0	0	1.209.684.361	0	3.774.837.656	3.774.837.656
4	Puskesmas Tanah Abang	7.131.514	0	0	7.131.514	0	3.693.951	3.693.951
5	Puskesmas Menteng	3.166.830	0	0	3.166.830	0	1.559.550	1.559.550
6	Puskesmas Cempaka Putih	4.943.656	0	0	4.943.656	0	4.921.995	4.921.995
7	Puskesmas Johar Baru	3.570.870	0	0	3.570.870	0	3.517.590	3.517.590
8	Puskesmas Kemayoran	223.794.812	0	0	223.794.812	0	749.370.184	749.370.184
9	Puskesmas Sawah Besar	190.000	0	0	190.000	0	190.000	190.000
10	Puskesmas Gambir	2.282.160	0	0	2.282.160	0	0	0
11	Puskesmas Pademangan	1.039.695	0	0	1.039.695	0	1.827.910	1.827.910
12	Puskesmas Tanjung Priok	383.846.791	0	0	383.846.791	0	0	0
13	Puskesmas Koja	4.852.780	0	0	4.852.780	0	0	0
14	Puskesmas Kebon Jeruk	57.043.240	0	0	57.043.240	0	53.475.421	53.475.421
15	Puskesmas Kembangan	48.714.133	0	0	48.714.133	0	48.534.789	48.534.789
16	Puskesmas Cengkareng	56.063.501	0	0	56.063.501	0	49.187.945	49.187.945
17	Puskesmas Kalideres	82.162.110	0	0	82.162.110	0	376.541.534	376.541.534
18	Puskesmas Grogol Petamburan	2.128.980	0	0	2.128.980	0	410.700	410.700
19	Puskesmas Pal Merah	58.519.627	0	0	58.519.627	0	54.103.137	54.103.137
20	Puskesmas Tambora	11.115.550	0	0	11.115.550	0	11.115.550	11.115.550
21	Puskesmas Taman Sari	5.505.610	0	0	5.505.610	0	5.089.360	5.089.360
22	Puskesmas Pasar Minggu	8.996.590	0	0	8.996.590	0	820.000	820.000
23	Puskesmas Jagakarsa	482.932.562	0	0	482.932.562	0	3.699.421	3.699.421

No	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 Desember 2024
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4-5-6)	8	9 = (7+8)
24	Puskesmas Mampang Prapatan	74.615.160	0	0	74.615.160	0	117.649.405	117.649.405
25	Puskesmas Setiabudi	3.681.224	0	0	3.681.224	0	48.005.520	48.005.520
26	Puskesmas Tebet	14.604.000	0	0	14.604.000	0	345.410.315	345.410.315
27	Puskesmas Pasar Rebo	27.960.000	0	0	27.960.000	0	6.426.600	6.426.600
28	Puskesmas Ciracas	5.413.480	0	0	5.413.480	0	47.779.084	47.779.084
29	Puskesmas Cipayung	782.945.079	0	0	782.945.079	0	1.781.550	1.781.550
30	Puskesmas Kramat Jati	6.783.409	0	0	6.783.409	0	7.284.114	7.284.114
31	Puskesmas Makasar	5.621.050	0	0	5.621.050	0	0	0
32	Puskesmas Jatinegara	2.739.753	0	0	2.739.753	0	24.711.480	24.711.480
33	Puskesmas Duren Sawit	76.171.251	0	0	76.171.251	0	67.655.215	67.655.215
34	Puskesmas Matraman	61.694.899	0	0	61.694.899	0	2.495.746	2.495.746
35	Puskesmas Pulo Gadung	12.327.660	0	0	12.327.660	0	3.401.007	3.401.007
36	Puskesmas Cakung	1.548.893.666	0	0	1.548.893.666	0	1.144.800.367	1.144.800.367
37	Puskesmas Kepulauan Seribu Utara	36.168.328	0	0	36.168.328	0	0	0
38	Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan	168.305.199	0	0	168.305.199	0	0	0
39	Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu	10.435.868	0	1	10.435.867	0	14.884.422	14.884.422
40	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	55.869.065.905	0	0	55.470.548.155	398.517.750	54.299.787.118	54.698.304.868
41	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	16.203.100.837	0	0	16.203.100.837	0	61.205.084.642	61.205.084.642
42	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	19.936.963.912	0	0	19.936.963.912	0	12.986.987.252	12.986.987.252
43	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	5.968.719.892	0	0	5.968.719.892	0	7.060.367.778	7.060.367.778
44	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	8.995.639.775	0	0	8.995.639.775	0	26.483.918.891	26.483.918.891
45	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	5.440.944.660	0	0	5.440.944.660	0	4.990.421.578	4.990.421.578
46	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	15.138.289.766	0	0	15.138.289.766	0	16.525.943.212	16.525.943.212
47	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	2.110.121.951	0	0	2.110.121.951	0	2.373.303.597	2.373.303.597
48	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar	16.573.022	0	0	16.573.022	0	568.908.910	568.908.910
49	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	277.546.923	0	0	277.546.923	0	1.227.055.862	1.227.055.862
50	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	28.750.000	0	0	28.750.000	0	506.800.785	506.800.785
51	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	804.712.017	0	0	804.712.017	0	3.607.134.895	3.607.134.895
52	Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing	6.449.244.390	0	0	6.449.244.390	0	7.224.311.928	7.224.311.928
53	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan	2.087.843.698	0	0	2.087.843.698	0	1.764.015.432	1.764.015.432
54	Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan	23.646.665	0	0	23.646.665	0	2.155.497.313	2.155.497.313
55	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	438.137.568	0	0	438.137.568	0	366.903.412	366.903.412
56	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	95.768.963	0	0	80.117.073	15.651.890	75.456.278	91.108.168
57	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	5.404.686.458	0	0	5.404.686.458	0	5.079.874.765	5.079.874.765
58	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan	5.764.987.380	345.824.606	122.884.279	5.987.927.707	0	4.469.930.396	4.469.930.396
59	Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan	1.076.666.850	0	0	1.076.666.850	0	1.358.580.302	1.358.580.302
60	Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati	1.732.023.149	0	0	1.732.023.149	0	1.432.971.490	1.432.971.490
61	Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas	2.449.943.263	0	0	2.449.943.263	0	1.551.069.416	1.551.069.416
62	Rumah Sakit Umum Daerah Matraman	4.157.873.589	0	0	4.157.873.589	0	1.544.536.580	1.544.536.580
63	Rumah Sakit Umum Daerah Tamansari	901.961.281	0	0	901.961.281	0	1.981.368.313	1.981.368.313
64	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok	394.831.077	0	0	394.831.077	0	117.026.916	117.026.916
65	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang	114.237.781	0	0	114.237.781	0	122.305.956	122.305.956
66	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru	435.919.861	0	0	435.919.861	0	0	0
67	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang	51.430.000	0	0	51.430.000	0	18.625.584	18.625.584
68	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama	69.467.021	0	0	69.467.021	0	27.190.894	27.190.894
69	Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung	18.701.194	0	0	18.701.194	0	671.551.992	671.551.992
70	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Peternakan	235.704.938	0	0	235.704.938	0	246.413.593	246.413.593

No	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2023			SALDO UTANG 2023 PER 31 DESEMBER 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2024	SALDO UTANG PER 31 Desember 2024
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4-5-6)	8	9 = (7+8)
71	Unit Pengelola Perparkiran	41.473.625	0	0	41.473.625	0	11.036.898	11.036.898
72	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah	599.561.495	0	0	94.483.341	505.078.154	279.272.598	784.350.752
73	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta	0	0	0	0	0	100.707.576	100.707.576
74	Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah	0	0	0	0	0	759.000	759.000
75	Puskesmas Pesanggrahan	0	0	0	0	0	3.799.009	3.799.009
76	Puskesmas Pancoran	0	0	0	0	0	66.390.756	66.390.756
	Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	176.808.371.586	345.824.606	122.884.280	176.112.064.118	919.247.794	229.591.029.655	230.510.277.449
Utang Belanja Modal BLUD								
	a Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD							
1	Laboratorium Kesehatan Daerah	0	0	0	0	0	47.253.000	47.253.000
2	Puskesmas Cakung	54.000	0	54.000	0	0	0	0
3	Puskesmas Kemayoran	0	0	0	0	0	24.713.000	24.713.000
4	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	0	0	0	0	0	7.009.166	7.009.166
5	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	0	0	0	0	0	2.711.730	2.711.730
6	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	296.400.000	0	0	296.400.000	0	15.500.000	15.500.000
7	Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing	78.000.000	0	0	78.000.000	0	0	0
8	Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung	0	0	0	0	0	24.512.180	24.512.180
9	Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas	0	0	0	0	0	0	0
10	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	625.521.200	0	0	625.521.200	0	0	0
11	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	1	0	1	0	0	0	0
12	Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan	0	0	0	0	0	5.640.000	5.640.000
13	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	0	0	0	0	0	176.563.373	176.563.373
14	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan	0	0	0	0	0	60.200.000	60.200.000
15	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	0	0	0	0	0	56.856.500	56.856.500
	Jumlah Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	999.975.201	0	54.001	999.921.200	0	420.958.949	420.958.949
	b Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD							
1	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	0	0	0	0	0	4.307.591.030	4.307.591.030
2	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	943.775.896	0	0	943.775.896	0	0	0
3	Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung	0	0	0	0	0	283.855.595	283.855.595
	Jumlah Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	943.775.896	0	0	943.775.896	0	4.591.446.625	4.591.446.625
	c Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD							
1	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	174.677.065	0	0	0	174.677.065	0	174.677.065
	Jumlah Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	174.677.065	0	0	0	174.677.065	0	174.677.065
	Jumlah Utang Belanja Modal BLUD	2.118.428.162	0	54.001	1.943.697.096	174.677.065	5.012.405.574	5.187.082.639

Monitoring Atas Penyelesaian Pekerjaan Yang Melewati Tahun Anggaran 2024
Per 31 Desember 2024

NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	NAMA/LOKASI PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	BOBOT PEKERJAAN DI 20 DES 2024 (%)	NILAI PADA SAAT SP2D CAIR S.D TERAKHIR DIBAYARKAN DI 20 DES 2024 (Rp)	PENAMBAHAN BOBOT PEKERJAAN DARI TANGGAL SP2D TERAKHIR PEKERJAAN S.D 31 DESEMBER 2024	BOBOT PEKERJAAN S.D 31 DES 2024	RENCANA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN DI TAHUN 2025 (%)	TANGGAL PENYELESAIAN PEKERJAAN 100%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.4	Rehab Total KB Negeri 24 Tomang dan PKBM Negeri 24 Tomang	15.690.687.879	90,00%	12.131.619.091	14.324.222.493	2,28%	357.747.684	92,28%	14.478.366.776	1.211.321.104	23	23 Februari 2025			
2	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Cipelet Selatan 03	28.027.871.281	90,00%	25.225.084.153	24.642.892.871	6,86%	1.922.711.970	96,86%	27.147.796.123	3.14%	880.075.158	19	19 Februari 2025		
3	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total SDN Pondok Pinang 05 dan USB SMA	68.253.172.088	90,00%	61.427.859.589	59.971.048.166	4,02%	2.743.777.526	94,02%	64.171.632.585	5,98%	4.081.539.703	3	3 Maret 2025		
4	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Pejatun Timur 07 Pp	34.996.040.490	90,00%	31.496.761.041	27.899.127.236	6,85%	2.397.253.708	96,85%	33.894.017.749	3,15%	1.102.386.741	19	19 Februari 2025		
5	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Pajatan Timur 11 Pp	36.039.663.747	90,00%	32.435.687.372	27.411.844.218	6,10%	2.198.419.489	96,10%	34.043.186.861	3,90%	1.405.548.886	19	19 Februari 2025		
6	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Karet Kunirung 01 Pg Aih Fungsi USB SMP	24.133.238.960	90,00%	21.737.967.819	19.902.376.602	6,74%	1.627.907.763	96,74%	23.365.856.933	3,26%	797.395.327	19	19 Februari 2025		
7	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.1.02	Rehab Total Gedung SDN Karet Kunirung 01 Pg Aih Fungsi USB SMP	62.588.738.867	90,00%	56.128.364.080	71.391.769.751	2,98%	2.461.144.618	92,98%	76.791.009.399	7,02%	5.797.729.468	19	19 Februari 2024		
8	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Kampung Balit 01	26.450.248.552	70,00%	18.515.173.886	17.512.096.728	20,33%	5.377.335.531	90,61%	23.965.570.213	9,67%	2.557.730.035	19	19 Februari 2025		
9	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Pasar Baru 01/03/05 dan TK Negeri Sawah Besar 01	67.725.872.880	70,00%	47.408.111.016	45.858.314.547	20,20%	13.680.626.322	90,42%	61.237.734.258	9,80%	6.637.135.542	19	19 Februari 2025		
10	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total SDN Duri Pulo 01/02/03/04/05/10	61.157.209.811	20,00%	12.231.441.962	12.231.441.962	4,50%	2.752.074.441	24,61%	15.050.789.334	75,50%	46.173.893.407	30	30 Maret 2025		
11	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total SDN Karang Anyar 01/02/05/06/08	47.191.385.881	40,00%	18.876.554.352	18.876.554.352	8,00%	3.775.310.870	49,57%	23.392.569.981	52,00%	24.539.520.638	15	15 Maret 2025		
12	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total SDN Ciken 01,02 dan USB SMA	67.577.750.451	20,00%	13.515.558.090	13.515.558.090	4,89%	3.372.151.744	25,63%	17.320.187.683	75,01%	50.690.100.617	15	15 April 2025		
13	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.04	Rehab Total KBN 25 Cempaka Baru dan PKBM 20 Cempaka Baru	17.677.271.724	20,00%	3.535.454.347	3.535.454.347	5,20%	619.218.109	35,89%	4.571.342.470	74,89%	13.222.589.257	7	7 Maret 2025		
14	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN kebun baweng 01,03,07 dan USB SMP	83.153.412.672	27,38%	22.775.739.731	18.630.882.534	4,03%	3.351.982.531	31,34%	26.060.279.531	68,58%	57.026.810.410	31	31 Maret 2025		
15	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.02	Rehab Total Gedung SMP 117	31.566.072.800	40,00%	12.654.838.586	12.626.429.121	1,42%	448.238.234	41,43%	13.077.823.961	58,49%	18.462.995.981	31	31 Maret 2025		
16	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.04	Rehab Total Gedung PKBM N 39	13.632.852.229	17,24%	2.350.303.724	2.660.912.668	2,76%	376.266.722	19,11%	2.605.238.061	80,00%	10.906.281.783	31	31 Maret 2025		
17	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Cipayang 05	34.973.754.451	13,37%	4.675.960.970	6.223.476.871	4,02%	1.405.944.929	17,06%	5.966.522.509	82,61%	28.891.818.552	31	31 Maret 2025		
18	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Dukuh 05	27.589.109.251	31,73%	8.747.676.398	5.513.821.847	8,73%	2.729.965.333	35,89%	9.884.553.303	60,00%	16.541.465.539	31	31 Maret 2025		
19	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Balekambang 03	36.644.136.721	35,90%	7.328.827.345	7.328.827.345	3,49%	1.433.816.864	39,28%	14.380.816.864	60,02%	22.213.675.680	31	31 Maret 2025		
20	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Rembulan 05	26.839.021.729	13,20%	3.575.021.639	5.094.485.514	2,38%	1.272.877.679	42,28%	4.305.066.879	82,78%	18.848.816.877	31	31 Maret 2025		
21	1.01.0.0.0.0.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.01.1.09	Pengawasan Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2024 Paket 2	3.509.320.500	73,37%	2.574.788.451	2.574.792.075	5,33%	187.046.763	78,70%	2.761.835.234	26,63%	634.532.040	31	31 Maret 2025		
22	1.02.0.0.0.0.01.0003	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1.01.02.2.02	Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Puskesmas Duri Kapa	5.328.462.995	47,13%	2.509.780.477	2.509.780.477	15,62%	848.110.333	63,02%	1.970.572.185	9	9 Februari 2025	19	19 Februari 2025		
23	1.02.0.0.0.0.01.0003	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1.01.02.2.02	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Puskesmas Duri Kapa	593.505.900	50,00%	296.752.950	296.752.950	13,02%	72.262.588	63,02%	374.015.548	36,98%	219.490.352	9	9 Februari 2025		
24	1.02.0.0.0.0.01.0003	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1.01.02.2.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Tahap Lelang Dan Pengawasan Berkala Puskesmas Duri Kapa	374.496.000	80,00%	299.596.000	299.596.000	5,00%	18.724.750	85,00%	318.320.750	15,00%	58.174.750	9	9 Februari 2025		
25	1.02.0.0.0.0.01.0005	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1.02.02.2.01	Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Total Gedung Puskesmas di Kelurahan Batu Ampar	11.115.068.645	60,00%	6.689.041.187	6.689.041.187	4,02%	446.547.883	64,02%	7.115.589.070	35,98%	3.999.479.575	19	19 Februari 2024		
26	1.02.0.0.0.0.01.0005	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1.02.02.2.01	Jasa konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Total Gedung Puskesmas di Kelurahan Batu Ampar	801.697.500	60,00%	481.018.500	481.018.500	4,02%	32.228.240	64,02%	513.226.697	40,00%	320.679.000	19	19 Februari 2024		
27	1.02.0.0.0.0.01.0005	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1.02.02.2.01	Pengawasan Berkala Pekerjaan Rehabilitasi total Gedung Puskesmas di Kelurahan Batu Ampar	63.936.000	60,00%	38.361.600	38.361.600	0	0	4,02%	2.570.227	64,02%	63.936.000	19	19 Februari 2024		
28	1.03.0.0.0.0.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	1.03.02.1.01.0089	Pembangunan Polder / Pompa KBN, Surter C, Greenlie (RW 13), dan KPN Bertand	101.000.000.340	77,50%	78.275.000.238	78.275.000.238	1,66%	1.674.580.005	78,16%	79.949.580.241	20,84%	21.050.420.361	19	19 Februari 2025		
29	1.03.0.0.0.0.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	1.03.02.1.01.0089	Pembangunan Pompa Tipala Serta Kelengkapan Pompa Marunda (JCC-Mertand) dan Pompa Adhyaksa	28.763.573.622	65,30%	18.761.064.575	18.761.064.575	1,45%	11.178.232.590	66,75%	9.552.341.118	33,25%	1.178.339.550	07/03/2025	19	19 Februari 2025	
30	1.03.0.0.0.0.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	1.03.02.1.01.0089	Pengadaan Pompa Pengendali Banjir Surter C	31.674.920.596	80,89%	25.650.350.698	0	0	0,00%	25.339.936	81,06%	5.999.229.653	18,94%	5.999.229.653	19	19 Februari 2025	
31	1.03.0.0.0.0.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	1.03.02.1.01.0089	Pengadaan Pompa Pengendali Banjir KBN	20.672.056.967	83,79%	17.321.138.532	0	0	1,03%	212.922.187	84,82%	17.534.038.719	15,18%	3.138.018.248	19	19 Februari 2025	
32	1.03.0.0.0.0.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	1.03.02.1.01.0089	Pembangunan Tump Saluran/Kali dan Prasarana/RLS Wastak Pondok Ranggon I & II	12.733.279.680	90,00%	11.480.131.694	11.480.131.694	7,72%	962.910.028	97,72%	12.443.041.722	2,28%	290.437.598	1	1 Mar 2025		
33	1.03.0.0.0.0.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	1.03.02.1.01.0089	Pembangunan Tump Saluran/Kali dan Prasarana/RLS Pondok Ranggon II	9.839.142.463	92,38%	8.898.371.084	8.898.371.084	2,38%	229.892.369	94,28%	9.119.263.474	5,72%	552.739.269	19	19 Februari 2025		
34	1.03.0.0.0.0.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	1.03.02.1.01.0089	Pembangunan Struktur Sarung Sampan Otomatis Rumah Pompa Artha Gading	1.314.863.456	50,00%	657.431.728	657.431.728	4,20%	55.224.365	54,20%	712.655.993	45,80%	602.207.463	19	19 Februari 2025		
35	1.03.0.0.0.0.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	1.03.02.1.01.0079	Pembangunan/Perkutan Tanggul Kali Angke Segmen Green Garden	4.188.444.435	70,00%	2.931.911.105	2.931.911.104	13,12%	458.368.257	83,12%	3.481.399.361	16,88%	707.135.074	31	31 Januari 2025		
36	1.03.0.0.0.0.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NICID Fase A (Single Year) 2024	91.553.588.491	96,22%	86.092.863.688	88.089.985.741	0	0	96,71%	88.544.223.004	3,29%	3.009.966.487	19	19 Februari 2025		
37	1.03.0.0.0.0.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman di Embung Pekoyan, Taman Sirsak, Taman Tongkang, Taman RW 08 Kramat dan Taman RW 19 Sukapura	28.055.931.752	69,00%	19.358.592.909	19.358.592.908	0	0	255.533.426	69,91%	19.614.126.335	30,09%	8.441.805.417	19	19 Februari 2025	
38	1.03.0.0.0.0.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	3.29.02.1.01.0003.001	Pembangunan Sistem Monitoring Penurunan Tanah dan Pengembangan Kawasan Peristir Pekt (Pek. Konsultansi Pengawas)	278.804.250	86,40%	240.877.932	0	0	5,91%	16.483.744	92,31%	257.366.765	7,69%	21.447.575	19	19 Februari 2025	
39	1.03.0.0.0.0.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	3.29.02.1.01.0003.001	Pembangunan Sistem Monitoring Penurunan Tanah dan Pengembangan Kawasan Peristir Pantai	2.951.513.872	86,40%	2.549.960.410	0	0	5,91%	174.502.353	92,31%	2.724.462.764	7,69%	227.651.108	19	19 Februari 2025	
40	1.03.0.0.0.0.03.0000	DINAS Cipta Karya, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	1.03.08.1.01	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Dokumen Lalu Lintas Komplek Resanca	1.179.587.000	80,00%	943.677.600	500	0	0,00%	1.002.657.450	85,00%	1.002.657.450	15,00%	1.002.657.450	07/03/2025	19	19 Februari 2025
41	1.03.0.0.0.0.03.0000	DINAS Cipta Karya, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	1.03.08.1.01	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Markas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	2.354.976.000	80,00%	1.883.980.800	1.766.232.000	10,00%	235.497.600	80,00%	2.119.478.400	10,00%	235.497.600	19	19 Februari 2025		
42	1.03.0.0.0.0.03.0000	DINAS Cipta Karya, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	1.03.08.1.01	Pembangunan Rumah Negara Golongan I Tipe A (Jalan Besakki) - Konstruksi	15.741.344.348	82,16%	12.953.088.516	12.463.026.848	3,96%	623.966.890	86,12%	13.557.075.406	13,88%	21.148.268.942	22/01/2025	19	19 Februari 2025	
43	1.03.0.0.0.0.03.0000	DINAS Cipta Karya, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	1.03.08.1.01	Pembangunan Rumah Negara Golongan I Tipe A (Jalan Besakki) - Pengawas	667.605.000	82,16%	548.553.364	483.793.500	3,96%	26.466.241	86,12%	575.019.805	13,88%	92.645.195	22/01/2025	19	19 Februari 2025	
44	1.03.0.0.0.0.03.0000	DINAS Cipta Karya, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	1.03.08.1.01	Pembangunan Sekretariat Resimen Mahadewa Jayakarta - Konstruksi	17.178.508.185	33,42%	5.153.552.448	5.153.552.448	7,47%	1.282.951.427	40,89%	5.743.218.964	59,11%	10.154.989.268	19/02/2025	19	19 Februari 2025	
45	1.03.0.0.0.0.03.0000	DINAS Cipta Karya, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	1.03.08.1.01	Pembangunan Sekretariat Resimen Mahadewa Jayakarta - Pengawas	1.011.748.350	33,42%	338.126.299	303.524.505	7,47%	75.532.073	40,89%	413.658.372	59,11%	586.089.978	19/02/2025	19	19 Februari 2025	
46	1.03.0.0.0.0.03.0000	DINAS Cipta Karya, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	1.03.08.1.01															

NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	NAMA/ LOKASI PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	BOBOT PEKERJAAN DI 20 DES 2024 (%)		NILAI PADA SAAT SP2D CAIR S.D TERAKHIR DIBAYARKAN DI 20 DES 2024 (RP)	PENAMBAHAN BOBOT PEKERJAAN DARI TANGGAL SP2D TERAKHIR DIBAYARKAN S.D 31 DESEMBER 2024		BOBOT PEKERJAAN S.D 31 DES 2024		RENCANA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN DI TAHUN 2025 (%)		TANGGAL PENYELESAIAN PEKERJAAN 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01.1.09	Rehabilitasi Gedung Dinas Lingkungan Hidup	10.923.352.300	36,37%	3.972.823.232	6.950.306.860	63,63%	6.950.529.068	97,00%	10.585.651.731	3,00%	527.700.569	7 Januari 2025
78	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11.1.01	Pengadain 400/ XDCR	20.914.830.000	30,00%	6.724.448.000	20.914.830.000	70,00%	14.640.361.000	95,00%	19.869.086.500	10,00%	2.091.483.500	8 Januari 2025
79	2.15.0.00.0.00.01.0008	UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS	2.15.02.1.05	Pengembangan ITS Traffic Light (Intelligent Traffic Control System) Tahun 2024 (Jakarta)	62.233.243.000	75,57%	62.143.661.735	61.674.932.250	0,00%	0	75,57%	62.143.661.735	24,43%	20.089.581.265	8 Februari 2025
80	2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03.1.01	Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Cipayang (Pelaksanaan Konstruksi)	28.297.684.469	62,21%	17.655.121.416	28.297.684.467	1,41%	397.865.444	63,62%	18.002.986.859	36,38%	10.294.697.610	8 Februari 2025
81	2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03.1.01	Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Sawah Besar (Pelaksanaan Konstruksi)	25.435.726.246	85,00%	21.620.367.309	25.435.726.240	5,19%	1.320.114.192	90,19%	22.940.481.051	8,81%	2.495.244.515	8 Februari 2025
82	2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01.1.09	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta (Pelaksanaan Konstruksi)	94.914.545.364	50,25%	47.696.457.336	104.311.063.194	2,18%	2.067.238.796	52,43%	49.763.096.134	47,57%	45.130.849.230	1 Februari 2025
83	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.07	Konstruksi Lanjutan Pembangunan Gedung UP3D Cempaka Putih-Termin V	5.653.289.000	75,00%	4.239.968.750	5.653.289.000	23,75%	1.342.856.138	98,75%	5.362.922.868	1,25%	70.966.112	06 Januari 2025
84	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.07	Pengawasan Berkelanjutan Pembangunan Gedung UP3D Cempaka Putih	84.748.500	75,00%	63.561.375	84.748.500	23,75%	20.127.769	98,75%	83.689.144	1,25%	1.059.356	06 Januari 2025
85	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.07	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung UP3D Cempaka Putih-Termin IV	272.838.000	75,00%	204.628.500	272.838.000	23,75%	64.769.025	98,75%	269.427.525	1,25%	3.410.475	06 Januari 2025
86	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.09	Pengawasan Perbaikan Gedung Dinas Tekniks Abdul Muis-Termin V	226.412.000	75,00%	169.809.000	226.412.000	14,00%	31.697.680	89,00%	201.506.680	11,00%	24.905.320	06 Januari 2025
87	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.09	Konstruksi Perbaikan Gedung Dinas Tekniks Abdul Muis-Termin V	5.499.264.000	75,00%	4.124.448.000	5.222.122.000	14,00%	731.097.080	89,00%	4.855.545.080	11,00%	643.718.920	06 Januari 2025
88	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.09	Perencanaan Perbaikan Gedung Dinas Tekniks Abdul Muis	97.541.250	75,00%	73.155.938	97.541.250	14,00%	13.655.775	89,00%	88.811.713	11,00%	10.729.537	06 Januari 2025
89	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.09	Konstruksi Perbaikan Gedung UP3D Bapenda- Termin III	3.671.012.000	60,00%	2.202.697.200	3.547.818.000	30,14%	1.069.312.345	90,14%	3.271.919.545	9,86%	399.967.455	06 Januari 2025
90	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.09	Pengawasan Perbaikan Gedung UP3D Bapenda-Termin V	218.833.000	75,00%	164.124.750	218.833.000	15,14%	33.131.318	90,14%	197.256.066	9,86%	21.576.934	06 Januari 2025
91	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.09	Perencanaan Perbaikan Gedung UP3D Bapenda	97.541.250	60,00%	58.524.750	97.541.250	30,14%	29.368.833	90,14%	67.923.683	9,86%	9.617.567	06 Januari 2025
92	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.09	Perencanaan Perbaikan Gedung Samsat	97.263.000	80,00%	77.810.400	97.263.000	13,29%	12.926.253	93,29%	90.736.653	6,71%	6.526.347	19 Februari 2025
93	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.09	Pengawasan Perbaikan Gedung Samsat-Termin V	363.829.000	75,00%	272.871.750	363.829.000	18,29%	66.544.324	93,29%	339.418.074	6,71%	24.412.926	19 Februari 2025
94	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.07	Perencanaan Pembangunan Gedung UP3D Kembangan	97.297.000	90,00%	87.567.300	97.297.000	6,21%	6.042.144	96,21%	93.609.444	3,79%	3.867.536	19 Februari 2025
95	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.07	Pembangunan Gedung UP3D Kembangan-Termin VII	25.420.690.000	90,00%	22.878.621.000	25.420.690.000	6,21%	1.578.624.849	96,21%	24.457.245.849	3,79%	963.444.151	19 Februari 2025
96	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.07	Pengawasan Pembangunan Gedung UP3D Kembangan-Termin VII	692.196.000	90,00%	622.976.400	692.196.000	6,21%	42.965.372	96,21%	665.961.772	3,79%	26.234.238	19 Februari 2025
97	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.07	Pembangunan Gedung UP3D Jagakarsa-Termin VII	25.113.786.000	90,00%	22.602.407.400	25.113.786.000	4,71%	1.182.859.321	94,71%	23.785.266.721	5,29%	1.328.519.279	19 Februari 2025
98	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.07	Pengawasan Berkelanjutan Pembangunan Gedung UP3D Jagakarsa	97.493.000	90,00%	87.743.700	97.493.000	4,71%	4.591.620	94,71%	92.335.620	5,29%	5.157.380	19 Februari 2025
99	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.07	Pengawasan Pembangunan Gedung UP3D Jagakarsa-Termin VI	652.957.500	90,00%	587.661.750	652.957.500	4,71%	30.754.298	94,71%	618.416.048	5,29%	34.541.452	19 Februari 2025
100	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.09	Konstruksi Perbaikan Gedung Samsat	11.037.067.000	80,00%	8.829.653.600	8.829.653.600	13,29%	1.466.406.796	93,29%	10.296.060.396	6,71%	741.006.604	19/02/2025
101	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.07	Konstruksi Pembangunan Gedung UP3D Taman Sari	25.419.876.000	55,00%	13.980.931.800	13.980.931.800	0,88%	223.694.909	55,88%	14.204.626.709	44,12%	11.215.249.291	19/02/2025
102	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.07	Pengawasan Pembangunan Gedung UP3D Taman Sari	655.599.300	45,00%	295.019.685	655.599.300	10,88%	71.329.204	55,88%	396.546.889	44,12%	289.250.411	19/02/2025
103	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.07	Pengawasan Berkelanjutan Pembangunan Gedung UP3D Taman Sari	87.900.000	0,00%	0	87.900.000	0	55,88%	54.706.520	44,12%	43.193.480	19/02/2025	
104	1.02.0.00.0.00.01.0088	PUSAT KRISIS DAN KEGAWATDARURATAN KESEHATAN DAERAH	1.01.02.2.01	Pengadaan Kapal Pelayanan Kesehatan	31.947.998.910	92,33%	29.497.587.394	29.497.587.394	3,01%	961.634.767	95,00%	30.350.596.965	4,00%	1.488.776.749	31 Januari 2025
105	2.11.0.00.0.00.01.0008	UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	2.11.11.1.01	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi Manajemen Konstruksi Pembangunan RDF Plant Rorotan	16.766.094.900	90,00%	15.089.485.410	15.089.485.410	4,32%	724.295.300	94,32%	15.813.780.710	5,68%	952.314.190	19 Februari 2025
106	2.11.0.00.0.00.01.0008	UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	2.11.11.1.01	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang & Bangun Pembangunan RDF Plant Jakarta Rorotan	1.284.534.975.461	90,09%	1.157.255.577.393	156.099.477.915	4,23%	84.336.675.462	94,32%	1.211.592.232.855	5,68%	72.962.722.606	15 Februari 2025
Jumlah					3.362.227.096.839		2.497.961.913.263	1.524.994.477.666		169.146.615.686		2.661.461.446.569		791.999.473.899	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS (DEFISIT)
PER 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Pendapatan		Jumlah Pendapatan Sebelum Eliminasi	Beban	Surplus/Defisit Sebelum Eliminasi	Surplus/Defisit Setelah Eliminasi
		Pendapatan Dana BLUD	Pendapatan Alokasi APBD				
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 5 - 6	8 = 3 - 6
1	DINAS KESEHATAN						
	Laboratorium Kesehatan Daerah	34.364.030.694	32.773.547.586	67.137.578.280	102.346.641.315	(35.209.063.035)	(67.982.610.621)
	PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH	1.281.816.567	4.812.847.382	6.094.663.949	7.654.773.112	(1.560.109.163)	(6.372.956.545)
	Pusat Layanan Kesehatan Pegawai	3.042.424.144	19.971.829.685	23.014.253.829	17.842.746.761	5.171.507.068	(14.800.322.617)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU	1.440.944.448	22.308.281.315	23.749.225.763	27.483.031.929	(3.733.806.166)	(26.042.087.481)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU	239.249.683.263	80.081.865.795	319.331.549.058	392.518.623.994	(73.187.074.936)	(153.268.940.731)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMAYORAN	28.457.122.329	13.361.373.288	41.818.495.617	43.417.968.680	(1.599.473.063)	(14.960.846.351)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAH BESAR	26.779.551.074	18.105.791.477	44.885.342.551	50.782.599.787	(5.897.257.236)	(24.003.048.713)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CEMPAKA PUTIH	13.140.257.193	10.569.482.222	23.709.739.415	39.005.387.540	(15.295.648.125)	(25.865.130.347)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU	14.121.404.308	25.253.255.155	39.374.659.463	34.802.320.011	4.572.339.452	(20.680.915.703)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA	63.179.417.294	17.541.407.768	80.720.825.062	94.938.936.690	(14.218.111.628)	(31.759.519.396)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING	58.418.979.488	18.473.249.301	76.892.228.789	87.249.859.564	(10.357.630.775)	(28.830.880.076)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADEMANGAN	18.595.548.702	18.671.680.652	37.267.229.354	42.237.334.847	(4.970.105.493)	(23.641.786.145)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN	42.003.330.801	33.974.459.781	75.977.790.582	74.771.048.202	1.206.742.380	(32.767.717.401)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KALIDERES	52.984.854.089	74.806.770.644	127.791.624.733	108.750.397.959	19.041.226.774	(55.765.543.870)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAGAKARSA	24.900.798.603	16.980.386.432	41.881.185.035	45.927.436.796	(4.046.251.761)	(21.026.638.193)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET	41.739.011.942	18.656.834.704	60.395.846.646	64.286.849.536	(3.891.002.890)	(22.547.837.594)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN	23.426.790.200	26.175.229.551	49.602.019.751	50.608.088.798	(1.006.069.047)	(27.181.298.598)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN	40.002.204.822	17.536.018.961	57.538.223.783	59.050.054.890	(1.511.831.107)	(19.047.850.068)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI	38.211.769.327	13.574.618.406	51.786.387.733	69.255.478.741	(17.469.091.008)	(31.043.709.414)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIRACAS	21.569.860.445	16.608.039.766	38.177.900.211	43.250.457.126	(5.072.556.915)	(21.680.596.681)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MATRAMAN	27.207.618.050	15.789.187.086	42.996.805.136	46.085.286.188	(3.088.481.052)	(18.877.668.138)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN SARI	28.366.170.073	20.004.764.178	48.370.934.251	53.755.031.279	(5.384.097.028)	(25.388.861.206)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK	18.047.925.550	18.355.160.177	36.403.085.727	42.252.842.488	(5.849.756.761)	(24.204.916.938)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG	27.022.491.953	990.014.290	28.012.506.243	47.065.827.104	(19.053.320.861)	(20.043.335.151)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU	19.414.977.029	24.900.742.393	44.315.719.422	52.172.276.353	(7.856.556.931)	(32.757.299.324)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG	22.725.604.895	19.862.437.744	42.588.042.639	50.942.389.300	(8.354.346.661)	(28.216.784.405)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG	19.157.974.526	19.921.655.119	39.079.629.645	43.412.322.882	(4.332.693.237)	(24.254.348.356)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN LAMA	17.286.208.903	21.282.711.336	38.568.920.239	44.233.737.839	(5.664.817.600)	(26.947.528.936)
	PUSAT KRISIS DAN KEGAWATDARURATAN KESEHATAN DAERAH	29.159.734.292	178.444.899.686	207.604.633.978	168.825.234.981	38.779.398.997	(139.665.500.689)

No.	Nama OPD	Pendapatan		Jumlah Pendapatan Sebelum Eliminasi	Beban	Surplus/Defisit Sebelum Eliminasi	Surplus/Defisit Setelah Eliminasi
		Pendapatan Dana BLUD	Pendapatan Alokasi APBD				
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 5 - 6	8 = 3 - 6
	PUSKESMAS TANAH ABANG	14.381.785.109	20.482.175.547	34.863.960.656	39.111.952.472	(4.247.991.816)	(24.730.167.363)
	PUSKESMAS MENTENG	8.297.414.523	17.949.204.242	26.246.618.765	28.833.869.946	(2.587.251.181)	(20.536.455.423)
	PUSKESMAS SENEN	9.728.242.848	18.001.912.437	27.730.155.285	30.284.893.051	(2.554.737.766)	(20.556.650.203)
	PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH	9.493.769.253	20.494.636.363	29.988.405.616	32.705.923.790	(2.717.518.174)	(23.212.154.537)
	PUSKESMAS JOHAR BARU	12.071.836.186	18.855.809.442	30.927.645.628	34.286.415.391	(3.358.769.763)	(22.214.579.205)
	PUSKESMAS KEMAYORAN	18.454.973.326	13.654.444.807	32.109.418.133	37.885.357.338	(5.775.939.205)	(19.430.384.012)
	PUSKESMAS SAWAH BESAR	11.228.769.530	20.874.302.044	32.103.071.574	36.990.908.802	(4.887.837.228)	(25.762.139.272)
	PUSKESMAS GAMBIR	7.981.013.491	22.561.743.467	30.542.756.958	33.581.539.349	(3.038.782.391)	(25.600.525.858)
	PUSKESMAS PENJARINGAN	19.263.487.471	16.883.772.105	36.147.259.576	44.172.878.670	(8.025.619.094)	(24.909.391.199)
	PUSKESMAS PADEMANGAN	13.239.448.316	10.848.674.642	24.088.122.958	27.846.990.634	(3.758.867.676)	(14.607.542.318)
	PUSKESMAS TANJUNG PRIOK	23.122.853.977	23.241.674.257	46.364.528.234	52.870.714.838	(6.506.186.604)	(29.747.860.861)
	PUSKESMAS KOJA	21.104.511.255	23.081.270.462	44.185.781.717	52.635.401.746	(8.449.620.029)	(31.530.890.491)
	PUSKESMAS KELAPA GADING	11.575.383.169	12.766.954.830	24.342.337.999	27.803.409.535	(3.461.071.536)	(16.228.026.366)
	PUSKESMAS CILINCING	26.468.052.317	26.416.296.989	52.884.349.306	62.445.260.498	(9.560.911.192)	(35.977.208.181)
	PUSKESMAS KEBON JERUK	22.898.039.949	23.226.229.476	46.124.269.425	55.119.776.452	(8.995.507.027)	(32.221.736.503)
	PUSKESMAS KEMBANGAN	21.791.787.093	19.878.963.362	41.670.750.455	47.839.461.323	(6.168.710.868)	(26.047.674.230)
	PUSKESMAS CENGKARENG	32.353.845.740	17.104.711.468	49.458.557.208	61.111.252.523	(11.652.695.315)	(28.757.406.783)
	PUSKESMAS KALIDERES	25.320.384.182	24.988.537.688	50.308.921.870	61.644.532.649	(11.335.610.779)	(36.324.148.467)
	PUSKESMAS GROGOL PETAMBURAN	16.086.212.741	24.487.510.062	40.573.722.803	47.606.281.400	(7.032.558.597)	(31.520.068.659)
	PUSKESMAS PAL MERAH	18.439.921.405	22.026.631.174	40.466.552.579	45.422.985.629	(4.956.433.050)	(26.983.064.224)
	PUSKESMAS TAMBORA	18.295.106.364	25.878.827.323	44.173.933.687	52.433.226.382	(8.259.292.695)	(34.138.120.018)
	PUSKESMAS TAMAN SARI	9.642.752.575	16.194.458.687	25.837.211.262	28.049.763.796	(2.212.552.534)	(18.407.011.221)
	PUSKESMAS KEBAYORAN LAMA	18.012.067.865	13.460.196.337	31.472.264.202	37.904.274.727	(6.432.010.525)	(19.892.206.862)
	PUSKESMAS PESANGGRAHAN	14.487.552.537	15.011.197.064	29.498.749.601	32.935.689.714	(3.436.940.113)	(18.448.137.177)
	PUSKESMAS PASAR MINGGU	19.271.852.163	16.969.002.876	36.240.855.039	41.720.873.534	(5.480.018.495)	(22.449.021.371)
	PUSKESMAS JAGAKARSA	19.622.200.578	15.684.373.290	35.306.573.868	41.715.535.029	(6.408.961.161)	(22.093.334.451)
	PUSKESMAS MAMPANG PRAPATAN	11.549.808.499	20.114.085.275	31.663.893.774	35.006.582.838	(3.342.689.064)	(23.456.774.339)
	PUSKESMAS PANCORAN	13.371.818.712	17.923.118.212	31.294.936.924	36.852.354.351	(5.557.417.427)	(23.480.535.639)
	PUSKESMAS KEBAYORAN BARU	13.042.616.357	21.420.302.818	34.462.919.175	38.813.626.442	(4.350.707.267)	(25.771.010.085)
	PUSKESMAS SETIABUDI	10.705.034.612	17.906.521.571	28.611.556.183	33.868.016.746	(5.256.460.563)	(23.162.982.134)
	PUSKESMAS TEBET	16.141.560.840	21.975.396.911	38.116.957.751	41.584.163.046	(3.467.205.295)	(25.442.602.206)
	PUSKESMAS CILANDAK	17.242.738.648	22.363.208.034	39.605.946.682	43.336.930.352	(3.730.983.670)	(26.094.191.704)
	PUSKESMAS PASAR REBO	14.693.803.731	22.784.651.643	37.478.455.374	43.617.756.752	(6.139.301.378)	(28.923.953.021)
	PUSKESMAS CIRACAS	17.741.054.401	18.887.508.061	36.628.562.462	44.087.119.220	(7.458.556.758)	(26.346.064.819)
	PUSKESMAS CIPAYUNG	16.378.943.190	25.883.755.984	42.262.699.174	50.205.332.995	(7.942.633.821)	(33.826.389.805)
	PUSKESMAS KRAMAT JATI	17.941.405.887	25.894.694.359	43.836.100.246	50.068.007.536	(6.231.907.290)	(32.126.601.649)
	PUSKESMAS MAKASAR	12.316.795.444	20.945.370.934	33.262.166.378	41.167.211.293	(7.905.044.915)	(28.850.415.849)

No.	Nama OPD	Pendapatan		Jumlah Pendapatan Sebelum Eliminasi	Beban	Surplus/Defisit Sebelum Eliminasi	Surplus/Defisit Setelah Eliminasi
		Pendapatan Dana BLUD	Pendapatan Alokasi APBD				
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 5 - 6	8 = 3 - 6
	PUSKESMAS JATINEGARA	18.174.428.731	23.555.828.218	41.730.256.949	50.941.318.930	(9.211.061.981)	(32.766.890.199)
	PUSKESMAS DUREN SAWIT	23.119.407.578	21.165.591.817	44.284.999.395	57.106.634.668	(12.821.635.273)	(33.987.227.090)
	PUSKESMAS MATRAMAN	11.552.216.173	25.428.851.734	36.981.067.907	43.683.990.233	(6.702.922.326)	(32.131.774.060)
	PUSKESMAS PULO GADUNG	16.481.493.251	18.942.287.651	35.423.780.902	43.151.493.840	(7.727.712.938)	(26.670.000.589)
	PUSKESMAS CAKUNG	27.578.106.763	26.917.409.453	54.495.516.216	66.146.120.727	(11.650.604.511)	(38.568.013.964)
	PUSKESMAS KEPULAUAN SERIBU UTARA	1.433.982.863	18.753.561.557	20.187.544.420	23.450.742.736	(3.263.198.316)	(22.016.759.873)
	PUSKESMAS KEPULAUAN SERIBU SELATAN	1.288.489.150	18.140.106.145	19.428.595.295	20.631.760.154	(1.203.164.859)	(19.343.271.004)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA	357.884.766.915	161.589.261.748	519.474.028.663	575.851.488.319	(56.377.459.656)	(217.966.721.404)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN	375.898.494.911	153.812.676.060	529.711.170.971	547.200.934.619	(17.489.763.648)	(171.302.439.708)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENGKARENG	256.338.899.253	60.845.497.340	317.184.396.593	463.360.313.890	(146.175.917.297)	(207.021.414.637)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO	218.243.959.242	119.062.852.572	337.306.811.814	344.656.268.424	(7.349.456.610)	(126.412.309.182)
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH	207.088.019.125	72.780.884.243	279.868.903.368	330.393.830.680	(50.524.927.312)	(123.305.811.555)
	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT	180.053.229.196	778.739.196	180.831.968.392	322.956.377.632	(142.124.409.240)	(142.903.148.436)
	Sub Total 1	3.294.192.842.439	2.278.684.213.857	5.572.877.056.296	6.448.022.530.333	(875.145.474.037)	(3.153.829.687.894)
2	DINAS PENDIDIKAN						
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	906.397.587	6.327.424.794	7.233.822.381	6.659.812.168	574.010.213	(5.753.414.581)
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	1.086.277.000	4.116.315.360	5.202.592.360	5.413.029.666	(210.437.306)	(4.326.752.666)
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	2.211.949.802	4.356.721.877	6.568.671.679	7.302.820.349	(734.148.670)	(5.090.870.547)
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	158.851.223	2.335.008.729	2.493.859.952	3.343.946.982	(850.087.030)	(3.185.095.759)
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	1.724.126.383	6.407.519.479	8.131.645.862	7.687.929.568	443.716.294	(5.963.803.185)
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	1.863.469.988	1.872.523.248	3.735.993.236	2.975.004.307	760.988.929	(1.111.534.319)
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	291.932.911	2.981.310.544	3.273.243.455	3.009.283.536	263.959.919	(2.717.350.625)
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	229.290.950	2.923.975.335	3.153.266.285	3.706.616.953	(553.350.668)	(3.477.326.003)
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	205.053.922	4.194.541.912	4.399.595.834	7.023.103.318	(2.623.507.484)	(6.818.049.396)
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	1.166.554.814	2.768.341.472	3.934.896.286	3.892.126.355	42.769.931	(2.725.571.541)
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	495.450.080	2.304.338.689	2.799.788.769	2.835.886.935	(36.098.166)	(2.340.436.855)
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	210.839.500	3.076.373.791	3.287.213.291	3.160.397.343	126.815.948	(2.949.557.843)
	Sub Total 2	10.550.194.160	43.664.395.230	54.214.589.390	57.009.957.480	(2.795.368.090)	(46.459.763.320)
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	UNIT PENGELOLA DANA PERUMAHAN	11.558.937.502	-	11.558.937.502	3.616.687.273	7.942.250.229	7.942.250.229
	Sub Total 3	11.558.937.502	-	11.558.937.502	3.616.687.273	7.942.250.229	7.942.250.229

No.	Nama OPD	Pendapatan		Jumlah Pendapatan Sebelum Eliminasi	Beban	Surplus/Defisit Sebelum Eliminasi	Surplus/Defisit Setelah Eliminasi
		Pendapatan Dana BLUD	Pendapatan Alokasi APBD				
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 5 - 6	8 = 3 - 6
4	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN						
	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	13.361.065.426	14.489.321.459	27.850.386.885	31.920.261.995	(4.069.875.110)	(18.559.196.569)
	Sub Total 4	13.361.065.426	14.489.321.459	27.850.386.885	31.920.261.995	(4.069.875.110)	(18.559.196.569)
5	DINAS PERHUBUNGAN						
	Unit Pengelola Perparkiran	57.020.955.941	-	57.020.955.941	66.659.762.772	(9.638.806.831)	(9.638.806.831)
	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	3.175.364.276	37.416.246.490	40.591.610.766	55.606.176.387	(15.014.565.621)	(52.430.812.111)
	Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik	-	737.629.476	737.629.476	894.776.392	(157.146.916)	(894.776.392)
	Sub Total 5	60.196.320.217	38.153.875.966	98.350.196.183	123.160.715.551	(24.810.519.368)	(62.964.395.334)
6	DINAS KEBUDAYAAN						
	Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	3.225.289.271	64.066.274.244	67.291.563.515	51.896.744.430	15.394.819.085	(48.671.455.159)
	Sub Total 6	3.225.289.271	64.066.274.244	67.291.563.515	51.896.744.430	15.394.819.085	(48.671.455.159)
7	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
	UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG	7.204.003.370	-	7.204.003.370	14.690.432.262	(7.486.428.892)	(7.486.428.892)
	Sub Total 7	7.204.003.370	-	7.204.003.370	14.690.432.262	(7.486.428.892)	(7.486.428.892)
8	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA						
	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	32.785.654.728	83.677.889.765	116.463.544.493	112.176.294.467	4.287.250.026	(79.390.639.739)
	Sub Total 8	32.785.654.728	83.677.889.765	116.463.544.493	112.176.294.467	4.287.250.026	(79.390.639.739)
9	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						
	UNIT PENGELOLA JAKARTA ASSET MANAGEMENT CENTER	455.464.774.166	2.655.216.633	458.119.990.799	34.386.944.864	423.733.045.935	421.077.829.302
	Sub Total 9	455.464.774.166	2.655.216.633	458.119.990.799	34.386.944.864	423.733.045.935	421.077.829.302
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1.947.762.267	8.143.611.140	10.091.373.407	8.882.390.538	1.208.982.869	(6.934.628.271)
	Sub Total 10	1.947.762.267	8.143.611.140	10.091.373.407	8.882.390.538	1.208.982.869	(6.934.628.271)
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
	Unit Pengelola Sampah Terpadu	25.917.640.621	1.751.535.933.728	1.777.453.574.349	432.276.778.687	1.345.176.795.662	(406.359.138.066)
	Sub Total 11	25.917.640.621	1.751.535.933.728	1.777.453.574.349	432.276.778.687	1.345.176.795.662	(406.359.138.066)
12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK						
	UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY	653.966.800	86.828.209.820	87.482.176.620	144.865.309.751	(57.383.133.131)	(144.211.342.951)
	Sub Total 12	653.966.800	86.828.209.820	87.482.176.620	144.865.309.751	(57.383.133.131)	(144.211.342.951)
	TOTAL SELURUH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	3.917.058.450.967	4.371.898.941.842	8.288.957.392.809	7.462.905.047.631	826.052.345.178	(3.545.846.596.664)

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2024**

(dalam Rupiah)

No	Nama OPD	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Properti Investasi	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Ekuitas
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	UNIT PENGELOLA DANA PERUMAHAN	26.092.395.418	4.049.611.156	9.658.000	-	30.151.664.574	-	-	-	30.151.664.574
	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA									
1	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	5.470.962.526	1.827.025.695.281	7.725.117.523	-	1.840.221.775.330	5.075.768.705	-	5.075.768.705	1.835.146.006.625
	DINAS PERHUBUNGAN									
1	Unit Pengelola Perparkiran	3.618.015.698	159.462.817.565	6.522.163.566	-	169.602.996.829	3.880.580.918	-	3.880.580.918	165.722.415.911
2	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	452.279.938	372.932.229.436	54.075.938	-	373.438.585.312	3.076.930.139	-	3.076.930.139	370.361.655.173
3	Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik	417.702.558	427.945.277	490.600	-	846.138.435	-	-	-	846.138.435
	DINAS KESEHATAN									
1	Laboratorium Kesehatan Daerah	60.516.647.658	64.895.793.565	338.823.442	-	125.751.264.665	3.980.924.437	-	3.980.924.437	121.770.340.228
2	PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH	130.111.761	9.733.197.997	200.546.000	-	10.063.855.758	17.999.691	-	17.999.691	10.045.856.067
3	Pusat Layanan Kesehatan Pegawai	2.589.738.545	6.740.436.378	503.800.000	-	9.833.974.923	110.537.220	-	110.537.220	9.723.437.703
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU	2.041.284.419	10.984.354.038	1.936.000	-	13.027.574.457	39.968.722	-	39.968.722	12.987.605.735
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU	71.325.405.390	338.087.507.984	398.224.281	-	409.811.137.655	19.586.403.964	-	19.586.403.964	390.224.733.691
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMAYORAN	11.653.550.837	7.890.139.169	83.462.859	-	19.627.152.865	2.425.367.064	-	2.425.367.064	17.201.785.801
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAH BESAR	14.444.864.034	27.950.890.855	91.280.345	-	42.487.035.234	616.299.510	-	616.299.510	41.870.735.724
8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CEMPAKA PUTIH	5.935.463.601	15.429.569.919	71.781.001	-	21.436.814.521	1.261.302.592	-	1.261.302.592	20.175.511.929
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU	6.636.962.509	27.161.326.529	279.199.875	-	34.077.488.913	553.319.048	-	553.319.048	33.524.169.865
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA	21.201.880.479	60.111.716.243	87.539.709	-	81.401.136.431	3.903.252.801	-	3.903.252.801	77.497.883.630
11	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING	17.782.276.699	47.199.143.293	34.073.400	-	65.015.493.392	7.302.620.742	-	7.302.620.742	57.712.872.650
12	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADEMANGAN	9.360.530.528	35.075.154.832	29.985.647	-	44.465.671.007	1.767.640.432	-	1.767.640.432	42.698.030.575
13	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN	17.182.875.976	47.569.528.824	29.059.771	-	64.781.464.571	2.161.137.313	-	2.161.137.313	62.620.327.258
14	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KALIDERES	21.814.877.271	91.288.106.692	863.464.150	-	113.966.448.113	4.197.289.134	-	4.197.289.134	109.769.158.979
15	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAGAKARSA	11.485.553.195	14.947.950.862	720.081.148	-	27.153.585.205	147.628.011	-	147.628.011	27.005.957.194
16	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET	12.680.409.590	28.941.118.131	265.473.203	-	41.887.000.924	5.210.796.449	-	5.210.796.449	36.676.204.475
17	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN	6.410.880.956	34.674.430.133	47.130.645	-	41.132.441.734	4.588.777.296	-	4.588.777.296	36.543.664.438
18	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN	12.492.973.505	17.251.299.204	13.629.410	-	29.757.902.119	1.601.743.340	-	1.601.743.340	28.156.158.779
19	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI	17.629.362.256	38.717.688.218	2.737.298.472	-	59.084.348.946	1.690.015.887	-	1.690.015.887	57.394.333.059
20	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIRACAS	8.411.245.379	16.014.680.636	213.292.186	-	24.639.218.201	1.551.069.416	-	1.551.069.416	23.088.148.785

No	Nama OPD	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Properti Investasi	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Ekuitas
21	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MATRAMAN	9.963.956.879	16.867.215.033	51.919.055	-	26.883.090.967	3.954.260.326	-	3.954.260.326	22.928.830.641
22	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN SARI	7.840.769.776	37.779.111.898	224.980.898	-	45.844.862.572	1.981.368.313	-	1.981.368.313	43.863.494.259
23	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK	8.422.115.921	24.544.752.308	26.313.403	-	32.993.181.632	175.159.761	-	175.159.761	32.818.021.871
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG	18.682.255.570	22.692.309.799	99.053.193	-	41.473.618.562	122.305.956	-	122.305.956	41.351.312.606
25	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU	7.470.223.072	39.679.322.091	31.353.903	-	47.180.899.066	69.306.683	-	69.306.683	47.111.592.383
26	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG	10.938.822.832	45.458.161.144	9.618.216	-	56.406.602.192	95.930.798	-	95.930.798	56.310.671.394
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG	10.928.901.218	43.317.733.177	-	-	54.246.634.395	1.060.301.392	-	1.060.301.392	53.186.333.003
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN LAMA	7.135.954.885	36.155.645.022	550.000	-	43.292.149.907	112.297.944	-	112.297.944	43.179.851.963
29	PUSAT KRISIS DAN KEGAWATDARURATAN KESEHATAN DAERAH	10.860.966.803	155.503.113.434	692.654.712	-	167.056.734.949	1.463.608.712	-	1.463.608.712	165.593.126.237
30	PUSKESMAS TANAH ABANG	8.341.706.180	22.606.640.091	123.291.800	-	31.071.638.071	61.121.059	-	61.121.059	31.010.517.012
31	PUSKESMAS MENTENG	4.330.324.971	41.737.688.802	891.370.521	-	46.959.384.294	48.799.575	-	48.799.575	46.910.584.719
32	PUSKESMAS SENEN	5.974.933.158	11.259.513.314	22.033.437	-	17.256.479.909	65.589.126	-	65.589.126	17.190.890.783
33	PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH	5.455.937.024	23.539.102.360	7.229.938	-	29.002.269.322	56.968.437	-	56.968.437	28.945.300.885
34	PUSKESMAS JOHAR BARU	7.377.103.341	27.095.326.450	742.769.047	-	35.215.198.838	46.882.398	-	46.882.398	35.168.316.440
35	PUSKESMAS KEMAYORAN	7.836.003.932	23.604.765.634	277.904.653	-	31.718.674.219	777.552.934	-	777.552.934	30.941.121.285
36	PUSKESMAS SAWAH BESAR	6.676.375.001	16.381.723.713	19.841.729	-	23.077.940.443	40.113.906	-	40.113.906	23.037.826.537
37	PUSKESMAS GAMBIR	4.299.305.858	20.756.160.901	50.960.767	-	25.106.427.526	470.000	-	470.000	25.105.957.526
38	PUSKESMAS PENJARINGAN	5.505.148.737	42.981.861.432	817.076.515	-	49.304.086.684	-	-	-	49.304.086.684
39	PUSKESMAS PADEMANGAN	3.675.681.793	8.907.824.022	121.724.424	-	12.705.230.239	33.962.598	-	33.962.598	12.671.267.641
40	PUSKESMAS TANJUNG PRIOK	5.075.147.106	30.070.620.252	899.541.657	-	36.045.309.015	57.881.479	-	57.881.479	35.987.427.536
41	PUSKESMAS KOJA	7.335.647.742	21.318.938.190	857.467.626	-	29.512.053.558	79.902.750	-	79.902.750	29.432.150.808
42	PUSKESMAS KELAPA GADING	5.116.918.703	12.629.193.226	5.317.069	-	17.751.428.998	31.193.121	-	31.193.121	17.720.235.877
43	PUSKESMAS CILINCING	12.231.089.608	26.414.948.015	1.797.758.406	-	40.443.796.029	61.601.473	-	61.601.473	40.382.194.556
44	PUSKESMAS KEBON JERUK	4.566.743.295	29.484.863.398	291.215.013	-	34.342.821.706	53.475.421	-	53.475.421	34.289.346.285
45	PUSKESMAS KEMBANGAN	9.768.680.201	39.555.344.673	145.810.294	-	49.469.835.168	48.534.789	-	48.534.789	49.421.300.379
46	PUSKESMAS CENGKARENG	6.620.695.273	27.624.334.381	436.616.457	-	34.681.646.111	49.187.945	-	49.187.945	34.632.458.166
47	PUSKESMAS KALIDERES	7.611.976.161	33.616.715.144	868.842.425	-	42.097.533.730	376.541.534	-	376.541.534	41.720.992.196
48	PUSKESMAS GROGOL PETAMBURAN	4.130.155.143	38.837.964.661	746.902.105	-	43.715.021.909	72.442.212	-	72.442.212	43.642.579.697
49	PUSKESMAS PAL MERAH	7.674.407.384	20.046.264.109	22.423.527	-	27.743.095.020	54.103.137	-	54.103.137	27.688.991.883
50	PUSKESMAS TAMBORA	3.848.564.217	18.575.043.190	82.222.566	-	22.505.829.973	62.837.079	-	62.837.079	22.442.992.894
51	PUSKESMAS TAMAN SARI	5.465.239.281	6.897.810.602	257.040.532	-	12.620.090.415	30.582.636	-	30.582.636	12.589.507.779
52	PUSKESMAS KEBAYORAN LAMA	3.362.082.673	12.183.839.379	187.372.400	-	15.733.294.452	44.127.622	-	44.127.622	15.689.166.830
53	PUSKESMAS PESANGGRAHAN	8.317.495.294	12.984.772.193	1.198.586.725	-	22.500.854.212	39.086.471	-	39.086.471	22.461.767.741

No	Nama OPD	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Properti Investasi	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Ekuitas
54	PUSKESMAS PASAR MINGGU	5.078.593.574	9.820.128.510	1.186.353.472	-	16.085.075.556	80.712.028	-	80.712.028	16.004.363.528
55	PUSKESMAS JAGAKARSA	6.442.802.476	27.868.974.156	62.401.508	-	34.374.178.140	48.952.485	-	48.952.485	34.325.225.655
56	PUSKESMAS MAMPANG PRAPATAN	5.568.645.377	14.522.768.290	566.156.320	-	20.657.569.987	169.096.418	-	169.096.418	20.488.473.569
57	PUSKESMAS PANCORAN	5.072.569.182	25.990.204.174	502.364.419	-	31.565.137.775	66.390.756	-	66.390.756	31.498.747.019
58	PUSKESMAS KEBAYORAN BARU	5.254.862.948	28.272.516.680	1.036.405.243	-	34.563.784.871	50.225.471	-	50.225.471	34.513.559.400
59	PUSKESMAS SETIABUDI	4.761.063.025	26.188.445.869	151.725.640	-	31.101.234.534	79.660.568	-	79.660.568	31.021.573.966
60	PUSKESMAS TEBET	4.166.045.871	43.239.527.758	106.669.760	-	47.512.243.389	406.430.227	-	406.430.227	47.105.813.162
61	PUSKESMAS CILANDAK	5.229.837.176	17.344.954.387	524.984.152	-	23.099.775.715	64.439	-	64.439	23.099.711.276
62	PUSKESMAS PASAR REBO	7.165.568.487	7.042.219.107	213.337.310	-	14.421.124.904	55.728.915	-	55.728.915	14.365.395.989
63	PUSKESMAS CIRACAS	5.630.131.866	24.467.530.803	331.725.532	-	30.429.388.201	47.779.084	-	47.779.084	30.381.609.117
64	PUSKESMAS CIPAYUNG	6.065.629.168	42.870.601.113	109.476.180	-	49.045.706.461	74.618.879	-	74.618.879	48.971.087.582
65	PUSKESMAS KRAMAT JATI	8.608.829.476	32.985.404.137	416.044.609	-	42.010.278.222	72.898.108	-	72.898.108	41.937.380.114
66	PUSKESMAS MAKASAR	4.395.431.479	23.092.524.472	673.732.470	-	28.161.688.421	57.199.966	-	57.199.966	28.104.488.455
67	PUSKESMAS JATINEGARA	7.641.555.278	38.596.358.366	502.833.948	-	46.740.747.592	847.342.239	-	847.342.239	45.893.405.353
68	PUSKESMAS DUREN SAWIT	9.309.600.829	41.496.071.042	61.539.994	-	50.867.211.865	67.655.215	-	67.655.215	50.799.556.650
69	PUSKESMAS MATRAMAN	5.754.951.753	22.557.529.074	441.931.795	-	28.754.412.622	63.627.731	-	63.627.731	28.690.784.891
70	PUSKESMAS PULO GADUNG	5.606.161.913	17.927.316.033	415.454.023	-	23.948.931.969	3.401.007	-	3.401.007	23.945.530.962
71	PUSKESMAS CAKUNG	12.298.396.640	53.880.021.891	92.102.486	-	66.270.521.017	1.230.458.802	-	1.230.458.802	65.040.062.215
72	PUSKESMAS KEPULAUAN SERIBU UTARA	816.980.715	21.180.096.369	870.591.836	-	22.867.668.920	610.000	-	610.000	22.867.058.920
73	PUSKESMAS KEPULAUAN SERIBU SELATAN	1.229.874.669	23.115.922.641	744.981.429	-	25.090.778.739	18.794.512	-	18.794.512	25.071.984.227
74	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA	66.775.507.910	456.086.762.350	19.280.082	-	522.881.550.342	59.690.704.933	-	59.690.704.933	463.190.845.409
75	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN	135.253.472.076	519.654.730.437	2.317.565.264	-	657.225.767.777	74.257.636.003	-	74.257.636.003	582.968.131.774
76	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENGKARENG	97.111.756.202	335.070.576.474	171.234.070	-	432.353.566.746	13.638.203.813	-	13.638.203.813	418.715.362.933
77	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO	67.798.595.079	376.812.438.412	15.317.492.876	-	459.928.526.367	10.593.716.696	-	10.593.716.696	449.334.809.671
78	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH	57.509.256.087	146.835.404.927	1.847.357.984	-	206.192.018.998	28.965.717.545	-	28.965.717.545	177.226.301.453
79	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT	61.893.467.952	297.077.852.723	122.964.092	-	359.094.284.767	11.349.004.747	-	11.349.004.747	347.745.280.020
	DINAS PENDIDIKAN									
1	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	729.784.351	200.690.494.355	2.275.196	-	201.422.553.902	40.351.750	-	40.351.750	201.382.202.152
2	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	233.286.694	6.797.232.677	1.698.223.400	-	8.728.742.771	24.917.110	-	24.917.110	8.703.825.661
3	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	881.319.303	145.293.906.552	30.977.415	-	146.206.203.270	391.975.011	-	391.975.011	145.814.228.259
4	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	125.234.675	1.448.809.585	13.000.001	-	1.587.044.261	9.041.823	-	9.041.823	1.578.002.438
5	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	455.511.072	59.013.272.932	580.285.721	-	60.049.069.725	43.100.140	-	43.100.140	60.005.969.585
6	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	295.628.700	13.508.927.591	2.707.424	-	13.807.263.715	11.451.852	-	11.451.852	13.795.811.863

No	Nama OPD	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Properti Investasi	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Ekuitas
7	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	126.183.365	16.490.073.644	480.316.382	-	17.096.573.391	17.799.805	-	17.799.805	17.078.773.586
8	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	77.667.762	5.905.493.598	594.617.934	-	6.577.779.294	22.883.600	-	22.883.600	6.554.895.694
9	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	26.518.802	23.764.061.594	143.878.930	-	23.934.459.326	19.580.986	-	19.580.986	23.914.878.340
10	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	89.387.295	7.571.772.828	59.906.675	-	7.721.066.798	19.333.144	-	19.333.144	7.701.733.654
11	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	99.171.452	746.043.557	-	-	845.215.009	-	-	-	845.215.009
12	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	749.241.813	8.676.126.467	78.056.904	-	9.503.425.184	17.416.305	-	17.416.305	9.486.008.879
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
1	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2.331.207.428	378.623.400	-	-	2.709.830.828	-	-	-	2.709.830.828
	DINAS KEBUDAYAAN									
1	Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	1.659.610.106	324.345.928.676	53.062.334	-	326.058.601.116	111.222	-	111.222	326.058.489.894
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG	5.184.855.377	547.129.724.272	119.898.487.335	-	672.213.066.984	2.037.801.085	-	2.037.801.085	670.175.265.899
	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN									
	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	7.304.686.021	37.520.464.669	3.206.150.287	-	48.031.300.977	246.413.593	-	246.413.593	47.784.887.384
	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH									
1	UNIT PENGELOLA JAKARTA ASSET MANAGEMENT CENTER	584.996.961.134	250.970.407.889	42.935.231.000	4.464.014.013.669	5.342.916.613.692	115.314.996.131	-	115.314.996.131	5.227.601.617.561
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
1	Unit Pengelola Sampah Terpadu	104.024.044.345	2.634.628.922.184	8.295.243.339	-	2.746.948.209.868	187.327.914	-	187.327.914	2.746.760.881.954
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK									
1	UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY	20.337.131.954	73.215.412.059	15.840.345.417	-	109.392.889.430	-	-	-	109.392.889.430
	Total	1.942.786.598.615	11.327.763.532.979	256.048.822.372	4.464.014.013.669	17.990.612.967.635	406.316.002.476	-	406.316.002.476	17.584.296.965.159